GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012–2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 6 indikator target sasaran dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017 yang capaiannya telah melampaui target sasaran tahun berikutnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012 – 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6), diantara Pasal 4 dengan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Dalam hal terjadi perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menngah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Salinan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8/2014)

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARGET PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH, KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Unang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARGET PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH, KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2017

Pasal 1

Mengubah Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sasaran tahunan RPJMD pada :

1. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
2. Angka Harapan Hidup.
3. Jumlah Wisatawan Nusantara.
4. Jumlah Wisatawan Mancanegara.
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
6. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

b. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dengan target memberikan implikasi positif terhadap tolok ukur kinerja dan keluaran dari kegiatan tahunan yang dilaksanakan.

c. Sasaran tahunan dan Indikator kinerja Utama (IKU) Gubernur pada :
1. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.
2. Angka Harapan Hidup.
3. Jumlah Wisatawan Nusantara.
4. Jumlah Wisatawan Mancanegara.
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
6. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

Pasal 2

Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diikuti dengan perubahan Kerangka Pendanaan, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 sebagiamana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan Target Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, IKU Gubernur menjadi dasar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan atas Rencana Strategis SKPD Tahun 2012-2017.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 yang meliputi Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Kerangka Pendanaan, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agas setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 DESEMBER 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 105

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR x

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 6
1.3 Hubungan Antar Dokumen 8
1.4 Sistematika Penulisan 10
1.5 Maksud dan Tujuan 11
1.5.1 Maksud 11
1.5.2 Tujuan 11

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 13

2.1 Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta 13
2.2 Aspek Geografi dan Demografi 24
2.2.1 Karakteristik lokasi dan wilayah 24
2.2.2 Penggunaan Lahan 30
2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah 33
2.2.4 Wilayah Rawan Bencana 35
2.2.5 Demografi 37
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 42
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 42
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 55
2.3.3 Fokus Budaya, Pemuda dan Olahraga 71
2.4 Aspek Pelayanan Umum 81
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 81
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 150
2.4.3 Pencapaian Pelaksanaan SPM 160
2.5 Aspek Daya Saing Daerah 169
2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 169
2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 171
2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi 180
2.5.4 Fokus sumber Daya Manusia 182

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 184

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 184
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 184
3.1.2 Neraca Daerah 188
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 203
3.3 Kerangka Pendanaan 216
3.3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 217
3.3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah 221
3.3.3 Kebijakan Umum Anggaran 222
3.3.4 Rencana Pengembangan BUMD 234

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 238

4.1 Permasalahan Pembangunan 238
4.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 238

4.1.2 Kependudukan dan Demografi 238
4.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 239
4.1.4 Sosial dan Budaya 241
4.1.5 Pemerintahan dan Politik 243
4.1.6 Prasarana Wilayah 243
4.2 Isu Strategis 245

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 249

5.1 Kebudayaan dan Filosofi Pembangunan 249
5.2 Visi dan Misi 254
5.2.1 Visi 254
5.2.2 Misi 266
5.2.3 Hubungan Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah dengan Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah 267
5.3 Tujuan dan Sasaran 269
5.4 Keselarasan RPJMD 2012-2017 dengan RPJMN 2010-2014 277

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 285

6.1 Analisis Eksternal 286
6.2 Analisis Internal 288
6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan 313
6.3.1 Kota Yogyakarta 318
6.3.2 Kabupaten Sleman 326
6.3.3 Kabupaten Bantul 333
6.3.4 Kabupaten Kulon Progo 340
6.3.5 Kabupaten Gunungkidul 349

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 358

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 419

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 500

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 517

10.1 Pedoman Transisi 517
10.2 Kaidah Pelaksanaan 519

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2011 24

Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis DIY 25

Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY 25

Tabel 2.4 Potensi Ketersediaan Air Tahun sampai Tahun 2011(dalam juta m^3) 28

Tabel 2.5 Debit Rerata Sungai di DIY 29

Tabel 2.6 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010 38

Tabel 2.7 Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011 38

Tabel 2.8 Proyeksi Penduduk SP 2000 menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin di DIY, Tahun 2012-2017 41

Tabel 2.9 IPM DIY menurut Komponen, 2009-2011 42

Tabel 2.10 IPM antar Kabupaten/Kota di DIY, 2008-2011 42

Tabel 2.11 Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usah (Juta Rupiah), 2007-2011 44

Tabel 2.12 Distribusi Persentase PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha,2007-2011 45

Tabel 2.13 PDRB DIY ADHB menurut Penggunaan, 2008-2011 45

Tabel 2.14 Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran 2007-2012 47

Tabel 2.15 Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2007-2011 49

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan, 2009-2012 50

Tabel 2.17 Jumlah Kejahatan yang Terselesaikan Tahun 2009-2011 53

Tabel 2.18 Angka Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/ Kota di DIY 2008-2011 55

Tabel 2.19 APM SD/MI/Paket A di DIY, 2008/2009 - 2012/2013 57

Tabel 2.20 APM SD Tahun 2009/2010 – 2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin 57

Tabel 2.21 APK SD/MI/Paket A di DIY, 2008/2009 – 2012/2013 58

Tabel 2.22 APK SD Tahun 2009/2010 – 2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin 58

Tabel 2.23 APM SMP/MTs/Paket B di DIY 2008/2009-2012/2013 59

Tabel 2.24 APM SMP Tahun 2009/2010 –2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin 59

Tabel 2.25 APK SMP/MTs/Paket B di DIY 2008/2009 – 2012/2013 60
Tabel 2.26 APK SMP Tahun 2009/2010 –2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin 60
Tabel 2.27 APM SMA/MA/SMK/Paket C di DIY, 2008/2009 s/d 2012/2013 61
Tabel 2.28 APM SMA Tahun 2009/2010 –2012/2013Berdasarkan Jenis Kelamin 61
Tabel 2.29 APK SMA/MA/SMK/Paket C di DIY, 2008/2009 s/d 2012/2013 62
Tabel 2.30 APK SMA Tahun 2009/2010 –2012/2013 Berdasarkan Jenis 62
Tabel 2.31 Angka Kelulusan menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2007-2012 63
Tabel 2.32 Jumlah Kematian Bayi di bawah Usia 1 Tahun dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY 2010-2011 65
Tabel 2.33 Capaian Rencana Aksi Daerah MDG's Tahun 2012 67
Tabel 2.34 Penduduk Berdasarkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di DIY Tahun 2011 69
Tabel 2.35 Data Kepesertaan CoB, Tahun 2012-2013 70
Tabel 2.36 Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, 2008-2012 75
Tabel 2.37 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2008-2012 76
Tabel 2.38 Penanganan Cagar Budaya 76
Tabel 2.39 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2008-2012 77
Tabel 2.40 Perkembangan Seni dan Budaya menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012 77
Tabel 2.41 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2008-2012 78
Tabel 2.42 Perkembangan Sistem Budaya di DIY, 2008-2012 79
Tabel 2.43 Pemuda dan Olah Raga di DIY, 2007-2012 80
Tabel 2.44 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di DIY, 2008-2012 81
Tabel 2.45 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Pendudukan Usia Sekolah, 2007-2011 82
Tabel 2.46 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011/2012 82
Tabel 2.47 Rasio Guru terhadap Siswa 83
Tabel 2.48 Rasio Siswa terhadap Kelas 83
Tabel 2.49 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Balita menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011 84
Tabel 2.50 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 Penduduk di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2009-2011 85
Tabel 2.51 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011 86
Tabel 2.52 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 di DIY, 2009-2011 87

Tabel 2.53 Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di DIY, 2009-2011 87
Tabel 2.54 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2011 88
Tabel 2.55 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompentensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2011 90
Tabel 2.56 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2011 92
Tabel 2.57 Jumlah Kasus, Jumlah Kematian, dan *Case Fatality Rate* (CFR) DBD di Daerah DIY, 2009-2011 94
Tabel 2.58 Cakupan Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Strata 1 Pasien Masyarakat Miskin (dan Hampir Miskin) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011 95
Tabel 2.59 Cakupan Kunjungan KN1 dan KN L menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011 95
Tabel 2.60 Cakupan Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011 96
Tabel 2.61 Cakupan Puskesmas Pembantu Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011 96
Tabel 2.62 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perkotaan Tahun 2012 98
Tabel 2.63 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Pedesaan Tahun 2012 98
Tabel 2.64 Lahan Kritis DIY 108
Tabel 2.65 Capaian IPG DIY, 2008-2011 110
Tabel 2.66 Capaian IPG DIY, 2010-2011 110
Tabel 2.67 Capaian IDG DIY, 2010-2011 110
Tabel 2.68 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012 111
Tabel 2.69 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan di DIY, 2011 111
Tabel 2.70 Rasio Pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Lembaga Pemerintah, 2011 113
Tabel 2.71 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di DIY 2010-2011 114
Tabel 2.72 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di DIY, 2010-2011 114
Tabel 2.73 Rasio Pekerja Perempuan di Pemerintahan dan Swasta Terhadap Pekerja Laki-laki di Pemerintahan dan Swasta di DIY, 2011 114
Tabel 2.74 Keanggotaan Perempuan Dalam Organisasi Politik Tahun 2012 115
Tabel 2.75 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DIY, 2009-2011 115
Tabel 2.76 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di DIY Tahun 2010-2012 Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY 115
Tabel 2.77 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, 2011-2012 116

Tabel 2.78 Presentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, 2010-2011 116
Tabel 2.79 Presentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang Diselesaikan oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY Tahun 2010-2011 116
Tabel 2.80 Presentase Pengaduan Tindak Kekerasan Anak yang Terselesaikan oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY Tahun 2010-2011 117
Tabel 2.81 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY 117
Tabel 2.82 Rasio Akseptor KB 118
Tabel 2.83 Jumlah Peserta KB Aktif, Pasangan Usia Subur, Wanita Usia Subur, dan *Unmet Need* menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2011 118
Tabel 2.84 PUS Usia Istri yang kurang dari 20 Tahun..... 119
Tabel 2.85 Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY, 2009-2011 119
Tabel 2.86 Lembaga Bina Keluarga menurut Kabupaten/Kota di DIY 2011-2012 120
Tabel 2.87 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan DIY, 2010-2011 121
Tabel 2.88 Sarana Sosial Panti Asuhan dan Panti Jompo di DIY Tahun 2009-2011 122
Tabel 2.89 Data PSKS di DIY, 2011 123
Tabel 2.90 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan di DIY, 2008-2012 (Agustus) 123
Tabel 2.91 Penduduk yang Bekerja di DIY menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, 2009-2011 124
Tabel 2.92 Tenaga Kerja Perusahaan, 2005-2010 128
Tabel 2.93 Data Keanggotaan, Pengurus dan Manager Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 128
Tabel 2.94 Jumlah UMKM 129
Tabel 2.95 Komposisi Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan Tahun 2012 di Sektor UMKM..... 129
Tabel 2.96 Realisasi dan Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN DIY, 2008-2012 130
Tabel 2.97 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011 145
Tabel 2.98 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2011..... 146
Tabel 2.99 Jumlah Posyandu menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011 146
Tabel 2.100 Persentase Posyandu Aktif menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2011 146
Tabel 2.101 Persentase PKK Aktif menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011 147
Tabel 2.102 LPM Berprestasi menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 147

Tabel 2.103 Perkembangan Potensi IKM, 2008-2011 159
Tabel 2.104 Pencapaian Pelaksanaan SPM 161
Tabel 2.105 Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di DIY, 2008-2011 169
Tabel 2.106 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di DIY, 2008-2011 169
Tabel 2.107 Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di DIY, 2009-2012 (Januari) 170
Tabel 2.108 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di DIY, 2009-2011 171
Tabel 2.109 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makan di DIY, 2009-2011 171
Tabel 2.110 Kondisi Tingkat Layanan Jaringan Jalan di DIY, 2012 172
Tabel 2.111 Cakupan Pelayanan Air Minum di DIY, 2009-2012 173
Tabel 2.112 Rasio Elektrifikasi di DIY, 2010-2012 174
Tabel 2.113 Jumlah dan Presentase Rumah Tangga DIY Terlayani Sanitasi Layak, 2010-2012 174
Tabel 2.114 Persentase Lokasi Kumuh yang Telah Ditangani 174
Tabel 2.115 Load Faktor Angkutan Umum Perkotaan dan AKDP di DIY 175
Tabel 2.116 Jumlah Penumpang Pengguna Angkutan Umum di Simpul Utama DIY 175
Tabel 2.117 Jumlah Simpul Transportasi di DIY 175
Tabel 2.118 Jumlah Sambungan Telepon di DIY (%), 2007-2011 176
Tabel 2.119 Jumlah Warnet di DIY, 2007-2010 176
Tabel 2.120 Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY, 2007-2011 177
Tabel 2.121 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY, 2007-2012 .. 177
Tabel 2.122 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY (hari), 2008-2011 178
Tabel 2.123 Jumlah Hotel Berbintang & Non Berbintang di DIY, 2008-2011 178
Tabel 2.124 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Strategis DIY 179
Tabel 2.125 Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di DIY, 2008-2011 180
Tabel 2.126 Jumlah Demo di DIY, 2008-2012 181
Tabel 2.127 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di DIY, 2011 181
Tabel 2.128 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di DIY, 2010 182
Tabel 2.129 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, 2010 ... 182
Tabel 2.130 Rasio Ketergantungan di DIY, 2008-2012 183
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2011 185
Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta 187

Tabel 3.3 Aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Per 31 Desember 2007 s.d. 31 Desember 2011 191
Tabel 3.4 Kewajiban Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Per 31 Desember 2008 sd. 31 Desember 2011. 194
Tabel 3.5 Ekuitas Dana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Per 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011 197
Tabel 3.6 Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2011 200
Tabel 3.7 Rasio Solvabilitas Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2011 201
Tabel 3.8 Rasio Aktivitas Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2011 202
Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apatur DIY 203
Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama DIY 204
Tabel 3.11 Penutupan Defisit Riil Anggaran DIY 204
Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemda DIY 205
Tabel 3.13 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran DIY 206
Tabel 3.14 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Pemda DIY 207
Tabel 3.15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-DIY untuk Tahun 2009-2011 207
Tabel 3.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..... 225
Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Daeraj Istimewa Yogyakarta..... 225
Tabel 3.18 Kerangka Pendaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah..... 228
Tabel 3.19 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2013-2017 230
Tabel 3.20 Proyeksi Pengembangan PT. Bank BPD DIY Tahun 2013-2017 234
Tabel 3.21 Proyeksi Pengembangan PT. Taru Martani Tahun 2013-2017 235
Tabel 3.22 Proyeksi Pengembangan PT. AMI Tahun 2013-2017 236
Tabel 3.23 Proyeksi Pengembangan BUKP Tahun 2013-2017 237
Tabel 4.1 Rasio Puskesmas Berdasarkan per 100.000 Penduduk dan Rasio Nasional per 30.000 247
Tabel 4.2 Rasio Jumlah Rumah Sakit dengan Jumlah Penduduk Tahun 2011 247
Tabel 5.1 Hasil Telaah RPJPD 255
Tabel 5.2 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya DIY Sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara Pada Tahun 2025 255

Tabel 5.3 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya DIY Sebagai Pusat Budaya Terkemuka se Asia Tenggara Pada Tahun 2025 257
Tabel 5.4 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya DIY Sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara Pada Tahun 2025 259
Tabel 5.5 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya Lingkungan Masyarakat Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Pada Tahun 2025 259
Tabel 5.6 Keterkaitan Visi dan Misi 269
Tabel 5.7 Keterkaitan Misi dan Tujuan 269
Tabel 5.8 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 270
Tabel 5.9 Target Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah 273
Tabel 5.10 Hubungan antara RPJMD 2012-2017 dengan Misi, Agenda serta Prioritas RPJMN 2010-2014 283
Tabel 6.1 Tahapan Utama RPJPD 2005-2025 285
Tabel 6.2 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman 290
Tabel 6.3 Analisis SWOT (SWOT Analysis) 293
Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan 297
Tabel 6.5 Tahapan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan 304
Tabel 6.6 Langkah dan Strategi Yang Direkomendasikan dalam Penanganan Permasalahan di Sektor Pertanian 309
Tabel 6.7 Rencana Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Hingga 5 (Lima) Tahun Ke Depan 312
Tabel 6.8 Target Pembangunan Kota Yogyakarta 2013-2017 324
Tabel 6.9 Target Pembangunan Kabupaten Sleman 2013-2017 332
Tabel 6.10 Target Pembangunan Kabupaten Bantul 2013-2017 338
Tabel 6.11 Target Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2013-2017 . 345
Tabel 6.12 Rencana dan Tahapan Pembangunan Pelabuhan Tahun 2013-2017 347
Tabel 6.13 Target Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2013-2017 354
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan 368
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Pelayanan Umum yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 420
Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 421
Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Keistimewaan yang disertai Kebutuhan Pendanaan 486
Tabel 9.1 Target Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah 502
Tabel 9.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD DIY 505

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagian Alir Tahapan Penyusunan RPJMD 4

Gambar 1.2 Kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJMD 5

Gambar 1.3 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra SKPD 5

Gambar 1.4 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD 6

Gambar 1.5 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya..... 10

Gambar 2.1 Peta Administrasi DIY 24

Gambar 2.2 Komposisi Luas Wilayah DIY 25

Gambar 2.3 Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di DIY..... 27

Gambar 2.4 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian di DIY(hektar), 2009-2011 30

Gambar 2.5 Luas Hutan menurut Tata Guna Hutan di DIY (hektar), 2011 32

Gambar 2.6 Luas Hutan menurut Kabupaten/Kota di DIY(hektar), 2011 32

Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana DIY..... 36

Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Penduduk DIY menurut Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Sensus Penduduk antar Sensus (SUPAS) 1995 37

Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY (%), 2011..... 39

Gambar 2.10 Peta Kepadatan Penduduk DIY, 2011 39

Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2007-2011 43

Gambar 2.12 Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha(Jutaan Rupiah), 2007-2011 43

Gambar 2.13 Distribusi PDRB DIY menurut Penggunaan ADHB (%), 2007-2011 46

Gambar 2.14 Perkembangan Laju Inflasi Kota Yogyakarta (%), 2007-2012 47

Gambar 2.15 Nilai PDRB per Kapita DIY (Rupiah), 2007-2011 48

Gambar 2.16 Rasio Gini dan KBD (40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (%), 2007-2011 49

Gambar 2.17 Indeks Wiliamson DIY, 2007-2011..... 50

Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Desa di DIY, 2007-2011 51

Gambar 2.19 Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2005-2012 51

Gambar 2.20 Persentase Penduduk Miskin DIY, 2005-2012 52

Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman (P_1) & Indeks Keparahan (P_2) di DIY (%), 2009-2012..... 52

Gambar 2.22 Koridor Jawa MP3EI 53
Gambar 2.23 Angka Melek Huruf DIY, 2009-2012 55
Gambar 2.24 Rekapitulasi Pendidikan yang ditamatkan dari SD s/d Diploma ke atas menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011 63
Gambar 2.25 Angka Kematian Bayi di DIY Berdasarkan Sensus Penduduk 1971-2010 64
Gambar 2.26 Angka Usia Harapan Hidup DIY, 2008-2011 65
Gambar 2.27 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2009-2011 93
Gambar 2.28 Perkembangan TFR DIY, 1994-2012 118
Gambar 2.29 Perkembangan TPAK di DIY, 2010-2012 125
Gambar 2.30 TPAK menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011-2012 (Agustus) 126
Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, 2009-2012 (%) 127
Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di DIY (%), 2011-2012 128
Gambar 2.33 Pertumbuhan Investasi PMDN/PMA DIY (%), 2008-2012 ... 130
Gambar 2.34 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk DIY 2008-2012 (Kkal/kapita/hari) 143
Gambar 2.35 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY 2008-2012 (gram/kapita/hari) 143
Gambar 2.36 Skor Pola Pangan Harapan DIY, 2009-2011 144
Gambar 2.37 Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu DIY, 2007-2011 151
Gambar 2.38 Tingkat Konsumsi Ikan DIY (kg/kapita/tahun), 2005-2011 158
Gambar 2.39 Nilai Tukar Petani DIY, 2007-2011 170
Gambar 2.40 Luas Wilayah Produktif di DIY (hektar), 2008-2010 179
Gambar 4.1 Skema Renaisans Yogyakarta 245
Gambar 5.1 Pencapaian Tujuan dan Sasaran 263
Gambar 5.2 Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD 269
Gambar 5.3 Skema Besar RPJMD 2012-2017 276
Gambar 5.4 Keterkaitan Visi RPJP, RPJMN, dan RPJMD 278
Gambar 5.5 Keterkaitan Misi RPJP, RPJMN, dan RPJMD 279
Gambar 6.1 Tahapan Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017 286
Gambar 6.2 Kawasan Strategis DIY 301
Gambar 6.3 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Jalan dan Transportasi 302
Gambar 6.4 PDRB Kabupaten-Kota dan DIY atas Harga Konstan 2000 (Tahun 2007-2011) dalam Juta Rupiah 314
Gambar 6.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota dan DIY Tahun 2007-2011 315
Gambar 6.6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten-Kota dan DIY Tahun 2007-2011 316

Gambar 6.7 Pengangguran Terbuka di DIY dan Kabupaten-Kota Tahun 2007-2011 317
Gambar 6.8 Realisasi Investasi DIY dan Kabupaten-Kota Tahun 2007-2011 (dalam Juta Rupiah) 318
Gambar 6.9 IPM Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011 319
Gambar 6.10 Pertumbuhan PDRB Pertanian Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 319
Gambar 6.11 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 320
Gambar 6.12 Pertumbuhan PDRB Industri Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 320
Gambar 6.13 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 321
Gambar 6.14 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 321
Gambar 6.15 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 322
Gambar 6.16 Pertumbuhan PDRB Keuangan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 322
Gambar 6.17 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011 323
Gambar 6.18 Proyeksi Realisasi Investasi Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah 323
Gambar 6.19 IPM Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011 326
Gambar 6.20 Pertumbuhan PDRB Pertanian Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 327
Gambar 6.21 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 328
Gambar 6.22 Pertumbuhan PDRB Industri Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 328
Gambar 6.23 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 329
Gambar 6.24 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 329
Gambar 6.25 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 330
Gambar 6.26 Pertumbuhan PDRB Keuangan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 330
Gambar 6.27 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Sleman dan DIY Tahun 2007-2011 331
Gambar 6.28 Proyeksi Realisasi Investasi Sleman dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah 331
Gambar 6.29 IPM Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011 334
Gambar 6.30 Pertumbuhan PDRB Pertanian Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 334

Gambar 6.31 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 335
Gambar 6.32 Pertumbuhan PDRB Industri Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 335
Gambar 6.33 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 336
Gambar 6.34 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 336
Gambar 6.35 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 337
Gambar 6.36 Pertumbuhan PDRB Keuangan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 337
Gambar 6.37 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Bantul dan DIY Tahun 2007-2011 338
Gambar 6.38 Proyeksi Realisasi Investasi Bantul dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah 338
Gambar 6.39 IPM Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011 340
Gambar 6.40 Pertumbuhan PDRB Pertanian Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 341
Gambar 6.41 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 341
Gambar 6.42 Pertumbuhan PDRB Industri Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 342
Gambar 6.43 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 342
Gambar 6.44 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 343
Gambar 6.45 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 343
Gambar 6.46 Pertumbuhan PDRB Keuangan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 344
Gambar 6.47 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011 344
Gambar 6.48 Proyeksi Realisasi Investasi Kulon Progo dan DIY Tahun2013-2017 dalam Juta Rupiah 345
Gambar 6.49 IPM Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011 349
Gambar 6.50 Pertumbuhan PDRB Pertanian Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 350
Gambar 6.51 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 350
Gambar 6.52 Pertumbuhan PDRB Industri Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 351
Gambar 6.53 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 351
Gambar 6.54 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 352

Gambar 6.55 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 352
Gambar 6.56 Pertumbuhan PDRB Keuangan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 353
Gambar 6.57 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011 353
Gambar 6.58 Proyeksi Realisasi Investasi Gunungkidul dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah 354
Gambar 6.59 Skema Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Tahun 2013-2017 357
Gambar 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD 419

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka status keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7, DIY memiliki kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang.

Undang-undang tersebut juga menegaskan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Karena itu tantangan yang dihadapi adalah membangun kapasitas yuridis agar mampu "mengembalikan", "menguatkan", dan "mengarahkan" keistimewaan DIY.

"Semangat keistimewaan" yang dimaksud adalah:

1. Hamemayu Hayuning Bawana
2. Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti
3. Tahta Untuk Rakyat
4. Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh
5. Catur Gatra Tunggal dengan sumbu imaginer dan filosofis
6. Pathok Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat keistimewaan di dalamnya. RPJMD 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pertama yang disusun dalam era UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen RPJMD Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara resmi disampaikan pada saat Rapat Paripurna DPRD DIY pada tanggal 21 September 2012.

Proses penyusunan RPJMD melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD;

   Persiapan penyusunan meliputi:

   - Penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
   - Orientasi mengenai RPJMD;
   - Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
   - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD;

   Penyusunan rancangan awal meliputi:

   - Pengolahan data dan informasi
   - Analisis gambaran umum DIY
   - Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan.
   - Perumusan permasalahan pembangunan daerah
   - Perumusan isu strategis dan analisa SWOT.
   - Perumusan penjelasan Visi Misi, tujuan dan sasaran.
   - Perumusan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun.
   - Perumusan rencana indikasi program prioritas yang disertai pendanaan.
   - Penetapan indikator kinerja daerah.
   - Pembahasan dengan SKPD DIY sebagai bahan penyusunan rancangan Renstra SKPD.
   - Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
   - Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran yang diwujudkan dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Program Prioritas.

3. Penyusunan rancangan RPJMD;

   Penyusunan rancangan RPJMD meliputi:

   - Penyusunan surat edaran Gubernur tentang penyusunan rancangan Renstra SKPD.
   - Verifikasi rancangan Renstra SKPD.
   - Rancangan Renstra SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD.
   - Pelaksanaan musrenbang RPJMD; Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

4. Perumusan rancangan akhir RPJMD;

   Perumusan rancangan akhir meliputi:

   - Penyusunan rancangan akhir RPJMD dengan memperhatikan hasil musrenbang RPJMD.
   - Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri.

- Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD sesuai hasil konsultasi.

5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

   Penetapan Peraturan Daerah melalui:

   - Penyusunan raperda.
   - Pembahasan pansus DPRD DIY.
   - Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Proses penyusunan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

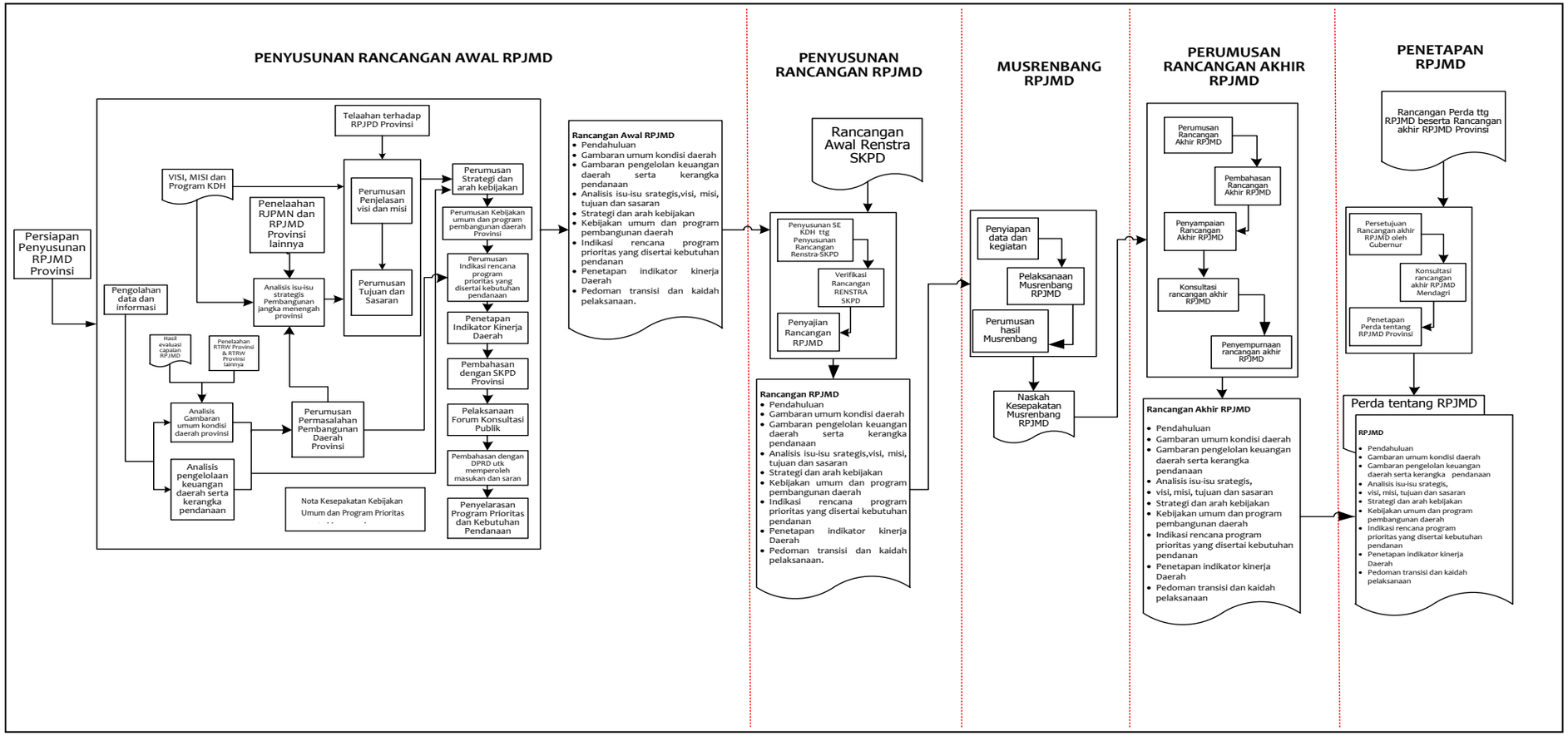

Sumber: Permendagri Nomor 54/Tahun

Gambar 1.1 Bagian Alir Tahapan Penyusunan RPJMD

RPJPD 2005-2025 terbagi menjadi 4 (empat) tahapan lima tahunan, yaitu Tahap Lima Tahun I (2005–2009), Tahap Lima Tahun II (2010–2014), Tahap Lima Tahun III (2015–2019), Tahap Lima Tahun IV (2020–2025).RPJMD Tahun 2012-2017 terletak di setengah perjalanan RPJPD Tahun 2005-2025. Kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD dapat digambarkan dalam gambar berikut ini.

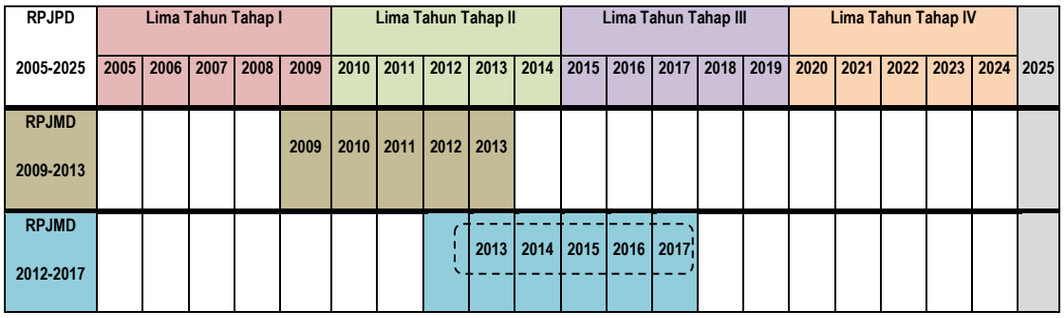

Gambar 1.2 Kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJMD

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini.

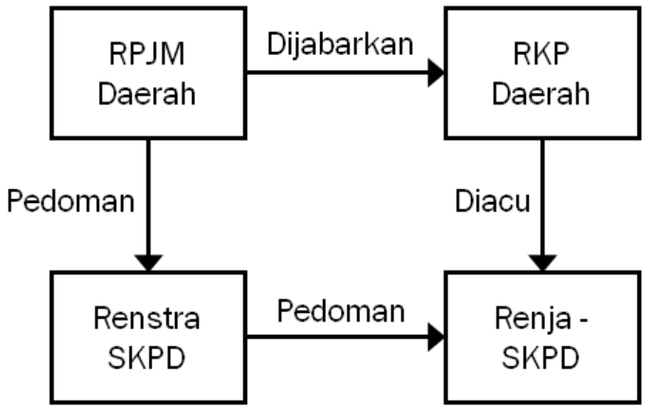

Gambar 1.3 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra SKPD

Kepala daerah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk perencanaan pembangunan selama masa jabatannya. Visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah dipedomani oleh kepala SKPD yang kemudian dituangkan menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD. Dengan demikian visi misi SKPD disusun untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini.

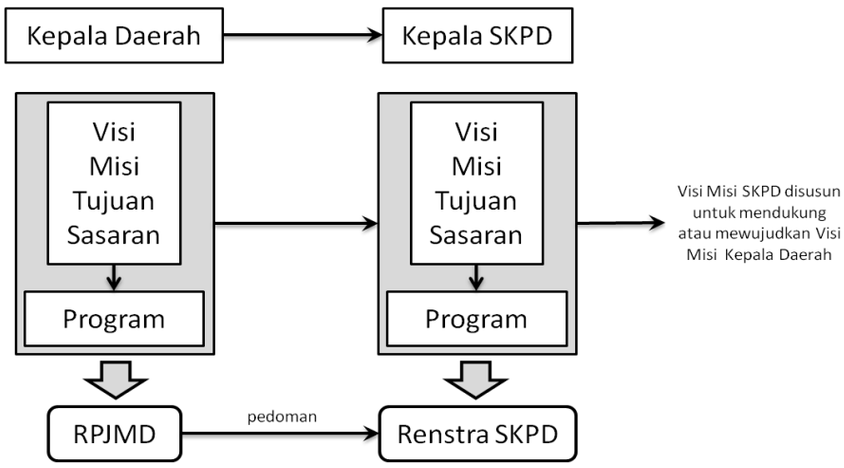

Gambar 1.4 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD

Sejalan dengan proses pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa target sasaran pembangunan daerah yang sampai dengan Tahun 2013 telah melampaui target. Terdapat 6 target sasaran dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 yang capaiannya telah melampaui target sasaran tahun berikutnya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa target sasaran pada RPJMD Tahun 2012-2017 tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan lampiran sebagaimana tertuang dalam Bab I-X dokumen ini.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunandaerah.

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah periode 2012-2017 yang dalam penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional. Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2010–2014 adalah "**Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan**." Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahapan kedua dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMD DIY memperhatikan RPJMN dimana penekanan RPJMD DIY untuk mencapai masyarakat mandiri telah selaras

dengan visi RPJMN untuk memberdayakan sumberdaya manusia yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dalam hal menciptakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pemberdayaan sumber daya manusia ke arah Kesejahteraan Rakyat. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD.

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta menjabarkan kehendak masyarakat DIY yang dijadikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Selain itu, proses penyusunan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 memperhatikan RPJMD daerah sekitar yang terdekat. Keterkaitan terhadap RPJMD daerah lain dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah yang paling berdekatan dengan DIY. Visi RPJMD Provinsi Jawa tengah adalah "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera". Misi yang dituangkan berkaitan dengan Visi tersebut adalah:

a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat.
b. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya.
c. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal.
d. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan.
e. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
f. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

Berdasarkan pada misi tersebut dapat di tarik beberapa *keyword* utama, yaitu pemerintahan yang bersih dan profesional (*good governance*); pembangunan ekonomi; pemantapan sosial dan budaya; pengembangan SDM, peningkatan infrastruktur dan terakhir adalah supremasi hukum. Kebijakan dasar misinya dimulai dengan pelayanan dasar pemerintahan dan kepastian hukum, sedangkan pengisinya adalah pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pengembangan SDM, pemantapan kondisi sosial budaya serta dilengkapi dengan penciptaan infrastruktur yang mencukupi.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 -2017 juga mempedomani dokumen RTRW DIY dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang.

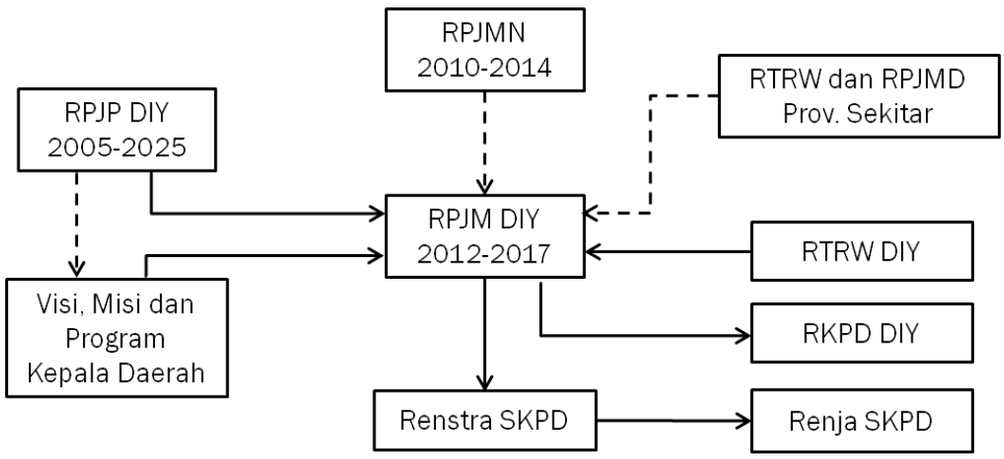

Gambar 1.5 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya

Selain itu, proses penyusunan RPJMD DIY tahun 2012-2017 memperhatikan RPJMD daerah sekitar yang terdekat. Keterkaitan terhadap RPJMD daerah lain dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah yang paling berdekatan dengan DIY. Visi RPJMD Jawa tengah adalah Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera. Misi yang dituangkan berkaitan dengan Visi tersebut adalah:

a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat.
b. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya.
c. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal.
d. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan.
e. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
f. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

Berdasarkan pada misi tersebut dapat di tarik beberapa *keyword* utama, yaitu pemerintahan yang bersih dan profesional (*good governance*); pembangunan ekonomi; pemantapan sosial dan budaya; pengembangan SDM, peningkatan infrastruktur dan terakhir adalah supremasi hukum. Kebijakan dasar misinya dimulai dengan pelayanan dasar pemerintahan dan kepastian hukum, sedangkan pengisinya adalah pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pengembangan SDM, pemantapan kondisi sosial budaya serta dilengkapi dengan penciptaan infrastruktur yang mencukupi.

1.4 Sistematika Penulisan

RPJM Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.5.2 Tujuan

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2012-2017, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpedoman pada RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025;

b. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2013-2017;
c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2017.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, merumuskan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun rencana 2013-2017, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun rencana 2013-2017. Adapun penjelasan bahwa RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi pokok pokok sebagai:

a. Acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2013-2017;
b. Tolok ukur keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;
c. Tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
d. Pedoman seluruh pemangku kepentingan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
e. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan daerah dan aspirasi mesyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejak zaman Prasejarah hingga kini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan akan peristiwa-peristiwa penting, bahkan peristiwa-peristiwa dalam proses evolusi geologis. Hal ini jarang terjadi di daerah lain sehingga dapat dikatakan sejarah DIY itu sendiri merupakan salah satu keistimewaan DIY. Peninggalan-peninggalan cagar budaya dan warisan budaya mewakili tahapan periodisasi sejarah yang terjadi di DIY, yaitu masa prasejarah, masa Kerajaan Mataram Kuno, masa Kasultanan Mataram Islam, masa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman, masa kolonial, masa kemerdekaan, dan masa kontemporer.

Menurut ahli geologi, DIY merupakan barometer sejarah bumi dan kegunungapian di Indonesia, karena bukti geologi yang tersingkap di DIY mewakili 70% riwayat sejarah kebumian di Pulau Jawa. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya singkapan batuan dan fosil. Warisan geologi ini membentuk riwayat yang utuh sejak zaman pra-gunung api (berlangsung lebih dari 36 juta tahun yang lalu), zaman gunung api purba/*Old Andesite Formation* (berlangsung antara 16-36 juta tahun yang lalu), dan zaman gunung api masa kini (zaman Merapi kira-kira 2 juta tahun yang lalu). Warisan geologi yang utuh seperti ini langka dijumpai di daerah lain.

Apabila dipelajari dari bukti-bukti arkeologis yang ditemukan, menunjukkan bahwa penghunian manusia purba di DIY telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jejak-jejak kehidupan manusia prasejarah ditemukan di daerah Pegunungan Sewu yang berada di bagian selatan DIY. Di kawasan *karst* ini terdapat ratusan guayang dulu pernah menjadi tempat bermukim manusia, mungkin sejak sekitar 15.000 tahun yang lalu.

Penelitian yang telah dilakukan di daerah ini membuktikan manusia prasejarah yang hidup di gua-gua itu telah memiliki budaya yang cukup maju. Mereka mengandalkan kehidupannya dengan berburu dan mengeksploitasi tanaman. Ketika itu, mereka belum tinggal secara menetap di gua-gua tersebut, tetapi kadang berpindah sesuai dengan musim. Masa pengembaraan itu mereka hidup dengan berburu dan meramu.

Adakalanya, mereka hidup agak di pedalaman dengan lebih banyak berburu hewan, mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian. Hewan yang banyak diburu adalah monyet (*macaca fasicularis*), rusa, dan mungkin banteng. Di musim yang lain, mereka akan pergi ke wilayah pantai dan lebih banyak hidup dari mengumpulkan kerang dan mungkin menombak ikan. Cangkang kerang yang dikumpulkan seringkali mereka pergunakan sebagai perhiasan atau alat dan masih mereka bawa ketika mereka kembali masuk ke pedalaman.

Mereka juga telah mengenal penguburan jenazah dengan cara terlipat, ditaburi zat pewarna, dan ditindih dengan batu sebelum ditimbun dengan tanah. Hal ini membuktikan budaya yang sudah cukup maju. Semua bukti kehidupan manusia gua tersebut begitu banyak tersebar di Kabupaten Gunung Kidul. Namun, kini gua-gua dengan bukti kehidupan prasejarah itu terancam oleh kegiatan manusia, khususnya pertambangan gamping dan fosfat. Padahal, sumberdaya budaya itu mempunyai nilai penting bagi data sejarah, arkeologi, dan ilmu lainnya.

Setelah kehidupan manusia prasejarah di gua-gua berakhir, wilayah DIY telah dihuni oleh manusia prasejarah yang lebih maju. Mereka tinggal menetap di dalam perkampungan dan mengandalkan pada kehidupan pertanian. Hasil yang diperoleh lalu dipertukarkan, sehingga masyarakat saat itu dapat memperoleh benda-benda dari luar, antara lain manik-manik dari kaca.Masyarakat pada saat itu meninggalkan bukti-bukti keberadaannya terutama berupa benda-benda megalitik yang terutama tersebar di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Karangmojo dan Playen. Benda megalitik yang ditemukan berupa kubur peti batu, patung menhir, dan batu tegak lainnya. Ketika itu, mereka juga telah menggunakan alat-alat pertanian dari besi dan memakai gerabah sebagai wadah.

Meskipun belum diketahui secara tepat sejak kapan kehidupan seperti ini dimulai, namun data arkeologi memberikan petunjuk kehidupan seperti itu telah berlangsung sejak 2.500 tahun lalu dan berkembang hingga beberapa abad Masehi. Bukti-bukti kehidupan yang menunjukkan tradisi megalitik kurang banyak mendapat perhatian. Sebagian di antara temuan itu telah rusak, bahkan terbongkar. Sebagian yang lain dijadikan jembatan atau penguat pematang. Tentu saja, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintan untuk menyelamatkan benda-benda ini dengan mengumpulkan dan melindunginya di suatu tempat. Namun, tentu upaya itu masih jauh dari cukup untuk menyelamatkan tinggalan purbakala yang amat penting ini.Kehidupan prasejarah di kawasan pegunungan selatan Yogyakarta berangsur-angsur berakhir dengan kedatangan dan semakin menguatnya pengaruh budaya Hindu di wilayah DIY. Tidak dapat disangkal, pada masa pengaruh budaya Hindu pun, wilayah Yogyakarta menjadi pusat perkembangannya. Sejak sekitar abad ke-7, diduga telah ada komunitas-komunitas yang terpengaruh budaya Hindu di sekitar wilayah Yogyakarta.

Keberadaan cagar budaya yang bercorak kuno seperti candi, situs, prasasti, perhiasan, peralatan telah menunjukkan bahwa sebuah kerajaan besar bercorak Hindu berkembang dan jaya sekitar abad ke-8. Wilayah DIY menjadi pusat dari Kerajaan Mataram Kuno. Kompleks Candi Prambanan dan Ratu Boko hanyalah beberapa contoh peninggalan masa kejayaan kerajaan Mataram Kuno. Namun, masih ada ratusan candi lainnya yang kini telah menjadi saksi sejarah peradaban DIY, di antaranya Candi Kalasan, Sari, Sambisari, Kedulan, Banyunibo, Barong, Morangan dan Kimpulan. Menurut Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 M, daerah Saliman (= Sleman, DIY bagian utara) adalah tempat berdirinya kerajaan Mataram Hindu yang diprakarsai oleh Sang Ratu Sanjaya. Pernyataan dalam prasasti itu didukung dengan keberadaan sejumlah nama tempat atau toponim di daerah Sleman yang menunjukkan adanya permukiman keluarga kerajaan, di antaranya adalah *Rejadani* (= tempat raja), *Poton* (pattana = kota), *Bantareja* (= makam raja), dan *Dayakan* (dayaka = keluarga raja).

Pada jaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, wilayah DIY juga berperan besar dalam percaturan sejarah. Panembahan Senapati merintis pendirian Kerajaan Mataram Islam di Kotagede, yang ada di bergelar "*Senapati Ing Alaga Sayidin Panatagama*" artinya Panglima Perang dan Ulama Pengatur Kehidupan Beragama. Pada masa Sultan Agung Hanyokrokusuma wilayah kekuasaan Mataram sangat luas, meliputi seluruh Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Karawang, Jawa Timur sampai Jember dan Madura. Sultan Agung memilih DIY sebagai pusat kerajaannya, yaitu daerah Kerta dan Pleret. Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Pleret Kraton Mataram mencapai puncak kejayaan. Tak hanya berpikir tentang keamanan dan keberlangsungan kraton semata. Bukti dari semua itu bisa dilihat dari karya seperti *Sastra Gending*, *Kitab Ni Cruti*, dan *Niti Castra*, Kaligrafi, Perhitungan Tahun Jawa dan perayaan Sekaten. Hasil karya Sultan Agung yang sampai sekarang menjadi "monumen" adalah

makam Imogiri (makam raja-raja Mataram) yang sekarang telah ditetapkan menjadi Kawasan cagar Budaya Kelas C yang di bawah kewenangan provinsi.

Setelah Sultan Agung mangkat, Mataram mengalami masa-masa atau detik-detik keruntuhan. Tanda-tanda dari keruntuhan Kesultanan Mataram antara lain kebijakan-kebijakan para pengganti Sultan Agung yang menimbulkan ketidakstabilan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Selain itu, mereka lebih dekat kepada VOC, hal demikian berbeda ketika masa pemerintahan Sultan Agung yang memusuhi VOC. Kedekatan para pengganti Sultan Agung dengan VOC menyebabkan terjadinya intervensi VOC terhadap politik Kesultanan Mataram. Puncak perpecahan di Mataram ditandai dengan Perjanjian Giyanti atau perjanjian *Palihan Nagari*pada tanggal 13 Februari 1755 M. Perjanjian ini terjadi karena VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang sedang menguasai beberapa daerah di tanah Jawa merasa kewalahan untuk menghadapi perlawanan Pangeran Mangkubumi yang terus mendapat dukungan dari rakyat. Bahkan rakyat kemudian mengangkat dan menobatkan Pangeran Mangkubumi sebagai raja yang dikenal dengan Sri Susuhunan Kebanaran. Dukungan terhadap Susuhunan Kebanaran ini terus menguat, sehingga perlawanan terhadap VOC pun semakin meluas.

Untuk meredakan perlawanan dan menghindari kerugian yang bertambah banyak, maka VOC atas persetujuan Sunan Paku Buwono III, menawarkan perdamaian kepada Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi tidak keberatan dengan rumusan perjanjian damai itu yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Isi perjanjian Giyanti ini yang terpenting adalah pembagian Mataram menjadi dua. Separuh tetap berada di bawah kekuasaan Sunan Paku Buwono III yang berpusat di Surakarta sehingga disebut Kasunanan Surakarta, dan yang separuhnya lagi diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dengan pusat pemerintahannya ada di Yogyakarta sehingga terkenal dengan nama Kasultanan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat). Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai sultan di Yogyakarta dengan gelar "*Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping I*" (Sultan Hamengku Buwono I).

Sultan Hamengku Buwono I (6 Agustus 1717 – 24 Maret 1792) terlahir dengan nama Raden Mas Sujana yang merupakan adik Susuhunan Mataram II Surakarta. Sultan Hamengkubuwana I dalam sejarah terkenal sebagai Pangeran Mangkubumi pada waktu sebelum naik tahta kerajaan Ngayogyakarta, beliau adalah putra Sunan Prabu dan saudara muda Susuhunan Pakubuwana II.

Dalam pembagian wilayah Kerajaan Mataram, Kasultanan Yogyakarta memperoleh Wilayah Mataram, Kedu, dan Bagelen yang masuk dalam wilayah *Negara Agung*. Daerah yang masuk dalam wilayah *Mancanegara* meliputi Madiun (Kota Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan); Kediri (Kertasana, Kalangbret, Ngrawa/Tulung Agung); Surabaya (Japan/Majakerta); Rembang (Jipang, Teras Karas); Semarang (Sela, Kuwu, sebagian Grobogan). Kasultanan Yogyakarta juga mendapat wilayah dari Pantai Utara Jawa.

Sebelum dapat membangun istana yang tetap, untuk sementara waktu Sultan Hamengku Buwono I bertahta di Pesanggrahan di Wilayah Gunung Gamping yang dinamakan istana Ambar Ketawang mulai tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat ini, Pangeran Mangkubumi mulai merencanakan desain kota pemerintahannya dengan landasan filosofis yang sangat luar biasa, sehingga menjadi saujana asosiatif yang bernilai tinggi. Yang dimaksud dengan saujana asosiatif (*associative cultural landscape*) adalah paduan antara karya alam (bentang lahan dan lingkungan) dengan karya bentukan

manusia yang hanya dapat dipahami berdasarkan konsep keagamaan atau kepercayaan, budaya, maupun seni tertentu yang melatarinya. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut *Beringin*, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama *Pachetokan*, sedang di sana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tersebut untuk didirikan Kraton. Sultan Hamengku Buwono mulai menempati istana yang baru Ngajogjo Adiningrat (Ngayogyakarta Hadiningrat) pada hari Kamis Pahing tanggal 7 Oktober 1756. Disamping mendirikan istana baru, beliau yang berdarah seni mendirikan bangunan tempat bercengkerama Taman Sari yang terletak di sebelah barat istananya.

Pangeran Mangkubumi berhasil membangun kratonnya di daerah bekas hutan Beringan wilayah Mataram secara sempurna, yaitu baik dari segi fisik maupun non fisik dan dilandasi dengan pemikiran filosofis religious, politis, sosial, ekonomis, dan kultural yang mendalam. Makna-makna simbolis dan filosofis dapat dirunut dari segi penamaan kraton, ciri religius kraton, gaya seni budaya, semangat dan jiwa patriotisme.

Pangeran Mangkubumi mendesain kerajaannya ini dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang bermakna sebuah kerajaan yang sejahtera, indah dan terkemuka di dunia. Beliau memperoleh nama ini dari nama Kerajaan Ayodyapura yang diperintah oleh Rama penjelmaan Dewa Wisnu yang dikaguminya. Beliau berharap kerajaannya ini akan menjadi indah, makmur, sejahtera, terkemuka seperti Ayodyapura, dan kini menjadi cita-cita bersama Kraton dan DIY dalam Era Globalisasi. Sri Sultan Hamengku Buwono I dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia pada peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2006.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Kontrak politik terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941, No. 47.

Sri Sultan Hamengku Buwono II (7 Maret 1750–2 Januari 1828) atau terkenal pula dengan nama lainnya Sultan Sepuh Sultan adalah raja di Kesultanan Yogyakarta yang memerintah antara tahun 1792 dan 1828. Hal ini ditandai dengan terjadinya perubahan empat kali rezim kolonial dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, yaitu dari VOC, Prancis, Inggris dan Belanda. Perubahan rezim yang juga menimbulkan pergantian kebijakan kolonial ini mengakibatkan terjadinya instabilitas politik dari penguasa kolonial khususnya tindakan pemerintah kolonial terhadap raja-raja pribumi. Kondisi ini meningkatkan eskalasi konflik yang cukup tajam antara penguasa kolonial dan penguasa Jawa. Semasa hidupnya dikenal sebagai penentang kekuasaan kolonial atau tidak pernah mau tunduk terhadap tuntutan-tuntutan kolonial, antara lain menentang Gubernur Jendral Daendels dan Raffles. Sultan menentang aturan protokoler baru ciptaan Daendels mengenai alat kebesaran Residen Belanda, pada saat menghadap sultan misalnya hanya menggunakan payung dan tak perlu membuka topi. Perselisihan antara Hamengku Buwono II dengan Susuhunan Surakarta tentang batas daerah kekuasaan juga mengakibatkan Daendels memaksa Hamengku Buwono II turun takhta pada tahun 1810 dan untuk selanjutnya bertahta secara terputus-putus hingga tahun 1828, yaitu akhir 1811 ketika Inggris menginjakkan kaki di Jawa (Indonesia) sampai pertengahan 1812 ketika tentara Inggris menyerbu keraton Yogyakarta dan 1826 untuk meredam perlawanan Diponegoro sampai 1828. Hamengku Buwono III, Hamengku Buwono IV dan Hamengku Buwono V sempat bertahta saat masa hidupnya Sri Sultan Hamengku Buwono II.

Saat menjadi putra mahkota beliau mengusulkan untuk dibangun benteng kraton untuk menahan seragan tentara Inggris. Tahun 1812 Raffles menyerbu Yogyakarta dan menangkap Sultan Sepuh yang kemudian diasingkan di Pulau Pinang kemudian dipindah ke Ambon. Pada tahun 1826 beliau dibujuk untuk menduduki Kesultanan kembali agar mau mempengaruhi para pangeran agar tidak mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro.

Selama masa pemerintahannya, sifatnya yang antikolonial semakin jelas. Sultan HB II menyadari bahwa orang-orang Belanda merupakan ancaman utama terhadap keutuhan wilayah dan kewibawaan raja-raja Jawa khususnya di Kesultanan Yogyakarta. Sultan HB II tidak berpikir untuk mengembalikan wilayah Kerajaan Mataram lama di bawah satu pemerintahan. Sebaliknya, tujuan utama Sultan HB II adalah menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai suatu kerajaan Jawa yang besar, berwibawa dan disegani oleh para penguasa lain termasuk oleh orang-orang Eropa. Harapan Sultan HB II adalah Kesultanan Yogyakarta menjadi penegak dan pendukung utama tradisi budaya dan kekuasaan Jawa. Bertolak dari konsep ini, Sultan HB II bertekad untuk menolak semua intervensi Belanda yang mengakibatkan merosotnya kewibawaan raja Jawa dan berkurangnya wilayah kekuasaan raja-raja Jawa.

Pengganti Sultan Hamengku Buwono II adalah Sri Sultan Hamengku Buwono III (1769–3 November 1814), putra dari Hamengku Buwono II (Sultan Sepuh). Hamengku Buwono III memegang kekuasaan pada tahun 1810. Setahun kemudian ketika Pemerintah Belanda digantikan Pemerintah Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Raffles, Sultan Hamengku Buwono III turun tahta dan kerajaan dipimpin oleh Sultan Sepuh (Hamengku Buwono II) kembali selama satu tahun (1812). Pada masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono III keraton Yogyakarta mengalami kemunduran yang besar-besaran. Kerajaan Ngayogyakarta diharuskan melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setahunnya. Angkatan perang kerajaan diperkecil dan hanya beberapa tentara keamanan keraton. Sebagian daerah kekuasaan keraton diserahkan kepada Pangeran Notokusumo dan diangkat menjadi Pangeran Adipati Ario Paku Alam I.

Tahun 1811 ketika Inggris berhasil menduduki Pulau Jawa, yang ditandai dengan Kapitulasi Tuntang, dan berhasil menggeser kedudukan Belanda merupakan awal lahirnya Kadipaten Pakualaman. Letnan Gubernur Raffles, wakil pemerintah Inggris, mengangkat Pangeran Natakusuma menjadi pangeran yang memerintah sendiri, lepas dari kekuasaan kasultanan, dan bergelar Adipati Paku Alam I. Kemudian pada tahun 1813 dilakukan penyerahan kekuasaan beserta wilayahnya kepada Paku Alam I. Lokasi pusat Kadipaten Pakualaman terletak di sebelah timur Sungai Code masih berada di wilayah dalam Kota Yogyakarta dan kekuasaannya meliputi sebagian tanah Bagelen dan tanah Panjang. Kemudian dalam perjalannya, wilayah tersebut diganti dengan daerah Adikarta (Kulon Progo Bagian Selatan).

Dengan berdirinya Kadipaten Pakualaman maka wilayah Kerajaan Mataram yang satu, kuat dan kokoh pada masa pemerintahan Sultan Agung akhirnya terpecah menjadi empat, yakni: 1) Kasultanan Yogyakarta; 2) Kasunanan Surakarta; 3) Pakualaman; 4) Mangkunegaran.

Selanjutnya Kraton Ngayogyakarta dipimpin oleh Hamengku Buwono IV (3 April 1804–6 Desember 1822). Beliau diangkat sebagai raja pada usia 10 tahun, sehingga memerintah didampingi wali, yaitu Paku Alam I sampai dengan tahun 1820. Pada masa pemerintahannya diberlakukan sistem sewa tanah untuk swasta.

Pada masa berikutnya adalah Hamengku Buwono V (25 Januari 1820–1826 dan 1828–4 Juni 1855). Dalam memerintah beliau dibantu dewan perwalian yang antara lain beranggotakan Pangeran Diponegoro sampai tahun 1836. Dalam masa pemerintahannya sempat terjadi peristiwa penting yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung 1825–1830. Setelah perang selesai angkatan bersenjata Kesultanan Yogyakarta semakin diperkecil lagi sehingga jumlahnya menjadi sama dengan sekarang ini. Selain itu angkatan bersenjata juga mengalami demiliterisasi dimana jumlah serta macam senjata dan personil serta perlengkapan lain diatur oleh Gubernur Jenderal Belanda untuk mencegah terulangnya perlawanan kepada Belanda seperti waktu yang lalu. Tujuan dari Hamengku Buwono V sendiri dekat dengan Belanda adalah untuk melakukan taktik perang represif, dimana ia menekankan pada perang tanpa darah, Sri Sultan mengharapkan dengan dekatnya pihak keraton dengan pemerintahan Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak keraton dan Belanda, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara.

Setelah Perang Diponegoro atau sering disebut Perang Jawa (1825-1830) berakhir terjadi tonggak perubahan penting bagi peta kehidupan Kasultanan Yogyakarta. Pihak Pemerintah Belanda memperkecil wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta karena Belanda menganggap bahwa yang harus bertanggung jawab atas perang tersebut adalah kasultanan dan kasunanan. Akibatnya, Yogyakarta kehilangan wilayah *Mancanegara* yang meliputi Madiun dan Kediri.

Semasa pemerintahan Hamengku Buwono VI mulai timbul pemberontakan-pemberontakan yang tidak mengakui masa pemerintahan Sultan, namun bisa diredam dan dibersihkan. Hal ini berkat kepemimpinan dan ketangguhan Danuredjo V sebagai mahapatih Keraton Jogja. Hubungan dengan berbagai kerajaan pun dijalin kuat. Walaupun sempat menimbulkan beberapa sengketa, namun sultan dapat mengatasinya dengan arif bijaksana. Tapi lambat laun hubungan dengan pemerintahan Belanda agak mulai menuai konflik tertama karena Keraton kala itu banyak menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang menjadi musuh pemerintah Belanda.

Hamengku Buwono VI naik tahta menggantikan kakaknya, yaitu Hamengku Buwono V sejak tahun 1855. Pada masa pemerintahannya terjadi gempa bumi yang besar yang meruntuhkan sebagian besar Keraton Yogyakarta, Taman Sari, Tugu Golong Gilig, Masjid Gede (masjid keraton), Loji Kecil (sekarang Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta) serta beberapa bangunan lainnya.Semasa pemerintahannya Hamengku Buwono VI justru melanjutkan kebijakan dari kakaknya yang sebelumnya ditentang keras.

Masa kejayaan diawali ketika Sultan Hamengku Buwono VII bernama asli Raden Mas Murtejo, putra Hamengkubuwono VI yang lahir pada tanggal 4 Februari 1839 berkuasa. Ia naik tahta menggantikan ayahnya sejak tahun 1877.

Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono VII, banyak didirikan pabrik gula di Yogyakarta, yang seluruhnya berjumlah 17 buah. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang kepadanya untuk menerima dana sebesar Rp 200.000,00,-. Hal ini mengakibatkan Sultan sangat kaya sehingga sering dijuluki Sultan Sugih. Masa pemerintahannya juga merupakan masa transisi menuju modernisasi di Yogyakarta. Banyak sekolah modern didirikan. Ia bahkan mengirim putra-putranya belajar hingga ke negeri Belanda.

Sultan HB VII memberikan perhatian yang besar pada kegiatan kesenian yang dirintis oleh kedua putranya, Pangeran Tejokusumo dan Pangeran Suryodiningrat. Dengan mendirikan sekolah tari gaya Yogyakarta yang

pertama kali dibuka untuk umum, Krido Bekso Wiromo, kedua pangeran ini berhasil memperkenalkan kebudayaan kraton yang semula hanya terbatas di lingkup istana, menjadi meluas dan hidup di kalangan masyarakat. Mereka yang berminat untuk mempelajari tari gaya Yogyakarta bisa datang dan mendaftarkan ke Dalem Tejokusuman. Selain itu, pentas tari dan wayang orang menjadi semakin marak sejak akhir tahun 1918, dan mendapatkan dukungan penuh dari Sultan HB VII. Hal tersebut menjadi fenomena yang menarik.

Fenomena yang lebih penting dari hal itu adalah hubungan yang terjadi antara para bangsawan kraton, terutama para putra Sultan HB VII, dengan para aktivis organisasi politik di luar kraton. Salah satu organisasi yang bersentuhan dengan para bangsawan Yogya ini adalah Budi Utomo. Sultan HB VII menunjukkan sikap simpatinya Sultan HB VII kepada Budi Utomo pada tahun 1909, yaitu ketika ia mengizinkan penyelenggaraan kongres pertama Budi Utomo di Mataram Loge, Jalan Malioboro. Bangunan milik Sultan ini merupakan gedung pertemuan milik kelompok *Vrijmetselaar (Freemason*) yang tumbuh dan berkembang di Yogya pada akhir abad XIX. Beberapa orang bangsawan Jawa menjadi anggota dari organisasi ini, seperti Pangeran Notodirojo. Melalui para bangsawan ini, Budi Utomo mampu memperkenalkan programnya kepada Sultan HB VII.

Organisasi massa lainnya yang bersentuhan dengan kalangan kraton adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh penghulu kraton, KH Achmad Dahlan. Dasar organisasi ini adalah melaksanakan ajaran agama Islam secara murni dengan tujuan mengentaskan umat Islam dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan arah perjuangan seperti itu, Achmad Dahlan menggariskan, bahwa perlu diambil upaya pembelajaran kepada umat Islam seluas-luasnya dengan menerapkan model pendidikan Barat, namun tetap berazaskan pada landasan Islam, sehingga umat Islam akan mampu menghadapi perubahan zaman.

Dengan mempertimbangkan situasi kehidupan politik di kraton yang mulai tenang, ditambah dengan kondisi fisik yang semakin menurun karena usianya yang sudah mencapai 81 tahun, Sultan HB VII sejak pertengahan tahun 1920, mulai mengurangi kegiatan dalam pemerintahannya. Bahkan Sultan menyampaikan keinginan untuk turun dari tahta kepada Patih Danurejo VII dan juga disampaikan kepada Sunan PB X yang melakukan kunjungan sebagai menantu di Pesanggrahan Ambarukmo pada awal bulan Maret 1920. Salah satu motivasi yang mendorong keinginan itu adalah bahwa status putra mahkota telah jelas dan telah diterima dengan baik oleh kerabat raja, maupun pemerintah kolonial. Di samping itu, Sultan ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda, yang lebih tepat untuk menyongsong pembaruan-pembaruan dalam administrasi birokrasi, sehingga pemerintahan kraton akan berjalan semakin baik.

Pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII (3 Maret 1880–22 Oktober 1939), seorang raja yang memimpin di Kesultanan Yogyakarta dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 1921. Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan.

Putra-putra Hamengku Buwono VIII banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak diantaranya di Belanda. Salah satunya adalah GRM Dorojatun, yang kelak bertahta dengan gelar Hamengku Buwono IX, yang bersekolah di Universitas *Leiden*. Sultan Hamengku Buwono VIII memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan, organisasi-organisasi, kesehatan. Pada masa beliau berkembang perkumpulan-perkumpulan dan kegiatan-kegiatan seperti Perguruan Nasional Taman Siswa (3 Juli 1922), Pakempalan Politik Katolik Jawi (1923) dan Konggres Perempoean (1929).

Beliau banyak mengadakan rehabilitasi bangunan kompleks Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah Bangsal Pagelaran yang terletak di paling depan sendiri (berada tepat di selatan Alun-Alun Utara Yogyakarta). Bangunan lainnya yang rehabilitasi adalah tratag Siti Hinggil, Gerbang Donopratopo, dan Masjid Gedhe.

Dalam masa itu, pada tahun 1909 pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangun selokan *Van Der Wijck* dan Bendungan Karang Talun. Kedua bangunan pengendalian air tersebut mengaliri areal perkebunan tebu di sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mendukung perkebunan tebu yang menjadi pensuplai bahan baku pabrik-pabrik gula di DIY yang berkembang pada saat itu.

Sementara itu memasuki awal abad XX, banyak peristiwa perjuangan pergerakan nasional terjadi di Yogyakarta yang turut mewarnai perjalanan lahirnya NKRI. Hal ini terbukti dengan banyak organisasi kebangsaan yang lahir di Yogyakarta, seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, Wanita Utomo, dan Wanita Katholik, serta menjadi tempat penyelenggaran kongres kebangsaan, seperti Budi Utomo, *Jong Java*, dan Kongres Perempuan. Sejak awal abad XX hingga berakhirnya masa Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1942, Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman telah berperan menjadi katalisator transformasi di masyarakat dan tumbuhnya kebudayaan baru.

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan reorgansiasi agraria dengan penghapusan *apanage* yang mengakibatkan semua tanah kembali menjadi milik Raja. Walaupun demikian, hasil dari pengolahan tanah dimasukkan ke dalam kas daerah yang dikelola patih yang digunakan untuk pengeluaran Kraton, dan untuk pemakaiannya secara langsung harus atas sepengetahuan residen.

Demokratisasi dalam Kraton semakin nampak ketika Kraton Ngayogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Yogyakarta, 12 April 1912-Washington, DC, AS, 1 Oktober 1988) adalah salah seorang raja yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Beliau dilahirkan di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun, Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Ketika umur 4 tahun Hamengku Buwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Universiteit Leiden, Belanda (”Sultan Henkie”). Hamengku Buwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar “Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga”. Beliau merupakan Sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia.

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hemengku Buwana IX situasi sekitar Yogyakarta adalah situasi pergerakan dan perjuangan kemerdekaan RI. Sehingga tidak banyak terfokus kepada pembangunan fisik. Sri Sultan Hamengkubuwana IX berperan besar dalam keberadaan atau proses demokratisasi dan modernisasi Kraton Yogyakarta. Masa ini terjadi perubahan penting yaitu bergesernya konsep kekuasaan absolut bergeser kearah yang bersifat demokratis dari konsep ke-*agungbinathara*-an menjadi konsep kekuasaan ‘Tahta Untuk Rakyat’.

Salah satu tindakan yang mengukuhkan Sri Sultan HB IX sebagai pemegang tahta untuk rakyat, yaitu peranan beliau dalam penempatan tenaga kerja romusha di wilayah Yogyakarta. Pada masa penjajahan Jepang, tenaga romusha disalurkan ke luar Pulau Jawa untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan sarana transportasi, pertanian dan perkebunan untuk kepentingan pemenangan perang bagi pihak Jepang. Sri Sultan HB IX dengan pengaruhnya yang besar terhadap pemerintahan Jepang, mengusulkan agar romusha dari wilayah Yogyakarta dapat mengerjakan proyek-proyek di wilayah Yogyakarta sendiri. Selain itu, Sri Sultan HB IX mengusulkan proyek pembangunan saluran irigasi yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Selokan Mataram. Ide Sri Sultan Hamengku Buwana IX tersebut merupakan gambaran keberpihakan seorang penguasa untuk mensejahterakan rakyat Yogyakarta sekaligus membebaskannya dari kerja paksa atau *romusha* yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang.

Sejak 1946 beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. Beliau menaruh perhatian pada kemajuan petani dengan mendirikan Yayasan Kredir Tani, memperkenalkan Tembakau Virginia, dan membangun Pabrik Gula Madukismo untuk menyejahterakan petani tebu. Dalam pendidikan, beliau merelakan kratonnya menjadi tempat menimba ilmu bagi generasi muda seluruh nusantara. Kampus tersebut kemudian dikenal dengan Universitas Gadjah mada.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari NKRI dimana pilihan dan keputusan tersebut membawa konsekuensi peleburan masyarakat Yogyakarta yang homogen kedalam masyarakat Indonesia yang heterogen dan menjadikan masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Daerah Kasultanan Ngayogyakarta bergabung menjadi satu kesatuan dengan NKRI dan dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Pernyataan bergabungnya Yogyakarta dalam NKRI disebutkan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Setelah pernyataan menggabungkan diri di atas, pada tanggal 6 September 1945 Pemerintah Pusat menyampaikan Piagam Kedudukan yang merupakan pengakuan dan penetapan sebagai jawaban atas amanat tersebut. Dengan latar belakang tersebut, keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai Daerah Istimewa.

Sejarah kedudukan keistimewaan menunjukkan bahwa sejak awal penggabungannya kedalam NKRI, DIY telah memiliki perhatian, komitmen, dan dukungan yang besar atas berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai tonggak sejarah Indonesia secara keseluruhan. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa DIY merupakan pusat perjuangan dimana berbagai peristiwa penting dalam perintisan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI terjadi, bahkan pernah menjadi Ibukota Negara, yaitu pada tanggal 4 Januari 1946-27 Desember 1949.

Eksistensi DIY sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam NKRI secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang ini pada saat yang sama juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, eksistensi DIY sebagai daerah istimewa diakui dan dihormati secara tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sri Sultan Hamengku Buwono X (Kraton Yogyakarta Hadiningrat, 2 April 1946–sekarang) adalah salah seorang raja yang saat ini memimpin di Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 1998. Sri Sultan Hamengku Buwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengku Buwono X adalah seorang lulusan Fakultas Hukum UGM dan dinobatkan sebagai raja pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage, 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Alaga Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Dasa.

Hamengku Buwono X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan diantaranya adalah ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003 beliau ditetapkan lagi, setelah terjadi beberapa pro-kontra, sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003-2008. Kali ini beliau didampingi Wakil Gubernur, yaitu Paku Alam IX.

Keberpihakannya pada rakyat memang terbukti pada 14 Mei 1998, ketika gelombang demonstrasi mahasiswa semakin membesar. Jogja menjadi pelopor gerakan reformasi secara damai, tanpa kekerasan. Pada 19 Mei 1998 Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam VIII menyuarakan “Maklumat Yogyakarta”, yang mendukung gerakan reformasi total dan damai. Sri Sultan HB X dengan Keraton Jogjakarta-nya memang fenomenal. Kedekatannya dengan rakyat, dan karena itu juga kepercayaan rakyat terhadapnya, telah menjadi ciri khas yang mewarisi hingga kini. Di pagi hari yang cerah di hari peringatan Kebangkitan Nasional 1998 itu, mahasiswa berbaris dengan amat tertib menyuarakan “mantra” sakti

reformasi menuju Alun-alun Utara. Mereka pergi untuk mendengarkan maklumat yang akan dibacakan sebagai semacam pernyataan politik Sri Sultan.

Di era reformasi, bersama Gus Dur, Megawati dan Amien Rais, Sultan Hamengku Buwono X menjadi tokoh yang selalu diperhitungkan. Legitimasi mereka berempat sebagai tokoh-tokoh yang dipercaya rakyat bahkan melebihi legitimasi yang dimiliki lembaga formal seperti DPR. Mereka berempat adalah deklarator Ciganjur, yang lahir justru ketika MPR sedang melakukan sidang. Mereka berempat, plus Nurcholis Madjid dan beberapa tokoh nasional lain, diundang Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk ikut mengupayakan keselamatan bangsa, setelah peristiwa kerusuhan di Ambon.

Terkait dengan kepemimpinan di daerah, dalam hal ini kepemimpinan di tingkat provinsi, saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX. Sri Sultan Hamengku Buwono X pada saat ini juga merupakan pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sedangkan Sri Paduka Paku Alam IX adalah pemimpin Kadipaten Pakualaman. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa, serta merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta, dengan demikian maka keduanya merupakan dwi-tunggal yang menjunjung kepemimpinan *hamemayu hayuning bawana.*

Pada tahun 2012 Daerah Istimewa Yogyakarta menapaki periodisasi sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara, atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Selain berlaku sebagai instrumen yuridis, undang-undang tersebut juga menjadi pembeda Pemerintah DIY dari pemda-pemda yang lain.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ini dan kewenangan berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

2.2.1 Karakteristik lokasi dan wilayah

2.2.1.1 Batas Administrasi & Kondisi Geografi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara astronomis terletak antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00' -110°50' Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa Provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia.

Sumber: RTRW Provinsi DIY, 2009-2029

Gambar 2.1 Peta Administrasi DIY

Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2011

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
Kulon Progo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	**Yogyakarta**	**78**	**438**

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wilayah di DIY yang terluas adalah

Kabupaten Gunungkidul, yaitu 46,62% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

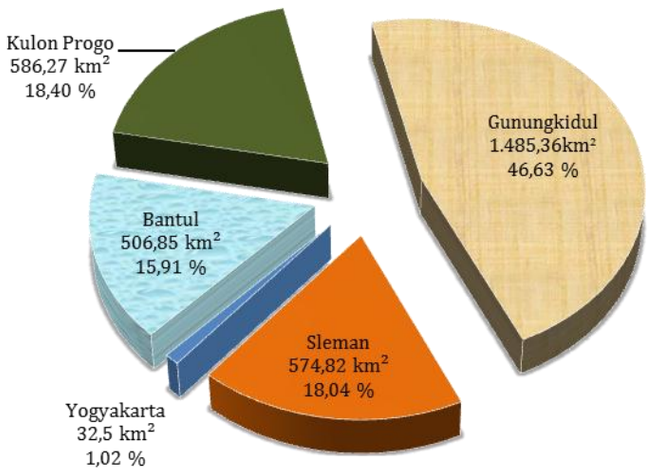

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.2 Komposisi Luas Wilayah DIY

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis DIY

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/ DaerahAlir an Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	-	22	56	88
Bantul	5	-	11	59	75
Gunungkidul	18	-	56	70	144
Sleman	-	-	11	75	86
Yogyakarta	-	-	-	45	45
DIY	**33**	**0**	**100**	**305**	**438**

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Letak DIY yang berada di bagian selatan Pulau Jawa menjadikan DIY berbatasan dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIYmemiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh

2.2.1.2 Topografi

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Penjabarannya antara lain:

a. Kemiringan lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km^2, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km^2, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km^2, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km^2.

b. Ketinggian lahan

Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam.Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km^2, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km^2, ketinggian 80–

2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;

- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

2.2.1.3 Geologi

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06km² atau sekitar27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah alluvial seluas 101,74 km², lithosol 1.052,93km², resina 78,83km², grumusol 349,35km², mediteran 345,40km², dan lathosol 394,49km².

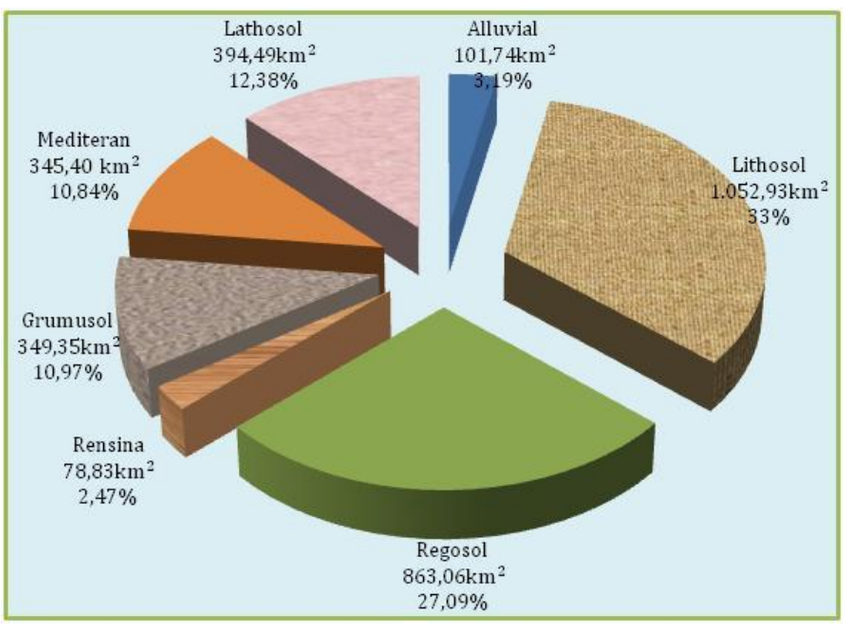

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.3 Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di DIY

2.2.1.4 Hidrologi

Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan sebagai sumber utamanya. Potensi sumberdaya air di DIY terdiri dari air permukaan, dan air tanah. Potensi air permukaan berada di DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, DAS Oyo dan DTA Karst. Sedangkan untuk potensi air tanah adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta, CAT Sleman dan CAT Wates.

Secara umum Provinsi D.I.Yogyakarta dibagi dalam Daerah Aliran Sungai besar dan kecil, yaitu : DAS Progo, Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong, Opak, Serang dan Oya sebagai penyedia sumber air irigasi. Terminologi DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kab. Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah :

a) DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman (DIY), Kabupaten Kulon Progo (DIY) dan Bantul (DIY).

b) DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul (DIY), Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

c) DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Tabel 2.4 Potensi Ketersediaan Air Tahun sampai Tahun 2011(dalam juta m³)

DAS	DAS Serang	DAS Progo	DAS Opak	DAS Oyo	DTA Karst
Volume Air Permukaan	311,59	3.964,59	610,48	1.455,37	1.478,18
Volume Air Tanah	51,12	458,12	432,01	2.224,41	1.013,73
Potensi Sumberdaya Air	362,70	4.422,71	1.042,49	3.679,78	2.491,91

Sumber: Bappeda DIY, 2012

Beberapa sungai yang melintas di wilayah Provinsi DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki pontensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Selain memiliki potensi pemenuhan kebutuhan sumber daya air, beberapa diantaranya juga memiliki potensi daya rusak yang mendapatkan cukup perhatian dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2.5 Debit Rerata Sungai di DIY

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m^3/det)			
	2011		2012	
	Maks	Min	Maks	Min
Sungai Progo (Sta. Karangtalun)	189,50	6,70	107,6	17,9
Sungai Opak (Sta. Tirtorejo)	70,90	0,50	49,50	0,40
Sungai Oyo (Sta. Bunder)	28,0	0,8	17,4	0,3
Sungai Code (Sta. Sidomulyo)	28,85	1,40	8,40	0,90
Sungai Gadjahwong (Sta. Bangerang)	15,50	0,60	3,80	0,40
Sungai Winongo (Sta. Tanjung)	17,60	2,00	9,00	2,00
Sungai Bedog (Sta. Pijenan)	32,20	1,10	62,80	1,80

Sumber: Data BLH dan DPUP-ESDM DIY Diolah, Tahun 2012

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk SBT Bribin sebesar 0,95 m^3/det, SBT Ngobaran 0,70 m^3/det, SBT Seropan 0,80 m^3/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m^3/det.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebalah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan CAT yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km^2, yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Perhitungan volume resapan air tanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka air tanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m^3 /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m^3 air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap air tanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air. Walaupun demikian, menurut Suharyadi (1998), dan Wilopo, (1999) pada beberapa daerah yang bersifat lokal degradasi muka air tanah tercatat cukup signifikan akibat pengumpulan lokasi-lokasi sumur eksploitasi air tanah pada beberapa area.

Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58$m^{3/tahun}$ dan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m^3/tahun. (*Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012)*

Untuk keperluan pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah. (*Dinas PUP PSDM, 2012*)

2.2.1.5 Klimatologi

Suhu udara tahunan di DIY berkisar antara 18°C sampai dengan 24°C. Curah hujan tahunan di DIY berkisar antara 718 mm/th sampai 2292,3 mm/th. Curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan fakta ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah

yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar ditinjau dari banyaknya input dari air hujan.

Kelembaban udara tercatat minimum 31% dan maksimum 97%, tekanan udara antara 986,4–1001,6 mb dengan arah angin antara 1-360 derajat dan kecepatan angin antara 0,0-18 knot.

2.2.2 Penggunaan Lahan

2.2.2.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Kondisi tahun 2011, luas lahan pertanian di DIY adalah 225.888 ha yang terdiri dari sawah seluas 56.491 ha dan bukan sawah 169.397 ha. Lahan sawah terluas berada di Kabupaten Sleman, yaitu 22.786 ha sedangkan di Kota Yogyakarta luas lahan sawah hanya sebesar 83 ha.

Lahan pertanian bukan sawah terluas berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 104.117 ha diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo seluas 35.027 ha, Kabupaten Sleman seluas 16.624 ha, Kabupaten Bantul seluas 13.442 ha, dan Kota Yogyakarta seluas 187 ha.

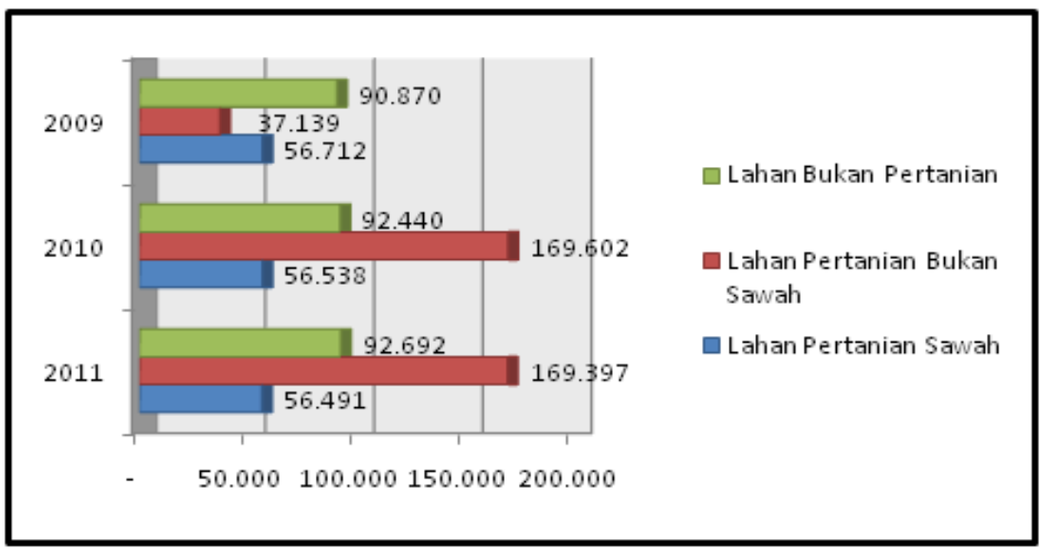

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.4 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian di DIY(hektar), 2009-2011

Sementara itu, lahan bukan pertanian seluas 92.692 ha yang terbagi menjadi lahan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya seluas 50.667 ha, rawa-rawa seluas 8 ha, hutan negara seluas 16.908 ha, dan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dan lain-lain) seluas 25.099 ha.

2.2.2.2 Kawasan Lindung

Menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY No. 2 Tahun 2010, penetapan kawasan lindung bawahan terdiri dari:

1) penetapan hutan lindung seluas 2.312,8000 ha tersebar di tiga kabupaten, yaitu:

a. Kabupaten Bantul seluas 1.041,2000 ha di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri;

b. Kabupaten Kulon Progo seluas 254,9000 ha terletak di Kecamatan Kokap;

c. Kabupaten Gunungkidul seluas 1.016,7000 ha terletak di Kecamatan Karangmojo, Playen, dan Panggang.

2) Penetapan Hutan Fungsi Lindung di:

a. Kabupaten Sleman terletak di Kecamatan Tempel;

b. Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo;

c. Kabupaten Kulon Progo terletak di Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan Temon;

d. Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Gedangsari, Ngawen, dan Semin, dan zone Gunungsewu meliputi Kecamatan Ponjong, Purwosari, dan Rongkop.

3) Penetapan kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Penetapan kawasan lindung setempat, yaitu: 1) kawasan sepadan pantai ditetapkan sepanjang dataran Pantai Selatan; 2) kawasan sepadan sungai di luar kawasan perkotaan ditetapkan pada Sungai Bogowonto, Progo, dan Opak; 3) kawasan sepadan waduk, embung, telaga, dan laguna ditetapkan di kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunungkidul; 4) kawasan sepadan mata air ditetapkan di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan suaka alam DIY yang merupakan bagian dari kawasan lindung ditetapkan sebagai berikut:

1) Cagar alam geologi dan hutan penelitian di Kabupaten Gunungkidul;

2) Cagar alam di Kecamatan Gamping (Kabupaten Sleman) seluas 0,0150 ha dan cagar alam di Kecamatan Imogiri (Kabupaten Bantul) seluas 11,4000 ha;

3) Taman hutan raya terletak di Kecamatan Patuk dan Playen (Kabupaten Gunungkidul) seluas 617 ha;

4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terletak di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan karst menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bentang alam Karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi, akan tetapi masih dilakukan kegiatan penambangan dan pembangunan di lokasi tersebut.

Kondisi tahun 2011, hutan di DIY tercatat seluas 18.715,06 ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 13.411,70 ha, hutan lindung seluas 2.312,80 ha dan hutan konversi seluas 2.990,56 ha. Hutan konservasi terdiri dari Cagar Alam 11,40 ha; Taman Wisata Alam 1.046,00 ha; Suaka Margasatwa 615,60 ha; Taman Nasional 1.729,46 ha; dan Taman Hutan Raya 634,10 ha.

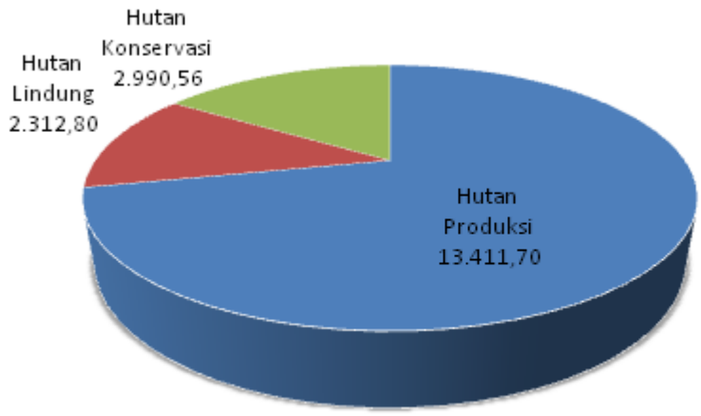

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.5 Luas Hutan menurut Tata Guna Hutan di DIY (hektar), 2011

Hutan di DIY tersebar di empat kabupaten, hutan terluas terletak di Kabupaten Gunungkidul 14.895,50 ha diikuti oleh Kabupaten Sleman 1.729,46 ha; Kabupaten Bantul 1.052,60 ha; dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 ha.

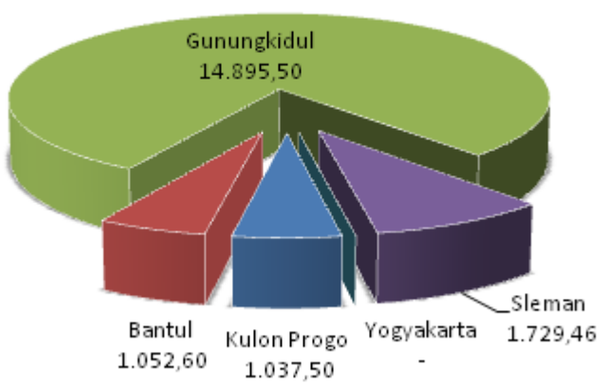

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.6 Luas Hutan menurut Kabupaten/Kota di DIY(hektar), 2011

Sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk, konversi lahan merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah 2007-2012 perubahan lahan terbanyak di DIY adalah dari penggunaan lahan sawah menjadi permukiman, yaitu sebesar 1.080,25 ha. Dari analisa spasial yang ada dapat terungkap bahwa perubahan ini banyak terjadi di sekitar pinggiran kota, khususnya wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang secara adminisratif masuk dalam Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Di daerah sekitar Puncak Gunungapi Merapi banyak areal hutan yang kemudian menjadi semak-belukar dan lahan terbuka, hal ini berkaitan dengan bencana Gunungapi Merapi yang besar di akhir tahun 2010.

2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, kawasan budidaya di DIY terdiri dari:

2.2.3.1 Kawasan Hutan Produksi

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukkan hutan produksi di DIY diantaranya adalah :

a. melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
b. mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
c. mengoptimalkan produktifitas kawasan hutan produksi;
d. mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diarahkan pada:

a. Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810.1000 ha;
b. Kabupaten Kulon Progo seluas 601.6000 ha.

2.2.3.2 Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah:

a. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

a. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
b. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
c. mengoptimalkan produktifitas kawasan kawasan pertanian lahan kering;
d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Penetapan kawasan pertanian di DIY diarahkan sebagai berikut:

a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman;
b. Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

DIY dalam rangka melindungi lahan pertanian abadi dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah mempunyai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha (merupakan lahan inti). Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tersebar di wilayah:

a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

2.2.3.3 Kawasan Pertambangan

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan adalah memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di:

a. kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam;
b. kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan diarahkan sebagai berikut:

a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong, Panggang, dan untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin
b. Kabupaten Kulon Progo yaitu:
   - Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangaan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih;
   - Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.

2.2.3.4 Kawasan Industri

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi a) mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan b) mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran.

Arahan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

2.2.3.5 Kawasan Pariwisata

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata adalah memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam. Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :

a. Kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

c. Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

2.2.3.6 Kawasan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi meliputi a) Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi. Arah penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut:

a. Kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;

b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;

c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

2.2.3.7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan pariwisata, pemanfataan dan pengelolaan potensi laut. Arahan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY, yaitu:

a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul

b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.

2.2.4 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY dan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030, penetapan kawasan rawan bencana alam di DIY adalah sebagai berikut:

1. Kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.

2. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pengunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah

Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.

3. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
4. Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
5. Kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota.

   Bencana alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
6. Kawasan rawan gempa bumi di Kabupten/Kota.

   Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi.
7. Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).
8. Kawasan rawan abrasi di semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo baik pantai tebing maupun pantai pasir.

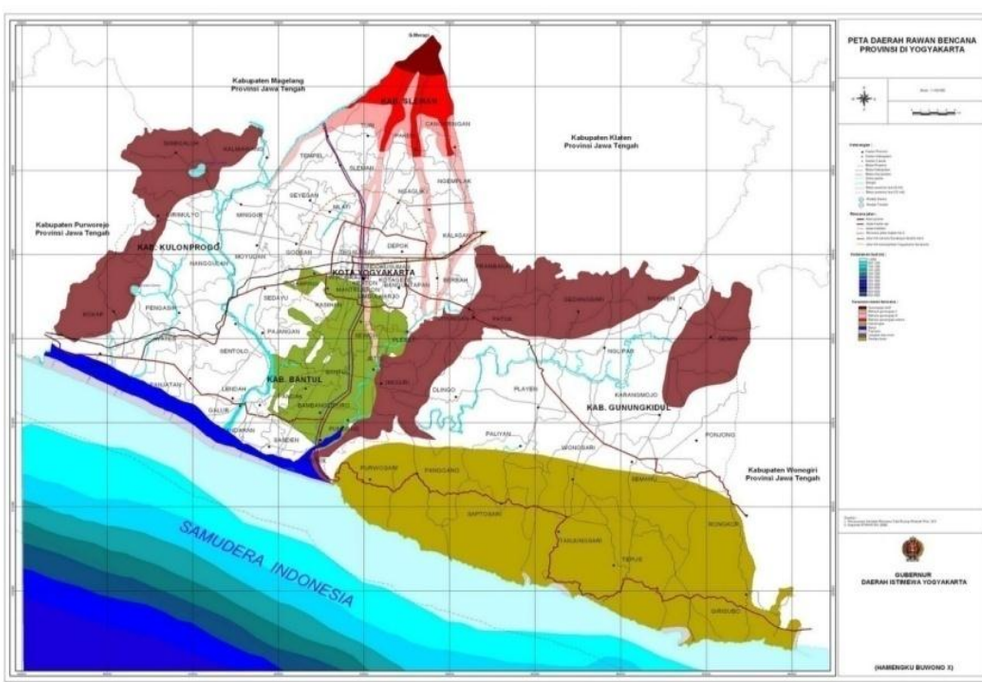

Sumber: RTRW DIY, 2009-2029

Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana DIY

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin tejadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam dan manusia/sosial, baik frekuensi maupun kerawanannya selama ini relatif kecil.

2.2.5 Demografi

2.2.5.1 Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta mengendalikan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan mendorong kegiatan, sepertipenundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program keluarga berencana (KB). Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011.

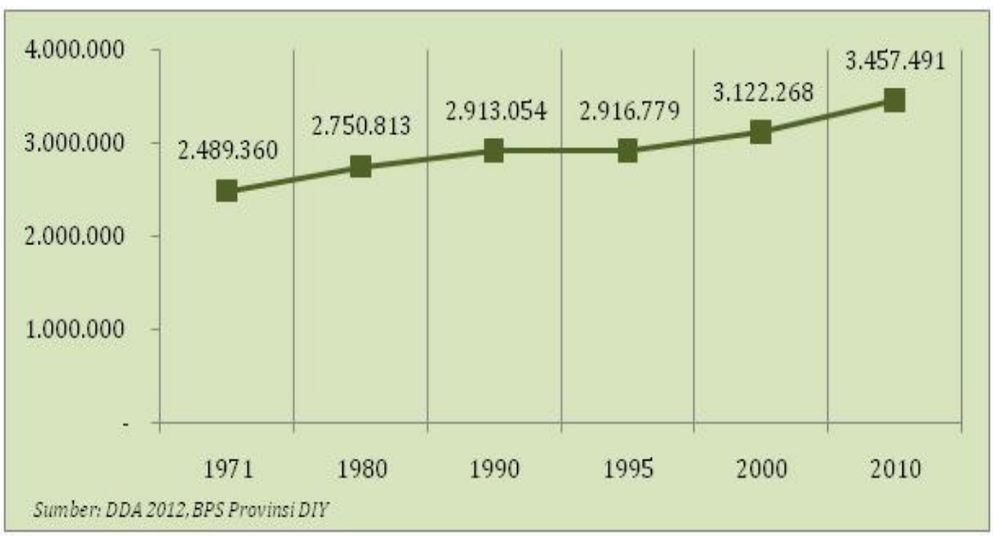

Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Penduduk DIY menurut Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Sensus Penduduk antar Sensus (SUPAS) 1995

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010
0 – 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96
15 – 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53
65 +	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kondisi tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.487.325 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.107.304 orang. Sementara itu Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 390.207 orang.

Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan DIY sebesar 51,36% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 48,64%. Hal tersebutjuga terlihat dari besarnya sex ratio DIY sebesar 94,71% yang berarti bahwa terdapat sekitar 94 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.Wilayah DIY yang memiliki sex ratio tertinggi adalah Kabupaten Bantul, yaitu 100,39% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 89,39%. Untuk Kabupaten Bantul jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.7 Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kulon Progo	190.761	199.446	390.207	95,65
Bantul	461.524	459.739	921.263	100,39
Gunungkidul	320.006	357.992	677.998	89,39
Sleman	534.644	572.660	1.107.304	93,36
Kota Yogyakarta	189.375	201.178	390.553	94,13
DIY	**1.696.310**	**1.791.015**	**3.487.325**	**94,71**

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,86% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,34% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 1,30%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi kearah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan Kota Yogyakarta semakin jenuh untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota.

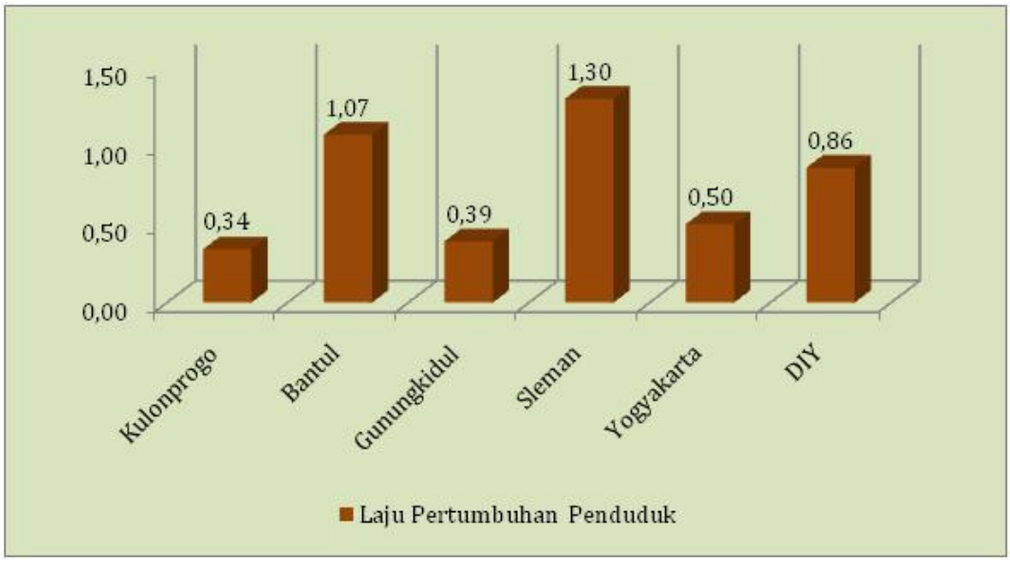

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY (%), 2011

Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2011, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 677.998 orang (19,44%) tercatat sebagai kabupaten berkepadatan penduduk terendah, yaitu 456 orang/km^2, sedangkan Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah terkecil dengan jumlah penduduk 390.553 orang (11,20%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.017 orang/km^2.

Sumber: Bappeda DIY, 2012

Gambar 2.10 Peta Kepadatan Penduduk DIY, 2011

Menurut data proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS, selama kurun waktu 2012-2017 jumlah penduduk DIY akan mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk laki-laki diperkirakan lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan.

Menurut komposisi umur, diperkirakan jumlah penduduk berusia 0-4 tahun, mencerminkan jumlah kelahiran, akan mengalami kenaikkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016-2017. Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) dipererkirakan akan mengalami kenaikkan sehingga perlu diperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk mencegah terjadinya pertambahan pengangguran. Sementara itu, kenaikkan jumlah penduduk usia tua (65 ke atas) menandakan bahwa usia harapan hidup.

Tabel 2.8 Proyeksi Penduduk SP 2000 menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin di DIY, Tahun 2012-2017

Kelompok Umur	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	109,0	104,1	109,6	105,2	109,6	105,6	110,1	105,5	109,2	105,1	109,4	104,3
4-9	104,5	100,6	106,1	101,8	107,1	103,3	108,9	104,4	109,7	104,9	110,1	105,0
10-14	100,3	96,6	101,8	97,6	102,7	97,9	102,5	98,5	105,2	100,3	106,6	102,5
15-19	121,1	113,3	116,1	108,8	110,5	103,6	102,5	98,0	105,3	100,4	107,5	101,5
20-24	155,9	139,2	152,2	137,1	149,8	135,3	148,7	133,8	143,4	127,9	137,0	122,3
25-29	191,6	162,4	186,0	157,2	181,6	153,4	180,4	151,4	173,4	147,4	167,2	144,2
30-34	193,4	168,8	198,3	170,7	199,2	172,0	200,0	170,5	196,4	167,1	191,3	163,0
35-39	148,7	142,4	159,3	148,2	168,2	154,3	175,6	159,2	182,9	163,3	189,3	167,3
40-44	121,0	127,5	122,4	128,3	126,1	129,5	130,9	132,7	137,4	137,4	146,6	142,1
45-49	113,6	123,5	114,0	124,4	114,7	125,5	116,0	125,7	116,9	126,5	119,0	126,3
50-54	103,5	110,5	105,8	113,4	107,5	116,5	108,5	118,7	109,6	120,5	110,7	122,4
55-59	86,3	90,4	88,7	94,3	92,4	97,5	94,6	101,6	97,5	105,5	99,6	108,4
60-64	65,0	71,2	67,2	74,2	71,2	76,3	74,4	79,8	76,3	82,3	79,5	86,3
65-69	49,9	59,0	51,0	60,0	52,0	61,1	53,4	62,8	55,0	64,2	57,3	66,0
70-74	42,0	52,8	42,1	52,8	41,9	53,0	41,3	52,6	41,1	52,9	41,2	53,9
75+	51,3	76,7	51,9	78,8	53,2	80,6	55,1	82,2	56,2	83,7	56,2	85,5
Jumlah	**1.757,1**	**1.739,0**	**1.772,5**	**1.752,8**	**1.787,7**	**1.765,4**	**1.802,9**	**1.777,4**	**1.815,5**	**1.789,4**	**1.828,5**	**1.801,0**

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka IPM DIY merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk DIY. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini salah satunya menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik.

Tabel 2.9 IPM DIY menurut Komponen, 2009-2011

Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	IPM
2009	73,16	90,18	8.78	644,67	75,23
2010	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77
2011	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2011

Angka IPM DIY mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, IPM DIY tercatat sebesar 76,32 naik dari angka IPM tahun 2010 yang sebesar 75,77. Nilai IPM DIY tahun 2011 menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Sementara itu jika dilihat menurut kabupaten/kota, peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

Tabel 2.10 IPM antar Kabupaten/Kota di DIY, 2008-2011

Kabupaten/Kota	IPM			
	2008	2009	2010	2011
Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05
Gunungkidul	70,00	70,18	70,45	70,84
Sleman	77,24	77,70	78,20	78,79
Kota Yogyakarta	78,95	79,29	79,52	79,89
DIY	**74,88**	**75,23**	**75,77**	**76,32**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2011

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB DIY

Selama kurun waktu 2007-2011, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 4,88% per tahun. Kondisi tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,16% yang berarti bahwa kinerja perekonomian DIY mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,88%. Sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, konstruksi, industri dan sektor jasa-jasa, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena wilayah DIY relatif kecil sehingga sumber daya alam yang dimiliki terbatas dan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa. Perekonomian DIY lebih mengandalkan sektor tersier dan terkait dengan aktivitas ekonomi wilayah lain seperti kunjungan wisata serta pelaku ekonomi dari luar DIY. Beberapa komoditas hasil industri kerajinan ada yang langsung dipasarkan ke luar DIY seperti Bali, Jakarta, dan beberapa kota lain yang terkait dengan aktivitas pariwisata.

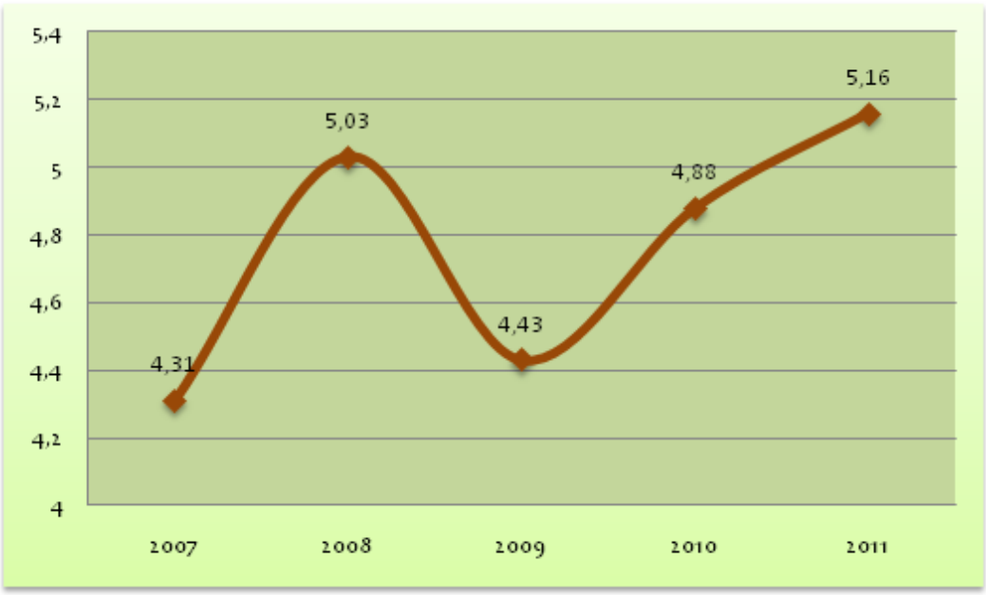

Sumber: BPS DIY, 2012

Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2007-2011

Selama kurun waktu 2007-2011, nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 32,92 trilyun rupiah dan pada tahun 2011 mencapai 51,78 trilyun rupiah yang berarti PDRB DIY secara nominal mengalami kenaikkan sebesar 18,86 trilyun rupiah selama kurun lima tahun tersebut.

Gambar 2.12 Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha(Jutaan Rupiah), 2007-2011

Lapangan Usaha	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	4.941.800	5.993.781	6.366.771	6.644.695	7.370.795
Pertamb. & Penggalian	258.761	280.106	293.983	304.660	361.793
Industri Pengolahan	4.475.680	5.062.275	5.528.856	6.396.639	7.434.020
Listrik, Gas & Air Bersih	423.370	488.334	560.316	607.072	675.912
Konstruksi	3.470.711	4.075.606	4.431.411	4.833.423	5.580.599
Perdagangan, Hotel & Restoran	6.326.700	7.321.299	8.165.613	9.008.181	10.246.578
Pengangkutan & Komunikasi	3.318.453	3.739.697	3.809.094	4.119.970	4.572.928
Keu., Real Estate &Js Perusahaan	3.188.428	3.724.285	4.090.675	4.552.667	5.158.229
Jasa-jasa	6.512.834	7.416.303	8.160.329	9.158.283	10.381.238

Lapangan Usaha	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
PDRB	**32.916.736**	**38.101.684**	**41.407.049**	**45.625.589**	**51.782.092**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Demikian halnya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 selama kurun waktu 2007-2011 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 nilai PDRB riil tercatat sebesar 18,29 trilyun rupiah kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 22,13 trilyun rupiah sehingga selama periode tersebut secara riil PDRB DIY naik sebesar 3,84 trilyun rupiah. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor kecuali sektor pertanian yang mengalami penurunan.

Tabel 2.11 Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usah (Juta Rupiah), 2007-2011

Lapangan Usaha	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	3.333.382	3.523.943	3.642.696	3.632.681	3.555.797
Pertamb. & Penggalian	138.358	138.328	138.748	139.967	156.711
Industri Pengolahan	2.528.020	2.562.549	2.610.760	2.793.580	2.983.167
Listrik, Gas & Air Bersih	165.772	174.933	185.599	193.027	201.243
Konstruksi	1.732.945	1.838.429	1.923.720	2.040.306	2.187.805
Perdagangan, Hotel & Restoran	3.750.365	3.947.662	4.162.116	4.383.851	4.611.402
Pengangkutan & Komunikasi	1.875.307	2.008.919	2.128.594	2.250.664	2.430.696
Keuangan, Real Estate &Jasa Perusahaan	1.695.163	1.793.789	1.903.411	2.024.368	2.185.221
Jasa-jasa	3.072.200	3.223.929	3.368.614	3.585.598	3.817.665
PDRB	**18.291.512**	**19.212.481**	**20.064.257**	**21.044.042**	**22.129.707**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Tabel 2.12 menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB yang dapat menggambarkan seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian. Selama periode 2007-2011 struktur perekonomian DIY didominasi oleh empat sektor, yaitu sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; serta sektor industri pengolahan. Porsi sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor industri pengolahan cenderung meningkat, sedangkan peranan sektor pertanian cenderung menurun. Fenomena ini menunjukkan, bahwa perekonomian DIY mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa.

Penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai akibat menurunnya luas lahan pertanian (konversi) dan kenaikan harga biaya produksi pertanian (saprotan). Bila pada tahun 2007 sektor pertanian masih mempunyai andil sekitar 15,01%, pada tahun 2011 menurun menjadi 14,23%. Lebih cepatnya pertumbuhan diluar sektor pertanian terutama pada sektor tersier berdampak terhadap menurunnya konstribusi sektor pertanian pada tahun 2011.

Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan selama tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan dari 13,60% pada tahun 2007 menjadi 14,36% pada tahun 2011. Pada tahun 2008, kontribusi sektor industri sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh pengaruh kenaikan harga BBM sedangkan pada tahun 2009 perlambatan produksi industri dipengaruhi oleh situasi perekonomian dunia yang kurang kondusif akibat krisis finansial global. Krisis tersebut berdampak pada

menurunnya permintaan ekspor termasuk produk industri DIY. Dampak ini masih terasa pada sektor ini di tahun 2009, sehingga kontribusi sektor industri masih belum banyak bergerak.

Kontribusi sektor konstruksi pada tahun 2011mencapai 10,78% mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2010 yang mencapai 10,59%. Kegiatan pembangunan bangunan tempat tinggal, hotel dan gedung perkantoran serta perbaikan jalan telah mendorong perkembangan sektor konstruksi.

Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2010 menyumbang 19,74%dan tahun 2011 naik menjadi 19,79%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor jasa-jasa dalam perekonomian DIY.

Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian DIY tetapi pada tahun 2009 peranannya sempat tergeser oleh peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2011 peranan sektor jasa-jasa tercatat mencapai 20,05% turun sebesar 0,02% dari tahun 2010 yang sebesar 20,07%.

Tabel 2.12 Distribusi Persentase PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha,2007-2011

Uraian	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pertanian	15,01	15,73	15,38	14,56	14,23
2. Pertambangan & Penggalian	0,79	0,74	0,71	0,67	0,70
3. Industri Pengolahan	13,60	13,29	13,35	14,02	14,36
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,29	1,28	1,35	1,33	1,31
5. Konstruksi	10,54	10,70	10,70	10,59	10,78
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,22	19,22	19,72	19,74	19,79
7. Pengakutan & Komunikasi	10,08	9,82	9,20	9,03	8,83
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9,69	9,77	9,88	9,98	9,96
9. Jasa-Jasa	19,79	19,46	19,71	20,07	20,05
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Tabel 2.13 menunjukkan nilai PDRB DIY menurut penggunaan. Selama kurun waktu 2008-2011 PDRB DIY menurut penggunaan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga; investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga komponen pengeluaran tersebut perkembangannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.13 PDRB DIY ADHB menurut Penggunaan, 2008-2011

Jenis Penggunaan	2008	2009	2010	2011
1. Konsumsi Rumah Tangga	18.615.698	20.610.786	23.198.864	26.319.645
A. Makanan	8.762.853	9.608.852	10.936.141	12.408.752
B. Bukan Makanan	9.852.846	11.001.934	12.262.723	13.910.892
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	924.600	1.171.357	1.437.471	1.724.961
3. Konsumsi Pemerintah	9.727.103	10.789.365	11.709.925	13.056.326
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12.983.264	13 964 317	15.027.836	16.459.379
5. Perubahan Inventori	1.401.260	1.025.286	823.693	859.193
6. Diskrepansi Statistik	545.574	600.545	642.299	1.001.457
7. Ekspor Barang & Jasa :	14.674.509	15.989.976	17.873.357	20.144.557
A. Antar Negara /	1.319.367	1.116.017	1.226.875	1.298.186

Jenis Penggunaan	2008	2009	2010	2011
Luar Negeri				
B. Antar Provinsi	13.355.141	14.873.959	16.646.482	18.846.371
Dikurangi :				
8. Impor Barang &Jasa :	20.770.323	22.744.584	25.087.856	27.783.426
A. Antar Negara / Luar Negeri	627.861	538.717	640.380	637.121
B. Antar Provinsi	20.142.462	22.205.867	24.447.476	27.146.305
P D R B	**38.101.684**	**41.407.049**	**45.625.589**	**51.782.092**

Sumber: BPS Provinsi DIY

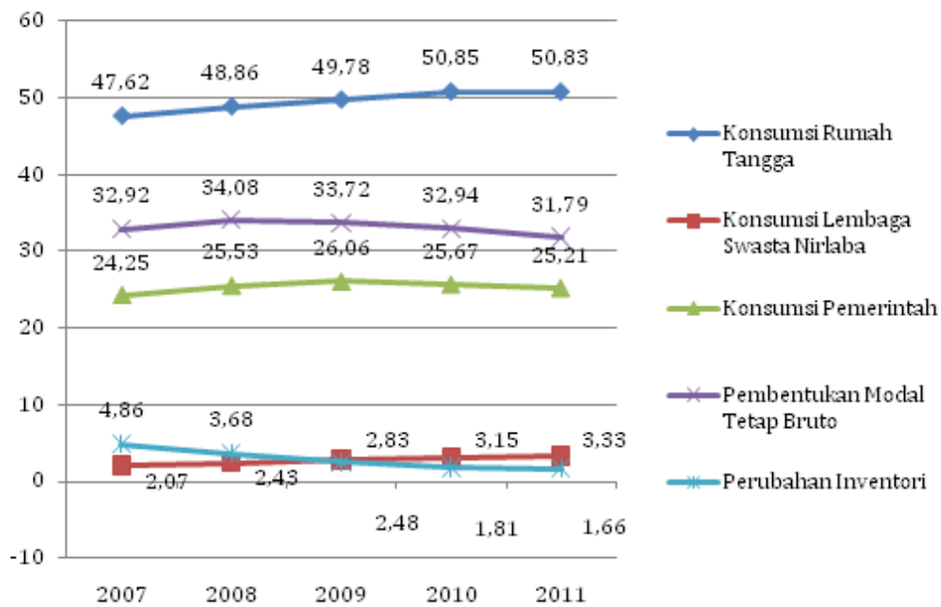

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.13 Distribusi PDRB DIY menurut Penggunaan ADHB (%), 2007-2011

Nilai konsumsi yang dibelanjakan oleh rumah tangga pada tahun 2011 tercatat sebesar 26,32 trilyun rupiah dari total nilai PDRB DIY sebesar 51,78 trilyun rupiah atau mencapai sekitar 50,83%. Persentase tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2010 yang mencapai 50,85%. Relatif tingginya persentase konsumsi rumah tangga dalam PDRB penggunaan menunjukkan bahwa komponen ini masih berperan besar untuk menggerakkan perekonomian.

Selama tahun 2007-2011 nilai PDRB yang berasal dari konsumsi pemerintah secara nominal mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat sebesar 13,06 trilyun rupiah atau memberi andil sekitar 25,21% terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2011.

Nilai investasi fisik (PMTB) DIY tahun 2011 mencapai 16,46 trilyun rupiah atau naik sekitar 1,43 trilyun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 15,03 trilyun rupiah. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di DIY cukup pesat didorong oleh perkembangan sektor konstruksi. Pada tahun 2011 komponen ini tumbuh lebih cepat, yaitu sebesar 4,57% setelah tumbuh 3,41% pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, nilai impor barang dan jasa tahun 2011 tercatat sebesar 27,78 trilyun rupiah, melampaui nilai ekspor pada tahun yang sama,

sehingga nilai ekspor neto DIY bertanda negatif yang berarti barang dan jasa yang diimpor lebih besar dari barang dan jasa yang diekspor ke luar wilayah.Sumbangan impor dalam PDRB cenderung meningkat dari 51,51% pada tahun 2007 menjadi 53,65% tahun 2011.

2.3.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta. Potensi terjadinya kenaikan harga-harga di DIY biasanya terjadi menjelang perayaan hari besar dan musim liburan sekolah yang menyebabkan lonjakan permintaan barang/jasa tertentu. Selain itu, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokkan barang yang kemudian akan memicu kenaikkan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Selama tahun 2007-2012, inflasi Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 9,88% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu 2,93%.

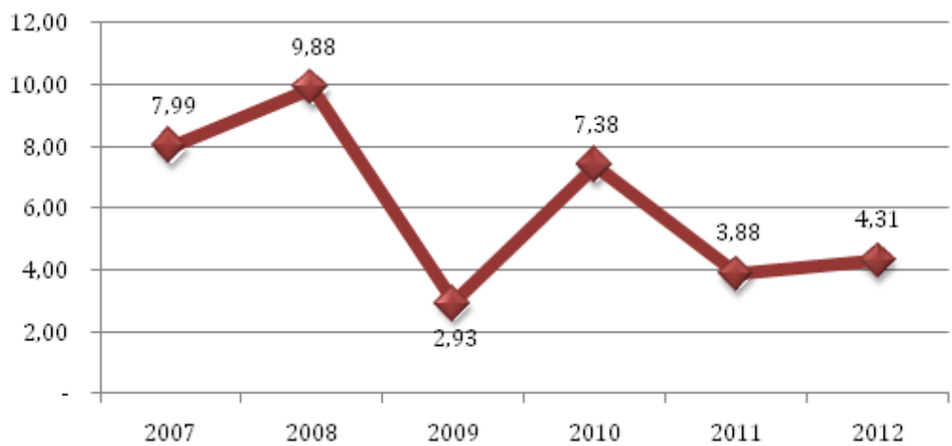

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Gambar 2.14 Perkembangan Laju Inflasi Kota Yogyakarta (%), 2007-2012

Tahun 2011, inflasi Kota Yogyakarta tercatat sebesar 3,88% yang disumbang dari inflasi kelompok pengeluaran sandang sebesar 9,40% dan dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 7,07%.

Kemudian, pada kondisi tahun 2012 inflasi Kota Yogyakarta dilaporkan mengalami kenaikan menjadi 4,31% yang disumbang oleh inflasi pada komponen bahan makanan sebesar 8,10%; komponen makan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 6,90%; dan sandang 3,56%.

Tabel 2.14 Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran 2007-2012

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bahan Makanan	13,30	14,87	3,91	18,86	1,82	8,10
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	7,33	9,40	7,50	5,47	7,07	6,90
3	Perumahan, Air, Listrik,	6,18	13,60	1,40	5,49	3,01	2,99

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Gas & Bahan Bakar						
4	Sandang	9,33	8,36	5,81	5,41	9,40	3,56
5	Kesehatan	4,36	8,23	1,86	1,97	5,64	1,93
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	12,58	5,77	2,26	4,25	1,73	1,43
7	Transportasi & komunikasi	2,99	2,97	(1,23)	5,57	2,40	1,30
	Inflasi Kota Yogyakarta	**7,99**	**9,88**	**2,93**	**7,38**	**3,88**	**4,31**

Sumber: BPSProvinsi DIY, 2012

2.3.1.3 PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita DIY baik secara riil maupun nominal selama tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, nilai PDRB per kapita secara nominal tercatat sebesar 9,80 juta rupiah kemudian naik mencapai 14,85 juta rupiah pada tahun 2011. Sementara itu, secara riil PDRB per kapita pada tahun 2007 sebesar 5,44 juta rupiah naik menjadi 6,35 juta rupiah pada tahun 2011.

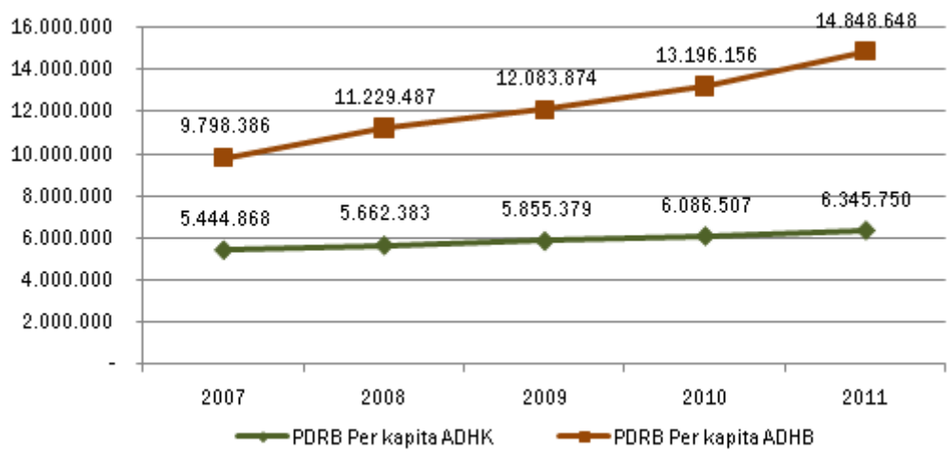

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.15 Nilai PDRB per Kapita DIY (Rupiah), 2007-2011

2.3.1.4 Indeks Gini & Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Indeks Gini dan pemerataan pendapatan menurut ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD) merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk.

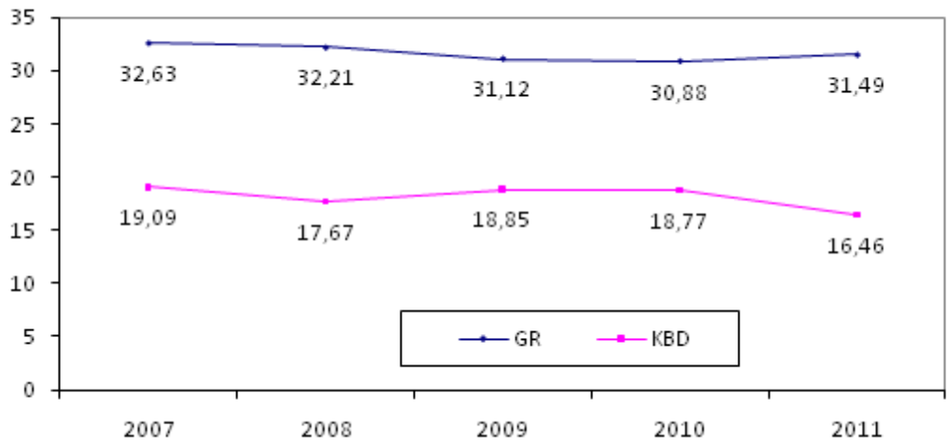

Sumber: Analisis PDRB DIY 2007-2011, Bappeda DIY

Gambar 2.16 Rasio Gini dan KBD (40% Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY (%), 2007-2011

Selama kurun 2007-2011, Rasio Gini cenderung menurun dari 32,63% tahun 2007 menjadi 31,49% tahun 2011. Demikian pula dengan ukuran KBD, persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan terendah memiliki kecenderungan menurun dari 19,09% pada tahun 2007 menjadi 16,46% pada tahun 2011.

Angka Rasio Gini dan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di DIY masih timpang. Namun, ketimpangan pendapatan penduduk DIY masih termasuk kategori ketimpangan sedang.

Tabel 2.15 Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2007-2011

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011
40% penduduk pendapatan terendah	19,09	17,67	18,85	18,77	16,46
40% penduduk pendapatan menengah	37,18	35,35	36,50	35,22	34,19
20% penduduk pendapatan tertinggi	43,73	46,99	44,65	46,02	49,34

Sumber: Analisis PDRB DIY 2007-2011, Bappeda DIY

2.3.1.5 Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan antar wilayah di DIY yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2007-2011 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 44,09% tahun 2007 menjadi 45,44% tahun 2011. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY semakin lebar.

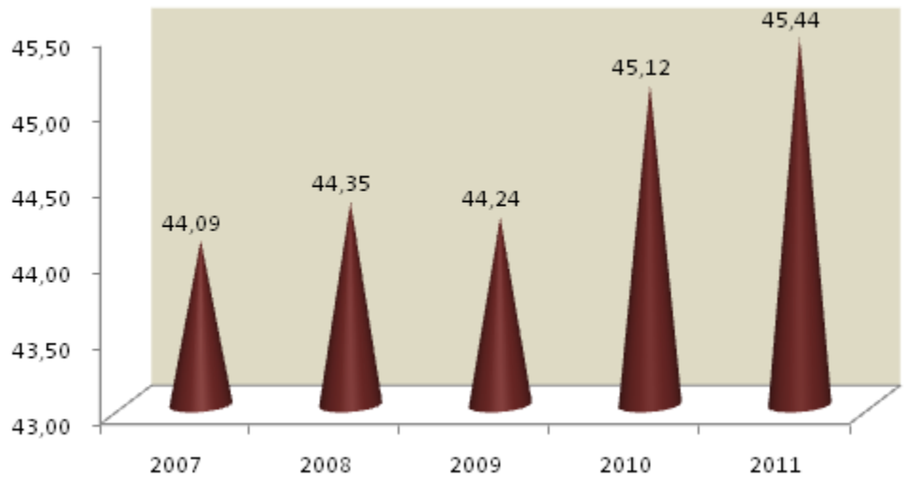

Sumber: Analisis PDRB DIY 2007-2011, Bappeda DIY

Gambar 2.17 Indeks Wiliamson DIY, 2007-2011

2.3.1.6 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan DIY selama periode 2009-2012 mengalami peningkatan. Pada Maret 2009 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar 220.830 rupiah per kapita per bulan. Sementara kondisi tahun 2012, pada posisi Maret tercatat sebesar 260.173 rupiah per kapita per bulan naik menjadi 270.110 rupiah per kapita per bulan pada bulan September sehingga selama enam bulan telah terjadi kenaikkan garis kemiskinan sebesar 3,82%. Kenaikkan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi selama periode tersebut.

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan, 2009-2012

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2009	220.830	574,92	16,86
Maret 2010	234.282	540,40	15,63
Sept 2011	257.909	564,30	16,14
Maret 2012	260.173	565,32	16,05
Sept 2012	270.110	562,11	15,88

Sumber: BPS Provinsi DIY

Jumlah penduduk miskin DIY pada periode Maret 2005- Maret 2012 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2005 jumlah penduduk miskin DIY tercatat sebanyak 625,80 ribu orang mengalami penurunan menjadi 565,32 ribu orang pada Maret 2012.

Kondisi pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin DIY pada posisi bulan September sebanyak 562,11 ribu orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2012 yang jumlahnya mencapai 565,32 ribu orang maka jumlah penduduk miskin DIY dalam 6 bulan turun sebanyak 3,21 ribu orang.

Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2005-2012 tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan DIY pada tahun 2005 tercatat mencapai 18,95% kemudian menurun menjadi 16,05% pada tahun 2012.

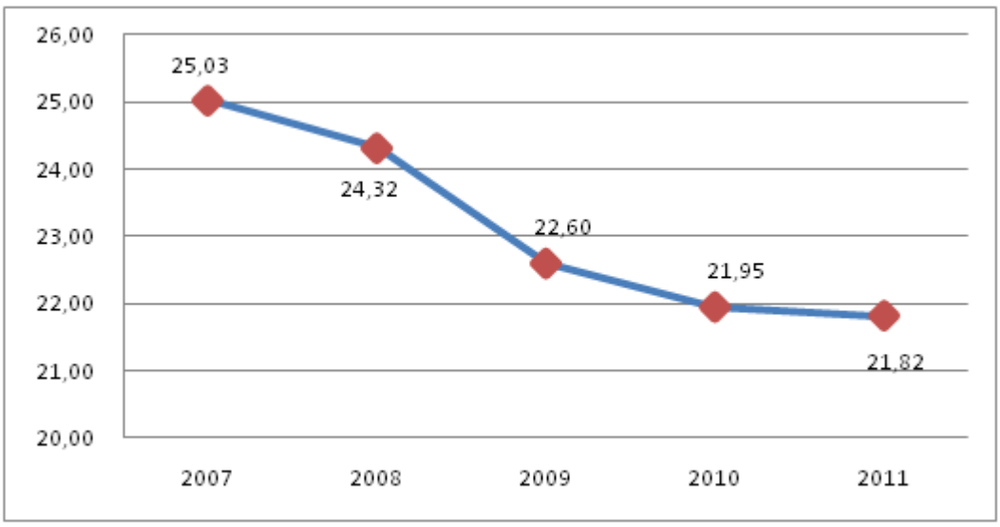

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Desa di DIY, 2007-2011

Selain itu tingkat kemiskinan di pedesaan menunjukkan prosentase yang cukup tinggi daripada tingkat kemiskinan di perkotaan. Data dari BPS tahun 2011 menunjukkan tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 21.82 % dan kemiskinan di perkotaan sebesar 13,16 %. Besarnya tingkat kemiskinan di pedesaan tidak bisa terlepas dari peran sektor pertanian yang menjadi tumpuan utama masyarakat di pedesaan. Untuk itu, revitalisasi sektor pertanian yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di pedesaan. Bahkan semenjak tahun 2005, tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 24,23 % mengalami penurunan menjadi 21,82 % pada tahun 2011.

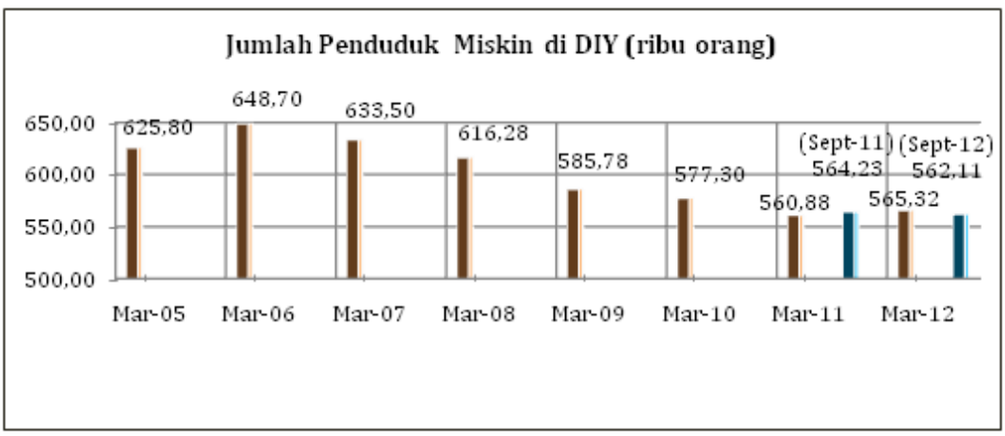

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.19 Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2005-2012

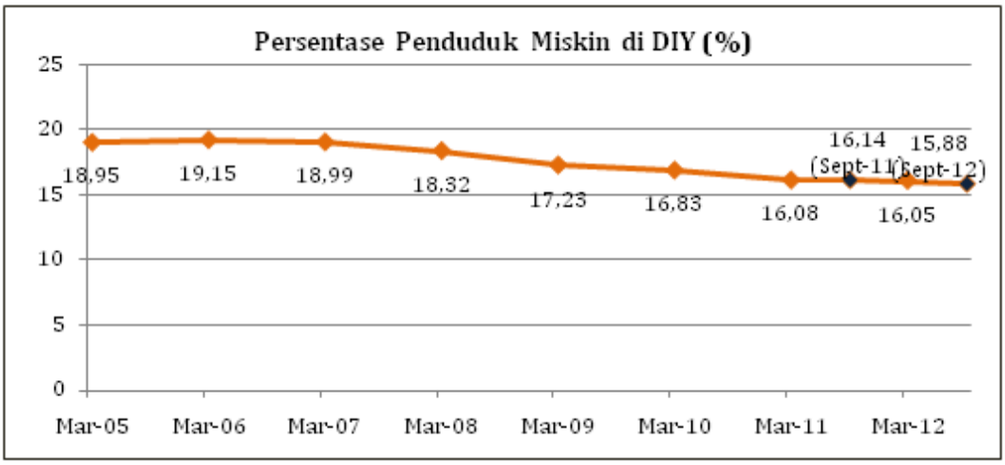

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.20 Persentase Penduduk Miskin DIY, 2005-2012

Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) di DIY selama periode 2009-2012 cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2009 P1 tercatat sebesar 3,52% menurun sampai dengan posisi September 2011 menjadi 2,48% kemudian pada Maret 2012 mengalami kenaikkan menjadi 3,47% dan turun kembali menjadi 2,89% pada September 2012. Demikian halnya dengan indeks keparahan kemiskinan DIY dari 1,04% pada periode Maret 2009 turun menjadi 0,59% pada periode September 2011 kemudian meningkat menjadi 1,14% pada Maret 2012 dan turun menjadi 0,75% pada September 2012.

Penurunan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin mengalami penurunan.

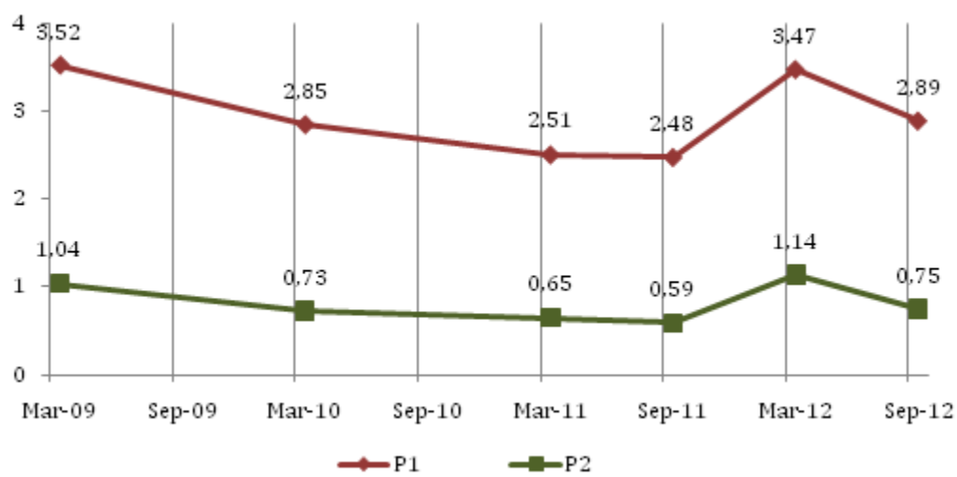

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Kedalaman (P_1) & Indeks Keparahan (P_2) di DIY (%), 2009-2012

2.3.1.7 Jumlah Kejahatan yang terselesaikan

Jumlah kejahatan yang terselesaikan adalah penanganan kejahatan oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah kejahatan yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah kejahatan yang terselesaikan di DIY dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2.17 Jumlah Kejahatan yang Terselesaikan Tahun 2009-2011

Tahun	Jumlah Kejahatan	Terselesaikan	Persentase Kasus Kejahatan Terselesaikan
2009	7.034	2.682	38
2010	7.980	2.728	34
2011	7.123	2.942	41

Sumber : BPS Provinsi DIY

Jumlah kejahatan di DIY dari tahun 2009 sampai dengan 2011 cenderung fluktuatif, meskipun demikian jumlah kejahatan yang terselesaikan dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif.

2.3.1.8 MP3EI Dalam Rangka Mendukung Kesejahteraan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dalam koridor Jawa MP3EI memiliki peran yang strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa. Beberapa program yang mulai dikembangkan sebagai bentuk dukungan DIY terhadap pelaksanaan MP3EI untuk menumbuhkan perekonomian wilayah selatan diantaranya: 1) Pengembangan Bandar Udara Internasional baru; 2) Pengemangan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto; 3) Pengembangan Sektor Kawasan Industri Berbasis Baja; 4) Pengembangan Kawasan Industri Sentolo; 5) Penataan Kawasan Pertumbuhan ekonomi koridor Temon-Wates-Yogyakarta-Prambanan.

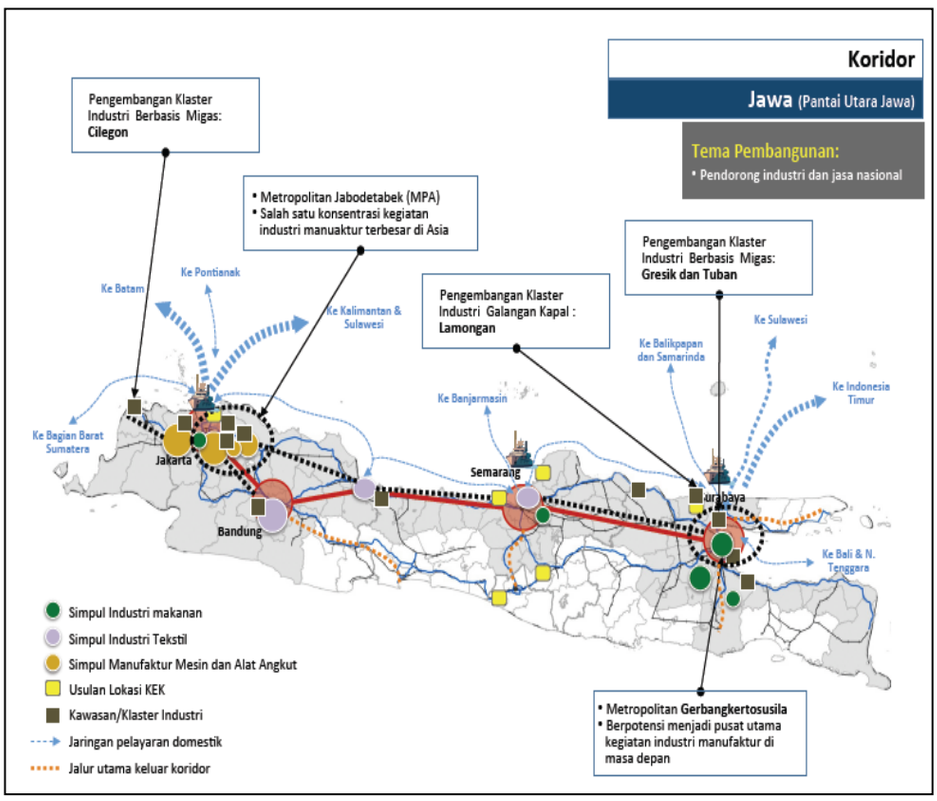

Gambar 2.22 Koridor Jawa MP3EI

Bandar Udara Internasional

Bandar Udara baru sangat dibutuhkan karena DIY merupakan pusat pertumbuhan dan pelayanan di wilayah selatan Jawa, yang menghubungkan antara koridor timur-barat Jawa bagian selatan terutama antara Ponorogo sampai dengan Cilacap, serta koridor utara-selatan Semarang, Magelang dengan Yogyakarta.

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto

Potensi ikan yang dapat dihasilkan dari wilayah laut selatan DIY mencapai ± 320.600 ton per tahun. Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Samudera Indonesia sebesar 900 ribu ton, Selatan Jawa 300 ribu ton, DIY dengan panjang garis pantai 113 km menghasilkan 34 ribu ton. Hasil ikan di DIY setiap tahunnya cukup rendah dibandingkan potensi SDI pada wilayah laut selatan DIY. Hal ini disebabkan belum tertanganinya secara optimal perikanan laut DIY. Disamping untuk kegiatan perikanan di pelabuhan Tanjung Adikarto ada juga kegiatan pariwisata pengendalian banjir tambak dan industri.

Pengembangan Industri Baja Kulon Progo

Salah satu potensi sumber daya alam yang berlimpah di kabupaten Kulon Progo adalah pasir besi di sepanjang 20 km dari muara Sungai Progo sampai muara Sungai Bogowonto (cadangan 240 juta ton). Potensi yang perlu juga dikembangkan adalah sektor kerajinan, makanan dan minuman, dan perkayuan.

Kawasan Industri Sentolo

Kawasan Industri Sentolo yang terletak di Kecamatan Sentolo dan Lendah berada di pinggir Sungai Progo sebelah timur perbatasan Kabupaten Sleman dan Bantul dengan lahan seluas 1.421 ha akan digunakan sebagai lokasi industri kecil dan menengah non polutan. Kawasan industri di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya difokuskan hanya untuk pengembangan potensi internal kabupaten, tetapi juga di fungsikan untuk mengembangkan kegiatan industri yang berada di DIY.

Koridor Temon-Prambanan

Sarana prasarana pendukung kawasan strategi ekonomi yang berada di Kulon Progo adalah jalan yang melintasi kawasan strategi ekonomi yang akan di fungsikan sebagai jalur jalan lintas selatan untuk mengurangi kepadatan di jalur pantai utara, jalur ini mempunyai peran penting dalam memperkuat orientasi arus perdaganan yang berfokus ke tiga arah, yaitu timur (Solo ke Surabaya), utara (Semarang), dan barat (Purwokerto, Jakarta).

Sementara itu, jalur lintas selatan yang ada di pesisir laut selatan mempunyai peran penting dalam memperkuat orientasi arus perdagangan yang berfokus arah timur (Pacitan, Wonogiri), barat (Purworejo dan Cilacap).

Kawasan Industri Berbasis Baja

Kawasan pabrik baja berlokasi di kawasan Lendah dekat dengan lokasi penambangan pasir besi Kabupaten Kulon Progo. Kawasan industri baja ini akan disinergikan dengan serangkaian kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi dan pemrosesannya. Kawasan industri ini direncanakan terdiri dari industri pengolahan, pabrik baja, pabrik besi, dan pabrik baja khusus.

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,18% naik menjadi 90,84% pada tahun 2010 kemudian naik mencapai 91,49% pada tahun 2011. Tahun 2011 masih terdapat 10 persen penduduk DIY yang ditengarai buta huruf. Berdasarkan data BPS, sebagian besar penduduk DIY yang buta huruf adalah penduduk usia 50 tahun keatas.

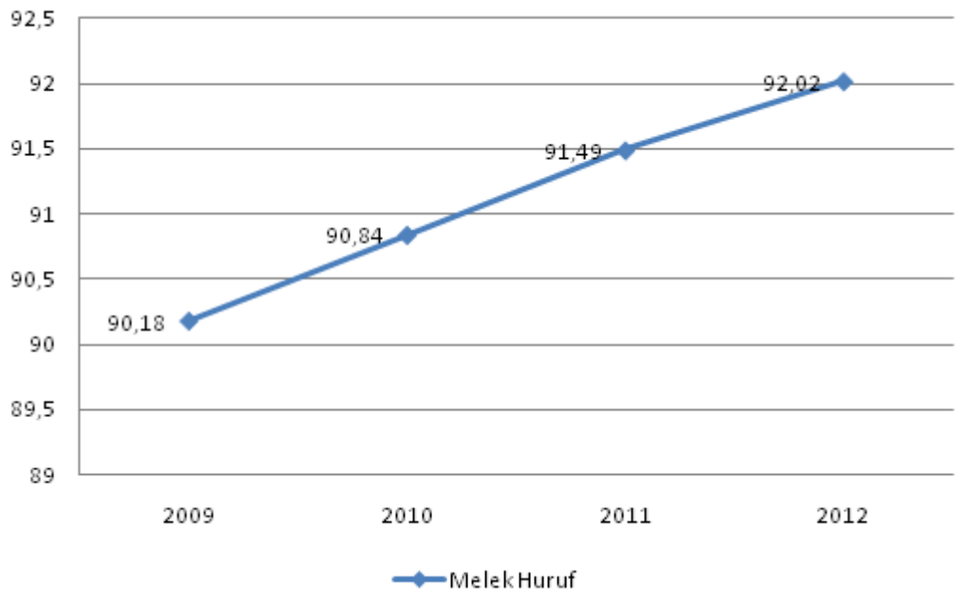

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.23 Angka Melek Huruf DIY, 2009-2012

2.3.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Data tahun 2011 menunjukkan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Yogyakarta, yaitu 11,52; diikuti Kabupaten Sleman 10,51; Kabupaten Bantul 8,92; dan Kabupaten Kulon Progo 8,37 sedangkan angka terendah berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 7,70. Angka rata-rata lama sekolah di DIY dari kurun waktu 2008 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat DIY tentang pentingnya pendidikan cukup tinggi.

Tabel 2.18 Angka Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/ Kota di DIY 2008-2011

Provinsi/Kabupaten	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			
	2008	2009	2010	2011
Kulon Progo	7,80	7,89	8,20	8.37
Bantul	8,55	8,64	8,82	8.92
Gunungkidul	7,60	7,61	7,65	7.70
Sleman	10,10	10,18	10,30	10.51
Kota Yogyakarta	11,42	11,48	11,48	11.52
DIY	**8,71**	**8,78**	**9,07**	**9,20**

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2011

2.3.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Pertisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Dilihat dari APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan relatif meningkat dari tahun ke tahun, sekalipun kenaikan tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan terutama pada upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.APM SD/MI periode 2012/2013 mencapai 97,54 naik dari periode sebelumnya. Jika dilihat APM menurut kabupaten/kota maka APM Kabupaten Gunungkidul masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, APK SD/MI periode 2012/2013 sebesar 111,78 mengalami penurunan dari periode sebelumnya yang mencapai 111,43.

Tabel 2.19 APM SD/MI/Paket A di DIY, 2008/2009 - 2012/2013

Kabupaten/ Kota	APM (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	91,71	91,74	91,71	92,45	92,54
Sleman	100,87	100,97	100,87	101,58	101,59
Gunungkidul	88,72	88,82	88,72	88,45	88,45
Kulon Progo	91,46	91,66	91,46	91,18	90,92
Yogyakarta	121,59	121,89	121,59	122,24	122.93
DIY	**97,15**	**97,45**	**97,15**	**97,53**	**97,54**

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.20 APM SD Tahun 2009/2010 – 2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun 2009/2010 APM Tingkat SD Termasuk Paket A			Tahun 2010/2011 APM Tingkat SD Termasuk Paket A			Tahun 2011/2012 APM Tingkat SD Termasuk Paket A			Tahun 2012/2013 APM Tingkat SD Termasuk Paket A		
		L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
1	Bantul	87,15	77,58	86,72	99,06	84,86	91,71	99,94	85,48	92,45	94,62	90,35	92,54
2	Sleman	93,36	89,18	95,35	101,77	99,92	100,87	103,12	99,96	101,58	103,31	99,77	101,59
3	Gunungkidul	98,96	89,00	93,93	93,63	83,90	88,72	93,35	83,65	88,45	93,35	83,65	88,45
4	Kulon Progo	93,52	89,01	91,30	93,33	89,53	91,46	93,05	89,26	91,18	92,24	89,53	90,92
5	Yogyakarta	117,56	112,84	115,23	130,49	113,29	121,59	131,45	113,66	122,24	124,29	121,49	122,93
	Rata-rata	95,82	88,75	94,75	101,31	92,52	97,15	102,19	92,93	97,53	100,02	94,97	97,54

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.21 APK SD/MI/Paket A di DIY, 2008/2009 – 2012/2013

Kabupaten/ Kota	APK (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	104,75	104,78	104,75	105,29	105,90
Sleman	116,5	116,57	116,50	116,53	117,34
Gunungkidul	100,31	100,38	100,31	100,01	99,80
Kulon Progo	106,91	106,98	106,91	106,58	105,87
Yogyakarta	139,26	139,86	139,26	138,63	140,13
DIY	**111,45**	**112,4**	**111,45**	**111,43**	**111,78**

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.22 APK SD Tahun 2009/2010 – 2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kabupaten/Kota	Tahun 2009/2010			Tahun 2010/2011			Tahun 2011/2012			Tahun 2012/2013		
		APK Tingkat SD Termasuk Paket A			APK Tingkat SD Termasuk Paket A			APK Tingkat SD Termasuk Paket A			APM Tingkat SD Termasuk Paket A		
		L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
1	Bantul	100,29	88,73	99,50	113,60	96,51	104,75	114,05	97,14	105,29	108,46	103,21	105,90
2	Sleman	109,12	103,76	111,20	117,69	115,22	116,50	118,58	114,37	116,53	119,63	114,93	117,34
3	Gunungkidul	112,27	100,56	106,36	106,09	94,65	100,31	105,77	94,36	100,01	105,67	94,04	99,80
4	Kulon Progo	109,52	103,67	106,64	109,55	104,18	106,91	109,22	103,87	106,58	108,01	103,62	105,87
5	Yogyakarta	135,44	130,40	133,12	149,32	129,88	139,26	148,87	129,09	138,63	141,59	138,60	140,13
	Rata-rata	110,68	102,12	109,27	116,77	106,18	111,45	116,97	105,95	111,43	114,89	108,56	111,78

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

APM pada jenjang SMP/MTs di DIY pada periode 2012/2013 mencapai 81,13 meningkat dari periode 2011/2012 yang mencapai 81,08 dan periode 2010/2011 yang mencapai 81,05. Sementara itu, APK SMP/MTs pada periode 2012/2013 mencapai 115,43 naik dari periode sebelumnya.

Tabel 2.23 APM SMP/MTs/Paket B di DIY 2008/2009-2012/2013

Kabupaten/ Kota	APM (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	71,71	82,66	71,71	74,65	75,78
Sleman	81,77	82,66	81,77	79,65	81,85
Gunungkidul	78,22	78,66	78,22	73,97	71,47
Kulon Progo	87,93	81,69	87,93	84,47	82,55
Yogyakarta	95,5	108,58	95,70	105,87	105,99
DIY	**83,03**	**84,70**	**81,05**	**81,08**	**81,13**

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.24 APM SMP Tahun 2009/2010 –2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun 2009/2010			Tahun 2010/2011			Tahun 2011/2012			Tahun 2012/2013		
		APM Tingkat SMP Termasuk Paket B			APM Tingkat SMP Termasuk Paket B			APM Tingkat SMP Termasuk Paket B			APM Tingkat SMP Termasuk Paket B		
		L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
1	Bantul	71,24	65,68	82,66	71,30	72,15	71,71	74,34	74,99	74,65	75,51	76,06	75,78
2	Sleman	57,29	55,58	82,66	82,93	80,57	81,77	80,31	78,96	79,65	82,51	81,15	81,85
3	Gunungkidul	82,77	74,64	78,66	81,47	75,04	78,22	77,05	70,95	73,97	74,55	68,46	71,47
4	Kulon Progo	85,66	77,78	81,69	90,26	85,63	87,93	86,85	82,13	84,47	81,94	83,19	82,55
5	Yogyakarta	110,51	106,68	108,58	85,90	90,65	95,70	111,93	100,10	105,87	109,08	102,88	105,99
	Rata-rata	74,33	69,60	84,70	80,85	79,23	81,05	82,78	79,37	81,08	82,21	80,01	81,13

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.25 APK SMP/MTs/Paket B di DIY 2008/2009 – 2012/2013

Kabupaten/ Kota	APK (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	105,89	112,77	105,89	109,66	106,38
Sleman	114,39	112,05	114,39	113,68	113,72
Gunungkidul	111,93	111,30	111,93	106,65	104,34
Kulon Progo	117,88	118,07	117,88	120,49	124,28
Yogyakarta	130,05	155,35	130,95	141,25	148,78
DIY	**116,03**	**118,01**	**114,32**	**115,50**	**115,43**

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.26 APK SMP Tahun 2009/2010 –2012/2013 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun 2009/2010 APK Tingkat SMP Termasuk Paket B			Tahun 2010/2011 APK Tingkat SMP Termasuk Paket B			Tahun 2011/2012 APK Tingkat SMP Termasuk Paket B			Tahun 2012/2013 APK Tingkat SMP Termasuk Paket B		
		L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
1	Bantul	97,67	89,15	112,77	106,10	105,67	105,89	110,21	109,09	109,66	103,13	109,78	106.38
2	Sleman	78,02	74,96	112,05	115,45	113,30	114,39	114,75	112,57	113,68	112,83	114,65	113,72
3	Gunungkidul	117,13	105,58	111,30	116,90	107,06	111,93	111,55	101,85	106,65	105,04	103,65	104,34
4	Kulon Progo	122,78	113,43	118,07	122,57	113,25	117,88	125,20	115,85	120,49	120,36	128,43	124,28
5	Yogyakarta	158,21	152,51	155,35	136,82	125,32	130,95	147,01	135,77	141,25	148,73	148,82	148,78
	Rata-rata	103,71	96,81	118,01	116,97	111,64	114,32	118,16	112,80	115,50	113,99	116,90	115,43

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, pada tahun 2012/2013 APK menunjukkan angka sebesar 88,04% sedangkan tahun 2011/2012 mengalami penurunan menjadi 88,79%. APM SM/MA pada tahun 2012/2013 sebesar 63,65%, mengalami kenaikan pada tahun 2011/2012 yang mencapai angka sebesar 63,45%.

Tabel 2.27 APM SMA/MA/SMK/Paket C di DIY, 2008/2009 s/d 2012/2013

Kabupaten/ Kota	APM (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	59,80	41.66	54,57	62,36	63,04
Sleman	50,28	55.31	54,06	54,04	55,06
Gunungkidul	49,18	59.80	49,99	51,99	51,99
Kulon Progo	56,10	70.60	63,43	70,66	66,99
Yogyakarta	93,92	98.92	88,18	88,11	88,65
DIY	**60,87**	**60.46**	**60,47**	**63,45**	**63,65**

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.28 APM SMA Tahun 2009/2010 –2012/2013Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun 2009/2010 APM Tingkat SMA Termasuk Paket C			Tahun 2010/2011 APM Tingkat SMA Termasuk Paket C			Tahun 2011/2012 APM Tingkat SMA Termasuk Paket C			Tahun 2012/2013 APM Tingkat SMA Termasuk Paket C		
		L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
1	Bantul	43,95	39,46	41,66	56,32	52,75	54,57	64,90	59,72	62,36	66,93	59,07	63,04
2	Sleman	44,48	70,25	55,31	53,02	55,09	54,06	52,91	55,91	54,04	52,77	57,39	55,06
3	Gunungkidul	67,05	52,69	59,80	52,47	47,56	49,99	54,48	49,55	51,99	53,45	50,49	51,99
4	Kulon Progo	74,60	66,36	70,60	62,05	65,03	63,43	69,60	71,89	70,66	69,60	64,34	66,99
5	Yogyakarta	110,83	88,52	98,92	90,49	86,04	88,18	89,94	86,42	88,11	86,83	90,50	88,65
	Rata-rata	60,79	60,11	60,46	61,12	59,81	60,47	64,31	62,58	63,45	64,13	63,17	63,65

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.29 APK SMA/MA/SMK/Paket C di DIY, 2008/2009 s/d 2012/2013

Kabupaten/ Kota	APK (%)				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Bantul	82,45	56.92	83,01	85,94	85,15
Sleman	75,72	81.93	76,59	76,56	77,35
Gunungkidul	68,96	84.32	71,37	71,22	70,46
Kulon Progo	87,84	114.70	93,14	92,77	93,63
Yogyakarta	131,23	143.01	130,03	129,49	124,23
DIY	**87,06**	**87.90**	**88,33**	**88,79**	**88,04**

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Tabel 2.30 APK SMA Tahun 2009/2010 –2012/2013 Berdasarkan Jenis

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun 2009/2010 APK Tingkat SMA Termasuk Paket C			Tahun 2010/2011 APK Tingkat SMA Termasuk Paket C			Tahun 2011/2012 APK Tingkat SMA Termasuk Paket C			Tahun 2012/2013 APK Tingkat SMA Termasuk Paket C		
		L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
1	Bantul	62,61	59,44	56,92	81,47	82,79	83,01	85,63	86,26	85,94	84,74	85,57	85,15
2	Sleman	66,99	99,09	81,93	74,99	78,18	76,59	74,70	78,39	76,56	75,27	79,47	77,35
3	Gunungkidul	81,79	73,71	84,32	75,08	67,74	71,37	74,44	68,06	71,22	72,06	68,83	70,46
4	Kulon Progo	105,34	102,40	114,70	86,35	101,03	93,14	85,63	101,07	92,77	97,59	89,59	93,63
5	Yogyakarta	166,44	141,89	143,01	134,72	125,68	130,03	134,52	124,81	129,49	122,67	125,82	124,23
	Rata-rata	86,29	89,60	87,90	87,96	88,30	88,33	88,57	89,00	88,79	87,83	88,24	88,04

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

2.3.2.4 Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di DIY selama kurun waktu 2007-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Angka Kelulusan menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2007-2012

Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SD/MI	98,85	99,65	98,18	96,47	98,53	98,69
SMP/MTs	99,92	90,18	90,15	81,84	98,28	98,46
SMA/MA/SMK	98,17	88,68	95,32	88,98	99,61	98,74

Sumber: Disdikpora DIY, 2012

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kelulusan yang sangat signifikan. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI cukup stabil.

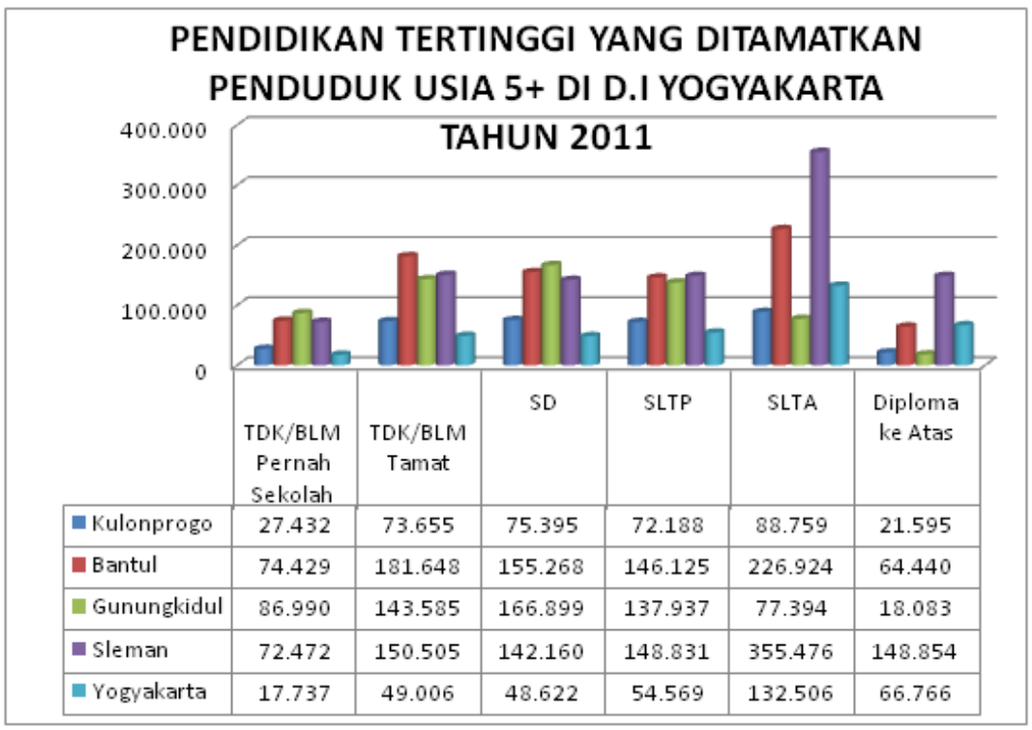

	TDK/BLM Pernah Sekolah	TDK/BLM Tamat	SD	SLTP	SLTA	Diploma ke Atas
Kulonprogo	27.432	73.655	75.395	72.188	88.759	21.595
Bantul	74.429	181.648	155.268	146.125	226.924	64.440
Gunungkidul	86.990	143.585	166.899	137.937	77.394	18.083
Sleman	72.472	150.505	142.160	148.831	355.476	148.854
Yogyakarta	17.737	49.006	48.622	54.569	132.506	66.766

Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2.24 Rekapitulasi Pendidikan yang ditamatkan dari SD s/d Diploma ke atas menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Jumlah pendidikan yang ditamatkan tingkat SD adalah di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan jumlah terbesar tingkat SMP, SLTA dan Diploma ke atas adalah di Kabupaten Sleman. Pendidikan yang ditamatkan tingkat SD dan SMP relatif hampir sama jumlahnya di masing-masing kabupaten/kota sementara Tingkat SLTA dan Diploma ke atas terjadi disparitas antar kabupaten/kota.

2.3.2.5 Angka Kematian Bayi (AKB)

Menurut data BPS, Angka Kematian Bayi (AKB) di DIY tahun 2010 adalah 17 bayi mati per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan yang terbaik

secara nasional. Berikut data perkembangan Angka Kematian Bayi DIY berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS:

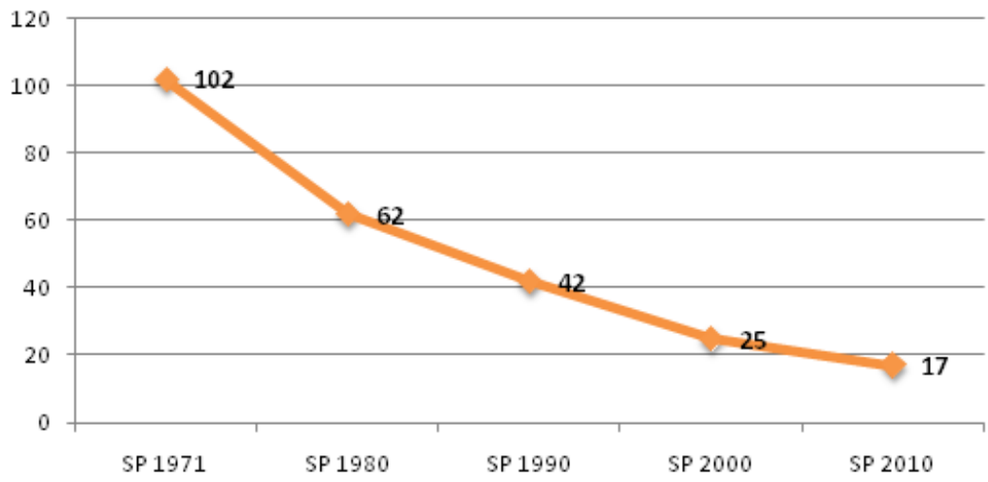

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.25 Angka Kematian Bayi di DIY Berdasarkan Sensus Penduduk 1971-2010

Gambar diatas menunjukkan terjadi penurunan AKB yang signifikan selama kurun 1971-2010. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya AKB di DIY antara lain kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan, persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dan peningkatan kesadaran ibu hamil dalam melakukan kunjungan kehamilan.

Walaupun AKB di DIY tergolong rendah tetapi berdasarkan laporan data jumlah kematian bayi terdapat peningkatan dari tahun 2010 sebesar 346 jumlah kematian bayi dari 43.048 kelahiran hidup menjadi 419 jumlah kemtian bayi dari 44.829 kelahiran hidup di tahun 2011. Jumlah kematian bayi dan jumlah kelahiran hidup tahun 2010 -2011 di DIY disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.32 Jumlah Kematian Bayi di bawah Usia 1 Tahun dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY 2010-2011

Kabupaten/ Kota	2010		2011	
	Kematian Bayi Di Bawah Usia 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Kematian Bayi Di Bawah Usia 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup
Yogyakarta	40	4559	45	4774
Bantul	120	12185	114	13446
Kulon Progo	56	5717	73	5702
Gunungkidul	63	8996	123	8684
Sleman	67	11591	64	12223
DIY	**346**	**43.048**	**419**	**44.839**

Sumber : Dinkes DIY, 2010-2011

2.3.2.6 Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi.

Berdasarkan data dari BPS, Angka Usia Harapan Hidup di DIY mengalami peningkatandari tahun ke tahun. Perkembangan angka usia harapan hidup DIY disajikan dalam gambar sebagai berikut:

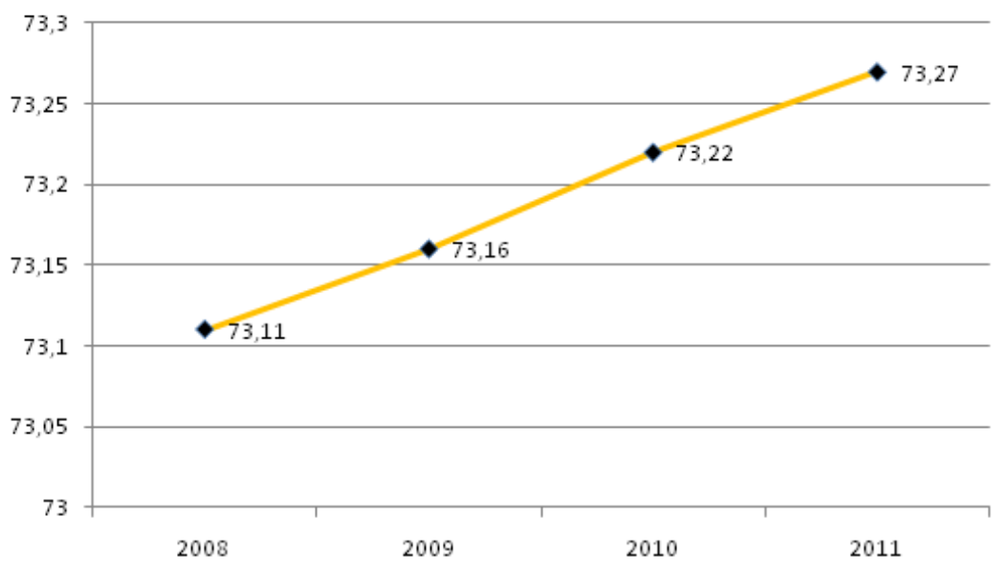

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.26 Angka Usia Harapan Hidup DIY, 2008-2011

Angka harapan hidup di DIY merupakan yang terbaik di Indonesia. Rata-rata nasional angka usia harapan hidup adalah 68. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup masyarakat DIY.

2.3.2.7 Pendukung Kesejahteraan Sosial

DIY memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan melalui program-program prioritas seperti MDGs, Jamkesmas, dan MP3KI (*Masterplan* Perluasan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia).

Millenium Development Goals (MDG's)

Millenium Development Goals (MDG's) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Memuat tujuh tujuan, yaitu: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurukan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; dan (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta turut berkomitmen dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDG's pada tahun 2015 dengan meyusun Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goal's (RAD MDG's), melalui Surat Keputusan Gubernur (SK GUB) Nomor 56 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Rencana Aksi Daerah pencapaian target MDG's (Millenium Development Goals).

Pengarusutamaan MDG's dilakukan dalam proses perencanaan daerah dan diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik daerah dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDG's kemudian diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu dalam RPJMD dan renstra SKPD.

Upaya monitoring dan evaluasi juga telah dilakukan secara periodik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui tim yang ditugaskan berdasarkan SK Gubernur Nomor 36.2/TIM/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDG's. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target MDG's selaras dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.

Rencana Aksi Daerah MDG's Provinsi DIY disusun secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan. Dengan memperhatikan kecenderungan dan capaian target-target MDG's, pencapaian MDG's sampai saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori pencapaian MDGs, meliputi : (a) target yang telah tercapai (lebih baik dari capaian nasional dan target nasional tahun 2015); (b) target yang akan tercapai pada tahun 2015; dan (c) target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Kondisi capaian tersebut merupakan landasan penting bagi upaya perumusan kebijakan, strategi, sasaran, program maupun kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan MDG's tahun 2015. Terhadap target yang telah tercapai, DIY menetapkan target baru yang lebih baik dari target nasional 2015. Rekapitulasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD pada tahun 2012 dengan rincian ada 6 indikator yang masih memerlukan perhatian serius, 26 indikator akan tercapai dan 13 indikator pada tahun 2012 ini sudah tercapai bahkan ada yang telah melampaui target nasional pada tahun 2015.

Tabel 2.33 Capaian Rencana Aksi Daerah MDG's Tahun 2012

No	Indikator	Target 2015	Capaian 2012	Status
1	Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional	10,3	16,08	▼
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,5	2,79	▶
3	Proporsi Tenaga Kerja Berusaha Sendiri & Pekerja Bebas Terhadap Total Kesempatan Kerja	Menurun	22	▶
4	Prevalensi Balita Berat Badan Rendah	<10	8,95	▶
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	<1	0,59	▶
6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	11,9	8,36	▶
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100%	97,53%	▶
8	Proporsi Murid Kelas 1 yang Menamatkan SD/MI/Paket A	100%	98,47%	▶
9	Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun	100%	100%	●
10	APM SMP/MTs/Paket B	84%	81,08%	▶
11	Rasio APM Laki Perempuan SD/MI	100%	100%	●
12	Rasio APM Laki Perempuan SMP	100%	100%	●
13	Rasio Melek Huruf Perempuan thd Laki (15-24th)	100%	100%	●
14	Kontribusi Perempuan di Sektor Non Pertanian	39,86	Meningkat	▶
15	Proporsi Kursi diduduki Perempuan di DPRD	30%	24,49%	▶
16	AKBalita/1000 Kelahiran Hidup	16	19	▶
17	AKBayi/1000 Kelahiran Hidup	16	17	▶
18	Proporsi Anak Usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100%	73,92%	▶
19	AKI/100.000 Kelahiran Hidup	100	101	●
20	Proporsi Kelahiran ditolong Nakes Terlatih	99%	99,85%	●
21	Angka CPR pada Perempuan Menikah 15-24 Tahun	80%	78,56%	▶
22	Tingkat Kelahiran Pada Remaja	24 per 1000	-	▼
23	Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)	95%	93,31%	▶
24	*Unmet Need* KB	5%	9,04%	▼
25	Prevalensi HIV	>0,5%	0,19%	▶
26	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Resiko Tinggi	50%lk;50%pr	27,40%	▼
27	Proporsi Penduduk 15-24 tahun memiliki Pengetahuan AIDS	80%	78%	▶
28	Proporsi Penduduk dengan HIV AIDS memiliki akses obat anti retroviral	90%	80%	▶
29	Angka Kejadian TB	Menurun	58%	●
30	Tingkat Prevalensi TB	Menurun	28	●
31	Tingkat Kematian TB	Menurun	4	●
32	Proporsi Kasus TB ditemukan melalui DOTS	70%	59%	▶
33	Angka Kejadian Malaria	0,0017	0,015	▶
34	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	100%	100%	●

No	Indikator	Target 2015	Capaian 2012	Status
35	Rasio kawasan tertutup pohon hasil potret citra	50	40,25	▶
36	Jumlah Emisi Karbon	5.052.162 GGCo2e	5.667.672 GGCO2e	▼
37	Jumlah Konsumsi BPO	24,5 Metrik Ton CFc	30,05 Metrik Ton CFC	▼
38	Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap total luas kawasan Hutan	29%	28,50%	▶
39	Rasio Kawasan Lindung Perairan	5 Ha	0 Ha	▼
40	Proporsi RT terhadap Air Minum Layak Kota dan Desa	100%	69,46%	▶
41	Proporsi RT terhadap Sanitasi Layak Perkotaan dan Perdesaan	100%	85,41%	▶
42	Proporsi RT Kumuh Perkotaan	3,01	4,15	▶
		▼	▶	●
		Perlu Perhatian	**Akan Tercapai**	**Telah Tercapai**

Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta)

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera, adil dan makmur, Gubernur dan Bupati/Walikota se- Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Semesta atau disingkat Jamkesta. Salah satu tindak lanjut komitmen tersebut disusunlah Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY yang meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi. Tujuan diselenggarakannya Jamkesta adalah memberikan wadah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan kepada penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan jaminan kesehatan, secara terintegrasi.

Jamkesta diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk paket pemeliharaan kesehatan.

Berikut adalah data penduduk berdasarkan kepesertaan jaminan kesehatan di DIY tahun 2011.

Tabel 2.34 Penduduk Berdasarkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di DIY Tahun 2011

Kabupaten/ Kota	Program Jaminan Kesehatan							Jumlah	Jml Pddk	Belum Dijamin
	Askes-PNS	Jamsostek	Jamkesmas	Jamkesos	Jamkesda	Asabri	Komersial			
Yogyakarta	77.707	24.370	68.456	24.978	171.799	9.650	4.526	381.486	469.721	88.235
Bantul	84.850	9.537	222.987	102.654	-	5.240	6.893	432.161	935.519	503.358
Kulon Progo	49.524	3.013	141.893	60.479	25.000	3.450	3.238	286.597	385.549	98.952
Gunungkidul	41.330	607	340.635	88.570	-	1.250	1.824	474.216	706.187	231.971
Sleman	132.905	25.792	168.158	26.000	164.238	4.503	10.996	532.592	1.069.623	537.031
TOTAL	386.316	63.319	942.129	302.681	361.037	24.093	27.477	2.107.052	3.566.600	1.459.548

Sumber: Bapeljamkesos, Dinas Kesehatan DIY, 2011

Dalam mewujudkan *total coverage* jaminan kesehatan di DIY, Pemda DIY bersama Pemerintah Kota/Kabupaten di DIY sepakat untuk melaksanakan suatu program pembiayaan kesehatan bersama yang disebut dengan *Coordination of Benefit* (CoB). Berikut adalah data kepesertaan CoB 2012 – 2013:

Tabel 2.35 Data Kepesertaan CoB, Tahun 2012-2013

Kab/Kota	Peserta CoB	
	2012	2013
Kota Yogyakarta		28.000
Kab Bantul	60.815	200.000
Kab Kulon Progo	62.057	185.953
Kab Gunungkidul	77.128	173.913
Kab Sleman	50.000	75.000

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

Masterplan Perluasan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)

Dalam rangka memaksimalkan manfaat *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Pemerintah sedang menyiapkan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). MP3KI merupakan *affirmative action* sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya *pro-growth*, tetapi juga *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*, termasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Guna mendukung MP3KI di DIY, maka melalui Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dilakukan koordinasi dan penguatan pembangunan yang sinergis, inklusif dan berkeadilan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah DIY. Upaya yang dilakukan di antaraya melalui percepatan penurunan angka kemiskinan di DIY yang ditargetkan setiap tahunnya sebesar 2%. Selain itu juga dilakukan pelembagaan TKPKD di masing-masing wilayah sampai tingkat dusun.

Program utama dalam penanggulangan kemiskinan di DIY, yaitu program pemberdayaan masyarakat UED–SP, BKD, UKM, Desa Priama, UPPKS, PNPM Mandiri, Pedesaan, TMMD, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, KPM, PKK, P2WKSS, Kube, BOSDA, PKH, dan Beasiswa Miskin.

Guna memantapkan upaya penanggulangan kemiskinan di DIY, maka dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan juga bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga perguruan tinggi, dunia industri perbankan, NGO/ LSM masyarakat, dan media.

Grand Design Kependudukan

Terdapat tiga hal penting mengenai struktur penduduk DI. Yogyakarta, pertama, telah lama struktur penduduk DI. Yogyakarta berada pada Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang ditandai dengan rendahnya TFR dan laju pertumbuhan penduduk. Hasil SP 2010 kondisi kependudukan memasuki fase krusial ditandai dengan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk meningkat. Terlepas dari berbagai perbedaan dalam interpretasi, hal ini perlu dicermati dan diantisipasi dengan kebijakan tepat. Kedua, kebijakan kependudukan di DIY. belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Ketiga, pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang di Daerah Istimewa Yogyakarta belum diikuti dengan

penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Memperhatikan ketiga persoalan mendasar tersebut, maka disusunlah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan untuk dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan di DIY. Dalam hal ini meliputi *road map*:

a. Pengendalian Kuantitas penduduk
b. Pembangunan keluarga
c. Pengarahan mobilitas penduduk
d. Pembangunan data dan informasi kependudukan

2.3.3 Fokus Budaya, Pemuda dan Olahraga

2.3.3.1 Budaya

Budaya pada hakekatnya adalah cipta, rasa dan karsa yang mengakar pada masyarakat. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang berisi 16 Bab dan 51 Pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dengan penetapan lewat DPRD, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Untuk melaksanakan kewenangan keistimewaan itu akan diatur melalui Perda Istimewa. DIY menyongsong Peradaban Baru Yogyakarta dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

Yogyakarta didesain oleh Pangeran Mangkubumi dengan tata nilai keruangan dan arsitektur berkonsep "*Catur Gatra Tunggal*": Kraton-Masjid Agung-Pasar Beringhardja-Alun-Alun Utara, mewujudkannya dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan akan menjadi ciri khas Keistimewaan Yogyakarta yang akan menjadi pembelajaran kearifan lokal oleh banyak pihak.

Dalam konstelasi "Catur Gatra Tunggal", Kraton dapat diidentikkan dengan Pemerintah Daerah yang memiliki sifat dan sikap seorang *Satriya*, yang telah dijadikan budaya pemerintahan. Budaya kerja ini mewajibkan bagi setiap Abdi Negara sebagai Abdi Masyarakat, untuk bersikap dan bertindak dengan selalu mencerminkan sifat-sifat keutamaan seorang *Satriya*, yaitu "Selaras, Akal-budi luhur, keTeladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya, Ahli dan profesional", yang berlandaskan falsafah hidup: "*sawiji, greget, sengguh, ora-mingkuh*".

Harmoni Kraton-Masjid Agung dapat dibayangkan dalam pemerintahan Kasultanan Demak adanya Dwitunggal Sultan-Sunan, yang sekarang harus diwujudkan dalam harmoni hubungan '*ulama-umara*'. Akan tetapi, kenyataanya ketika hubungan Sultan dan Sunan belum dapat diwujudkan dengan mantap, Belanda sudah menguasai semua keadaan. Sekarang ini, kaum ulama dituntut tidak hanya mengajarkan kesalehan ritual saja, tetapi juga meneladankan kesalehan sosial dan kesalehan publik.

Pasar Beringhardja adalah metafora sistem pasar yang akan kita anut: apakah menganut paham liberalisme dengan sistem *free-trade*, atau memilih *fair-trade*. Jika benar-benar mengikuti paham *fair-trade*, maka program ekonomi kerakyatan harus diwujudkan sebagai gerakan, bukan berhenti di slogan.

Sedangkan Alun-Alun Utara adalah ruang publik dimana suara rakyat diungkapkan dan diekspresikan sebagai pengejawantahan asas demokrasi.

Dalam Sila Keempat Pancasila, yaitu "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*".

Tujuannya untuk mencapai musyawarah dan mufakat berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Keterlibatan warga merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama *antaride* dan antarpihak, sedangkan kata kunci demokrasi perwakilan adalah kompetisi *antaride* dan antarkelompok. Jika demokrasi perwakilan ditandai oleh kompetisi politik, kemenangan, dan kekalahan satu pihak, maka demokrasi deliberatif lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling menghormati, serta berupaya mencapai titik temu dan mufakat.

Yogyakarta adalah keluasan Bumi Mataram artinya Bumi Ibu. Demikian juga Yogyakarta, yang berpijak di Bumi Mataram, sejak berada di Kota Revolusi ini sejatinya adalah "*Ibu Asuh*" dari Republik Indonesia. Sebagai negeri yang bermatra semesta, yang dihidupi oleh filosofi "*Hamemayu Hayuning Bawana*", mengharuskan Yogyakarta untuk selalu hadir memberikan sumbangsih kepada dunia, dan juga sebaliknya, menerima dunia dalam dirinya. Kerelaan untuk berbagi dan menerima dalam ranah budaya itu akan memperkaya khasanah budaya Yogyakarta yang Semesta.

Memasuki abad ke-21, paradigma pembangunan yang merujuk *knowledge-based economy* tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan tiga hal, yaitu kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. *Ketiga*, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi, yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Kemudian menyusul negara-negara Singapura, China, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.

Bertolak dari fakta empiris itu, maka DIY yang maju dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan --*center of excelence*-- yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai *teaching, research and entrepreneurial university*.

Masyarakat maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi disertai tingkat kemiskinan yang rendah, dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespons dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan DIY yang Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan, sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Masyarakat Sejahtera ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

Masyarakat sejahtera tidak cukup hanya diukur dari nilai-nilai lahiriah itu saja, tetapi juga ditandai oleh nilai-nilai ruhaniah dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman sebenarnya adalah aset bangsa yang harus dipahami sebagai *'fitrah'* untuk menumbuhkan rasa toleransi, dimana secara pribadi kebenaran agama yang diyakini tidak harus menyalahkan orang lain yang berbeda agama dalam banyak hal. Perbedaan memang sesuatu keniscayaan yang *sunatullah*. Dengan toleransi tidak boleh mengorbankan keyakinan, akidah dan ajaran agama masing-masing. Toleransi antar pemeluk agama adalah pada sikap dan pergaulan, bahwa setiap agama memerintahkan untuk berbuat baik, termasuk kepada orang dari agama lain.

Berdasarkan ketentuan undang-undang keistimewaan yang mengamanatkan urusan keistimewaan maka pada Pasal 31 ditetapkan bahwa kewenangan kebudayaan diatur dengan Perda Istimewa.

Kewenangan kebudayaan dimaksudkan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan norma, adat istidat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Pembangunan DIY yang dilandasi oleh filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* yang mengandung makna: "kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia."

Guna mengakselerasi DIY dengan membangkitkan kembali Peradaban Unggul Yogyakarta dan Nusantara melalui Renaisanse budaya yang memuat landasan idiil filosofis *Hamemayu Hayuning Bawana* yang secara konseptual mengatur harmoni hubungan dan tata laku antar sesama rakyat, antar sesama warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antar insan dengan Tuhan yang Maha Pencipta.

Renaisanse Yogyakarta yang mengacu pada konsep *aworing kawula-gusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap satria: *sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan kita.

Kraton Yogyakarta yang mulai ditempati 7 Oktober 1956 atau 13 suro (muharam/jumakir 1682) oleh *Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Abdurrahman Sayidin Pranatagama Kalifatullah Kaping I* menjadikan kraton sebagai:

- pusat pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan segala bidang politik
- pusat kerohanian sebab sultan adalah Kalifatullah atau Raja Tuhan di dunia atau wakil Tuhan didunia
- pusat pelestarian, pewarisan dan pengembangan kebudayaan adiluhung

Kraton Yogyakarta memiliki kualitas sumber daya budaya dan memiliki magnet yang dapat menggerakkan manusia. Budaya kraton adalah merupakan tempat lahirnya pemikiran-pemikiran unggul mengenai hakikat manusia dan kehidupan. Kraton juga tempat lahirnya dan terhimpunnya berbagai keahlian kreatifitas kehidupan yang adi luhung serta nilai-nilai norma dalam menjalani kehidupan dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alamnya.

Puro Pakualaman merupakan kadipaten yang dibentuk Pemerintah Belanda pada tahun 1810 M dan yang bertakhta pertama adalah Sultan Hamengku Buwono III atau putra mahkota Hamengku Buwono II. Tak lama kemudian

Inggris berkuasa Sultan Hamengku Buwono II diasingkan di Ambon karena melawan Pemerintahan Inggris sebagai pengganti Sultan Hamengku Buwono II adalah Sultan Hamengku Buwono III yang semula berada di Puro Pakualaman. Sementara Puro Pakualaman diberikan ke saudaranya yang bernama Pangeran Notokusumo yang dinobatkan pada tanggal 29 Juni 1812 Masehi oleh Raffles (Pemerintahan Inggris) dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Pakualam I. Sebagai bentuk penghormatan pada Kasultanan Ngayogyakarta, Puro Pakualaman dibangun menghadap selatan.

Peradaban baru DIY diwarnai dengan kelahiran kembali nilai-nilai luhur Yogyakarta dan sumber-sumber daya kejayaan masa lalu dalam konteks masa kini. Pada hakekatnya Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perpaduan antara kejayaan masa lalu dengan cita-cita di masa yang akan datang. Menapaki tonggak baru dalam sejarah pemerintahan DIY, Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi yang diprioritaskan, yakni bidang1) Pendidikan; 2) Pariwisata; 3) Teknologi; 4) Ekonomi; 5) Energi; 6) Pangan; 7) Kesehatan; 8) Keterlindungan Warga; 9) Tata Ruang dan Lingkungan dengan berlandaskan kebudayaannya yang adiluhung.

Cita-cita DIY menjadi pusat kebudayaan terkemuka pada tahun 2025 telah memperoleh tambahan stamina dengan *mainstream* kebudayaandalam pembangunan di segala bidang. Kebudayaan diharapkan dapat dilindungi, dikembangkan dan juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat DIY. Upaya-upaya untuk memajukan kebudayaan agar DIY dapat menjadi pusat pelestarian, pengembangan dan pewarisan kebudayaan yang adiluhung.

Pembangunan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan, tetapi juga untuk memanfaatkan kebudayaan yang merupakan aset yang sangat tinggi harganya bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di DIY. Kebudayaan akan menjadi arus utama atau payung bagi sektor lain, karena sumber daya kebudayaan mengandung unsur-unsur universal dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya pembangunan dalam segala bidang akan menghasilkan sebuah karya budaya besar yang akan mewakili peradaban pada zamannya. Karya karya budaya yang besar sebagai hasil pembangunan di segala bidang yang berpayung hukum pada kebudayaan akan menghasilkan *renaissance* budaya Yogyakarta.

Keutamaan pembangunan kebudayaan adalah untuk membentuk identitas diri atau jati diri masyarakat, karena mempunyai daya tangkal terhadap budaya asing yang dapat diakses oleh masyarakat DIY melalui berbagai sumber. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang pernah disampaikan Alvin Toffler dalam *the third wave*-nya membuat dunia yang borderless sehingga masyarakat mempunyai kemudahan dalam mengakses berbagai informasi melalui berbagai media melintasi batas-batas budaya lain. Informasi dari luar yang mengalir deras kepada masyarakat memiliki *content* positif maupun negatif, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sejauh kebudayaan DIY mampu menjadi filter bagi masyarakat sehingga mampu memilah dan memilih sisi positif dari budaya-budaya baru yang mereka terima serta justru akan memperkaya budaya yang sudah ada.

Kebudayaan juga akan menjadi potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Menurut Maynard dan Mehrtens (1993) setelah gelombang ketiga Alvin Toffler, dunia akan dilanda gelombang keempat (*fourth wave economic*) yang mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun industrialisasi. Ekonomi gelombang keempat adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang

ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Geliat nasional juga menunjukkan kepada orientasi ke arah tersebut. Kebudayaan juga menjadi media diplomasi yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan internasional, karena memiliki kekuatan citra positif bangsa yang berperadaban. Bukti dari kekayaan budaya tersebut adalah DIY memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi baik budaya *tangible* (kasat mata) maupun *intangible* (tidak kasat mata).

Potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY yang tercermin tabel dibawah ini.

Tabel 2.36 Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, 2008-2012

Aspek	Satuan	Capaian				
		2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah kunjungan museum	Orang	320.000	360.000	575.000	623.500	1.375.000
Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju	Organisasi	36	36	36	38	40
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	188	194	214	220	225
Jumlah Gelar Seni Budaya	Kali	675	720	790	920	960
Jumlah Desa Budaya berkategori Maju	Desa	5	5	6	8	12
Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan	Dokumen	38	43	91	104	120
Jumlah sumber sejarah yang terkelola	Sumber sejarah	-	44	300	500	700
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	92	92	94	94	96

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2012

Museum sebagai mozaik sejarah peradaban masyarakat menyebar di sebagian besar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantu, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan perhatian khusus untuk pendirian museum yang representatif bagi daerah. Menurut beberapa catatan di DIY telah berkembang sekitar 42 museum atau sekitar 15% dari museum di Indonesia baik yang sudah dikenal masyarakat maupun belum pernah dikenal. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan salah satu museum tertua dan terbanyak koleksinya di Indonesia. Dari sekian banyaknya museum tersebut, baru 32 museum yang masuk Barahmus, dan baru 40% yang memiliki standar pelayanan yang baik. Dua museum yang diproyeksikan sebagai museum internasional adalah Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang.

Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012

tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2012benda cagar budaya terdapat 715 buah, yang ditetapkan sudah mencapai 521 buah. Jumlah kawasan cagar budaya ada 16 buah, baru 6 buah yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum. Tindak lanjut terhadap Perda tersebut adalah pengaturan mengenai sertifikasi bagi ahli-ahli konstruksi yang memiliki bidang garap cagar budaya. DIY juga memberikan penghargaan bagi para pelestari cagar budaya dan subsidi pemeliharaan. DIY juga sudah memberlakukan mekanisme perizinan sebelum membangun yang berkaitan dengan cagar budaya yang mana harus memperoleh rekomendasi layak membangun atau tidak dari Dewan Pertimbangan warisan Budaya. Diharapkan setiap orang yang akan melakukan konstruksi terhadap bangunan yang berada dalam perlindungan pihak terkait kebudayaan semestinya memiliki surat referensi keteknisan konstruksi cagar budaya.

Kantong-kantong yang memiliki potensi dengan dominasi untuk pelestarian cagar budaya terdapat 16 kawasan, yaitu antara lain Malioboro, Kraton, Puro Pakualaman, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, Pleret, Ambarketawang, Ambarabinangun, Sokoliman, Parangtritis, Prambanan, Ratu Boko, Pengok, Baciro, Jetis. Kawasan-kawasan tersebut memiliki tingkatan klasifikasi yang berbeda. Sejumlah 6 kawasan cagar budaya mendapatkan SK Gubernur No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY sebagai kawasan cagar budaya kelas C (kewenangan setingkat provinsi), yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri. Kawasan Cagar Budaya menjadi salah satu kawasan strategis budaya yang menyimpan dan menampilkan kekayaan dan keunikan cagar budaya baik *tangible* maupun *intangible*. Masing-masing kawasan cagar budaya memiliki kekhasan yang dipengaruhi oleh sejarah kawasan tersebut.

Tabel 2.37 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2008-2012

Jenis Data	2008	2009	2010	2011	2012
Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	511	511	511	515	521
Kawasan Cagar Budaya	12	12	13	13	16
Situs	96	96	96	96	96
Monumen Sejarah Perjuangan	-	44	44	44	44
Museum	31	34	34	38	42

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 2.38 Penanganan Cagar Budaya

Aspek	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	188	194	214	220	225
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimilki	1.272	1.272	1.279	1.279	1.410

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Dilihat dari zamannya sumber sejarah dibedakan dalam sumber sejarah kuno, sumber sejarah masa Kerajaan Islam, sumber sejarah zaman Kolonial, dan sumber sejarah kontemporer (sekarang). Sumber sejarah yang terkelola sampai tahun 2012 sebanyak 700 macam yang tersimpan di beberapa tempat antara lain di Keraton, Puro Pakualaman, museum-museum, Perpustakaan Daerah DIY, Perpustakaan Biro Hukum. DIY yang menyandang julukan sebagai kota perjuangan, kota budaya, kota

pendidikan menyimpan banyak sumber sejarah dalam berbagai jenisnya, yaitu sumber sejarah artefak (kebendaan seperti arsip, rekaman-rekaman, prasasti, foto, gua, candi, monumen, koin, dan lain-lain), sumber sejarah tertulis (antara lain berupa babad, kitab, serat, naskah-naskah, surat resmi pemerintahan, peraturan-peraturan dari zaman klasik hingga kontemporer, majalah, koran, dan lain-lain), sumber sejarah lisan (kisah yang diemban para tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada zamannya), dan sumber sejarah sosial kemasyarakatan (berupa *folklore*, dongeng, karya sastra, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain). Sumber sejarah tersebut akan menjadi bukti kebenaran sejarah, dan apabila dirangkai akan menjadi mozaik sejarah peradaban di DIY.

Dalam perkembangan kesenian Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Di sisi lain, terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perubahan akan selalu terjadi, sebagai akibat adanya kreativitas seniman, tuntutan perubahan fungsi dan selera masyarakat yang terus berubah. Perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *artshop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendiidkan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Tabel 2.39 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2008-2012

Jenis Data	2008	2009	2010	2011	2012
Organisasi Kesenian					
Organisasi Sinematografi	14	14	14	14	14
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.203	4.203	4.219	4.269	5.387
Organisasi Seni Rupa	2	8	25	25	25

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 2.40 Perkembangan Seni dan Budaya menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	13,55	0,42
Kabupaten Sleman	9,73	0,25
Kabupaten Gunungkidul	11,58	0,17
Kabupaten Kulon Progo	16,71	0,23
Kota Yogyakarta	12,98	0,23
DIY	**12,24**	**0,26**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Festival, Karnaval, Gelar Budaya, Pasar Rakyat dan *event-event* budaya lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah, antara lain Pekan Budaya Rusia, Pekan Budaya Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Karnaval Jogja, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede. Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukan peningkatan kuantitas pada tahun 2009 sebanyak 720

menjadi 960 pada tahun 2012. Hal ini mengisyaratkan adanya pemberlanjutan dari pelestarian seni dan budaya.

Tabel 2.41 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2008-2012

Jenis Data	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	720	720	790
Prasarana Budaya	92	92	135	137	412
Lembaga Budaya	107	107	107	107	107
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Sampai saat ini ada 4308 kelompok seni yang mengembangkan seni rupa, pertunjukan, dan sinematografi. Grup-grup kesenian diklasifikasikan dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu tumbuh, berkembang, dan maju. Sekitar 60% grup kesenian di DIY masih berkategori tumbuh. Oleh karenanya perlu pemberdayaan yang lebih intensif lagi dan penambahan stimulan. Galeri seni yang didirikan ada 26 buah. Dalam dunia sinematografi DIY sendiri telah memproduksi beberapa film seperti 'Rindu di Hati Tara', '*Loro Blonyo*', 'Titik 0 Km', dan sebagainya. Beberapa film Indie memperoleh prestasi di tingkat nasional dan internasional. Produser Hollywood tertarik menjadikan Jogja sebagai lokasi Film Java Heat yang tayang perdana di Indonesia 18 April 2013 dan segera ditayangkan di 60 negara. DIY berpotensi menjadi studio alam lokasi syuting film nasional maupun internasional, bahkan berciri khas kebudayaan.

SDM industri kreatif nasional diwarnai oleh tokoh seniman dan budayawan kreatif dari DIY, yaitu antara lain Soimah, Kelik Pelipur Lara, Hanung Bramantyo, Seventeen, Jogja Hip Hop, Petakumpet, Dagadu, Shaggydog, Sheila On Seven, Butet Kertarajasa, Jaduk Feriyanto, Anggito Abimanyu, Cak Nun, Letto dan lain-lain. Maestro-maestro yang merupakan seniman-seniman yang mampu menjadi inspirasi seniman muda antara lain Bagong Kussudiarjo, Affandi, Kartika, Basiyo, WS Rendra, Kuntowijoyo dan lain-lain.

Jumlah gedung seni budaya di DIY pada tahun 2012 sebanyak 96 buah ini menunjukan perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *artshop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendiidkan yang bergerak di bidang seni seperti P4TK Seni dan Budaya, SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Perkembangan kesenian Yogyakarta yang sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Di sisi lain, terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perubahan akan selalu terjadi, sebagai akibat adanya kreativitas seniman, tuntutan perubahan fungsi dan selera masyarakat yang terus berubah. Perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *artshop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Dokumen penyelenggaraan *event* dan karya-karya para seniman sangat penting dikelola dan dilestarikan, karena akan menjadi bukti kemajuan seni

dan budaya di DIY. Jumlah dokumen seni budaya dan karya seni yang dilestarikan semakin meningkat seiring perkembangan kesenian di DIY. Kalau ditelusuri dokumentasi milik lembaga non pemerintah dapat diperkirakan pada tahun 2012 jumlah dokumen seni budaya, dan karya ada 120 buah.

Di pedesaan sendiri masih tumbuh dan berkembang desa-desa yang menjaga budaya rakyat. Pada tahun 1995 Gubernur menetapkan 32 desa bina budaya melalui SK Gubernur Nomor 325/Kpts/1995. Pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian terhadap desa-desa di DIY, dan terdapat 41 desa budaya termasuk yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan tersebut. Desa budaya tersebut diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya, yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Hingga akhir 2012 tercatat menjadi 43 desa yang berpotensi sebagai benteng pertahanan budaya tradisional yang perlu dipetakan kembali potensi dan tingkat perkembangannya, serta dilindungi dalam suatu regulasi. Desa budaya dapat berperan sebagai wadah konservasi dan pengembangan budaya baik yang *tangible* maupun *intangible*.

Adat-istiadat dan tradisi mewarnai kehidupan masyarakat DIY. Dalam kejadian-kejadian proses daur hidup pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Sampai tahun 2012 masih ditemukan 377 jenis upacara adat istiadat dan 34 jenis tradisi daur hidup yang menyebar di berbagai desa yang dilaksanakan oleh kesatuan masyarakat desa, kelompok organisasi budaya, maupun keluarga, antara lain berupa *mitoni, tetakan, pitung dinanan, slametan, nyatus, nyewu* dan lain-lain. Beberapa desa, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di desa lain, antara lain *merti dusun, ruwatan, labuhan, bersih desa, sedekah bumi* dan sebagainya. Makanan tradisional yang masih dapat dijumpai masih ada 137 jenis, seperti *nagasari, gudheg, mendhut, lemper, pecel, wedang uwuh, bakpia, yangko, geplak*, dan lain-lain. Permainan tradisional yang masih dikenal ada 34 jenis, antara lain *dakon, benthik, dhelik-dhelikan, gobag sodhor, jamuran* yang memiliki nilai-nilai kebersamaan, kreativitas dan inovasi.

Tabel 2.42 Perkembangan Sistem Budaya di DIY, 2008-2012

Jenis Data	2008	2009	2010	2011	2012
Kegiatan Upacara Adat dan Tradisi Permohonan dan Tasyukuran	359	359	377	377	377
Jenis Upacara Adat dan Tradisi Daur Hidup	34	34	34	34	34
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	90	90	90
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	34
Makanan Tradisional	137	137	137	137	137

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Organisasi penghayat kepercayaan yang masih berkembang ada sekitar 90 kelompok. Mereka juga melakukan ritual budaya sendiri. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY.

2.3.3.2 Pemuda dan Olahraga

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) komitmen dengan mewujudkan kualitas sumber daya pemuda dan olahraga yang memiliki kebangsaan kepemimpinan yang berakhlak mulia, maju, mandiri mulia, sehat, cerdas, mampu menorehkan prestasi, memiliki daya saing yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan untuk menangani hal tersebut di DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Tugas Balai Pemuda dan Olahraga.

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Pemuda adalah aset dan sumber daya yang terus dipanggil untuk berpartisipasi dalam komunitas dan juga isu-isu keuangan, disamping memberikan pelayanan pada masyarakat yang berefek pembelajaran keterampilan untuk bekerja bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Pemuda dijadikan mitra bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi untuk berkarya disamping pemuda juga mesti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perubahan di komunitasnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) komitmen dengan kegiatan olahraga karena olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stress. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stress. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki, Nurhayati, Winarsih, Doni Tata dan lain-lain. Sarana dan prasarana olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Stadion PSS Sleman, dan lain-lain.

Tabel 2.43 Pemuda dan Olah Raga di DIY, 2007-2012

Uraian	Tahun						Satuan
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Organisasi Kepemudaan	35	35	35	35	35	35	Buah
Jumlah Karang Taruna	438	438	442	440	437	440	Buah
Jumlah Organisasi Olah Raga	51	50	50	51	51	50	Buah
Sarana Olah Raga							
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	0	Unit
2) Standar Nasional	3	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY

Dari tabel di atas tampak bahwa perubahan dari tahun ke tahun tidak terlalu besar. Perubahan yang nampak pada jumlah Karang Taruna, yang mengalami kenaikan pada tahun 2010 namun pada tahun 2011 mengalami penurunan.

Tabel 2.44 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di DIY, 2008-2012

Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah grup kesenian	5.426	5.426	4.225	4.269	4.344
Jumlah gedung kesenian	92	92	92	92	96
Jumlah klub olahraga	655	652	655	660	665
Jumlah gedung olahraga	26	28	28	29	29

Sumber: Dinas Kebudayaan & Dinas Dikpora

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional ataupun bertaraf internasional, mengembangkan pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya pendidikan yang handal; penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan; menarik minat peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.

Untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara maka sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional serta pusat–pusat keunggulan ilmiah, tersedianya sumber daya pendidikan yang handal, terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan, mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY, menciptakan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya, meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.

Untuk sasaran terwujudnya lembaga pendidikan yang terstandar nasional dan internasional serta pusat–pusat keunggulan ilmiah, hasil yang dicapai adalah meningkatnya prosentase sekolah yang terakreditasi A. Untuk jenjang SD/MI sebesar 96,37%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 92,65 %, untuk jenjang SM/MA sebesar 98,65 %, dan untuk jenjang SMK sebesar 86,56 %.

Untuk sasaran tersedianya sumber daya pendidikan yang handal, hasil yang dicapai adalah meningkatnya jumlah guru yang berpendidikan S1 ke atas. Untuk guru di jenjang SD/MI saat ini telah terdapat 62,51 % guru yang berpendidikan S1 ke atas. Untuk jenjang SMP/MTs telah terdapat 85,08 % guru dan di jenjang SM terdapat 91, 52 % guru. Selain itu, berdasarkan Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat tertinggi se Indonesia.

Untuk sasaran mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY, hasil yang telah dicapai saat ini adalah besarnya prosentase

mahasiswa yang berasal dari luar DIY sebanyak 70 % dari total mahasiswa yang ada.

Untuk sasaran lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, hasil yang telah dicapai adalah tingginya angka lulusan yang ada di semua jenjang. Untuk jenjang SD/MI sebesar 98,45%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 96,83 %, untuk jenjang SM sebesar 97,75 %.

Untuk sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya, hasil yang telah dicapai adalah tingginya APK dan APM masing–masing jenjang. Untuk jenjang PAUD, APK yang dicapai adalah 66,93 %, untuk APM jenjang SD/MI sebesar 97,54 %, untuk APM jenjang SMP/MTs sebesar 81,13 %, untuk APK SM sebesar 88,04 % dan untuk APK PLB sebesar 69,89 %.

Untuk sasaran meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi ditandai dengan rata–rata lama sekolah sebesar 9,2.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS dapat dikaitkan dengan keadaan putus sekolah. Di beberapa Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dijumpai anak putus sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Pendudukan Usia Sekolah, 2007-2011

APS penduduk usia sekolah	2007	2008	2009	2010	2011
APS SD/MI/Paket A (7-12)	103,5	105,37	105,52	104,81	107,49
APS SMP/MTS /Paket B (13-15)	99,66	103,23	105,26	112,19	110,35
APS SMA/SMK/MA/Paket C (16-18)	60,6	61,97	62,76	65,71	68,05

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa APS penduduk usia SD/ MI/ Paket A menurun pada tahun 2010 kemudian meningkat lagi di tahun 2011, sedangkan untuk APS penduduk usia 13-15 dan 16-18 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011/2012

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Rasio
1	Bantul	353	62.869	56,15	85	21.457	39,61
2	Sleman	501	76.290	65,67	106	24.377	43,48
3	Gunungkidul	486	49.243	98,69	106	18.096	58,58
4	Kulon Progo	351	30.148	116,43	65	12.329	52,72
5	Yogyakarta	175	40.335	43,39	58	16.690	34,75
	Jumlah	1866	258.885	72,08	420	92.949	45,19

Sumber:Dinas Dikpora DIY

3. Rasio Murid/Guru

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio siswa terhadap guru. Selama tahun 2007 hingga tahun 2012 terlihat bahwa rasio siswa terhadap guru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak. Kondisi rasio murid/guru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.47 Rasio Guru terhadap Siswa

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
TK	12	11	11	11	12
SD	13	15	13	13	14
SMP	12	11	11	13	12
SMA/SMK	9	9	9	9	9
SLB	4	3	4	4	4

Sumber:Dinas Dikpora DIY

Tabel 2.48 Rasio Siswa terhadap Kelas

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
TK	20	20	20	19	20
SD	22	22	21	21	22
SMP	33	30	29	29	30
SMA/SMK	30	29	28	30	30
SLB	4	4	2	5	4

Sumber: Dinas Dikpora DIY

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah DIY berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya Pemerintah DIY dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau dapat dilihat dari penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan. Akses masyarakat Yogyakarta terhadap sarana pelayanan kesehatan telah cukup baik. Salah satunya diperlihatkan dari aksesibilitas jarak jangkauan. Hasil survey Dinas Kesehatan Provinsi DIY pada tahun 2008, dimana menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan, yang menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

1. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Melalui posyandu, diperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan dasar ibu,bayi, dan balita. Data jumlah Posyandu di DIY pada tahun 2011 sebanyak 5.679 posyandu dengan jumlah balita sebanyak 222.734 balita sehingga rasio posyandu per satuan balita adalah

27,44. Tabel berikut menunjukkan jumlah posyandu, jumlah balita, dan rasio posyandu per satuan balita di DIY tahun 2011.

Tabel 2.49 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Balita menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu per satuan Balita
Kota Yogyakarta	622	21.400	29,07
Kab. Bantul	1.123	60.968	18,42
Kab. Kulon Progo	961	28.149	34,14
Kab.Gunungkidul	1.462	43.574	33,55
Kab. Sleman	1.511	68.643	22,01
DIY	5.675	222.734	27,44

Sumber : Profil Kesehatan DIY, Dinkes dan Data Pilah Gender dan Anak, BPPM, diolah

2. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Sampai dengan tahun 2011, jumlah puskesmas di DIY sebanyak 121 unit. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 3,47 atau dengan kata lain 1 puskesmas di DIY melayani 28.820 penduduk dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 318 unit. Apabila dibandingkan dengan standar nasional (1 puskesmas melayani 30.000 penduduk) berarti Pemerintah DIY telah mampu menyediakan sarana kesehatan berupa puskesmas yang telah mencapai standar nasional. Berikut adalah tabel rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per 100.000 penduduk di DIY tahun 2009–2011:

Tabel 2.50 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 Penduduk di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2009-2011

Kabupaten/Kota	2009					2010					2011				
	Jml Pddk	Puskesmas		Puskesmas Pembantu		Jml Pddk	Puskesmas		Puskesmas Pembantu		Jml Pddk	Puskesmas		Puskesmas Pembantu	
		Jml	Rasio per 100.000 pddk	Jml	Rasio per 100.000 pddk		Jml	Rasio per 100.000 pddk	Jml	Rasio per 100.000 pddk		Jml	Rasio per 100.000 pddk	Jml	Rasio per 100.000 pddk
Kota Yogyakarta	389.685	18	4,62	11	2,82	388.627	18	4,63	11	2,83	388.627	18	4,61	10	2,56
Kab. Bantul	899.312	27	3,00	67	7,45	911.503	27	2,96	67	7,35	911.503	27	2,93	68	7,38
Kab. Kulon Progo	387.493	21	5,42	61	15,74	388.869	21	5,40	63	16,20	388.869	21	5,38	62	15,89
Kab. Gunungkidul	675.474	29	4,29	107	15,99	675.382	30	4,44	107	15,99	675.382	30	4,42	107	15,78
Kab. Sleman	1.074.673	25	2,33	70	6,61	1.093.110	25	2,29	70	6,50	1.093.110	25	2,26	71	6,41
DIY	3.426.637	120	3,50	318	9,28	3.457.491	121	3,50	319	9,26	3.457.491	121	3,47	318	9,12

Sumber : DIY Dalam Angka 2010-2012, BPS

3. Ketersediaan Rumah Sakit

Salah satu upaya Pemerintah Daerah DIY dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit. Ketersediaan rumah sakit di DIY berada di semua Kabupaten/Kota di DIY, yaitu 18 rumah sakit di Kota Yogyakarta, 11 rumah sakit di Kabupaten Bantul, 8 rumah sakit di Kabupaten Kulon Progo, 3 rumah sakit di Kabupaten Gunungkidul, dan 26 rumah sakit di kabupaten Sleman (sumber : Dinas Kesehatan DIY). Jika dilihat dari data yang ada, proporsi ketersediaan rumah sakit antara kabupaten/kota di DIY dirasa timpang, sehingga ke depan perlu diatur agar rasio rumah sakit dibandingkan penduduk yang dilayani lebih proporsional. Harapannya pemerataan pelayanan kesehataan akan terwujud dengan baik termasuk kedalaman cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Data BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka 48,3% dari semua kelas tempat tidur rumah sakit. Jumlah penduduk DIY pada tahun 2011 mencapai 3.487.325 jiwa. Jumlah RS pemerintah dan swasta sebanyak 66 buah, BOR masih tergolong rendah yaitu 48,3 %. Standar angka ratio tempat tidur dibanding penduduk adalah 1 : 1000, sehingga dengan demikian dibutuhkan sebanyak 3.487 TT, data yang ada menunjukkan bahwa di DIY sudah mempunyai 5.950 TT. Dengan demikian di DIY jumlah tempat tidur di rumah sakit dirasa sudah cukup terpenuhi. Apalagi didukung dengan cakupan kunjungan penduduk miskin ke fasilitas kesehatan masih sangat rendah (0,49 %), sehingga penting bagi semua provider untuk menjalankan sistim rujukan dengan benar. Berikut adalah tabel ketersediaan rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan BOR menurut kabupaten/kota di Yogyakarta:

Tabel 2.51 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011

No	Kab/Kota	Jml Pddk	Jml RS	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tempat Tidur Kelas 3	Jumlah Hari Perawatan	*Bed occupansy ratio* (BOR)
1	Kota Yogyakarta	390.553	18	1.875	682	361.072	50,8%
2	Kab Bantul	921.263	11	879	415	158.445	53,3%
3	Kab Kulon Progo	390.207	8	524	201	32.933	18,2%
4	Kab Gunungkidul	677.998	3	257	109	59.471	62,7%
5	Kab Sleman	1.107.304	26	2.415	931	332.592	54,7%
6	DIY	3.487.325	66	5.950	2.338	944.513	48,3%

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

Cakupan bumil risti pada komplikasi kebidanan yang ditangani di DIY sebesar 70,44% dengan perincian kabupaten Sleman 44,14% dan kabupaten Gunung Kidul 68,11%, sehingga untuk menekan angka kematian ibu masih dimungkinkan pengembangan RS lebih lanjut. Misalnya dengan menambah jumlah RS Khusus (ICU/NICU) atau menambah tempat tidur dan prasarana di fasilitas tersebut, Ratio TT ICU adalah 7-8 % dari kebutuhan TT , jadi di DIY dibutuhkan sebanyak 245 TT ICU.

4. Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio dokter umum di DIY tahun 2011 sebesar 28,76 per 100.000 penduduk, yang berarti 1 orang dokter umum di DIY untuk 3.477 jiwa. Rasio tersebut masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 40 per 100.000 penduduk atau 1 orang dokter umum untuk 2.500 jiwa. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis, kondisi DIY sudah jauh di atas standar nasional yaitu 23,79 per 100.000 penduduk dari standar nasional sebesar 6 per 100.000 penduduk. Demikian juga dengan rasio dokter gigi, kondisi di DIY sudah lebih tinggi dari standar nasional, yaitu 12,46 per 100.000 penduduk dari standar nasional 11 per 100,000 penduduk. Tabel berikut menyajikan data rasio dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis di DIY tahun 2009–2011 :

Tabel 2.52 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 di DIY, 2009-2011

Dokter	2009		2010		2011	
	Jumlah	Rasio per 100.000 Penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 Penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 Penduduk
Dokter Umum	773	21,68	723	19,69	997	28,76
Dokter Spesialis	789	22,13	868	24,39	825	23,79
Dokter Gigi	304	8,53	253	6,9	432	12,46

Sumber : Profil Kesehatan 2009-2011, Dinas Kesehatan DIY, diolah

5. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

Rasio perawat di DIY tahun 2011 sebesar 178,65 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2011 sebesar 52,85 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk. Tabel berikut menyajikan jumlah perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di DIY tahun 2009–2011.

Tabel 2.53 Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di DIY, 2009-2011

Tenaga Kesehatan	2009		2010		2011	
	Jumlah	rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	rasio per 100.000 penduduk
Perawat	4.379	122,82	4.635	134,20	6.194	178,65
Bidan	1.172	32,87	1.284	37,18	1.857	52,86
Tenaga Farmasi	732	20,53	563	16,30	2.069	59,67
Tenaga Gizi	277	7,77	294	8,51	353	10,18

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2009-2011, Dinas Kesehatan DIY, diolah

6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan tren penurunan, dari 91,32% di tahun 2009 menurun menjadi 70,44% di tahun 2011. Akan tetapi hal tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan adalah angka proyeksi bumil risti. Setiap komplikasi yang terjadi akan diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penaganan komplikasi bisa disebabkan karena jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

Tabel 2.54 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2011

Kabupaten/ Kota	2009			2010			2011		
	Bumil Risti/ Komplikasi	Bumil Risti/ Komplikasi Ditangani	Cakupan Bumil Risti/ Komplikasi Yang Ditangani (%)	Bumil Risti/ Komplikasi	Bumil Risti/ Komplikasi Ditangani	Cakupan Bumil Risti/ Komplikasi Yang Ditangani (%)	Bumil Risti/ Komplikasi	Bumil Risti/ Komplikasi Ditangani	Cakupan Bumil Risti/ Komplikasi Yang Ditangani (%)
Kota Yogyakarta	593	525	88,53	1.020	712	69,79	1.070	897	83,85
Kab.Bantul	5.997	5.997	100,00	1.332	2.454	91,72	2.956	2.391	80,88
Kab. Kulon Progo	1.428	1.428	100,00	2.675	1.231	92,40	1.348	1.238	91,83
Kab. Gunungkidul	2.371	1.441	60,78	1.871	1.645	87,91	1.942	1.323	68,11
Kab. Sleman	1.115	1.115	100,00	2.600	1.330	51,15	2.644	1.167	44,14
Jumlah DIY	11.504	10.506	91,32	9.498	7.372	77,61	9.960	7.016	70,44

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Menurut laporan Riskesdas 2010, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY mencapai 98,6% jauh di atas rata–rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2009, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 92,52% meningkat pada tahun 2011 menjadi 99,73%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 :

Tabel 2.55 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompentensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2011

Kabupaten/Kota	2009			2010			2011		
	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan
Kota Yogyakarta	5.199	4.859	93,46	4.578	4.577	99,98	4.787	4.787	100,00
Kab.Bantul	13.211	12.474	94,42	12.262	12.212	99,59	13.512	13.495	99,87
Kab. Kulon Progo	6.043	5.981	98,97	5.756	5.723	99,43	5.711	5.688	99,60
Kab. Gunungkidul	9.939	8.928	89,83	9.049	8.982	99,26	8.733	8.700	99,62
Kab. Sleman	13.207	11.799	89,34	12.412	11.544	93,01	12.225	12.177	99,61
Jumlah DIY	47.599	44.041	92,53	44.057	43.038	491,27	44.968	44.847	99,73

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

8. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (Universal Child *Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT.

Data menunjukan peningkatan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* DIY mencapai angka 100. Hal ini berarti tujuan *Universal Child Immunization* sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI).

Tabel 2.56 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2011

Kabupaten/ Kota	2009			2010			2011		
	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan UCI	Persentase Desa/ Kelurahan UCI	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan UCI	Persentase Desa/ Kelurahan UCI	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan UCI	Persentase Desa/ Kelurahan UCI
Kota Yogyakarta	45	45	100,00	45	45	100,00	45	45	100,00
Kab.Bantul	75	75	100,00	75	75	100,00	75	75	100,00
Kab. Kulon Progo	88	86	97,73	88	88	100,00	88	88	100,00
Kab. Gunungkidul	144	142	98,61	144	144	100,00	144	144	100,00
Kab. Sleman	86	86	100,00	86	86	100,00	86	86	100,00

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2009-2011, Dinas Kesehatan DIY

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2011, prevalensi balita gizi buruk di DIY adalah 0,68%. Dari 5 kabupaten dan kota di DIY, prevalensi gizi buruk di 4 kabupaten sudah sesuai harapan, yaitu <1% tetapi di Kota Yogyakarta angka prevalensi gizi buruk masih 1,35%. Situasi gizi di DIY dari tahun 2009-2011 dapat dilihat dari gambar berikut ini :

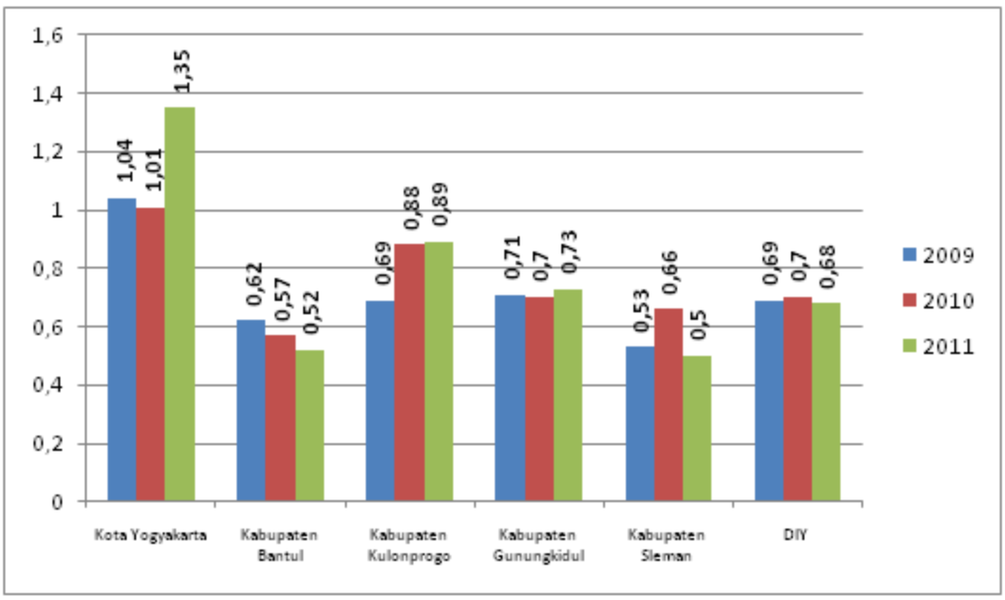

Gambar 2.27 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2009-2011

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, artinya sebanyak 387 balita yang mengalami gizi buruk (dengan indikator BB/TB), semuanya mendapatkan perawatan *(Sumber: Dinas Kesehatan DIY).*

Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

10. Pola penyakit

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pola penyakit yang masuk dalam sepuluh besar penyakit (Puskesmas) pada tahun 2010 adalah influenza, diare, hipertensi, Tifus, tersangka TB Paru, DBD, dan sifilis. Dari data yang didapat, menunjukkan terjadi transisi epidemilogi di DIY dengan menonjolnya penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit hipertensi dan diabetes melitus di Puskesmas.

Beberapa penyakit telah menjadi perhatian global dan dituangkan dalam komitmen bersama melalui *Millennium Development Goals* (MDG's) antara lain : TBC, HIV AIDS, dan malaria. Selain itu, DBD juga menjadi perhatian.

a. TBC

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, angka penemuan TBC (*Case Detection Rate*/CDR) di DIY dari tahun 2009 sampai dengan 2011 masih di bawah target sebesar 70%. Pada tahun 2009, CDR sebesar 52,6. Sedangkan CDR tahun 2010 sebesar 53,3 dan menurun pada tahun 2011 sebesar 50,8%. Sedangkan untuk angka keberhasilan penyembuhan TBC (*Success Rate*/SR), dari tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan tetapi masih di bawah target, yaitu sebesar 85%. SR tahun 2009 sebesar 82,5%, tahun 2010 sebesar 83,8% dan tahun 2011 sebesar 84,6%.

Kunci utama dalam penyembuhan dan pengendalian penyakit TBC adalah penemuan penderita mengingat TBC yang tidak ditangani akan menimbulkan kematian dan merupakan prekusor penyakit fatal lain seperti HIV AIDS, obstruksi paru, dan lain sebagainya.

b. HIV AIDS

DIY saat ini telah menempati urutan ke-17 provinsi dengan penderita penyakit HIV AIDS terbesar. Penderita terbanyak adalah kelompok usia 20–26 tahun dengan didominasi pengguna narkoba suntik. Angka penemuan kasus HIV AIDS masih rendah, yaitu 1.508 kasus dengan target semula 2.000. Dari 1.508 kasus yang ditemukan, sejumlah 586 kasus diantaranya telah memasuki fase AIDS sedangkan sisanya masih dalam fase HIV positif. *(Sumber : Dinas Kesehatan DIY)*

Dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, Pemerintah Daerah DIY telah menyusun Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan *Human Immunodefficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Defficiency Syndrome* (AIDS) yang berisi tentang tugas dan wewenang pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan, pengobatan, perawatan, dukungan, dan rehabilitasi sosial.

c. Malaria

Penyakit malaria telah menurun dengan sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Namun demikian masih ditemukan adanya kasus penularan *indigenous* malaria di Kabupaten Kulon Progo. Total kasus (*indigenous* dan *non indigenous*) tahun 2011 terlaporkan sejumlah 166 kasus terbanyak berasal dari Kabupaten Kulon Progo yang mencapai 159 kasus.

Masih belum baiknya kondisi lingkungan dan peningkatan pemanasan global dikhawatirkan akan tetap memberikan peluang yang tinggi bagi perkembangan penyakit ini (Sumber: Dinas Kesehatan DIY)

d. Demam Berdarah *Dengue* (DBD)

Jumlah kasus DBD pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 2.203 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 16 kasus (CFR = 0,73). Sedangkan pada tahun 2010, kasus DBD mengalami peningkatan sebanyak 5.121 kasus dengan jumlah kematian 33 (CFR = 0,64). Sehingga walaupun CFR mengalami penurunan, tetapi dari segi jumlah kasus dan jumlah kematian mengalami peningkatan dan kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 1.012 kasus dengan jumlah kematian 5 (CFR = 0,5).

Masih tingginya prevalensi penyakit DBD dipengaruhi oleh masih tingginya resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik yang masih di bawah 95%, yaitu 71,8% pada tahun 2009, dan 87,88% pada tahun 2010 tetapi menurun pada tahun 2011 sebesar 86,42 (Sumber: Dinas Kesehatan DIY). Tabel berikut menunjukkan jumlah kasus, jumlah kematian dan *case fatality rate* DBD tahun 2009–2011 di DIY :

Tabel 2.57 Jumlah Kasus, Jumlah Kematian, dan *Case Fatality Rate* (CFR) DBD di Daerah DIY, 2009-2011

2009			2010			2011		
Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	CFR	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	CFR	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	CFR
2203	16	0,73	5121	33	0,64	1012	5	0,5

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2009-2011, Dinas Kesehatan DIY

11. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana pelayanan kesehatan strata 1 tahun 2011 adalah 0,49%. Tabel 2.58 menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.58 Cakupan Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Strata 1 Pasien Masyarakat Miskin (dan Hampir Miskin) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Kabupaten / Kota	Jumlah Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin	Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Yankes Strata 1	Cakupan (%)
Kota Yogyakarta	388.627	498	0,13
Kab.Bantul	222.987	2.039	0,91
Kab. Kulon Progo	222.893	1.748	0,78
Kab. Gunungkidul	725.583	3.272	0,45
Kab. Sleman	168.158	858	0,51
Jumlah DIY	1.728.248	8.415	0,49

Sumber : Profil Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY 2011

Berbagai kebijakan terkait penanganan masalah kesehatan bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain pelaksanaan jamkesda di masing-masing kabupaten/kota di DIY dan jamkesos PBI di tingkat provinsi yang sasaranya masyarakat miskin, pada tahun 2011 Pemerintah Daerah DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 tentang sistem jaminan kesehatan semesta. Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaanya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan pemerintah kabupaten/kota di DIY meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.

12. Cakupan Kunjungan *Neonatus* Lengkap

Dari jumlah ibu bersalin di DIY tahun 2011 sejumlah 44.968 orang, bayi yang dilahirkan yang melakukan kunjungan neonatus lengkap termasuk tinggi, yaitu sebesar 88,26%. Sedangkan ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya sudah sangat tinggi, akan tetapi masih belum optimal dalam memeriksakan kesehatan neonatusnya. Tabel berikut menunjukkan cakupan kunjungan K1 dan K4 menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011.

Tabel 2.59 Cakupan Kunjungan KN1 dan KN L menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011

Kabupaten/ kota	KN 1		KN L	
	Abs	%	Abs	%
Kulon Progo	4.752	99,54	4.405	92,27
Bantul	13.353	99.31	12.564	93,44
Gunungkidul	5.671	99,46	5.398	94,67
Sleman	8.493	97,8	7.424	85,49
Yogyakarta	12.117	99,05	9.786	80
DIY	44.386	98,99	39.577	88,26

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2011, Dinas Kesehatan DIY

a. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas di DIY mencapai lebih dari 100%, hal ini menunjukkan di setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas. Tabel berikut menunjukkan cakupan puskesmas di DIY tahun 2011:

Tabel 2.60 Cakupan Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Cakupan (%)
Kota Yogyakarta	14	18	128,57
Kab.Bantul	17	27	158,82
Kab. Kulon Progo	12	21	175,00
Kab. Gunungkidul	18	30	166,67
Kab. Sleman	17	25	147,06
Jumlah DIY	78	121	155,13

Sumber : DDA 2012, BPS Provinsi DIY, Diolah

b. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas pembantu adalah 68,04%. Cakupan terendah berada di Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan di daerah Kota Yogyakarta jarak administrasi antar kecamatan relatif dekat sehingga kebutuhan puskesmas pembantu tidak terlalu banyak dan sarana pelayanan kesehatan lain cukup tersedia.

Tabel 2.61 Cakupan Puskesmas Pembantu Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Puskesmas Pembantu	Cakupan (%)
Kota Yogyakarta	45	10	22,22
Kab.Bantul	75	68	90,67
Kab. Kulon Progo	88	62	70,45
Kab. Gunungkidul	144	107	74,31
Kab. Sleman	86	71	82,56
Jumlah DIY	438	318	68,04

Sumber : DDA 2012, BPS Provinsi DIY, diolah

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang sumber daya air, keciptakaryaan, dan kebinamargaan. Di bidang sumber daya air, Pemerintah DIY berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Bidang kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan berstatus jalan provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah DIY. Sedangkan bidang keciptakaryaan melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini DPUP-ESDM DIY telah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap beberapa sungai. Ditinjau dari segi kewenangan pengelolaan sungai, maka seluruh DAS yang melintas di wilayah DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Sampai dengan saat ini kesepakatan pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan secara informal, sehingga diperlukan Nota Kesepakatan/MoU.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya. Sampai dengan Tahun 2012 capaian penambahan penyediaan air baku sebesar 600 liter/detik.

Untuk menjaga ketersediaan air baku diprioritaskan, dilakukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan optimalisasi prasarana yang sudah terbangun. Adapaun untuk pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan dengan cara Pengoptimalan dari prasarana yang sudah terbangun, Pembangunan Air Baku Pedesaan (SPAMDES), Pengoptimalan dengan memanfaatkan debit sungai di DIY, Pembangunan bendungan yang tersebar di DIY dengan melalui tahap kelayakan dan keseuaian yang terprogram, Pembangunan kaptering mata air dan sungai bawah tanah, Pembangunan Embung Pemanfaatan Cadangan air dari Cekungan Air Tanah dimungkinkan dengan kendali yang terprogram.

Tabel 2.62 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perkotaan Tahun 2012

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Perkotaan						
			Jumlah Rumah Tangga Perkotaan	Rumah Tangga Terlayani Perkotaan					
				Perpipaan Perkotaan		Non Perpipaan Perkotaan		Total Perkotaan Terlayani	
		(RT)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(%)	(RT)	(%)
1	Yogyakarta	78.593	78.593	11.619	14,78%	18.859	24,00%	30.478	38,78%
2	Sleman	221.063	198.824	48.021	24,15%	68.496	34,45%	116.517	58,60%
3	Bantul	184.336	144.262	44.638	30,94%	59.059	40,94%	103.697	71,88%
4	Gunungkidul	136.585	8.564	15.980	186,60%	1.623	18,95%	17.603	205,55%
5	Kulon Progo	78.642	17.215	10.494	60,96%	6.671	38,75%	17.164	99,71%
	DIY	699.220	447.458	130.752	29,22%	154.708	34,57%	285.460	63,80%

Sumber : Dinas PUP & ESDM DIY, 2012

Tabel 2.63 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Pedesaan Tahun 2012

Perdesaan							Total Rumah Tangga Terlayani	
Jumlah Rumah Tangga Perdesaan	Rumah Tangga Terlayani Perdesaan							
	Perpipaan Perdesaan		Non Perpipaan Perdesaan		Total Perdesaan Terlayani			
(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(%)	(RT)	(%)	(RT)	(%)
-							30.478	38,78%
22.239	7.165	32,22%	14.351	64,53%	21.516	96,75%	138.033	62,44%
40.075	5.202	12,98%	24.752	61,77%	29.955	74,75%	133.652	72,50%
128.021	73.342	57,29%	33.477	26,15%	106.819	83,44%	124.422	91,10%
61.427	16.190	26,36%	25.727	41,88%	41.917	68,24%	59.081	75,13%
251.762	101.899	40,47%	98.307	39,05%	200.207	79,52%	485.667	69,46%

Sumber : Dinas PU P ESDM DIY, 2012

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) DI dengan jumlah GP3A sebanyak 24 (dua puluh empat) dan P3A sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) buah.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsoran tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong.

Kondisi sampai bulan Juli tahun 2012 untuk penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir sebesar 67,2%:

1) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, yaitu dengan perkuatan tebing sungai yang mengalami gerusan dengan konstruksi yang ramah lingkungan berupa pasangan bronjong.
2) Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan, yaitu dengan melakukan monitoring dan persiapan menghadapi banjir serta pengadaan bahan banjiran berupa bronjong dan karung plastik.
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya berupa bantuan teknis serta pemberian bantuan bahan banjiran kepada masyarakat yang berada di daerah potensi banjir.
4) Pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi sebanyak 67 pos yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo (20 pos), Kabupaten Sleman (19 pos), Kabupaten Bantul (18 pos), Kabupaten Gunungkidul (10 pos).

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi.

Total panjang jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi sebelum tahun 2012 adalah 690,25 Km, dengan total panjang jembatan sepanjang 4.393,09 m. Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012, Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, panjang jalan berstatus jalan provinsi berkurang dari semula 690,25Km menjadi 619,34Km. Hal ini menyebabkan kondisi jalan mantap pada ruas jalan berstatus jalan provinsi menjadi berkurang, dari semula 83,89% menjadi 71,09%. Penurunan kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa ruas jalan berstatus provinsi yang beralih status menjadi jalan berstatus nasional maupun jalan berstatus kabupaten. Selain itu, terdapat juga perubahan status dari jalan berstatus kabupaten menjadi jalan berstatus provinsi, tetapi dengan kondisi awal rusak dan rusak berat. Keadaan ini tentunya akan mengurangi kondisi jalan berstatus provinsi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai upaya percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa, serta untuk optimalisasi potensi daerah selatan Pulau Jawa maka dibangun jalur lintas selatan. Selain itu manfaat pembangunan jalur lintas selatan adalah untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata, industri kelautan dan pertanian, yang diharapkan bisa merupakan satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa sehingga dapat memberikan tingkat

pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Pembangunan jalur lintas selatan juga mempunyai tujuan strategis, yaitu untuk menyeimbangkan pertumbuhan wilayah DIY yang selama ini cenderung berkembang ke arah utara–timur laut.

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 117,60 km terbagi menjadi 4 (empat) segmen. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/JJLS, pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung dengan panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2011 tahapan pembangunan JJLS meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), pembebasan tanah seluas 37,26 Ha serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan sepanjang 9,40 km.

Penggunaan lahan permukiman terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah 2007-2012 perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman merupakan yang terbesar. Tahun 2007, luas wilayah permukiman adalah 32.431,95 ha, dan pada tahun 2012 menjadi 33.901,50 ha atau mengalami pertambahan permukiman baru seluas 1.469,55 ha. Seiring dengan bertambahnya permukiman di DIY maka penyediaan infrastruktur dasar untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan perlu ditingkatkan.

Dalam pengelolaan air bersih, sebagai wujud peran serta masyarakat di DIY, telah terbentuk PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang beranggotakan kelompok kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 jumlah anggota PAMASKARTA telah mencapai 482 kelompok, dimana masing-masing kelompok mengelola sumber air rata rata 1-2 liter/detik.

Jumlah penduduk yang terlayani air minum sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum di DIY sampai dengan bulan Juli tahun 2012 sebanyak 2.263.914 jiwa, yang terlayani melalui layanan SPAMDES dan layanan SPAM IKK.

Penduduk DIY yang terlayani sanitasi layak sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 70% (dengan jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 501. 464 rumah tangga).

Cakupan pelayanan air limbah terpusat yang melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta sampai dengan tahun 2012 telah dapat menjangkau sebanyak 13.329 sambungan rumah (SR) masing-masing di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R *(Reduce, Reuse, Recycle)* pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah pada skala regional di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* pada TPA Piyungan di Bantul. Adapun untuk wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo telah dibangun masing-masing satuTPA dengan sistem *controlled landfill.* Penerapan pengelolaan sampah ramah lingkungan sampai dengan Tahun 2012 baru dapat terlaksana sebesar 45%.

Sesuai dengan data *Masterplan* Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di KPY. Capaian penanganan sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 27,90%. Kondisi tersebut disebabkan oleh besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganannya termasuk kebutuhan penanganan diluar KPY.

Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional. Sampai tahun 2012 sudah sekitar 28% dari kawasan agropolitan, minapolitan, dan desa-desa pusat pertumbuhan yang dikembangkan.

Revitalisasi /penataan bangunan dan lingkungan dilakukan melalui tahapan penyusunan regulasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada kawasan cagar budaya dan kawasan yang mempunyai nilai dan fungsi budaya. Penataan kawasan tersebut bertujuan untuk melestarikan sekaligus memperkuat eksistensi kawasan tersebut. Terdapat 18 Kawasan Budaya dengan tingkatan dan klasifikasi tertentu, yaitu Kawasan Malioboro, Kraton, Puro Pakualaman, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, Pleret, Ambarketawang, Ambarbinangun, Sokoliman, Parangkusumo, Kembang Lampir, Candi Gebang, Nglanggeran, Suralaya dan Kiskendo, Girigondo, Gunung Gambar dan Candi Kedulan. Sampai dengan tahun 2011, terdapat 6 kawasan cagar budaya mendapatkan SK Gubernur No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY sebagai kawasan cagar budaya kelas C (kewenangan setingkat provinsi), yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, dan Imogiri.

Jasa Pengujian merupakan salah satu pendukung pelaksanaan konstruksi yang memenuhi mutu bahan bangunan/rancang bangun sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dan penentuan kualitas air yang diperbandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

Lingkup layanan jasa pengujian meliputi jasa pengujian mutu bahan bangunan beserta seluruh produk-produk olahannya, air baku, air limbah, serta mekanika tanah dengan jumlah parameter uji sejumlah 80 parameter. Sampai dengan akhir tahun 2012 parameter yang telah terakreditasi sejumlah 31 parameter atau 38,75 % melalui sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ISO/IEC 17025:2008.

2.4.1.4 Urusan Perumahan

Upaya mengatasi penurunan *backlog* (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY untuk mengatasi masalah perumahan adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
2) Pengembangan Perumahan Swadaya.
3) Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Upaya Pemerintah DIY untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pembangunan rumah formal melalui pengembang. Namun upaya ini berjalan lambat karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat

berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Sampai dengan Tahun 2012, jumlah prosentase rumah tidak layak huni terhadap keseluruhan jumlah rumah sebesar 8,5%.

Sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah, maka pemerintah provinsi setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

Berdasarkan data *Neighbourhood Urban Shelter Sector Project (NUSSP)* yang dilakukan pada tahun 2009 terdapat 107 lokasi kumuh pada 69 kawasan kumuh di daerah perkotaan yang sampai dengan tahun 2012 telah ditangani 12 lokasi. Tolok ukur capaian kerja yang telah ditargetkan dilakukan melalui serangkaian kegiatan penataan kawasan padat penduduk yang cenderung kumuh.

2.4.1.5 Urusan Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pasal 112, untuk arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh SKPD–SKPD yang berwenang sesuai dengan RTRW DIY. Sehingga perlu adanya turunan dari RTRW DIY yang ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dengan kedalaman skala 1 : 5000 sebagai pelaksanaan rencana tata ruang.

Amanat penyusunan Rencana Tata Ruang sebagai tindaklanjut dari RTRW DIY adalah minimal sebanyak 11 kajian untuk Rencana Struktur Ruang, 14 Kajian untuk Rencana Pola Ruang dan 19 Kajian untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Pada saat ini telah disusun 21 Kajian serta 9 Peraturan Daerah terkait Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis .

Pemanfaatan ruang di DIY dilakukan sejalan dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan khususnya lahan pertanian produktif untuk mendukung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. Disamping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaaan lahan pada kawasan lindung.

Namun demikian dalam hal Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, masih terkendala dengan instrument dan mekanisme pelaksanaannya. Masih kurangnya aturan yang terkait dengan Peraturan Zonasi, Insentif bagi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Disinsentif bagi yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, serta Sanksi bagi pelanggar aturan Rencana Tata Ruang. Misalkan, dalam Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah ditentukan luasan lahan yang ditetapkan hanya untuk pertanian, namun belum ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota dengan penetapan lokasi secara spasial dari LP2B tersebut. Sehingga apabila ada pemanfaatan ruang yang melanggar dari ketetapan LP2B belum dapat dikenakan aturan-aturan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang seperti insentif, disinsentif dan sanksi.

Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan

Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, diupayakan untuk melakukan pengembangan kawasan strategis pada setiap Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, pada saat ini penetapan kawasan strategis cepat tumbuh masih belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan antara lain seperti :

- potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk uggulan di kawasan; sehingga dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayahnya tidak seperti yang diharapkan.

Target perencanaan kawasan yang akan dikembangkan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, antara lain kawasan pantai selatan, hal ini sejalan dengan Visi Gubernur 2012–2017 dengan tema Yogyakarta menyongsong peradaban baru dengan membalik paradigma "*among tani* menjadi *dagang layar*" yang konsekwensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman belakang melainkan menjadi halaman depan. Untuk itu diperlukan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung kawasan strategis pantai selatan atau kawasan strategis baru yang akan ditumbuhkan. Kawasan pansela merupakan:

1) Kawasan strategis Provinsi DIY *Pasal 97 Perda 2 Th. 2010* tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;
2) Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi (untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunungkidul);
3) Kawasan strategis lindung dan budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kab. Bantul); dan
4) Kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut.

Pada saat ini di kawasan Pansela direncanakan pembangunan bandara dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pansela. Disamping itu potensi pariwisata, perikanan, dan pertanian di Kawasan Pansela juga perlu ditingkatkan perkembangannya.

Amanat yang disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa salah satu kewenangan dalam urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Tata Ruang. Dimana dalam Tata Ruang dimaksud terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, oleh karenanya perlu dilakukan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten.

Dalam mendukung pelaksanaan tersebut serta implementasi dari Undang-Undang Keistimewaan DIY terkait Tata Ruang, diperlukan penetapan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

2.4.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana *(sense of ownership)* juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Perencanaan pembangunan DIY diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan darah yang visioner dan implementatif dalam arti mempunyai tujuan dan antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif dalam arti menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti Gas Rumah Kaca, MDG's, *sustainable development* serta muatan yang bersifat spesifik dan kekinian seperti Keistimewaan DIY yang telah dikukuhkan melalui UU. No. 13 Tahun 2012.

Rencana Aksi Nasional tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang kemudian ditindaklanjuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang pada bulan September 2012 telah selesai dan disahkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen akan melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3,62% atau sebesar 80,75 Gg CO_2 dari Total Emisi Gas Rumah Kaca seluruh sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2.228,132 Gg CO_2 (menjadi sebesar $\pm$5.667.673,14 Gg jika di-*equvalen*-kan secara keseluruhan untuk Gas CO_2, CH_4, dan N_2O) dengan rincian penurunan aksi mitigasi emisi Gas Rumah Kaca di Daerah Istimewa Yogyakarta ada pada sektor peternakan, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor industri, sektor transportasi, sektor limbah, dan sektor energi listrik. Perlu diketahui bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi gas rumah kaca di DIY adalah sektor energi listrik yang dapat memberikan kontribusi sebesar 3.934,62 Gg-eq CO_2 (CO_2 sebesar 1.311,54 Gg, CH_4 sebesar 62,45 Gg, N_2O sebesar 4,23 Gg) meskipun untuk sektor energy listrik tersebut dihitung hanya sebatas konsumsi karena sumber emisi gas

rumah kaca tidak berada di DIY. Menilik lebih lanjut bahwa jumlah emisi gas rumah kaca terbesar kedua adalah peternakan (memiliki emisi gas CO_2 sebesar 346,44 Gg, CH_4 sebesar 16,49 Gg, N_2O sebesar 0,00 Gg)yang selanjutnya adalah sektor limbah (memiliki emisi gas CO_2 sebesar 300,34 Gg, CH_4 sebesar 14,30 Gg, N_2O sebesar 0,00 Gg), transportasi (memiliki emisi gas CO_2 sebesar 231,86 Gg, CH_4 sebesar 1,81 Gg, N_2O sebesar 0,20 Gg), pertanian (memiliki emisi gas CO_2 sebesar 34,41 Gg, CH_4 sebesar 1,64 Gg, N_2O sebesar 0,11 Gg), industri (memiliki emisi gas CO_2sebesar 2,59 Gg, CH_4 sebesar 0,00 Gg, N_2O sebesar 0,00 Gg), dan kehutanan (memiliki emisi gas CO_2 sebesar 0,93 Gg, CH_4 sebesar 0,04 Gg, N_2O sebesar 0,00 Gg).

2.4.1.7 Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di DIY terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Untuk transportasi yang memanfaatkan moda darat, penggunaan kendaraan bermotor di jalan, pada tahun 2012, telah mencapai angka V/C ratio rata-rata 0,69 pada ruas jalan perkotaan Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam upaya mencari solusi untuk mengurangi kemacetan lalulintas dan memasyarakatkan penggunaan angkutan umum, pada tahun 2008, khususnya di Perkotaan Yogyakarta telah diluncurkan penggoperasian Trans Jogja. Angkutan Trans Jogja ini merupakan alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada "membeli layanan" dan bukan sistem setoran. Dengan pelayanan yang lebih baik dan kendaraan yang baru, diharapkan sedikit demi sedikit dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalulintas di persimpangan, pada tahun 2011, telah dikembangkan pengaturan lampu lalulintas di persimpangan dengan konsep ATCS (*area traffic control systems*) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2012 telah terpasang 11 unit ATCS atau 20% dari 55 simpang yang direncanakan, dengan rincian sejumlah 6 unit yang dialokasikan melalui APBN dan 5 unit dari APBD Kota Yogyakarta. Selain itu, penggunaan tehnologi ATCS dapat juga dimanfaatkan untuk pengurangan waktu tundaan (*delay*) di persimpangan, yang akan membantu pengurangan emisi gas buang sumber bergerak maupun emisi gas rumah kaca. Guna menunjang pelayanan pelayanan angkutan umum, sampai saat ini DIY telah memiliki 2 terminal tipe A yang terletak di Kota Yogyakarta (Giwangan) dan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari).

Load factor rata-rata penumpang angkutan umum di DIY pada tahun 2012 sebesar 30,66% naik dari tahun 2011 yang sebesar 28,42 %. Secara rinci, rata-rata *load factor* untuk Angkutan Umum di DIY pada tahun 2012, adalah :

1) Angkutan AKDP sebesar 26,85 %;
2) Angkutan Perkotaan sebesar 22,73 %;
3) Angkutan Trans Jogja sebesar 42,41 %.

Layanan angkutan AKDP merupakan layanan angkutan umum yang menghubungkan antara layanan angkutan perkotaan, dalam hal ini angkutan reguler dan Trans Jogja, dengan layanan angkutan perdesaan dan perbatasan. Layanan angkutan ini disediakan untuk mendukung mobilitas penumpang/orang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk mobilitas angkutan barang, sampai dengan saat ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta belum tersedia terminal angkutan barang maupun lokasi yang dapat dijadikan *rest area* bagi kendaraan bermotor angkutan barang.

Untuk fasilitas keselamatan lalu lintas jalan diperlukan kebutuhan akan rambu baik di jalan provinsi maupun jalan nasional sampai akhir 2011 terpasang 4.616 unit rambu di jalan provinsi dan di jalan nasional sebesar 16.175 unit yang terdiri dari rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan (LPJU), rambu petunjuk pengarah jalan (RPPJ), pita penggaduh, paku marka, *warning light*, *traffic light*, *guard rail*, *deliniator*. Peningkatan kebutuhan fasilitas keselamatan lalulintas dapat terjadi karena banyaknya fasilitas yang rusak dan hilang karena adanya kerusakan akibat kerusakan, umur fisik dan pencurian. Di tahun 2012, peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan adalah sebesar 72%, kenaikan yang hanya sebesar 2% dapat dirasakan sangat sedikit, tetapi hal tersebut terjadi dikarenakan prosentase kebutuhan fasilitas keselamatan jalan juga meningkat sebagai hasil dari perhitungan kebutuhan pada tahun 2010.

Pada tahun 2012, penumpang angkutan kereta api jarak pendek, mencapai angka 986.894 penumpang dengan ketersediaan tempat duduk sebanyak 1.086.720 TD. Kondisi ini menunjukkan penumpang kereta api jarak pendek tidak ada lagi yang berdiri (tidak memperoleh tempat duduk) selama melakukan perjalanan.

Pada moda transportasi udara, kondisi yang ada dapat dilihat dari jumlah pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Selama periode 2008-2012 telah terjadi perubahan preferensi masyarakat DIY khususnya dalam menggunakan moda transportasi jarak jauh, yaitu ditandai dengan mulai beralihnya masyarakat menggunakan pesawat terbang dibanding moda transportasi lainnya. Pada tahun 2010, pergerakan pesawat untuk penerbangan domestik dan internasional mengalami kenaikan dari 26.647 pada tahun 2009 menjadi 28.428 pada tahun 2010 atau naik sebesar 6,7% dari tahun 2009. Pertumbuhan pergerakan pesawat pada tahun 2010 sebesar 6,7% lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 10,6%. Hal ini disebabkan adanya larangan beroperasinya Bandara Adisutjipto oleh Kementerian Perhubungan selama ±16 hari saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi di akhir 2010. Pada tahun 2011 pergerakan pesawat mengalami kenaikan menjadi 32.091 atau naik sebesar 12,88% dari tahun 2010. Tahun 2012, pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto sudah mencapai angka 16.882 atau lebih dari separo jumlah pergerakan pesawat di tahun 2011. Kondisi itu menunjukkan bahwa pergerakan pesawat atau operasi penerbangan, yang ditunjukkan dengan adanya proses *take off/landing* di Bandara Adisutjipto, meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun.

Tingginya pergerakan pesawat ini menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk menggunakan transportasi udara sebagai sarana angkutan dari/menuju Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi kondisi ini tidak didukung oleh adanya fasilitas layanan Bandara, baik dari sisi udara maupun sisi darat, terutama untuk terminal penumpang dan area apron pesawat. Permasalahan ini mengidentifikasikan perlu adanya upaya untuk pengembangan ataupun pembangunan bandara baru. Sampai dengan tahun 2012, telah ada studi terkait dengan rencana pembangunan bandara baru, baik berupa Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) maupun *Masterplan* yang telah dilakukan oleh pihak swasta.

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pelayanan transportasi, adalah telah adanya integrasi moda layanan antara moda transportasi udara, moda jalan, dalam hal ini Trans Jogja dan moda kereta api. Layanan integrasi antarmoda ini terdapat di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dimana didalam area Bandara Adisutjipto sudah terdapat halte Trans Jogja dan Stasiun Maguwo untuk layanan kereta api jarak pendek Yogyakarta–Solo.

2.4.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan.

Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand* (*BOD*) dan *Chemical Oxygen Demand* (*COD*). Air sungai dari tahun 2008–2012 semakin membaik dengan kata lain terjadi penurunan pencemaran kualitas air sungai. Parameter utama berupa bakteri coli di tahun 2012 terlihat meningkat. Belum tercapainya penurunan jumlah bakteri coli disebabkan masih banyak rumah tangga yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan tanpa pengolahan terlebih dahulu, serta sumber-sumber pencemar lainnya. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi yang diperlukan.

Untuk kualitas udara ambien digunakan parameter utama, yaitu konsentrasi *Carbon Monoksida* (*CO*), *Hidro Carbon* (*HC*), *Ozon* (O_3), Plumbum (Pb), Nitrogen Dioksida (NO_x), *Sulfur Dioksida* (SO_2),dan konsentrasi partikulat. Pada Tahun 2012 berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara pada 30 lokasi didapat kondisi bahwa konsentrasi *Carbon Monoksida* (*CO*) berkisar antara 0,1-11 ppm, kandungan *Ozon* (O_3) berkisar antara 0,0012-0,0158 ppm, kandungan Timbal/*Plumbum (Pb)* berkisar antara 0,054-0,62 $\mu g/m^3$, kandungan *Hidrokarbon (HC)* berkisar antara 16,22-117 $\mu g/m^3$ (Kombinasi Pengukuran Bulan Maret dan Bulan Agustus Tahun 2012), kandungan *Nirogen Dioksida* (NO_x) berkisar antara 0,0012-0,0333 ppm, dan kandungan *Sulfur Dioksida* (SO_2) berkisar antara 0,008-0,0379 ppm. Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dibawah batas maksimal baku mutu yang ditetapkan. Namun meskipun demikian ke depan perlu diwaspadai terkait dengan tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda 4 dapat menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi zat pencemar tersebut diatas. Lebih dari itu masih rendahnya kesadaran para pengguna kendaraan dalam perawatan mesin juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya emisi gas buang kendaraan.

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani dari tahun 2008–2012 terus meningkat. Sumber pencemar yang tertangani tersebar di kabupaten/kota di DIY, merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri dan UMKM yang potensial menimbulkan pencemaran baik air sungai akibat buangan limbah cairnya maupun pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya.

Perlu diketahui pula bahwa Ruang Terbuka Hijau dapat memberikan pengaruh terhadap usaha untuk mereduksi pencemaran udara, salah satunya adalah emisi gas buang kendaraan. Sampai dengan Tahun 2012 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Yogyakarta adalah sebesar 17% (sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016). Sedangkan RTH kabupaten lain belum dilakukan pendataan secara detail, meskipun secara eksisting RTH di masing-masing kabupaten sudah tersedia. Adapun standar Pelayanan Minimal mensyaratkan luasan RTH publik pada kawasan perkotaan sebesar 20%.

1. Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang komplek, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu terjadi juga ancaman degradasi dan kekurangan air pada musim kemarau serta fenomena banjir pada musim hujan.

Tabel 2.64 Lahan Kritis DIY

No.	Kabupaten/ Kota	Kritis (Ha)
1	Bantul	2.327,75
2	Gunungkidul	12.749
3	Sleman	3.724,77
4	Kulon Progo	5.448,35
5	Yogyakarta	0
	Total	**24.249,87**

Sumber: Dinas Kehutanan Dan Perkebunan DIY, 2012

Penurunan luas kerusakan lahan dari tahun 2008–2012 semakin membaik dan telah memenuhi bahkan melampaui target. Upaya dilakukan untuk menurunkan luas kerusakan lahan adalah reklamasi lokasi lahan kritis, dengan melakukan penghijauan pada bekas penambangan pasir (bahan galian golongan C) di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Volume resapan air tanah yang sering disebut juga sebagai air tanah yang dapat diperbaharui dan merupakan batas keseimbangan eksploitasi air tanah yang berwawasan lingkungan. Perhitungan volume resapan air tanah dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka air tanah, sehingga didapatkan volume imbuhan air di cekungan mencapai 443 juta m^3/tahun. Berdasarkan perhitungan volume air didalam aquifer didapat 3,5 Milyar m^3 air terkandung didalam aquifer. Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah mensyaratkan zona aman untuk konservasi air tanah adalah apabila :

1. Penurunan muka air tanah < 20%
2. Jumlah zat padat terlarut < 1000 mg/liter atau daya hantar listrik < 750 µS/cm

2.4.1.9 Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Rasio luas tanah bersertifikat di wilayah DIY menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,23%. Rasio luas bidang tanah bersertifikat di wilayah DIY rata-rata sebesar 7,67%.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, DIY mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai daerah otonom dan daerah istimewa. Sebagai daerah otonom, DIY harus mengemban dan melaksanakan urusan-urusan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaanya. Sebagai daerah istimewa, DIY mempunyai urusan-urusan keistimewaan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Kedua kelompok urusan tersebut harus dilaksanakan secara

sinergitas dan terpadu dalam rangka terwujudnya kepentingan masyarakat di DIY.

2.4.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY antara lain Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, *updating* dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

2.4.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

Gender, suatu konstruksi sosial atau interpretasi masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki-laki dan perempuan, menjadi masalah ketika timbul ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol atas sumber daya dan/atau pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan.

Jumlah penduduk Provinsi DIY berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 3.457.491 jiwa (BPS, Provinsi DIY, 2011), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa, dengan persentase sex ratio sebesar 97,73 %. Sedangkan proyeksi penduduk tahun 2011 sebanyak 3.487.325 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.740.900 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.726.300 jiwa, dengan persentase sex ratio sebesar 99,16 %.

a. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Sedangkan capaian IPG DIY dari tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65 Capaian IPG DIY, 2008-2011

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011
DIY	71,50	72,24	72,51	73,07
Kota Yogyakarta	77,05	77,10	77,56	77,92
Kab. Bantul	71,20	71,20	71,33	71,71
Kab. Kulon Progo	66,13	66,56	67,04	67,85
Kab. Gunungkidul	64,69	64,77	65,42	66,04
Kab. Sleman	73,73	73,94	74,17	74,75

Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Tabel 2.66 Capaian IPG DIY, 2010-2011

Provinsi/ Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (Persen)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (Persen)		IPG	
	L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
D I YOGYAKARTA	71,37	75,16	96,28	87,09	9,78	8,67	60,82	39,18	72,51	73,07
Kulon Progo	72,53	76,24	96,98	86,50	9,15	8,07	68,03	31,97	67,04	67,85
Bantul	69,42	73,32	96,39	86,25	9,35	8,36	62,06	37,94	71,33	71,71
Gunung Kidul	69,07	72,99	92,22	78,63	7,84	6,32	61,60	38,40	65,42	66,04
Sleman	73,21	76,86	97,90	89,76	11,18	9,97	62,21	37,79	74,17	74,75
Kota Yogyakarta	71,59	75,37	99,78	96,85	11,96	11,30	57,92	42,08	77,56	77,92

Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG disusun dari tiga komponen, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.

Capaian IDG DIY merupakan yang terbaik secara nasional. Hal ini menandakan peran serta perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan lebih baik dibandingkan provinsi lain. Sedangkan capaian IDG DIY 2010 sampai 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67 Capaian IDG DIY, 2010-2011

Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	(%)	(%)	(%)	2010	2011
D I YOGYAKARTA	21,82	44,54	39,18	77,70	77,84
Kulon Progo	12,50	44,93	31,97	61,18	61,15
Bantul	15,56	46,53	37,94	67,85	68,46
Gunung Kidul	13,33	44,97	38,40	59,36	62,22
Sleman	18,00	44,02	37,79	70,74	70,52
Kota Yogyakarta	15,00	42,74	42,08	69,85	70,00

Sumber : BPS dan BPPM, DIOLAH

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), seperti halnya dengan IPG, dihitung dengan disparitas, atau perbedaan ketimpangan dengan laki-laki. Untuk DIY, besarnya masing-masing elemen dasar untuk menghitung kesetaran pemberdayaan gender dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan.

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Legislatif

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik diatur dalam Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta Undang-Undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Untuk DIY, perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga perwakilan rakyat masih dibawah kuota undang-undang, yaitu 21,82%. Hal ini berarti masih diperlukan kebijakan dan strategi dalam penyadaran dan pembelajaran politik bagi perempuan di DIY dengan harapan akan mendorong peningkatan kepesertaan perempuan di DIY dalam politik baik secara kualitas dan kuantitas. Berikut adalah tabel anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan jenis kelamin tahun 2011-2012.

Tabel 2.68 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012

No	DPRD	2011				2012			
		L	P	Jumlah	%	L	P	Jumlah	%
1	Kota Yogyakarta	34	6	40	15,00	34	6	40	15,00
2	Kab. Bantul	38	7	45	15,56	38	7	45	15,56
3	Kab. Kulon Progo	35	5	40	12,50	35	4	39	10,26
4	Kab. Sleman	41	9	50	18,00	41	9	50	18,00
5	Kab. Gunungkidul	39	8	45	13,33	39	6	45	13,33
6	Kab DIY	43	12	55	21,82	43	12	55	21,82

Sumber: BPPM, DIY

c. Proporsi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Representasi perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dapat juga dilihat di lembaga pemerintahan. Berikut adalah tabel partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di DIY.

Tabel 2.69 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan di DIY, 2011

NO	Kabupaten/kota	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
1	Kota Yogyakarta	7.855	90.832	
2	Bantul	7.258	205.746	
3	Kulon Progo	4.952	91.082	
4	Gunungkidul	5.463	164.006	
5	Sleman	10.654	244.876	
6	Provinsi	3.553		
	Total	**39.735**	**796.542**	**4,98%**

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2011 dan DDA 2011, diolah

Dengan persamaan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk bekerja di lembaga pemerintah, ternyata persentase pekerja perempuan di lembaga

pemerintah masih rendah, baru mencapai 4,98% dibanding total pekerja perempuan.

Lebih jauh dapat lihat bahwa perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I–IV.

Tabel di dibawah menunjukkan bahwa jumlah pejabat perempuan di lembaga pemerintah masih sangat rendah. Bahkan semakin tinggi tingkat Eselon, semakin sedikit perempuan yang menjadi pejabat. Hal ini menunjukkan masih sangat rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah.

Tabel 2.70 Rasio Pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Lembaga Pemerintah, 2011

No	Kab/Kota	Eselon I		Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
		L	P	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio
1	Kota Yogyakarta			19	5	0,26	91	42	0,46	365	303	0,83
2	Kab Bantul			30	2	0,06	125	42	0,33	318	214	0,67
3	Kab. Kulon Progo			20	4	0,20	106	29	0,27	273	134	0,49
4	Kab. Gunungkidul			23	2	0,09	125	19	0,15	383	134	0,34
5	Kab. Sleman			21	5	0,23	87	49	0,56	337	215	0,63
6	Provinsi	1	-	32	6	0,18	140	53	0,37	330	213	0,64
Jumlah		1	-	145	24	0,16	674	234	0,34	2.006	1.213	0,60
Rasio		0		0,17			0,35			0,60		

Sumber : Data Pilah Gender dan Anak 2012, BPPM DIY, diolah

Sajian data persentase perempuan di lembaga pemerintah, yang dirinci menurut kabupaten/kota, dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.71 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di DIY 2010-2011

NO	Uraian	2010	2011
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	20	24
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	212	234
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	1.143	1.213
4	Pekerja perempuan di pemerintah	30.288	39.735
5	Jumlah pekerja perempuan	805.618	796.542
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3,80	4,98

Sumber : Data Pilah Gender dan Anak 2012, BPPM DIY, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja di lembaga pemerintah tidak menggunakan kuota sehingga perempuan harus mengikuti persaingan bebas dengan laki-laki.

d. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel menunjukkan bahwa pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan sebesar 0,64%.

Tabel 2.72 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di DIY, 2010-2011

NO	Uraian	2010	2011
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	760.241	756.807
2	Jumlah pekerja perempuan	805.618	796.542
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	94,36	95,01

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2011 dan DDA 2011, diolah

e. Proporsi Pekerja Swasta Perempuan Terhadap Pekerja Swasta Laki-Laki

Rasio pekerja swasta perempuan terhadap pekerja swasta laki-laki seperti tersebut di atas menunjukkan angka yang tinggi. Artinya, di lembaga swasta, partisipasi perempuan hampir setara dengan partisipasi laki-laki.

Tabel 2.73 Rasio Pekerja Perempuan di Pemerintahan dan Swasta Terhadap Pekerja Laki-laki di Pemerintahan dan Swasta di DIY, 2011

NO	Uraian	2011		
		L	P	Rasio
1	Jumlah pekerja yang bekerja di lembaga Pemerintahan	47.646	39.735	0,83
2	Jumlah pekerja yang bekerja di lembaga swasta	954.407	756.807	0,79

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2011 dan DDA 2011, diolah

f. Keanggotaan Perempuan Dalam Organisasi Politik

Realitas partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga tinggi Negara, pemerintah, partai politik dan juga di organisasi-organisasi publik lainnya yang masih minim. Jumlah keterwakilan yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan sebuah keputusan. Dengan kata lain posisi perempuan dalam politik masih terpinggirkan, terkucilkan dan partai politikpun sebagian besar tidak memiliki platform yang jelas bagi perempuan, bahkan ada partai politik

yang tidak memiliki kebijakan-kebijakan spesifik perempuan. Gerakan Perempuan memperjuangkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen merupakan gerakan memperjuangkan kehidupan politik yang demokratis bagi seluruh perempuan. Berdasarkan realita tersebut, maka dipandang perlu ada kebijakan khusus untuk mendukung kaum perempuan agar mau terjun ke politik.

Tabel 2.74 Keanggotaan Perempuan Dalam Organisasi Politik Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota/Prov	Perempuan	Laki-Laki
1	Kota Yogyakarta	n/a	n/a
2	Bantul	5	71
3	Kulonprogo	4	62
4	Gunung Kidul	6	76
5	Sleman	7	69
6	DIY	9	67
	Jumlah	38	414

Sumber Data : Bakeslinmas DIY

g. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan yang terjadi secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga terhadap perempuan dan anak masih menjadi fenomena gunung es di DIY, di mana kasus yang dilaporkan kepada lembaga terkait belum mencakup semua kasus yang terjadi. Masyarakat masih menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib yang harus ditutupi dan tidak boleh diceritakan kepada pihak luar. Faktor ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki juga turut menjadi alasan korban kekerasan enggan untuk melaporkan kasusnya. Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan di DIY.

Tabel 2.75 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DIY, 2009-2011

NO	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan	883	929	647
2	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak	462	360	343
3	Jumlah Kepala Rumah Tangga	1.030.696	1.037.980	1.041.925
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,08	0,09	0,06
5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,04	0,03	0,03

Sumber : Data Pilah Gender dan Anak 2011- 2012, BPPM DIY, diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, sedangkan kekerasan terhadap anak cenderng menurun. Berikut adalah data jumlah kekerasan terhadap anak di DIY dari tahun 2009-2012:

Tabel 2.76 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di DIY Tahun 2010-2012 Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY

No	Nama Kab/Kota	Tahun						Jumlah
		2010		2011		2012		
		L	P	L	P	L	P	
1	Kota Yogyakarta	4	14	3	27	6	7	13
2	Kab. Bantul	1	32	5	24	7	17	13
3	Kab. Kulon Progo	0	26	2	25	8	19	10
4	Kab. Gunungkidul	1	45	3	31	3	19	7
5	Kab. Sleman	13	48	5	23	0	13	18

No	Nama Kab/Kota	Tahun						Jumlah
		2010		2011		2012		
		L	P	L	P	L	P	
6	Provinsi	51	125	62	133	35	90	148
	Total	70	290	80	263	59	165	209

Sumber: BPPM DIY

h. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.77 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, 2011-2012

Uraian	Feb-11	Feb-12
Angkatan Kerja Perempuan	896.154	855.162
Perempuan Usia Kerja	1.387.745	1.398.822
Persentase	64,58	61,13

Sumber : Pusdatinaker, diolah

i. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Menunjukkan upaya pemerintah menangani pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap kasus yang diadukan ke unit-unit pelayanan tindak kekerasan. Tabel berikut menunjukkan persentase jumlah pengaduan yang ditangani di unit-unit pelayanan pengaduan di DIY tahun 2010–2011 :

Tabel 2.78 Presentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, 2010-2011

Uraian	2010	2011
Jumlah unit pelayanan pengaduan	25	27
Jumlah Pengaduan yang tertangani	1305	999
Jumlah Pengaduan	1305	999
Persentase (%)	100	100

Sumber : BPPM DIY

Tabel 2.79 Presentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang Diselesaikan oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY Tahun 2010-2011

Uraian	2010	2011
Jumlah unit pelayanan pengaduan	25	27
Jumlah Pengaduan yang terselesaikan	873	596
Jumlah Pengaduan	929	647
Persentase (%)	94	92

Sumber : BPPM DIY

Berdasarkan tabel diatas bahwa pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 2%. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut karena amanah dari UU PKDRT bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan.

Tabel 2.80 Presentase Pengaduan Tindak Kekerasan Anak yang Terselesaikan oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY Tahun 2010-2011

Uraian	2010	2011
Jumlah unit pelayanan pengaduan	25	27
Jumlah Pengaduan yang terselesaikan	329	310
Jumlah Pengaduan	360	343
Persentase (%)	91	90

Sumber : BPPM DIY

Berdasarkan tabel diatas bahwa pengaduan tindak kekerasan terhadap anak mengalami penurunan sekitar 1%. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut karena amanah dari UU Perlindungan Anak bahwa anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan hak-hak dasar anak.

j. Pernikahan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun ini adalah banyaknya permohonan nikah dari masyarakat dengan usia perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Oleh sebab itu, Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) harus mengeluarkan surat dispensasi nikah.

Bila dilihat lebih jauh pada faktor penyebabnya, diketahui bahwa adanya budaya menikah muda, *married by accident*, atau karena faktor ekonomi. Bila fenomena ini tetap terjadi tanpa ada campur tangan kebijakan pemerintah, dapat dibayangkan akibat yang akan terjadi. Mulai dari ledakan penduduk, penurunan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kriminalitas sampai timbulnya amsalah ketahanan pangan.

Tabel 2.81 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY

No	Wilayah	2009		2010		2011	
		<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun
		P	L	P	L	P	L
1	Kota Yogyakarta	15	18	24	27	14	32
2	Kabupaten Bantul	31	56	93	52	42	105
3	Kab. Kulon Progo	21	33	19	44	30	26
4	Kab. Gunungkidul	19	19	42	36	59	68
5	Kab. Sleman	189	17	22	28	25	46
	DIY	275	143	200	187	170	277

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

2.4.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* yang rendah. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BKKBN Tahun 2011, untuk DIY peserta KB terbanyak berada pada kisaran umur 35–39 tahun, kepesertaan KB Pria masih rendah, dan *unmet need* masih relatif tinggi.

Upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

a. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

TFR merupakan jumlah anak yang dilahirkan oleh satu perempuan, hal ini menunjukkan bahwa TFR juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan penduduk.

Walaupun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total *fertility rate* (TFR) terendah di Indonesia, tetapi melihat tren yang ada terjadi lonjakan dari 1,8 (SDKI 2007) menjadi 2,1 (SDKI 2012). Salah satu sebabnya adalah, masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa mempunyai dua anak terlalu sedikit.Berikut adalah perkembangan TFR DIY :

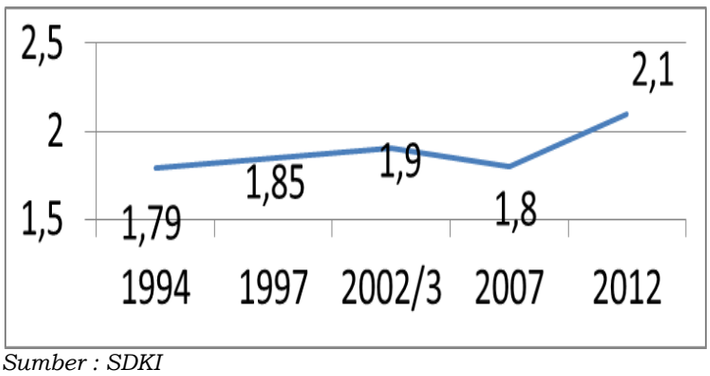

Sumber : SDKI

Gambar 2.28 Perkembangan TFR DIY, 1994-2012

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB dalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB menunjukkan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.82 Rasio Akseptor KB

Uraian	2010	2011
Jumlah Akseptor KB	410.200	375.831
Jumlah Pasangan Usia Subur	539.682	521.380
Rasio	76%	72%

Sumber: BPPM DIY

Tabel 2.83 Jumlah Peserta KB Aktif, Pasangan Usia Subur, Wanita Usia Subur, dan *Unmet Need* menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2011

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2010				Tahun 2011			
		Peserta KB Aktif	Jumlah PUS	Jumlah WUS	*Unmet Need* (%)	Peserta KB Aktif	Jumlah PUS	Jumlah WUS	*Unmet Need* (%)
1	Yogyakarta	32.966	47.505	83.902	16,31	31.940	47.613	81.766	13,36
2	Bantul	120.485	151.680	226.032	8,69	99.834	142.826	229.735	7,74
3	Kulon Progo	45.314	66.780	101.516	16,14	45.754	67.417	102.008	10,04
4	Gunungkidul	110.883	136.087	188.730	9,18	98.493	125.619	177.887	8,85
5	Sleman	100.552	137.630	277.113	13,29	99.810	137.905	223.265	9,97
	Provinsi DIY	410.200	539.682	877.293	9,67	375.831	521.380	814.661	9,67

Sumber : BKKBN DIY

Berdasarkan data Riskesdas 2010, capaian rata-rata nasional *unmet need* adalah sebesar 14%. Dari tabel diatas, pencapaian *unmet need* di DIY sudah

lebih baik dari angka nasional tetapi masih memerlukan penanganan lebih lanjut karena angka tersebut masih tergolong tinggi.

c. PUS Usia Istri Kurang Dari 20 Tahun

Secara ideal perempuan sebaiknya menikah di usia 20-35 tahun. Sedangkan untuk laki-laki beda 5 tahun, yaitu 25–40 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses degeneratif. Selain itu, secara psikologis, pada usia 20 tahun mulai matangnya emosional dan nalar seseorang. Di masyarakat masih ditemui PUS dimana istri berusia kurang dari 20 tahun. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk meminimalisir hal tersebut.

Tabel 2.84 PUS Usia Istri yang kurang dari 20 Tahun

Usia	Tahun 2010		Tahun 2011	
	Jumlah PUS	%	Jumal PUS	%
Jumlah PUS Usia < 20 Th	3.712	0,71	2.901	0,62
Jumlah PUS Usia 20 Th s.d. 29 Th	121.036	0,22	89.456	0,17
Jumlah PUS Usia 30 Th s.d. 49 Th	396.830	0,73	376.517	0,72
Jumlah	539.682		521.380	

Sumber :BPPM DIY

Berdasarkan tabel diatas bahwa PUS Usia Istri < 20 th mengalami penurunan sekitar 0,09 %. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga di kategorisasikan kedalam 5 tahapan keluarga, yaitu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Tabel 2.85 Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY, 2009-2011

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun					
		2009		2010		2011	
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%	Jumlah KK	%
1.	Pra S	174.534	18,35	187.277	20,15	225.823	24,30
2.	KS I	214.083	22,51	208.367	22,42	200.008	21,52
3.	KS II	222.674	23,41	198.237	21,33	146.038	15,72
4.	KS III	281.481	29,60	281.909	30,33	302.792	32,59
5.	KS III Plus	58.230	6,12	53.665	5,77	54.575	5,87
	Jumlah KK	951.002		929.455		929.236	

Sumber : BKKBN DIY

Tabel Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2009–2011 menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III.

e. Lembaga Bina Keluarga

Lembaga Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program Bina Keluarga merupakan suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran keluarga (Bapak/Ibu dan anggota keluarga lain) untuk membina tumbuh kembang balita , mendidik anak

remaja yang benar serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua perlu ditingkatkan. Keluarga adalah garis utama pertahanan masyarakat terhadap pertumbuhan masalah penduduk lansia. BKB, BKR, BKL di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami pertumbuhan.

Tabel 2.86 Lembaga Bina Keluarga menurut Kabupaten/Kota di DIY 2011-2012

Kab/Kota	BKB				BKR				BKL			
Tahun	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)
Kota Yogyakarta	95	28	102	28	35	13	66	14	48	14	80	80
Bantul	260	35	310	55	52	19	79	23	24	19	57	23
Kulonprogo	387	24	387	12	92	11	91	12	89	13	88	12
Gunung Kidul	459	39	446	23	81	15	84	18	114	19	119	106
Sleman	150	37	204	54	90	17	143	34	142	18	171	27
Jumlah	1351	163	1449	172	350	75	463	101	417	83	515	248

Sumber Data : BPPM DIY diolah
**) P= Percontohan.*

2.4.1.13 Urusan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Beberapa masalah sosial akan mempengaruhi pelaksanaan keberhasilan program-program pembangunan dari suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga seperti keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi salah satu sasaran program pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, diamanatkan agar daeraha melakukan pendataan PMKS dan PSKS. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. perlindungan sosial; dan

e. penanggulangan kemiskinan.

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak)

yang kurang mendukung atau menguntungkan. Berikut data PMKS di DIY Tahun 2010–2011.

Tabel 2.87 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan DIY, 2010-2011

No	PMKS	Satuan	2010	2011
1	Anak balita terlantar	Orang	4.353	2.842
2	Anak terlantar	Orang	32.728	28.204
3	Anak jalanan	Orang	448	312
4	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Orang	685	487
5	Penyandang Disabilitas	Orang	36.863	35.264
6	Tuna susila	Orang	224	174
7	Pengemis	Orang	297	208
8	Gelandangan	Orang	218	169
9	Lanjut usia terlantar	Orang	29.742	30.953
10	Korban bencana alam	Orang	249	726
11	Korban bencana sosial	Orang	26	70
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Orang	4.556	3.322
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	KK	3.433	3.476
14	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) orang	Orang	13.607	11.623
15	Keluarga Berumah Tak Layak Huni (RTLH)	KK	29.797	29.753
16	Keluarga fakir miskin	KK	124.805 *	124.805*
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	KK	1.326	1.143
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	2.068	1.718
19	Orang Dengan HIV/AIDS	Orang	930	1.094
20	Korban Tindak Kekerasan orang (KTK)	Orang	6.337	5.169
21	Keluarga Rentan	KK	76.823	76.823

Sumber : Dina Sosial DIY

*Ket: *) PPLS 2008*

***) PPLS 2011*

Beberapa permasalahan PMKS yang menjadi perhatian antara lain masih tingginya jumlah anak jalanan dan tingginya kasus penyalahgunaan NAPZA di DIY. Keberadaan anak jalanan sedikit banyak akan berkontribusi negatif terhadap citra DIY sebagai daerah tujuan wisata. Terkait hal itu, Pemerintah Daerah DIY telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk (1) mengentaskan anak dari kehidupan di jalan, (2) menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan (3) memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

b. Sarana Sosial

DIY memiliki beberapa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dari tabel di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah panti di DIY. Pada tahun 2011 terjadi penambahan jumlah panti asuhan sebanyak 5 panti dan panti rehabilitasi sebanyak 1 panti. Jumlah ini tetap sampai pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana sosial yang ada di DIY dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.88 Sarana Sosial Panti Asuhan dan Panti Jompo di DIY Tahun 2009-2011

Kabupaten/ Kota	2009				2010				2011			
	Panti Asuhan		Panti Wredha		Panti Asuhan		Panti Wredha		Panti Asuhan		Panti Wredha	
	Lembaga	Anak Asuh	Lembaga	Penghuni	Lembaga	Anak Asuh	Lembaga	Penghuni	Lembaga	Anak Asuh	Lembaga	Penghuni
Kota Yogyakarta	10	464	3	96	11	742	3	75	13	576	3	75
Kab.Bantul	12	393	1	60	13	515	1	50	16	592	1	50
Kab. Kulon Progo	15	837	1	24	15	605	1	25	17	840	1	25
Kab. Gunungkidul	12	478	0	0	10	558	0	0	13	605	0	0
Kab. Sleman	24	1146	1	100	27	1510	1	100	30	1549	1	100
DIY	**73**	**3318**	**6**	**280**	**76**	**3930**	**6**	**250**	**89**	**4162**	**6**	**250**

Sumber : DIY Dalam Angka 2009,2010, 2011, BPS, diolah

Selain Panti yang dikelola oleh swasta, Pemerintah DIY juga memiliki beberapa panti antara lain Panti Sosial Karya Wanita, Panti Sosial Bina Remaja, Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Bina Karya, Panti Sosial Tresno Werdha, dan Panti Sosial Pamardi Putra.

c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.89 Data PSKS di DIY, 2011

No	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	4.465 orang
2	Organisasi Sosial (Orsos)	316 Orsos
3	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	55 WKSBM
4	Karang Taruna	438 Karang taruna
5	Dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha kesejahteraan sosial	130 buah
6	Perintis kemerdekaan dan keluarga Pahlawan	15 orang

Sumber : Dinas Sosial DIY 2011

2.4.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY selama lima tahun terakhir (2008-2012) cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja DIY tercatat sebanyak 1.944.858 orang naik dari tahun 2011 yang sebanyak 1.872.912 orang. Sementara itu, selama periode 2008-2012 jumlah pengangguran di DIY tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 121.046 orang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 107.148 orang dan tahun 2011 menjadi 74.317 tetapi kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 77.150 orang.

Tabel 2.90 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan di DIY, 2008-2012 (Agustus)

Kegiatan	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk Usia 15+ (orang)	2.836.178	2.871.719	2.698.134	2.723.629	2.745.072
a. Angkatan Kerja (orang)	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858
Bekerja (orang)	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.867.708
Pengangguran (orang)	107.529	121.046	107.148	74.317	77.150
b. Bukan Angkatan Kerja (orang)	836.444	855.025	815.838	850.717	800.214

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2012

Jumlah penduduk yang bekerja di DIY yang bekerja dari tahun 2009 sampai 2011 menururt data BPS cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 penduduk DIY yang bekerja sebanyak 1.798.595 yang didominasi oleh penduduk di usia produktif usia 30 sampai dengan 49 tahun. Selain penduduk usia produktif, jumlah penduduk DIY umur 65 tahun keatas yang bekerja juga tergolong tinggi sebanyak 132.737 di tahun 2011. Berikut adalah tabel penduduk yang bekerja di DIY menurut golongan umur dan jenis kelamin :

Tabel 2.91 Penduduk yang Bekerja di DIY menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, 2009-2011

Golongan Umur	Agust-09			Agust-10			Agust-11		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
15-19	28.554	26.160	54.714	34.207	28.030	62.237	30.112	34.660	64.772
20-24	71.056	60.205	131.261	61.558	57.463	119.021	89.873	69.702	159.575
25-29	147.717	90.320	238.037	103.914	75.154	179.068	115.164	79.184	194.348
30-34	179.812	115.244	295.056	116.756	81.845	198.601	121.945	95.593	217.538
35-39	112.358	95.384	207.742	115.545	96.207	211.752	117.941	99.917	217.858
40-44	128.159	103.097	231.256	124.848	102.534	227.382	128.991	116.941	245.932
45-49	105.443	93.599	199.042	108.201	95.875	204.076	106.721	90.777	197.498
50-54	97.840	75.433	173.273	94.843	79.654	174.497	99.992	73.230	173.222
55-59	67.199	50.233	117.432	68.825	64.029	132.854	72.491	42.268	114.759
60-64	46.666	44.182	90.848	47.488	44.730	92.218	48.251	32.105	80.356
≥ 65	90.401	66.586	156.987	93.345	80.097	173.442	70.572	62.165	132.737
Jumlah	**1.075.205**	**820.443**	**1.895.648**	**969.530**	**805.618**	**1.775.148**	**1.002.053**	**796.542**	**1.798.595**

Sumber : BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional, diolah Pusdatinaker

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara penduduk tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK DIY pada Agustus 2012 sekitar 70,85%, meningkat sekitar 2,08 poin bila dibandingkan keadaan Agustus 2011 (68,77%) atau naik sekitar 0,38 poin dibanding Februari 2012 (70,47%).
Pola perkembangan TPAK pada periode 2010-2012 juga menunjukkan pola yang menarik. TPAK tidak banyak berubah tetapi terdapat kecenderungan pada bulan Agustus TPAK lebih rendah bila dibandingkan kondisi bulan Februari, kecuali Agustus 2012 yang tampak tidak banyak berubah dibanding Februari 2012. Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki pada Agustus 2012 mencapai sekitar 80,34%, sementara TPAK perempuan sebesar 61,78%.

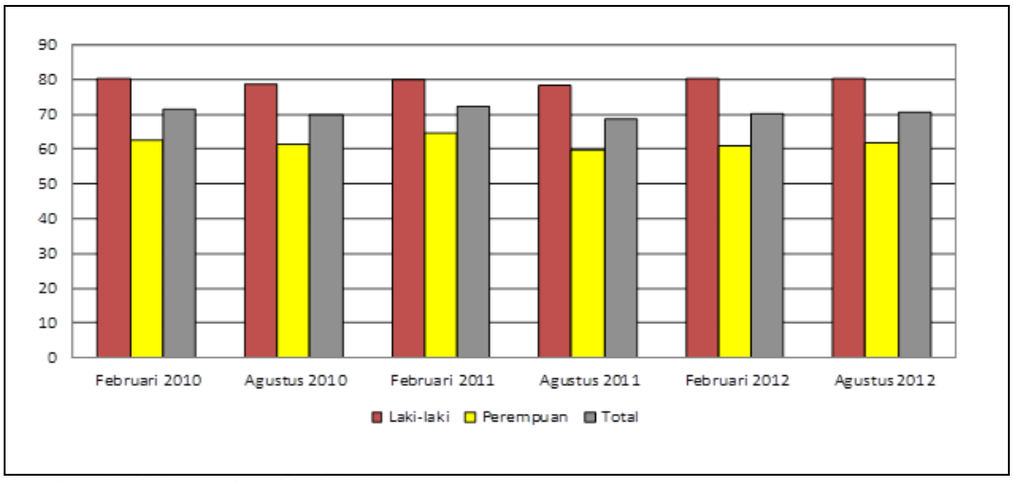

Sumber: BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.29 Perkembangan TPAK di DIY, 2010-2012

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, TPAK di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini karena di dua kabupaten tersebut tenaga kerja sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut sangat tergantung pada musim dan pola garapan, sehingga TPAK sangat berfluktuasi. Pada saat musim tanam atau panen memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak daripada pada masa garapan yang lain. Sementara di kabupaten lain tidak banyak berubah, meskipun di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terdapat kecenderungan penurunan nilai TPAK.

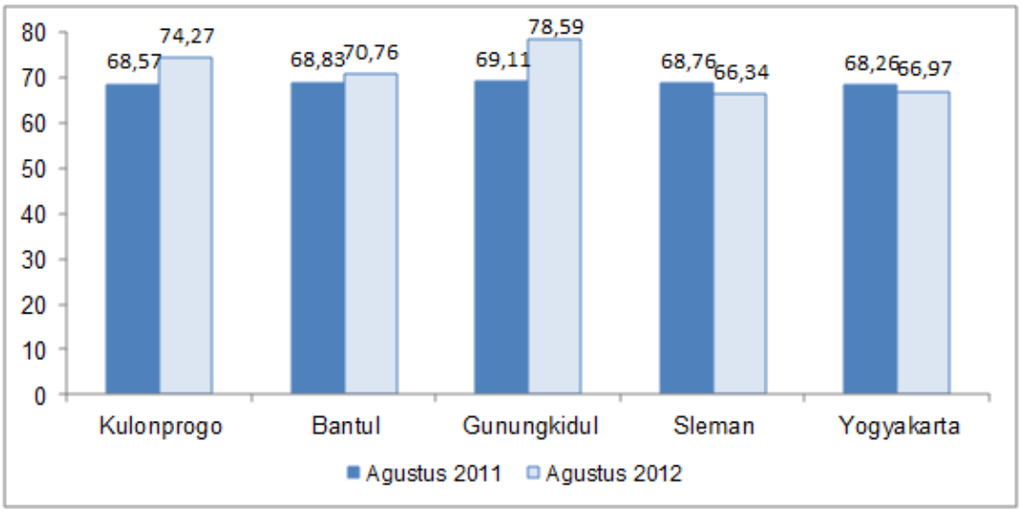

Sumber :BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.30 TPAK menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011-2012 (Agustus)

Jumlah angkatan kerja di DIY selama 2008-2011 cenderung dinamis. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 sebanyak 1.872.912 orang, sementara itu data pada tahun 2010 sebanyak 1.882.296 orang, tahun 2009 sebanyak 2.016.694 orang dan pada tahun 2008 sebanyak 1.999.734 orang. Untuk tahun 2012 diprediksi jumlah angkatan kerja sebanyak 1.894.924. Dengan demikian pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dari tahun 2008, 2009 dan 2010. Selanjutnya, jumlah pengangguran terbuka di DIY selama kurun waktu 2008-2011 juga menunjukkan angka dinamis Tahun 2008 sebesar 107.529 orang, naik pada tahun 2009 menjadi 121.046 orang, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 107.148 orang dan tahun 2011 turun menjadi 74.317. Sedangkan proyeksi jumlah pengangguran terbuka untuk tahun 2012 turun menjadi 72.564.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama kurun waktu 2008-2011 menunjukkan angka yang dinamis. Data pada tahun 2008 menunjukkan TPAK sebesar 70,41% yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 70,23%, angka ini menurun kembali di tahun 2010 menjadi 69,76%, pada tahun 2011 turun lagi menjadi 68,77% dan pada tahun 2012 TPAK diproyeksi mengalami kenaikan menjadi 68,88%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka pengangguran. Fluktuasi TPT di DIY dari tahun 2009 ke 2012 berada dalam kisaran 4-6%, meskipun ada kecenderungan mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 TPT sekitar 6,00%, pada Agustus 2010 sebesar 5,69%, dan pada Agustus 2011 dan 2012 sebesar 3,97%. Angka ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional yang berkisar 6-8%.

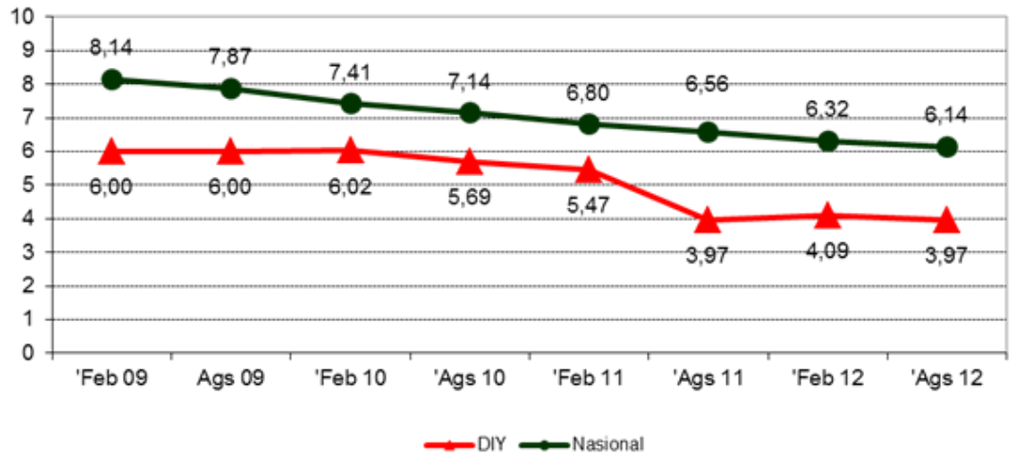

Sumber :BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, 2009-2012 (%)

Pada Agustus 2012 TPT di daerah perkotaan DIY sekitar 4,53%, sementara di perdesaan hanya 2,99%. TPT di perkotaan selalu lebih tinggi dibanding di perdesaan di DIY. Tingginya TPT di perkotaan dipengaruhi oleh beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sementara di perdesaan umumnya didominasi pertanian dengan daya tampung yang terbatas. Angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan pindah atau mondok di perkotaan, sehingga pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (*nglajo/commute/ulang-alik/*pulang-pergi) ke perkotaan.

TPT di kabupaten/kota mengalami variasi perkembangan pada periode Agustus 2011 ke Agustus 2012. Pola TPT antar kabupaten/kota juga terdapat perubahan, dimana nilai TPT di Kabupaten Sleman menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Pada Agustus 2012 TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman (5,42%), disusul Kota Yogyakarta (5,03%) dan Kabupaten Kulon Progo (3,91%). TPT rendah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul (1,92%) dan Kabupaten Bantul (3,60%).

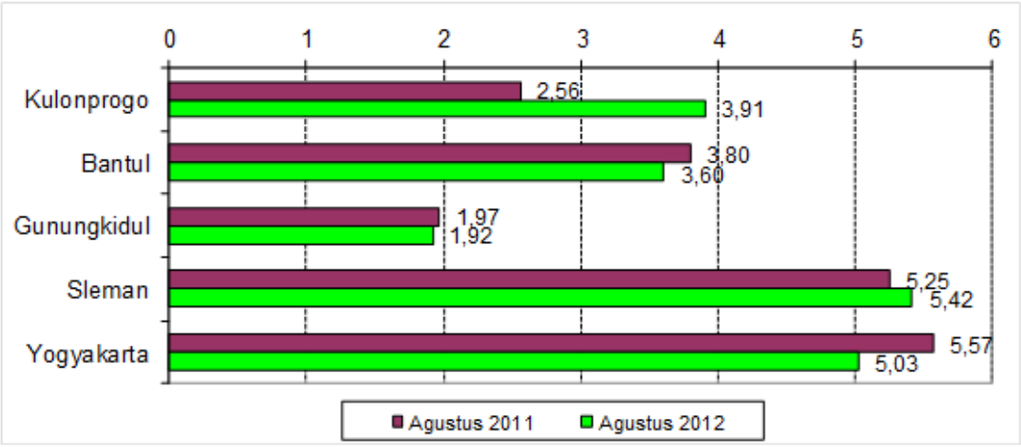

Sumber :BRS November 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di DIY (%), 2011-2012

Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2006 ke tahun 2007 kemudian mengalami kenaikkan hingga tahun 2010. Namun secara keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di perusahan mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 4,03%. Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.92 Tenaga Kerja Perusahaan, 2005-2010

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata Pertum buhan (%)
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (orang)	31.866	34.840	38.505	38.938	143.834	149.494	4,03%

Sumber:Disnakertrans DIY

2.4.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di DIY dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2012, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.090 koperasi, mengalami kenaikan sebanyak 109 koperasi atau 5,5% dibanding tahun 2011, yaitu sebanyak 1.981 koperasi. Demikian halnya untuk UKM pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan sebesar 2,020 UMKM atau sebesar 1% dibanding dengan tahun 2011.

Tabel 2.93 Data Keanggotaan, Pengurus dan Manager Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA KOPERASI		Jumlah Manager		Jumlah Karyawan	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Yogyakarta	29,038	21,898	34	26	586	325
2	Bantul	130,092	51,920	129	23	594	404
3	Kulon Progo	59,677	29,038	82	3	356	209
4	Gunungkidul	59,470	13,761	43	25	336	289

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA KOPERASI		Jumlah Manager		Jumlah Karyawan	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
5	Sleman	134,654	99,930	92	126	1761	1012
6	DIY	53,476	35,875	175	45	1272	689
Jumlah		466,407	252,422	555	248	4,905	2,928

Sumber: Dinas Perindakop Dan UKM,DIY

Keanggotaan perempuan dalam koperasi di DIY secara kesuluruhan sejumlah 35% dari seluruh anggota koperasi di DIY dengan jumlah perempuan yang menjadi manager koperasi sebanyak 248 orang atau 31% dari total jumlah manager koperasi dan karyawan koperasi sebanyak 81 orang atau 37% dari total karyawan koperasi.

Sementara itu untuk sektor UMKM di DIY pada tahun 2012 tercatat terdapat 203.995 unit usaha. Jumlah ini meningkat sebesar 2.020 dibandingkan dengan tahun 2011. Jika dilihat dari jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2012 jumlah pekerja perempuan dan laki-laki di sektor UMKM besarannya sebanding.

Tabel 2.94 Jumlah UMKM

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Unit Usaha	149,290	152,340	164,847	182,232	201,975	203,995

Sumber: Dinas Perindakop Dan UKM,DIY

Tabel 2.95 Komposisi Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan Tahun 2012 di Sektor UMKM

Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	
		Laki-Laki	Perempuan
Aneka Usaha	43,976	89,323	79,322
Perdagangan	58,363	105,903	110,903
Industri Pertanian	55,496	97,602	103,603
Industri Non Pertanian	46,160	87,600	90,601
Jumlah	203,995	380,428	384,429

Sumber: Dinas Perindakop Dan UKM,DIY

2.4.1.16 Urusan Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka DIY masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Perkembangan penanaman modal di DIY dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut:

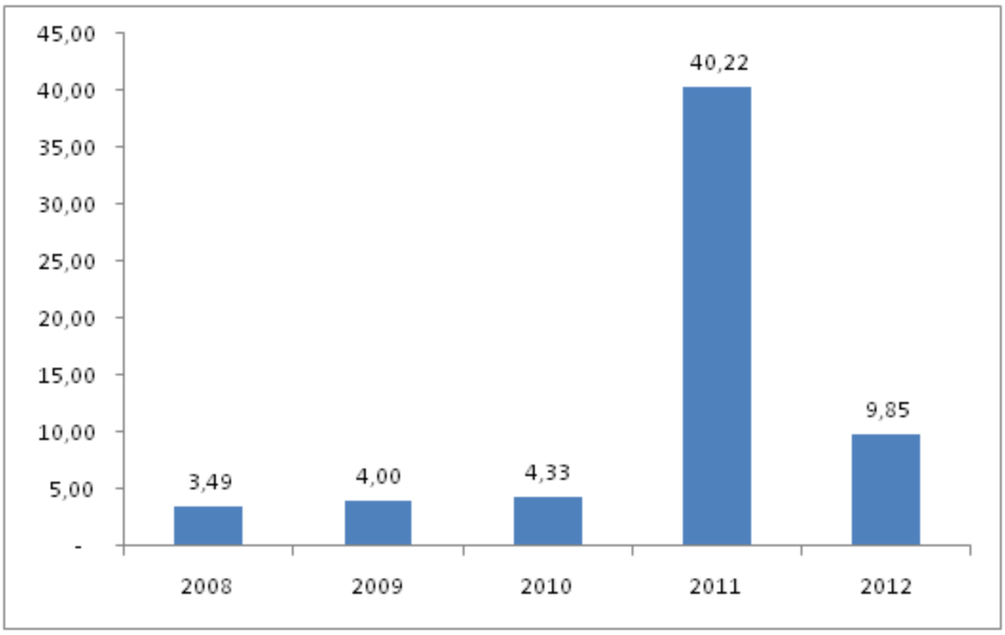

Sumber: BKPM DIY

Gambar 2.33 Pertumbuhan Investasi PMDN/PMA DIY (%), 2008-2012

Tahun 2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY sebesar 9,85% dengan nilai pertumbuhan Rp. 632.488.121.751,- yang terdiri dari kenaikan investasi PMDN sebesar 21,30% (senilai Rp. 492.802.910.146,-) dan pertumbuhan investasi PMA sebesar 3,40% (senilai Rp. 139.685.211.605,-). Rincian perusahaan yang merealisasikan investasinya (aktif) di DIY sejumlah 230 perusahaan (terdiri dari 110 PMA dan 120 PMDN) dari total 348 perusahaan yang tercatat, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 39.050 TKI serta 141 TKA. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan semester I/2012, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.96 Realisasi dan Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN DIY, 2008-2012

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	PMA+PMDN (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	1.806.426.455.845	2.415.461.744.857	4.221.888.200.702	142.187.960.933	3,49
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	168.757.500.000	3,99
2010	1.884.923.869.797	2.696.046.957.447	4.580.972.827.244	190.327.126.542	4,33
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008	1.842.605.192.764	40,22

Sumber: BKPM DIY

Perkembangan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada 5 tahun terakhir, sebagaimana tersaji dalam tabel diatas. Peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2011, karena realisasi perusahaan baru, perluasan perusahaan yang telah merealisasikan investasinya pada tahun-tahun sebelumnya, renovasi / peremajaan/ restruksturisasi perusahaan yang tentunya juga berimplikasi pada penambahan investasi. Pemulihan kondisi ekonomi di DIY pasca erupsi Gunung Merapi yang cepat juga memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi.

Sektor-sektor yang memberikan sumbangan pertumbuhan investasi meliputi sektor sekunder dan tersier yang berkembang cukup signifikan antara lain berupa jasa perhotelan, restoran, industri pengolahan, perdagangan, dan pengangkutan.

Upaya peningkatan promosi investasi telah dilaksanakan melalui bentuk keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi regional maupun skala nasional seperti gelar potensi investasi daerah (GPID), *Trade and Tourism Investment (TTI) Expo*, penyelenggaraan *one on one meeting*, *business forum/business meeting* dengan calon investor dan *stakeholder* terkait serta promosi peluang investasi melalui *website Jogja Invest*. Adapun peningkatan iklim investasi telah dilaksanakan dengan pembentukan Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang telah melayani izin/non izin sebanyak 74 jenis izin (53 izin usaha, 16 izin terkait usaha serta 5 buah izin non usaha), melaksanakan fasilitasi pelayanan serta pengawasan dan pembinaan perusahaan penanaman modal yang telah beroperasi di DIY, serta penyusunan rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD) dan penyusunan raperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di DIY.

Hasil penilaian kualifikasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Tentang Penetapan kualifikasi terhadap 130 PTSP tingkat provinsi, kabupaten dan kota tahun 2010, kantor Gerai P2T DIY telah masuk kualifikasi bintang satu dengan nomor urut satu, kemudian pada penilaian tahun 2011 telah naik kualifikasi menjadi bintang dua. Selanjutnya keikutsertaan DIY pada pelaksanaan Pameran Invesda Expo 2012 meraih juara harapan tiga stand terbaik. Pada Pameran Promosi Potensi Daerah Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun 2012, DIY berhasil meraih penghargaan sebagai *Brand Manage Champion 2012*[yr] kategori stand pemerintah.

Salah satu strategi yang juga diupayakan untuk peningkatan realisasi penanaman modal adalah optimalisasi serta revitalisasi peran Kantor Perwakilan Daerah (KAPERDA) DIY di Jakarta sebagai *single window* sekaligus *front office* Pemerintah DIY di Jakarta. Salah satu kegiatan yang telah dan akan terus diupayakan terkait hal tersebut diantaranya pelaksanaan *gathering* bersama perusahaan-perusahan penanaman modal di DIY yang memiliki kantor utama di Jakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut secara khusus merupakan strategi dalam upaya menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahan sehingga terus mempertahankan dan jika memungkinkan menambah investasinya di DIY.

2.4.1.17 Urusan Kebudayaan

Visi DIY sesuai dengan RPJPD 2005-2025 (Perda Nomor 2 Tahun 2009) adalah "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera".

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah DIY sebagai pusat Budaya terkemuka di Asia Tenggara adalah mewujudkan:

1) Museum-museum berstandar internasional;
2) Kelompok kesenian yang maju, mandiri, mempunyai jaringan internasional;
3) Cagar budaya yang lestari dan berdaya guna;
4) Peristiwa budaya bertaraf internasional;
5) Desa budaya yang maju dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya;
6) Dokumen dan karya seni klasik serta tradisi yang lestari, mampu memberikan arah kehidupan masyarakat karena kandungan nilai-nilai budi pekerti luhur yang ada di dalamnya;

7) Ruang seni budaya yang representatif dimana masyarakat bisa mengapresiasi seni budaya serta penghormatan dan pemanfaatan sejarah lokal DIY oleh seluruh masyarakat dalam pembangunan yang bersifat fisik ataupun non fisik.

Lima pilar utama dalam urusan kebudayaan menyangkut pembentukan karakter bangsa (jati diri bangsa); Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya seni, budaya daerah, kesejarahan, permuseuman; Pengelolaan cagar budaya yang optimal; Regenerasi SDM kebudayaan; dan Penataan lingkungan yang ramah budaya, sadar budaya dan kondusif untuk kreatif dan inovasi.

Pembangunan kebudayaan di DIY tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu namun, juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan DIY dalam bidang ekonomi. Kekayaan budaya DIY merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari "karya budaya". Keunggulan kompetitif Yogyakarta dalam bidang kebudayaan menjadi komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi DIY.

Selain mempunyai potensi "ekonomi" kebudayaan juga mempunyai daya tangkal terhadap budaya asing yang diakses oleh masyarakat DIY, kemajuan teknologi yang berakibat berkembangnya teknologi informasi seperti yang pernah disampaikan Alvin Tofler dalam *the third wave*-nya membuat dunia yang *boderless* sehingga masyarakat mempunyai kemudahan dalam mengakses berbagai informasi melalui berbagai sarana dari berbagai budaya. Membuat masyarakat langsung berhadapan dengan informasi tersebut sehingga hal ini akan mempengaruhi ketahanan budaya masyarakat di DIY. Informasi yang mengalir deras kepada masyarakat memiliki *content* positif dan negatif, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sejauh masyarakat mampu memilih sisi positif dari budaya-budaya baru yang mereka terima serta tetap mempertahankan budaya yang ada.

Pembangunan kebudayaan di DIY yang dilakukan bersama *stake holder* terkait dalam kurun waktu 2008-2012 melakukan upaya menyusun program/kegiatan dalam memperkuat ketahanan budaya dan mempertahankan budaya lokal yang ada serta memanfaatkan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari pembinaan sampai pada aktivitas pendukungnya. Aktivitas ini diwujudkan antara lain dalam bentuk program kegiatan yang meliputi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Program tersebut antara lain Program pengembangan nilai budaya; Program pengelolaan kekayaan budaya; Program pengelolaan keragaman budaya; Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

2.4.1.18 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program, yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya

mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi *entrepreneur* sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global.

Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat provinsi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan selama tahun 2008–2012 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

2.4.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Daerah Istimewa Yogyakarata (DIY) selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan.

Kondisi umum DIY di tahun 2008 sampai dengan juli 2012 cukup kondusif. Menurut laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Satkorpulsida (Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah) sampai dengan bulan juli 2012 kasus penipuan hingga saat ini masih merupakan kasus yang paling menonjol, disusul oleh kasus pencurian dengan pemberatan dan penggelapan. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang khususnya kasus *cyber crime*.

Peredaran narkoba dan minuman keras yang semakin meluas menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak anarkis dan kejahatan di kalangan pelajar dan mahasiswa yang pada akhirnya akan memberikan penilaian negatif bagi citra DIY. Sebagai konsekuensi predikat miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan. Heterogenitas masyarakat tersebut menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah DIY dilakukan dengan pendekatan

preemptif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan preemptif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan tersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir. Dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan, maka Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri dilakukan dengan:

1. Membentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Tim Terpadu Tingkat Daerah dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian, serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung pada pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaian;
2. Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedapankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
3. Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

Melalui Inpres ini, Presiden menugaskan Gubernur sebagai Ketua Tim Terpadu Tingkat Provinsi untuk:

1. Menyusun rencana aksi terpadu di daerahnya dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan di daerahnya;
3. Segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di daerahnya; dan
4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Menko Polhukam.

2.4.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007 pada urusan pendidikan, dengan adanya perubahan fokus unsur penyelenggaraan RSBI/SBI yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota menyerahkan SMP, SMA dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional kepada pemerintah provinsi. Sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah DIY, telah dilaksanakan pengalihan pengelolaan penyelenggaraan RSBI/SBI dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah DIY yang diikuti penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) penyelenggaraan RSBI dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 8 Maret 2010.

1. Pemerintahan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Urusan sampai tahun 2012 yang terselesaikan adalah:

- Terlaksananya kesepakatan bersama dan kesepakatan batas wilayah antar kabupaten dan antar provinsi dengan melalui pemasangan pilar batas, pengukuran titik koordinat, rekonstruksi jalur batas, pemberian akses jalan di perbatasan.
- Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012, sesuai dengan Pasal 6 dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk menggantikan istilah Muspida dengan ketugasan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dan kelancaran pembangunan daerah
- Terlaksananya kesepakatan kerjasama antar anggota MPU dalam Rapat Gabungan FKD MPU XII di Bandung Jawa Barat. Selain itu juga disepakatinya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang jadwal Rakergub FKD MPU XIII, SKB Program Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2013 dan rekomendasi kepada Pemerintah.
- Telah disusun masukan mengenai mekanisme penetapan pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan

kegiatan pengawalan pembahasan peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (RUUK).

- Tanggal 31 Agustus 2012 keluarlah Undang- Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX yang berasaskan pengakuan atas hak asal usul kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, pendayagunaan kearifan local. Dengan tujuanmewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan social yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Dengan kewenangan sebagai berikut a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, c) kebudayaan, d) pertanahan, e) tata ruang.

2. Organisasi

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010–2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merespon tuntutan reformasi birokrasi dimaksud, Pemerintah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Tahun 2012 yang mendapatkan dan menerapkan ISO sejumlah 3 (tiga) KPPD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Target ISO pada unit kerja tersebut merupakan ISO perpanjangan dengan penambahan komponen/ unsur penilaian di bidang pelayanan. Beberapa instansi tersebut merupakan instansi yang diproyeksikan akan mendapatkan perpanjangan sertifikat ISO 9001: 2008. Sertifikasi ISO sebagai indikator kinerja pemerintahan umum merupakan bentuk penghargaan atas penilaian mutu pelayanan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Hukum

Dari sisi pelayanan penunjangan supremasi hukum telah dilaksanakan beberapa kegiatan berupa peningkatan kualitas perundang-undangan, pelayanan informasi hukum, pengawasan produk hukum kabupaten/ kota dan bantuan hukum. Dari data pencapaian kinerja pelayanan hukum mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 terlihat bahwa jumlah produk hukum yang ditetapkan kecenderungannya semakin meningkat, sedangkan terhadap jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditelaah serta jumlah fasilitasi

penanganan dan advokasi permasalahan hukum cenderung fluktuatif tiap tahun dikarenakan tergantung pada jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditetapkan serta jumlah permasalahan hukum yang ditangani.

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, yang menyatakan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

Dalam upaya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sebagai implementasinya terbitkannya Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Aksi PPK untuk strategi pencegahan meliputi (a) perizinan usaha (b) pengadaan barang dan jasa, (c) transparansi perencanaan dan penganggaran serta akses terhadap informasi.Pada tahun 2014 semua Kabupaten/Kota wajib menyusun rencana aksi PPK untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, yang setiap triwulan dilaporkan kepada Presiden melalui UKP4.

4. Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di Pemerintah DIY, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional.

5. Umum

Untuk memenuhi hak-hak masyarakat akan kebutuhan informasi dan mendukung transparansi akuntabilitas publik, sekaligus melaksanakan publikasi kegiatan dan kebijakanpemerintah antara lain melalui website www.jogjaprov.go.id. Selama tahun 2010 berita yang berhasil di*upload* sebanyak 698 buah, dan jumlah pengunjung yang mengakses *website* sebanyak 219.308 orang. Kunjungan terbanyak terjadi pada bulan November 2010 sebanyak 84.140 orang, ketika informasi dan proses pendaftaran CPNS dimuat dalam *website*.

Dalam menyampaikan informasi agar cepat terinformasikan kepada publik, kepada reporter www.pemda-diy.go.id. digariskan bahwa sebagai media *online*, maka "*berita hari ini, harus tayang hari ini*".

Selanjutnya, untuk mewujudkan pemerintah yang peka dan responsif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat serta memberi peluang terjadinya sinergi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dilaksanakan kegiatan dialog interaktif di televisi, iklan layanan masyarakat, siaran nasional citra Jogja melalui RRI, sarasehan radio. Sejak tahun 2009 bekerja sama dengan Jogja TV, menayangkan acara Citra Jogja sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kemitraan dengan pers sangat penting untuk mendukung publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah. Kemitraan dilakukan melalui *pers tour* dan jumpa pers.

Sebagai upaya mendukung sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dan hasil-hasil yang telah dicapai maupun program-program yang sudah dilaksanakan telah didistribusikan Buletin Siaran Pemerintah Daerah Edisi Bulanan dan Edisi Khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan dan dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintahan, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat daerah yang juga merupakan suatu pengaturan kelembagaan yang sistematik, dan berjangka panjang untuk mendorong, menyebarluaskan dan menerapkan inovasi teknologi dalam aspek pembangunan maka dibangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Ada beberapa hal yang medasari pentingnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dibentuk. Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Sistem inovasi dibutuhkan dikarenakan juga oleh karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, keterampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat, dan pengelolaan SDM kolaboratif serta rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat. Kondisi ini mendesak dibentuknya suatu sistem untuk mengatasi permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan sebuah pola pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, keseluruhan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, aksi, dan proses produksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan, dan difusi inovasi serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai pembangunan sebuah daerah.

Tujuan dari pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah:

1. Visi pembangunan ekonomi lokal berbasis IPTEKMAS;
2. Mendayagunakan segenap potensi pembangunannya secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui inovasi;
4. Proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah dengan membentuk jejaring;
5. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan;
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Salah satunya dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja;
7. Menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor;
8. Menciptakan kebijakan berdasarkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

6. Sekretariat DPRD

Lembaga perwakilan rakyat, sebagai salah satu simpul utama penyelenggaraan pemerintahan, menjadi katup terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Agar lembaga perwakilan rakyat dapat berperan secara optimal harus didukung dengan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan, Program yang dilaksanakan tahun 2008–2012.

7. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 disusun 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur tentang APBD sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2011 disusun 4 Peraturan Daerah dan 7 Peraturan Gubernur sedangkan tahun 2012 akan disusun 12 Peraturan Gubernur.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

8. Perangkat Daerah

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010–2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010–2014, yakni:

1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merespon tuntutan reformasi birokrasi dimaksud, Pemerintah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

9. Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Disiplin PNS ditegakkan antara lain dengan penggunaan mesin

presensi elektronik bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah DIY. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS dan selanjutnya diberikan *reward* bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. Penilaian kinerja PNS juga mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu PNS. Formulasi penilaian kinerja PNS akan dikembangkan dari tahun ke tahun. *Reward* juga diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan tali asih bagi PNS dan PTT yang memasuki masa purna tugas. *Punishment* diterapkan bagi PNS dengan penegakan peraturan perundang- undangan bagi PNS.

Pengembangan SDM tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang paling kuat dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, yang dicapai melalui upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

10. Persandian

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se-DIY serta UTP Jajaran persandian Muspida yang meliputi :

1. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia
2. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY;
3. Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU;
4. Jajaran POLDA;
5. Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah DIY.

2.4.1.21 Urusan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Sebagaimana arahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mendefinisikan bahwa **kedaulatan pangan** merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan, **kemandirian pangan** adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Adapun **ketahanan pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, harus mengutamakan produksi wilayah setempat dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan (distribusi) dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, terutama pada daerah rawan pangan, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dari ketiga aspek tersebut, sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar, yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan. Keterpaduan SPM Bidang Ketahanan Pangan dengan tiga aspek strategis diatas merupakan rekonstruksi kebijakan pangan menuju ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan melalui kerjasama kolektif dan sinergis diantara pihak-pihak terkait.

a. **Ketersediaan Pangan**

   Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan melalui sisi produksi, DIY mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas padi, jagung, dan ubi kayu. Hal tersebut dikarenakan terjadi penambahan luas panen untuk komoditas padi sawah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul untuk penambahan luas panen padi ladang. Selain itu, upaya intensifikasi yang dilakukan secara terpadu juga mampu mendongkrak produktifitas sejumlah komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar) pada tahun 2012.

   Untuk ketersediaan daging konsumsi untuk pemenuhan protein hewani juga mengalami peningkatan pada tahun 2011. Peningkatan produksi daging ini terkait dengan peningkatan produksi daging untuk komoditas sapi, domba, kambing, dan ayam pedaging. Selain itu sumber protein hewani yang bersumber dari ikan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari produksi perikanan budidaya maupun tangkap. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 mencapai 50.246 ton dan produksi perikanan tangkap mencapai 6.570 ton.

Berdasarkan kecenderungan peningkatan produksi pangan diatas dan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2012 sebesar 3.689 KKal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannnya sebesar 100,63 gram/kapita/hari.

b. Distribusi Pangan

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komooditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari taget 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

c. Konsumsi dan Pengawasan Pangan

Jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 1.938 Kkal/kapita/hari. Namun, jumlah ini masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari.

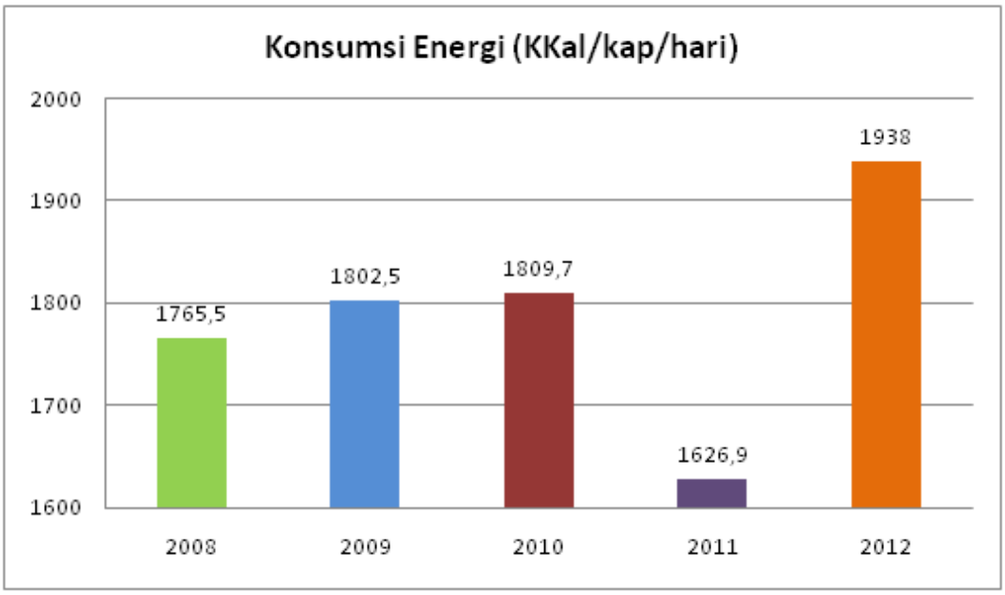

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2012 (diolah)

Gambar 2.34 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk DIY 2008-2012 (Kkal/kapita/hari)

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2012 mencapai sebesar 49,7 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut masih berada di bawah angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari.

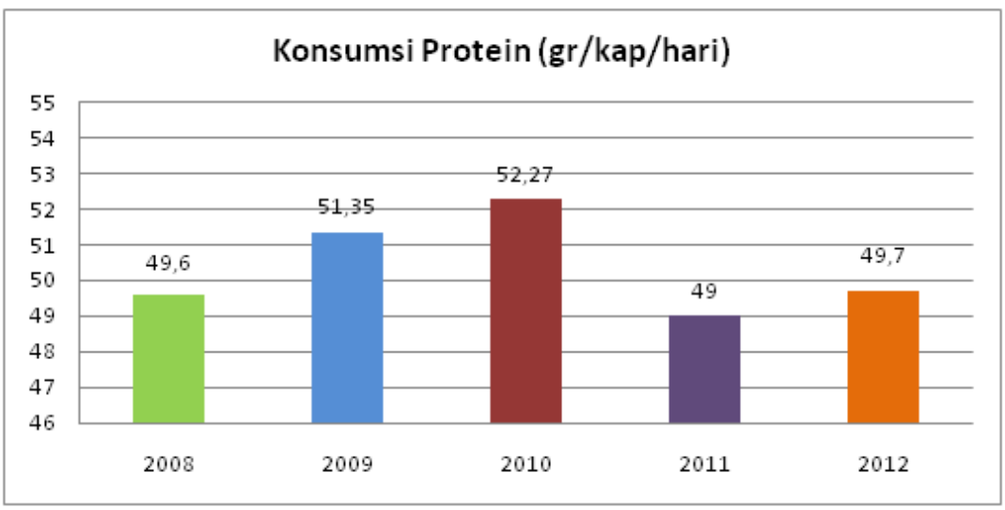

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2012 (diolah)

Gambar 2.35 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY 2008-2012 (gram/kapita/hari)

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2011 adalah 85,6. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.

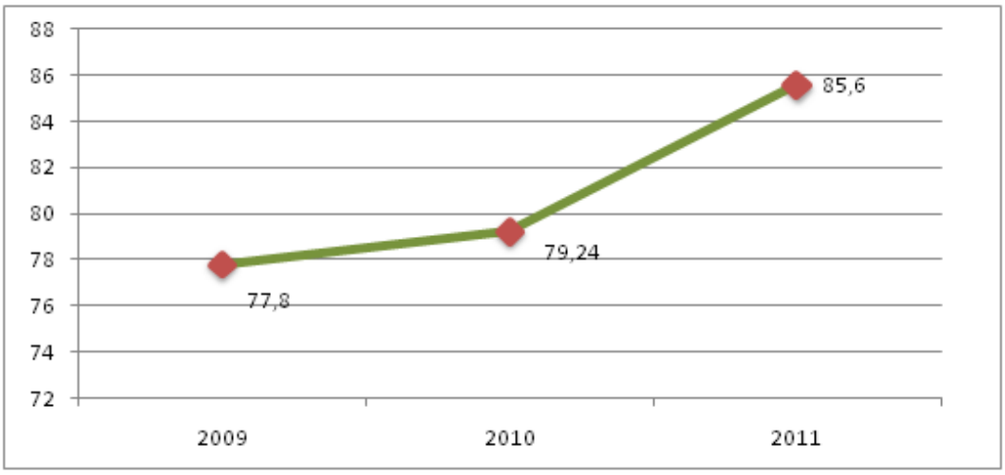

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanDIY, 2012 (diolah)

Gambar 2.36 Skor Pola Pangan Harapan DIY, 2009-2011

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan di DIY.

Pembangunan ketahanan pangan selain diarahkan dalam RPJMN 2010-2014 juga diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang MDG's. Terkait dengan hal itu, maka perlu disusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015 di tingkat provinsi. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tesebut, DIY telah menetapkan Pergub Nomor 57 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi DIY Tahun 2011-2015.

RAD-PG DIY dirancang bersinergi dengan RPJMD DIY dan RAN-PG, yakni penurunan prevalensi gizi kurang anak balita, penurunan prevalensi pendek anak balita, dan pencapaian konsumsi pangan dengan asupan kalori 2.000 Kkal/kapita/hari. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan IPM tersebut, maka sasaran RAD-PG DIY adalah:

1. Penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita;
2. Penurunan prevalensi pendek balita;
3. Penurunan Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil;
4. Penurunan kerawanan pangan masyarakat;
5. Peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian;
6. Peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat;
7. Peningkatan mutu dan keamananpangan yang dikonsumsi masyarakat;
8. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, maka akan dilakukan berbagai program dan kegiatan dalam bentuk RAD-PG 2011-2015. Program dirancang dalam satu rencana yang integratif dalam 5 pilar rencana aksi, yang terdiri atas:

1. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada WUS, ibu hamil dan anak balita;
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;
3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
4. Peningkatan PHBS;
5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

2.4.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Seluruh desa/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011 :

Tabel 2.97 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah LPMD/LPMK		Asosiasi LPMD/LPMK	Jumlah
		LPMD	LPMK		
1	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
2	Kab. Bantul	75	-	1	76
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
7	Total	393	45	6	444

Sumber : BPPM DIY

b. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa

Selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat desa, dibentuk pula lembaga pemberdayaan ekonomi desa seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Lumbung Pangan, Pasar Desa, dan Badan Kredit Desa. Tabel berikut menunjukkan jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa di DIY tahun 2010 :

Tabel 2.98 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2011

Kab/Kota	Jumlah LSM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif				Jumlah
	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Lumbung Pangan	Pasar Desa	Badan Kredit Desa	
Kota Yogyakarta	45	44	31	0	120
Kab.Bantul	75	48	55	10	160
Kab. Kulon Progo	88	72	41	20	232
Kab. Gunungkidul	144	77	138	15	304
Kab. Sleman	86	69	43	35	238
Jumlah DIY	438	310	308	80	1.136

Sumber : BPPM DIY

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

c. Posyandu Aktif

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan jumlah posyandu dan posyandu aktif di DIY.

Tabel 2.99 Jumlah Posyandu menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Posyandu				Total Posyandu
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	Kota Yogyakarta	-	91	166	365	622
2	Bantul	64	390	512	157	1.123
3	Kulon Progo	90	124	409	338	961
4	Gunungkidul	6	241	929	286	1.462
5	Sleman	112	272	675	452	1.511
	JUMLAH	**272**	**1.118**	**2.691**	**1.598**	**5.679**

Sumber : Profil Kesehatan, 2011

Tabel 2.100 Persentase Posyandu Aktif menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2011

Kabupaten/ Kota	2010			2011		
	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%
Kota Yogyakarta	622	449	72,19	622	531	77,73
Kab.Bantul	1.123	518	46,13	1.123	669	59,57
Kab. Kulon Progo	960	670	69,79	961	747	83,11
Kab. Gunungkidul	1.461	1.287	88,09	1.462	1215	74,59
Kab. Sleman	1.504	1.161	77,19	1.511	1127	72,19

Kabupaten/ Kota	2010			2011		
	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%
Jumlah DIY	5.670	4.085	72,05	5.679	42,89	75,52

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2010 - 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Persentase Posyandu Aktif di DIY di tahun 2011 dibanding tahun 2010. Di tahun 2011, persentase posyandu aktif di kabupaten/kota di DIY menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, karena masing-masing telah melebihi angka 50%. Cukup tingginya persentase Posyandu aktif di DIY ini cukup berarti signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita.

d. Persentase PKK aktif

Persentase PKK aktif di DIY menunjukkan angka yang menggembirakan. Dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%). Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat terutama kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi. Tabel berikut menunjukkan persentase PKK aktif di DIY menurut kabupaten/kota tahun 2010 :

Tabel 2.101 Persentase PKK Aktif menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Kota Yogyakarta	60	60	100
Kab.Bantul	93	93	100
Kab. Kulon Progo	101	101	100
Kab. Gunungkidul	163	163	100
Kab. Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber : BPPM DIY

e. LPM Berprestasi

LPM (LPM, PKK, Posyandu) berprestasi di DIY setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa LPM mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Tabel berikut menunjukkan LPM Berprestasi di DIY menurut Kabupaten/Kota di tahun 2012:

Tabel 2.102 LPM Berprestasi menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012

Kabupaten/Kota	LPM		PKK		Posyandu	
	Jml LPM	Jml LPM Berprestasi	Jml PKK	Jml PKK Berprestasi	Jml Posyandu	Jml Posyandu Berprestasi
Kota Yogyakarta	45	6	60	10	622	365
Bantul	75	12	93	10	1123	157
Kulonprogo	88	9	101	10	961	338
Gunung Kidul	144	15	103	10	1462	286
Sleman	86	8	104	10	1511	452
DIY	6	-	1	-	-	-
Jumlah	444	50	522	50	5.679	1.598

Sumber Data : BPPM DIY diolah

2.4.1.23 Urusan Statistik

Urusan statistik di DIY diampu oleh dua instansi. Pertama oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan yang kedua adalah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi pemerintah di daerah. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan.

Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Statistik Daerah. Pada tahun 2012 jumlah program dilaksanakan sebanyak satu program dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2012, capaian fisik rata-rata sebesar 41,85% dengan capaian keuangan sebesar 33,74%. Hal ini disebabkan karena sesuai aliran kas bahwa target fisik s/d bulan Juni 2012 sebesar 41,85% sedangkan target keuangan s/d bulan Juni 2012 sebesar 40,52%.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut:

1) Urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validitas data. Karena ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data.
2) Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
3) Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan perundang-undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi dinas, instansi, lembaga terkait penanggungjawab data dalam penyediaannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa solusi telah dilakukan di antaranya sebagai berikut :

1) Mengingat banyaknya instansi yang berfungsi sebagai penyedia data di daerah, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, sehingga terjadi komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
2) Dibutuhkan adanya ketegasan dalam pembagian proporsi tanggung jawab masing-masing instansi penyedian data agar tidak terjadi duplikasi data, atau sebaliknya ketiadaan data yang diakibatkan oleh tidak adanya instansi pengampu penyediaan data tertentu;
3) Pemahaman peraturan perUndang- Undangan tentang data dan statistik baik peraturan perUndang- Undangan dari tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari tumpang tindih dalam hal penyajian data serta untuk memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyedia data dan statistik.

2.4.1.24 Urusan Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan di DIY dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah DIY mengembangkan sistem kearsipan dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dan otomasi kearsipan. Tindak

lanjut dari penerapan teknologi informasi adalah dengan penyediaan khasanah arsip dalam bentuk digital yang dapat diakses masyarakat secara online.

2) Dalam rangka penyusunan kegiatan kearsipan, telah disusun *grand design* kearsipan yang memberikan panduan tahap demi tahap kegiatan yang berskala prioritas untuk dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2010 – 2025.
3) Layanan kepada masyarakat dilengkapi dengan inventaris khasanah arsip yang bersifat tematik seperti khasanah tentang Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman yang diolah dan dilayankan dalam bentuk layanan bersama antara Pemerintah DIY dengan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Disamping itu juga disediakan koleksi khasanah arsip yang sudah dialih mediakan dalam bentuk digital, dialihaksarakan dalam tulisan latin, dan dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia yang bertujuan semakin memudahkan pengunjung dan pemerhati arsip.
4) Adanya jaringan kearsipan dengan lembaga kearsipan dari seluruh Indonesia yang ditunjang melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah dalam bentuk daftar pertelaan arsip bersama yang bersifat online yang dapat diakses masyarakat melalui internet.
5) Dalam rangka penanggulangan bencana gempa dan Gunung Merapi, Pemerintah DIY memberikan layanan penyelamatan arsip kepada pemerintah desa maupun masyarakat dengan mengalokasikan 1 (satu) unit mobil Masyarakat Sadar Arsip (Masdarsip) di lokasi pengungsian setiap hari dengan kegiatan berupa penyelamatan arsip pasca bencana.
6) Belum tersedianya gedung depo untuk penyimpanan arsip dinamis dan arsip statis. Saat ini penyimpanan arsip dilakukan di Ruang Hall (terbuka) yang akibatnya memperpendek umur arsip.

2.4.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik(*e-government).* Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS). Sampai dengan Tahun 2012 telah ditetapkan sebanyak 9 urusan atau bidang layanan unggulan urusan DGS.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/*global area network*) di Pemerintah DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Sampai dengan akhir tahun 2011, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah DIY telah menghubungkan 89 lokasi perkantoran Pemerintah DIY yang terdiri dari 53 lokasi perkantoran dengan kabel HFC dan 23 titik lokasi dengan wireless. Sejak tahun 2009, jaringan tersebut menghubungkan 1.494 komputer untuk seluruh SKPD yang ada di

lingkungan Pemerintah DIY. Diharapkan sampai dengan Tahun 2017 seluruh kantor Pemerintah DIY telah terlayani sistem jaringan yang terpusat di LTMI (Kepatihan) dengan baik.

Seluruh program sudah mulai dengan mengembangkan pelayanan secara *online*. Beberapa diantaranya adalah *Agricente*r oleh Dinas Pertanian, *Fishery Bussiness Center* oleh Dinas Perikanan dan kelautan, Jogja belajar oleh Dinas Pendidikan, Jogja Bisnis oleh Disperindagkop, Jogja Sehat oleh Dinas Kesehatan, *Visiting Jogja* oleh Dinas Pariwisata, Bursa Kerja Online oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plaza Informasi oleh Dishubkominfo, *Jogja Invest* oleh BKPM.

Program pendukung pelaksanaan DGS di pemerintah DIY untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain Portal Pemerintah DIY, CPNS *Online* (Penerimaan CPNS Secara *Online*), LPSE (Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik), Data dan Informasi Bencana, SIPKD, SIMPEG, SIMONEV, SIM Perijinan Terpadu Pemerintah DIY.

Selanjutnya dengan konsep *e-gov* tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terliat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis *Citizen Centris*.

2.4.1.26 Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis di DIY khususnya terkait dengan keberadaan DIY sebagai kota pelajar. Usaha untuk memperbaiki kualitas layanan perpusatakaan senantiasa dilakukan dengan berbagai cara. Untuk lebih meningkatkan layanan perpustakaan pada masyarakat, pada tahun 2010 dilakukan sertifikasi layanan perpustakaan dengan melakukan perbaikan baik dari sisi fisik, fungsi, maupun administrasi dengan bukti diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008.

Tindak lanjut dari diperolehnya ISO 9001:2008 adalah adanya survei kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan dimana hasil dari survei adalah terdapat peningkatan kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakan sebelum dan sesudah diperolehnya ISO 9001:2008 sebesar 71%. Perpustakaan DIY selalu berupaya agar masyarakat tertarik berkunjung ke perpustakaan dengan meningkatkan pelayanan dan penambahan koleksi yang bersifat tematik, koleksi buku-buku kuno sudah dialihkan dalam bentuk digital dan dialihkan dalam tulisan latin dan bahasa Indonesia buku serta pembangunan gedung perpustakaan terpadu, membuat jaringan perpustakaan dengan perguruan tinggi yang ada di DIY berupa katalog online yang dapat diakses masyarakat melalui internet www.jogjalib.jogjakarta.go.id. Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah DIY memberikan layanan *trauma healing* kepada pengungsi ketika terjadi bencana gunung merapi dengan mengalokasikan 2 (dua) unit perpustakaan keliling di lokasi pengungsian setiap hari dengan kegiatan berupa *story telling* dan penyediaan koleksi yang bersifat menghibur.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1 Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis bagi DIY. Sektor pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Bagi DIY, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat

dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor jasa-jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam rentang waktu 2008-2011 kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan. Akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,42% per tahun.

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan atau kedaulatan pangan. Pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan konsumsi masyarakat dalam wilayah tersebut, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat. Data menunjukkan produktivitas sub sektor tanaman pangan di DIY mempunyai kecenderungan meningkat. Komoditas padi bahkan berada di atas rerata nasional. Produktivitas komoditas tanaman pangan unggulan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:

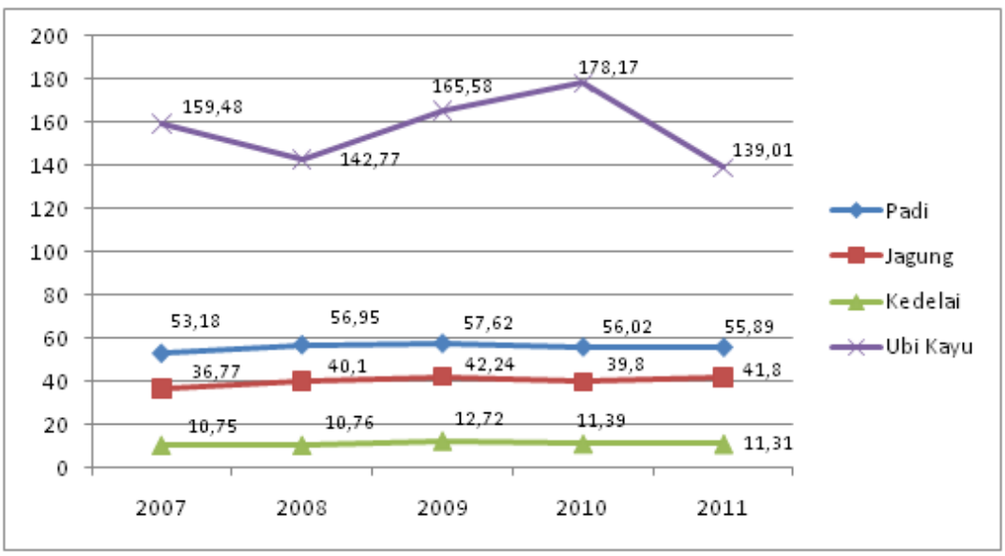

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012 (diolah)

Gambar 2.37 Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu DIY, 2007-2011

Wilayah DIY juga merupakan sentra tanaman sayuran terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai besar. Kedua komoditas tersebut memiliki luasan panen terluas dari total 18 komoditas sayuran di DIY atau memiliki besaran areal sebesar 47%. Untuk bawang merah sebagian besar menjadi komoditas unggulan daerah Bantul (85%). Sedangkan untuk komoditas cabe besar menjadi sentra pada wilayah Kulon Progo (41,35%), Sleman (32,65%), dan Bantul (17,69%). Peningkatan luas panen yang berdampak pada peningkatan produksi menunjukkan bahwa secara agro-klimatologi, wilayah DIY secara umum memiliki kesesuaian untuk pengembangan komoditas sayuran dengan dukungan lahan yang subur, ketinggian yang memadai, curah hujan yang cukup, dan iklim/temperatur yang cocok.

Potensi komoditas buah-buahan dijumpai pada semua kabupaten/kota di DIY. Setidaknya terdapat 21 komoditas buah-buahan yang dibudidayakan pada wilayah DIY. Sebagaimana komoditas sayuran, sebagian besar komoditas buah-buahan banyak dijumpai pada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Komoditas salak merupakan andalan pada Kabupaten Sleman dan buah pisang menjadi tanaman andalan bagi Kabupaten Bantul.

Sementara itu untuk sub sektor peternakan, wilayah DIY memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Untuk ternak besar pada wilayah DIY, sebagian besar atau 99% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Pertumbuhan populasi ternak menunjukkan angka positif pada tahun 2011 sebesar 7,4%. Produksi daging juga mengalami kecenderungan meningkat. Hal ini dalam rangka mendukung kebijakan strategis swasembada daging tahun 2014.

Rata-rata pertumbuhan komoditas unggulan perkebunan dari tahun 2007 hingga 2011 sebesar 1,64%. Komoditas perkebunan tersebut memiliki luasan yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan. Potensi unggulan subsektor perkebunan yang dimiliki oleh DIY adalah kelapa, kopi, jambu mete, kakao, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman.

Agribisnis perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk yang dihasilkan, pengolahan dan pemasaran hasil yang memadai serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna serta tingkat kemampuan petani dan kelembagaan petaninya di dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis juga memadai.

Di sisi lain efisiensi usaha tani akan dapat tercapai apabila produksi yang tinggi tersebut dapat diimbangi dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dengan peluang pasar yang baik serta dicapai tingkatan dengan harga yang wajar. Dengan berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di DIY maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar.

Selain itu, hal terpenting dalam merevitalisasi sektor pertanian untuk mendukung memperkuat daya saing produk pertanian adalah meningkatkan kapasitas SDM (sumberdaya manusia) dan meningkatkan kelembagaan sektor pertanian. Kualitas SDM sektor pertanian yang kurang memadai, menjadi persoalan yang harus ditangani secara berkelanjutan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan jiwa kewirausahaan, dan pendampingan penyuluhan. Untuk itu, penguatan kelembagaan pertanian perlu disokong sepenuhnya dengan dukungan permodalan yang terjangkau, fasilitasi sarpras secara tepat, pemberdayaan petani muda bermental wirausaha, pemberdayaan wanita tani, pelatihan, ketersediaan informasi pertanian yang memadai, sentuhan teknologi yang aplikatif, dan skim jejaring pemasaran yang tepat.

Penguatan kelembagaan pertanian harus seiring pula dengan pola pendampingan berupa penyuluhan yang memadai. Dukungan penyuluhan yang memadai menjadi salah satu prioritas yang mendukung penguatan SDM pertanian beserta kelembagaannya, melalui penguatan sumberdaya penyuluh, termasuk kelembagaannya, baik penyuluh PNS, TH-TBPP, maupun penyuluh swadaya.Keberhasilan penyuluh melakukan pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu kunci sukes dalam menggerakkan sektor pertanian menuju arah yang lebih baik menuju peningkatan daya saing.

2.4.2.2 Urusan Kehutanan

Hutan di DIY seluas 26,01% dari luas wilayah DIY atau seluas 82.872,47 Ha. Dari persentase tersebut, 20,14% merupakan hutan rakyat dan sisanya 5,87% merupakan hutan negara. Pada tahun 2010 luas kerusakan kawasan hutan di DIY mencapai 4,939% yang sebagian besar (4,938%) diakibatkan adanya bencana alam erupsi Gunung Merapi, sedangkan pada tahun 2010 telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di wilayah DIY sebesar 9,93%.

Berdasarkan wilayah administrasi, kawasan hutan negara dibagi dalam 4 wilayah, yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,500 Ha, Kabupaten Bantul 1.052,600 Ha, Kabupaten Sleman 1.729,464 ha dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,500 Ha. Sedangkan berdasarkan fungsi hutan, kawasan hutan negara terdiri atas hutan produksi 13.411,700 Ha, Hutan lindung 2.312,800 Ha, Hutan konservasi 2.990,564 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,600 Ha).

Sektor pertanian, persoalan utama dalam mendukung pembangunan urusan kehutanan adalah mensinergiskan keberadaan hutan dengan masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, penguatan SDM sekitar hutan dalam membangun hutan secara bersama menjadi penting dalam mewujudkan hutan lestari. Kesadaran terhadap pentingnya fungsi hutan yang disadari oleh masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kehutanan di wilayah DIY. Untuk itu skim penguatan SDM dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan serta strategi penguatan penyuluhan kehutanan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontribusi membangun hutan berkelanjutan.

2.4.2.3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM), memiliki peran didalam memfasilitasi dan menyediakan pasokan energi dan sumber daya mineral antara lain melalui penyediaan listrik perdesaan, pengembangan energi baru terbarukan dan penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah dalam.

Ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sampai tahun 2012, kondisi kelistrikan di DIY menunjukkan ratio desa berlistrik mencapai 100%, ratio dusun berlistrik sebesar 94,13% atau masih terdapat 238 dusun dari total 4058 yang sebagian besar KK nya belum berlistrik. Pada akhir tahun 2011, ratio elektrifikasi DIY adalah sebesar 76,21%. Pada tahun 2012, jumlah RT tercatat 1.037.976 rumah tangga dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD, terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015 %. Sedangkan melalui dana APBN terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564%. Secara keseluruhan total ratio elektrifikasi pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011.

Dengan memanfaatkan tenaga air, surya dan biogas, dibangkitkan tenaga listrik sebesar 106 kw dari keseluruhan potensi energi baru dan terbarukan di DIY yang diperkirakan kurang lebih sebesar 10 mw.

Sampai dengan tahun 2011, total jumlah energy baru terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 582,3 kw dari total potensi 10.000 kw (10 MW). Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kw, sehingga total telah dibangkitkan energi sebesar 629,35 kw yang berasal dari sumber baru terbarukan.

Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, yaitu Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman. Melalui dana APBN dan APBD DIY, pendayagunaan air tanah dilakukan dengan pembuatan sumur bor air tanah dalam yang berada di daerah sulit air yaitu daerah dengan kedalaman muka air tanah dalam dan fluktuasi air tanah tinggi.

Upaya konservasi air tanah dilakukan dengan membuat sumur peresapan air hujan dan sumur pantau yang dilengkapi alat pantau permukaan air tanah, yaitu *automatic water level recording* (AWLR) berbasis telemetri.

Kegiatan usaha pertambangan di DIY dikelompokkan dalam 3 jenis komoditas tambang, yaitu mineral logam, mineral non logam dan batuan. Mineral logam meliputi mangaan dan pasir besi; mineral non logam meliputi fosfat, bentonit, zeolit, dan kaolin, sedangkan batuan meliputi andesit, tanah urug, pasir, sirtu, batu kali, batu gamping, dan breksi batuapung.

Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2011 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 487.100 m^3, batu gamping/kapur dengan produksi 87.486 m^3, tanah liat dengan produksi 304 m^3, andesit dengan produksi 191.275 m^3, zeolit dengan produksi 300 m^3, breksi batu apung dengan produksi 525 m3, dan tanah urug dengan produksi 101.648 m3. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011, total peningkatan nilai produksi bahan galian dari 7 mineral logam dan batuan sebesar 396,3 juta rupiah atau meningkat 1,07% dari target sebesar 0,37%.

Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 89 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 9 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji dengan 43 agen dan 2.832 pangkalan. Upaya pemenuhan kebutuhan bahan bakar, dilakukan melalui kegiatan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pada tahun 2011, penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium sebesar 458.064 KL, solar 112.816 KL serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 52.792,15 Ton, realisasi penyaluran melebihi 1,3% dari besarnya kuota.
Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, realisasi penyaluranbahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluranbahanbakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY.

2.4.2.4 Urusan Pariwisata

Potensi daya tarik wisata (DTW) di DIY tersebar di seluruh Kabupaten/kota dalam berbagai jenis. Sampai saat ini, daya tarik wisata yang menjadi andalan DIY berdasarkan sebaran di kabupaten/kota meliputi 43 DTW di Kota Yogyakarta, 43 DTW di Kabupaten Sleman, 40 DTW di Kabupaten

Bantul, 17 DTW di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 DTW.

Sarana pendukung pariwisata DIY yang terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 161 Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan 424 rumah makan/restoran/cafe, di Kabupaten Sleman terdapat 145 BPW dan 246 rumah/restoran/cafe makan. Di Kabupaten Bantul 11 BPW dan 13 rumah makan/restoran;di Kabupaten Kulon Progo terdapat 4 BPW dan 18 rumah makan/restoran dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 3 BPW dan 51 rumah makan/restoran. Ketersediaan transportasi umum antar kota dan antar daya tarik wisata di berbagai wilayah DIY kuantitasnya untuk tahun 2011 cukup memadai dan terus ditingkatkan kualitas sarana maupun pelayanannya.

Pada tahun 2010 jumlah wisatawan sebanyak 1.456.880 orang atau naik sebesar 2,16% dari tahun 2009. Jumlah ini walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 tetapi tidak mencapai target jumlah kunjungan wisatawan tahun 2010 sebanyak 1.554.555 orang. Hal ini disebabkan oleh bencana Erupsi Gunung Merapi pada akhir tahun 2010 yang mengakhibatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY pada Triwulan IV (Oktober–Desember) mengalami penurunan yang signifikan dibanding periode yang sama di tahun 2009. Hal ini berdampak pada penurunan lama tinggal wisatawan, penyelenggaraan MICE, dan tingkat hunian hotel. Tahun 2011 jumlah wisatawan sebanyak 1.607.694 orang atau meningkat 10,34% dari tahun 2010. Untuk tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 berdasarkan data BPS DIY jumlah wisatawan tercatat sebanyak 1.444.003 orang. Jumlah wisatawan nusantara (Wisnus) yang berkunjung ke DIY lebih dominan dibanding wisatawan mancanegara (Wisman), mencapai 90,85% dari total kunjungan wisatawan selama periode 2008-Bulan Juni 2012.

Wisatawan di DIY sampai dengan Bulan Juni 2012 rata-rata lama tinggal wisatawan selama 1,71 hari. Lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY lebih lama dibanding dengan lama tinggal wisatawan nusantara. Tingginya lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY karena mereka ingin lebih mengenal dan menikmati keindahan obyek wisata dan daya tarik wisata di DIY terutama wisata budaya yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dieksplore. Banyak dari wisman yang sangat antusias mempelajari bagaimana cara membuat batik, kerajinan perak dan bahkan pembuatan keris.

Kecenderungan lama tinggal wisatawan di DIY berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel, baik itu hotel berbintang maupun hotel melati. Kenaikan rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2009 diikuti dengan kenaikan tingkat hunian hotel, dari 42,69% pada tahun 2008 menjadi 55,25% pada tahun 2009. Tahun 2010 tingkat hunian kamar menjadi 50,93% dan menurun lagi di tahun 2011 menjadi 45,33% akibat erupsi Gunung Merapi. Sedangkan sampai dengan Juni 2012, tingkat hunian kamar mencapai 45,28%. Diharapkan dengan liburan Idul Fitri bulan Agustus dan libur akhir tahun 2012, tingkat hunian kamar Hotel akan terus meningkat.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya bertujuan untuk melihat pesona/keindahan obyek wisata dan daya tarik wisata yang ada, karena dengan semakin kondusifnya situasi dan kondisi DIY juga menjadi pilihan untuk penyelenggaraan *meeting, incentive, conferrence, andexhibition* (MICE). Wisata MICE yang semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini juga menjadi salah satu wisata yang memberikan kontribusi bagi PAD. DIY memiliki potensi Wisata MICE yang besar karena didukung oleh sarana dan prasarana serta akomodasi yang memadai. Dari tahun ke tahun penyelenggaraan MICE di DIY terus meningkat, dan tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Sampai dengan bulan

Juni tahun 2012, penyelenggaraan MICE menunjukan angka yang baik. Dari target 5.990 kali penyelenggaraan sudah terealisasi sebanyak 4.550 kali. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring citra DIY yang makin aman.

Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di DIY melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan.

Pemerintah DIY terus berupaya mendorong pengembangan desa wisata/kampung wisata dengan meningkatkan kualitas tampilan potensi (alam dan budaya). Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sadar wisata, sapta pesona dan peran aktif untuk meningkatkan perekonomian melalui desa/kampung wisata. Pengembangan desa/kampung wisata sangat potensial bagi kemajuan ekonomi masyarakat karena dapat dirasakan langsung kehadiran wisatawan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Potensi desa wisata yang layak jual sebanyak 65 desa wisata yang tersebar di 5 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gunungkidul (5), Kota Yogyakarta (11), Kabupaten Kulon Progo (8), Kabupaten Sleman (23), dan Kabupaten Bantul (16).

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (LOS) ke Yogyakarta, diupayakan selalu menyelenggarakan program/kegiatan yang dapat memperpanjang lama tinggal. Disamping itu juga memfasilitasi penyelenggaraan event-event kepariwisataan di Kabupaten/Kota serta bekerjasama dengan *stakeholder* maupun komunitas pariwisata lainnya. Tahun 2011 kegiatan tersebut antara lain berupa pentas seni yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan menempati lokasi strategis seperti di Malioboro, stasiun Tugu, depan Puro Pakualaman, Bandara Adi Sucipto dan tempat lainnya. Selain itu diselenggarakan pula *Jogja Fashion Week* yang dilaksanakan selama satu minggu. Kegiatan ini menampilkan beragam design batik yang dirancang oleh perancang muda Yogyakarta.

Penyelenggaraan event-event kepariwisataan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain tidak hanya berbasis budaya tetapi berbagai jenis pertunjukan lainnya seperti *Jogja Air Show*, Lomba Panjat Tebing, Jelajah Wisata Alam, Festival Perahu Naga dan penyelenggaraan Festival Malioboro. Berbagai pentas budaya juga digelar secara periodikdilaksanakan berkoordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota, semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan posisi DIY sebagai destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara. Promosi penyelenggaraan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference* dan *Exhibition*) bertaraf nasional maupun internasional juga terus dilaksanakan sehingga mempercepat meningkatnya kunjungan wisatawan ke DIY.

Dalam pengembangan obyek wisata, bersama Kabupaten/Kota se-DIY berupaya untuk membuka daya tarik wisata baru ataupun mengembangkan daya tarik wisata yang telah ada, terutama sarana prasarana pariwisata paska erupsi gunung api Merapi di kawasan Cangkringan, Sleman. Selain itu juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sekitar daya tarik wisata tentang pengetahuan/kemampuan pariwisata agar masyarakat siap menerima kunjungan wisatawan ke daerahnya. Contoh pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu pengembangan daya tarik wisata Goa Kiskendo, Goa Pindul, Pantai Siung, gunung Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul ataupun daya tarik wisata

lainnya di kabupaten-kabupaten yang lain serta Kota Yogyakarta.Dengan semakin berkembangnya berbagai daya tarik wisata yang ada dan diversifikasi produk baru (seperti wisata air, wisata dirgantara, wisata olahraga, wisata petualangan dsb) diharapkan tahun-tahun mendatang kunjungan wisatawan ke DIY semakin meningkat.

Pemasaran destinasi pariwisata DIY dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Strategi dan kiat-kiat promosi yang dilaksanakan disamping ikut berpartisipasi dalam *event/exhibition* tingkat nasional maupun internasional juga kerjasama dengan swasta (dalam dan luar negeri), *Familiarization Trip* agar DIY dapat terpromosikan melalui media cetak maupun *road show/travel dialog* dsb.

Terbatasnya anggaran promosi pariwisata DIY terutama ke luar negeri mengharuskan Pemerintah DIY lebih jeli dalam mencari dan mengutamakan pasar wisatawan potensial. Untuk kawasan Asia lebih diutamakan ke Negara Jepang, China, Korea, Malaysia, Singapura dan Thailand. Bagi DIY negara-negara Asia merupakan target pasar wisatawan yang potensial terutama negara Malaysia dan Singapura karena memiliki kedekatan geografis, adanya penerbangan langsung (*direct flight*), kedekatan emosional, sejarah, budaya, geografis dan juga karena sesama anggota ASEAN dan EATOF. Sedangkan untuk kawasan Eropa maupun kawasan lainnya belum menjadi sasaran utama karena belum sepadannya dampak kunjungan wisatawan ke DIY dengan besarnya anggaran promosi yang dikeluarkan, kecuali wisatawan dari negara Belanda, Jerman, Perancis, Amerika Serikat dan Australia yang sudah memberikan kontribusi besar dalam hal kunjungan wisatawan.

Kegiatan promosi juga dilakukan melalui media massa (elektronik dan cetak), antara lain melalui situs web www.visitingjogja.com yang semakin dikenal luas oleh calon wisatawan, baik wisatawan di dalam/di luar negeri. Web ini merupakan salah satu web unggulan DIY dalam mendukung *Jogja Cyber Province*.

Peningkatan kualitas pelayanan di Bandara Adi Sucipto juga menjadi salah satu prioritas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang menggunakan jasa bandara dengan mengoptimalkan *Tourist Information Service* (TIS). Dalam hal ini Pemerintah DIY bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura I, sedangkan untuk pelayanan informasi wisatawan di kawasan perkotaan tersedia TISdi stasiun KA Tugu dan *Tourist Information Centre* (TIC) di Jalan Malioboro, maupun TIC terpadu dengan sembilan Provinsi lainnya (Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, NTB dan NTT) yang tergabung dalam Mitra Praja Utama yang berlokasi di Kuta, Bali.

Walaupun terjadi bencana alam erupsi Gunungapi Merapi, pariwisata DIY mendapat penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Pengembangan Pariwisata. Penghargaan diberikan dalam forum Indonesia Tourism Award 2010 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA pada tanggal 2 Desember 2010. Dalam forum yang sama penghargaan juga didapat oleh Kota Yogyakarta sebagai ”Kota Terfavorit” dan ”Kota dengan Pelayanan Terbaik.

2.4.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani, khususnya ikan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan konsumsi ikan per kapita dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan per kapita DIY selama 3 tahun terakhir menunjukkan *trend* yang positif. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh gencarnya kegiatan sosialisasi gemar makan ikan di DIY. Pertumbuhan konsumsi ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:

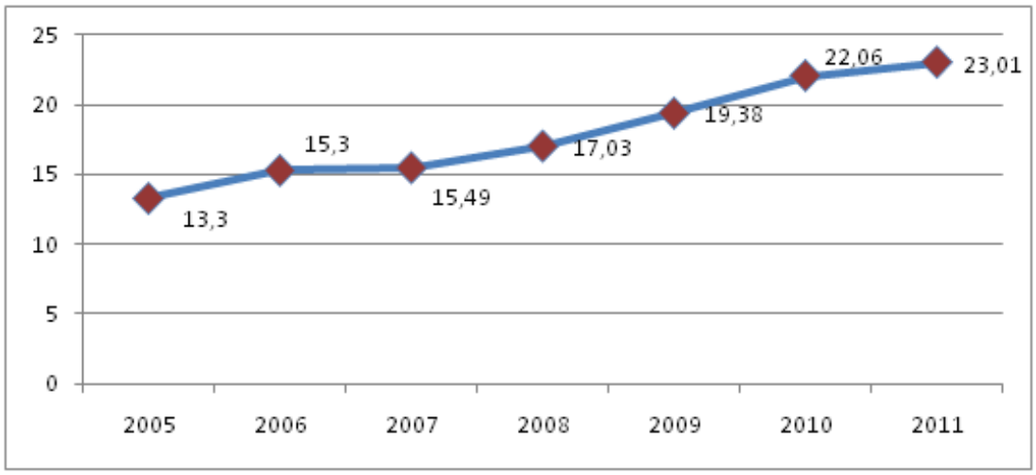

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah)

Gambar 2.38 Tingkat Konsumsi Ikan DIY (kg/kapita/tahun), 2005-2011

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Meskipun produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008, namun permintaan ikan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari wilayah DIY. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2008-2011 rata-rata sebesar 37.595,5 ton per tahun.

Produksi perikanan di DIY didominasi oleh perikanan budidaya. Rata-rata kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY mencapai 85,23%, bahkan pada tahun 2011 mencapai 89,36%. Sementara kontribusi perikanan tangkap menurun dari 11,17% pada tahun 2010 menjadi 10,64% pada tahun 2011. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya *over fishing* dan *illegal fishing* serta kurangnya *restocking* di perairan umum, sehingga sumber daya ikan di perairan umumberkurang. Selain itu, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY.

Potensi serta pemanfaatan sumber daya melalui perikanan tangkap masih terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya baik budidaya air tawar maupun air payau yang banyak tumbuh dan berkembang di DIY juga menjadi prioritas dalam pembangunan perikanan dan kelautan di DIY. Hal ini dikarenakan perikanan budidaya merupakan kontributor utama dalam produksi perikanan di DIY.

2.4.2.6 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi DIY, yaitu sebagai penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB setelah sektor jasa-jasa. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di DIY karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY selama tahun 2011 hingga 2012 dapat dilihat pada perkembangan ekspor impor. Volume ekspor DIY tahun 2012 sebesar 45 juta kg, meningkat18 juta kg dari tahun 2011. Sementara itu,nilai ekspor pada tahun 2010 sebesar 144 juta US$ dan tahun 2011 sebesar 191 juta US$. Beberapa komoditi yang menjadi unggulan ekspor DIY antara lain kulit, produk kulit, tekstil dan kerajinan.

Negara tujuan ekspor utama setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor walaupun sudah tidak menjadi tujuan utama, selanjutnya diikuti oleh negara-negara Uni Eropa, Jepang, Australia, Kanada, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, serta Uni Emirat Arab sebagai *entry point* dari negara-negara Timur-tengah.

Sementara itu, pada sisi impor menunjukkan adanya penurunan nilai dan volume pada akhir tahun 2012. Pada tahun 2011, realisasi impor DIY mengalami peningkatan nilai dan volume menjadi sebesar nilai 75,98 juta US$ dan volumenya 2,42 juta kg. Barang modal berupa tekstil, bahan baku susu, kulit disamak, mesin, kapas, label, asesoris garment masih mendominasi realisasi impor di tahun 2010. Dalam tahun 2012 (s.d Agustus) realisasi impornya mencapai nilai 9,74 juta US$ dan volumenya 1,21 juta kg, posisi ini bila dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, mengalami penurunan nilai 87,18%, sedangkan volume mengalami penurunan sebesar 50%.

Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2008-2012 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jumlah pasar di DIY. Realisasi jumlah penerbitan SIUP sepanjang tahun 2012 sebanyak 2.109 buah, sehingga jumlah kumulatif menjadi 41.703 SIUP. Perkembangan sektor perdagangan DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Jumlah pasar tradisional pada tahun 2012 sebanyak 333 buah dan toko modern 416 buah.

2.4.2.7 Urusan Industri

Sektor industri di DIY memiliki kontribusi dalam PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13,48% pada tahun 2011 dan 13,62% pada tahun 2012, menempati urutan keempat setelah sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Sektor industri di DIY didominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimana jenis usaha seperti ini sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Jumlah unit usaha pada tahun 2012 sebanyak 82.344 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 301.385 orang. Kondisi tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.103 Perkembangan Potensi IKM, 2008-2011

Indikator	Capaian Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Unit Usaha	76.267	77.851	78.122	80.056	82,344
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	273.621	291.391	292.625	295.461	301,385
Nilai Investasi (Rp Miliar)	769,27	871,11	878,06	1.003,67	1,151,820
Nilai Produksi (Rp Miliar)	2.800,90	2.325,58	2.821,21	3.053,03	3,500,662
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Miliar)	1.258,22	1.251,17	1.358,29	1.352,47	1,369,114

Sumber: Disperindagkop DIY

Sektor Industri selama tahun 2012, mengalami perkembangan positif. Hal tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dari jumlah unit usaha (2,86%), penyerapan tenaga kerja (2,01%), nilai investasi (14,75%), dan nilai produksi (15%).

Ke depan, pengembangan industri unggulan akan ditekankan pada produk-produk Industri Pengolahan Kayu dan Pengolahan Kulit sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No 138/M-IND/PER/10/2009 tentang Kompetensi Inti Industri DIY. Selain itu, industri kreatif dan industri produk-produk khas DIY dikembangkan seperti batik, gamelan, wayang dan sebagainya.

2.4.2.8 Urusan Ketransmigrasian

Program transmigrasi kini pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*) maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin.

Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 759 KK selama kurun waktu 2008-2011, yaitu masing-masing 205 KK pada tahun 2008, 223 KK pada tahun 2009, 175 KK pada tahun 2010 dan 125 KK pada tahun 2011. Selain itu, juga telah dilaksanakan program transmigrasi lokal dengan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) bagi calon transmigran. Total calon transmigran yang telah mengikuti PDU selama tahun 2008-2010 sebanyak 573 KK dengan rincian 196 KK pada tahun 2008, 227 KK pada tahun 2009 dan 150 KK pada tahun 2010.

2.4.3 Pencapaian Pelaksanaan SPM

Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam upaya membangun ukuran dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Urusan Wajib sendiri merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2.104 Pencapaian Pelaksanaan SPM

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional			Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator	Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
	Bidang social								
1.	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial	1. Persentase (%) PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial	80%	2008-2015	80%	80%	3%	3,23%	<
		2. Persentase (%) panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2008-2015	60%	60%	29%	35,65%	<
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	3. Persentase (%) panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	80%	2008-2015	80%	80%	6,09%	6,09%	<
		4. Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	60%	2008-2015	60%	60%	57%	51,9%	<
3.	Penanggulangan korban bencana	5. Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80%	2008-2015	80%	80%	49%	75%	<
		6. Persentase (%) Kabupaten/ Kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	2008-2015	80%	80%	2,9%	8,09%	<

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional			Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator	Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
4.	Pelakanaan dan Pengembangan jaminan sosial	7. Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40%	2008-2015	40%	40%	99,88%	99,93%	>
	Bidang lingkungan hidup								
5.	Pelayanan Informasi status mutu air	1. Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetrapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	80%	2013	80%	100%	90%	100%	>
6.	Pelayanan informasi status mutu udara ambien	2. Jumlah kabupaten/ kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	80%	2013	80%	100%	90%	100%	>
7.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	3. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	80%	2013	80%	100%	90%	100%	>
	Bidang Perumahan Rakyat								
8.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009-2025	20%	20%	18.39%	18,58%	<
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2009-2025	14%	14%	16%	22%	>
9.	Lingkugan yang sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	3. Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang sesuai dengan PSU	100%	2009-2025	20%	20%	10.96%	21%	>
	Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan								
10.	Penanganan pengaduan/ korban kekerasan terhadap	1. Cakupan Perempuan dan anak korban kekeraan yang	100%	2014	100%	100%	100%	39,75%	<

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional			Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator	Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
	perempuan dan anak	mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu							
11.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatannoleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014	100%	100%	100%	45,65%	<
12.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayaan terpadu	75%	2014	75%	75%	70%	100%	>
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	75%	75%	50%	100%	>
13.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	80%	80%	70%	37,50%	<
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	50%	2014	50%	50%	40%	100%	>

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional			Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator	Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
		bantuan hukum							
14.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	50%	50%	100%	0%	<
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	100%	100%	70%	0%	<
	Bidang Ketenagakerjaan								
15.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	5%	17%	4,37%	16,57%	<
		2. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	10%	20%	13,85%	24,56%	>
		3. Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	60%	2016	10%	20%	43,43%	58,99%	>
16.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	10%	22%	29,54%	60,95%	>
17.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	10%	22%	19,78%	55,70	>
18.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50%	2016	8,35%	16,70%	8,30%	12,69%	<
19.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	7,30%	14,50%	7,30%	14,50%	>
		2. Besaran pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	0%	2,85%	0%	3%	>
	Bidang Kesenian								
20.	Perlindungan, Pengembanga dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni 50%	50 %	2014	790 kegiatan	960 kegiatan	870 kegiatan	960 kegiatan	=
		2. Cakupan Fasilitasi Seni	30 %	2014	790	960	870	960	=

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional			Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator	Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
		30%			fasilitas	fasilitas	Fasilitasi	fasilitas	
		3. Cakupan Gelar Seni 75%	75%	2014	790 gelar seni	960 gelar seni	870 Gelar seni	960 gelar seni	=
		4. Misi Keseian 100%	100%	2014	790 misi	960 misi	870 misi	960 misi	=
21.	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan SDM kesenian	25%	2014		150 orang		200 orang	>
		6. Cakupan tempat kesenian	100%	2014		96		96	=
		7. Cakupan organisasi kesenian	34%	2014		0,94%		0,94%	=
	Bidang Ketahanan Pangan								
22.	Ketersediaan dan Cadangan pangan	Penguatan Cadangan Pangan	15,50%	2015	15,50%	37,50%	15,50%	35%	<
23.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	91,91%	2015	91,91%	94,26%	91,91%	94,26%	=
24.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70,50%	2015	70,50%	73%	70,50%	73%	>
25.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	24,8%	2015	24%	45%	24,8%	46%	>
	Bidang Penanaman Modal								
26.	Kebijakan Penanaman Modal	1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun	2014		2		4	>
27.	Kerjasama Penanaman Modal	2. Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan	1 (satu) kali per tahun	2014		2		2	=

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional			Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator	Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
		pengusaha tingkat provinsi/nasional							
28.	Promosi Penanaman Modal	3. Tersedianya promosi peluang penanaman modal Provinsi	1 (satu) kali per tahun	2014		4		4	=
29.	Pelayanan Penanaman Modal	4. Pendaftaran PMDN, Izin Prinsip PMDN, Izin Usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan Pemerintah Daerah	100%	2014		100%		100%	=
30.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014		9		9	=
31.	Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	2. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014		100%		100%	=
32.	Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	3. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014		2		2	=
	Bidang Perhubungan								
33.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan — Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan	100%	2014		90%		90%	

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional				Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator		Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
			jalan untuk jaringan jalan Provinsi							
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014				3 buah	
		c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60%			75%		75%	=
		d. Keselamatan	Tersedianya standar keselamatan bagi angkutan	100%						

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Nasional				Standar Pelayanan Minimal Daerah				Kondisi Pencapaaian Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Indikator		Target	Batas Akhir Capaiaan	Target 2011	Target 2012	Capaian 2011	Capaian 2012	
			umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)							
		e. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan	100%						

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Selama periode 2008-2011, pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita DIY mengalami kenaikan. Pengeluaran riil per kapita DIY tahun 2011 sebesar 650,16 ribu rupiah lebih besar dari tahun 2010 yang sebesar 646,56 ribu rupiah. Sementara itu menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita terbesar berada di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 653,79 ribu rupiah dan terkecil berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 628,73 ribu rupiah.

Tabel 2.105 Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di DIY, 2008-2011

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rupiah)			
	2008	2009	2010	2011
Kulon Progo	628,29	629,50	630,38	631,42
Bantul	642,19	643,89	646,08	651,17
Gunungkidul	621,67	623,09	625,20	628,73
Sleman	645,15	646,08	647,84	650,27
Yogyakarta	645,10	647,59	649,71	653,79
DIY	**643,25**	**644,67**	**646,56**	**650,16**

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

Pengeluaran rata-rata per kapita menurut golongan pengeluaran di DIY pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami pergeseran. Jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran di bawah 200 ribu rupiah cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah rumahtangga dengan golongan pengeluaran lebih besar dari 200 ribu rupiah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan pendapatan di tingkat rumah tangga.

Tabel 2.106 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di DIY, 2008-2011

Golongan Pengeluaranper Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Rangga			
	2008	2009	2010	2011
< 100.000	1.206	693	193	-
100.000 – 149.999	33.876	17 831	8.821	7.495
150.000 – 199.999	82.121	82 671	59.040	46.381
200.000 – 299.999	161.777	230 077	217.222	175.341
300.000 – 499.999	339.546	316 194	328.385	302.419
≥ 500.000	402.136	402 121	433.212	510.289

Sumber: DDA DIY 2009-2012

2) Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang

berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

NTP DIY selama kurun waktu 2008-2011 menunjukkan adanya tren yang meningkat, dimana tahun 2008 tercatat sebesar 105,28 dan kemudian menjadi 107,84 pada tahun 2009. Selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2010 sebesar 112,64 dan pada tahun 2011 menjadi 115,11. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan pilihan mata pencarian yang menguntungkan bagi masyarakat DIY. Terlebih dengan penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan.

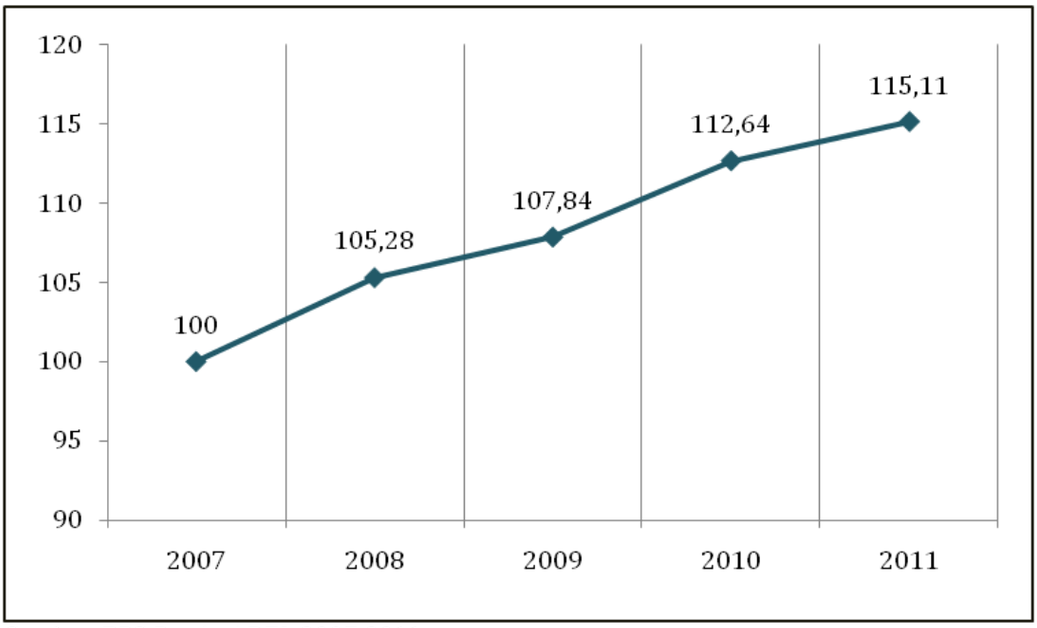

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2007-2011

Gambar 2.39 Nilai Tukar Petani DIY, 2007-2011

Data perkembangan NTP pada bulan Januari selama 2009-2012 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai NTP di DIY untuk semua sub sektor pertanian kecuali peternakan. Pada kondisi Januari 2012, sub sektor hortikultura merupakan subsektor yang memiliki NTP tertinggi (128,96) disusul NTP sub sektor perkebunan rakyat (123,62). Pertumbuhan NTP yang signifikan menggambarkan derajat kesejahteraan petani yang semakin baik apabila tingginya daya beli petani dipicu oleh faktor produktivitas yang stabil atau meningkat, serta permintaan yang tinggi.

Tabel 2.107 Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di DIY, 2009-2012 (Januari)

NTP Sektor/Sub sektor	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
NTP Pertanian	104.62	110.29	113.89	116.50
NTP Pertanian Pangan	102.88	109.45	113.52	117.11
NTP Hortikultura	103.64	117.56	127.30	128.96
NTP Perkebunan Rakyat	118.11	115.90	121.44	123.62
NTP Peternakan	107.24	106.16	103.66	103.79
NTP Perikanan	110.18	112.28	112.69	113.79

Sumber : analisa data BPS DIY

3) Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita

Pada tahun 2011, rata-rata pengeluaran per kapita DIY sebesar 625.044 rupiah mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 553.966 rupiah. Kenaikkan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan.

Tabel 2.108 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di DIY, 2009-2011

Kelompok Komoditas	2009		2010		2011	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Makanan	206.690	44,45	244.003	44,05	276.323	44,21
Bukan Makanan	258.321	55,55	309.963	55,95	348.721	55,79
Jumlah	**465.011**	**100**	**553.966**	**100,00**	**625.044**	**100,00**

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan selama tahun 2009-2011 mengalami fluktuasi. Kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air; kelompok barang-barang dan jasa; kelompok Pajak Pemakaian, dan Premi Asuransi; dan kelompok keperluan pesta dan upacara mengalami penurunan pada tahun 2010 kemudian meningkat pada tahun 2011 tetapi besarannya masih lebih rendah dari tahun 2009.Sementara kelompok Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala serta kelompok Barang Tahan Lama selama kurun waktu 2009-2011 mengalami penurunan.

Tabel 2.109 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makan di DIY, 2009-2011

Kelompok	2009		2010		2011	
	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	160.063	18,53	109.997	19,86	121.996	19,52
2. Barang-Barang & Jasa	183.534	21,25	124.291	22,44	151.625	24,26
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	25.538	2,96	15.912	2,87	14.128	2,26
4. Barang Tahan Lama	70.084	8,11	40.722	7,35	34.823	5,57
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	16.939	1,96	10.601	1,91	12.348	1,98
6. Keperluan pesta dan upacara	15.267	1,77	8.440	1,52	13.802	2,21
	471.425	**54,58**	**309.963**	**55,95**	**625.044**	**55,79**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2011

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Berdasarkan data tahun 2008–2012 dapat diketahui kondisi tingkat pelayanan jalan untuk semua status jalan di DIY, sebagai berikut:

Tabel 2.110 Kondisi Tingkat Layanan Jaringan Jalan di DIY, 2012

Status Jalan	2008		2009		2010		2011		2012	
	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%
Jalan Nasional	168,81		168,81		168,81		223,16		223,16	
Mantap		71,84		90,83		88,65		97,25		99,06
Tidak Mantap		28,16		9,17		11,35		2,75		0,94
Jalan Provinsi	690,25		690,25		690,25		690,25		619,34	
Mantap		79,25		81,74		83,45		83,89		71,09
Tidak Mantap		20,75		18,26		16,55		16,11		28,91
Jalan Kota (Yogyakarta)	247,80		247,80		248,09		248,09		248,09	
Mantap		82,07		82,07		82,09		82,09		82,09
Tidak Mantap		17,93		17,93		17,91		17,91		17,91
Jalan Kabupaten (Bantul)	899,83		899,83		895,73		895,73		873,33	
Mantap		71,73		73,58		75,00		76,88		75,74
Tidak Mantap		28,27		26,42		25,00		23,12		24,26
Jalan Kabupaten (Kulon Progo)	925,30		925,30		925,30		763,69		763,69	
Mantap		92,38		85,22		85,19		86,28		86,28
Tidak Mantap		7,62		14,78		14,81		13,72		13,72
Jalan Kabupaten (Gunungkidul)	818,46		818,46		686,00		686,00		686,00	
Mantap		50,63		50,63		70,08		71,15		71,15
Tidak Mantap		49,37		49,37		29,92		28,85		28,85
Jalan Kabupaten (Sleman)	1.085,13		1.085,13		1.085,13		1.085,13		1.085,13	
Mantap		68,50		69,86		68,92		71,34		71,34
Tidak Mantap		31,50		30,14		31,08		28,66		28,66

Sumber: Dinas PUP & ESDMDIY, 2012

b. Prosentase luas yang terlayani Air Irigasi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi seluas 17.112,87 ha tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan PemerintahDIY di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul meliputi 44 daerah irigasi.Sampai dengan akhir tahun 2012, Daerah Irigasi yang terlayani air adalah sebesar 78,5%.

c. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di wilayah DIY

Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan meliputi dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobag dorong, gerobag motor, kontainer, TPS, dan depo dan transito) sampai di TPA. Sampai dengan akhir tahun 2010 daya tampung TPA sebanyak 2.123.347.

d. Prosentase Penurunan Genangan

Prosentase penurunan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2012 telah tertangani sebesar 33,9%.

2) Perumahan

a. Penduduk Terlayani Air Minum

Cakupan pelayanan penduduk terlayanani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk DIY. Berdasarkan hasil pembangunan sistem penyediaan air di DIY sampai tahun 2012 adalah sebesar 70,38 % yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk terlayani sebesar 2.460.539 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk DIY sebesar 3.496.100 jiwa. Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayanani air minum layak dari tahun ke tahun terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.111 Cakupan Pelayanan Air Minum di DIY, 2009-2012

Tahun	Rasio Pelayanan Air Minum (%)	Peningkatan dari tahun sebelumnya (%)
2009	60	4
2010	64	4
2011	65,29	1,29
2012	70,38	5,09

Sumber: Dinas PUP & ESDMDIY, 2011

b. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah jumlah total rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga yang ada. Peningkatan rasio elektrifikasi di DIY per tahun sekitar 1%. Rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.112 Rasio Elektrifikasi di DIY, 2010-2012

Tahun	Rasio Elektrifikasi (%)	Peningkatan dari tahun sebelumnya (%)
2010	75,04	0,81
2011	76,21	1,17
2012	76,80	0,59

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2011

c. Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi diasumsikan bahwa rumah tangga telah menggunakan fasilitas sanitasi layak antara lain meliputi a) pembuangan tinja (MCK); b) pembuangan air limbah (SPAL); c) pembuangan sampah.

Tabel 2.113 Jumlah dan Presentase Rumah Tangga DIY Terlayani Sanitasi Layak, 2010-2012

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Perkotaan			Perdesaan			Total Rumah Tangga Terlayani	
		Jumlah Rumah Tangga Perkotaan	Rumah Tangga Terlayani Perkotaan		Jumlah Rumah Tangga Perdesaan	Rumah Tangga Terlayani Perdesaan			
	(RT)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(%)
2010	691.498	442.516	389.088	89,71	248.982	176.903	72,78	565.991	81,85
2011	693.440	443.759	394.190	90,61	249.681	182.303	74,74	576.493	83,14
2012	699.220	447.458	404.790	92,24	251.762	192.403	78,15	597.193	85,41

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2012

d. Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Berdasarkan kajian dari NUSSP Tahun 2009 bahwa kawasan kumuh di DIY sebanyak 69 kawasan yang terdiri dari 107 lokasi kumuh.

Tabel 2.114 Persentase Lokasi Kumuh yang Telah Ditangani

Uraian	2009	2010	2011	2012
Persentase lokasi kumuh yang telah ditangani (%)	2,8	5,6	8,4	11,2
Jumlah lokasi kumuh yang telah ditangani	3	3	3	3
Jumlah lokasi kumuh (titik)	107	107	107	107

Sumber: Bappeda DIY, 2012, diolah

e. Rumah layak Huni

Tahun 2011 masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 91.200 unit rumah dari keseluruhan jumlah rumah sebesar 1.038.233 unit rumah. Jadi jumlah rumah layak huni di DIY adalah sebesar 947.033 unit rumah atau sebesar 91,22% dari total rumah di DIY yang terdiri dari 822.687 unit rumah permanen dan 124.346 unit rumah semi permanen (Sumber: LKPJ-AMJ, Tahun 2012).

3) **Perhubungan**

a. **Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Load faktor untuk angkutan umum perkotaan reguler sejak tahun 2008 terus mengalami menurunan, sedangkan angkutan perkotaan Trans Jogja selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DIY cenderung untuk memilih menggunakan angkutan umum perkotaan yang dapat diandalkan dan nyaman. Secara keseluruhan, load faktor angkutan umum perkotaan jika digabungkan akan menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Tabel 2.115 Load Faktor Angkutan Umum Perkotaan dan AKDP di DIY

Tahun	Angkutan Perkotaan			Angkutan AKDP (%)	rata-rata DIY (%)
	Reguler (%)	Trans Jogja (%)	rata-rata (%)		
2008	27,60	31,87	29,74	36,18	31,88
2009	27,29	33,60	30,45	32,40	31,10
2010	22,00	33,99	28,00	18,00	24,66
2011	24,01	38,26	31,14	23,00	28,42
2012	22,73	42,41	32,57	26,85	30,66

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika DIY

Untuk penggunaan angkutan umum yang menuju atau keluar dari DIY, termasuk moda kereta api dan pesawat, maka diketahui bahwa jumlah penumpang yang menggunakan moda bis cenderung stabil, sementara pengguna kereta api mengalami penurunan karena terkait kebijakan larangan berdiri bagi pengguna kereta api, sehingga harus sesuai dengan jumlah *seat*/tempat duduk. Lonjakan besar terdapat pada penggunaan moda pesawat, dengan kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2011 adalah ± 15%.

Tabel 2.116 Jumlah Penumpang Pengguna Angkutan Umum di Simpul Utama DIY

Moda Layanan	SIMPUL	2008	2009	2010	2011
Penumpang Bus	Terminal Giwangan	2.596.294	2.582.586	2.658.359	2.471.342
Penumpang Kereta Api	Stasiun TUGU & Lempuyangan	5.293.428	3.041.233	3.319.151	3.051.414
Penumpang Pesawat Udara	Bandara Adisutjipto	1.321.061	1..556.003	1.709.827	2.010.662

Sumber: Data BPS, 2012

b. **Terminal Bus/Pelabuhan/Stasiun Kereta Api**

DIY tidak memiliki layanan angkutan laut maupun perairan, maka yang termasuk dalam simpul transportasi hanyalah terminal bus, stasiun kereta api, dan bandar udara.

Tabel 2.117 Jumlah Simpul Transportasi di DIY

Simpul Transportasi	Tipe	2008	2009	2010	2011
Terminal Bus	A	3	3	3	3
	B	2	2	2	2

Simpul Transportasi	Tipe	2008	2009	2010	2011
	C	3	3	3	3
Stasiun Kereta Api	Besar	2	2	2	2
	Kelas 1	--	--	--	--
	Kelas 2	1	1	1	1
	Kelas 3	4	4	4	4
Bandar Udara		1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2012

c. Jumlah Jaringan Komunikasi

Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Selama kurun waktu 2007-2010, jumlah sambungan telepon di DIY mengalami kenaikkan untuk tahun 2007 sebanyak 379.648 menjadi sebanyak 452.565 pada tahun 2010. Sementara itu, kondisi tahun 2011 terdapat 134.849 jumlah sambungan telepon di DIY mengalami penurunan sebesar 70,20% dibandingkan dengan tahun 2010. Dari jumlah sambungan telepon di DIY tersebut 100% merupakan wireline.

Tabel 2.118 Jumlah Sambungan Telepon di DIY (%), 2007-2011

Jenis	2007	2008	2009	2010	2011
WIRELINE	**119.664**	**122.664**	**122.563**	**123.081**	**134.849**
Kulon Progo	2.283	2.340	2.372	2.412	2.631
Bantul	4.033	4.134	4.085	4.261	5.940
Gunungkidul	3.196	3.276	3.286	3.356	3.553
Sleman	17.640	18.081	17.894	17.926	21.611
Yogyakarta	92.520	94.833	94.926	95.126	101.114
CDMA	**259.976**	**316.769**	**328.621**	**329.484**	**--**
Pasca bayar	35.883	31.439	32.074	31.864	--
Pra Bayar	224.093	285.330	296.547	297.620	--
DIY	**379.648**	**439.433**	**451.184**	**452.565**	**134.849**

Sumber: DDA 2012, BPS Provinsi DIY

d. Rasio Warnet terhadap Penduduk

Rasio warnet atau rasio ketersediaan warnet adalah jumlah warnet per 1000 penduduk. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Semakin besar rasio warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.119 Jumlah Warnet di DIY, 2007-2010

Uraian	2007	2008	2009	2010
Jumlah Warnet	101	166	259	352

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi DIY

Jumlah warnet di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena bisnis warnet menjadi bisnis yang menjanjikan ditengah kemajuan jaman yang menuntut setiap orang untuk menggunakan jasa internet dalam mempermudah komunikasi maupun pendukung kegiatan lainnya.

e. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal dan Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Perkembangan jumlah sarana komunikasi di DIY dari tahun 2007 hingga 2011 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sarana komunikasi yang ada berupa media cetak, stasiun radio, dan stasiun TV. Pada tahun 2011, di DIY tercatat jumlah media cetak sebanyak 30, stasiun radio sebanyak 57, dan stasiun TV sebanyak 4 sedangkan jumlah wartawan terdaftar sebanyak 250 orang.

Tabel 2.120 Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY, 2007-2011

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Media Cetak	30	30	30	30	30
Stasiun Radio	57	57	57	57	57
Stasiun TV	4	4	4	4	4
Wartawan Terdaftar	250	250	250	250	250

Sumber : DDA 2012, BPS Provinsi DIY

f. Dinamika Kepariwisataan

Yogyakarta merupakan tujuan wisata yang sudah terkenal baik wisatawan mancanegara maupun domestik, hampir tiap musim liburan Yogyakarta penuh dengan kunjungan wisatawan. Keanekaragaman budaya dan daya kreativitas warga DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang semakin menarik minat wisatawan. Obyek wisata yang beraneka ragam di DIY memberikan berbagai alternatif para wisatawan untuk dikunjungi.

Pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pada 2012, tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 2.215.832 orang, dengan rincian 202.518 orang dari mancanegara dan 2.013.314 orang dari nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran.

Tabel 2.121 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY, 2007-2012

Tahun	Wisman (orang)	Pertumbuhan (%)	Wisnus (orang)	Pertumb-uhan (%)	Jumlah Wisatawan	Pertumb-uhan (%)
2007	103.224	32,09	1.146.197	36,99	1.249.421	36,57
2008	128.660	24,64	1.156.097	0,86	1.284.757	2,83
2009	139.492	8,42	1.286.565	11,29	1.426.057	11
2010	152.843	9,57	1.304.137	1,37	1.456.980	2,17
2011	169.565	10,94	1.438.129	11,78	1.607.694	12,74

Sumber: Dinas PariwisataDIY

Infrastruktur jalan yang bagus, sikap ramah tamah dan lingkungan yang nyaman diharapkan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan sehingga akan meningkat kesejahteraan para pelaku industri wisata di Yogyakarta.

Tabel 2.122 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY (hari), 2008-2011

Akomodasi	Tahun							
	2008		2009		2010		2011	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
Hotel Melati	1,88	1,76	1,8	1,8	1,86	1,76	1,82	1,74
Hotel Bintang	1,91	1,71	2,02	1,69	1,96	1,63	2,02	1,71

Sumber: Dinas Pariwisata DIY

Perkembangan jumlah hotel di DIY menurut klasifikasinya sangat bervariasi, jumlah hotel non bintang, bintang satu, bintang empat, dan bintang lima relatif tidak mengalami perubahan. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada hotel bintang tiga.

Tabel 2.123 Jumlah Hotel Berbintang & Non Berbintang di DIY, 2008-2011

Jumlah Hotel	2008	2009	2010	2011
Hotel Bintang Lima	4	4	4	4
Hotel Bintang Empat	8	8	8	8
Hotel Bintang Tiga	6	5	8	8
Hotel Bintang Dua	4	5	7	6
Hotel Bintang Satu	13	10	10	10
Hotel Non Bintang	385	385	415	415

Sumber: SIPD DIY, 2012

4) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

DIY komitmen mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah melalui Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029.

Untuk itu pelaksanaan pembangunan di DIY telah dilakukan sesuai dengan arahan dari Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

5) Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di DIY selama kurun waktu 2008-2010 mengalami peningkatan, tahun 2008 seluas 5.695,10 ha naik menjadi 5.844,20 ha tahun 2009 dan 6.343,50 ha tahun 2010. Sementara itu, tahun 2011 dan 2012 luas wilayah produktif tersebut diperkirakan menurun, yaitu menjadi seluas 5.006,50 ha pada tahun 2011 dan 5.600,70 pada tahun 2012.

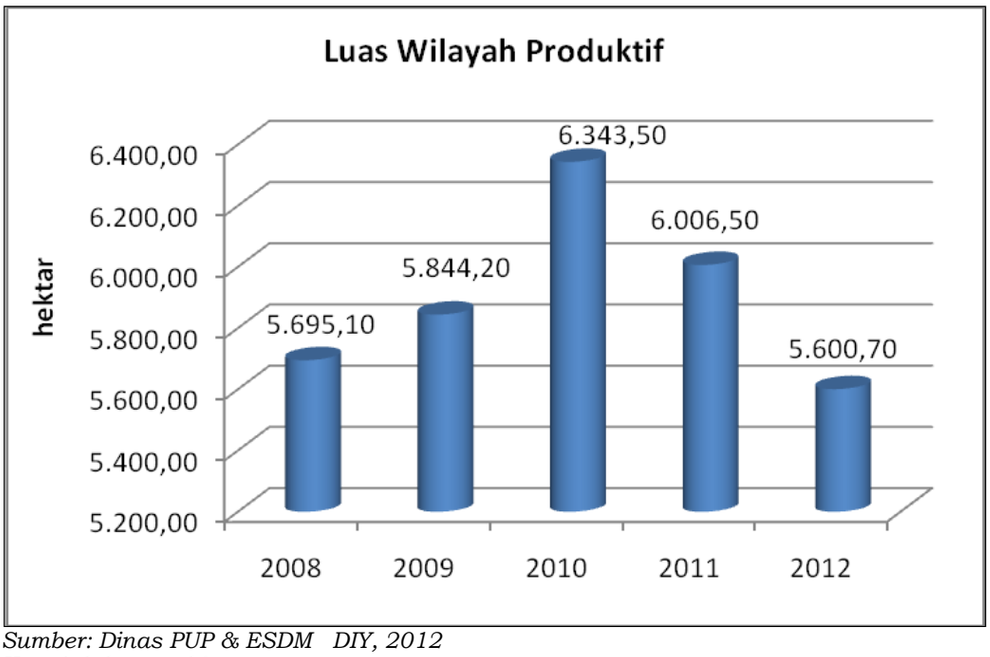

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2012
*Ket.: * dalam perkiraan*

Gambar 2.40 Luas Wilayah Produktif di DIY (hektar), 2008-2010

6) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas dasar amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Peraturan Menteri PU Nomor: *15*/PRT/M/*2009* Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi , telah dituangkan dan ditetapkan melalui perda no 2 Tahun 2012tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009–2029.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri PU Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Sehingga Provinsi DIY berikut Kabupaten/Kota nya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali maupun kawasan strategis provinsi.

Tabel 2.124 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Strategis DIY

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Dokumen Tata Ruang yang ada	4	5	8	9
2.	Kebutuhan Dokumen Tata Ruang	23	23	23	23
3.	Rasio (1./2.)	0.17	0.21	0.34	0.39

Sumber: Bappeda DIY, 2012, diolah

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.125 Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di DIY, 2008-2011

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah kasus narkoba	332	268	266	262
2.	Jumlah kasus pembunuhan	15	15	14	10
3.	Jumlah kejahatan seksual	29	19	18	13
4.	Jumlah kasus penganiayaan (ringan-berat)	474	627	579	536
5.	Jumlah kasus pencurian (ringan-biasa)	904	1.156	1.409	944
6.	Jumlah kasus penipuan	940	1.038	1.428	1.301
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	12	5	5	6
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	2.706	3.128	3.719	3.072
9.	Jumlah penduduk	3.393.003	3.426.637	3.457.491	3.487.325
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,08	0,09	0,11	0,09

Sumber: DDA,beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

Jumlah tindak kejahatan menurut jenis kasus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011. Untuk menurunkan angka kriminalitas, selain upaya kerja keras aparat keamanan juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Jumlah kasus yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah kasus pencurian dan penipuan. Namun, kondisi tahun 2011 kasus pencurian turun menjadi 944 kasus dan kasus penipuan turun menjadi 1.301 kasus. Dalam rangka penurunan jumlah kasus tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

b. Jumlah Demonstrasi

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demontrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakukan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak

pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di DIY dari kurun waktu 2008–2011 mengalami penurunan dan menunjukkan kenaikan pada tahun 2012.

Tabel 2.126 Jumlah Demo di DIY, 2008-2012

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2008	353
2009	333
2010	340
2011	176
2012*	273

Sumber: SIPD DIY, 2012

*Ket: * Angka Sementara*

c. Lama Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Upaya dilakukan Pemerintah Daerah DIY melalui Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola oleh Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah DIY. Selain prosedur perijinan yang mudah, ketersedian informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

d. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak Daerahyang menjadi kontributor PAD DIY adalah:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

e. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.127 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di DIY, 2011

Uraian	Jumlah
Jumlah Perda terkait perijinan	-
Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	2
Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	2

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2012

2.5.4 Fokus sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pembangunan SDM diarahkan agar dapat mewujudkan SDM yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan.

Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

Kualitas SDM yang dimiliki berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan pendidikan S1, S2, dan S3.

1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Rasio lulusan di DIY disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.128 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di DIY, 2010

NO	Uraian	2010
1.	Jumlah lulusan S1	185.651
2.	Jumlah lulusan S2/S3	19.267
3.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	204.918
4.	Jumlah penduduk	3.457.491
5.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	592,58

Sumber: SP 2010, BPS RI

Menurut data Sensus Penduduk (SP) 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Provinsi DIY yang tamat Diploma I/II sebanyak 30.767 orang, tamat Diploma III sebanyak 73.037 orang, tamat Diploma VI/S1 sebanyak 185.651 orang, dan tamat S2/S3 sebanyak 19.267orang.

Lulusan S2/S3 terbanyak berada di Kabupaten Sleman, yaitu 10.565 orang, sedangkan yang terkecil berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebanyak 436 orang. Sementara lulusan Diploma IV/S1 terbanyak berada di Kabupaten Sleman (82.904 orang) dan terkecil di Kabupaten Gunungkidul (9.324 orang)

Tabel 2.129 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, 2010

Kabupaten/Kota	Diploma I/II	Diploma III	S1/ Diploma IV	S2/S3
Kulon Progo	3.650	4.491	11.349	436
Bantul	8.072	17.198	43.940	3.745
Gunungkidul	4.047	3.650	9.324	552
Sleman	11.585	32.103	82.904	10.565
Yogyakarta	3.413	15.595	38.134	3.969
DIY	**30.767**	**73.037**	**185.651**	**19.267**

Sumber: SP 2010, BPS

2) Tingkat Ketergantungan/Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk DIY tahun 2012 sebesar 37,35 yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 38 orang yang tidak produktif. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2011 yang sebesar 37,02. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif (65 tahun lebih).

Bertambahnya angka ketergantungan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 disebabkan naiknya persentase penduduk yang belum dan tidak produktif. Naiknya persentase penduduk yang tidak produktif antara lain terkait dengan capaian DIY dimana penduduknya mempunyai usia harapan hidup tertinggi di Indonesia. Sedangkan naiknya persentase penduduk yang belum produktif harus diikuti dengan program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, seperti program Keluarga Berencana (KB).

Tabel 2.130 Rasio Ketergantungan di DIY, 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	637.100	634.400	602.600	608.500
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	320.100	323.500	324.200	328.300
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	957.200	957.900	926.800	936.800
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	2.511.300	2.544.000	2.512.200	2.530.400
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	38,12	37,65	36,89	37,02

Sumber : DDA 2011 (diolah)

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2007 sampai dengan, yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro antara lain; 1) Adanya rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) pada beberapa saat; 2) Pemulihan ekonomi internasional yang berdampak pada pemulihan perkenomian nasional yang berimbas ke daerah; 3) Terjadinya laju penurunan tingkat inflasi dalam beberapa saat; 4) Stabilitas harga bahan dasar dan sosial politik lokal; 5) Cepat tanggapnya penanganan akibat bencana.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2011

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	PENDAPATAN	967.870.747.519,50	1.258.609.946.423,39	1.286.067.485.169,33	1.403.174.023.247,19	1.609.761.447.239,23	14,57
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.181.759.199,50	632.872.311.670,13	645.145.551.075,74	768.341.053.125,19	871.963.501.186,23	17,92
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	434.898,894.141,00	525.185.354.193,35	541.192.265.769,60	634.710.019.946,80	735.226.105.916,20	15,39
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.563.425.637,00	29.259.898.291,50	34.785.228.680,57	32.836.503.243,89	35,985.658.458,15	21,83
1.1.3	Daerah yg Dipisahkan	11.927.611.593,02	12.481.050.738,67	20.094.713.175,83	26.333.869.884,77	28.961.383.472,76	26,41
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.791.827.828,48	65.946.008.446,61	49.073.343.449,74	74.460.660.049,73	71.790.353.339,12	73,47
1,2	DANA PERIMBANGAN	480.922.834.904,00	601.802.167.488,00	631.011.121.383,59	626.677.339.122,00	722.339.653.053,00	11,16
1.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak	43.543.834.904,00	70.560.773.088,00	73.681.173.383,59	87.821.992.122,00	82.037.725.053,00	20,02
1.2.2	Dana Alokasi Umum	437.379.000.000,00	511.773.394.400,00	523.919.948.000,00	527.471.247.000,00	620.812.328.000,00	9,44
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	19.468.000.000,00	33,410.000.000,00	11.384.100.000,00	19.489.600.000,00	
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.766.153.416,00	23.935.467.265,26	9.910.812.710,00	8.155.631.000,00	15.458.293.000,00	58,82
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.766.153.416,00	23.620.587.265,26	7.124.862.710,00	5.232.631.000,00	6.315.972.000,00	38,16
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hsl Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	314.880.000,00	2.785.950.000,00	2.923.000.000,00	9.142.321.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-

Pengukuran kinerja pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Struktur pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam kurun waktu tahun 2007-2011 sumber utama pendapatan terbesar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan angka pertumbuhan rata-ratanya mencapai 58,82%. Berurutan kemudian penopang pendapatan dari PAD sebesar 17,92% dan terakhir dari Dana Perimbangan sebesar 11,16%. Dari data tersebut kenaikan rata-rata pendapatan daerah setiap tahunnya sebesar 14,57%.

Dari sudut pandang capaian kinerja per rincian obyek, secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2007-2011 kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari Pajak Daerah yang sebesar 43,93% baru urutan selanjutnya berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 40,55%. Jika ditinjau dari sisi ini, maka kemandirian atas pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik dan mempunyai kompisisi sebanding antara PAD dan Dana Perimbangan. Hal demikian ini mengindikasikan bahwa kinerja aparat telah memaksimalkan pelaksanaan pemungutan PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada kurun waktu 2007-2011 Pendapatan Asli Daerah mempunyai rata-rata kenaikan sebesar 17,92%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sendiri rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 51,80%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) **Pajak Daerah,** terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP).

2) **Retribusi Daerah,** terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perjalanan Penerimaan Retribusi baik Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perpindahan pengelompokan obyek penerimaan. Dalam Retribusi Jasa Umum hanya ada tiga kelompok yaitu Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Jasa Pendidikan. Kemudian Retribusi Jasa Usaha terdiri dari enam kelompok yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Pelelangan, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Peningkatan Pelayanan Pelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Penjualan Produksi Usaha Daerah. Sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari ijin trayek dan ijin jasa perikanan.

1) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,** terdiri dari penerimaan laba atas PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

2) **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,** terdiri dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus.

1) **Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,**bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

2) **Dana Alokasi Umum,** dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok belanja pegawai sebagai prioritas.

3) **Dana Alokasi Khusus,** sama halnya dengan DAU, merupakan dana transfer dari pusat atas beberapa kegiatan yang sudah ditentukan pembidangannya.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah.

Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
A	**BelanjaTidakLangsung**	**47,14**	**53,14**	**56,26**
1	BelanjaPegawai	20,98	22,62	24,28
2	BelanjaBunga	0,00	0,00	-
3	BelanjaSubsidi	-	-	-
4	BelanjaHibah	1,05	6,06	1,03
5	BelanjaBantuanSosial	6,51	5,97	6,72
6	BelanjaBagiHasil	13,42	14,47	15,69
7	BelanjaBantuanKeuangan	5,17	3,84	8,54
8	BelanjaTidakTerduga	-	0,18	0,00
B	**BelanjaLangsung**	**42,65**	**38,15**	**35,16**
1	BelanjaPegawai	5,86	5,85	4,90
2	BelanjaBarangdanJasa	23,73	23,99	21,90
3	Belanja Modal	13,05	8,32	8,36

Sumber: DPPKA DIY 2012

Dari hasil olah data yang kemudian dituangkan pada tabel 3.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa kontribusi realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD Pemda DIY selama 3 (tiga) tahun terjadi peningkatan secara berkelanjutan dimana pada tahun 2009 kontribusi realisasi belanja tidak langsung terhadap APBD sebesar 47,14%, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 53,14% dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 56,26%. Meskipun secara total belanja kontribusi realisasi belanja tidak

langsung terhadap APBD meningkat secara terus menerus, akan tetapi kalau dilihat lebih mendetail pada rincian obyek belanja tidak langsung, kontribusi realisasi rincian obyek belanja tidak langsung terjadi fluktuasi, terutama pada rincian obyek belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2009 kontribusi realisasi belanjanya sebesar 1,05% kemudian meingkat menjadi 6,06% pada tahun 2010 dan menurun menjadi sebesar 1,03 pada tahun 2011. Pada rincian obyek belanja bantuan keuangan kontribusi relisasi belanjanya sebesar 5,17% pada tahun 2009 kemudian turun menjadi sebesar 3,84% pada tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar 8,54%. Penurunan kontribusi realisasi belanja hibah ini perlu mendapat perhatian yang serius terutama apabila belanja hibah tersebut berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa kontribusi belanja langsung terhadap realisasi APBD Pemda DIY terjadi sebaliknya jika dibandingkan dengan kontribusi belanja tidak langsung, yaitu terjadi penurunan secara berkelanjutan. Kontribusi realisasi belanja langsung terhadap realisasi APBD Pemda DIY pada tahun 2009 sebesar 42,65%, kemudian menurun menjadi sebesar 38,15 pada tahun 2010, dan menurun lagi pada tahun 2011 mejadi sebesar 35,26%. Kalau dilihat lebih dalam lagi, penurunan kontribusi realisasi belanja langsung terhadap APBD ini juga terjadi secara parallel pada masing-masing jenis belanja, baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Kecenderungan penurunan ini perlu menjadi perhatian yang serius mengingat belanja langsung merupakan kelompok belanja yang langsung berkaitan dengan kinerja program/kegiatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Aset

Aset lancar Pemerintah DIY mengalami trend menurun pada tahun 2007 hingga 2009 dan mulai mengalami kenaikan secara perlahan pada tahun 2009 hingga 2011 dengan rata-rata penurunan dalam 5 (lima) tahun sebesar 8,60%. Penurunan terbesar disebabkan oleh berkurangnya saldo kas dari tahun 2007 sebesar Rp.553.312.717.156,81 menjadi Rp.290.052.556.196,39 pada tahun 2008.

Apabila dilihat secara lebih mendetail, kas dan piutang pendapatan daerah masing-masing mengalami rata-rata penurunan sebesar 12,85% dan 28,83% sejak tahun 2007-2011. Sedangkan untuk piutang lain-lain dan persediaan barang mengalami rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 59,39% dan 106,96%. Bagian lancar tuntutan ganti rugi hanya terdapat pada tahun 2011 sehingga tidak dapat dianalisis trend peningkatan atau penurunannya. Nilai tersebut merupakan piutang akibat adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP TGR) yang akan jatuh tempo pada TA 2012 atau dalam jangka waktu paling lambat satu tahun terhitung dari tanggal neraca. Demikian pula dengan biaya dibayar di muka yang baru muncul pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 85.688.376,00.

Investasi jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 25,63%. Investasi ini didorong oleh investasi permanen sebesar 27,92% dan investasi non permanen sebesar 20,51%. Investasi non permanen ini merupakan dana bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah DIY untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.

Aset tetap dalam neraca keuangan Pemerintah DIY mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,91% selama kurun waktu 5 tahun sejak 2007-

2011. Pada tahun 2007 jumlah aset tetap mengalami penurunan dari Rp. 3.299.489.366.264,70 menjadi Rp. 2.999.047.613.090,00 pada tahun 2008 atau turun sebesar 9,11%. Selanjutnya aset tetap mengalami tren meningkat yaitu pada tahun 2009 (8,55%), 2010 (30,76%), dan 2011 (5,43%). Pertumbuhan asset tetap ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya kegiatan inventarisasi, klasifikasi dan penilaian asset tetap sesuai Pergub Nomor 22.1 Tahun 2010.

Pertumbuhan aset tetap yang terbesar berasal dari konstruksi dalam pengerjaan yang mengalami rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 82,93%, diikuti dengan pertumbuhan tanah sebesar 24,53%, aset tetap lainnya sebesar 21,35%, peralatan dan mesin sebesar 20,49%, gedung dan bangunan sebesar 5,41% dan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 2,17%.

Pemerintah DIY mulai menempatkan dana cadangan sejak tahun 2008 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah untuk membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di DIY. Tujuannya untuk memenuhi program peremajaan 20 bus angkutan perkotaan di wilayah DIY. Penyediaan Dana Cadangan dialokasikan secara bertahap selama 7 tahun terhitung sejak TA 2008 sampai dengan TA 2014. Namun sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011, Perda No.3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Meskipun demikian, sampai dengan 31 Desember 2011 Dana Cadangan belum dilimpahkan kembali ke rekening Kas Daerah. Hal ini mengingat perjanjian Pinjam-Pakai antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 6/KES.BER/GUB/2007 – 04/NKB/2007 tanggal 3 Maret 2007 yang telah diaddendum dengan Perjanjian Nomor 30/PK/2009 – Nomor 40/PERJ/GUB/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 berakhir pada tahun 2014 menunggu berakhirnya perjanjian.

Aset lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup signifikan selama 2007-2011 yaitu sebesar 125,88%. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2010 karena mengalami pertumbuhan aset sebesar 533,15% dari tahun sebelumnya walaupun kemudian diikuti dengan penurunan sebesar 68,39% pada tahun 2011. Dari pos-pos aset lainnya, yang mengalami rata-rata pertumbuhan paling besar adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan yaitu sebesar 530,91%. Tagihan tersebut merupakan piutang yang telah didukung dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak. Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan terbesar terdapat pada tahun 2009 sebesar Rp 441.866.348,55 yang kemudian terus menurun menjadi Rp 71.111.261,55 pada tahun 2010 dan Rp 2.087.004,00 pada tahun 2011. Hal ini berarti bahwa sebagian besar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan sudah dapat diselesaikan hingga akhir 2011.

Tagihan Bagi Hasil Kemitraan mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 4,71% selama 4 tahun sejak tahun 2008 hingga 2011. Tagihan Bagi Hasil Kemitraan ini merupakan hak pemerintah atas kontrak kemitraan selama lebih dari 30 tahun dengan PT Yogya Indah Sejahtera yang besarannya per tahun telah ditetapkan dengan Akte Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53 tanggal 12 September 1992 dan Adendum ke II tanggal 14 Agustus 1998.

Sedangkan untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dikatakan cenderung konstan karena hanya mengalami pertumbuhan yang relatif kecil. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2007-2011, rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 1,85%.

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah DIY mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,44%. Penurunan terjadi pada tahun 2008 sebesar

12,15% dari tahun sebelumnya, namun diikuti dengan pertumbuhan aset pada tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 5,38%, 32,52%, dan 4%. Pertumbuhan asset Pemda DIY ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya adanya kegiatan inventarisasi, klasifikasi dan penilaian asset tetap sesuai Pergub Nomor 22.1 Tahun 2010.

Tabel 3.3 Aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Per 31 Desember 2007 s.d. 31 Desember 2011

Kode Rek	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ASET**						
1.1	**ASET LANCAR**						
1.1.1	Kas	553,312,717,156.81	290,052,556,196.39	231,879,995,705.33	232,164,536,964.36	269,565,009,030.23	(12.85)
1.1.2	Piutang Pendapatan Daerah	30,191,696,925.50	41,001,161,708.14	2,385,229,366.14	435,899,248.00	543,916,446.00	(28.83)
1.1.3	Piutang Lain-lain	4,208,535,191.57	335,000,000.00	357,000,000.00	1,533,845,425.14	1,432,440,093.99	59.39
1.1.4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	30,246,619.00	-
1.1.5	Biaya dibayar di muka	-	-	-	85,688,376.00	85,688,376.00	-
1.1.6	Persediaan barang	6,624,570,683.50	7,215,920,397.50	7,861,203,153.67	15,010,180,523.38	62,894,389,220.02	106.96
JUMLAH ASET LANCAR		594,337,519,957.38	338,604,638,302.03	242,483,428,225.14	249,230,150,536.88	334,551,689,785.24	
PERT.ASET LANCAR (%)			(43.03)	(28.39)	2.78	34.23	(8.60)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Non Permanen	16,606,600,000.00	29,666,583,461.00	16,440,510,000.00	15,953,137,818.00	24,077,629,518.00	20.51
1.2.2	Investasi Permanen	80,868,191,020.16	126,691,919,020.16	166,440,802,135.95	195,542,495,323.64	207,555,794,518.42	27.92
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		97,474,791,020.16	156,358,502,481.16	182,881,312,135.95	211,495,633,141.64	231,633,424,036.42	
PERT.INVESTASI JANGKA PANJANG (%)			60.41	16.96	15.65	9.52	25.63
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	951,439,632,977.00	725,200,078,222.00	738,257,750,766.00	1,614,102,886,801.00	1,637,460,180,432.00	24.53
1.3.2	Peralatan dan Mesin	142,982,429,261.00	192,354,400,269.00	216,710,375,824.00	246,910,296,992.00	298,392,018,509.00	20.49
1.3.3	Gedung dan Bangunan	879,987,020,511.10	836,566,909,467.00	933,744,771,431.00	1,036,293,094,082.00	1,077,283,007,005.00	5.41
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,299,567,038,282.60	1,222,446,641,899.00	1,317,947,503,972.00	1,324,936,912,288.00	1,408,255,252,862.00	2.17
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	10,596,664,805.00	13,213,050,158.00	13,790,980,373.00	15,977,307,862.00	22,442,590,768.00	21.35

Kode Rek	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	14,916,580,428.00	9,266,533,075.00	35,025,162,984.00	18,562,804,550.00	44,295,731,480.00	82.93
Kode Rek		**URAIAN**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
1		2	3	4	5	6	7
JUMLAH ASET TETAP		3,299,489,366,264.70	2,999,047,613,090.00	3,255,476,545,350.00	4,256,783,302,575.00	4,488,128,781,056.00	
PERT.ASET TETAP (%)			(9.11)	8.55	30.76	5.43	8.91
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	0	1,586,442,237.87	3,221,979,925.87	3,294,264,816.02	3,233,796,153.01	34.50
JUMLAH DANA CADANGAN		0	1,586,442,237.87	3,221,979,925.87	3,294,264,816.02	3,233,796,153.01	
PERT.DANA CADANGAN (%)				103.09	2.24	(1.84)	34.50
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	0	7,445,000,000.00	7,112,000,000.00	6,777,000,000.00	6,442,000,000.00	(4.71)
1.5.2	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	9,612,000.00	221,573,248.02	441,866,348.55	71,111,261.55	2,087,004.00	530.91
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6,588,500,000.00	7,038,500,000.00	7,038,500,000.00	7,594,179,000.00	7,038,500,000.00	1.85
1.5.4	Aset Tak Berwujud	16,232,478,369.00	16,232,478,373.00	17,658,894,873.00	20,490,331,762.00	33,609,927,492.00	22.21
1.5.5	Aset Lain-lain	176,839,727.55	67,693,965.00	-	169,267,537,994.00	17,445,069,264.00	
JUMLAH ASET LAINNYA		23,007,430,096.55	31,005,245,586.02	32,251,261,221.55	204,200,160,017.55	64,537,583,760.00	
PERT. ASET LAINNYA (%)			34.76	4.02	533.15	(68.39)	125.88
JUMLAH ASET DAERAH		**4,014,309,107,338.79**	**3,526,602,441,697.08**	**3,716,314,526,858.51**	**4,925,003,511,087.09**	**5,122,085,274,790.67**	
PERT. ASET (%)			**(12.15)**	**5.38**	**32.52**	**4.00**	7.44

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah DIY selama periode tahun 2007-2011 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif dimana terjadi kenaikan maupun penurunan. Pada awal periode (tahun 2007) kewajiban jangka pendek berjumlah Rp 24.651.855.589,00 kemudian pada akhir periode (tahun 2011) sebesar Rp 2.373.399.355,78 atau jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya sebesar 10,46%. Hal ini terjadi karena pada periode tahun 2008-2009 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 151,86% sehingga jumlah kewajiban jangka pendek pada periode tersebut berjumlah Rp 3.119.134.241,83. Faktor utama penyebab pertumbuhan kewajiban jangka pendek ini adalah pertumbuhan utang lainnya yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 52,23%. Utang lainnya ini meliputi diantaranya kekurangan pembayaran bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota, biaya yang masih harus dibayar yaitu klaim jamkesos yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya dan pendapatan diterima dimuka.

Kewajiban jangka panjang menunjukkan kecenderungan yang positif, dimana terjadi pertumbuhan yang negatif, atau terjadi penurunan kewajiban jangka panjang rata-rata minus 47,34 persen. Kewajiban jangka panjang ini meliputi utang jangka panjang dan utang bunga yang pada akhir periode tahun 2011 sudah tidak ada lagi kewajiban jangka panjang tersebut. Hal ini berarti bahwa seluruh kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah DIY sudah dapat dilunasi semua.

Secara keseluruhan persentase pertumbuhan kewajiban Pemerintah Daerah DIY selama periode tahun 2007-2011 fluktuatif. Pada periode tahun 2007-2008 terjadi penurunan sebesar minus 94,73% kemudian periode tahun berikutnya (2008-2009) naik menjadi 142,06%. Pada periode tahun 2009-2010 menurun kembali menjadi 21,13% dan pada akhir tahun periode (2010-2011) menurun signifikan menjadi minus 38,22% persentase. Dengan demikian Pemerintah Daerah DIY seharusnya dapat mengendalikan kewajiban jangka pendeknya, dengan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.

Tabel 3.4 Kewajiban Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Per 31 Desember 2008 sd. 31 Desember 2011

Kode Rek	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	953,700,073.00	425,607,741.00	341,943,744.00	78,854,904.00	5,907,440.00	(61.12)
2.1.2	Utang Lainnya	23,538,614,448.36	662,493,451.79	2,662,287,814.00	3,762,851,678.00	2,367,491,915.78	52.23
2.1.4	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang	159,541,067.64	150,353,572.66	114,902,683.83	-	-	(14.67)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		24,651,855,589.00	1,238,454,765.45	3,119,134,241.83	3,841,706,582.00	2,373,399,355.78	
PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)			(94.98)	151.86	23.17	(38.22)	10.46
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Jangka Panjang	150,000,000.00	-	52,384,262.00	-	-	
2.2.2	Utang Bunga	72,105,356.49	71,751,783.83	-	-	-	(0.49)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		222,105,356.49	71,751,783.83	52,384,262.00	-	-	
PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (%)			(67.69)	(26.99)			(47.34)
JUMLAH KEWAJIBAN		**24,873,960,945.49**	**1,310,206,549.28**	**3,171,518,503.83**	**3,841,706,582.00**	**2,373,399,355.78**	
PERT. KEWAJIBAN (%)			**(94.73)**	**142.06**	**21.13**	**(38.22)**	7.56

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Pertumbuhan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah DIY selama kurun waktu 2009-2011 adalah rata–rata bertambah sebesar 7,57% per tahun, meskipun pada komponen- komponen tertentu mengalami penurunan. Secara lebih rinci, pada Tahun 2008 pertumbuhannya naik dari -11,63% mencapai angka 5,33%, kemudian terus naik secara signifikan sebesar 32,53% pada Tahun 2010, akan tetapi pada tahun 2011 kembali turun hingga angka 4,03% sehingga didapat rata–rata pertumbuhan pertahun sebesar 7,57%. Adapun Ekuitas Dana Pemerintah Daerah DIY adalah terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, serta Ekuitas Dana Cadangan. Dimana pada setiap komponen terdiri dari pos–pos yang turut andil dalam naik dan turunnya pertumbuhan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah DIY.

Ekuitas Dana Lancar yang terdiri dari SILPA, SILPA di BLUD, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana cadangan penjaminan UMKM, serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, mengalami penurunan rata–rata sebesar 7,99%. Ini terjadi karena rata-rata penurunan yang cukup besar pada Tahun 2009 yaitu sebanyak 29,05% dan dengan rata-rata yang cukup rendah pada periode tahun sebelumnya, yaitu -40,78%, meskipun pada tahun selanjutnya yaitu Tahun 2010 sudah dicapai peningkatan sebanyak 2,52% dan pada Tahun 2011 mengalami kemajuan peningkatan yang cukup besar yakni 35,37%, tetapi tidak mampu membawa rata–rata pertumbuhan Ekuitas Dana Lancar menjadi positif. Penurunan Ekuitas Dana Lancar ini dikarenakan SILPA yang juga menurun pada Tahun 2008 ke Tahun 2009 turun dari Rp.279.499.643.186,39 menjadi sebesar Rp. 231.489.751.385,33, kemudian kembali turun pada Tahun 2010 menjadi Rp.230.911.218.650,70, tetapi mengalami kenaikan lagi pada tahun 2011 sebesar Rp.267.478.790.932,52 sehingga rata–rata penurunannya adalah sebesar 12,21%. Komponen Ekuitas Dana Lancar yang mengalami rata–rata pertumbuhan adalah SILPA di BLUD yaitu sebesar 75,95%, serta Cadangan Persediaan mengalami kenaikan sebesar 106,96% dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah sebesar 35,88%. Sedangkan komponen SILPA mengalami rata–rata penurunan sebesar 12,21% tiap tahun, pendapatan yang ditangguhkan juga mengalami rata – rata penurunan sebanyak 3,90%, dan cadangan piutang juga turun rata-rata 24,11% pertahunnya.

Adapun untuk Ekuitas Dana Investasi, yang terdiri dari dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, dana diinvestasikan dalam aset tetap, dana diinvestasikan dalam aset lainnya, serta dana pembayaran utang jangka panjang, memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan Ekuitas Dana Pemda DIY sebanyak 9,78% pertahunnya. Pada Tahun 2009 Ekuitas Dana Investasi tumbuh sebesar 8,92%, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2011 yaitu sebesar 34,63% meskipun pada tahun selanjutnya yaitu Tahun 2011 mengalami penurunan hingga ke angka 2,39%. Akan tetapi pertumbuhan Ekuitas Dana Investasi tetap menyumbang pertumbuhan rata–rata sebesar 9,78% setiap tahun dengan perincian dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang tumbuh rata–rata sebesar 25,63%, kemudian dana diinvestasikan dalam aset tetap dengan pertumbuhan rata–rata 8,91%, dan dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya menyumbang pertumbuhan rata–rata 125,88%. Sedangkan dana pembayaran utang jangka panjang turun tiap tahunnya sebesar 47,34%.

Sementara itu, Ekuitas Dana Cadangan tumbuh rata–rata 34,50% setahunnya, dengan rincian kenaikan sebesar 103,09% pada Tahun 2009, kemudian terus turun pada dua tahun setelahnya, yaitu 2,24% pada Tahun 2010 dan turun hingga -1,84% pada tahun 2011.

Secara total jumlah kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2007 adalah sebesar Rp 4.014.309.107.338,79, dan pada Tahun 2008 turun menjadi sejumlah Rp 3.526.602.441.697,08 dengan tingkat penurunan rata–rata 12,15%. Kemudian pada tiga tahun sesudahnya, yaitu Tahun 2009 hingga 2011 jumlah kewajiban dan ekuitas terus naik, Rp 3.716.314.526.858,51 pada Tahun 2009, lalu Tahun 2010 sebesar Rp 4.925.003.511.087,09, dan pada Tahun 2011 Rp 5.122.085.274.790,67 dengan tingkat pertumbuhan rata–rata 5,38% pada Tahun 2009, dan 32,52% pada Tahun 2010, serta Tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 4,00%.

Tabel 3.5 Ekuitas Dana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Per 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011

Kode Rek	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**EKUITAS DANA**						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	529,957,891,682.55	279,499,643,186.39	231,489,751,385.33	230,911,218,650.70	267,478,790,932.52	(12.21)
3.1.2	SILPA di BLUD	-	-	-	1,165,322,855.66	2,050,422,710.71	75.95
3.1.3	Pendapatan yang Ditangguhkan	22,401,125,401.26	127,305,269.00	48,300,576.00	9,140,554.00	29,887,947.00	(3.90)
3.1.4	Cadangan Piutang	34,400,232,117.07	41,336,161,708.14	2,742,229,366.14	2,055,433,049.14	2,092,291,534.99	(24.11)
3.1.5	Cadangan Persediaan	6,624,570,683.50	7,215,920,397.50	7,861,203,153.67	15,010,180,523.38	62,894,389,220.02	106.96
3.1.6	Cadangan Penjaminan UMKM	-	10,000,000,000.00	-	-	-	
3.1.7	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(23,698,155,516.00)	(812,847,024.45)	(2,777,190,497.83)	(3,762,851,678.00)	(2,367,491,915.78)	35.88
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		569,685,664,368.38	337,366,183,536.58	239,364,293,983.31	245,388,443,954.88	332,178,290,429.46	
PERT. EKUITAS DANA LANCAR			(40.78)	(29.05)	2.52	35.37	(7.99)
3.2	EKUITAS DANA						

Kode Rek	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	INVESTASI						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	97,474,791,020.16	156,358,502,481.16	182,881,312,135.95	211,495,633,141.64	231,633,424,036.42	25.63
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3,299,489,366,264.70	2,999,047,613,090.00	3,255,476,545,350.00	4,256,783,302,575.00	4,488,128,781,056.00	8.91
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	23,007,430,096.55	31,005,245,586.02	32,251,261,221.55	204,200,160,017.55	64,537,583,760.00	125.88
3.2.4	Dana Pembayaran Utang Jangka Panjang	(222,105,356.49)	(71,751,783.83)	(52,384,262.00)	-	-	(47.34)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		3,419,749,482,024.92	3,186,339,609,373.35	3,470,556,734,445.50	4,672,479,095,734.19	4,784,299,788,852.42	
PERT. EKUITAS DANA INVESTASI (%)			(6.83)	8.92	34.63	2.39	9.78
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN						
3.3.1	Ekuitas Dana Cadangan	0	1,586,442,237.87	3,221,979,925.87	3,294,264,816.02	3,233,796,153.01	34.50
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		0	1,586,442,237.87	3,221,979,925.87	3,294,264,816.02	3,233,796,153.01	
PERT. EKUITAS DANA CADANGAN (%)				103.09	2.24	(1.84)	34.50
JUMLAH EKUITAS DANA		**3,989,435,146,393.30**	**3,525,292,235,147.80**	**3,713,143,008,354.68**	**4,921,161,804,505.09**	**5,119,711,875,434.89**	
PERT.EKUITAS DANA (%)			**(11.63)**	**5.33**	**32.53**	**4.03**	7.57
JUMLAH KEWAJIBAN &		**4,014,309,107,338.79**	**3,526,602,441,697.08**	**3,716,314,526,858.51**	**4,925,003,511,087.09**	**5,122,085,274,790.67**	

Kode Rek	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
EKUITAS DANA							
PERT. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (%)			**(12.15)**	**5.38**	**32.52**	**4.00**	7.44

Analisis lebih lanjut terhadap neraca Pemda DIY untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan akan digunakan metode analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktiitas. Penjelasan lebih lanjut terhadap analisis tersebut sebagai berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

Kemudian quick rasio diperoleh dengan jalan mengurangkan aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

Hasil perhitungan rasio likuiditas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2009-2011 berdasarkan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rasio Likuiditas Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2011

Rasio Likuiditas	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4
Rasio Lancar	77,74	64,87	140,96
Rasio Quick	75,22	60,97	114,46

Sumber: DPPKA DIY 2012

a. Rasio Lancar

Rasio Lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah DIY untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh jumlah aset lancar dapat menjamin hutang lancarnya. Semakin tinggi rasio berarti hutang–hutang yang ada semakin terjamin. Menurut kriteria yang dibuat oleh Dun dan Bradstreet (D&B), angka rasio yang mengindikasikan besarnya kemampuan Pemda untuk mencairkan aset lancarnya untuk melunasi tagihan jangka pendeknya adalah lebih dari 4,0. Akan tetapi bila rasio yang diperoleh adalah lebih kecil dari 1,5 maka diindikasikan Pemda akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Dari hasil perhitungan diperoleh rasio lancar Pemerintah Daerah DIY untuk Tahun 2009 adalah sebesar 77,74, Tahun 2010 sebesar 64,87 dan pada Tahun 2011 adalah 140,96. Nilai ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah DIY tidak mengalami kesulitan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek yang dimilikinya. Meskipun pada Tahun 2010 rasio sempat mengalami penurunan tetapi pada Tahun 2011 kembali mengalami kenaikan. Jadi dapat diambil kesimpulan pemerintah Daerah DIY sangat *liquid* karena kemampuannya dalam membayar hutang jangka pendek sangat tinggi.

b. Rasio *Quick*

Rasio quick digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban–kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan

jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar hutang. Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemda tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dari perhitungan rasio quick Pemerintah Daerah DIY diperoleh rasio quick sebesar 75,22 untuk Tahun 2009, kemudian pada Tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 60,97 meskipun pada Tahun 2011 terjadi kenaikan lagi menjadi 114,46. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Daerah DIY setelah dikurangi persediaan yang dimiliki sangat liquid untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimilikinya.

Berdasarkan analisis rasio lancar dan rasio quick tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio lancar dan rasio quick pada Pemerintah Daerah DIY diperoleh nilai yang tinggi. Hal ini berarti bahwa Pemda DIY memiliki tingkat investasi persediaan yang cukup rendah.

RASIO SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah:

Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung tingkat solvabilitas Pemerintah Daerah DIY ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rasio Solvabilitas Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2011

Rasio Solvabilitas	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,0009	0,0008	0,0005
Rasio Total Hutang Terhadap Modal	0,0009	0,0008	0,0005

Sumber: DPPKA DIY (2012)

a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari hutang. Formulasi yang dipakai adalah total hutang dibagi dengan total aset. Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan baerarti semakin baik rasio hutang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan hutangnya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 0,0009 untuk Tahun 2009, kemudian semakin menurun pada Tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 0,0008 dan 0,0005. Dari kecilnya nilai rasio yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah DIY sangat solvabel dan tidak bergantung kepada hutang untuk memenuhi aset-asetnya.

b. Rasio Total Hutang Terhadap Modal

Rasio Total Hutang Terhadap Modal diformulasikan dengan membagi antara total hutang dengan total modal. Jadi rasio ini merupakan perbandingan

antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan Pemda dan menunjukkan kemampuan modal Pemda untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Rasio hasil perhitungan dari neraca Pemda pada Tahun 2009 adalah sebesar 0,0009, serta menurun ke angka 0,0008 dan 0,0005 untuk dua tahun sesudahnya. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin sehat kondisi keuangan Pemda. Dari kecilnya rasio milik Pemerintah Daerah DIY dan bahkan cenderung mengalami penurunan, dapat kita indikasikan bahwa Pemda DIY tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya jikalau memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada kreditur.

RASIO AKTIVITAS

Untuk mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menggunakan dana secara efektif dan efisien, digunakan rasio aktivitas. Karena perhitungan rasio ini berdasarkan pada perbandingan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran pada satu periode tertentu, maka rasio ini diyakini dapat mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional pemerintahan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata–rata umur piutang dan rasio rata–rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang, dimana:

Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan

Rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan, dimana:

Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai persediaan, sedangkan

Rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan):2

Berdasarkan formulasi di atas, rasio aktivitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2009–2011 adalah sebagau berikut:

Tabel 3.8 Rasio Aktivitas Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2011

Rasio Aktivitas	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	2	3	4
Rata-rata Umur Piutang	6,25	0,63	0,45
Rata-rata Umur Persediaan	54,85	76,71	208,05

Sumber: DPPKA DIY 2012

a. Rasio Rata-rata Umur Piutang

Rasio ini dipakai untuk mengukur lamanya umur rata–rata piutang atau lamanya waktu yang diperlukan mulai dari proses sampai dengan pembayaran tunai. Bila rasio rata–rata umur piutang besar maka kemungkinan piutang menjadi tidak tertagih juga tinggi. Perhitungan rasio ini diperoleh dengan cara membagi jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari dengan perputaran piutang. Yang mana perputaran piutang didapat dengan menjumlahkan saldo awal piutang dan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Dari proses perhitungan didapat rasio 6,25 untuk

Tahun 2009, kemudian Tahun 2010 rasio yang diperoleh adalah 0,63, kemudian pada tahun berikutnya turun lagi menjadi 0,45. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa umur piutang Pemerintah Daerah DIY mengalami penurunan selama kurun waktu Tahun 2009 hingga 2011. Hal ini berarti bahwa tingkat ketertagihan piutang menunjukkan kecenderungan semakin baik selama periode analisis. Hal tersebut juga berdampak sangat baik terhadap kestabilan kondisi keuangan Pemerintah Daerah DIY karena Pemda tidak kesulitan dalam menagih piutang -piutangnya.

b. Rasio Rata – rata Umur Persediaan

Rasio ini digunakan untuk mengetahui lamanya umur persediaan atau lamanya dana yang tertanam pada persediaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari dengan perputaran persediaan. Di mana perputaran persediaan didapat dengan menjumlahkan saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan kemudian dibagi dua. Rasio rata–rata umur persediaan yang diperoleh dari perhitungan untuk Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2009 adalah sebesar 54,85 sehingga pada satu tahun terjadi perputaran persediaan selama 55 hari. Demikian juga dengan tahun 2010 terjadi perputaran persediaan selama 77 hari dan Tahun 2011 perputaran persediaan yang terjadi adalah selama 208 hari. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan yang berputar dalam satu tahun serta menunjukkan efektivitas manajemen Pemerintah Daerah dalam mengelola persediaannya. Sebaliknya bila perputaran persediaan rendah menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan persediaan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apatur DIY

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		a	b	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2009	940.826.420.859	1.340.402.413.793	70,19
2	Tahun Anggaran 2010	901.796.127.914	1.398.696.910.173	64,47
3	Tahun Anggaran 2011	1.015.869.958.981	1.553.613.581.545	65,39

Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama DIY

Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Belanja Tidak Langsung	310.260.955.405	335.693.915.466	414.966.135.024	13,34
Belanja Pegawai	310.260.955.405	335.693.915.466	414.966.135.024	13,34
Belanja Langsung	219.998.317.534	190.182.782.185	191.561.381.286	(13,19)
Belanja Pegawai	27.404.681.110	21.897.852.274	25.417.676.908	(12,05)
Belanja Barang Jasa	137.153.805.230	116.335.380.038	115.729.901.237	(15,43)
Belanja Modal	55.439.831.194	51.949.549.873	50.413.803.141	(7,77)
Pembiayaan pengeluaran	12.914.564.850	44.102.852.067	27.344.846.900	4,72
Pembentukan Dana Cadangan	1.575.000.000	-	-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.200.000.000	21.187.852.067	2.600.000.000	(331,53)
Pembayaran Pokok Utang	100.000.000	50.000.000	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	22.865.000.000	23.225.000.000	50,78
Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	1.519.846.900	
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Blm Terselesaikan	1.039.564.850	-	-	

Tabel 3.11 Penutupan Defisit Riil Anggaran DIY

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.286.067.485.169,00	1.374.205.096.491,03	1.604.910.831.405,87
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	1.327.487.848.943,00	1.354.594.058.106,00	1.562.268.734.645,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.914.564.850,00	44.102.852.067,00	27.344.846.900,00
A	Defisit Riil	(54.334.928.623,67)	(24.491.813.682,00)	15.297.249.860,87
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan			
4	SILPA TA sebelumnya	279.499.643.186,00	231.489.751.385,00	232.076.541.506,00
5	Pencairan dana cadangan	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	23.947.092.976,00	20.885.008.000,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	5.445.531.350,00	-	-
10	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	879.505.473,00	1.131.510.827,00	1.270.414.276,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	285.824.680.009,00	256.568.355.188,00	254.231.963.782 ,00
A-B	Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	231.489.751.385,33	232.076.541.506,36	269.529.213.643,25

Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemda DIY

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1	SILPA TA sebelumnya	(514,40)	(945,17)	1.517,11
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	(97,78)	136,53
6	Penerimaan Piutang Daerah	(10,02)	-	-
7	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	(1,62)	(4,62)	8,30
8	Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	(426,04)	(947,57)	1.761,95

Tabel 3.13 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran DIY

No	Uraian	2009		2010		2011		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	231.489.751.385,33		232.076.541.506,36		269.529.213.643,23		19.313.126.189,47
2	Pelampauan penerimaan PAD	69.629.041.564,74	30,08	101.320.664.485,03	43,66	91.995.437.363,87	34,13	27.029.009.359,71
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	360.977.692,59	0,16	(1.269.780.551,00)	(0,55)	7.172.727.247,00	2,66	2.590.495.655,41
4	Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.856.556.500,00	1,23	(1.066.290.000,00)	(0,46)	1.278.406.500,00	0,47	(2.750.498.250,00)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	151.023.649.469,00	65,24	129.157.255.589,00	55,65	146.605.835.127,00	54,39	(13.142.104.111,00)
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.039.564.850,00	0,45	-	-	-		-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	1.519.846.900,00	0,56	-

Tabel 3.14 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Pemda DIY

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	231.489.751.385,33	232.076.541.506,36	269.529.213.643,23
	Dikurangi :			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.039.564.850,00	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	1.519.846.900,00
4	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran	230.450.186.535,33	232.076.541.506,36	268.009.366.743,23

Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2009 – 2011 adalah:

a. LKPD Tahun 2009 dengan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yaitu Aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2009 senilai Rp3.255.476.545.350,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum melakukan penilaian atas saldo awal aset tetap dan pencatatan aset tetap pada sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b. LKPD Tahun 2010 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan paragraf penjelas yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral masih mencatat aset daerah yang telah digunakan oleh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena aset tersebut belum dilakukan penyerahan secara resmi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

c. LKPD Tahun 2011 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan paragraf penjelas yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum menyajikan investasi non permanen dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan aset tetap belum dilakukan penyusutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan untuk opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-DIY untuk Tahun 2009-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-DIY untuk Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
1	Kota Yogyakarta	2009	Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas	• Sebagian Aset Tetap yaitu Bangunan Gedung belum dinilai oleh Penilai Independen, namun dinilai dengan Harga Standar Gedung Bangunan Negara TA 2008 yang diterbitkan oleh Kementrian PU senilai

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				Rp96.307.669.500,00 atau 3,21% dari Total Aset Tetap. • Aset Tetap belum disusutkan.
		2010	Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas	• Pemerintah Kota mengakui adanya arus kas masuk dan arus kas keluar pada aktivitas non anggaran (pajak atas SP2D LS Pihak Ketiga) namun Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku wajib pungut, pada kenyataannya tidak melakukan pemungutan dan penyetoran atas pajak dimaksud. • Pemerintah Kota memiliki tanah seluas 58.850 M2 yang dikerjasamakan dengan mitra pihak ketiga (PT. PK) dengan bentuk kerjasama bangun guna serah (BOT). Aset tanah tersebut dijaminkan oleh PT. PK ke Bank. Kerjasama BOT tersebut diputus secara sepihak kontraknya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2009. Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menghadapi gugatan perdata dari PT. PK atas pemutusan kontrak secara sepihak tersebut. Keputusan Pengadilan Negeri memenangkan pihak penggugat tetapi pihak Pemerintah Kota Yogyakarta sedang mengajukan banding atas besarnya ganti rugi yang belum disepakati.
		2011	Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas	• Aset Tetap Tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3.073.463.152.914,48 dan 3.005.251.743.213,16 belum dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. • Pemerintah Kota memiliki tanah seluas 58.850 M2 yang dikerjasamakan dengan mitra pihak ketiga (PT. PK) dengan bentuk kerjasama bangun guna serah (BOT). Aset tanah tersebut dijaminkan oleh PT.

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				PK ke Bank. Kerjasama BOT tersebut diputus secara sepihak kontraknya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2009. Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menghadapi gugatan perdata dari PT. PK atas pemutusan kontrak secara sepihak tersebut. Keputusan Pengadilan Negeri memenangkan pihak penggugat tetapi pihak Pemerintah Kota Yogyakarta sedang mengajukan banding atas besarnya ganti rugi yang belum disepakati.
2	Kabupaten Sleman	2009	Wajar Dengan Pengecualian	• Pemerintah Kabupaten Sleman menyajikan nilai aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.238.927.368.131,00 berdasarkan hasil pengolahan data hasil sensus daerah Tahun 2008, penilaian final secara manual terhadap data hasil sensus daerah Tahun 2008, koordinasi dan rekonsiliasi dengan pengurus barang SKPD, dan memperhitungkan mutasi aset tetap Tahun 2009. Nilai aset tetap tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak sesuai dengan jumlah rincian aset tetap di SKPD-SKPD dan belum mencakup seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
		2010	Wajar Dengan Pengecualian	Selama TA 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terjadi mutasi penambahan aset tetap sebesar Rp. 42.893.468.971,81. Mutasi tersebut tidak didukung dengan rincian aset tetap dari pengurus barang yang sesuai. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini mutasi penambahan aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selama Tahun 2010.

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
		2011	Wajar Dengan Pengecualian	• Pemerintah Kabupaten Sleman menyajikan Investasi Non Permanen Tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp. 54.942.952.578,00 dan Rp. 55.166.126.822,00. Pemerintah Kabupaten Sleman belum menyajikan Investasi Non Permanen tersebut dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. • Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp. 2.504.501.327.118,97 dan Rp. 2.229.592.426.782,81 belum dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
3	Kabupaten Bantul	2009	Wajar Dengan Pengecualian	• RSUD Panembahan Senopati masih mencatat dana Jamkesmas yang merupakan titipan dari Kementrian Kesehatan sebesar Rp. 14.296.974.000,00 sebagai pendapatan retribusi rumah sakit. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008. Pencatatan sebagai pendapatan retribusi tersebut mengakibatkan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 dan Kas pada Neraca per 31 Desember 2009 dicatat terlalu tinggi (overstated) sebesar Rp. 14.296.974.000,00. Namun berdasarkan catatan Bank dan Bendahara, saldo kas di Bendahara Pengeluaran hanya sebesar Rp. 9.609.363.072,00 karena sudah digunakan untuk operasional RSUD yang

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 875.615.800,00 dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 sebesar Rp. 3.811.995.128,00. • Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.006.651.091.168,06 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dicatat sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
		2010	Wajar Dengan Pengecualian	• Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar . .637.099.293,07 dan Rp. 88.691.362.690,38. Pemerintah Kabupaten Bantul belum mengakui penerimaan kas dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah sebesar Rp. 512.047.962,96. Penerimaan dari keempat SKPD tersebut digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul juga belum mengakui penerimaan dan pengeluaran kas dari Dana Jamkesmas yang telah menjadi hak BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul sebesar Rp. 795.163.865,00. • Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat Kas di BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 4.160.362.100,00. BLUD Panembahan Senopati Bantul belum melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas Tahun 2010 sebesar Rp. 280.532.827,00 secara memadai. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. • Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat aset tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp. 2.164.887.631.044,59 dan Rp. 2.006.651.091.168,06. Pemerintah Kabupaten Bantul belum melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, administrasi pencatatan aset tetap belum diselenggarakan dengan tertib, sehingga rincian aset tetap pada masing-masing SKPD tidak dapat ditelusuri. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap per 31 Desember 2010 dan 2009.
		2011	Wajar Dengan Pengecualian	Pengecualian pada Investasi Non Permanen, Aset Lainnya dan Pendapatan Asli Daerah.
4.	Kabupaten Gunung Kidul	2009	Wajar Dengan Pengecualian	• Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.161.206.136.774,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena sebagian nilai asset tetap belum dicatat berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan dan pencatatan asset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.
		2010	Wajar Dengan Pengecualian	• Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyajikan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				sebesar Rp. 5.115.339.964,00 yang dicatat dalam jumlah netto tidak sesuai SAP • Saldo asset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.189.477.988.537,00, diantaranya sebesar Rp. 187.252.079.110,27 belum memperhitungkan atribusi biaya pengadaan dan tidak didukung dengan buku inventaris serta mutasi asset tetap sebesar Rp. 75.747.935.603,26 belum mencakup hasil penilaian asset tetap Tahun 2010 dan tidak didukung daftar mutasi asset tetap SKPD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum melakukan penilaian atas 127 unit asset tetap pada 18 SKPD sebagaimana disyaratkan dalam SAP.
		2011	Wajar Dengan Pengecualian	• Nilai persediaan yang disajikan sebesar Rp. 5.523.114.922,00 terdiri dari Persediaan Material/Bahan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp. 4.954.324.546,00 di bagian pelayanan/apotek RSUD Wonosari sebesar Rp. 128.464.596,00 dan Instalasi Laboratorium RSUD Wonosari sebesar Rp. 440.325.780,00 tidak didukung pencatatan mutasi pengeluaran yang memadai dan BPK RI tidak bisa memperoleh keyakinan atas nilai persediaan tersebut. • Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.292.774.471.245,07, nilai tersebut termasuk asset tetap yang disajikan dalam Neraca Awal 1 Januari 2002 sebesar Rp. 407.589.351.076,79. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tidak dapat menyampaikan kertas kerja dan Laporan Hasil Penyusunan Neraca Awal dan BPK RI tidak dapat melakukan prosedur

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				pemeriksaan yang memadai terkait dengan asersi penilaian untuk dapat memperoleh keyakinan atas nilai asset tetap sebesar Rp. 407.589.351.076,79. • Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum mengakui penerimaan kas dari klaim Askes PNS pada Dinas Kesehatan dan Jamkesos masing-masing sebesar Rp. 832.922.700,- dan Rp. 130.963.176,-. Penerimaan tersebut digunakan langsung untuk Kegiatan Askes PNS dan Jamkesos di Puskesmas. • Belanja Barang dan Jasa Tahun 2011 sebesar Rp. 104.745.057.835,52 termasuk Belanja Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp. 11.661.287.271,- yang didalamnya termasuk penyalahgunaan Belanja Perjalanan Dinas Setwan sebesar Rp. 334.891.000,-.
5.	Kabupaten Kulon Progo	2009	Wajar Dengan Pengecualian	• Aset Tetap Neraca Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 200.247.536.000,- tidak dapat diyakini kewajarannya. Aset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal Tahun 2002 belum dinilai dengan SAP. Nilai tersebut berasal dari taksiran pengurus barang pada Tahun 2002 dan tidak didukung dengan kertas kerja penilaian yang menunjukkan metode penilaian yang digunakan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga belum mampu menyajikan saldo dan mutasi asset tetap Tahun 2009 karena prosedur akuntansi asset tetap belum diterapkan sehingga mutasi asset tetap tidak didasarkan pada realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap yang sebenarnya. • Saldo Investai Non

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				Permanen per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 3.983.643.635,- tidak didukung bukti penyetoran angsuran, dan pencatatan yang memadai. Sal;do investasi non permanen merupakan nilai dana penguatan modal yang sampai akhir tahun anggaran 2009 belum dikembalikan oleh penerima dana. Saldo neraca menunjukkan selisih saldo sebesar Rp. 3.983.643.635,- dibandingkan dengan bukti penyetoran angsuran dana penguatan modal.
		2010	Wajar Dengan Pengecualian	• Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 896.600.773.942,16. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 166.794.873.000,- adalah nilai asset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal Tahun 2002 dan belum disajikan sesuai dengan nilai wajar seperti yang disyaratkan dalam SAP. Pencatatan mutasi asset tetap selama Tahun 2010 sebesar Rp. 40.557.727.038,- tidak didasarkan atas realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap sebenarnya, sehingga nilai asset tetap sebesar Rp. 207.352.600.038,- tidak dapat diyakini kewajarannya. • Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2010 menyajikan saldo Investasi Non Permanen sebesar Rp. 8.200.938.442,-, dari nilai tersebut sebesar Rp. 776.955.529,- tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sesuai SAP. • Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2010 menyajikan saldo Persediaan pada RSUD Wates dan Dinas Pendidikan sebesar Rp. 3.228.100.535,46 tidak didukung dengan catatan

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Opini	Keterangan
				akuntansi yang memadai sesuai SAP.
		2011	Wajar Dengan Pengecualian	• Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2011 menyajikan saldo asset tetap sebesar Rp. 973.724.747.410,33. Dari nilai tersebut masih terdapat asset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal yang belum dilakukan penilaian sebesar Rp. 230.680.811.842,00, ketidaksesuaian nilai asset tetap yang disajikan di neraca dengan bukti dukung sebesar Rp. 57.413.643.557,60, asset tetap dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan usulan penghapusan sebesar Rp. 187.636.115,-, asset tetap dengan nilai dibawah Rp. 250.000,- sebanyak 4.355 barang dengan nilai sebesar Rp. 202.985.382,33 dan asset tetap pada Dinas Pendidikan yang belum seluruhnya dicatat. • Pemerintah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2011 menyajikan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp. 8.450.599.293,-. Nilai tersebut masih terdapat pengelolaan penerimaan dari dana kapitasi Askes PNS di luar mekanisme APBD oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 633.136.258,-.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaankeuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dalam APBD DIY yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan DIY dan pembangunan DIY dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2012-2017 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2007-2011, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2012-2017.

3.3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Strategis yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi

administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
   a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
   b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
   a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
   b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
   a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
   b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumberpungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yangmemenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah
2) lntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.

7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.

8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.

9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah tahun 2011, yang meliputi:

1) Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp. 127.500.000.000,00

2) PD Taru Martani sebesar Rp. 3.442.583.363,00

3) PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp. 15.636.000.000,00

4) Badan Usaha Kredit Pedesaan sebesar Rp. 13.586.959.724,00

Di samping ke Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah DIY melakukan investasi pada pihak ketiga, yaitu PT. Bangun Askrida sebesar Rp. 440.000.000,00.

Dari investasi tersebut, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen yang perkembangan dalam 4 (empat) tahun terakhir (2009-2012) dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1) Bank Pembangunan Daerah tahun 2009 sebesar Rp 11.041.000.000,00, tahun 2010 sebesar Rp 23.777.000.000,00, tahun 2011 sebesar Rp 25.642.000.000,00, dan tahun 2012 sebesar Rp 31.761.000.000,00.

2) PD Taru Martani tahun 2009 sebesar Rp 712.430.237,00, tahun 2010 sebesar Rp 590.393.311,00, tahun 2011 sebesar Rp 85.896.812,00, dan tahun 2012 sebesar Rp 83.815.722,00.

3) Badan Usaha Kredit Pedesaan tahun 2009 sebesar Rp 1.598.321.496,00, tahun 2010 sebesar Rp 1.841.299.779,00, tahun 2011 sebesar Rp 2.588.462.211,00, dan tahun 2012 sebesar Rp 3.530.937.292,00.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lainpendapatan yang sah,

2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

3.3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangkaekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadapperkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangkapengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagipeningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalampengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis danterpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi danmisi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yangtelah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaianvisi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporanhingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakanyang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dankeluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapatdinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbukaberdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harusdiadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arahpengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untukdapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatankegiatandi bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah,penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target padasetiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasarkebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untukmeningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur public dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuanyang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkansesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakatmudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasibelanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasikeuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.3.3 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telahditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan danalokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentinganmasyarakat.

a. Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah.

Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD lima tahun mendatang, apabila sumber PAD tersebut menunjukkan peningkatan dalam kualitas dan kuantitas terutama sumber-sumber yang menjadi obyek PAD. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh.

Pada periode tahun anggaran 2013-2017, prediksi anggaran pendapatan berjalan semakin meningkat meskipun peningkatan tersebut tidak relatif besar seiring dengan perubahan kondisi keadaan di masa yang akan datang. Dari sisi prosentase besaran kontribusi prediksi anggaran pendapatan, pada lima tahun ke depan antara PAD dengan Dana Perimbangan mengalami perjalanan yang cukup signifikan, dalam arti proporsi keduanya saling berimbang bahkan prediksi untuk tiga tahun terakhir dalam periode tersebut PAD dirahkan lebih berperan besar dari pada atau dibandingkan dengan Dana Perimbangan.

b. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasianggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapaivisi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dankuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanjaharus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung danBelanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenisbelanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas BelanjaPegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes, Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/Kab/ Kota Dan Pemdes, dan Belanja TidakTerduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atasBelanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

1) Belanja Tidak Langsung

Pada tahun anggaran 2012, sebagaimana tahun 2010 dan 2011,pemerintah menetapkan menaikkan gaji PNS. Tentunya hal ini akanberpengaruh pada APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalamlima tahun ke depan.

Kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut dibiayai oleh sumberpendapatan DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkandapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompokbelanja tidak langsung adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Alokasi belanja hibah danbantuansosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Tujuan alokasi bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Alokasi belanja bantuan keuangan diarahkan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus. Tujuan alokasi bantuan keuangan tersebut adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Mekanisme anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan proposal dari masyarakat ,artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengankebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku.

Selain itu, komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untukmemperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi padameningkatnya belanja bidang pendidikan dan kesehatan yang juga akanberpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung dalam lima tahunke depan.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yangberhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dankegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan denganKebijakan Umum APBD(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS)dan RencanaStrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barangdan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsungini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung.Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium PNS, Honorarium non PNS Uang Lembur, dan Belanja Pegawai BLUD.

Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depandiarahkan pada pencapaian visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta,antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan,kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur untukmempercepat peningkatan akses masyarakat dan mendorongpertumbuhan ekonomiserta diarahkan untukpengurangan kemiskinan. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masingkegiatan juga diperkirakan akan meningkat.

Sementara itu, khususuntuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahunmendatang diprioritaskan untuk membangun

sarana dan prasarana yangmendukung tercapainya visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2.658.370.090.568,50	3.155.760.939.182,27	3.471.309.413.239,15	3.751.626.722.443,57	4.105.179.166.226,87
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	3.224.600.842,28	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	379.241.941.052,56	382.020.096.897,50	585.438.238.232,54	474.922.004.183,27	307.888.437.467,02
	Total penerimaan	3.040.836.632.463,34	3.537.781.036.079,77	4.056.747.651.471,69	4.226.548.726.626,84	4.413.067.603.693,89
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.001.061.965.706,00	1.018.179.163.916,25	1.146.315.706.376,00	1.361.609.365.767,00	1.330.119.503.202,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.039.774.666.757,34	2.519.601.872.163,52	2.910.431.945.095,69	2.864.939.360.859,84	3.082.948.100.491,89

Berdasarkan Tabel diatas selanjutnya dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Daeraj Istimewa Yogyakarta

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.039.774.666.757,34	2.519.601.872.163,52	2.910.431.945.095,69	2.864.939.360.859,84	3.082.948.100.491,89
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	1.387.258.268.488,00	1.802.794.909.546,67	2.129.711.555.039,79	2.066.189.339.491,76	2.312.955.025.713,97
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	454.220.002.290,00	505.007.258.088,00	583.362.087.339,00	659.398.276.748,00	786.242.102.338,00

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	126.438.550.276,00	71.035.573.801,00	87.107.500.000,00	193.550.000.000,00	0,00
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	806.599.715.922,00	1.226.752.077.657,67	1.459.241.967.700,79	1.213.241.062.743,76	1.526.712.923.375,97
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	1.233.174.950.853,34	1.292.849.794.505,85	1.451.189.977.394,90	1.651.698.298.116,08	1.556.235.177.115,92
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	1.530.012.706.032,34	1.663.950.552.723,10	1.839.928.596.431,90	1.966.809.387.135,08	2.100.112.577.979,92
	Dikurangi:					
III. b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	420.403.413.140,00	442.136.332.027,25	475.846.119.037,00	508.661.089.019,00	543.877.400.864,00
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	1.109.609.292.892,34	1.221.814.220.695,85	1.364.082.477.394,90	1.458.148.298.116,08	1.556.235.177.115,92
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	123.565.657.943,00	71.035.573.810,00	87.107.500.000,00	193.550.000.000,00	0,00

Penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai belanja prioritas yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu prioritas I, prioritas II, dan prioritas III.

Prioritas I

Prioritas I berisi program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah dan amanat/kebijakan nasional yang di dalamnya termasuk kewajiban untuk anggaran pendidikan sebesar 20% serta anggaran kesehatan yang secara bertahap dianggarkan sebesar 10%. Selain itu, prioritas I juga berisi belanja yang wajib dan mengikat termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk gaji pegawai di lingkungan Pemda DIY.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Dengan demikian belanja pada prioritas II berisi belanja langsung di semua SKPD dikurangi belanja yang sudah dianggarkan pada prioritas I.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dari tabel 3.16 dapat dijelaskan bahwa setelah belanja digunakan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib, baru digunakan untuk pembiayaan SKPD untuk program non visi misi atau disebut belanja untuk pelayanan SKPD atau belanja SPM. Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas 1 (I-III) digunakan untuk belanja tidak langsung wajib dan prioritas berikutnya. Selanjutnya proporsi untuk belanja masing-masing prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Kerangka Pendaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	Prioritas I	27,65	806.599.715.922,00	35,39	1.226.752.077.657,67	36,76	1.459.241.967.700,79	30,08	1.213.241.062.743,76	34,60	1.526.712.923.375,97
2	Prioritas II	38.04	1.109.609.292.892,34	35.24	1.221.814.220.695,85	34,36	1.364.082.477.394,90	36,16	1.458.148.298.116,00	35,26	1.556.235.177.115,92
3	Prioritas III	34,32	1.001.061.965.706,00	29.37	1.018.179.163.916,25	28,88	1.146.315.706.376,00	33,76	1.361.609.365.767,08	30,14	1.330.119.503.202,00
	Total	100,00	2.917.270.974.520,34	100,00	3.466.745.462.269,77	100,00	3.969.640.151.471,69	100,00	4.032.998.726.626,84	100,00	4.413.067.603.693,89

3.3.4. Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkanserta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Dari prediksi lima tahun ke depan, terlihat bahwa persentase kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu dalam upaya membiayai kegiatan pemerintahan diperlukan langkah-langkah pembiayaan baik dengan sisa lebih, hutang dan sebagainya.

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN	2.658.370.090.568,50	3.155.760.939.182,27	3.471.309.413.239,15	3.751.626.722.443,57	4.105.179.166.226,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.151.006.344.796,50	1.342.290.475.580,27	1.500.246.634.501,15	1.585.522.856.110,01	1.700.736.088.160,89
Pendapatan Pajak Daerah	1.021.820.720.000,00	1.202.117.342.494,00	1.338.445.127.697,00	1.392.125.172.531,00	1.448.549.095.376,00
Pendapatan Retribusi Daerah	35.715.599.098,00	40.682.507.208,00	43.202.767.094,15	45.879.155.752,34	48.721.345.277.,72
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.411.499.191,50	48.063.944.818,32	58.271.832.110,00	76.751.064.215,00	120.450.719.256,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.058.526.507,00	51.426.681.059,95	60.326.907.600,00	70.767.463.611.,67	83.014.928.251,17
DANA PERIMBANGAN	964.396.534.022,00	1.046.227.488.649,00	1.046.869.045.263,00	1.052.491.796.453,36	1.062.226.827.212,84
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	101.565.866.022,00	109.172.328.649,00	87.240.283.263,00	69.714.250.103,41	55.709.088.573,56
Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	920.544.722.000,00	941.638.414.954,31	963.215.456.378,09
Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	37.131.610.000.00	39.084.040.000,00	41.139.131.395,64	43.302.282.261,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	542.967.211.750,00	767.242.974.953,00	924.193.733.475,00	1.113.612.069.880,20	1.342.216.250.853,14
Pendapatan Hibah	8.815.476.250,00	8.969.411.400,00	9.015.333.475,00	9.061.490.664,31	9.107.884.171,68
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	534.151.735.500,00	758.273.563.553,00	915.178.400.000,00	1.104.550.579.215,89	1.333.108.366.681,46

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
BELANJA	2.917.270.974.520,34	3.466.745.462.269,77	3.969.640.151.471,69	4.032.998.726.626,84	4.413.067.603.693,89
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.530.012.706.032,34	1.663.950.552.723,10	1.839.928.596.431,90	1.966.809.387.135,08	2.100.112.577.979,92
Belanja Pegawai	502.167.592.140,00	523.308.261.027,25	564.250.919.037,00	609.825.089.019,00	645.041.400.864,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	500.494.194.950,00	492.157.257.993,00	579.125.390.975,00	625.891.280.144,00	684.875.131.153,00
Belanja Bansos	23.062.809.309,34	14.631.602.000,00	9.134.490.000,00	9.872.123.945,00	10.802.470.647,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	376.702.290.858,57	472.309.827.352,47	530.003.343.479,90	551.902.338.667,08	575.060.875.757,92
Bantuan Keuangan	124.994.680.362,00	130.851.204.562,00	147.414.452.940,00	159.318.555.360,00	174.332.699.558,00
Belanja Tidak Terduga	2.591.138.412,43	30.692.399.788,38	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	1.387.258.268.488,00	1.802.794.909.546,67	2.129.711.555.039,79	2.066.189.339.491,76	2.312.955.025.713,97
Belanja Pegawai	133.582.631.582,00	98.077.340.603,00	160.814.243.601,48	148.041.783.949,18	168.617.952.017,40
Belanja Barang dan Jasa	637.163.846.287,00	749.287.053.734,67	964.885.461.608,87	888.250.703.695,06	1.011.707.712.428,38
Belanja Modal	385.119.137.119,00	431.555.796.209,00	482.442.730.804,44	444.125.351.847,53	505.853.856.214,19
Dana Keistimewaan	231.392.653.500,00	523.874.719.000,00	521.569.119.025,00	585.771.500.000,00	626.775.505.000,00
DEFISIT	(258.900.883.951,84)	(310.984.523.087,50)	(498.330.738.232,54)	(281.372.004.183,27)	(307.888.437.467,02)

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
	(5,62)		(2,00)	(0,20)	(0,02)
PEMBIAYAAN	258.900.883.951,84	310.984.523.087,50	498.330.738.232,54	281.372.004.183,27	307.888.437.467,02
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	385.339.434.227,84	382.020.096.897,50	585.438.238.232,54	474.922.004.183,27	307.888.437.467,02
SILPA	379.241.941.052,56	382.020.096.897,50	585.438.238.232,54	474.922.004.183,27	307.888.437.467,02
Pencairan Dana Cadangan	3.224.600.842,28	-	-	-	-
Hasil Penjualan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.506.301.320,00	-	-		
Penerimaan dari Penyusutan	366.591.013,00	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	126.438.550.276,00	71.035.573.810,00	87.107.500.000,00	193.550.000.000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	126.438.550.276,00	71.035.573.810,00	87.107.500.000,00	193.550.000.000,00	0,00
Pembayaran Hutang	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
DPAL	-	-	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas khusus pada angka penyertaan modal pada Tahun 2013 terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu penyertaan modal Pemda untuk BUMD sebesar Rp 100.113.950.276,- dan dana bergulir sebesar Rp 26.324.600.000,-, sedangkan untuk BUMD pada Tahun 2014 terdiri dari penyertaan modal Pemda untuk BUMD sebesar Rp 50.950.000.000,- dan Dana Bergulir sebesar Rp 20.085.573.810,-.

3.3.4 Rencana Pengembangan BUMD

1. Bank Pembangunan Daerah

Perkembangan PD. Bank BPD DIY selama 5 tahun terakhir (2008-2012) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikat dimana pertumbuhan asset rata-rata per tahun sebesar 20,74 % dan pertumbuhan laba bersih rata-rata per tahun sebesar 13,86 % sehingga PAD dari tahun ke tahun juga meningkat. Pada tahun 2012 telah disahkan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana pengembangan PT. Bank BPD DIY 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 melaksanakan perubahan bentuk badan hukum BPD DIY dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan merubah modal dasar dari Rp. 250.000.000.000,- menjadi Rp. 1 triliun serta melakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 56.000.000.000,-.
- Pada tahun 2014 dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000,-.
- Pada tahun 2015 dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 82.950.000.000,-.
- Pada tahun 2016 dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 193.550.000.000,-.
- Pada tahun 2017, PT. Bank BPD DIY dapat beroperasi sebagai Bank Devisa.

Proyeksi 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Proyeksi Pengembangan PT. Bank BPD DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Modal Pemda DIY	Laba setelah pajak	Dividen
2013	183.500.000.000	128.334.354.563	31.761.609.095
2014	233.500.000.000	138.893.111.016	43.220.540.695
2015	316.450.000.000	152.782.422.117	52.410.999.950
2016	510.000.000.000	168.060.664.329	68.036.750.000
2017	510.000.000.000	205.329.809.660	107.559.000.000

Keterangan :

Dividen disetorkan pada tahun berikutnya sebagai PAD.

2. PT. Taru Martani

Perkembangan PD. Taru Martani selama 5 tahun terakhir (2008-2012), menunjukkan adanya penurunan antara lain total asset mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 5,50%, penjualan mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 8,50% dan perolehan laba mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 19,76 %. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan eksternal antara lain tekanan pasar dan ruang gerak usaha semakin dibatasi yaitu dengan adanya regulasi larangan merokok di tempat umum, fluktuasi ekonomi, regulasi bea dan cukai yang memberatkan produsen rokok, dan daya beli konsumen (lokal) semakin lemah serta permasalahan internal yang antara lain mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi ketersediaan bahan baku untuk 1 tahun dan membayar pesangon

karyawan yang cukup besar mengingat sebagian besar karyawan masuk usia pensiun. Pada tanggal 17 Desember 2012 telah didirikan PT. Taru Martani dengan Akta Notaris Achmad Zubaidy, SH, S.Pd Nomor 05, dengan modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- modal disetor pada saat pendirian sebesar Rp. 12.500.000,- yang telah disetor penuh oleh PD. Taru Martani sebesar Rp. 12.000.000,- dan Koperasi Bhakti Martani sebesar Rp.500.000,- dan Akta Pendirian PT. Taru Martani telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor : AHU-06889.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 dan diberi waktu 6 bulan untuk melakukan pembesaran modal.

Rencana pengembangan PT. Taru Martani 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 dilakukan perubahan modal dasar PT. Taru Martani menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penyertaan modal sebesar Rp.12.000.000.000,-
- Pada tahun 2014 dilakukan pengalihan dan penempatan seluruh aktiva, kewajiban dan modal PD. Taru Martani termasuk sumbangan/hibah sebesar tambahan Rp. 400.000.000,- pada PT. Taru Martani, sehingga modal Pemerintah Daerah DIY pada PT. Taru Martani menjadi sebesar Rp.15.842.500.000,-
- Pada tahun 2015 dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp.4.157.500.000,-.
- Pada tahun 2014-2017 dilakukan penguatan exixting bisnis tembakau olahan dan diversifikasi usaha di luar bisnis utama (*core business)* dengan memanfaatkan lahan atau aset tetap yang tersedia.

Proyeksi 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Proyeksi Pengembangan PT. Taru Martani Tahun 2013-2017

Tahun	Modal Pemda DIY	Laba setelah pajak	Dividen
2013	15.442.500.000	120.082.293	86.302.400
2014	15.842.500.000	160.727.273	88.400.000
2015	20.000.000.000	708.758.435	389.817.139
2016	20.000.000.000	2.044.909.091	1.124.700.000
2017	20.000.000.000	2.674.545.455	1.471.000.000

Keterangan :

Dividen disetorkan pada tahun berikutnya sebagai PAD.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Perkembangan PT. Anindya Mitra Internasional selama 5 tahun terakhir (2008- 2012), menunjukkan adanya penurunan asset, penurunan pendapatan dan selama 3 tahun terakhir (2010-2012) belum mampu membukukan laba. Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Anindya Mitra Internasional yang berupa 20 bus dengan nilai Rp. 4.808.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp.700.910.000,-.

Rencana pengembangan PT. Anindya Mitra Internasional 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 Pemda DIY melakukan penyertaan modal pada PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp.700.910.000,- melalui APBD-Perubahan dan dilakukan penataan manajemen.

- Manajemen baru diminta menyusun strategic blue print PT. Anindya Mitra Internasional 2013 – 2017.
- Pada tahun 2014 – 2017 dilakukan :
  a. Penguatan existing bisnis, yaitu upgrading bisnis Kawasan Wisata Kaliurang, Kawasan Kridosono dan Sagan Resto serta revitalisasi unit percetakan, unit pertambangan dan unit realty.
  b. Pengembangan existing bisnis, yaitu pemasaran Solar Cell, pengelolaan bus Transjogja, pengelolaan bus Pariwisata, pengelolaan persewaan mobil dan kendaraan proyek, pengelolaan pariwisata di DIY, joint operation pengelolaan hotel dan pengelolaan aset.
  c. Dalam rangka pengembangan existing bisnis tersebut dimungkinkan dilakukan tambahan penyertaan modal dengan peraturan daerah tersendiri.
- Proyeksi 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Proyeksi Pengembangan PT. AMI Tahun 2013-2017

Tahun	Modal Pemda DIY	Laba	Dividen
2013	20.444.000.000	-	500.000.000
2014	20.444.000.000	1.279.487.765	164.474.866
2015	20.444.000.000	1.599.359.842	703.718.271
2016	20.444.000.000	2.319.071.771	879.647.913
2017	20.444.000.000	2.898.839.714	1.432.870.913

Keterangan :

Dividen disetorkan pada tahun berikutnya sebagai PAD.

4. PT. PPKD

Lembaga PPKD akan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012.

Perencanaan PT. PPKD 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 persiapan pembentukan PT. PPKD, yaitu mencari partner, penjaringan calon Direksi dan calon Komisaris, penyusunan draft Anggaran Dasar, dan disiapkan anggaran penyertaan modal pemda DIY sebesar Rp.25.000.000.000,-. Penyertaan modal tersebut dapat direalisasikan apabila telah mendapatkan partner sebagai pendiri PT. PPKD.
- Pada tahun 2014-2017 dilakukan sosialisasi dan tindak lanjut apabila mendapatkan partner sebagai pendiri PT.PPKD, serta pemenuhan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

5. BUKP

Perkembangan BUKP selama 5 tahun terakhir (2008-2012), menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dimana pertumbuhan asset rata-rata pertahun sebesar 29 %, pertumbuhan modal disetor rata-rata per tahun sebesar 6,12 %, pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat rata-rata per tahun sebesar 39,14 %, pertumbuhan kredit yang diberikan rata-rata per tahun sebesar 20,92 % dan pertumbuhan laba rata-rata per tahun sebesar 21,60 %.

Pada tahun 2012 dari 75 BUKP masih terdapat 5 BUKP yang menderita rugi yaitu :

a. BUKP Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, rugi sebesar Rp. 30.325.926,-
b. BUKP Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, rugi sebesar Rp. 68.775.482,-
c. BUKP Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, rugi sebesar Rp. 48.888.581,-
d. BUKP Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, rugi sebesar Rp. 20.734.522,-
e. BUKP Kec. Sleman, Kab. Sleman, rugi sebesar Rp. 2.925.190,-

Rencana pengembangan BUKP 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2013 dilakukan penyehatan BUKP yang menderita rugi dengan pembenahan manajemen dan tambahan penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp. 6.413.040.276,-;
- Mulai tahun 2015, sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 BUKP diarahkan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah, menghindarkan dari pelepas uang/pengijon dan rentenirpada masyarakat pedesaan, menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, dan memberikan pelayanan dengan menyediakan modal yang diarahkan pada peningkatan ekonomi produktif.

Proyeksi 5 tahun kedepan (2013-2017) adalah, sebagai berikut :

Tabel 3.23 Proyeksi Pengembangan BUKP Tahun 2013-2017

Tahun	Modal Pemda DIY	Laba	Dividen
2013	20.000.000.000	8.144.432.852	3.179.755.158
2014	20.000.000.000	9.426.713.216	3.968.646.264
2015	20.000.000.000	10.009.284.093	4.213.908.603
2016	20.000.000.000	10.865.387.541	4.574.328.155
2017	20.000.000.000	11.759.718.847	4.950.841.635

Keterangan :

Dividen disetorkan pada tahun berikutnya sebagai PAD.

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

a. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama.
b. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun.
c. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi, sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut.
d. Pencemaran air tanah meningkat yang menyebabkan air tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi.
e. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunungapi, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, tsunami, serta kekeringan menjadi tantangan dimasa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan.
f. Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisan lahan.
g. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
h. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak.
i. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3.
j. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.

4.1.2 Kependudukan dan Demografi

a. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
b. Terjadi ketimpangan penyebaran penduduk karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota khususnya kelompok usia muda produktif, dan lebih terdidik sehingga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumber daya potensial untuk pembangunan wilayah, bahkan beberapa wilayah perdesaan mengalami pertumbuhan penduduk yang berkurang (*depopulasi*);
c. Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali ke daerahnya sesudah menamatkan pendidikan;
d. Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.

4.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a. Investasi, Industri, dan Perdagangan
   1) Investasi
      a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
      b) Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
      c) Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan yang belum siap;
      d) Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
      e) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang.
      f) Tingginya ketimpangan investasi antara kabupaten/kota
   2) Industri
      a) Daya saing produk UMKM belum kuat;
      b) Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong impor;
      c) Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
      d) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
      e) Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
   3) Perdagangan
      a) Akses pasar masih rendah;
      b) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
      c) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
      d) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
      e) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
      f) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

b. Ketahanan Pangan
   1) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
   2) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
   3) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
   4) Masih adanya daerah rawan pangan;
   5) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah.

c. Pertanian
   1) Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
   2) Agribisnis pertanianyang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
   3) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
   4) Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.

d. Perikanan dan Kelautan
   1) Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat;
   2) Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
   3) SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai;
   4) Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
   5) Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
   6) Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

e. Kehutanan
   1) Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal;
   2) Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan;
   3) Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal;
   4) Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal.

f. Pariwisata
   1) Rendahnya lama tinggal wisatawan;
   2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
   3) Daya saing kelembangaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
   4) Suasana kondusif masih sering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan;
   5) Kualitas pelayanan wisata belum standar;
   6) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata;
   7) Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
   8) Stagnasi pengembangan produk pariwisata karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
   9) Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata;
   10) Tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain.

g. Koperasi dan UMKM
   1) Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
   2) Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
   3) Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
   4) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;
   5) Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.

h. Energi dan Sumberdaya Mineral
   1) Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui upaya penciptaan energi baru yang terbarukan, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga biogas belum maksimal;
   2) Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi belum berjalan efektif;
   3) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.

4.1.4 Sosial dan Budaya

a. Sosial
   1) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
   2) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
   3) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
   4) PemberdayaanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;
   5) Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.

b. Kesehatan
   1) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis diwilayah pedesaan belum merata;
   2) Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
   3) Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
   4) Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
   5) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Yogyakarta belum optimal.

c. Pendidikan
   1) Pendidikan cenderung mekanistis;
   2) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
   3) Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal;
   4) Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
   5) Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
   6) Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
   7) Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
   8) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;

9) Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
10) Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai.

d. Kebudayaan
1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
2) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
3) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
4) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia;
5) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
6) Kebudayaan lokal belum menjadi *way of life* bagi masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, kesejarahan;
7) Belum optimalnya upaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dari rennaisans Yogyakarta;
8) Sarana dan prasarana serta manajemen museum yang belum memadai.

e. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja
1) Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;
2) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
4) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
5) Masih terjadinya *trafficking* (perdagangan) perempuan dan anak, dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
1) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;
2) Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal;

3) Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stakeholders masih kurang;
4) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang;
5) Penanggulangan kejahatan teknologi informasi/*cyber crime* masih lemah.

g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1) Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
2) Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
3) Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
4) Lemahnya perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
5) Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal.

h. Agama
1) Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama.

4.1.5 Pemerintahan dan Politik

a. Pemerintahan dan Politik
1) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) belum optimal;
3) Belum optimalnya implementasi *Good Governance*.

b. Hukum
1) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
2) Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
3) Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
4) Penegakan supremasi hukum masih lemah.

c. Kerjasama
1) Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
2) Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
3) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

4.1.6 Prasarana Wilayah

a. Transportasi
1) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitandan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;

2) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpaduyang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
3) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
4) Tingginya polusi udara akibat rendahnya pengendalian lalu lintas jalan di perkotaan.

b. Sumber Daya Air
1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
2) Lemahnya kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan;
3) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
4) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan;
5) Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air.

c. Keciptakaryaan
1) Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
2) Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;
3) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan;
4) Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
5) Belum tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya;
6) Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta;
7) Belum optimalnya layanan jasa konstruksi.

d. Energi dan Sumberdaya Mineral
1) Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui penyediaan energi baru terperbarukan masih belum maksimal;
2) Penyelenggaraan konservasi air tanah belum menjadi prioritas utama sehingga pengelolaan air tanah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perlu ditingkatkan.
3) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.

e. Tata Ruang
1) Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
2) Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah;
3) Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial;
4) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
5) Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;

f. Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
   1) Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi DGS;
   2) Belum optimalnya layanan unggulan DGS;
   3) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan baik, diharapkan Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat mempertahankan bahkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan salah satunya dijawab melalui pengembangan berbagai sistem informasi pembangunan. Adapun sistem informasi pembangunan yang telah berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD/*Jogja Plan*), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR/*Jogja Window*) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (*Web Monev*) sehingga diharapkan semua informasi pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh *stakeholder*. Namun demikian upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan pembangunan. Kesenjangan antara nilai-nilai filosofi dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat masih cukup tinggi, sehingga perlu segera disikapi, diantisipasi agarkesenjangannya tidak semakin lebar.

Gambar dibawah menunjukkan skema besar tentang *Renaisans* Yogyakarta yang digagas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

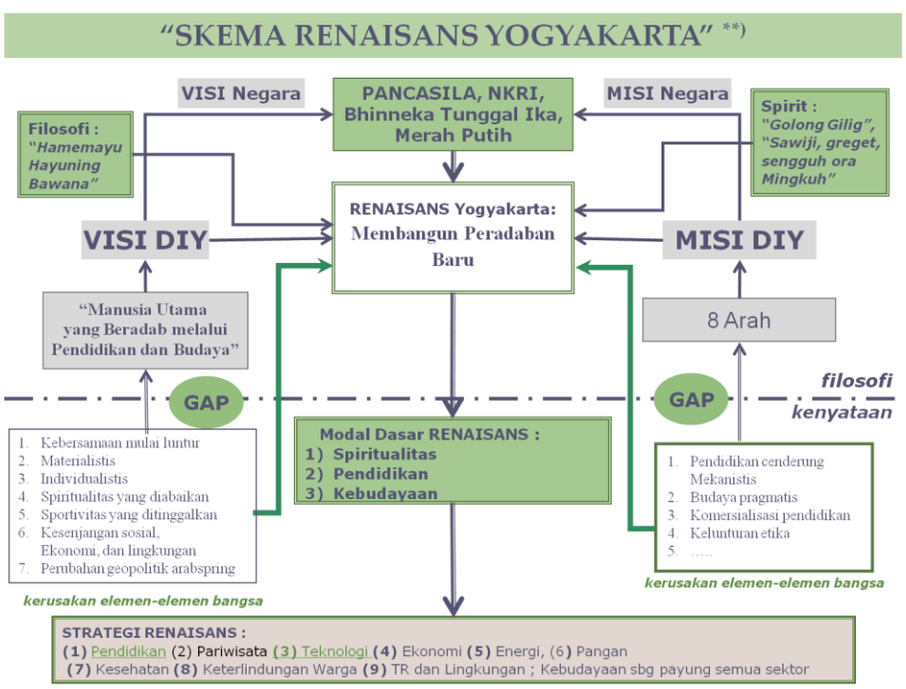

Gambar 4.1 Skema Renaisans Yogyakarta

Visi Gubernur merupakan pernyataan cita-cita luhur yang mengedepankan basis budaya dalam pembangunan DIY. Basis budaya unggul masa lalu yang kuat, tetapi tetap eksis dan lestari melalui internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan memperkokoh identitas dan karakter Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan sampai saat ini, menjadi modal dasar untuk membangun Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berkembang menuju masyarakat sejahtera. Harmonisasi hubungan antar warga masyarakat, dan dengan lingkungannya dibangun dengan terus memupuk tata nilai budaya unggul, serta terus membangun kreativitas dan inovasi agar mampu berkompetisi di tengah era globalisasi.

Isu Strategis DIY

1. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Gelombang arus globalisasi membawa implikasi hadirnya budaya konsumtif dimasyarakat, yang menjadikan adanya perilaku yang cenderung mengutamakan segala sesuatu harus instan atau budaya pragmatis, tanpa mau untuk menapaki segala proses yang ada. Kebudayaan lokal tergerus dengan hadirnya budaya pasar yang dipandang lebih modernis mulai dari perilaku individu, hubungan sosial dan nilai-nilai kehidupan dimasyarakat (kebersamaan mulai luntur, materialis, individualistis, spiritualitas yang diabaikan, sportivitas yang ditinggalkan, kesenjangan sosial). Kebudayaan di Daerah Istimewa mempunyai tantangan yang cukup besar untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal seiring dengan perkembangan pembangunan. Kebudayaan menjadi salah satu aset pembangunan di DIY yang melingkupi keseluruhan aspek dan sektor pembangunan daerah, sehingga kedudukannya menjadi prasyarat pembangunan yang tidak terpisahkan.

2. Pemerataan dan perluasan pendidikan. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2011 dimana angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,20 tahun sedangkan masih terdapat tiga kabupaten yang capaiannya dibawah DIY antara lain Kulon Progo (8,37); Bantul (8,92) dan Gunungkidul (7.70).

   Berkenaan dengan partisipasi pendidikan di jenjang SD sederajat APM DIY tahun 2012/2013 adalah sebesar 97,54 persen sedangkan masih terdapat tiga kabupaten yang nilainya lebih rendah yaitu kabupaten Bantul (92,54 persen); Gunungkidul (88,45 persen) dan Kulon Progo (90,92 persen). Tingkat pendidikan menengah dimana APM DIY pada tahun 2012/2013 adalah sebesar 81,13 persen, dimana masih terdapat dua kabupaten yang nilainya dibawah capaian tersebut, yaitu Kabupaten Bantul 75,78 persen dan Kabupaten Gunungkidul 71,47 persen. Tingkat pendidikan atas terdapat dua kabupaten yang capaiannya dibawah kabupaten lain dan DIY yang mencapai 63,65 persen, yaitu kabupaten Sleman sebesar 55,06 persen dan Gunungkidul dengan 51,99 persen.

3. Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat, diantaranya adalah:

   a. Masih tingginya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta masih diatas rata-rata nasional, dimana tahun 2010 sebesar 13,33 persen; tahun 2011 sebesar 12,36 persen dan 2012 adalah 11,96 persen, sedangkan tingkat kemiskinan DIY tahun 2010 adalah 16,83 persen; tahun 2011 sebesar 16,08 persen dan Tahun 2012 adalah 16,05 persen berdasarkan sumber data BPS DIY tahun 2012.

   b. Pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang belum merata. Pelayanan kesehatan balita pada tahun 2011 kondisi rasio posyandu per satuan balita di DIY sebesar 27,44, berdasarkan angka tersebut terdapat tiga wilayah yang mempunyai rasio dibawahnya,

yaitu Kota Yogyakarta (29,07); Kabupaten Kulon Progo (34,14) dan Kabupaten Gunungkidul (33,55). Pelayanan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat masih terdapat dua kabupaten yang rasionya dibawah DIY (3,47 per 100.000 penduduk atau 1:28.149 penduduk) dan standar nasional (1:30.000 penduduk) yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Tabel 4.1 Rasio Puskesmas Berdasarkan per 100.000 Penduduk dan Rasio Nasional per 30.000

Kabupaten-Kota	Rasio per 100.000 pend	Rasio Nasional 1: 30.000
Kota Yogyakarta	4,61	21.692
Kab Bantul	2,93	34.130
Kab Kulon Progo	5,38	18.587
Kab Gunungkidul	4,42	22.624
Kab Sleman	2,26	44.248
DIY	3,47	28.818

Sumber: Bappeda DIY dan Dinkes DIY, 2011

Ketersediaan rumah sakit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk terdapat dua kabupaten yang rasio antara jumlah penduduk dan jumlah rumah sakit nilainya cukup besar apabila dibandingkan dengan DIY, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.2 Rasio Jumlah Rumah Sakit dengan Jumlah Penduduk Tahun 2011

KAB-KOT	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH SAKIT	RASIO
Kab. Bantul	921.263	11	83.751
Kab. Sleman	1.107.304	26	42.589
Kab. Gunung Kidul	677.998	3	225.999
Kab. Kulon Progo	390.207	8	48.776
Kota Yogyakarta	390.553	18	21.697
DIY	3.487.325	66	52.838

Sumber: Bappeda DIY dan Dinkes DIY, 2011

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di DIY pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 secara umum, yaitu dari 78,46 persen menjadi 70,44 persen. Dua kabupaten yang memiliki cakupan paling kecil pada tahun 2011 Kabupaten Gunungkidul dengan 68,11 persen dan Kabupaten Sleman sebesar 44.14 persen.

2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Jawa, Jawa-Bali dan nasional. Pertumbuhan ekonomi DIY masih dibawah rata-rata. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa tahun 2009 sebesar 4,81 persen; tahun 2010 sebesar 6,33 persen dan tahun 2011 sebesar 6,64 persen. Kawasan Jawa-Bali mempunyai pertumbuhan rata-rata ditahun 2009 sebesar 4,82 persen; tahun 2010 sebesar 6,33 persen dan tahun 2011 adalah sebesar 6,64 persen. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi DIY (2011) pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2009 sebesar 4,43 persen, tahun 2010 sebesar 4,88 persen dan pada tahun 2011 adalah 5,16 persen.
3. Peningkatan daya saing pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata dan mempunyai harapan besar pada sektor ini. DIY mempunyai tantangan untuk terus mengembangkan kepariwisataan baik itu kunjungan wisatawan, pengembangan serta inovasi obyek wisata dan termasuk MICE *(Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)*. Tantangan pada jumlah wisatawan baik itu wisatawan

nusantara dan wisatawan mancanegara secara jumlah bertambah namun secara pertumbuhan mengalami trend yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun khususnya pada periode tahun 2009-2010 dan mulai naik pada tahun 2011. Lama tinggal wisatawan masih dapat dikatakan relatif singkat trend lama tinggal untuk wisatawan mancanegara tahun 2008-2011 mencapai 1,8 sampai 1,88 hari untuk hotel melati sedangkan hotel bintang 1,91-2,02 hari. Wisatawan nusantara yang menginap di hotel melati (1,74-1,8 hari) dan hotel bintang (1,63-1,71).

4. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.

   Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY pada kurun waktu 2009 mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2010 mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas dan tahun 2011 mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WTP)dengan paragraf penjelas. Berkenaan dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai B.

5. Peningkatan infrastruktur dan tataruang. Pengaturan tata ruang harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan tata ruang khususnya untuk kawasan strategis. Kebutuhan dokumen tata ruang di DIY dibutuhkan sebanyak 23 dokumen ketersediannya baru tercukupi 9 dokumen.

   Luas lahan produktif di DIY selama kurun waktu 2008-2011 mengalami fluktuatif, dimana selama tahun 2008-2010 mengalami kenaikan dari 5.695, 10 Ha menjadi 6.343,50 Ha. Kemudian 2010-2012 mengalami penurunan menjadi 5.600,70 Ha hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang kemanfaatannya.

   Infrastruktur jalan raya di DIY pada tahun 2012 mempunyai kondisi mantap sebagai berikut: jalan nasional sebesar 99,06 persen, jalan provinsi 71,09 persen, jalan kota yogyakarta 82,09 persen, kabupaten bantul 75,74 persen, jalan kabupaten Kulonprogo 86,28 persen, Jalan kabupaten Gunungkidul 71,15 persen dan jalan kabupaten Sleman 71,34 persen.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Kebudayaan dan Filosofi Pembangunan

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Budaya luhur DIY telah diwujudkan dalam karya bendawi (*tangible,* antara lain berupa warisan budaya, cagar budaya, dan saujana budaya) dan bukan bendawi (*intangible*, antara lain nilai-nilai, adat istiadat, tradisi, upacara, dan seni pertunjukan).

Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja*. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Enam nilai dasar budaya (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* bermakna sangat luas, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang *tangible* dan *intangible* serta sebagai *bawana alit* dan *bawana ageng*. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi rujukan hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Konsep *Sangkan Paraning Dumadi* berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (*sangkan paraning dumadi*). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulih mula mulanira*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé*; makro kosmos), termasuk manusia (*jagad cilik*; mikro kosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (*owah gingsir ing kanyatan*, *mobah mosiking kahanan*), bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (*urip iku bebasan mung mampir ngombé*), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati

(*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentraman.

Konsep ini menjadi inspirasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* yang berdimensi vertikal dan horizontal. Manunggaling Kawula Gusti dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai piwulang simbol ketataruangan. *Manunggaling Kawula Gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna *Manunggaling Kawula Gusti* adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Konsep Tahta Untuk Rakyat (TUR) dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula Gusti* (MKG), karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat.Sri Sultan HB X meneguhkan tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tekad ini melanjutkan tekad ayah beliau, Sultan HB IX, Tahta Untuk Rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana *Hamangku, Hamengku, Hamengkoni.* Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis *Manunggaling Kawula Gusti.*Keberadaan Kraton karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa Revolusi dulu.

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penjajahan.Konsep ini melambangkan menyatunya *cipta*, *rasa* dan *karsa* yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *manunggaling Kawula-Gusti*.

Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. *Sengguh*, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora*

Mingkuh, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. *Catur Gatra Tunggal* yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga. Lebih ekstrimnya lagi apabila empat elemen ini ditiadakan atau tertiadakan maka Yogyakarta akan tertiadakan juga secara fisik.

Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi–Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema *perennial* (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi *humanism metaphoric* di atasnya. Keberadaan sumbu imaginer dari Gunung Merapi–Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana, sejauh mata memandang).

Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang didalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan.Secara spasial, *Pathok Negara* telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Masjid Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru pinggiran kota Yogyakarta berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan Masjid-masjid Pathok Negara tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid PathokNegara tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Secara filosofis, konsepsual dan substansial *Hamemayu Hayuning Bawana* terbukti sangat mirip dengan konsep *sustainable development, sustainable human development,* dan *empowerment*. Demikian juga halnya dengan konsep Takhta Untuk Rakyat dan *Manunggaling Kawulo Gusti* sangat dekat dan mirip dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep *Pathok Nagara* memiliki pesan yang mirip dengan konsep *green belt* dalam pembangunan kota moderen. Konsep *Catur Gatra Tunggal* dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai

saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep *Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, mirip dengan spirit atau semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

Salah satu kegagalan masa lalu dalam mewujudkan cita-cita pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah karena mengabaikan pembangunan kebudayaan. Menafikan kebudayaan dalam pembangunan selama puluhan tahun telah menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan di negeri ini termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian di dalamnya. Kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan mendzalimi satu sama lain dalam berbangsa dan bernegara adalah puncak dari tidak terbangunnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pembangunan kebudayaan dalam proses pembangunan tampak makin surut. Kegamangan budaya ini telah membuat bangsa kita terombang-ambing dalam berbagai produk gaya hidup material kapitalistik yang cenderung makin menghilangkan identitas keindonesiaan dalam berbangsa. Akibat dari itu, bangsa yang sebelumnya memiliki rasa sosial yang tinggi, penuh kegotongroyongan, kini menjadi bangsa yang cenderung mencari selamat sendiri-sendiri.

Sebagian besar dari kita masih berfikir membangun kebudayaan hanya cukup dengan memperbanyak event kesenian dan festival-festival tradisi dengan alasan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan cara itu seakan-akan kita sangat peduli terhadap pembangunan kebudayaan. Padahal membangun kebudayaan tidak hanya sebatas memperbanyak event kesenian, upacara adat dan festival-festival tradisi demi untuk kepentingan pariwisata semata. Membangun kebudayaan adalah membangun semua totalitas aktifitas kehidupan manusia yang berlaku dalam suatu ruang dan suatu waktu.

Membangun kebudayaan adalah membangun moral, membangun perilaku, dan akhlak bangsa untuk mematuhi aturan-aturan negara, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Membangun kebudayaan tidak hanya diterjemahkan pada upaya pelestarian wayang atau dengan memperbanyak upacara tradisi semata. Membangun kebudayaan juga ada hubungannya dengan pembangunan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua sektor itu harus dibangun dengan landasan budaya kuat. Pembangunan ekonomi yang tidak berakar pada budaya moral yang baik tidak akan membawa keberhasilan bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan keadilan (hukum) yang tidak dilandasi moral dan etika yang bagus akan menciptakan mafia hukum yang dapat memperjualbelikan keadilan itu sendiri.

Demikian pula membangun pendidikan, jika sistem pendidikan tidak diubah dari paradigma budaya pendidikan hafalan menjadi budaya pendidikan yang berwawasan bagi anak didik, maka pendidikan yang kita kembangkan saat ini tak ubah seperti melatih binatang untuk pintar dalam sebuah arena sirkus, yang harus selalu patuh pada pawangnya. Artinya, Kita mendidik anak bangsa hanya untuk trampil dalam arena perebutan peluang kerja tanpa wawasan dan penguasaan ilmu secara kritis.

Selama peran budaya masih dianggap tidak penting dalam membangun bangsa, selama itu pula bangsa ini akan sangat sulit untuk bangkit dan bergerak maju. Apalagi untuk melompat mensejajarkan diri dengan kemajuan bangsa-bangsa lain. Tak usah jauh, selama ini mungkin kita bertanya-tanya mengapa negara jiran Malaysia begitu cepat bangkit dari ketertinggalannya. Padahal di era 1990-an Malaysia masih harus belajar banyak pada Indonesia dalam segala bidang pembangunan. Utamanya pendidikan, hal ini terlihat pada era 1980-an hingga pertengahan 1990-an

tidak sedikit putra-putri Malaysia yang belajar di berbagai Perguruan Tinggi Indonesia. Rupanya saat itu Malaysia sudah mulai banting stir mengalihkan strategi pembangunan negaranya dengan memanfaatkan peran budaya sebagai landasan gerakan pembangunannya.

Hebatnya, strategi budaya pembangunan yang digerakkan Mahatir Muhammad dalam membangun Malaysia yang dikenal dengan "Visi Malaysia 2010", ternyata jauh sebelum memasuki 2010, visi pembangunan Malaysia yang dicita-citakan Mahatir Muhammad untuk memajukan dan memakmurkan negaranya telah lebih dulu tercapai dari yang ditargetkan. Ini berarti peran budaya dalam mengerakkan pembangunan bangsa adalah suatu yang tidak bisa dinafikan oleh pemerintah.

Pembangunan dengan memanfaatkan peran budaya dalam membentuk kemajuan manusia saat ini, telah menjadi tren pembangunan yang dipraktekkan oleh banyak negara di dunia, terutama oleh negera-negara yang pernah rusak akibat Perang Dunia II. Penuntasan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan yang melanda negara-negara yang terpuruk akibat Perang Dunia II, seperti sebagian negara-negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia, dalam waktu yang tidak terlalu lama ketika mengalihkan perhatian pembangunan negaranya dengan memanfaatkan peran budaya ternyata mereka berhasil bangkit menjadi negara yang maju dan makmur.

Spanyol, Portugis, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong, serta Malaysia, adalah negara-negara yang dicontohkan Lawrence E. Harrisong (2006) sebagai negara yang berhasil bangkit secara mengejutkan setelah Jepang, karena memanfaatkan peran budaya dalam menuntaskan persoalan negeranya mulai dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan penegakan demokrasi, semua itu berhasil tuntaskan dengan memanfaatkan peran budaya dalam mereka membangun negaranya.

Konsep peran budaya dalam membangun bangsa sebagaimana yang menjadi strategi pembangunan negara-negara yang berhasil bangkit di dunia dari ketertinggalannya saat ini sebenarnya telah diperkenalkan pakar ilmuwan sosial Soedjatmoko pada bangsa Indonesia sejak akhir 1950-an. Sejak itu Seodjatmoko hingga akhir hayatnya (1922-1989) tak henti menyuarakan pentingnya peran kebudayaan dalam membangun negara-bangsa Indonesia. Setidaknya, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Indonasia menurut Soedjatmoko harus seimbang antara pembangunan fisik material dengan pembangunan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Hal ini penting dilakukan untuk tercapainya tujuan dan cita-cita pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Sayangnya, konsep membangun Indonesia yang disuarakan Soedjatmoko ini menjadi berseberangan dengan konsep politik pembangunan pemerintah Orde Baru kala itu. Akibatnya, dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia, hingga hari ini hampir tak henti bangsa kita berhadapan dengan berbagai persoalan sosial kemanusian sebagai dampak dari kesalahan pembangunan yang tidak mengikutsertakan peran kebudayaan di dalamnya. Saat ini orang-orang yang menyuarakan pentingnya peran kebudayaan dan pembangunan bangsa hampir tak terdengar lagi di negeri ini. Dulu selain Soedjatmoko, ada Sutan Takdir Alisyahbana (baca polemik kebudayaan), ada Koentjaraningrat, Muchtar Lubis, Umar Kayam, dan YB. Mangunwijaya. Mereka adalah anak bangsa yang sangat besar perhatian pada pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa dan negara.[1]

Kebudayaan memiliki peran besar dalam keberhasilan pembangunan bangsa, seperti yang dipraktekkan oleh negara-negera tertinggal di dunia

[1] *Nab Bahanya As, budayawan, dan penulis buku "Membangun Bersamarakyat: Tiga Tahun Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar" (Januari 2010)* dan Pengurus LKAS Banda Aceh.

saat ini, dan terbukti mereka berhasil bangkit dari ketertinggalannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka pemerintah dan pemerintah daerah juga harus *banting stir* mengalihkan strategi pembangunannya dari yang selama ini terfokus pada pembangunan fisik material semata, menjadi pembangunan berwawasan kebudayaan dalam arti universal.

5.2 Visi dan Misi

5.2.1 Visi

RPJPD DIY Tahun 2005-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun ke depan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya dan seluruh lapisan rakyat DIY, dengan menempatkan dimensi budaya sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan. Sejak kelahiran Yogyakarta, tujuan tersebut sejatinya sudah tersandang (*intrinsic*) sebagai misi 'istimewa', yang terkandung dalam nilai-nilai filosofis '*Hamêmayu-Hayuning Bawânâ*'.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY mempunyai kurun waktu perencanaan dari tahun 2005-2025. Visi dari RPJPD adalah **"Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

RPJMD DIY Tahun 2012-2017 berada pada transisi ditahapan lima tahun kedua (2010-2014) dan ketiga (2015-2019) dalam tata waktu RPJPD DIY. Penekanan pada lima tahun kedua adalah pada pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Lima tahun ketiga mempunyai penekanan pada pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Berdasarkan atas kedua penekanan dalam dua kurun waktu tersebut, secara sederhana didapati terdapat *key word* yang utama, yaitu pada pembangunan failitas pendukung utama dan pendayagunaan SDM untuk mengembangkan keunggulan daerah untuk memperkuat daya saing.

Pencapaian RPJPD DIY sampai pada tahun 2011 dapat ditunjukkan seperti dalam tabel dibawah. Kondisi terakhir dari harapan dua puluh tahun sebagaimana direncanakan dalam dokumen RPJPD.

Tabel 5.1 Hasil Telaah RPJPD

a. Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Tabel 5.2 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya DIY Sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara Pada Tahun 2025

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
1	Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.	a. Terwujudnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah;	Jumlah Sekolah Standar Nasional:
			a. SD/MI : 92 Sekolah.
			b. SMP/MTs: 97 Sekolah.
			c. SMA/MA/SMK: 275 Sekolah.
			Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional:
			a. SD/MI: 6 Sekolah.
			b. SMP/MTs: 12 Sekolah.
			c. SMA/MA/SMK: 26 Sekolah.
			Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal: 46 Lembaga.
		b. Tersedianya sumberdaya pendidikan yang handal;	Angka kelulusan:
			a. SD/MI : 98,53 Persen.
			b. SLTP/MTs : 98,28 Persen.
			c. SMU/MA/SMK: 99,61 Persen.
			Jumlah prestasi siswa dalam olimpiade/kejuaraan tingkat nasional dan internasional:
			a. SD/MI (Nasional) peringkat pertama.
			b.SLTP/MTs (Nasional) peringkat pertama; International dalam 1 event.
			c. SMU/MA/SMK (Nasional) Peringkat pertama dan dalam 4 event Internasional.
		c. Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan;	Jumlah perpustakaan berbasis TI sebanyak 21 Unit.
			Rasio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk 0,000364 unit/orang.
			Rasio Jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk 0,0050 Orang.
			Jumlah anggota Jaringan Jogja Library 21 Perguruan

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
			Tinggi.
			Ketersediaan gedung induk perpustakaan 1 unit.
			Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda 2 unit.
		d. Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY;	Jumlah Mahasiswa Asing: 8.342 Orang.
		e. Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;	Angka putus Sekolah.
			a. SD/MI : 0,07 Persen.
			b. SLTP/MTs : 0,09 Persen.
			c. SMU/MA/SMK: 0,57 Persen.
			Prestasi Kejuaraan PNF mendapatkan peringkat pertama.
		f. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya;	Angka melek huruf: 98,18 Persen.
			Angka Partisipasi Kasar.
			a. PAUD: 65, 73 Persen.
			b. SD/MI: 111,43 Persen.
			c. SLTP/MTs: 115,50 Persen.
			d. SMU/MA/SMK: 88,79 Persen.
			e. PLB: 92,03 Persen.
		g. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.	Jumlah Mahasiswa: 272,647 orang.
			Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK : 63,45 Persen.

Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2012-2017 pada terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 adalah:

1. Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing unggul, dan didukung oleh lembaga pendidikan yang bermutu tinggi, dengan prioritas tahapan pada: Penerapan standar lembaga pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan;
2. Memperluas pelayanan pendidikan dan pemberlakuan subsidi silang, dengan prioritas tahapan pada: Perluasan pelayanan pendidikan pada daerah tertinggal dan masyarakat kurang mampu;
3. Menerapkan dan meningkatkan kurikulum pendidikan yang mendukung peningkatan pencapaian kompetensi dan pengembangan karakter lulusan, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan pencapaian kompetensi dan relevansi lulusan melalui pengembangan mutu kurikulum berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul;

4. Meningkatkan peran perpustakaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan, dengan prioritas tahapan pada: Revitalisasi fungsi dan peran perpustakaan;
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam pendirian pusat teknologi dan industri (*techno-industrial Park*) sebagai katalisator industri berbasis sains (*Science-Based Industries*) di Yogyakarta, dengan prioritas tahapan pada: Perwujudan berdirinya pusat Teknologi dan Industri (*Techno-Industrial Park*);
6. Meningkatkan kapasitas guru dan dosen serta tenaga kependidikan lainnya, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas;
7. Meningkatkan budaya belajar dan membaca pada semua lapisan masyarakat, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan gemar belajar dan membaca sebagai bagian dari bagian dari budaya masyarakat;
8. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan, dengan prioritas tahapan pada: Pembelajaran berbasis penelitian yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
9. Mengembangkan pendidikan multikultur dalam upaya peningkatan wawasan, keterbukaan dan toleransi, dengan prioritas tahapan pada: Pengembangan pendidikan multikultur sebagai modal dasar untuk mendukung DIY sebagai tujuan pendidikan baik dari luar daerah maupun luar negeri;
10. Mendorong dalam perwujudan penataan lingkungan kawasan dan penataan ruang yang mendukung pengembangan pendidikan, dengan prioritas tahapan pada: Sinkronisasi program-program pendidikan dan penataan ruang;
11. Meningkatkan pencapaian kesetaraan pendidikan (laki-laki dan perempuan), dengan prioritas tahapan pada: Pengembangan budaya kompetisi dan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan;
12. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana, dengan prioritas tahapan pada: Sosialisasi pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap bencana melalui berbagai media pendidikan;
13. Meningkatkan sarana olahraga dan kesehatan yang memadai dalam menunjang proses pendidikan, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan sarana olahraga dan kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan.

b. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025

Tabel 5.3 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya DIY Sebagai Pusat Budaya Terkemuka se Asia Tenggara Pada Tahun 2025

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
2	Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se-Asia Tenggara pada tahun 2025.	a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan	Persentase fasilitasi lembaga pelestari warisan budaya terhadap kegiatan lain 26%.

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
		Yang Maha Esa;	
		b. Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan;	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi 6,97 %.
		c. DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur;	Persentase organisasi budaya berkategori maju adalah 1,03%.
		d. Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif;	Persentase desa budaya berkategori maju sebesar 36,59 %.
		e. Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya;	Persentase Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam kondisi baik sebesar 44, 47%.
		f. Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata;	Persentasefasilitasi pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film sebesar 28,12 %.
		g. Masuknya DIY dalam *culture itinerary/culture map* tingkatAsia Tenggara.	Persentase Kunjungan ke Museum terhadap Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) sebesar 13, 64 %.

Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2012-2017 pada Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pengembangan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh sistem informasi yang efisien dan mempunyai jaringan luas, dengan prioritas tahapan pada: Membangun partisipasi dalam pelestarian kebudayaan;
2. Mewujudkan pengembangan dan pelestarian dan mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah dengan prioritas tahapan pada: Penyelenggaraan event kebudayaan yang dinamis, unik, berkelas dunia, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke DIY. Penyediaan dokumen teknis implementasi, dan sosialisasi, standarisasi pengelolaan basis data dan informasi kebudayaan daerah;
3. Meningkatkan upaya penghargaan pemerintah terhadap aktivis-aktivis pelestari, pengembang, dan pewaris budaya, termasuk di dalamnya mengidentifikasi dan mendaftarkan hak paten atas hasil karya budaya Yogyakarta;
4. Meningkatkan keberdayaan pencapaian gaya hidup yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas.

c. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025

Tabel 5.4 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya DIY Sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara Pada Tahun 2025

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
3	Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.	a. Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;	Jumlah Desa Wisata: 54 Desa.
		b. Tersedianya fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal;	Rata-rata lama tinggal wisatawan: 2,10 Hari.
		c. Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan atau oleh pelaku wisata;	Jumlah MICE: 8.693 event.
		d. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;	Jumlah wisatawan.
			a. Wisatawan Nusantara: 1,561,846 orang.
			b. Wisatwan mancanegara: 183,282 orang.
		e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW.	PAD Pariwisata DIY: 75,76 milyar Rupiah.

Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2012-2017 pada Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Membangun perekonomian masyarakat melalui peningkatan dari sektor pariwisata dan sektor pendukung, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukungnya serta Pengembangan usaha pariwisata.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kerajinan pendukung kegiatan pariwisata seiring dengan adanya peningkatan modal terhadap UKM, dengan prioritas tahapan pada: Peningkatan industri kerajinan pendukung pariwisata dan fasilitasi permodalan bagi UKM.
3. Meningkatkan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan titik berat pada: Pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan.

d. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025.

Tabel 5.5 Hasil Telaah Sasaran Pokok Terwujudnya Lingkungan Masyarakat Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Pada Tahun 2025

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
4	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju,	a. Terselenggarakannya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan	SKPD yang mendapatkan dan menerapkan ISO: 3 SKPD.

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
	mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025.	supremasi hukum;	
			Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan: 26,14 Persen.
			Penyediaan pelayanan dari Goverment centris menuju *citizen centris*: 12 Persen.
		b. Terciptanya kelembagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap;	Jumlah usaha ekonomi masyarakat perdesaan 39 kelompok/desa.
			Peningkatan jumlah generasi muda cinta bahari: 16 Persen.
			Berkembangnya aktivitas kelembagaan petani: 20 Gapoktan.
		c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah;	Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: 27,84 Persen.
			Ketersediaan informasi dalam bentukl digital: 39 Persen.
			Ketersediaan peraturan perundangan kearsipan: 31 Produk hukum.
		d. Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai;	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik: 75 persen.
			Persentase penduduk berakses air minum: 64,33 Persen.
			V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan: 0,7.
			Persentase fasilitas keselamatan lalulintas jalan: 70 persen.
			Load factor penumpang angkutan umum: 28,09 Persen.
		e. Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia Tenggara;	Persentase Pengembangan Industri Kreatif Berbasis IT: 89%

No.	Sasaran Pokok	Indikator dan Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2011
		f. Terpenuhinya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama;	Persentasi realisasi Pembinaan Kerukunan Lintas Umat Beragama: 100%
		g. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak, dan remaja;	Angka kematian Balita per 1000 (KH) adalah 17 (Jumlah Kasus 469).
			Angka kematian Bayi per 1000 (KH) adalah 17 (Jumlah Kasus 419).
			Angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 (KH) adalah 101(Jumlah Kasus 56).
			Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB: 5 Kelompok.
			Terbentuknya pusat informasi dan konseling KRR: 15 Paket.
			Indeks Pembangunan Gender (IPG): 72,24 Persen.
			Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM): 63,32 Persen.
		h. Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi	Pertumbuhan PDRB 5,16 Persen.
			Indeks ketimpangan regional: 0,314.
			Nilai Tukar Petani: 117,38 Persen.
		i. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi.	Umur harapan hidup: 73,55 Tahun.
			Prevalensi Gizi buruk 0,67 Persen.
			Cakupan penanganan PMKS: 2,46 Persen.

Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD Tahun 2012-2017, terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kelembagaan lokal dan unit kelompok masyarakat yang peduli akan masalah kesejahteraan sosial yang aktif dan terhubungkan oleh jaringan kerja;
2. Memperbaiki dan meratakan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan, baik dalam hal jarak jangkauan yang lebih dekat maupun biaya yang lebih murah khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah, masyarakat

perdesaan terpencil (termasuk wilayah perbatasan), maupun masyarakat di lingkungan marginal kota;

3. Menjalin kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar daerah dan antar usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi;
4. Membentuk kemandirian dalam penyelengaraan transmigrasi berdasarkan kerjasama yang mutualistis dengan daerah-daerah penempatan yang memberikan jaminan dan peluang perbaikan ekonomi transmigran serta pembangunan sosial-ekonomi wilayah daerah penempatan;
5. Mewadahi aspirasi perempuan dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan peran perempuan dalam kegiatan sosial, maupun ekonomi produktif, serta terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif;
6. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui investasi, membuka usaha ekonomi produktif pada lokasi industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai;
7. Meningkatkan komoditas produk industri di lingkup usaha, mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kreatif yang khas dan orisinal, didukung lokasi-lokasi kegiatan industri yang berperan sebagai daya tarik kunjungan dan atraksi wisata daerah;
8. Membentuk sistem budidaya pertanian yang menjamin kebutuhan pangan penduduk serta berkembangnya jenis-jenis komoditas pertanian yang lebih teragamkan (diversifikasi), bernilai ekonomi lebih tinggi (komersial) serta kompetitif dari segi kualitas produknya termasuk produk pertanian lahan kota;
9. Meningkatkan konsumsi dan permintaan produk ikan dari dunia usaha dan masyarakat;
10. Menjaga dan melestarikan pertumbuhan tanaman hutan serta tersedianya produk hutan dan hasil ikutan hutan untuk kebutuhan dunia usaha dan rumahtangga serta terbentuknya kelompok-kelompok pelestari hutan;
11. Merumuskan peraturan dan ketentutan teknis kompetensi dalam pembagian urusan untuk mengurangi tumpang-tindih dan konflik kepentingan sebagai tindak lanjut otonomi pemerintahan daerah.

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di DIY tercermin dalam capaian indikator kinerja pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY Tahun 2009-2013, telah memuat indikator-indikator pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama jangka waktu lima tahun. Dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009-2013 terdapat 4 misi pembangunan untuk mewujudkan visi "**Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".** Dalam setiap misi yang telah ditetapkan, terdapat sasaran-sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun. Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dapat diukur dari capaian indikator sasaran, dimana juga telah ditetapkan target tahunannya.

Total jumlah indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009-2013 untuk menilai kinerja pembangunan daerah di Provinsi DIY sebanyak 149 indikator, terbagi dalam 4 misi dimana misi ke-1 sebanyak 67 indikator, misi ke-2 sebanyak 36 indikator, misi ke-3 sebanyak 11 indikator dan misi ke-4 sebanyak 35 indikator. Capaian kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2011 yang merupakan tahun ketiga

dari pelaksanaan RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009-2013 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dengan membandingkan target pada tahun 2011 dengan pencapaian pelaksanaan tahun 2011 dimana terdapat 107 Indikator (71,81%) telah tercapai sedangkan indikator yang belum tercapai terdapat sebanyak 42 indikator atau 28,19%. Kemudian jika dilihat lebih jauh gap tersebut dengan menggunakan "kacamata" tiga sektor visi jangka panjang daerah (pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata), maka urutan kontribusi terbesar dalam menyumbang gap adalah pendidikan, pariwista dan terakhir/terkecil adalah kebudayaan.

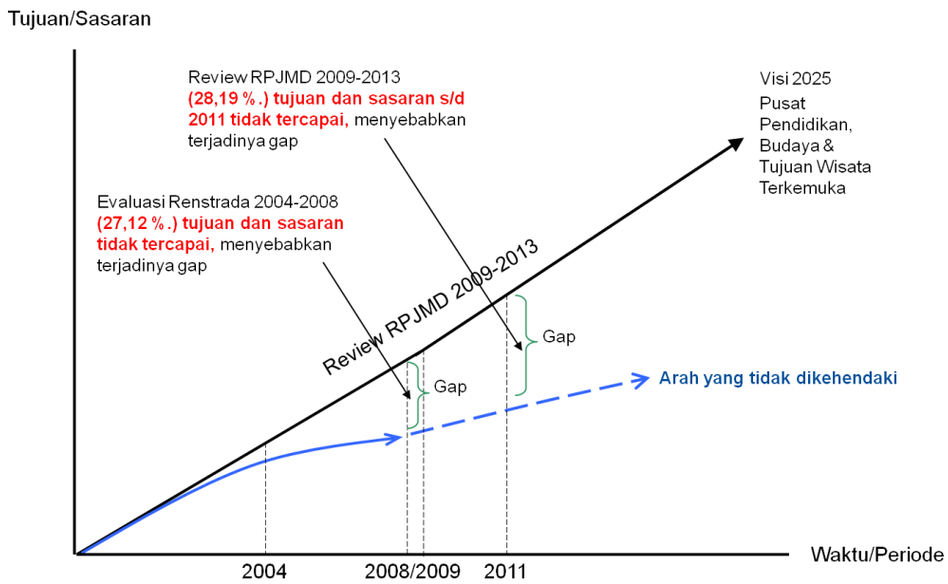

Gambar 5.1 Pencapaian Tujuan dan Sasaran

RPJPD DIY Tahun 2005-2025 merupakan landasan idiil-filosofis dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan beserta seluruh rakyat DIY sebagai landasan pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, agar mampu menjawab pesatnya tantangan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran peradaban. Hal ini membawa implikasi perlu disusunnya RPJMD 2012-2017 yang lebih progresif dan mampu mengakselerasi ke arah pencapaian Visi 2025. RPJMD DIY Tahun 2012-2017 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal RPJMD 2012-2017.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun permukiman.

Visi, Misi dan Program Calon Gubernur DIY Tahun 2012-2017 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY pada tanggal 21 September 2012 dengan tema "Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru" merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma '*among tani*' menjadi '*dagang layar*', dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan.

Perubahan paradigmatis ini paralel, bahkan terdukung oleh kebijakan ekonomi nasional dengan ditempatkannya wilayah Kulon Progo dalam program MP3I (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia). Pembangunan di wilayah Kulon Progo meliputi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, Bandara Internasional, Kawasan Industri, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Wisata Maritim, serta Kawasan Industri Baja yang mengandung *deposit vanadium*, yang di dunia hanya ditemukan di Kulonprogo dan Meksiko. Selain itu, juga direncanakan pembangunan Pelabuhan Samudera untuk memfasilitasi transportasi ekspor produk-produk hasil industri.

Secara konseptual, strategi pembangunan yang meletakkan wilayah Pantura sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*), asas pemerataannya sudah sulit dipenuhi. Akibatnya, terjadi marginalisasi di luar *growth-pole*, di Jawa bagian Selatan. Makin padatnya transportasi di jalur utara membawa implikasi melemahnya *carrying capacity* Pantura sebagai *growth-pole*. Konsekuensinya, perlu melakukan kaji ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara komprehensif, menyeluruh dan lengkap, dengan menempatkan Jawa bagian Selatan sebagai lokasi penyebaran pertumbuhan. Maka, mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansel) dengan berkembangnya klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan-selatan, menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu:

"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **lebih berkarakter** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena kararkter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **berbudaya** dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya

lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **maju** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah.

Tingkat kemajuan masyarakat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Kemajuan masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan masyarakat dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan masyarakat diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi masyarakat menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan masyarakat dan sistem politik yang dianutnya. Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Oleh karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan

pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana dengan mengedepankan semangat kerakyatan dan bukan kapitalisme. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga perguruan tinggi harus menjadi pusat keunggulan --*center of excelence*-- yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai *teaching, research and entrepreneurial university*.

Kemandirian dan kemajuan masyarakat tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya(*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domain *society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta yang **sejahtera** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

5.2.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, sertameningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampumenciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5.2.3 Hubungan Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah dengan Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi Jangka Menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Misi pertama (Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal) dan Misi kedua (Mewujudkan budaya

adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian budaya dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah akan ditampung, dipertajam dan difokuskan pada Misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi ketiga (Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif) dan Misi keempat (Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah akanditampung, dipertajam dan difokuskan pada Misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan Misi ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan mampu mendukung dan menjadi katalisator Misi pertama dan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pergeseran paradigma pembangunan dari "among tani" menuju ke "dagang layar" adalah sebuah cita-cita jangka panjang (ultimate goal) yang yang perlu dirintis menjadi sebuah milestone dalam jangka menengah. Konsep among tani didasari atas konsep perdagangan dan ekonomi klasik di DIY yang berkembang selama ini melalui semangat bertahan dengan basis dominasi pengembangan pertanian. Adapun semangat paradigma dagang layar merupakan konsep kemajuan kesejahteraan bangsa berbasis perdagangan menuju perdagangan internasional dengan strategi mutakhir, berakar kuat pada kearifan lokal, tetapi unggul dan mampu menandingi perdagangan bebas era global. Strategi mutakhir ini adalah penerapan "*Ekonomy Supply-Chain*" dengan harapan petani dan nelayan bisa bersatu padu, saling menolong mengatasi kelemahan, bekerjasama mencapai keunggulan. Untuk itu, petani dan nelayan sangat memerlukan kemudahan untuk mencapai pasar secara efisien dengan membangun jaringan yang sangat efektif dalam menyalurkan produk menuju pasar global maupun dunia ekspor

Untuk itu kawasan Pulau Jawa bagian selatan ini perlu dibangun jejaring aliran produk efisien yang berpotongan pada simpul-simpul sentra perdagangan. Dengan demikian dalam menyalurkan produk ke pasar global, Yogyakarta akan memiliki peran penting sebagai pusat (hub) perdagangan yang menyalurkan produk dari kawasan ekonomi yang terbentang dari Pacitan hingga Cilacap. Implikasinya, wilayah DIY menjadi pusat perdagangan pengumpul produk, sekaligus sebagai "Hubungan Perdagangan" produk-produk di bagian selatan Pulau Jawa. Selain itu budaya maritim dilestarikan dengan menggiatkan memanen produk laut Samudera Hindia, menumbuhkembangkan pelabuhan dalam rangka menuju Pusat Perdagangan Jalur Pantai Selatan Jawa.

Melalui paradigma *among tani dagang layar* tersebut, perekonomian daerah mampu tumbuh secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Artinya, paradigma tersebut sangat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan harapan Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sekaligus sebagai penajaman dari Misi ketiga dan Misi keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Oleh karena itu, korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka menengah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dapat digambarkan sebagai berikut.

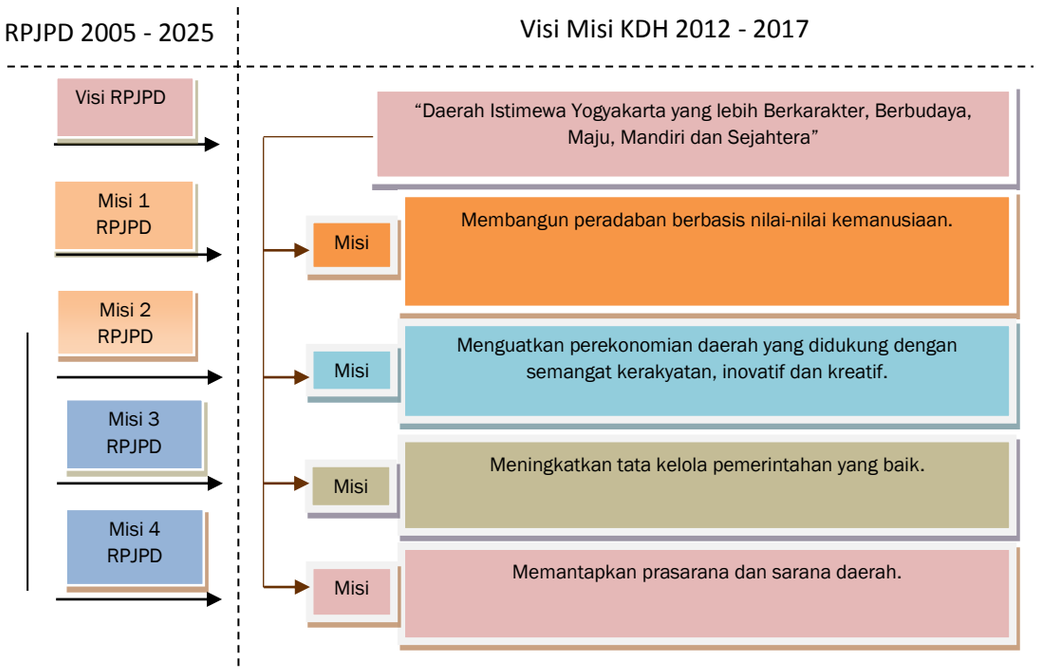

Gambar 5.2 Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Tabel 5.6 Keterkaitan Visi dan Misi

Visi	Misi
Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru	1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.
	2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
	3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
	4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut.

Tabel 5.7 Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.	1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.
	2. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.
	3. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.

Misi	Tujuan
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	1. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
	2. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.	1. Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.
	2. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran utama dan indikator sasaran utamanya sebagai berikut :

Tabel 5.8 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.	1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
	2. Mewujudkan peembangan pendidikan yang berkarakter.	1. Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.
		2. Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.
		3. Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
	3. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.
Misi 2:	1. Memacu	1. Pendapatan	Pendapatan

Visi: Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	masyarakat meningkat.	perkapita pertahun.
		2. Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.
		3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.
	2. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	1. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	1. Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara .
		2. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	2. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	*Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.*	1. *Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.*	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.*
		2. *Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.*	*Opini pemeriksaan BPK.*
Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah.	1. Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	*Load factor* angkutan perkotaan meningkat.
	2. *Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.*	1. *Kualitas lingkungan hidup meningkat.*	*Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.*
		2. *Pemanfaatan*	*Kesesuaian*

Visi: Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Ruang terkendali.	*pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.*

Sedangkan indikator target dari dampak pencapaian sasaran program (outcome) secara agregat dari semua misi dalam mencapai visi jangka menengah atau sering disebut sebagai sasaran utama adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Target Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
1	**Sasaran : Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.**							
	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	%	n/a	n/a	67,28	68,58	70,00	Sesudah Perubahan
	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	%	30	40	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
2	**Sasaran : Melek huruf masyarakat meningkat**							
	Angka Melek huruf	%	n/a	n/a	93,85	94,65	95,00	Sesudah Perubahan
	Angka Melek huruf	%	91,99	92,60	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
3	**Sasaran : Aksesibilitas pendidikan meningkat**							
	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	9,60	10,00	10,80	11,60	12,00	Tetap
4	**Sasaran : Daya Saing Pendidikan meningkat**							
	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	%	-	5,00	10,00	20,00	40,00	Tetap
5	**Sasaran : Harapan hidup masyarakat meningkat**							
	Angka Harapan Hidup.	Tahun	n/a	n/a	73,81	73,96	74,18	Sesudah Perubahan
	Angka Harapan Hidup.	Tahun	73,37	73,67	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
6	**Sasaran : Pendapatan masyarakat meningkat**							
	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta Rupiah	7,00	7,40	7,80	8,20	8,50	Tetap
7	**Sasaran : Ketimpangan Antar Wilayah menurun**							
	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	n/a	n/a	0,4465	0,4455	0,4445	Sesudah Perubahan
	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	0,2980	0,2950	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
8	**Sasaran : Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun**							
	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	Indeks Gini	0,298	0,295	0,2898	0,2888	0,2878	Tetap

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
9	**Sasaran : Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat**							
a.	Jumlah wisatawan nusantara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	n/a	n/a	3.581.860	4.071.753	4.561.646	Sesudah Perubahan
	Jumlah wisatawan nusantara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	2.113.314	2.237.500	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
b.	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	n/a	n/a	261.053	272.053	272.162	Sesudah Perubahan
	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	212.518	225.100	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
10	**Sasaran : Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat**							
	Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari (Wisatawan Mancanegara)	2,15	2,25	2,35	2,45	2,69	Tetap
	Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari (Wisatawan Nusantara)	2,00	2,15	2,30	2,45	2,60	Tetap
11	**Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat**							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Nilai (Kementerian PAN)	n/a	n/a	A	A	A	Sesudah Perubahan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Nilai (Kementerian PAN)	B	B	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
12	**Sasaran : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat**							
	Opini pemeriksaan BPK.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tetap
13	**Sasaran : Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan**							

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	%	34,57	36,57	38,57	40,57	42,57	Tetap
14	**Sasaran : Kualitas lingkungan hidup meningkat**							
	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	%	3,14	6,29	9,43	12,58	15,72	Tetap
15	**Sasaran : Pemanfaatan Ruang terkendali**							
	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.	%	n/a	n/a	64,25	64,50	64,75	Sesudah Perubahan
	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.	%	50,00	60,00	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan

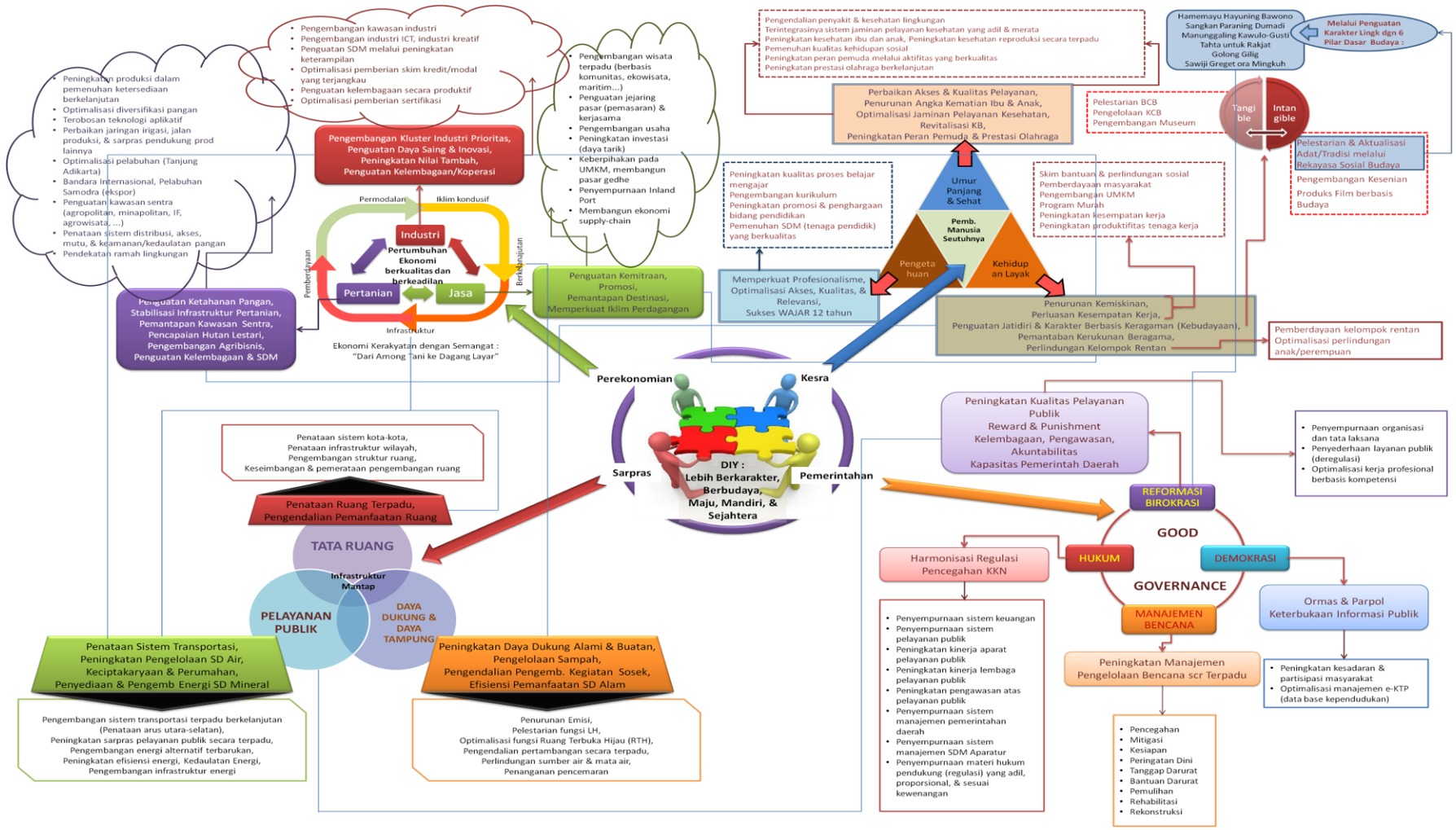

Gambar 5.3 Skema Besar RPJMD 2012-2017

5.4 Keselarasan RPJMD 2012-2017 dengan RPJMN 2010-2014

Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2005-2025 adalah: "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur". Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan lima tahunan. Dalam proses tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ini adalah merupakan tahapan kedua dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. Dokumen ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010.

Visi Indonesia tahun 2014 adalah "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN." Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa. Untuk mewujudkannya, penguatan triple track strategy *(pro growth, pro job, and pro poor*) akan dilanjutkan disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, perwujudan Indonesia yang demokratis akan tercermin dari terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Upaya yang akan dilakukan adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan meng-angan-kan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pengurangan kesenjangan.

Visi Pembangunan DIY lima tahun mendatang (2013-2017), yaitu: "Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru" selaras dengan visi RPJMN 2010-2014 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dalam hal menciptakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pemberdayaan sumber daya manusia.

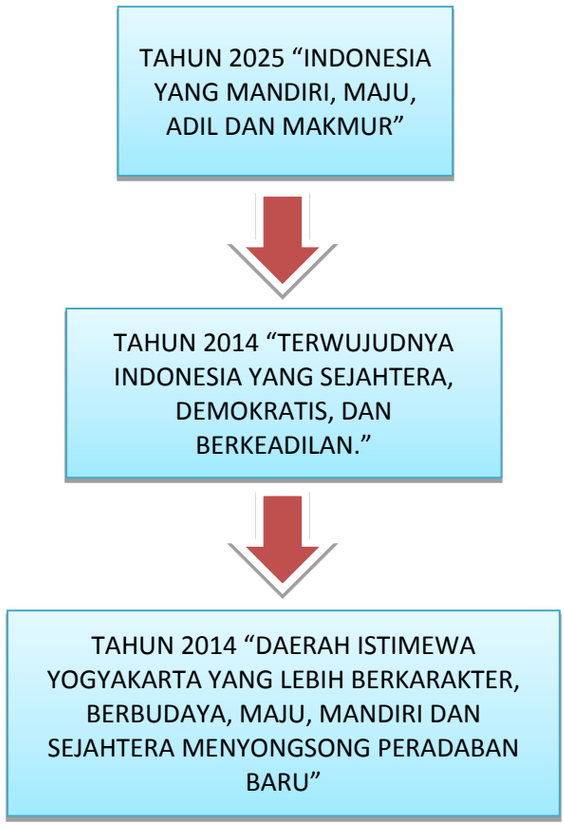

Gambar 5.4 Keterkaitan Visi RPJP, RPJMN, dan RPJMD

DIY mempunyai visi menciptakan masyarakat yang memiliki keahlian atau ketrampilan yang tinggi serta memiliki sifat sopan santun dan beradab sesuai dengan visi RPJMN. RPJMD dan RPJMN mempunyai visi yang sama untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam mencapai kesejahteraan. Visi tersebut diamanatkan agar tercapai Misi pertama RPJMD DIY dalam membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Visi tersebut seiring dengan Misi Pertama RPJMN yang secara luas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Delapan Misi Pembangunan Nasional Tahun (2005-2025)

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, danbersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Delapan Misi Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014)

1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.
2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.
3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Delapan Misi Pembangunan Jangka Menengah (2012-2017) DIY

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan .
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Gambar 5.5 Keterkaitan Misi RPJP, RPJMN, dan RPJMD

Misi Pertama RPJMD selaras dengan Agenda Pembangunan 1: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejateraan Rakyat pada RPKMN. Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Hal ini terkait dengan upaya pengembangan sumberdaya manusia yang diamanatkan dalam Misi Pertama RPJMD yang juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia demi peningkatan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Misi Pertama RPJMD dilaksanakan dengan beberapa strategi yang terfokus pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berbudaya, beradab dan berkualitas. Hal itu ditunjukan antara lain pada sasaran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Kemudian ditunjukan pula dalam sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, perluasan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik,

peningkataan fasilitas kesehatan, pengurangan resiko terjadinya penyakit dan peningkatan akses dan mutu kesehatan. Sasaran-sasaran tersebut mencerminkan keselarasan dengan prioritas dalam RPJMN yaitu Prioritas 2: Pendidikan dan Prioritas 3: Kesehatan. Selain itu, sasaran pembangunan pada Misi Pertama RPJMD yang mengamanatkan untuk mengembangkan dan melesarikan budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya selaras dengan Priotritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dalam RPJMN terutama terkait dengan pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuhmapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pembangunan.

Pada sisi lain, visi RPJMD DIY untuk mencapai masyarakat mandiri telah selaras dengan visi RPJMN untuk memberdayakan sumberdaya manusia ke arah Kesejahteraan Rakyat. Visi RPJMN tersebut dilaksanakan untuk mencapai Misi 1 Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera. Unsur-unsur utama dalam misi tersebut selaras dengan misi kedua RPJMD DIY yaitu menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan dimaknai sebagai upaya meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera yang berupaya untuk menciptakan kekuatan ekonomi daerah yang berbasis pada keunggulan lokal. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan keunggulan DIY. Meskipun pariwisata tidak merupakan sektor yang termasuk prioritas, pembangunan berbasis pariwisata tersebut sudah sesuai dengan upaya yang diamanatkan dalam visi RPJMN berupa penciptaan pertumbuhan untuk mencapai kesejahteraan dan upaya mengembangkan aktivitas perekonomian di perdesaan mengingat sektor pariwisata DIY juga meliputi aktivitas kepariwisataan di perdesaan. Visi ini bahkan juga sesuai dengan tujuan akhir rencana pembangunan jangka panjang DIY yang ingin dicapai pada tahun 2025 yaitu menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Pembangunan berbasiskan pariwisata di DIY dalam RPJMD juga didukung oleh pembangunan sektor-sektor pendukung lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor tersebut dengan memberdayakan kekuatan keunggulan ekonomi lokal seperti diamanatkan dalam Misi Kedua RPJMN. Strategi pembangunan RPJMD pada misi kedua mengamanatkan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah. Pemberdayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya memberdayakan keungulan lokal karena sektor usaha tersebut pada umumnya dimiliki oleh masyarakat setempat. Strategi untuk melaksanakan Misi Kedua RPJMD DIY juga mengamanatkan pelaksanaan kebijakan untuk memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata serta menguatkan kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif. Dua kebijakan itu merupakan representasi komitmen DIY untuk memajukan

industri kreatif seperti yang diamanatkan dalam Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam RPJMN. Dalam uraian penjelasan Agenda I tersebut, agenda pembangunan diupayakan untuk mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (resource based), sumber daya pengetahuan (knowledge based) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (culture based). Dengan cara itu, akan diperoleh ranah pembangunan ekonomi produktif yang makin luas, antara lain, ekonomi kreatif (creative economy), yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan dalam RPJMD sudah mengakomodir upaya untuk menciptakan penguasaan teknologi yang dipadukan dengan upaya penguatan aktivitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi seperti diamanatkannya kebijakan untuk mengembangkan pusat teknologi dan industri (Techno-industrial Park). Kebijakan itu diharapkan untuk menumbuhkan inovasi-inovasi teknologi serta berbagai macam kreativitas berbasis teknologi dengan potensi penerapannya dalam usaha untuk membangun perekonomian dengan menciptakan peluang usaha dan mengurangi tingkat pengangguran. Upaya ini juga selaras dengan Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi dalam RPJMN

Dalam strategi lain untuk mencapai Misi Kedua tersebut, pembangunan dilaksanakan sebagai upaya untuk pengembangan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir dengan didukung oleh semangat dari among tani ke dagang layar. Strategi pembangunan ini sesuai dengan Misi Pertama RPJMN yang dijabarkan pada peningkatan perhatian pada kawasan perdesaan dan mendorong penciptaan pertumbuhan ekonomi demi perbaikan kesejahteraan. Strategi eksplorasi sumber daya kelautan DIY adalah cerminan upaya pembangunan DIY untuk ambil bagian dalam sinergi nasional untuk lebih memberdayakan sumber daya tersebut demi kesejahteraan rakyat. Secara umum, penjabaran upaya pelaksanaan sasaran Misi Pertama mencerminkan upaya untuk melaksanakan pembangunan sesuai Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui pembangungan terfokus pada sektor pariwisata dengan tetap mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan.

Dalam Misi Kedua, Pembangunan DIY memang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasiskan sektor pariwisata yang berdaya saing tinggi, namun tetap berusaha memberdayakan sektor yang tidak langsung berkaitan dengan pariwisata seperti pertanian dan perkebunan untuk mencapai ketahanan ekonomi masyarakat termasuk ketahanan pangan di dalamnya. Hal itu diamanatkan dalam upaya pencapaian sasaran yang terkait dengan pembangunan perdesaan, revitalisasi pertanian dan ketersediaan pangan. Dalam hal ini, Misi Kedua RPJMD sudah selaras dengan prioritas 5 RPJMN: Ketahanan Pangan. Misi Kedua juga mempunyai kaitan langsung dengan upaya pelaksanaan prioritas 4 RPJMN: Penanggulangan Kemiskinan terutama kemiskinan di kawasan perdesaan. Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan untuk menerapkan Misi Kedua RPJMD mendukung Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha dalam RPJMN. Kebijakan-kebijakan itu antara lain menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan dan meningkatkan iklim usaha Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.

Misi Ketiga RPJMD DIY adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara

efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini sesuai dengan Misi Pertama RPJMN yang bertujuan untuk mendasarkan perbaikan kesehahteraan melalui proses pembangunan yang berdasarkan pada prinsip asas tata kelola yang baik dan bersih (good governance and good government) dan Prioritas pertama yang mengamanatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Lebih lanjut, Misi ini juga sesuai dengan Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan prioritas pembangungan I berupa reformasi birokrasi dan tata kelola dalam RPJMN. Strategi ini esensinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, transformasi birokrasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan. Strategi-strategi tersebut selaras juga dengan upaya menciptakan Agenda RPJMN kelima yaitu pembangunan yang inklusif dan berkeadilan serta unsur dari Visi RJPMN Ketiga dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis dan meningkatkan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah.

Misi Keempat RPJMD DIY adalah Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan melaksanakan salah satu strategi berupa pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini selaras dengan Misi Ketiga RPJMN yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan melalui upaya peningkatan akselerasi pembangunan daerah; pengurangan kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa misi RPJMD sesuai dengan misi RPJMN yang berusaha untuk mengarahkan pembangunan guna mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah. Upaya lain dilaksanakan dengan mengakomodir kebijakan terkait misi tersebut berupa meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan. Kemerataan sarana dan prasarana sebagai upaya pemerataan akses bagi seluruh daerah dan kelompok masyarakat dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya dimensi keadilan di semua bidang yang difasilitasi dengan penyediaan infrastruktur sesuai dengan Misi Ketiga RPJMN serta terwujudnya pelaksanaan Agenda V RPJMN yang berupa Pembangunan yang inklusif Dan Berkeadilan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai kepada seluruh daerah dan kelompok masyarakat akan dapat membantu upaya pemberantasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Prioritas 4 RPJMN: Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Misi Keempat, kebijakan terkait juga diarahkan untuk melaksanakan pembangunan dengan meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam demi pembangungan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup. Upaya ini selaras dengan Misi Pertama RPJMN yang penjabarannya ditekankan pada tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan

pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kebijakan lain dalam RPJMD DIY yang sesuai dengan Misi Keenam RPJMN adalah menata struktur ruang sesuai dengan RTRW serta mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW yang mencermintakan pemanfaatan ruang yang serasi antara beberapa kepentingan penggunaannya.

Prioritas 8 Energi untuk mewujudkan Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya selaras dengan arah kebijakan dalam strategi Misi Keempat RPJMD yang dilaksanakan melalui strategi penciptaan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan energi. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dengan upaya utama untuk konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan juga sejalan dengan Misi Keempat RPJMD yang diejawantahkan dalam strategi penanganan dan pengurangan resiko bencana serta perbaikan pengelolaan sumber daya dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Matrik hubungan antara RPJMD 2012-2017 dengan Misi, Agenda serta Prioritas RPJMN 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.10 Hubungan antara RPJMD 2012-2017 dengan Misi, Agenda serta Prioritas RPJMN 2010-2014

Misi RPJMD	Misi RPJMN	Agenda RPJMN	Prioritas RPJMN
Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Misi 1: Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera	Agenda 1: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Prioritas 2: Pendidikan Prioritas 3: Kesehatan Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan
Misi 2: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.	Misi 1: Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera	Agenda 1: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha Prioritas 11: Kebudayaan , Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan	Misi 1: Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera	Agenda 2: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda 5: Pembangunan	Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Misi RPJMD	Misi RPJMN	Agenda RPJMN	Prioritas RPJMN
mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.	Misi 2: Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi	yang Inklusif dan Berkeadilan	
Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.	Misi 3 RPJMN: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang	Agenda 5: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan	Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 8: Energi Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal tahapan dan strategi Tahun 2012-2017. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2009-2013, maka tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III.

Tabel 6.1 Tahapan Utama RPJPD 2005-2025

RPJPD Lima Tahun I (2005 – 2009)	RPJPD Lima Tahun II (2010 – 2014)	RPJPD Lima Tahun III (2015 – 2019)	RPJPD Lima Tahun IV (2020 – 2025)
Pembangunansarana dadanprasarana dasarkeunggulandaerah, danpersiapandasarkompetensi SDM yang berdayasaingunggul, sertakonsolidasipotensiekonomidan industry unggulan.	Pembangunanfasilitas-fasilitaspendukungutamakeunggulandaerah yang memilikidayadukungberantaipositif (*backward effect & forward effect*) untukmendorongkemajuandaerahdanmelanjutkanpembangunankompetensi SDM yang berdayasaingunggul secaralebihluasserta menggerakkanpotensiekonomidan industry unggulan.	Pendayagunaankapasitaskeunggulan daerahmelaluipengerahan SDM danfasilitas-fasilitasutamapendukungkeunggulan daerah, akselerasiusahaekonomidan industry unggulan, sertapenguatanjejaringuntukmeningkatkandayasaingkeunggulandaerah.	Penguatanupayapencapaiankeunggulandaerahmelaluisarana-saranapendukunglanjut, penguatanorientasi kompetisipadapembangunan SDM unggul, sertaexpansipereko nomiandan industry berbasiskeunggulandaerah yang didukungdengankete rsediaanenergi.
Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	*Keyword:* Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan	*Keyword:* Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun	*Keyword:* Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita

2012-2017

Sedangkan tahapan secara umum Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut.

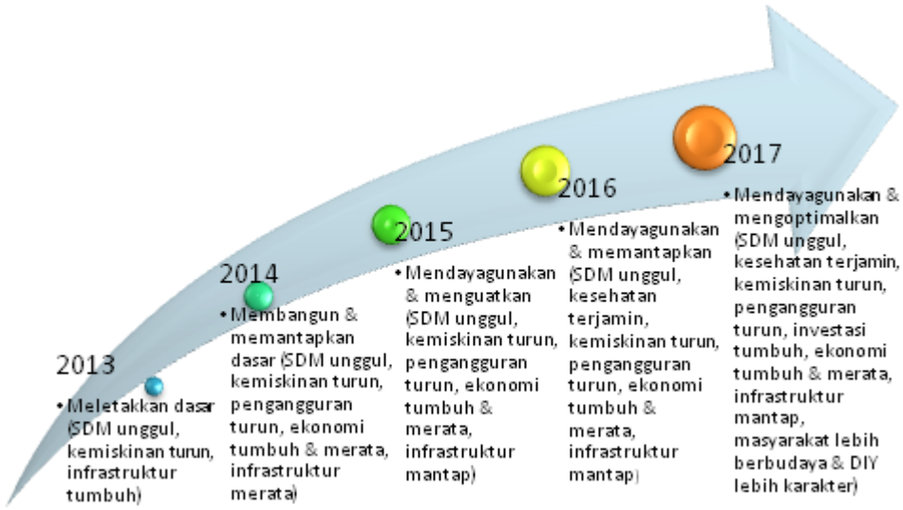

Gambar 6.1 Tahapan Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017

6.1 Analisis Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancamanyang dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Daerah Istimewa Yogyakarta baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

Perencanaan dalam lingkup regional dan nasional tertuang dalamRencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN)tahun2010-2014. Telaah terhadap dokumen perencanaan jangka menengah nasional ini diharapkan akan mengarahkan pada sinkronisasi antara pusat dengan daerah dan membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi perencanaan pembangunan DIY. RPJMN mempunyai pembagian perencanaan berdasarkan kewilayahan, DIY termasuk dalam kluster kawasan Jawa-Bali.Beberapa kebijakan dalam RPJMN yang terkait dengan DIY diantaranya mengenai:

a. Secara nasional, daya tarik investasi wilayah Jawa-Bali sangat tinggi, terbukti dari nilai realisasi investasi yang terpusat di wilayah ini. Total nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2008, lebih dari 91 persen berlangsung di wilayah Jawa dan Bali. Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), wilayah ini menyumbang sebesar 60,20 persen. Namun terdapat ketimpangan investasi yang dominan di wilayah Jawa-Bali.Penanaman modal PMDN di DIY Rp 2.313.141.695.784,00 dan PMA Rp4.110.436.324.224,00

b. Dalam lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Jawa-Bali terus meningkatsecara nyata.Perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanyaketimpanganyang cukup tinggi antara Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lain.Pengangguran terbuka DIY Tahun 2012 per Agustus 3,97 % atau 771.500 orang.Nilai PDRB per kapita DIY ADHB sejak tahun 2007 hingga 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 9,80 juta dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2011 mencapai Rp 14,85 juta. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Nilai riil PDRB per kapita sejak tahun 2007 terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 5,44 juta menjadi Rp 6,35 juta di tahun 2011.

c. Tingkat kemiskinan untuk wilayah Jawa-Bali masih terhitung tinggi dimana salah satunya adalah DIY.Kemiskinan DIY tahun 2011 adalah 560.800 orang atau 16,08 % (BPS, 2012).

d. Hampir seluruh wilayah Jawa-Bali termasuk wilayah DIY yang rentan terhadapbencana alam baik gempa bumi, longsor, banjir dan angin kencang.Bencana alam: puting beliung (kabupaten Sleman), gunung berapi dan gempa (Kabupaten Bantul), kekeringan (Gunungkidul) dan Tanah Longsor (Kulon Progo).

Posisi DIY dalam konteks nasional sangat strategis, terutama pasca ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan status keistimewaan, DIY mempunyai posisi tawar yang tinggi, baik sebagai daerah pengembangan budaya , maupun untuk pengembangan pariwisata dan pendidikan.

Pergeseran paradigma pembangunan "**DariAmong Tani Menuju Dagang Layar**" ditempuh melalui strategi akselerasi pengembangan wilayah Pantai Selatan (Pansela). Selain itu juga mengembangkan potensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa bagi kawasanJawa bagian selatan dan sebagai hub bagi daerah sekitarnya dalam mengakses pasar internasional. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilakukan dengan cara mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim di wilayah pesisir. Program–program strategis tersebut perlu didukung dengan pembangunan berbagai infrastruktur terutama di wilayah bagian selatan antara lain pembangunan jalur jalan lintas selatan, pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto serta rencana pembangunan bandara baru untuk meningkatkan kesiapan DIY dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Berdasarkan kondisi diatas dan kondisi eksisting yang terjadi saat ini didalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancamanbagi DIY dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Peluang

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah/negara dan budaya (*borderless*), memungkinkan DIY untuk bersaing di kancah internasional.
2. Kesepakatan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat.
3. Posisi DIY didalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan menjadi satu-satunya simpul pengembangan klaster di wilayah Selatan Jawa, disamping itu DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya *hub* koridor di wilayah Selatan Jawa.
4. Kebijakan nasional yang mendukung DIY dalam program pembangunan nasional.
5. DIY sebagai daerah yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modal.
6. DIY dianggap sebagai tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal bagi orang luar DIY.
7. DIY dapat menjadi bagian dari warisan budaya dunia, sehingga sangat strategis menjadi pusat pengembangan dan penelitian ilmu

pengetahuan dunia, antara lain kegunungapian, kegempabumian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan lain-lain.

b. Ancaman

1. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana (erupsi gunung Merapi, gempa bumi, kekeringan, longsor dan angin puting beliung dll).
2. DIY tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global *(global warming),* meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan muka air laut meninggi, meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon.
3. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan jasa dan meningkatnya arus transportasi, alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang serta ancaman kerusakan kawasan hutan, *karst,* pantai, gumuk pasir dll.
4. Faktor kenyamanan juga menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus bagi pengembang sehingga menyebabkan nilai tanah tidak terkendali, pada saat yang sama menyebabkan penduduk DIY tidak mampu menjangkau karena harga lahan yang tinggi dan masyarakat lokal tidak mempunyai daya beli yang bagus.
5. Eksternalitas DIY (konstelasi wilayah secara regional) tidak semuanya dapat optimum misalnya Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri yang berbatasan langsung dengan DIY memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.
6. Masuknya pengaruh budaya negatif yang dibawa oleh para pendatang yang berpotensi pada lunturnya nilai-nilai kearifan lokal.
7. Isu terorisme yang menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan kegiatan perekonomian khususnya pembangunan pariwisata yang mensyaratkan keamanan dan kenyamanan sebagai prasyarat utama.
8. Kondisi usaha yang kurang sehat khususnya di sektor industri kecil antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah.
9. Ancaman narkoba karena DIY merupakan pasar potensial dimana pengguna utamanya adalah generasimuda.

6.2 Analisis Internal

Tinjauan internal bertujuan untuk memahami kondisi Daerah istimewa Yogyakarta dengan memetakan kekuatan dan kelemahanyang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya.

Dalam analisis internal ini diuraikan juga mengenai pengalaman akan permasalahan dan menjadi isu strategis sehingga dapat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahanDIY dari wilayah yang berdekatan.Penelaahan terhadap RPJMD daerah lain dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah yang paling berdekatan dengan DIY. Periodesasi RPJMD Jawa Tengah adalah 2008-2013 yang merupakan peralihan diantara tahap I dan II dokumen perencanaan RPJPD. Tahap pertama pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah (tahun 2005-2009) berorientasi pada kelanjutan pencapaian target pembangunan dalam Renstra Jawa Tengah tahun 2003 - 2008 yang diarahkan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam

tata kelola pemerintahan serta pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan tahapan kedua pembangunan Jawa Tengah (2010-2014) diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkualitas serta pengelolaan sumber daya alam. Beberapa hal yang memiliki kemiripan permasalahan dengan wilayah DIY antara lain:

a. Tingginya jumlah penduduk miskin. Tahun 2003 jumlah penduduk miskin 6.980.000 orang (21,7 %) sedangkan kemiskinan DIY tahun 2011 adalah 560.800 orang atau 16,08 % (BPS, 2012).

b. Tingginya jumlah penganggur, Tahun 2003 sebesar 912.513 orang sedangkan pengangguran terbuka DIY Tahun 2012 per Agustus 3,97 % atau 771.500 orang.

c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, sebesar 2 % per tahun sedangkan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian DIY sebesar 250 ha/per tahun.

d. Masih rendahnya realisasi penanaman modal di Jawa Tengah sedangkan Penanaman modalPMDN di DIY Rp2.313.141.695.784,00 dan PMA Rp4.110.436.324.224,00.

e. Masih rendahnya akses UKM terhadap permodalan di Jawa Tengah sedangkan Kredit UMKM pada bank umum dan BPR di DIY Rp 10.826.244.000.000,00.

f. Terdapatnya bencana alam dikedua daerah seperti puting beliung, longsor, gunung berapi dan gempa.

a. Kekuatan

1. DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampaunya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan DIY mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan pembangunan.

2. Kawasan, bangunan, benda, situs, dan struktur cagar budaya *(tangible asset)* dan adat istiadat, tradisi, seni pertunjukan, musik dan lagu daerah, bahasa dan aksara (*intangible asset*) merupakan aset bernilai tinggi yang masih melekat dalam kondisi ke'kini'an DIY dan menjadi daya tarik luar biasa bagi pengembangan pariwisata budaya dan sejarah.

3. Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia bahkan dalam lingkup Asia Tenggara. DIY memiliki*icon* sebagai kota pendidikan dengan dukungan keberadaan perguruan tinggi negeri dan swasta unggulan dan melimpahnya potensi SDM unggul.

4. Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali.

5. Kreativitas dan inovasi serta budaya masyarakat DIY yang dikenal ramah dan toleran serta selalu menghindari konflik dan kekerasan menjadikan DIY sebagai salah satu kota ternyaman dan *city of tolerance.*

6. DIY memiliki peranan yang besar dalam setiap periodisasi sejarah bangsa dari zaman prasejarah yang menjadikan DIY mewarisi formasi geologi dari zaman Purba, pada zaman Mataram Kuno, Mataram Islam, zaman Kemerdekaan, zaman Reformasi, hingga sekarang.

7. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan *(growth pole)* di wilayah Selatan serta dilalui jalur transportasi barat-timur.
8. DIY merupakan daerah yang masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi (KPI).
9. Indeks Pembangunan Manusia dan Derajat Kesehatan DIY maju.

b. Kelemahan

1. Posisi DIY yang merupakan *bottle neck* ditinjau dari batas wilayah yaitu dengan Samudra Indonesia dan kondisi geografis di selatan yaitu pegunungan kapur yang merupakan wilayah kurang subur.
2. *Growth pole* yang terpusat di perkotaan Yogyakarta sehingga menimbulkan arus transportasi yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan *urban sprawl* yang mengakibatkan ketimpangan wilayah dan penyediaan infrastruktur yang tidak efisien.
3. Keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif serta mahalnya harga tanah untuk penyediaan hunian /perumahan.
4. Angka kemiskinan di DIY khususnya dibeberapa wilayah masih cukup tinggi, prosentase kemiskinan DIY mencapai 16, 08 % atau ranking 24 Nasional.
5. Tingkat pengangguran terbuka di DIY masih cukup tinggi, (2006 – 2010) prosentasenya mencapai 5,69 %.
6. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat.
7. Keterbatasan potensi SDA di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 6.2 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi Daerah Istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampaunya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran Keistimewaan yang memungkinkan DIY mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan pembangunan. 2. Kawasan, bangunan, benda, situs, dan struktur cagar budaya *(tangible asset)* dan adat istiadat, tradisi, seni pertunjukan, musik dan lagu daerah, bahasa dan aksara (*intangible asset*) merupakan aset bernilai tinggi yang masih melekat dalam kondisi ke'kini'an DIY dan menjadi daya tarik luar biasa bagi pengembangan pariwisata budaya dan sejarah. 3. Yogyakarta sebagai salah satu	1. Posisi DIY yang merupakan *bottle neck* ditinjau dari batas wilayah yaitu dengan Samudra Indonesia dan kondisi geografis di selatan yaitu pegunungan kapur yang merupakan wilayah kurang subur 2. *Growth pole* yang terpusat di perkotaan Yogyakarta sehingga menimbulkan arus transportasi yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan *urban sprawl* yang mengakibatkan ketimpangan wilayah dan penyediaan infrastruktur yang tidak efisien. 3. Keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif serta mahalnya harga tanah untuk penyediaan hunian /perumahan. 4. Angka kemiskinan di DIY khususnya dibeberapa wilayah masih cukup tinggi, prosentase kemiskinan DIY mencapai 16, 08

pusat pendidikan terkemuka di Indonesia bahkan dalam lingkup Asia TenggaraDIY dengan dukungan keberadaan perguruan tinggi negri dan swasta unggulan dan melimpahnya potensi SDM yang berkualitas. 4. Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali. 5. Kreativitas dan inovasi serta budaya masyarakat DIY yang dikenal ramah dan toleran serta selalu menghindari konflik dan kekerasan menjadikan DIY sebagai salah satu kota ternyaman dan *city of tolerance.* 6. DIY memiliki peranan yang besar dalam setiap periodisasi sejarah bangsa dari zaman prasejarah yang menjadikan DIY mewarisi formasi geologi dari zaman Purba, pada zaman Mataram Kuno, Mataram Islam, zaman Kemerdekaan, zaman Reformasi, hingga sekarang. 7. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan *(growth pole)* di wilayah Selatan serta dilalui jalur transportasi barat-timur 8. DIY merupakan daerah yang masuk dalam Kawasan Pemerhati Investasi (KPI). 9. Indeks Pembangunan Manusia dan Derajat Kesehatan DIY maju.	% atau ranking 24 Nasional 5. Tingkat pengangguran terbuka di DIY masih cukup tinggi, (2006 – 2010) prosentasenya mencapai 5,69 % 6. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat. 7. Keterbatasan potensi SDA di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
PELUANG	**ANCAMAN**
1. Globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah/negara dan budaya *(borderless)*, memungkinkan DIY untuk bersaing di kancah internasional. 2. Kesepakatan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. 3. Posisi DIY didalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan menjadi satu-satunya simpul pengembangan klaster di wilayah Selatan Jawa, disamping itu DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya *hub* koridor di wilayah Selatan Jawa.	1. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana (erupsi gunung Merapi, gempa bumi, kekeringan, longsor dan angin puting beliung dll) 2. DIY tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global *(global warming)*, meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan muka air laut meninggi, meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon. 3. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan jasa dan meningkatnya arus transportasi, alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang serta

4. Kebijakan nasional yang mendukung DIY dalam program pembangunan nasional 5. DIY sebagai daerah yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modal 6. DIY dianggap sebagai tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal bagi orang luar DIY. 7. DIY dapat menjadi bagian dari warisan budaya dunia, sehingga sangat strategis menjadi pusat pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dunia, antara lain kegunungapian, kegempabumian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan lain-lain.	ancaman kerusakan kawasan hutan, *karst,* pantai, gumuk pasir dll 4. Faktor kenyamanan juga menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus bagi pengembang sehingga menyebabkan nilai tanah tidak terkendali, pada saat yang sama menyebabkan penduduk DIY tidak mampu menjangkau karena harga lahan yang tinggi dan masyarakat lokal tidak mempunyai daya beli yang bagus 5. Eksternalitas DIY (konstelasi wilayah secara regional) tidak semuanya dapat optimum misalnya Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri yang berbatasan langsung dengan DIY memiliki pertumbuhan ekonomi rendah 6. Masuknya pengaruh budaya negatif yang dibawa oleh para pendatang yang berpotensi pada lunturnya nilai-nilai kearifan lokal 7. Isu terorisme yang menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan kegiatan perekonomian khususnya pembangunan pariwisata yang mensyaratkan keamanan dan kenyamanan sebagai prasyarat utama. 8. Kondisi usaha yang kurang sehat khususnya disektor industri kecil antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah 9. Ancaman narkoba karena DIY merupakan pasar potensial dimana pengguna utamanya adalah generasimuda.

Tabel 6.3 Analisis SWOT (SWOT Analysis)

FAKTOR INTERNAL	STRENGHTS	WEAKNESSES
FAKTOR EKSTERNAL	1. DIY pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi Daerah Istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampaunya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran Keistimewaan yang memungkinkan DIY mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan pembangunan. 2. Kawasan, bangunan, benda, situs, dan struktur cagar budaya *(tangible asset)* dan adat istiadat, tradisi, seni pertunjukan, musik dan lagu daerah, bahasa dan aksara (*intangible asset*) merupakan aset bernilai tinggi yang masih melekat dalam kondisi kekinian DIY dan menjadi daya tarik luar biasa bagi pengembangan pariwisata budaya dan sejarah. 3. Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia bahkan dalam lingkup Asia TenggaraDIY memiliki Icon sebagai kota pendidikan dengan dukungan keberadaan perguruan tinggi negri dan swasta unggulan dan melimpahnya potensi SDM unggul. 4. Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali. 5. Kreativitas dan inovasi serta budaya masyarakat DIY yang dikenal ramah dan toleran serta selalu menghindari konflik dan kekerasan menjadikan DIY sebagai salah satu kota ternyaman dan *city of tolerance.* 6. DIY memiliki peranan yang besar dalam setiap	1. Posisi DIY yang merupakan *bottle neck* ditinjau dari batas wilayah yaitu dengan Samudra Indonesia dan kondisi geografis di selatan yaitu pegunungan kapur yang merupakan wilayah kurang subur 2. *Growth pole* yang terpusat di perkotaan Yogyakarta sehingga menimbulkan arus transportasi yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan *urban sprawl* yang mengakibatkan ketimpangan wilayah dan penyediaan infrastruktur yang tidak efisien. 3. Keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif serta mahalnya harga tanah untuk penyediaan hunian /perumahan. 4. Angka kemiskinan di DIY khususnya dibeberapa wilayah masih cukup tinggi, prosentase kemiskinan DIY mencapai 16, 08 % atau ranking 24 Nasional 5. Tingkat pengangguran terbuka di DIY masih cukup tinggi, (2006 – 2010) prosentasenya mencapai 5,69 % 6. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat. 7. Keterbatasan potensi SDA di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. 8. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan perempuan masih perlu ditingkatkan.

	periodisasi sejarah bangsa dari zaman prasejarah yang menjadikan DIY mewarisi formasi geologi dari zaman Purba, pada zaman Mataram Kuno, Mataram Islam, zaman Kemerdekaan, zaman Reformasi, hingga sekarang. 7. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan *(growth pole)* di wilayah Selatan serta dilalui jalur transportasi barat-timur. 8. DIY merupakan daerah yang masuk dalam Kawasan Pemerhati Investasi (KPI) 9. Indeks Pembangunan Manusia dan Derajat Kesehatan DIY maju.	
OPPORTUNITIES *1.* Globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah/negara dan budaya *(borderless)*, memungkinkan DIY untuk bersaing di kancah internasional. 2. Kesepakatan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. 3. Posisi DIY didalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan menjadi satu-satunya simpul pengembangan klaster di wilayah Selatan Jawa, disamping itu DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya *hub* koridor di wilayah Selatan Jawa. 4. Kebijakan nasional yang mendukung DIY dalam program pembangunan nasional	**STRATEGI S – O** 1. Pengoptimalan potensi wisata DIY berbasis budaya dan potensi lokal yang bersinergi dengan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sebagai pemangku kebudayaan dengan memanfaatkan kondisi globalisasi, akses AFTA dan teknologi informasi. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya. 3. Pewujudan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di ASEAN yang aman-nyaman dengan didukung etos masyarakat yang kreatif, inovatif, toleran, nir kekerasan dan menjunjung nilai-nilai kebudayaan lokal. 4. Percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua 5. Peningkatan layanan pendidikan yang melibatkan stakeholders terkait dan pengembangan fasilitas pendidikan untuk	**STRATEGI W – O** 1. Peningkatan askes sarana prasarana fisik hub koridor klaster Selatan Jawa yang merujuk pada MP3EI dalam rangka mengurai *bottle neck*geografis di DIY bagian selatan. 2. Penataan tata ruang sesuai pemanfaatan untuk mengurai masalah growth pole, urban sprawl, keterbatasan lahan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi optimalisasi investasi regional maupun global 3. Pewujudan selatan DIY sebagai potensi investasi dan peluang perdagangan internasional melalui keberadaan hub koridor Selatan Jawa (JJLS), Bandara Internasional dan Pelabuhan. 4. Pengembangan pertanian dalam arti luas berbasis kawasan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat

5. DIY sebagai daerah yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modal 6. DIY dianggap sebagai tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal bagi orang luar DIY. 7. DIY dapat menjadi bagian dari warisan budaya dunia, sehingga sangat strategis menjadi pusat pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dunia, antara lain kegunungapian, kegempabumian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan lain-lain.	mewujudkan kemandirian masyarakat. 6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY melalui investasi yang mengoptimalkan posisi sebagai simpul pengembangan klaster Selatan Jawa (MP3EI), momentum AFTA, dukungan Kebijakan Nasional serta situasi yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. 7. Pergeseran pembangunan agraris ke maritim (dari *Among Tani* ke *Dagang Layar*) dengan mewujudkan pengembangan klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim. 8. Perbaikan iklim investasi dan meningkatkan daya saing daerah untuk menarik investasi 9. Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing produk dan untuk meningkatkan ekspor 10. Penguatan sumberdaya manusia didukung pengembangan IPTEK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi	5. Pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan penyebaran aktivitas perekonomian daerah yang mewujudkan kemandirian ekonomi (entrepreunership), berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. 6. Pemanfaatan potensi SDA untuk menarik investasi global dengan memperhatikan kelaikan dan pelestarian lingkungan, 7. Penajaman kegiatan yang berorientasi pada pengurangan penduduk miskin 8. Integrasi penciptaan lapangan kerja baru berbasis teknologi dan padat karya. 9. Peningkatan harkat martabat masyarakat lebih fokus pada penanganan masalah kesejahteraan social serta penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial.
THREATS 1. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana (erupsi gunung Merapi, gempa bumi, kekeringan, longsor dan angin puting beliung dll) 2. DIY tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global *(global warming)*, meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan muka air laut meninggi, meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon. 3. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan jasa	**STRATEGI S – T** 1. Peningkatan optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta swasta dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan. 2. Meningkatkan optimalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah. 3. Peningkatan mitigasi lingkungan dalam rangka antisipasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam rangka perwujudan kemandirian pangan. 4. Pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan	**STRATEGI W – T** 1. Stabilisasi harga dan penguatan pasar dalam negeri didukung pengelolaan persaingan usaha 2. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan 3. Institusionalisasi budaya anti kemiskinan 4. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, pengarusutamaan gender dan optimalisasi perlindungan anak dan perempuan.

dan meningkatnya arus transportasi, alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang serta ancaman kerusakan kawasan hutan, *karst,* pantai, gumuk pasir dll 4. Faktor kenyamanan juga menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus bagi pengembang sehingga menyebabkan nilai tanah tidak terkendali, pada saat yang sama menyebabkan penduduk DIY tidak mampu menjangkau karena harga lahan yang tinggi dan masyarakat lokal tidak mempunyai daya beli yang bagus 5. Eksternalitas DIY (konstelasi wilayah secara regional) tidak semuanya dapat optimum misalnya Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri yang berbatasan langsung dengan DIY memiliki pertumbuhan ekonomi rendah 6. Masuknya pengaruh budaya negatif yang dibawa oleh para pendatang yang berpotensi pada lunturnya nilai-nilai kearifan lokal 7. Isu terorisme yang menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan kegiatan perekonomian khususnya pembangunan pariwisata yang mensyaratkan keamanan dan kenyamanan sebagai prasyarat utama. 8. Kondisi usaha yang kurang sehat khususnya disektor industri kecil antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah 9. Ancaman narkoba karena DIY merupakan pasar potensial dimana pengguna utamanya adalah generasimuda.	yang berwawasan lingkungan dan berbasis kebudayaan masyarakat. 5. Penggalakan keamanan lingkungan berbasis komunitas lokal (siskamling, atau semacam pecalang) dalam rangka menangggulangi ancaman budaya negatif dari luar, terorisme dan peredaran narkoba. 6. Pengembangan DIY sebagai *growth pole*Selatan Jawa yang memberi manfaat eksternalitas yang positif dan saling menguntungkan secara ekonomi dengan Provinsi yang berbatasan (Jawa Tengah; Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri). 7. Peningkatan kualitas manajemen, akes, dan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan untuk pengurangan risiko terjadinya penyakit, kecelakaan serta akibat bencana	

Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan.

Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI:Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru

MISI I: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.	Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budayadari 30%menjadi 70%.
2. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.	1. Melek huruf masyarakat meningkat.	Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat terdidik.	Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49 menjadi 95
	2. Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dari 9,2 menjadi 12 serta peningkatan Daya Saing Pendidikan
	3. Daya Saing Pendidikan meningkat.	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalammengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.	Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dari 0% menjadi 40%
3. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku	Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 74,18

MISI I: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
		hidup bersih dan sehat.	

MISI II: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
1. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	1. Pendapatan masyarakat meningkat.	Meningkatnya produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.	Meningkatkan Pendapatan perkapita pertahun dari Rp.6,8 jt menjadi Rp. 8,5 jt
	2. Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indek Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4445
	3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.	Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.
2. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	1. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 orang menjadi 4.561.646 orang dan jumlah

MISI II: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
			wisatawan mancanegara dari 202.518 orang menjadi 272.162 orang
	2. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergitas antar pelaku wisata.	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dari 1,9 hari menjadi 2,60 hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara dari 2,04 hari menjadi 2,69 hari

MISI III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.
	2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.	Mempertahankan Opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

MISI IV : Memantapkan prasarana dan sarana daerah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
1. Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses	Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan	Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di

MISI IV : Memantapkan prasarana dan sarana daerah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
	masyarakat di pedesaan.	meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalulintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.
2. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.	1. Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.	Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan dari 2% menjadi 15,72%.
	2. Pemanfaatan Ruang terkendali.	Pemanfaatan ruang mengacu rencana tataruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 64,75%

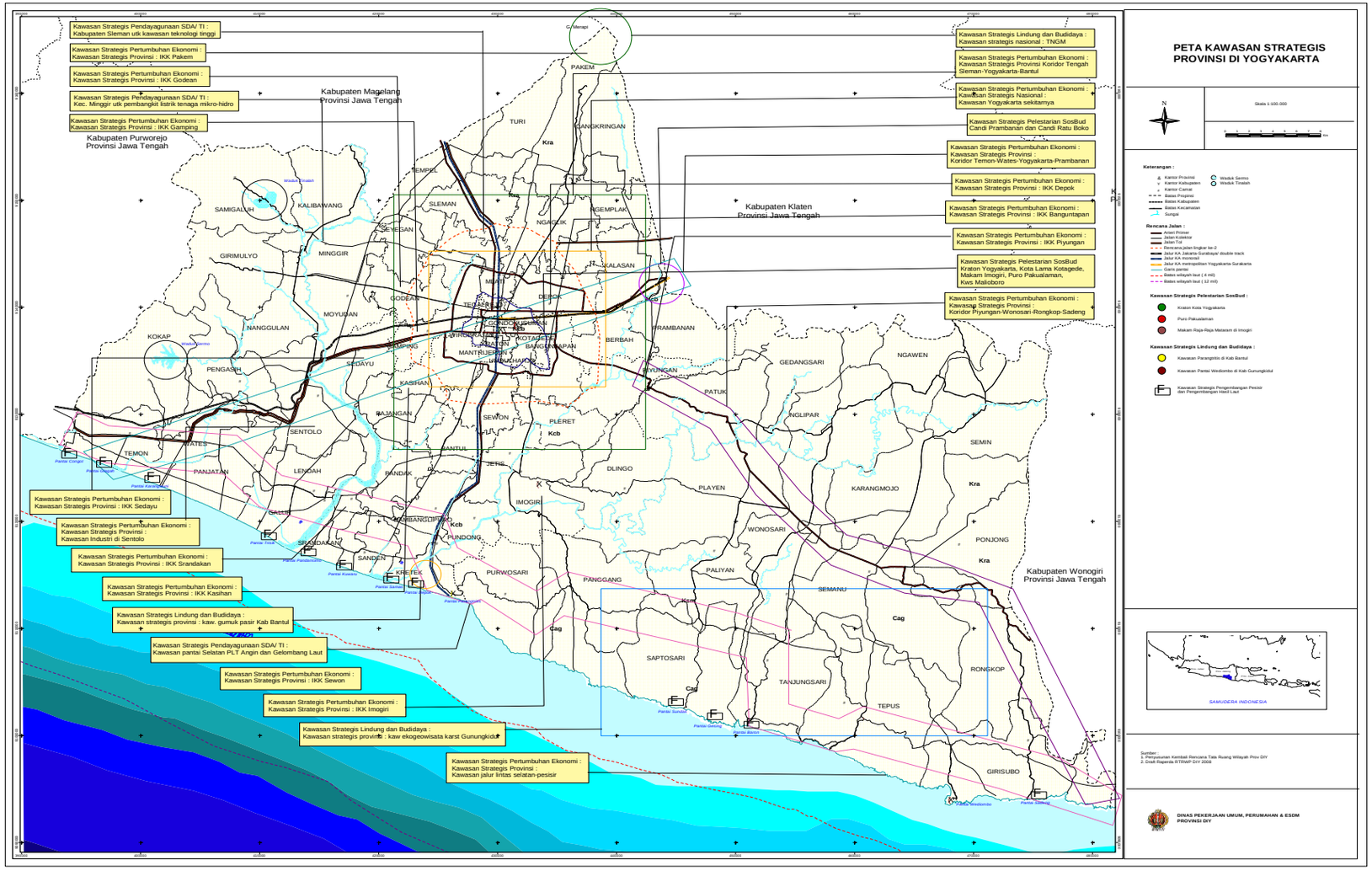

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2010

Gambar 6.2 Kawasan Strategis DIY

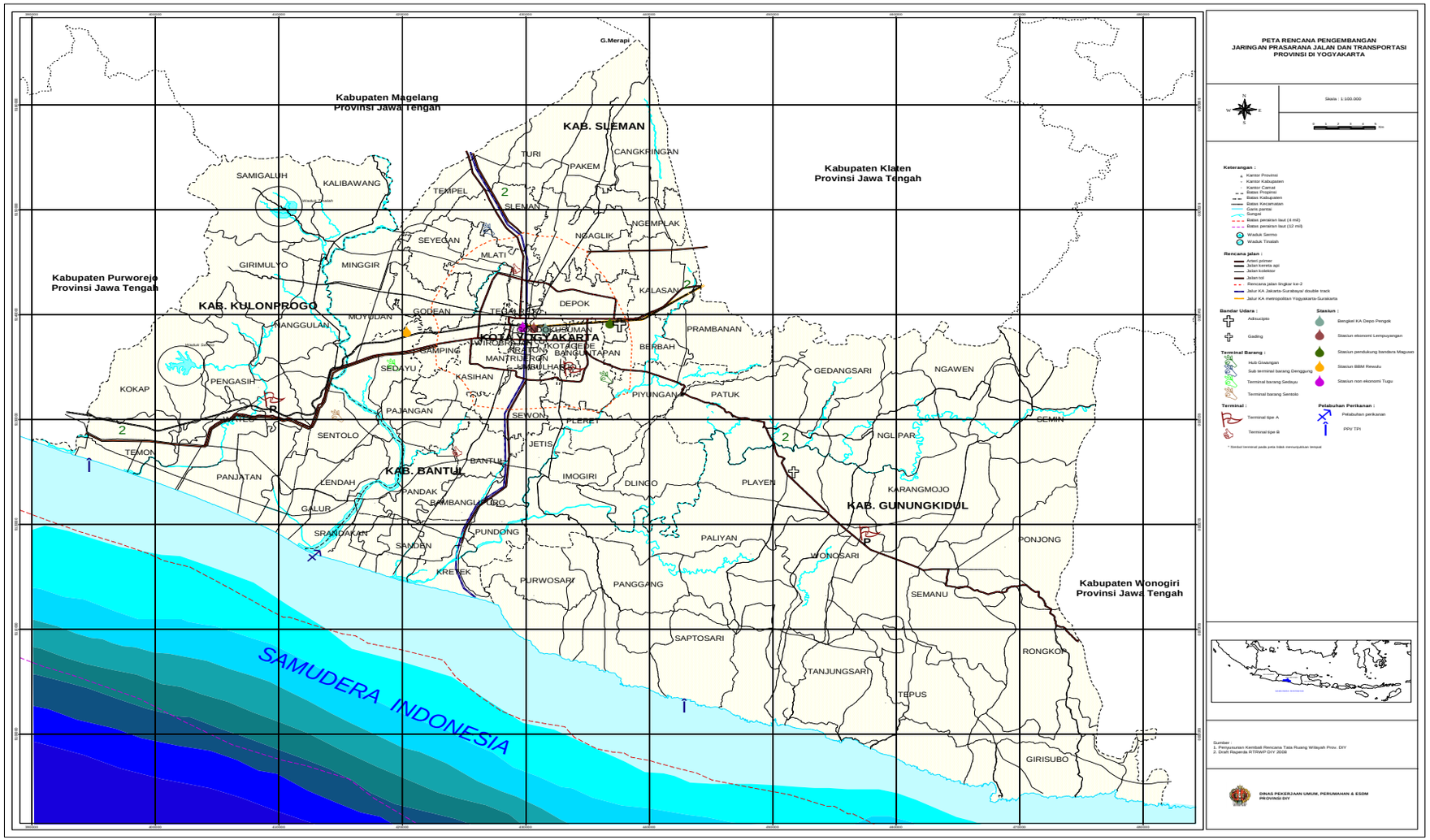

Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2010

Gambar 6.3 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Jalan dan Transportasi

Penataan Transportasi DIY

Permasalahan transportasi khususnya Transportasi Perkotaan di Perkotaan Yogyakarta, menjadi prioritas untuk segera ditangani dalam lima tahun ke depan. Sudah menjadi komitmen bersama, bahwa untuk penyelesaian permasalahan transportasi di Perkotaan yogyakarta, dilakukan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi di jalan.

Dalam lima tahun ke depan, pembenahan angkutan umum massal menjadi tujuan utama dan didukung oleh adanya kebijakan dari kegiatan-kegiatan pendukung untuk memperkuat keberadaan angkutan umum dan berusaha untuk menarik minat masyarakatmenggunakan angkutan umum. Integrasi layanan menjadi faktor kunci, dimana diperlukan pembangunan dan penyediaan *transfer point* dengan konsep pa*rk and ride* untuk memadukan antara layanan angkutan umum dengan penggunaan kendaraan pribadi.Kondisi saat ini (*baseline*), layanan *transfer point* yang menggunakan konsep *park and ride*, baru ada di Terminal Prambanan dan Areal Parkir Ngabean. Llima tahun kedepan, target pembangunan TOD (*transyt oriented development*) dan *transfer point* direncanakan tersebar di beberapa lokasi potensial antara lain : JEC, Kridosono dan areal di sekitar ringroad yang merupakan pintu masuk menuju Perkotaan Yogyakarta.

Selain pembangunan *transfer point*/TOD, beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan adalah sebagai berikut :

1. Pemasangan ATCS dengan dukungan *bus priority* untuk memudahkan pergerakan angkutan umum di persimpangan;
2. Penataan manajemen dan rekayasa lalulintas berbasis kawasan, dimana terdapat 7 kawasan di Perkotaan Yogyakarta yang akan ditata, yakni :
   - Malioboro;
   - Godean – Jati Kencana;
   - Terban – Jalan. Solo;
   - Kraton;
   - Kranggan;
   - Seturan, dan
   - Kota Gede.

Penerapan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat, baik angkutan Perkotaan maupun angkutan AKDP yang berfungsi sebagai *feeder*.

Dengan asumsi konsep sistem transportasi terpadu belum diwujudkan, konsep pengelolaan angkutan umum yang akan dilaksanakan berbasis pada konsep layanan "*buy the service*" dimana beban operasional menjadi beban pemerintah dan pihak operator hanya memberikan layanan sesuai dengan kontrak dan persyaratan yang telah disepakati. Dalam 5 tahun kedepan terdapat 11 rute baru dan 154 armada bis untuk melayani pergerakan masyarakat di Perkotaan Yogyakarta. 11 rute dengan 154 armada bis ini akan menggantikan layanan angkutan umum yang ada saat ini, dengan tahapan awal layanan akan dimulai pada tahun 2015. Secara rinci tahapan pelaksanaan pengoperasian layanan angkutan umum perkotaan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.5 Tahapan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan

Asumsi		2015	2016	2017
Jumlah Jalur		11	11	11
Load Factor	%	38.57	40.57	42.57
Jumlah armada	bis	107	124	154
Kecepatan	km/jam	23 – 25	23 – 24	27
Headway	menit	10	5 – 10	5 – 7
B.O.K	Rp. (000)	59,000,000	69,000,000	80,000,000
Pendapatan	Rp. (000)	30,000,000	36,000,000	44,000,000

Selisih antara pendapatan dan BOK yang harus disediakan, yang meningkatkan dari tahun 2015 ke tahun 2017, dikarenakan bertambahnya jumlah armada yang harus disediakan dan target *load factor* yang harus dipenuhi. Tahapan terakhir yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah 11 jalur pelayanan dengan 154 dan waktu tunggu (*headway*) rata-rata adalah 5 – 7 menit. Dengan kondisi layanan seperti pada tahun 2017 dan peningkatan jumlah *load factor* yang ada, maka selisih antara pendapatan dan BOK akan terus berkurang dan diharapkan mecapai impasnya pada tahun 2019. Namun demikian, sistem buy the service tersebut di atas akan dievaluasi ketika perjanjian dengan PT. JTT berakhir pada tahun 2015, sehingga perangkaan BOK dan proyeksi pendapatan pada tabel di atas akan disesuaikan dengan hasil evaluasi.

Sedangkan untuk menjangkau layanan di luar wilayah perkotaan, maka layanan angkutan umum AKDP (Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi) akan diberdayakan dan dijadikan sebagai *feeder* (jaringan ranting) dari angkutan perkotaan yang ada. Integrasi dari jenis layanan ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi *transfer point*/TOD sebagimana yang telah dijelaskan diatas.

Keberhasilan dari layanan angkutan umum, salah satu indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur kinerja angkutan umum, adalah indikator keselamatan angkutan umum yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam kontrak layanan antara pemerintah dan penyedia jasa.

Fungsi transportasi sebagai urat nadi pembangunan, menunjukkan bahwa transportasi berperan sebagai mata rantai dalam mengerakkan roda pembangunan antar wilayah. Beberapa kawasan strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan terhubung dengan baik jika ada penguatan terhadap sektor transportasi baik transportasi jalan maupun transportasi jalan rel. Kawasan seperti industri pasir besi, bandara, pelabuhan dan kawasan wisata lainnya di pesisir selatan Daerah istimewa Yogyakarta akan dihubungkan melalui penguatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jaringan jalan baru dengan dukungan jaringan jalan rel.

Peningkatan dan pemerataan Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, di samping konsumsi domestik dan belanja pemerintah. Untuk meningkatkan nilai investasi di DIY, maka ditempuh arah kebijakan yaitu perbaikan iklim penanaman modal melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi penanaman modal, mendorong pesebaran penanaman modal di kabupaten/kota serta pemberian fasilitas dan kemudahan perijinan.

1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Penananam Modal

   Penguatan kelembagaan dan koordinasi penanaman modal dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) dan peningkatan koordinasi penanganan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) sebagai berikut:

a. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan dengan memperbaiki pelayanan, kepastian, kecepatan, dan kemudahan pemberian izin di tingkat provinsi serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu antara tingkat provinsi dengan Kabupaten/Kota dan koordinasi antarsektor. Saat ini, tugas penyelenggaraan layanan PTSP sudah diwadahi dalam lembaga Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu (GP2T) pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY (BKPM DIY).

b. Peningkatan koordinasi penanganan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dilakukan dengan membentuk tim kerja KPS lintas sektor yang beranggotakan instansi pengampu sektor terkait dengan peluang investasi yang akan dikerjasamakan.

2. Persebaran Penanaman Modal

Persebaran investasi di DIY masih belum merata. Secara regional, investasi nampaknya masih terkonsentrasi di Sleman dan Kota dengan porsi yang mencapai sekitar 90 % baik untuk PMDN maupun PMA. Sementara di tiga wilayah lain hanya memiliki porsi 11%untuk PMDN, sementara untuk PMA bahkan kurang dari 10%. Hal ini tentu membawa dampak kesenjangan ekonomi antar wilayah. Secara teori pengelompokan investasi (aglomerasi) semacam ini sangat mungkin terjadi. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan aglomerasi, antara lain daya dukung infrastruktur, SDM, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pemerataan investasi terutama di daerah tertinggal meliputi:

c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.

d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang masih tertinggal

e. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.

f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah

g. Pengembangan kawasan bandar udara dan kawasan industri di Kulon Progo dan pengembangan kawasan pariwisata unggulan di Gunung Kidul

Sebagai acuan dalam perencanaan pesebaran penanaman modal di DIY, digunakan 3 (tiga) acuan penanaman modal di DIY yaitu meliputi peta pesebaran ketimpangan regional, peta perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata yang telah ditetapkan dalam RIPPARDA DIY 2013-2025 (Perda No. 1 tahun 2012), dan peta potensi investasi strategis seperti kawasan Pembangunan Bandara Baru dan Kawasan Industri di Kulon Progo.

Untuk mengembangkan investasi dan menarik investor terutama di kabupaten tertinggal dalam lima tahun kedepan akan dilakukanmelalui tiga upayayang disebut sebagai daya tarik, daya tahan, dan daya saing. Komponen dari masing-masing strategi tersebut sebagai berikut:

1. Daya tarik

   Peluang investasi harus dikomunikasikan (dipasarkan) pada investor potensial. Strategi komunikasi harus lebih mengkomunikasikan potensi keuntungan yang bisa dicapai investor. Metode pemasaran harus memanfaatkan berbagai media dan ditambah pendekatan persuasi.

2. Daya tahan

   Strategi purna jual yaitu dengan mengawal perkembangan investor. Selain itu, stabilitas wilayah, termasuk dalam hubungan perburuhan, harus dapat selalu dijaga.

3. Daya saing

   Peningkatan daya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja local dan kualitas infrastruktur serta dengan membuka akses pasar dengan menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dengan mengundang buyer potensial. Untuk menyelenggarakan ini, tidak perlu terpaku pada produk konvensional, tetapi mengenalkan produk-produk baru misalnya pameran potensi produk pertambangan, produk perikanan.

Peningkatan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam lima tahun ke depan, fasiliasti kemudahan perijinan dan pemberian insentif dalam penanaman modal telah diatur dalam Perda No 4 tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa:

1. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
2. percepatan dan kemudahan pemberian perizinan;
3. pemberian fasilitasi promosi investasi;
4. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
5. pemberian advokasi; dan
6. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Pemberian insentif atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi kriteria dan ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. menyerap tenaga terdidik, dan tenaga kerja lokal paling kurang 40% (empat puluh persen);
2. menyerap sumber daya lokal;
3. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.
5. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
6. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
7. melakukan alih teknologi;
8. melakukan industri pionir;
9. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
10. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
11. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pembangunan Pertanian Terpadu

Problem pembangunan pertanian tidak terlepas dari persoalan konversi lahan pertanian produktif dan kerentanan SDM pertanian. Konversi lahan pertanian produktif menjadi masalah serius dengan laju penurunan sebesar 0,27% per tahun untuk lahan sawah. Meskipun jumlah tenaga kerja sektor pertanian sangat dominan dalam struktur tenaga kerja DIY, namun persoalan kemiskinan masih menjadi isu yang harus dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah pedesaan. Kepemilikan lahan pertanian yang sempit dan gejala degradasi lahan juga senantiasa membayangi rendahnya kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perlu upaya untuk merevitalisasi sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sejumlah permasalahan di atas akan mendorong kegiatan sektor pertanian mengarah kepada usaha revitalisasi pertanian melalui: peningkatan intensifikasi lahan, diversifikasi produk yang bernilai ekonomis tinggi, dan industrialisasi bidang pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan pertanian di wilayah DIY perlu dikonstruksikan dengan berbasis teknologi. Hal ini dikarenakan kecenderungan stagnasi produktivitas lahan pertanian lebih disebabkan kurang berkembangnya teknologi, terbatasnya alih teknologi, serta rendahnya penggunaan dan akses terhadap teknologi. Konstruksi pembangunan pertanian berbasis teknologi tersebut akan dikembangkan dari hulu (proses produksi) hingga ke hilir (pengolahan hasil) yang nantinya berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan desain akselerasi pembangunan pertanian selama lima tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan perbenihan

   Benih menjadi salah satu sarana penting dalam proses produksi pertanian. Benih unggul diharapkan akan mendukung peningkatan produksi yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pengembangan benih unggul yang terintegrasi adalah melalui Jogja Benih. Optimalisasi peran Jogja Benih yang sudah ditetapkan melalui Pergub DIY Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta diharapkan mampu mengatasi persoalan perbenihan di tingkat petani, adopsi teknologi benih unggul dari lembaga penelitian atau Perguruan Tinggi, serta menyelamatkan sumberdaya perbenihan atau plasma nutfah lokal unggul. Pengembangan kelembagaan perbenihan menempatkan Jogja Benih pada posisi strategis yaitu sebagai wadah koordinasi seluruh kegiatan dan pelaku usaha perbenihan baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta, maupun masyarakat di DIY. Dengan demikian, secara kelembagaan Jogja Benih merupakan koordinator kegiatan perbenihan dengan tiga fungsi utama, yaitu (1) sebagai penyedia layanan informasi, (2) wadah sosialisasi dan diseminasi, dan (3) pengembangan produksi benih komoditas unggulan.

   Selain itu, pengembangan perbenihan di tingkat petani menjadi prioritas dalam meningkatkan produksi pertanian melalui benih unggul, sertifikasi perbenihan, penguatan permodalan serta penguatan sarana prasarana perbenihan, dan penguatan kelembagaan petani dalam memperoleh benih yang unggul dan bermutu.

2. Manajemen budidaya dari hulu hingga ke hilir

   Strategi manajemen budidaya pertanian dari hulu hingga ke hilir menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Pengembangan ekstensifikasi pertanian difokuskan pada pemanfaatan lahan potensial (lahan kering dan lahan

marjinal). Orientasi pengembangan pertanian melalui intensifikasi dilakukan dengan: teknik olah tanah yang tepat, penggunaan benih varietas unggul, pemanfaatan pupuk secara berimbang, pengairan (jaringan irigasi, kelembagaan P3A, teknologi pemanfaatan air), pengendalian hama penyakit terpadu, serta penanganan panen dan pasca panen yang tepat untuk mengurangi kehilangan hasil panen. Adapun untuk meningkatkan daya saing produk pertanian diperlukan pengolahan produk hasil pertanian agar memiliki nilai tambah sesuai kebutuhan pasar serta dilakukan upaya promosi dan pemasaran, serta pendampingan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi dalam rangka pencapaian ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, diperlukan upaya rekayasa teknologi diantaranya: pengembangan sistem informasi iklim, penggunaan alat mesin pertanian secara aplikatif, pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal, dan teknologi budidaya lainnya. Untuk memperkuat manajemen budidaya dari hulu hingga hilir diperlukan regulasi terkait dengan pengendalian pola tanam melalui sosialisasi kalender tanam secara berkelanjutan serta optimalisasi zonasi pertanian (pengembangan pertanian berbasis kawasan). Untuk itu diperlukan sinergitas penanganan manajemen bubidaya yang berkelanjutan antara berbagai pihak, baik lintas sektoral maupun lintas kewenangan (Pusat, Daerah, Kabupaten dan stakeholder lainnya).

3. Pengembangan pertanian ramah lingkungan

   Pertanian ramah lingkungan adalah sistem manajemen produksi terpadu yang menekan penggunaan pupuk buatan, pestisida kimia, dan menekan pencemaran udara, tanah, serta air. Pengembangan pertanian ramah lingkungan dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari bibit, cara budidaya, pengairan, pengendalian hama, hingga pengolahan pasca panen.

   Pengembangan pertanian ramah lingkungan di DIY yang sudah dilakukan meliputi pemanfaatan bahan organik untuk pertanian mulai dari bibit yang bukan merupakan hasil rekayasa genetic, penggunaan pupuk organik, pemanfaatan agensia hayati dalam pengendalian hama terpadu, hingga pengembangan Integrated Farming yang mengintegrasikan pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan dalam kawasan tertentu yang mengedepankan zero waste (nihil limbah).

   Integrated Farming (IF) merupakan keseluruhan pengelolaan usahatani secara terpadu untuk mengusahakan produksi yang efisien dan menguntungkan sekaligus ramah lingkungan. IF merupakan usahatani yang memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

   a. Meminimalkan dampak negatif pertanian modern;
   b. Meminimalkan pencemaran oleh bahan kimia beracun (pupuk, pestisida dan herbisida);
   c. Mencegah resistensi hama;
   d. Menghindari berkurangnya keragaman spesies hewan dan tumbuhan akibat pertanian monokultur;
   e. Mengurangi ketergantungan pada input luar tak-terbarukan;
   f. Meningkatkan efisiensi usahatani melalui minimisasi input luar.

4. Penguatan SDM

   Penguatan SDM pertanian dilakukan melalui strategi penguatan peran generasi muda pertanian dalam mengembangkan kawasan pertanian

dan penguatan kelembagaan pertanian. Adapun sejumlah kegiatan untuk mendukung kegiatan tersebut adalah: pelatihan, fasilitasi permodalan, gerakan Sarjana Membangun Desa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pola kemitraan, serta diklat kewirausahaan bagi generasi muda. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas SDM petani yang sudah ada dilakukan dengan diklat budidaya, Sekolah Lapang, fasilitasi teknologi, serta pelatihan pengolahan hasil pertanian. Selain itu, penumbuhan SDM pertanian juga ditumbuhkan secara sinergis melalui aspek kebudayaan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan termasuk institusi Kesultanan/Kadipaten sebagaimana mengadopsi keberhasilan pembangunan pertanian di Thailand dengan pendekatan kultural.

5. Akses permodalan

Penanganan permasalahan pembiayaan disektor pertanian akan dilakukan melalui beberapa skema berdasarkan skala usaha, yaitu: untuk skala usaha pemula akan dilakukan melalui skema hibah atau dana bergulir. Sedangkan untuk skala usaha Gapoktan yang *feasible* namun non-*bankable*, skema keuangannya berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), KKPE, dan sejenisnya. Untuk skala usaha yang feasible dan bankable, akan diberikan melalui skema kredit perbankan reguler.

Untuk mendorong akses permodalan, pemerintah juga memfasilitasi dalam hal pendampingan yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan mitra lainnya seperti Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Adapun untuk mengatasi persoalan kerentanan petani/nelayan dalam mengakses permodalan, akan dilakukan langkah strategis berupa desain pembentukan kelembagaan permodalan di sektor pertanian yang berperan sebagai embrio bank pertanian yang nantinya akan dikaji secara teknis. Hasil kajian tersebut akan memberikan desain kebijakan terhadap pembentukan kelembagaan tersebut yang nantinya akan mendukung perolehan akses modal bagi petani/nelayan berupa dana talangan, mampu mendukung peningkatan produksi pertanian/perikanan, dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

Kelembagaan yang berperan sebagai embrio bank pertanian tersebut diharapkan bisa berperan optimal pada tahun 2016, pasca dilakukan kajian terlebih dahulu dan dukungan kebijakan yang memadai. Adanya lembaga tersebut diharapkan mampu mengatasi sejumlah persoalan pelik pada sektor pertanian, seperti : kebutuhan akses pemenuhan modal dalam kebutuhan saprodi saat musim tanam, kebutuhan dana talangan bagi petani tembakau/perkebunan lainnya, kebutuhan modal kerja bagi nelayan, permodalan bagi peternak, maupun persoalan akses modal lainnya pada sektor pertanian.

Tabel 6.6 Langkah dan Strategi Yang Direkomendasikan dalam Penanganan Permasalahan di Sektor Pertanian

Langkah Strategis yang direkomendasikan	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pengembangan Perbenihan a. Penguatan kelembagaan Jogja Benih b. Pengembangan perbenihan di tingkat petani: • penyediaan benih unggul • sertifikasi perbenihan • penguatan permodalan • penguatan sarana prasarana	v	v	v	v	v

Langkah Strategis yang direkomendasikan	2013	2014	2015	2016	2017
perbenihan • penguatan kelembagaan petani dalam memperoleh benih yang unggul dan bermutu					
2. Manajemen budidaya dari hulu hingga ke hilir a. pengembangan ekstensifikasi pertanian difokuskan pada pemanfaatan lahan potensial b. pengembangan pertanian melalui intensifikasi: • teknik olah tanah yang tepat • penggunaan benih varietas unggul • pemanfaatan pupuk secara berimbang • pengairan (jaringan irigasi, kelembagaan P3A, teknologi pemanfaatan air) • pengendalian hama penyakit terpadu • penanganan panen dan pasca panen yang tepat untuk mengurangi kehilangan hasil c. peningkatan daya saing produk pertanian • pengolahan produk hasil pertanian agar memiliki nilai tambah • promosi dan pemasaran d. rekayasa teknologi: • pengembangan sistem informasi iklim • penggunaan alat mesin pertanian secara aplikatif • pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal dan teknologi budidaya lainnya	v	v	v	v	v
3. Pengembangan pertanian ramah lingkungan a. penggunaan bibit unggul lokal b. penggunaan pupuk organik c. pemanfaatan agensia hayati dalam pengendalian hama terpadu d. pengembangan *Integrated Farming*	v	v	v	v	v
4. Penguatan SDM a. penguatan peran dan minat generasi muda pertanian dalam mengembangkan kawasan pertanian dan penguatan kelembagaan pertanian: • pelatihan • fasilitasi permodalan • gerakan Sarjana Membangun Desa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pola kemitraan • diklat kewirausahaan bagi generasi muda b. meningkatkan kapasitas SDM petani yang sudah ada dilakukan dengan:	v	v	v	v	v

Langkah Strategis yang direkomendasikan	2013	2014	2015	2016	2017
• diklat budidaya • Sekolah Lapang • fasilitasi teknologi • pelatihan pengolahan hasil pertanian. c. penumbuhan SDM pertanian melalui aspek kebudayaan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan termasuk institusi Kesultanan/Pakualaman					
5. Akses permodalan penanganan permasalahan pembiayaan di sektor pertanian akan dilakukan melalui: • skema bantuan hibah • penguatan modal dengan skema dana bergulir • kerjasama dengan perbankan melalui KUR, KKPE, dan KUPS. • desain kebijakan untuk menyokong permodalan bagi petani dalam bentuk unit kelembagaan permodalan bagi petani (embrio bank pertanian)	v	v	v	v	v

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede

Kotagede merupakan salah satu kawasan cagar budaya di DIY yang berada dalam dua wilayah administratif, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Menurut SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, Kotagede berada di bawah kewenangan Provinsi. Kotagede merupakan salah satu pilar keistimewaan Yogyakarta dan visi DIY menjadi pusat kebudayaan terkemuka pada tahun 2025. Kelahiran kembali budaya-budaya luhur Mataram atau 'rennaisans' Mataram sebagaimana terkandung dalam visi dan misi Gubernur DIY ditengarai akan terjadi di kawasan ini.

Berdasarkan karakter peninggalannya, maka posisi Kotagede sangat strategis, karena berada pada segitiga emas peninggalan sejarah purbakala religius dengan titik point antara Borobudur (tempat ziarah khusus umat Budha), Prambanan (tempat ziarah khusus umat Hindu) dan Kotagede (peninggalan Mataram Islam) dan ketiga-tiganya adalah menjadi bukti kejayaan Mataram Klasik dan Islam. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam pernah beribukota di Kotagede. Bukti-bukti peninggalan Mataram Islam masih banyak dijumpai di Kotagede.

Kotagede sebagai kawasan dengan cagar budaya yang bernilai universal yang unggul potensial untuk dilestarikan sehingga menjadi cagar budaya tataran dunia (*World Heritage*). Untuk itu Kotagede haruslah memiliki sistem pelindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kotagede tidak hanya terkait dengan pelestarian cagar budaya bendawinya, tetapi juga terkait kesenian, penataan infrastruktur, transportasi, pengembangan industri, pariwisata, sehingga harus melibatkan pemangku kepentingan dari lintas sektor. Pelestarian Kotagede diharapkan dapat menjadikan Kotagede lestari dan masyarakatnya dapat menciptakan kesejahteraan hidupnya dengan menghidupkan kotanya melalui program lintas sektoral. Kotagede yang setidaknya mencakup lima desa/kelurahan pada hakekatnya merupakan satu kesatuan entitas.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dan rehabilitasi atas Kotagede dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Dep. PU dan Cipta Karya, DPU / KImpraswil, Dewan Pelestarian Pusaka UGM, *Java Reconstruction Fund* , BP3 sejak tahun 2002. Pada tahun 2002 melakukan studi DED pelestarian Komplek Masjid dan Makam Mataram Kotagede, pada tahun itu juga ada rehabilitasi masjid dan lingkungannya.Pada tahun 2005 dilakukan rehab beberapa bangsal di kompleks masjid dan makam Kotagede. Pada tahun 2008 dilaksanakan rehabilitasi pasca gempa.

Betapa pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pelestarian Kotagede, Pemerintah DIY pernah mengadakan kesepakatan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dalam Naskah MOU pada tahun 2011.

Pada tahun 2013 akan dilakukan penataan kawasan Dondongan dan Watugateng, serta sosialisasi pelaksanaan penataan tersebut. Berikut rencana pelestarian Kawasan Cagar Budaya hingga lima tahun yang akan datang

Tabel 6.7 Rencana Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Hingga 5 (Lima) Tahun Ke Depan

KEGIATAN	STAKEHOLDER	TAHUN KE				
		1	2	3	4	5
Penguatan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kotagede	Bappeda, Disbud, Biro Org, Kades/Lurah, Camat	●	●			
Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Masyarakat dalam Penyelamatan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya	Badan Pelestarian Cagar Budaya, Disbud, Swasta, PT	●	●			
Penyelamatan dan penataan cagar budaya kawasan inti Kotagede	Badan Pelestarian Cagar Budaya, Disbud, lembaga pendidikan	●	●	●	●	
Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya Kotagede keseluruhan	Badan Pelestarian Cagar Budaya, Disbud, lembaga pendidikan	●	●	●	●	●
Perumusan dan Penerapan Kebijakan Karakter KCB	Badan Pelestarian Cagar Budaya, Disbud,	●	●	●	●	●
Pengembangan Lingkungan yang mendukung Karakter KCB	DPU, Dishubkominfo, BLH, Disbud	●	●	●	●	●
Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Masyarakat dalam Pengembangan Industri Kerajinan	Disperindagkop, BKPM		●	●	●	
Peningkatan Kapasitas dan Dukungan Masyarakat dalam Penyelamatan dan Pengembangan Seni dan Budaya	Disbud, Disparda		●	●	●	
Peningkatan Prasarana dan Manajemen Transportasi	Dishubkominfo, DPU		●	●	●	
Peningkatan Sarana Prasarana dan Manajemen Drainasi dan Pembuangan Limbah	DPU, BLH		●	●	●	
Peningkatan kapasitas dan dukungan masyarakat dalam pengembangan Produk dan Pemasaran Wisata	Disparda	●	●	●		

6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Perencanaan lima tahunan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 selain memfokuskan pada aspek sektoral yang terangkum dalam tiga aspek yakni: kesejahteraan rakyat, daya saing dan pelayanan umum, juga memfokuskan dan menguraikan secara kewilayahan. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai satu kota dan empat kabupaten yakni: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul, dan masing-masing daerah mempunyai keunikan karakteristik pembangunannya masing-masing.

Arah pembangunan wilayah yang ditetapkan pada hakekatnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.Apabila tingkat pertumbuhan antar wilayah yang kurang seimbang terus berlanjut, maka dikawatirkan pada masa-masa mendatang akan menimbulkan berbagai persoalan yang cukup serius, yaitu:

1. Makin tajamnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antar kecamatan, dimana kecamatan yang tumbuh pesat akan semakin sejahtera dan kecamatan yang lemah kian tertinggal yang akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial.
2. Menumpuknya kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, yang selanjutnya bisa mengganggu keseimbangan lingkungan maupun daya dukung lahan.
3. Tidak meratanya penyebaran penduduk antar kecamatan: meningkatnya migrasi penduduk ke wilayah yang sangat maju pertumbuhan ekonominya, namun jumlah pengangguran kian bertambah di wilayah yang lamban pertumbuhan ekonominya.
4. Adanya lahan kosong di wilayah yang potensial akibat tidak tergarap secara optimal.
5. Tidak meratanya pembangunan prasarana dan sarana wilayah, baik dalam bentuk transportasi, energi, komunikasi, air bersih, fasilitas ekonomi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur wilayah lainnya. Kondisi seperti ini juga tidak kondusif bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.
6. Kemungkinan timbulnya berbagai persoalan lainnya.

Disamping itu terdapat perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan baik berdasarkan kondisi fisik wilayah maupun potensi yang timbul sebagai efek pengganda berkembangnya wilayah. Untuk mengantisipasi agar berbagai persoalan di atas tidak menjadi kenyataan, maka harus merancang strategi pembangunan wilayah yang berorientasi pada eksploitasi potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan diselaraskan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka tidak hanya diperlukan kebijakan-kebijakan fundamental, melainkan juga berbagai kebijakan afirmatif *(affirmatif policy)* yang signifikan.

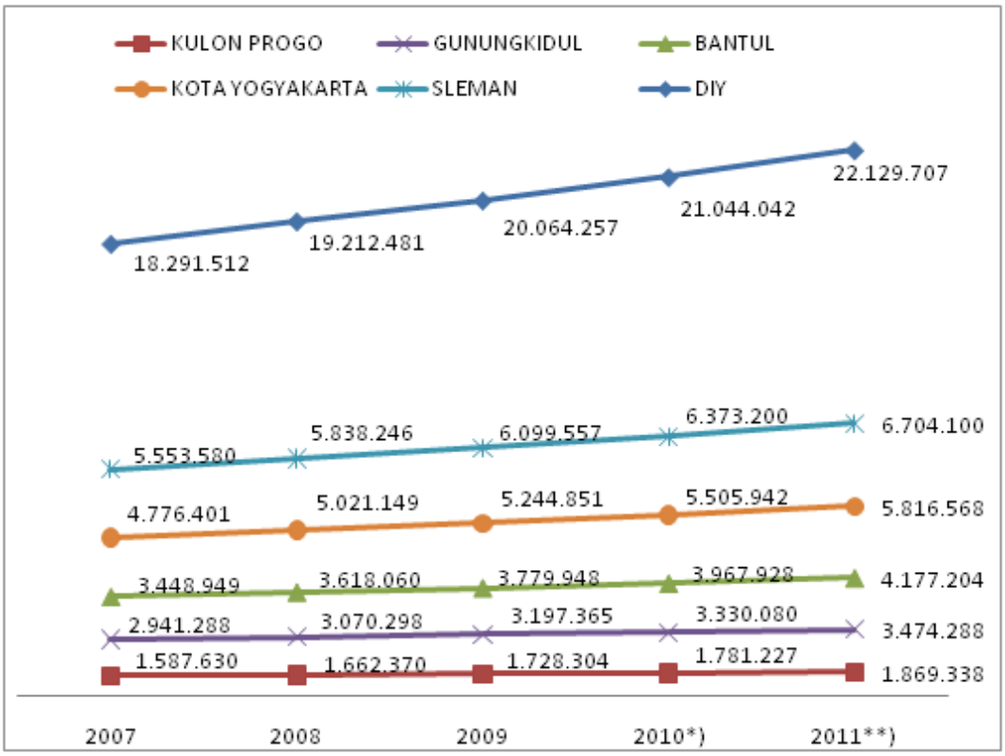

Sumber: BPS Provinsi DIY (2007-2011)

**angka sementara*

***angka sangat sementara*

Gambar 6.4 PDRB Kabupaten-Kota dan DIY atas Harga Konstan 2000 (Tahun 2007-2011) dalam Juta Rupiah

Secara umum, dinamika perekonomian di seluruh kabupaten dan kota mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan output daerah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh PDRB riil Kabupaten Sleman meningkat dari Rp5,553 trilyun di tahun 2007 menjadi Rp6,74 trilyun di tahun 2011, sementara itu PBRB riil Kabupaten Kulon Progo naik dari Rp1,587 trilyun menjadi Rp1,869 trilyun pada periode yang sama. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi PDRB dari tahun 2007–2011 peringkatnya konsisten antar Kabupaten-Kota. Proporsi posisi tertinggi dibandingkan PDRB DIY pada tahun 2011 adalah Sleman (30,29 persen), Kota Yogyakarta (26,28 persen), Bantul (18,88 persen), Gunungkidul (15,70 persen) dan Kulon Progo (8,45 persen).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satu indikator yang paling umum dan paling sederhana adalah dengan melihat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

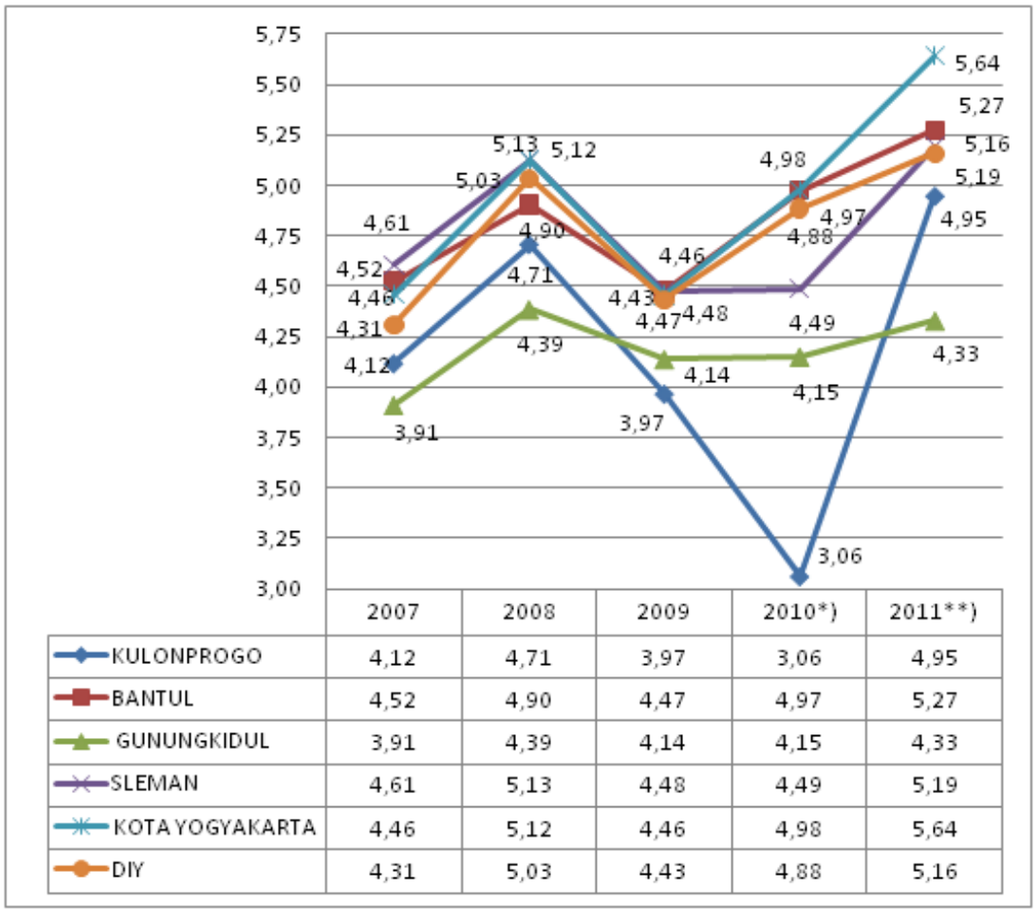

	2007	2008	2009	2010*)	2011**)
KULONPROGO	4,12	4,71	3,97	3,06	4,95
BANTUL	4,52	4,90	4,47	4,97	5,27
GUNUNGKIDUL	3,91	4,39	4,14	4,15	4,33
SLEMAN	4,61	5,13	4,48	4,49	5,19
KOTA YOGYAKARTA	4,46	5,12	4,46	4,98	5,64
DIY	4,31	5,03	4,43	4,88	5,16

Sumber: BPS Provinsi DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota dan DIY Tahun 2007-2011

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, secara umum perekonomian seluruh Kabupaten dan Kota mengalami pertumbuhan yang positif tapi pertumbuhan di tiap daerah mengalami dinamika kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi meskipun tetap tumbuh positif. Berdasarkan gambar diatas maka dapat terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta dengan nilai 5,64, disusul oleh Bantul sebesar 5,27 dan Sleman dengan 5,19. Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 dan Gunungkidul 4,33 dibandingkan dengan pertumbuhan DIY yang mencapai 5,16. Secara umum pada tahun 2009 terdapat penurunan tingkat pertumbuhan di seluruh kabupaten dan kota yang kemudian mengalami peningkatan di tahun berikutnya kecuali pada Kabupaten Kulon Progo yang turun dari 3,97 (2009) menjadi 3,64 (2010).

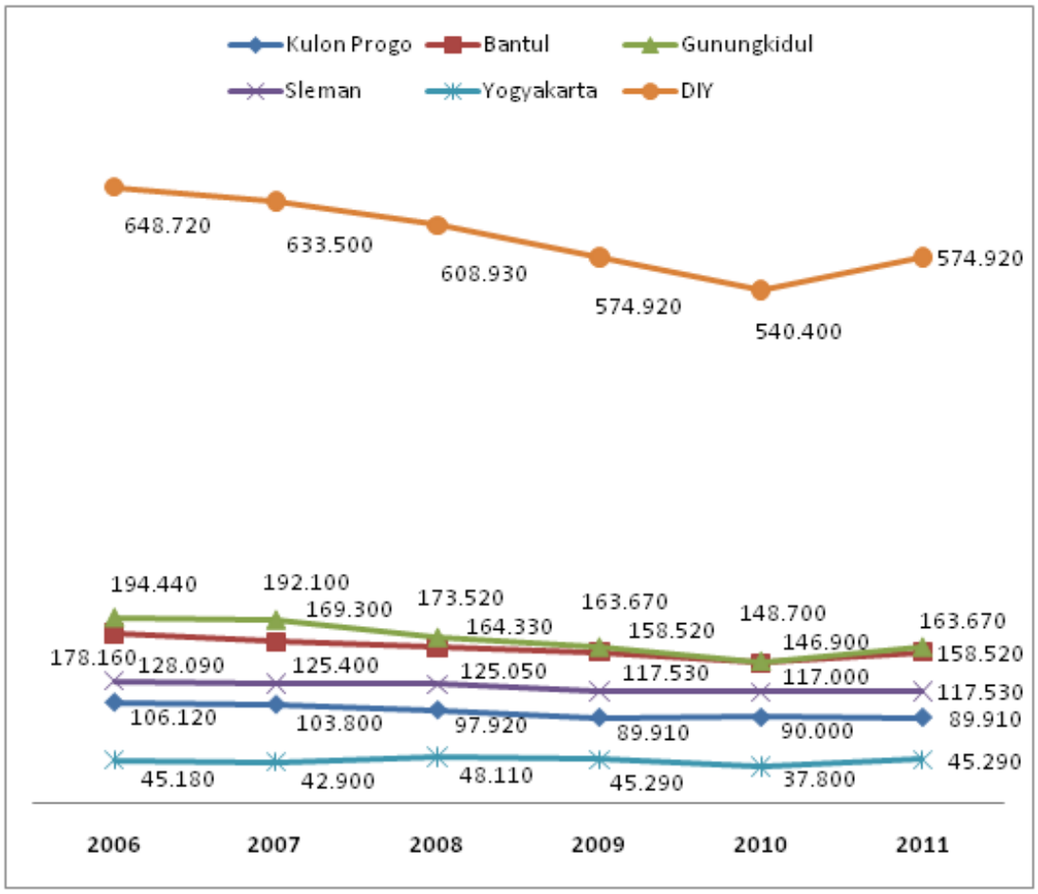

Sumber: DIY Dalam Angka (2007-2011)

Gambar 6.6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten-Kota dan DIY Tahun 2007-2011

Tingkat kemiskinan di wilayah DIY dan Kabupaten-kota secara umum berfluktuatif cenderung menurun dari tahun 2006 sampai 2010. Tahun 2010-2011 baik DIY maupun kabupaten-kota selain Kulon Progo mengalami kecenderungan menaik. Jumlah penduduk miskin Kulon Progo turun dari 90.000 (2010) menjadu 89,910 (2011). Tingkat kemiskinan paling rendah pada tahun 2011 adalah Kota Yogyakarta yang disusul oleh Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Gunungkidul.

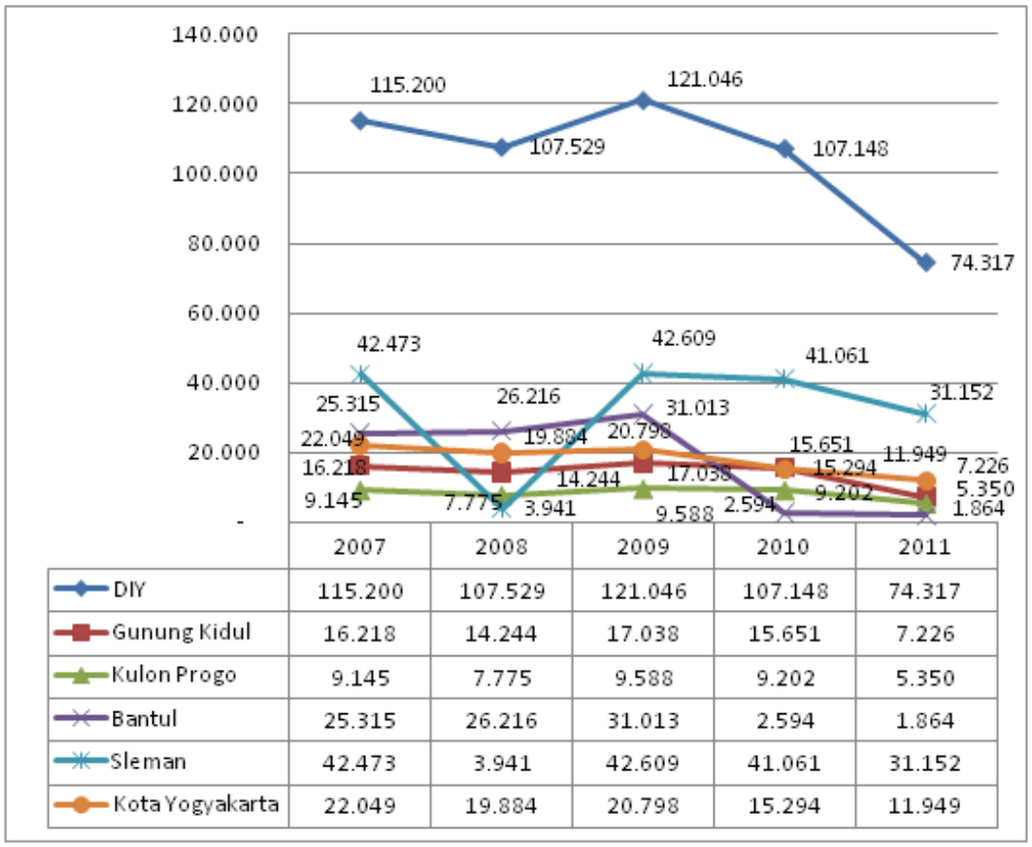

Sumber: BPS Provinsi DIY (2007 -2011)

Gambar 6.7 Pengangguran Terbuka di DIY dan Kabupaten-Kota Tahun 2007-2011

Pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pengangguran terbuka terendah pada tahun 2011 Kabupaten Bantul diikuti Kulon Progo, Gunungkidul. Dua daerah yang cukup dominan dalam pengangguran terbuka adalah Kabupaten Sleman yang cukup dominan dan Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk yang menganggur di Kabupaten Sleman adalah 31.152 orang dan di Kota Yogyakarta sebanyak 11.949 di tahun 2011. Penurunan pengangguran tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bantul yang turun dari 25.315 di tahun 2007 menjadi 1.864 di tahun 2011.

Pembangunan sektor kesehatan juga masih menunjukkan kinerja yang masih tidak merata. Kesenjangan beberapa indikator kesehatan menunjukkan adanya kesenjangan capaian di antara kabupaten dan kota se-DIY. Salah satunya adalah capaian jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun pada tahun 2010 dan 2011. Angka terendah dicapai Kota Yogyakarta sebesar 40 (2010) dan 45 (2011) sedangkan angka yang masih tinggi terjadi di Kabupaten Bantul sebesar 120 (2010) dan 114 (2011).

Beralih pada bidang sarana dan prasarana wilayah, kesenjangan capaian pembangunan antar kabupaten dan kota se-DIY terjadi selama periode 2008 – 2011. Angka prosentase jalan mantap berkisar antara 71,15% sampai 86,28%. Hal menarik adalah bahwa keadaan yang lebih baik justru tidak terjadi di kawasan yang didominasi kawasan berkategori perkotaan. Proporsi jalan mantap paling besar justru dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo yang mencapai angka di atas 85% setiap tahunnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kota Yogyakarta yang masih berada di bawah 85%.

Sementara itu dalam cakupan keterjangkauan listrik, rasio elektrifikasi masih menunjukkan ketimpangan. Rasio elektrifikasi tertinggi dicapai oleh

Kabupaten Sleman yang mencapai 92,08%. Sedangkan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo yang hanya sekitar 60,92% di tahun 2011. Hal yang menarik adalah bahwa Kota Yogyakarta yang notabene didominasi kawasan perkotaan hanya mencapai rasio sebesar 75,82% yang berada di bawah kabupaten Bantul yang mencapai 81,96%.

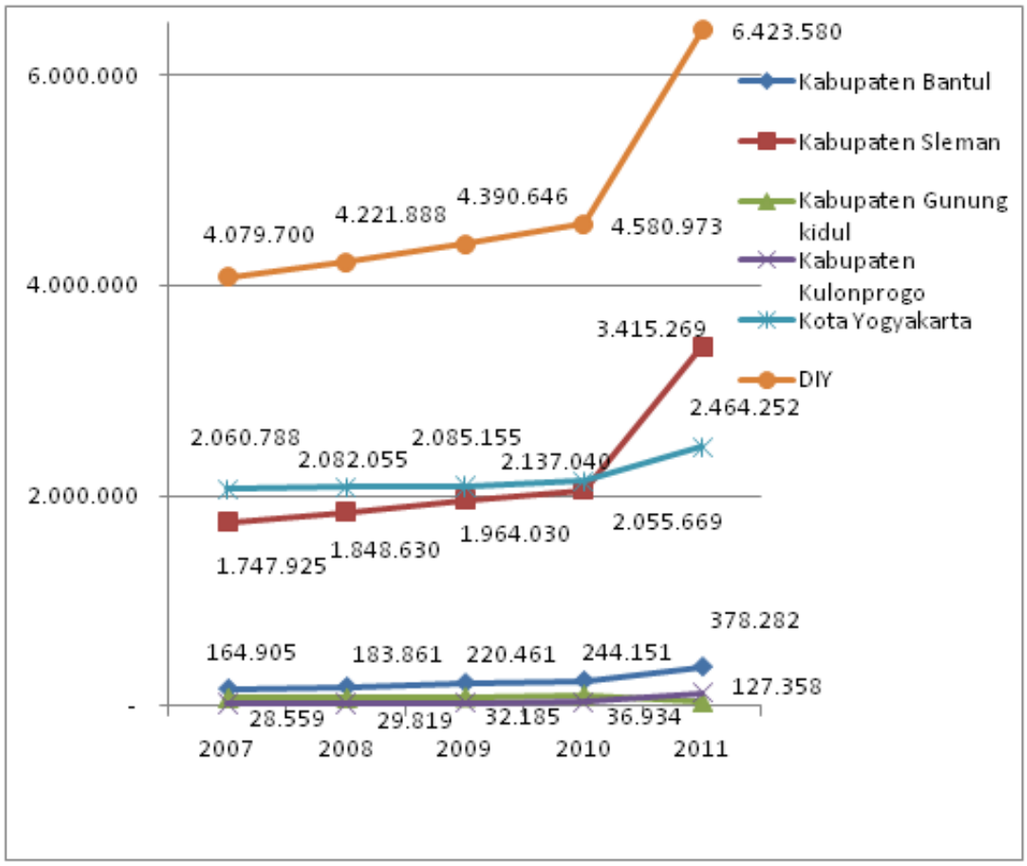

Sumber: BKPM 2012

Gambar 6.8 Realisasi Investasi DIY dan Kabupaten-Kota Tahun 2007-2011 (dalam Juta Rupiah)

Realisasi investasi selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007-2011 mempunyai kecenderungan terus menaik, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2010-2011 baik diwilayah DIY dan kabupaten-kota. Realisasi investasi kabupaten tertinggi dicapai oleh kabupaten Sleman dan kota yogyakarta. Realiasi terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pembangunan dimasing-masing kabupaten-kota di DIY adalah sebagai berikut:

6.3.1 Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisinya yang berada dipusat pemerintahan menjadikan letaknya strategis untuk sentra aktivitas baik perekonomian, pariwisata maupun lainnya. Kota Yogyakarta berperan sebagai barometer inflasi di DIY, kenaikan harga diwilayah ini dianggap mewakili perkembangan kondisi perekonomian didaerah lain. Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 mempunyai penduduk sebesar 390.553 orang yang merupakan jumlah penduduk tersedikit nomor dua setelah Kabupaten Kulon Progo.

Indeks Pembangun Manusia (IPM) Kota Yogyakarta jika dibandingkan dengan Nasional dan DIY posisinya sudah melampui capaian keduanya. Capaian Kota Yogyakarta bahkan mencapai target tertinggi diantara Kabupaten-Kota diwilayah DIY untuk tahun 2008 – 2011, namun demikian IPM mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 78,89 menjadi 79,52.

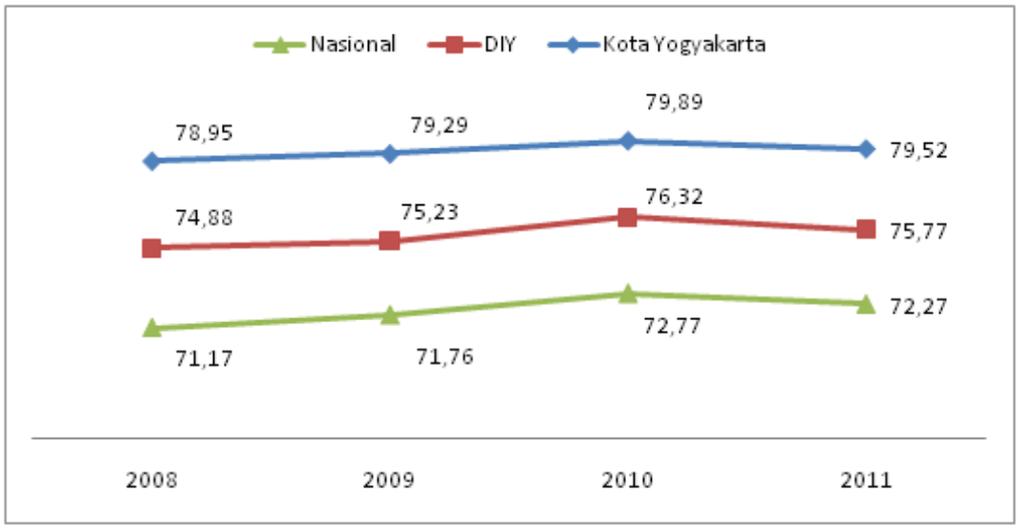

Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Gambar 6.9 IPM Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011

Kondisi capaian IPM Kota Yogyakarta tahun 2011 dapat dispesifikkan dengan angka melek huruf masyarakat 98,07 persen, rata-rata lama sekolah 11,52 tahun dan pengeluaran per kapita dalam *purchasing power parity* (PPP) Rp653.790 di mana hal ini merupakan kondisi paling tinggi diantara kabupaten-kota di DIY. Angka harapan hidup mencapai 73,48 tahun Kota Yogyakarta berada di bawah Kabupaten Sleman.

Secara umum, sektor pertanian mengalami kenaikan pertumbuhan PDRB dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, meskipun secara umum terdapat tren pertumbuhan yang menurun. Pertumbuhan PDRB pertanian Kota Yogyakarta naik dari -10,03% dari tahun 2007 menjadi 1,72% di tahun 2011.

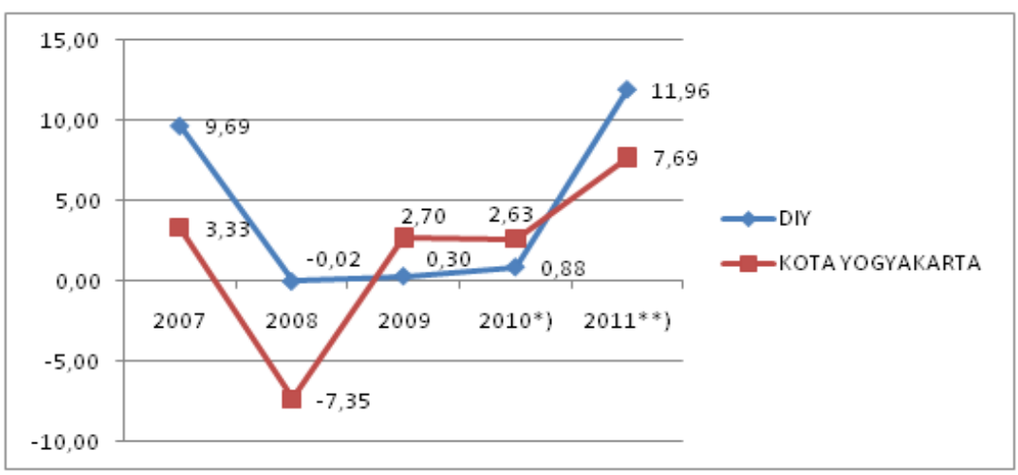

Gambar 6.10 Pertumbuhan PDRB Pertanian Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan seiring dengan kenaikannya di tingkat provinsi dari tahun 2008 - 2011. Pertumbuhan itu naik dari -7,35% menjadi 7,96% selama periode tersebut.

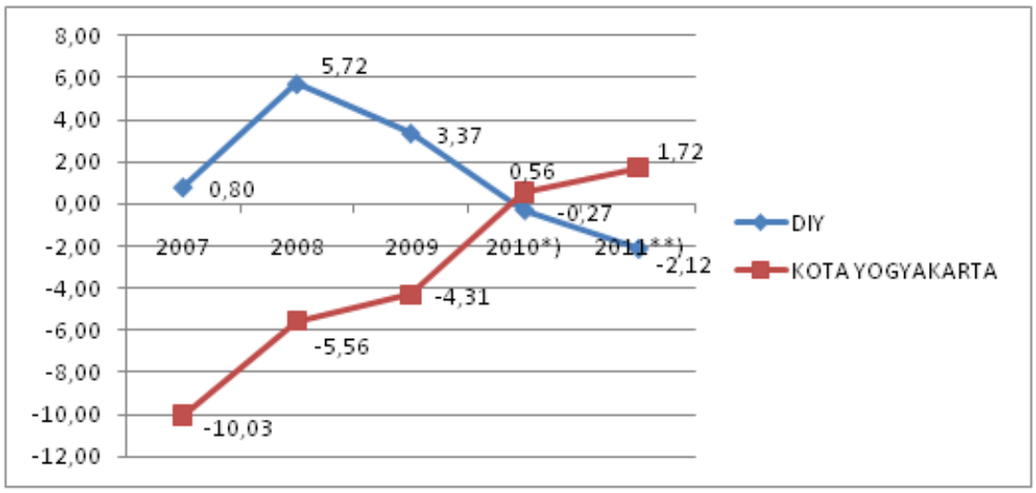

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.11 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB industri Kota Yogyakarta selama periode 2007 sampai 2011 mengalami perkembangan fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2008 dan 2011 yaitu menjadi sebesar 0,72% dan 2,02%.

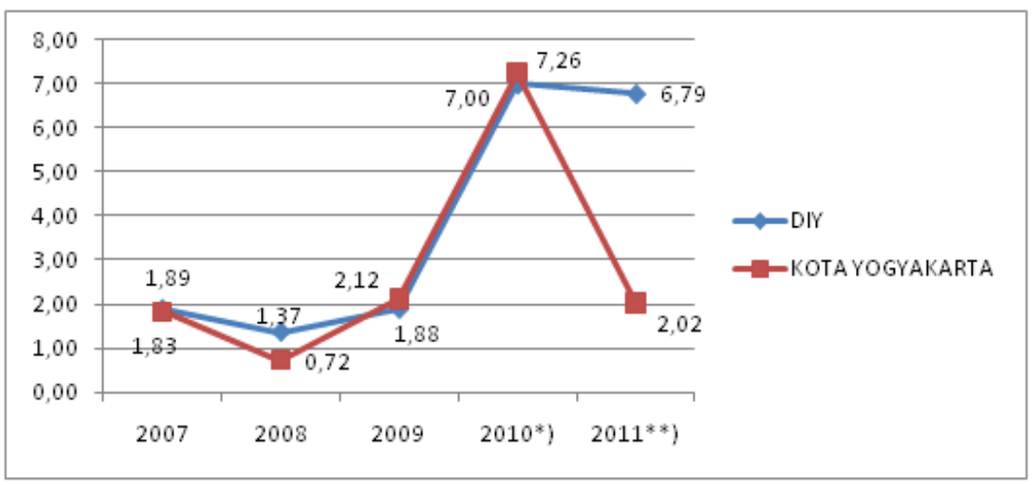

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.12 Pertumbuhan PDRB Industri Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

Selama periode 2007 – 2011, Pertumbuhan PDRB konstruksi mengalami penurunan di tahun 2009 baik untuk Kota Yogyakarta dan DIY yang kemudian mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2009, pertumbuhan PDRB konstruksi Kota Yogyakarta turun menjadi 0,24 yang kemudian naik menjadi 3,11% (2010) dan 5,39% (2011).

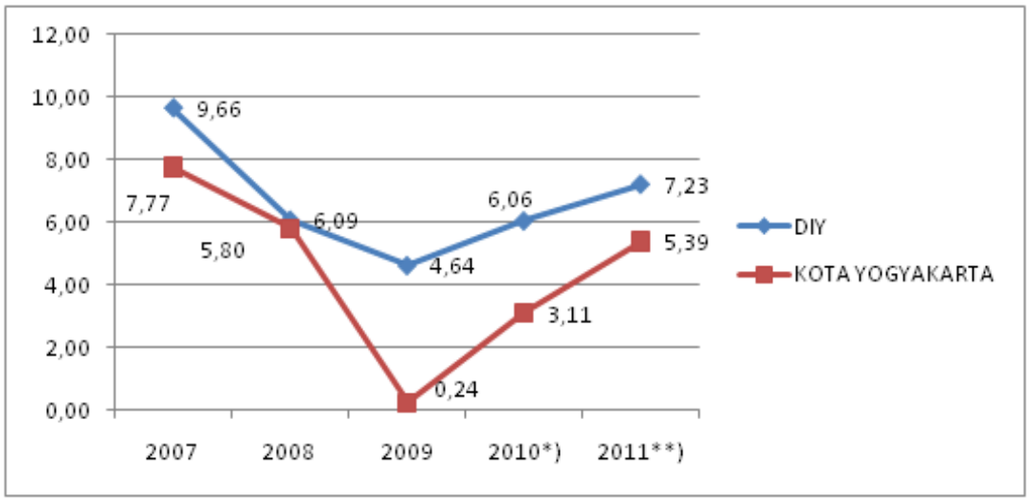

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.13 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

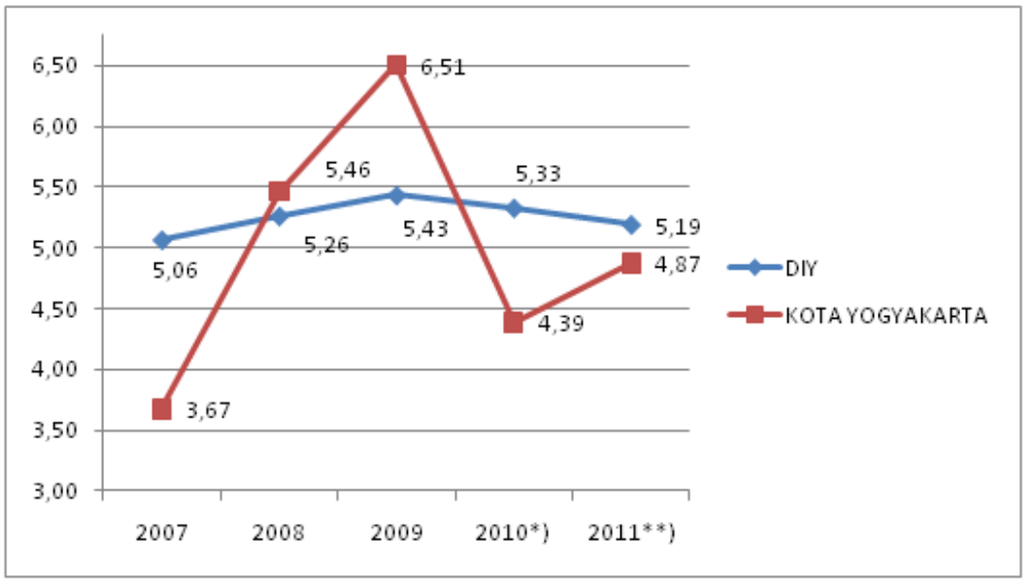

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.14 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

PDRB perdagangan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari 3,67% (2007) menjadi 6,51% (2009) yang kemudian turun menjadi 4,39% (2010). Pertumbuhan tersebut mengalami kenaikan menjadi 4,87% di tahun 2011.

Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Kota Yogyakarta berfluktuasi seiring dengan pertumbuhan PDRB di sektor yang sama se-DIY. PDRB naik dari 5,59% (2007) menjadi 8,15 (2008), yang kemudian turun menjadi 4,74% di tahun 2010. Angka tersebut kemudian naik menjadi 7,89% di tahun 2011.

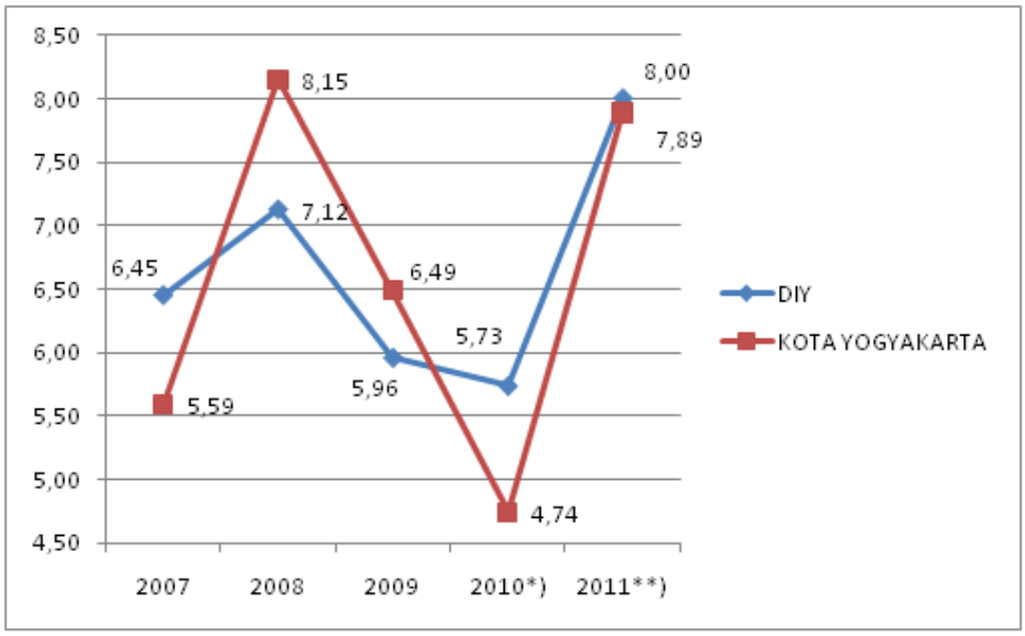

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.15 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum pertumbuhan PDRB keuangan DIY mengalami kenaikan sedangkan pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta berfluktuasi. Pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun 2009 yang kemudian mengalami kenaikan di tahun berikutnya seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

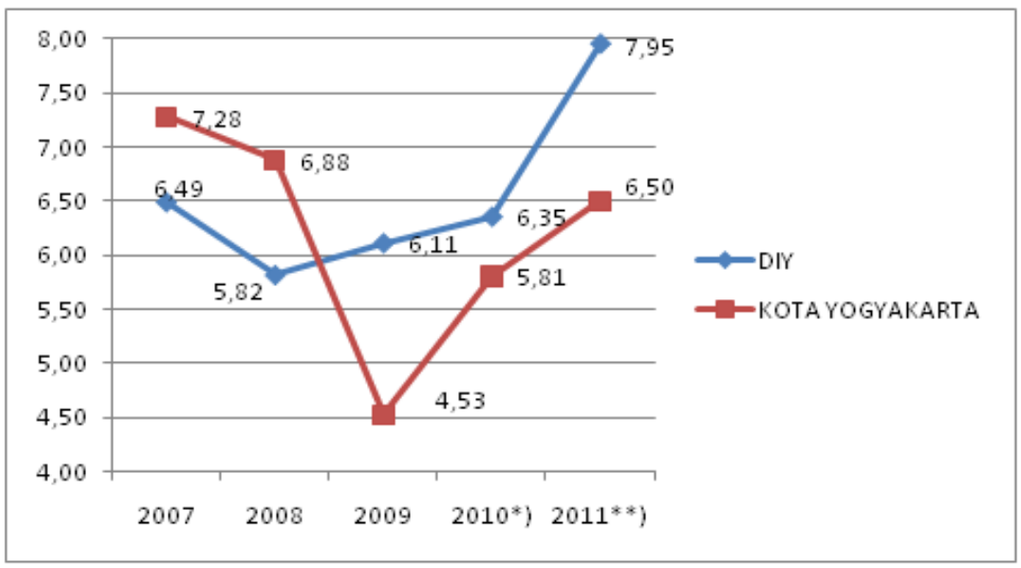

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.16 Pertumbuhan PDRB Keuangan Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, tren pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa di KotaYogyakarta dan DIY mengalami kenaikan. Pertumbuhan PDRB jasa-jasa Kota Yogyakarta naik dari 3,08% (2007) menjadi 5,95% (2011).

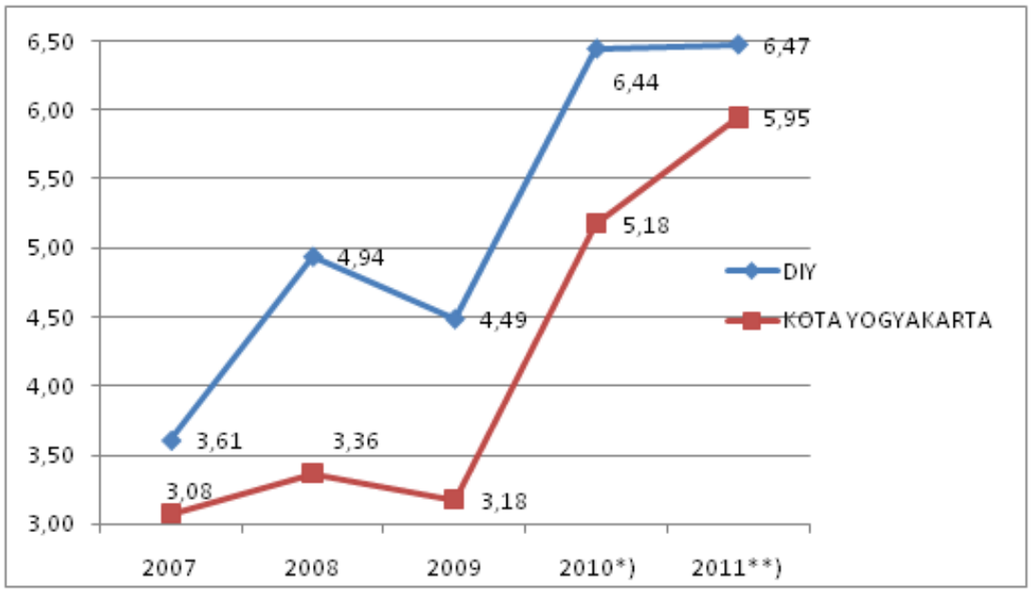

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.17 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2007-2011

Berdasarkan trend realisasi investasi kota Yogyakarta didapati hasil sebagai berikut dimana pada tahun 2017 diharapkan minimal akan mencapai realisasi investasi sebesar 3,1 trilyun rupiah. Dimana trend pertumbuhannya positif sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2017.

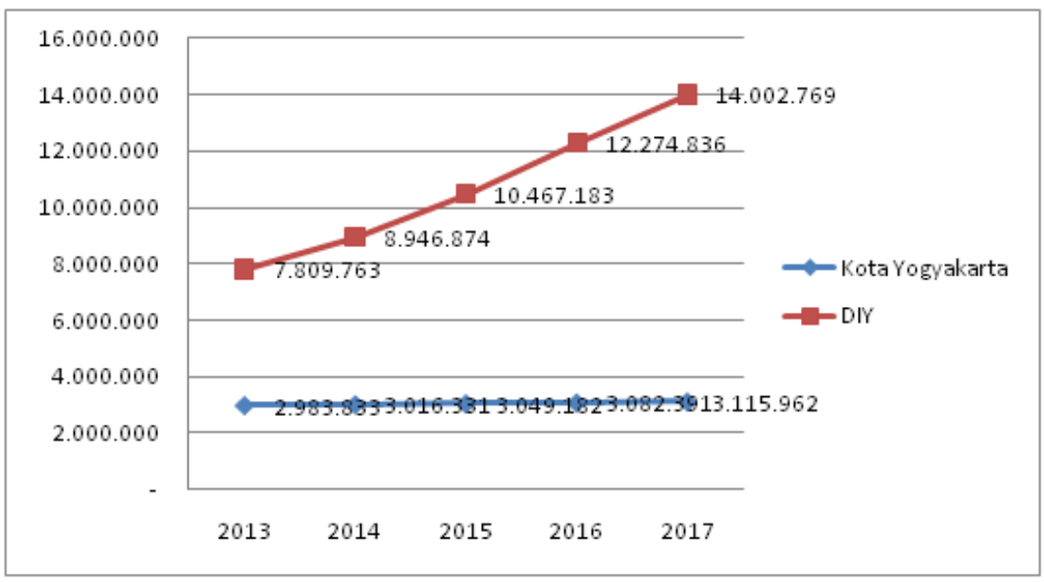

Sumber: Bappeda DIY diolah

Gambar 6.18 Proyeksi Realisasi Investasi Kota Yogyakarta dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah

Proyeksi target beberapa indikator pembangunan selama tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta. IPM diproyeksikan meningkat dari 80,48 di tahun 2013 menjadi 81,70 di tahun 2017. Kemiskinan diproyeksikan turun sekitar 3% dari 10,75% (2013) menjadi 7,69% (2017). Proyeksi pengangguran turun dari 4,87% di tahun 2013 menjadi 2,05% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan senantiasa mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dengan rangkaian pertumbuhan sebesar 5,8% (2013), 6,0% (2014), 6,2% (2015), 6,4% (2016) dan 6,61 (2017)

Tabel 6.8 Target Pembangunan Kota Yogyakarta 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM	80.48	80.79	81.09	81.40	81.70
2	Kemiskinan	10.75	9.93	9.15	8.40	7.69
3	Tingkat Pengangguran	4.87	4.16	3.46	2.76	2.05
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.8	6.0	6.2	6.4	6.61

Arah kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta letaknya yang menjadi pusat aktivitas utama menjadi sebuah hal penting terutama pengembangan sektor non pertanian (perdagangan, jasa, industri , transportasi & pariwisata). Untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya:

1. Berdasarkan capaian PDRB pada tahun 2007 – 2011 bahwa Kota Yogyakarta menjadi urutan teratas sehingga yang perlu ditekankan pada aspek pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Peningkatan pada kualitas hidup yang terukur dari IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan kebijakan memperluas aksesibilitas masyarakat pada pelayanan umum, fasilitasi pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta penciptaan peluang usaha pada sektor-sektor utama.
2. Pertumbuhan pada sektor jasa-jasa dimana melampaui DIY pada tahun 2007 -2011 harus dipertahankan dengan kebijakan kemudahan, kecepatan dan ketepatan perizinan bagi pengembangan usaha serta disupport dengan penyediaan sarana-prasarana penunjang usaha khususnya hiburan dan rekreasi yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Kota Yogyakarta.
3. Pertumbuhan pada sektor jasa tidak semulus yang dihadapi pada sektor perdagangan dimana mulai tahun 2009 sampai 2011 trendnya menurun. Hal ini harus disinergikan dengan laju pertumbuhan pada sektor jasa dan penganggkutan yang laju pertumbuhannya positif. Mengingat Kota Yogyakarta sekarang ini yang semakin padat kendaraan sehingga akan mengurangi kenyamanan dalam menikmati dan beraktivitas di Kota Yogyakarta maka kebijakan terpadu dalam sektor penganggkutan dengan sektor lain.
4. Meningkatnya pertumbuhan pada sektor kontruksi di Kota Yogyakarta harus diikuti dengan kebijakan pada penataan ruang secara keseluruhan, ruang terbuka hijau dan keselarasan dengan lingkungan.
5. Sektor pertanian khususnya peternakan ternyata sedang bergeliat di Kota Yogyakarta sejak tahun 2007 – 2011 dimana trendnya positif, hal ini perlu untuk dibarengi dengan kebijakan pada pengembangan peternakan yang dapat mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Revitalisasi Kawasan Malioboro-Kawasan Stasiun Tugu

Kawasan Malioboro dan kawasan Stasiun Tugu meruapakan satu satuan kawasan yang menjadi bagian dari kawasan garis filosofi dan merupakan wilayah inti kota .Sebagai kawasan budaya dan kawasan yang berkembang maka perlu dilakukan penataan kembali dan dilakukan pengembangan pada kawasan-kawasan tersebut. Konsep pengembangan yang akan diterapkan adalah terpadu satu sala lain termasuk desain saling mendukung perkembangan kawasan baik sebagai kawasan budaya maupun kawasan perdagangan dan jasa. Konsep Revitalisasi kawasan

Malioboro antara lain memberikan akses lebih leluasa kepada pejalan kaki sebagai salah satu upaya dukungan untuk meningkatkan peluang transaksi dan menata infrastruktur kawasan (parkir, akses). Sedangkan revitalisasi kawasan Stasiun Tugu sebagai upaya penciptaan kawasan dengan tata guna lahan bercampur (permukiman, komersial, transportasi) serta diharapkan kegiatan perekonomian kawasan ini bukan PESAING dari kegiatan di Jalan Malioboro. Melalui kerjasama dengan Kemeterian Perekonomian sudah dilakukan studi terkait peluang investasi kerjasama dengan swasta untuk penyediaan infrastruktur transportasi yang kemudian melalui bantuan dari BAPPENAS program ini disempurnakan kembali kajian FS nya . Pengembangan kawasan ini juga sudah masuk dalam PPP Book BAPPENAS (Public Private Partnership) tahun 2012 dan 2013 sebagai Proyek potensial untuk dapat dilaksanakan dengan sistem Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Untuk saat ini telah dilakukan penataan pada kawasan Maliboro - Tugu melalui kerjasama antara Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diharapkan berakhirnya RPJMD 2013–2017 penataan kawasan ini terkait pedestrianisasi, parkir dan penataan bangunan cagar budaya serta penataan kawasan pendukung kawasan inti Malioboro sudah dapat selesai dilaksanakan.

Pengembangan Trans Jogja

Konsep awal Bus TransJogja mengindikasikan bahwa Pemerintah DIY berkomitmen terhadap pelayanan (*public services*), dan tidak pernah berorientasi pada keuntungan secara finansial (*profit oriented*). Program ini menggantikan sistem setoran yang terbukti gagal dijalankan di hampir seluruh kota di Indonesia dan dapat mengoptimalkan sistem peremajaan angkutan dengan metode scrapping 1 : 2. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan angkutan umum massal ini maka telah dilakukan kajian rute dan penambahan jalur layanan, penyediaan infrastruktur pendukung antara lain park and ride, halte mobile, shelter, intergrasi tiket dengan moda lain, e-ticketing bekerjasama dengan perbankan, dan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Disamping itu direncanakan feeder yang akan terintegrasi dengan layanan trans jogja baik di perkotaan sendiri maupun dengan layanan AKDP. Tahun 2015 perjanjian operasional Trans Jogja yang sekarang berakhir dan diharapkan pada tahun tersebut adalah titik balik dari peningkatan dan revitalisasi pelayanan trans jogja ke depan.

Pembangunan kembali Embung Langensari

Pembangunan kembali Embung Langensari merupakan salah satu strategi penanganan terhadap banjir atau genangan yang terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu diKelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman.Hal tersebut disebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan dan alur drainase di Kawasan Langensari, Kecamatan Gondokusuman.Hal lain yang menjadi catatan adalah bahwa Kawasan Langensari sebelumnya adalah embung atau waduk di Kota Yogyakarta yang telah beralih fungsi menjadi permukiman, dan gedung sekolah, gedung pramuka, gedung orari/rapidan menjadi tempat parkir air dari Sungai Belik.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut di atas dilakukan perencanaan pembangunan kembali Embung Langensari untuk menangani permasalahan (banjir)/genangan yang terjadi pada musim hujan di Kawasan Langensari/Klitren sekaligus sebagai sarana konservasi air tanah di Kota Yogyakarta.Dalam proses perencanaan tersebut selanjutnya pembangunan kembali Embung Langensari sekaligus diarahkan sebagai sarana ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik di Kota Yogyakarta, khususnya di Kecamatan Gondokusuman.

Perencanaan pembangunan kembali Embung Langesari dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak),

Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta.Pembangunan kembali Embung Langensari direncanakan dengan luas 14.000m².

Pada tahap awal di Tahun 2011 dilaksanakan identifikasi dan pengukuran luasan genangan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pada tahun yang sama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melaksanakan penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Kembali Embung Langensari.Selanjutnya di Tahun 2012 dilaksanakan penyusunan UKL/UPL untuk melihat aspek lingkungan hidup dalam pembangunan kembali Embung Langensari.

Desain Embung Langensari adalah diperuntukkan sebagai kolam retensi atau parkir air sehingga potensi banjir dapat teratasi.Luas areal basah direncanakan 11.180,98 m² dengan volume potensi tampungan 28.064 m³ dan volume efektif tampungan 8.832 m³.

Tahapan yang direncanakan adalah pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Yogyakarta akan melaksanakan relokasi terhadap SD Langensari sekaligus melaksanakan pembangunan gedung SD yang baru sebagai pengganti.Pada Tahun 2015, direncanakan akan dilaksanakan proses pembangunan fisik Embung Langensari.Pada Tahun 2016 akandiikuti oleh penataan kawasan embung langensari yang akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik sekaligus sarana rekreasi bagi masyarakat Kota Yogyakarta khususnya Kecamatan Gondokusuman.

Keberadaan Embung Langensari di Tahun 2017 diharapkan sudah berfungsi dengan baik sebagai strategi alternatif penanganan banjir sekaligus fungsi konservasi air tanah *(re charge)* di Kota Yogyakarta.

6.3.2 Kabupaten Sleman

Sleman merupakan wilayah yang posisinya mayoritas berada dibagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman pada tahun 2011 berpenduduk 1.107.304 orang yang merupakan jumlah penduduk terbesar diantara kabupaten-kota di DIY.

Kabupaten Sleman untuk IPM sama halnya dengan Kota Yogyakarta juga sudah melampaui target capaian Nasional dan DIY dari tahun 2008–2011 secara konsisten.Seperti pola perkembangan IPM baik di tingkat DIY dan nasional, IPM kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2010 tapi menurun di tahun 2011.

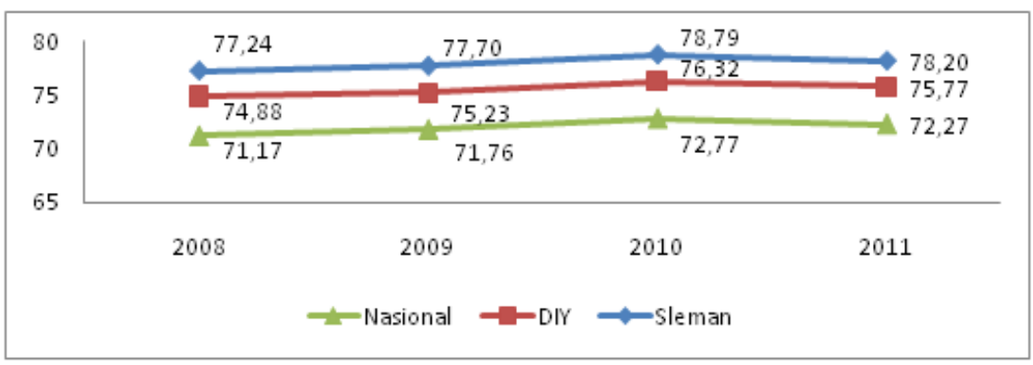

Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Gambar 6.19 IPM Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011

Posisi kondisi capaian IPM tahun 2011 Kabupaten Sleman pada angka harapan hidup menempati urutan tertinggi diantara kabupaten-kota se-DIY dengan 75,18 tahun. Tiga komponen lain seperti angka melek huruf 93,44

persen, rata-rata lama sekolah 10,51 tahun dan pengeluran perkapita (PPP) Rp. 650.270,- capaiannya dibawah Kota Yogykarta. Berkenaan dengan data ini maka arah kebijakan di Kabupaten Sleman diarahkan pada pemerataan, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Peningkatan pada akses, bantuan dan fasilitasi pembelajaran masyarakat untuk mendorong angka melek huruf.

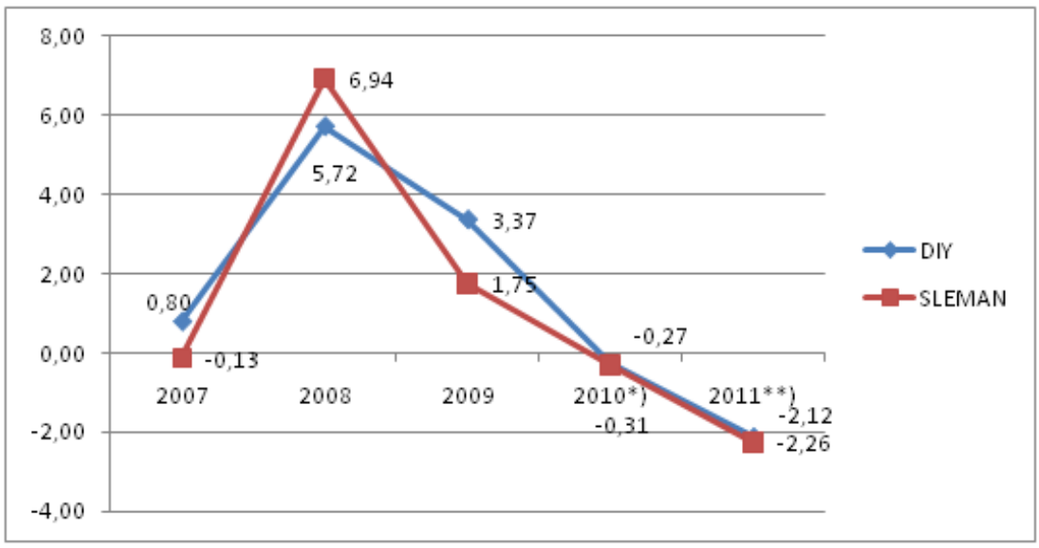

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.20 Pertumbuhan PDRB Pertanian Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

Perkembangan pertumbuhan PDRB pertanian Kota Yogyakarta bergerak seiring dengan pertumbuhan di sektor tersebut pada periode 2007–2011. PDRB pertanian Kota Yogyakarta naik dari -0,13% di tahun 2007 menjadi 6,94 di tahun 2008 yang kemudian terus mengalami penurunan menjadi -2,12% di tahun 2011. Pertumbuhannya di tahun itu masih berada di bawah pertumbuhan di tingkat provinsi sebesar -2,12%.

Pertumbuhan PDRB pertambangan Kabupaten Sleman mengalami penuruan tajam dari 74,60% di tahun 2007 menjadi -7,96% di tahun 2008, yang kemudian mengalami kenaikan terus sampai menjadi 15,24% di tahun 2010. Angka tersebut turun menjadi 14,35% di tahun 2011, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan keseluruhan provinsi sebesar 11,96%.

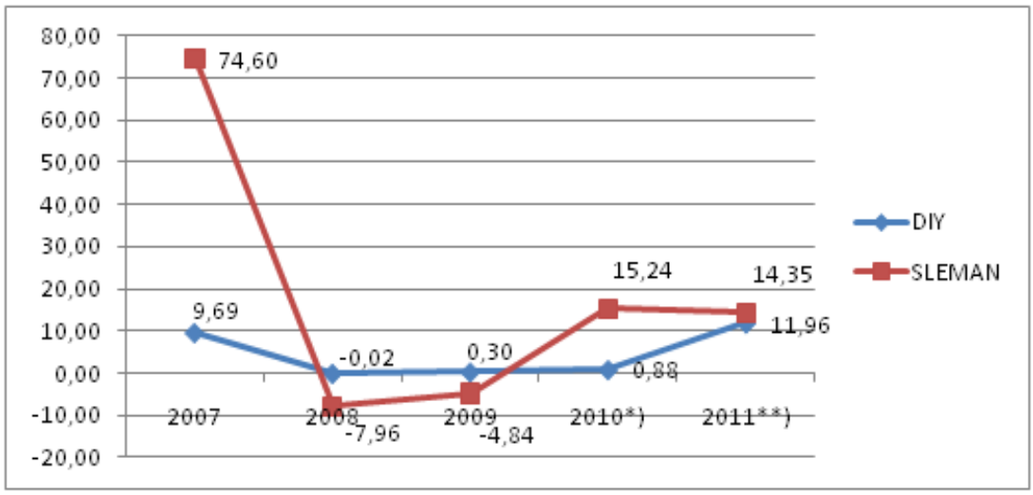

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.21 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB industri di Kabupaten Sleman menunjukkan kenaikan secara eksponensial. Selama tahun 2007 sampai 2009, perkembangannya mengikuti pola pertumbuhan sektor tersebut secara umum di DIY, namun pada tahun 2010 pertumbuhan sektor itu di Kabupaten Sleman sebesar 3,05% jauh di bawah pertumbuhan regional se-DIY sebesar 7,00%.

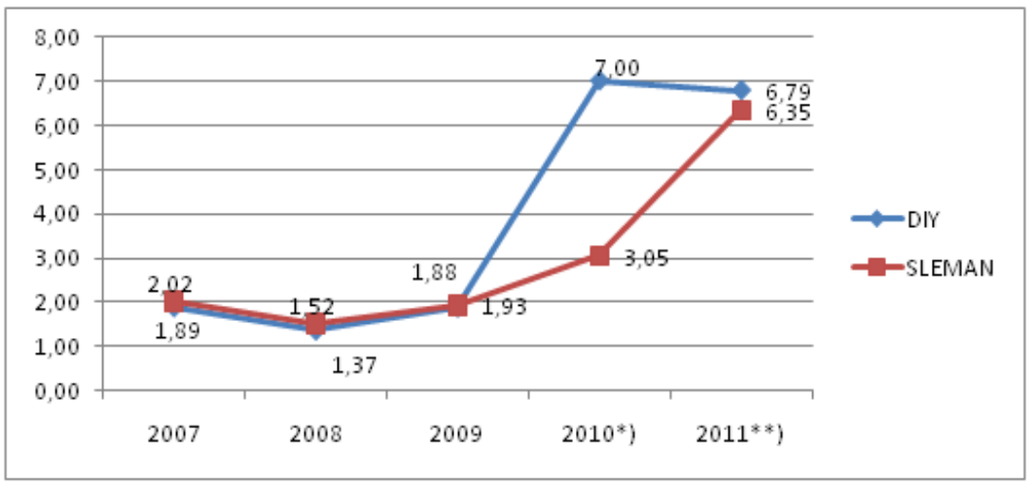

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.22 Pertumbuhan PDRB Industri Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, pertumbuhan PDRB konstruksi Kabupaten Sleman dan DIY berjalan seiring, di mana terdapat penurunan pertumbuhan pada tahun 2009 dan kemudian naik di tahun berikutnya. Pada akhir periode tingkat pertumbuhan sektor tersebut di Kabupaten Sleman sebesar 6,95% di bawah pertumbuhan keseluruhan DIY sebesar 7,23%.

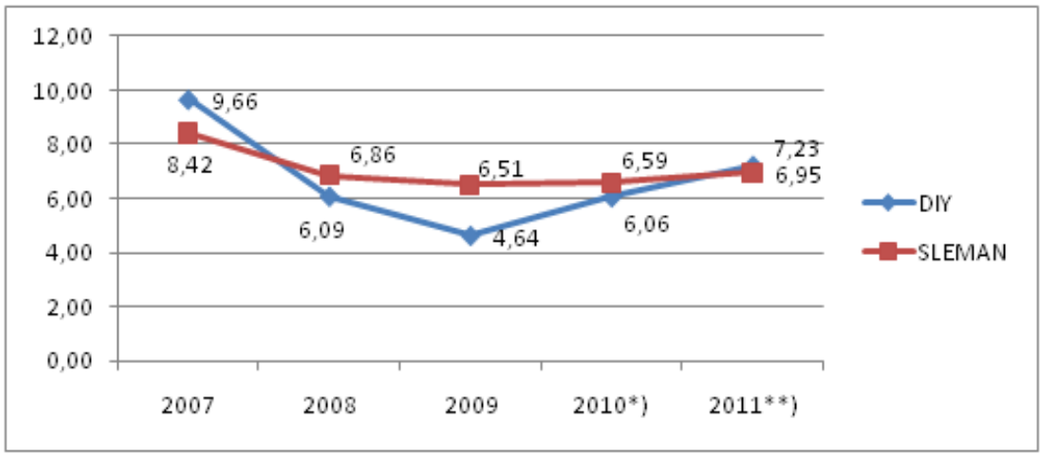

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.23 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB perdagangan Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhannya di tahun 2007 sebesar 6,97% dan menjadi 6,27% di tahun 2011.-Sementara itu pertumbuhannya selalu di atas rata-rata keseluruhan DIY di setiap tahunnya.

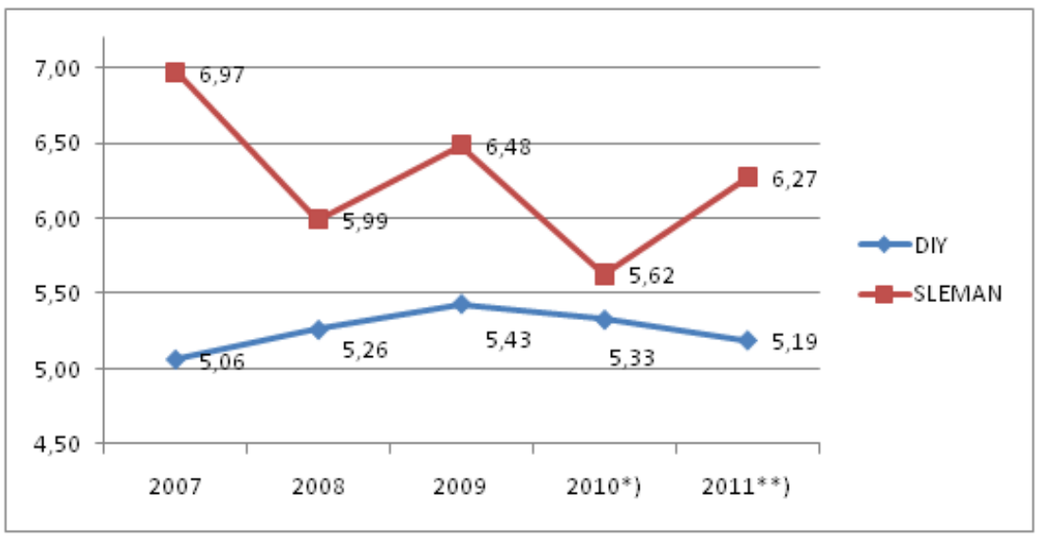

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.24 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari 7,06% di tahun 2007 menjadi 5,40% di tahun 2008, sedangkan di tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 8,00% di tahun 2011. Angka itu lebih besar dibandingkan rata-rata DIY sebesar 6,61% di tahun yang sama.

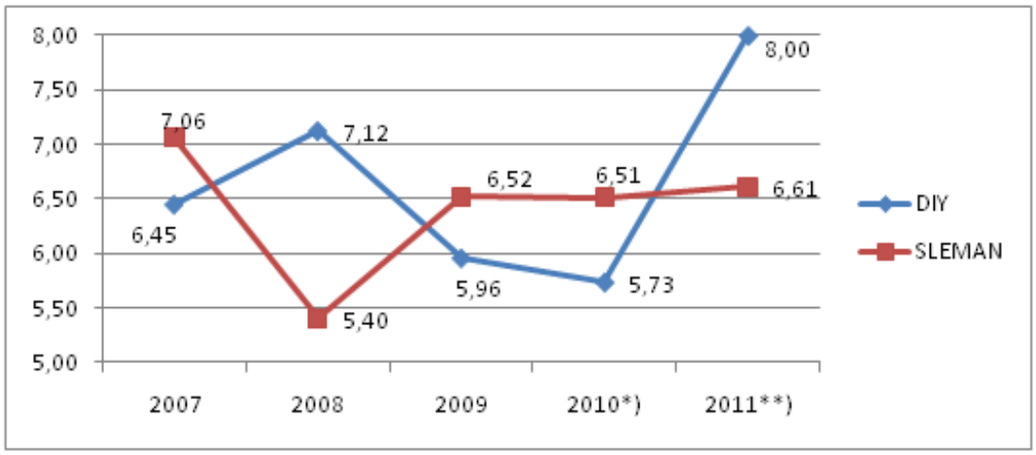

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.25 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, pertumbuhan PDRB keuangan Kabupaten Sleman dan DIY menunjukkan tren meningkat selama periode tahun 2007–2011. Pada tahun 2008, pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Sleman meningkat menjadi dari 5,10 (2007) menjadi 5,47% (2008) sedangkan pertumbuhannya di tingkat DIY justru turun dari 6,49% (2007) menjadi 5,82% (2008). Di akhir periode pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Sleman sebesar 6,88% masih di bawah pertumbuhannya sebesar 7,95% di tingkat DIY.

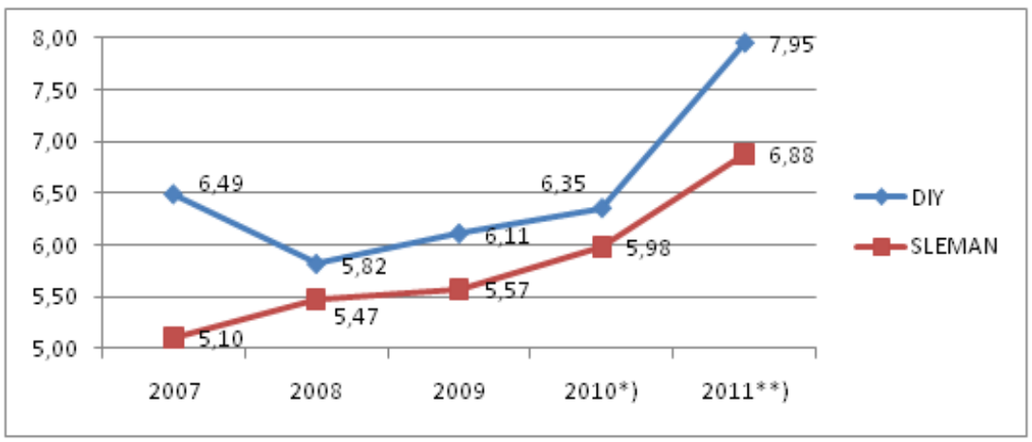

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.26 Pertumbuhan PDRB Keuangan Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

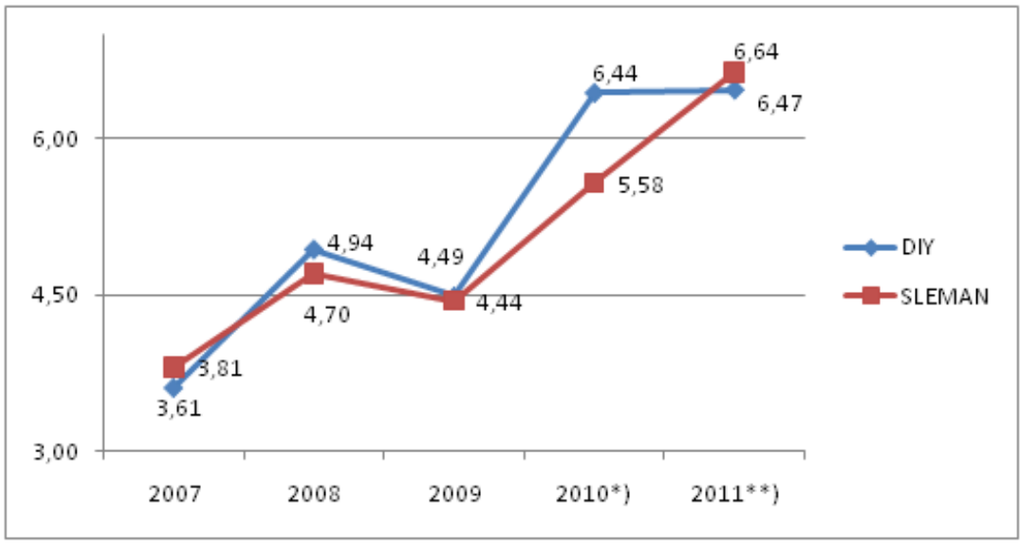

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.27 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Sleman dan DIY Tahun 2007-2011

Selama periode 2007–2011, pertumbuhan PDRB jasa-jasa mengalami tren menaik. Pertumbuhan PDRB sektor ini di Kabupaten meningkat dari 3,81% (2007) menjadi 6,64% (2011). Angka tersebut di akhir periode lebih tinggi dibandingkan capaian di tingkat 6,47%.

Berdasarkan trend realisasi investasi Sleman didapati hasil sebagai berikut dimana pada tahun 2017 diharapkan minimal akan mencapai realisasi investasi sebesar 5,5 trilyun rupiah. Dimana trend pertumbuhannya positif sejak tahun 2013 sampai pada tahun 2017.

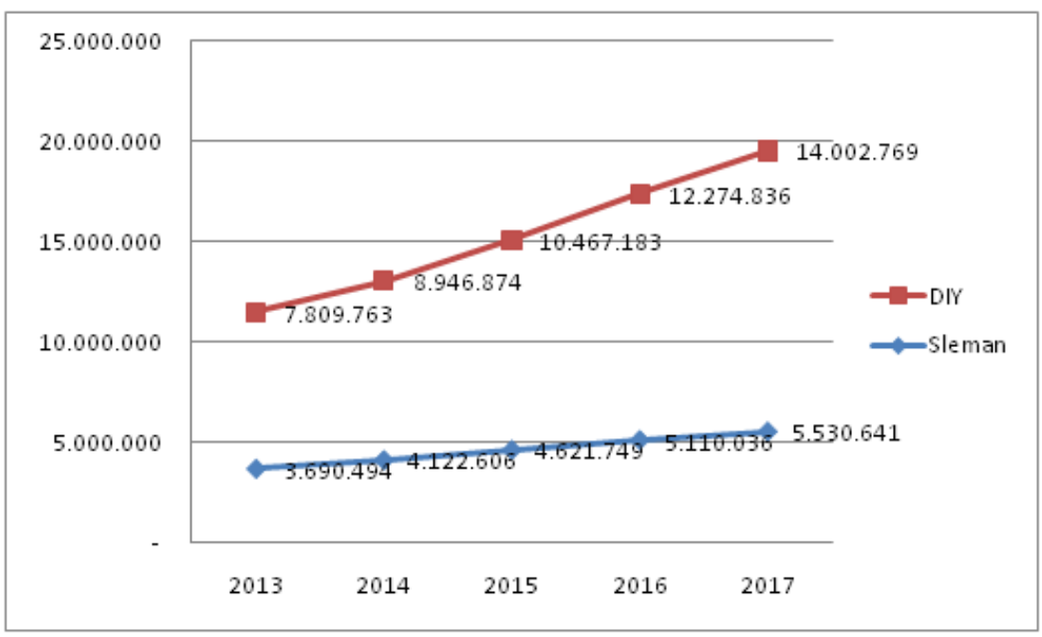

Sumber: Bappeda DIY diolah

Gambar 6.28 Proyeksi Realisasi Investasi Sleman dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah

Tabel 6.9 Target Pembangunan Kabupaten Sleman 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM	79.13	79.63	80	80.34	80.70
2	Kemiskinan	17	16	15	13.40	12.20
3	Tingkat Pengangguran	6.80	6.62	6.45	6.31	6.18
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.69	5.86	5.93	6.11	6.15

Di masa mendatang, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman diproyeksikan meningkat, di mana proyeksi beberapa indikator pembangunan selama tahun 2013 – 2017 menunjukkan kinerja pembangunan yang semakin membaik. Proyeksi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan IPM dari 79,13 (2013) menjadi 80,70 di akhir periode. Kemiskinan diproyeksikan turun dari 17% (2013) menjadi 12,20% (2017). Proyeksi pengangguran mengalami penurunan dari 6,80% di awal periode menjadi 6,18% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 5,69% di tahun 2013 menjadi 6,15% di tahun 2017.

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk Kabupaten Sleman sebagai wilayah paling utara dari DIY dan berhimpitan dengan Kota Yogyakarta serta berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, menjadikan Sleman menjadi pilihan pengembangan perkotaan ke sisi utara yang notabene juga merupakan daerah konservasi tangkapan air (resapan air) serta keberadaan Gunung Merapi yang masih aktif (daerah Rawan Bahaya Gunung Merapi). Pengembangn Sektor Non Pertanian (permukiman & industri), Pengembangan Sektor Perdagangan, Pengembangan Komoditi Hortikultura & Perkebunan, Pengembangan Sektor Pertanian Lahan Kering, Perkebunan dan Hortikultura, pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan menjadi pilihan arahan pengembangan kewilayahan untuk Kabupaten Sleman. Beberapa arah kebijakan Kabupaten Sleman adalah :

1. Usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya tercermin dari capaian IPM yang posisinya sudah termasuk tinggi dibandingkan dengan DIY dan Nasional selama kurun waktu 2008–2011. Usia harapan hidup menduduki posisi nomor satu untuk wilayah DIY. Namun pada tiga komponen Tiga komponen lain seperti angka melek huruf 93,44 persen, rata-rata lama sekolah 10,51 tahun dan pengeluran perkapita (PPP) Rp650.270 capaiannya masih dibawah Kota Yogyakarta. Berkenaan dengan hal ini diperlukan kebijakan pada upaya pemerataan dan peningkatan akses khususnya pendidikan serta kesempatan kerja. Usia harapan hidup yang tinggi juga harus disikapi dengan kebijakan sosial bagi lansia yang ada di wilayah Sleman.
2. Pertanian diwilayah Sleman mengalami trend penurunan laju pertumbuhan yang kian tahun cukup signifikan. Permasalahan mengenai penurunan laju pertumbuhan produktivitas pertanian juga mengenai alih fungsi lahan dan daya dukung lingkungan. Sleman mempunyai hawa dan suasana yang sejuk sehingga menjadi sasaran untuk memiliki property dikawasan ini baik itu masyarakat DIY dan Luar DIY. Fenomena ini harus disikapi dengan kebijakan pro petani dengan fasilitasi dan pengembangan pertanian, konverasi lahan pertanian, pengawasan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Pertumbuhan pertambangan khususnya penggalian mulai menunjukkan trend positif, berkah bumi dari muntahan Gunung Merapi berupa pasir

dan bebatuan harus dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa mengurangi daya dukung dan kerusakan lingkungan.

4. Pertumbuhan industri di Sleman harus disikapi dengan kebijakan pada penyiapan kapasitas masyarakat agar kesejahteraan masyarakat juga turut meningkat. Kebijakan investasi perlu terus didorong dan dipermudah dengan tetap memperhatikan sektor lainnya seperti ketenagakerjaan dan lingkungan. Pengembangan UKM juga harus didorong untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Sleman khususnya industry pengolahan.

Jaringan Jalan Selokan Mataram

Kondisi pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat termasuk di DIY yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi permasalahan utama. Hal ini terutama disebabkan antara lain keterbatasan ketersediaan infrastruktur jalan. Sebagai alternative memecah arus kendaraan yang masuk ke perkotaan Yogyakarta maka pembangunan jalan Selokan Mataram menjadi program penting. Jaringan jalan Selokan Mataram terbagi menjadi dua segmen yaitu Seturan – Affandi (Gejayan) sepanjang 2,344 KM dan Nyi Condrolukito (Monjali) – Jl .Magelang sepanjang 0,825 KM. Sampai dengan tahun 2012 sudah terselesaikan sepanjang 2 KM .Banyak kendala dalam penyelesaian jaringan jalan Selokan Mataram ini terutama pada pembebasan lahan dan kondisi eksisting yang sudah penuh oleh permukiman. Pemerintah DIY dan Pemda Kabupaten Sleman terus berusaha untuk melaksanakan penyelesaian dan juga usaha adanya dukungan Pemerintah Pusat . Diharapkan lima tahun ke depan jaringan jalan Selokan Mataram sudah dapat terealisir sesuai rencana.

6.3.3 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul selama 2008 – 2011 capaian IPM sudah diatas capaian Nasional namun masih berada dibawah DIY. Hal ini dikarenakan angka harapan hidup Bantul mencapai 71,33 tahun dan angka melek huruf 91,23 persen dimana kedua indikator tersebut posisinya terbawah kedua setelah Gunungkidul. Rata-rata sekolah posisinya menempati nomor tiga dengan 8,92 tahun setelah Sleman (10.51 tahun) dan Kota Yogyakarta (11.52 tahun). Disisi pengeluaran per kapita bantul menempati urutan kedua teratas setelah Kota Yogyakarta dengan capaian Rp651.170.

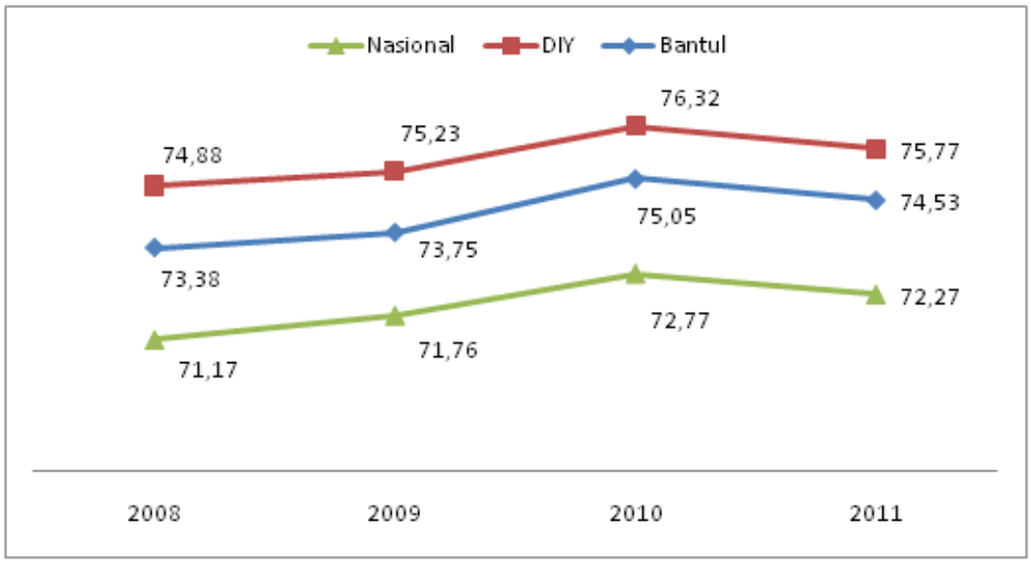

Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Gambar 6.29 IPM Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB pertanian Bantul bergerak seiring perkembangan pertumbuhannya di tingkat DIY. Pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan dari tahun 2007 ke 2008 yang kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2011. Penurunan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul sebesar -1,37% masih lebih rendah dibandingkan penurunan di tingkat DIY sebesar -2,12% di tahun 2011.

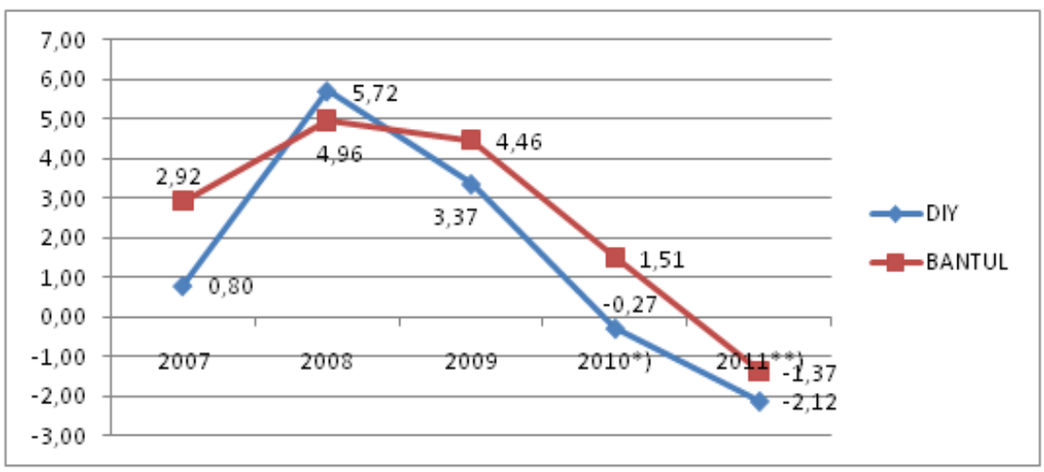

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.30 Pertumbuhan PDRB Pertanian Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

Pada tahun 2007, 2009 dan 2011, pertumbuhan PDRB pertambangan Bantul berada di atas angka di tingkat DIY. Di akhir periode angkanya sebesar 11,96% berada jauh di atas rata-rata DIY yang sebesar hanya 6,18%.

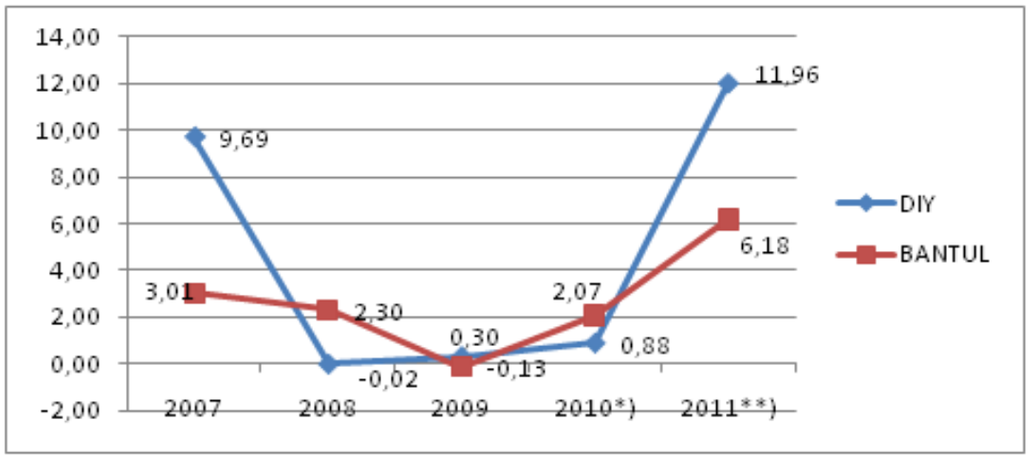

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.31 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

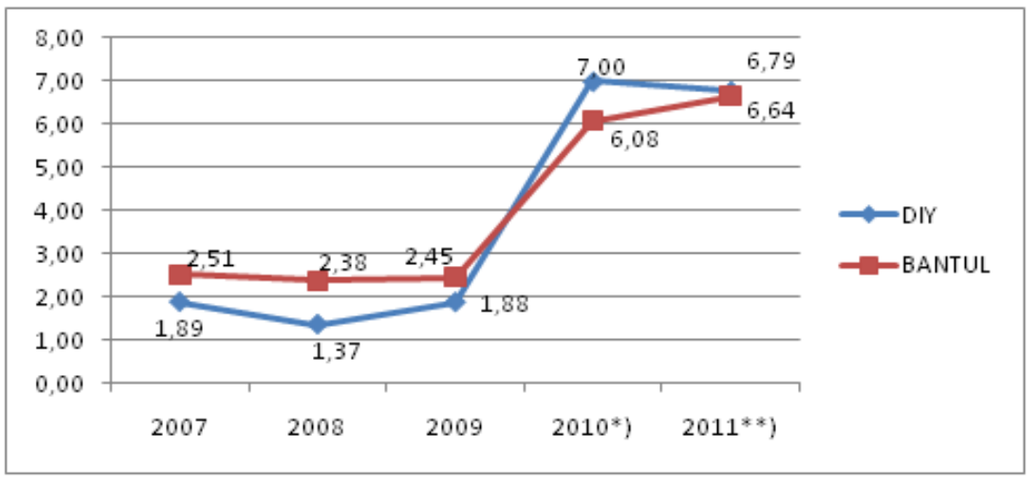

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.32 Pertumbuhan PDRB Industri Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

Grafik dari gambar di atas menunjukkan, perkembangan pertumbuhan PDRB industri di Kabupaten Bantul bergerak sejalan dengan perkembangan pertumbuhan PDRB industri se-DIY. Selama periode 2007–2009, pertumbuhan sektor ini di Bantul lebih tinggi dibandingkan di seluruh DIY, namun perkembangannya di Kabupaten Bantul di bawah perkembangan di tingkat provinsi untuk tahun 2010 dan 2011.

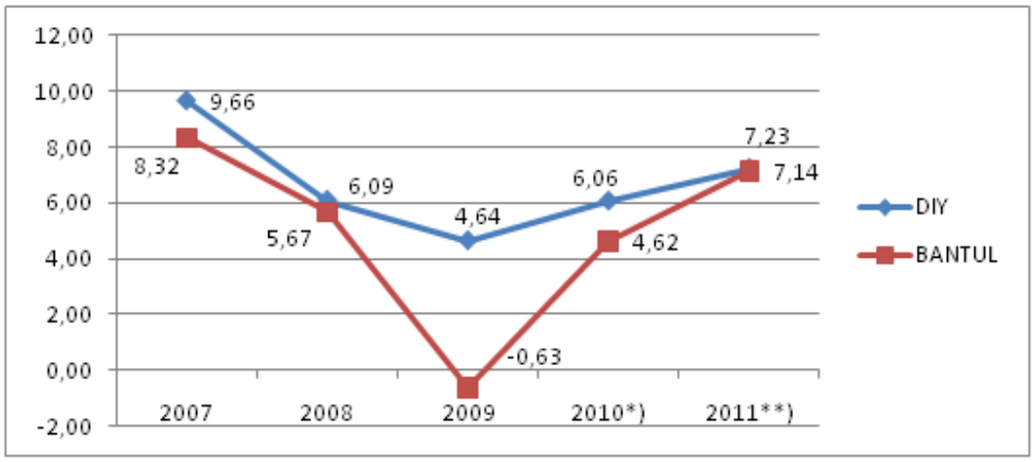

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.33 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul sempat mengalami penurunan tajan di tahun 2009, di mana angka pertumbuhan turun dari 8,32% menjadi -0,63%, namun angkanya kembali mengalami kenaikan menjadi 7,14% di tahun 2011. Secara keseluruhan, perkembangan pertumbuhan PDRB konstruksi Kabupaten Bantul berada di bawah DIY selama periode 2007–2011.

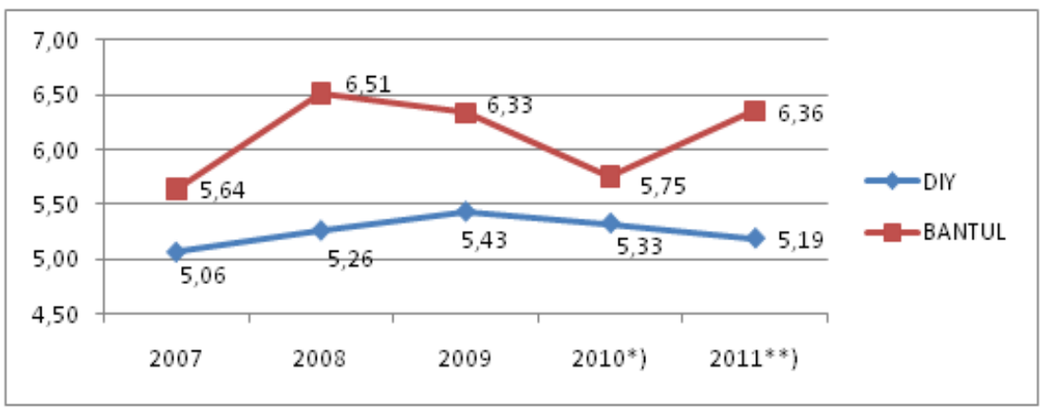

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.34 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

Perkembangan pertumbuhan PDRB perdagangan Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2007–2011 dengan puncak pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 sebesar 6,51%. Selama periode tersebut, pertumbuhan PDRB sektor tersebut selalu berada di atas angka rata-rata DIY.

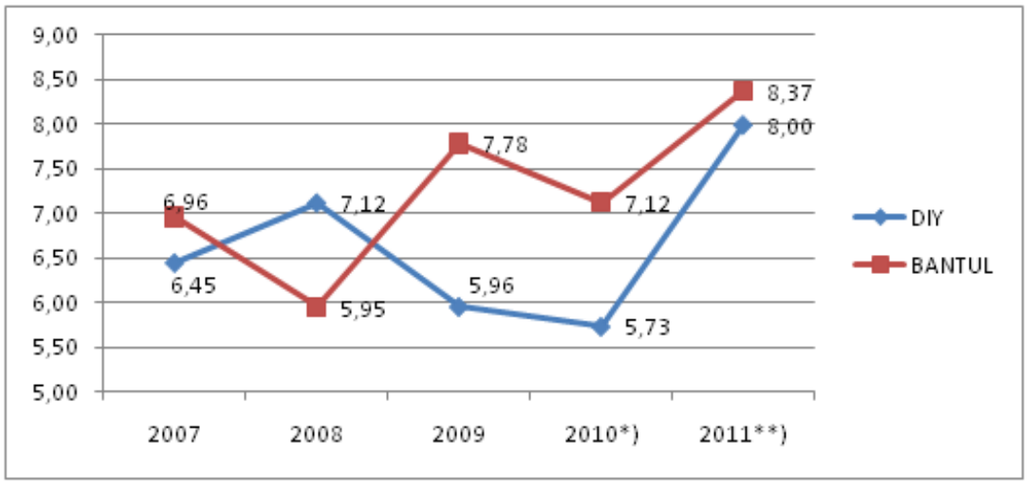

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.35 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB pengangkutan Kabupaten Bantul mengalami perkembangan fluktuatif selama periode 2007–2011. Pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2008 (5,95%) dan 2010 (7,12%) di banding periode satu tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi tahun 2009 (7,78%) dan 2011 (8,37%). DI akhir periode pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Bantul sebesar 8,37% berada di atas rata-rata DIY sebesar 8,00%.

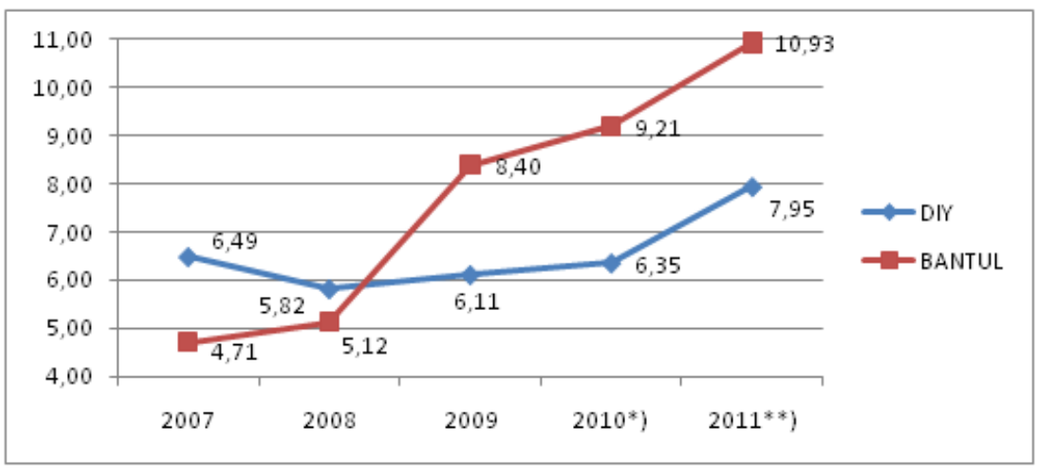

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.36 Pertumbuhan PDRB Keuangan Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB Keuangan Kabupaten Bantul senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2007–2011. Pertumbuhannya naik dari 4,71% di tahun 2007 menjadi 10,93% di akhir periode. Pada tahun 2011, tingkat pertumbuhannya sebesar 7,70% berada di atas rata-rata DIY sebesar 6,47%.

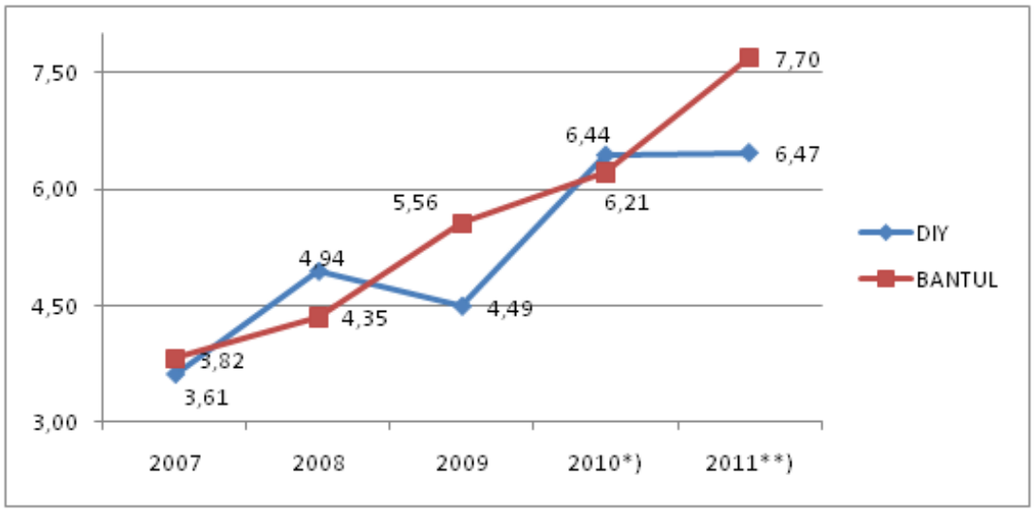

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.37 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Bantul dan DIY Tahun 2007-2011

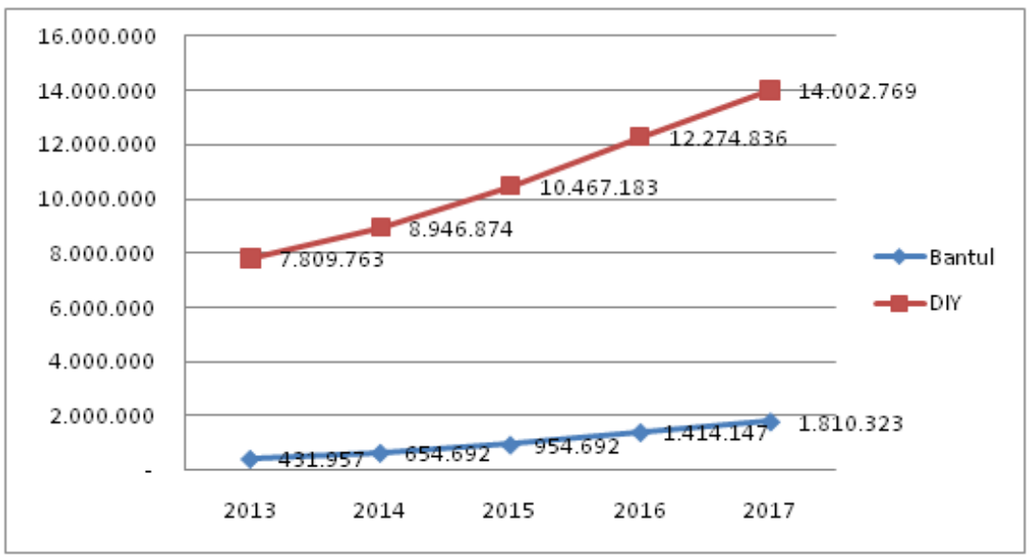

Sumber: Bappeda DIY diolah

Gambar 6.38 Proyeksi Realisasi Investasi Bantul dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah

Proyeksi atas realisasi investasi yang didasarkan pada capaian realisasi pada lima tahun terakhir mendapatkan hasil bahwa laju pertumbuhannya tidak terlalu besar namun memiliki kecenderungan positif. Dimana pada tahun 2017 diharapkan minimal akan mencapai 670, 2 milyyar rupiah.

Tabel 6.10 Target Pembangunan Kabupaten Bantul 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM	75,45	75,65	75,85	76,05	76,25
2	Kemiskinan	15.65	15.15	14.65	14.14	13.64
3	Tingkat Pengangguran	3.45	3.01	2.57	2.13	1.70
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,66	5,9	6,14	6,15	6,20

Dengan mencermati angka target capaian pembangunan Kabupaten Bantul, beberapa indikator pembangunan selama tahun 2013–2017 diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. IPM diproyeksikan meningkat dari 75,45 di tahun 2013 meningkat sekitar 0,80 menjadi 76,25 di tahun 2017. Kemiskinan diproyeksikan menurun menjadi 13,64% di tahun 2017 dari 15,65% di tahun 2013. Proyeksi pengangguran mengalami penurunan dari 3,45% di awal periode menjadi 1,70% di akhir periode. Pertumbuhan diproyeksikan senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rangkaian pertumbuhan sebesar 5,66% (2013), 5,9% (2014), 6,14% (2015), 6,15% (2016) dan 6,20 (2017).

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta, dimana merupakan bagian pengembangan perkotaan ke sisi selatan.Bantul mempunyai pantai-pantai yang cukup banyak untuk dikembangkan sebagai pariwisata dan perikanan, namun juga merupakan daerah rawan Bencana gempa Bumi & tsunami. Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, Pengembangan sektor pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah, Hortikultura (sayuran) & Pariwisata, Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan menjadi arahan pengembangan kewilayahan. Untuk itu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul diarahkan pada:

1. Melihat pada aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul salah satunya adalah IPM dimana capaiannya masih dibawah DIY walaupun sudah diatas Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut Bantul perlu untuk memperluas aksessibilitas, fasilitasi dan bantuan akan layanan umum seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Sektor pertanian mengalami penurunan laju pertumbuhan yang sama dengan permasalahan di Sleman selain terkait dengan produktivitas pertanian juga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang sangat terlihat antara lain di Kecamatan Kasihan, Sewon dan Banguntapan. Upaya-upaya kebijakan pengembangan pertanian perlu untuk mendapatkan perhatian antara lain penguatan pertanian melalui penguatan kelembagaan, pengawasan distribusi bibit, pupuk dan keperluan pertanian, jaminan sosial pertanian, usaha-usaha kemandirian petani seperti pembuatan pupuk organik. Kebijkan pengawasan dan pengendalian lahan pertanian menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan untuk segera dilakukan.
3. Bantul dengan laju pertumbuhan penganggkutan dan perdagangan serta disupport dengan laju pertumbuhan keuangan menjadi potensi untuk dapat menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Modal laju pertumbuhan ekonomi Bantul yang tinggi harus dioptimalkan untuk pengembangan pertanian, industry pengolahan dan perdagangan.

PANSELA (JJLS)

Untuk mendukung pengembangan kawasan selatan dan juga mendukung paradigma among tani ke dagang layar maka pengembangan jalur jalan lintas selatan menjadi program yang sangat penting dan harus didukung untuk percepatan penyelesaiannya. Pansela atau dikenal dengan JJLS merupakan jaringan jalan nasional strategis belum tersambung (Berdasarkan Kepmen PU Nomor 631 Tahun 2009) yang memiliki panjang 125,125 KM dengan rincian Kabupaten Kulon Progo sepanjang 28,840 KM dengan kondisi yang sudah ditangani sampai dengan 2013 sepanjang 14,875 KM, Kabupaten Bantul sepanjang 20,195 KM dengan kondisi sudah ditangani sampai dengan tahun 2013 sepanjang 1,6 KM , dan Kabupaten Gunungkidul sepanjang 76,090 KM dengan kondisi yang sudang ditangani sampai dengan tahun 2013 sepanjang 28,1 KM. Dalam pelaksanaan

pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan ini biaya fisik konstruksi didanai melalui alokasi dana APBN sedangkan pengadaan pembebasan lahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Terkait pembebasan lahan, hal inilah yang menjadi kendala karena keterbatasan pendanaan yang dimiliki daerah. Alokasi anggaran dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2013 total anggaran yang sudah direalisasikan untuk pembebasan lahan sebesar Rp. 64,290.621.414,- atau 32% dari jumlah total keseluruhan kebutuhan . Upaya yang dilakukan agar program ini dapat terealisir dengan cepat maka perlu dukungan pembebasan lahan dari Pemerintah Pusat sehingga diharapkan lima tahun kedepan jalur jalan lintas selatan ini sudah terselesaikan.

6.3.4 Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo capaian IPM masih berada di bawah DIY untuk tahun 2008-2011 walaupun sudah diatas capaian nasional. Kondisi atas IPM tahun 2011 angka harapan hidup berada diperingkat kedua dengan 74,48 tahun setelah Sleman, posisi ini juga sudah melebihi capaian dari DIY. Angka melek huruf di Kulon Progo berada di posisi ketiga dengan 92 persen yang melebihi capaian DIY. Namun rata-rata lama sekolah berada diperingkat kedua terbawah setelah Gunungkidul dengan 8,37 tahun, hal ini posisinya sama dengan pengeluaran per kapita (ppp), yaitu Rp. 631.420,-.

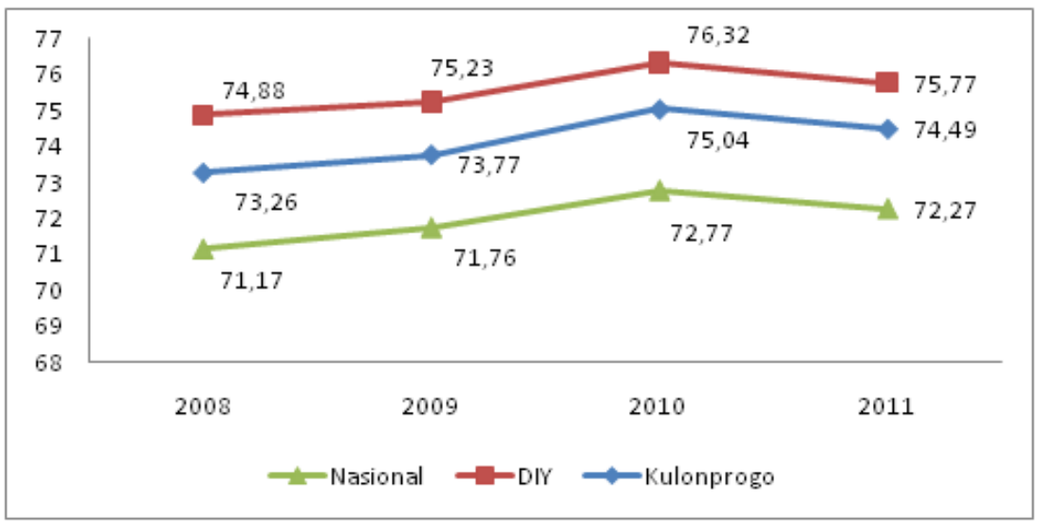

Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Gambar 6.39 IPM Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011

Pada tahun 2007 sampai 2010, pola pergerakan pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan perkembangan pertumbuhan di tingkat provinsi.Tingkat pertumbuhan di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2008 sebesar 7,05% lebuh tinggi dibandingkan rata-rata DIY sebesar 5,72%. Sementara itu, pertumbuhannya di tahun 2011 sebesar 5,98% lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY yang justru menurun menjadi -2,12% dari tahun sebelumnya.

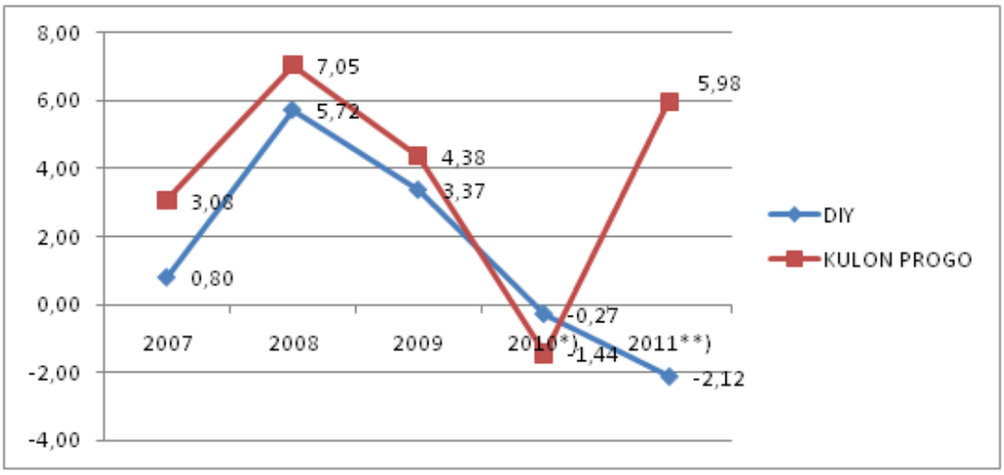

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.40 Pertumbuhan PDRB Pertanian Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB pertambangan Kulon Progo mengalami kenaikan pada tahun 2009 (8,81%) dan 2011 (21,56%), tapi sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2010 menjadi hanya -31,65%. Pada akhir periode pertumbuhan PDRB pertambangan Kabupaten Bantul sebesar 21,56% jauh di atas rata-rata DIY sebesar 11,96%.

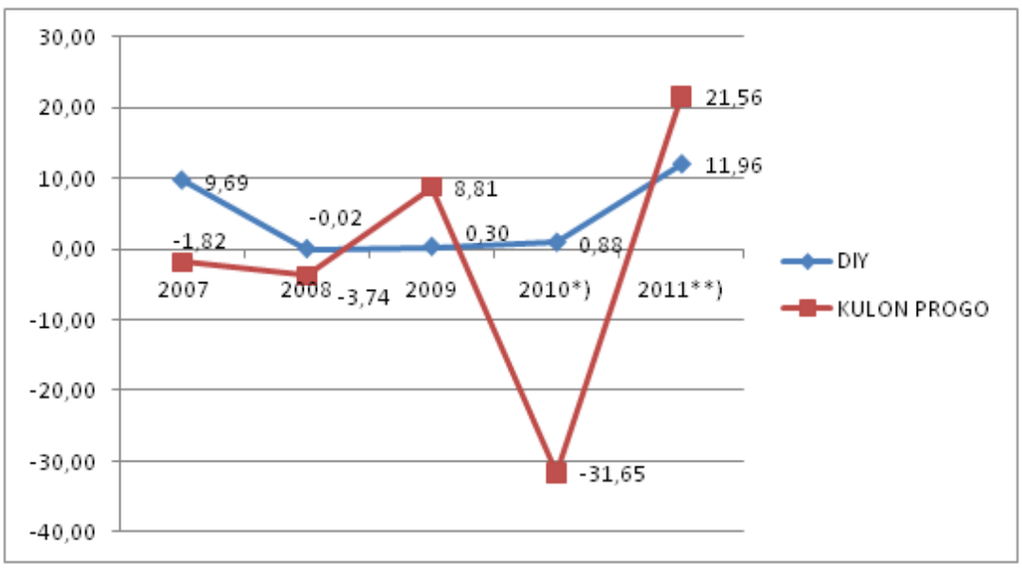

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.41 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan pertumbuhan PDRB se-DIY. Pertumbuhan sektor ini di Kabupaten Kulon Progo tertinggi terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 4,08% yang berada jauh di bawah rata-rata DIY sebesar 7,00%. Angka itu semakin turun drastis di tahun 2011 menjadi -1,235 yang berada jauh di bawah rata-rata DIY sebesar 6,79% yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

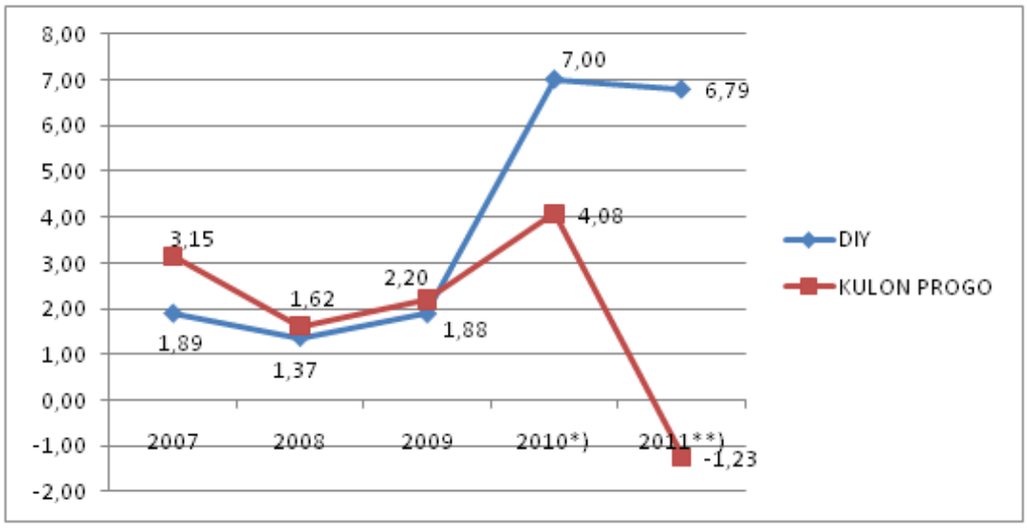

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.42 Pertumbuhan PDRB Industri Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

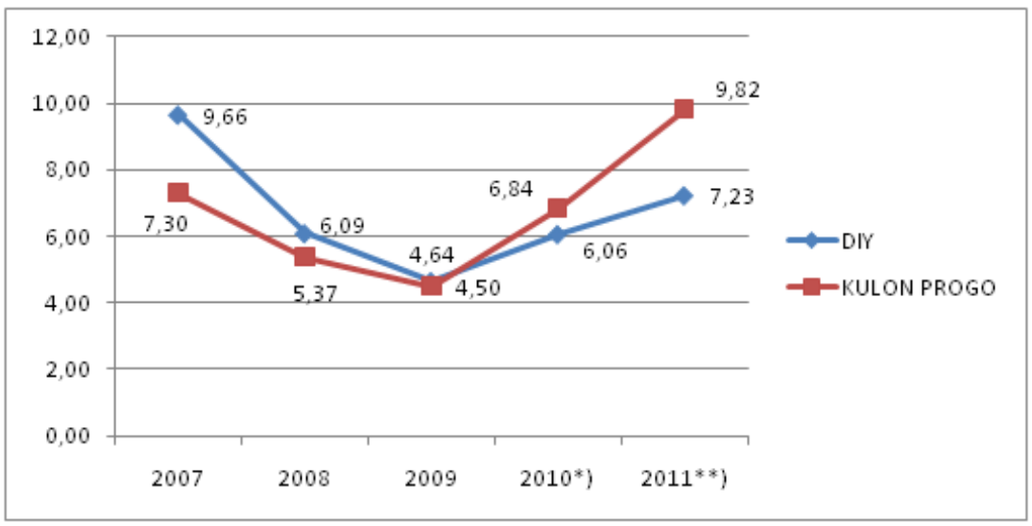

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.43 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB konstruksi Kulon Progo mengalami penurunan pada periode 2007 – 2009 dari 7,30% menjadi 4,50% dan angkanya selalu di bawah rata-rata DIY sebesar 9,66% (2007) sampai 4,64% (2009). Setelah 2009, pertumbuhannya di Kulon Progo dan DIY sama-sama mengalami kenaikan dengan kenaikan di Kulon Progo lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY dengan tingkat pertumbuhan di akhir periode sebesar 9,82%.

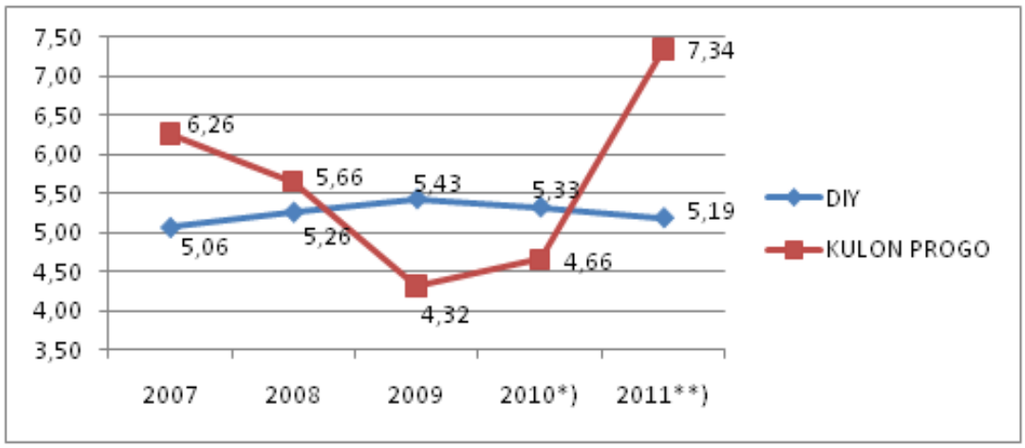

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.44 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB perdagangan Kulon Progo mengalami penurunan pada tahun 2007 sampai tahun 2009 yaitu dari 6,26% (2007) menjadi 4,32% (2009). Pada periode sesudahnya, pertumbuhannya mengalami kenaikan menjadi 4,66% (2010) dan 7,34% (2011) yang bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata DIY sebesar 5,19% di tahun 2011.

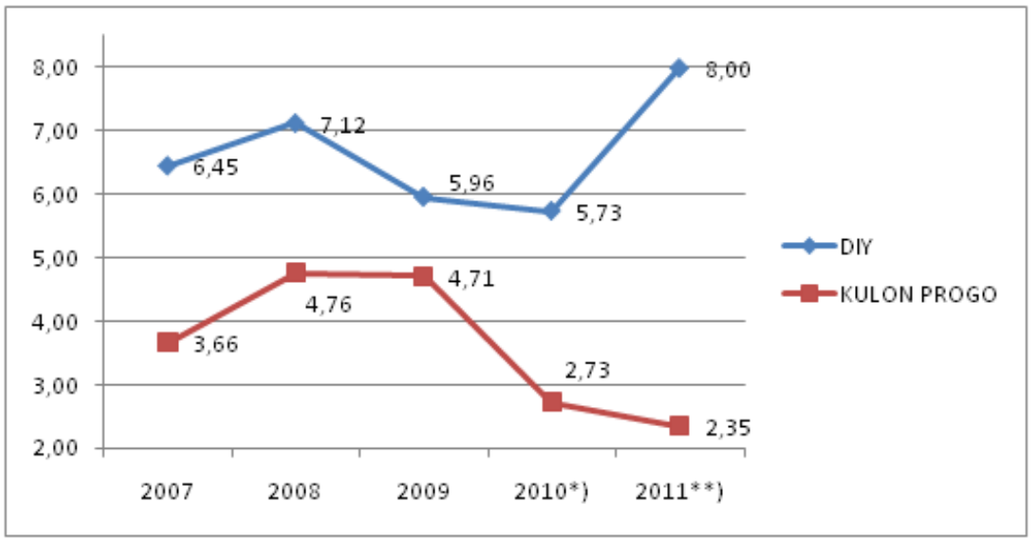

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.45 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, pertumbuhan PDRB pengangkutan Kulon Progo selalu berada di bawah rata-rata DIY sepanjang periode 2007–2011, bahkan tingkat pertumbuhan PDRB Kulon Progo terus mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2011 yang semakin tertinggal pada akhir periode. Di tahun 2011, tingkat pertumbuhannya adalah 2,35% yang berada jauh di bawah rata-rata DIY sebesar 8,00%.

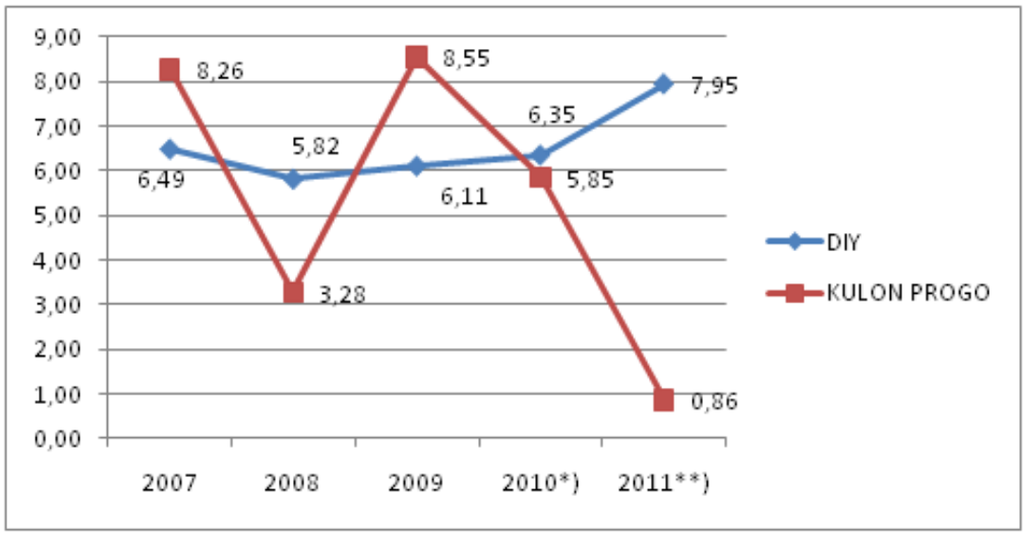

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.46 Pertumbuhan PDRB Keuangan Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

Keadaan sektor keuangan Kulon Progo jauh berbeda dengan perkembangan sektor tersebut di seluruh DIY. Pertumbuhan keuangan DIY relatif mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan keuangan Kulon Progo mengalami fluktuasi. Pada akhir periode, pertumbuhan sektor keuangan Kulon Progo semakin menurun mencapai 0,86% yang di bawah rata-rata DIY yang sebesar 7,95%.

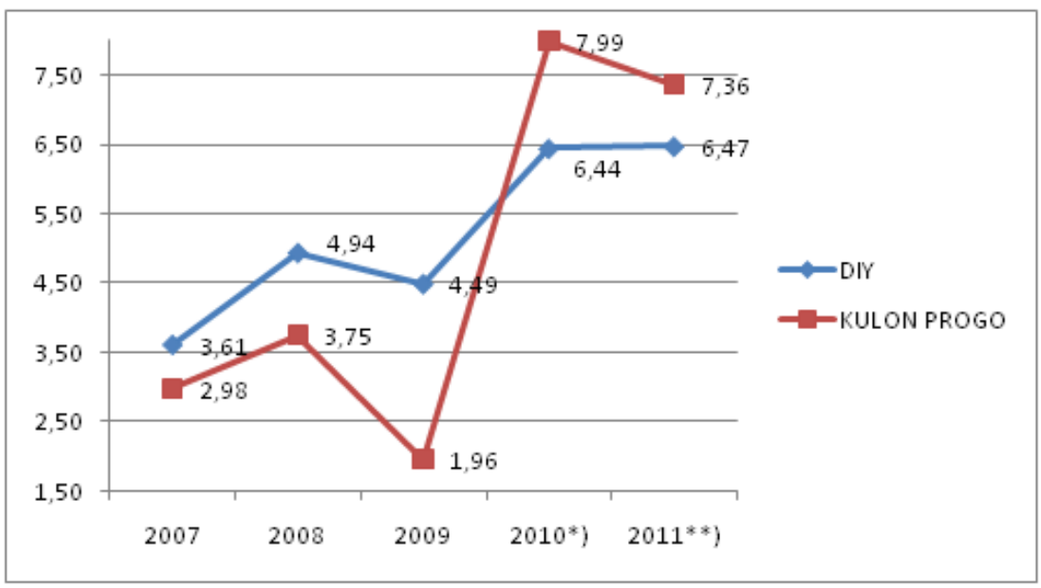

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.47 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Kulon Progo dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, perkembangan pertumbuhan PDRB jasa-jasa baik di tingkat Kabupaten Kulon Progo maupun DIY menunjukkan pola yang sama. Peningkatan tajam ditunjukkan kinerja pertumbuhan PDRB jasa-jasa Kulon Progo yang naik dari 1,96% (2009) menjadi 7,99 (2010). Di akhir periode,

tingkat pertumbuhan Kulon Progo sebesar 7,36% di atas rata-rata DIY yang sebesar 6,47%.

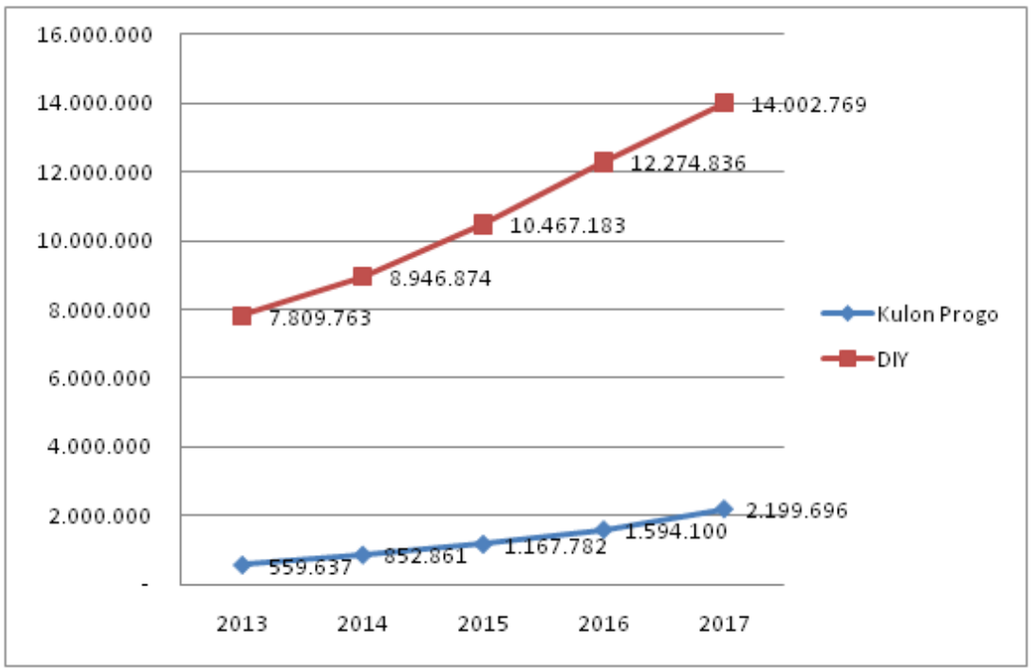

Sumber: Bappeda DIY

Gambar 6.48 Proyeksi Realisasi Investasi Kulon Progo dan DIY Tahun2013-2017 dalam Juta Rupiah

Proyeksi realisasi investasi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 diharapkan mencapai 2,1 trilyun rupiah. Trend kecenderungan tahun 2013 sampai 2017 meningkat secara positif setiap tahunnya.

Tabel 6.11 Target Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM	75.829	76.253	76.677	77.101	77.525
2	Kemiskinan	20.73	19.23	17.73	16.23	14.73
3	Tingkat Pengangguran	2.56	2.24	1.93	1.62	1.30
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.12	5.21	5.30	5.39	5.47

Selama lima tahun pada periode 2013 - 2017, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan target beberapa indikator pembangunan selama periode tersebut. Pada indikator IPM, proyeksi menunjukkan dari 75,83 di awal periode menjadi 77,53 di akhir periode. Prosentase warga miskin diproyeksikan turun dari 20,73% (2013) menjadi 14,73% (2017). Proyeksi tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 2,56% di awal periode menjadi 1,30% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 5,12% di tahun 2013 menjadi 5,47% di tahun 2017.

Kabupaten Kulon Progo dengan kelengkapan potensinya berupa perkebunan, pantai dan merupakan daerah lalu lintas utama memasuki DIY dari sisi sebelah barat menjadikan potensi untuk pengembangan pembangunan, disamping daerah rawan Longsor, Banjir dan Erosi. Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan,

Pengembangan sektor perkebunan, hortikultura & perkebunan, Pengembangan sektor pertanian Tanaman Pangan, Perikanan (darat & laut), Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan adalah arahan pengembangan wilayah Kulon Progo. Untuk itu arah kebijakan pembangunannya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo untuk saat ini masih relative rendah dibandingkan dengan Kabupaten-Kota lainnya. Sektor-sektor yang cukup berkembang diantaranya adalah pertambangan dan pertanian, dikala kabupaten-kota lainnya laju pertumbuhan pertaniannya menurun Kulon Progo justru menunjukkan trend positif. Hal ini perlu untuk disikapi dengan kebijakan pengembangan pertanian untuk meningkatkan porduktivitas pertanian serta support dengan sektor perdagangan yang sudah termasuk tinggi. Kebijakan pada sektor penganggkutan juga harus menjadi perhatian dimana sebagai *show window* DIY dari sisi sebelah barat laju pertumbuhannya dirasa masih kecil.

2. Pengembangan kawasan-kawasan indutri perlu segera digairahkan untuk mendorong sektor-sektor lain dan mendorong laju perekonomian. Mengingat sektor indutri diwilayah ini laju pertumbuhannya cukup kecil. Sektor konstruksi cukup hamper sama dengan fluktuatifnya trend pertumbuhan ekonomi dan Pengembangan sektor indutri. Pusat-pusat pertumbuhaan baru dikawasan Kulon Progo diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang terbilang masih tinggi di wilayah Kulon Progo.

3. Pengembangan pada kesejahteraan masyarakat juga perlu dibarengi selain pengembangan ekonomi dan infrasuktur. Kabupaten Kulon Progo capaian IPM berada dibawah DIY. Dua hal yang harus menjadi perhatian serius terkait dengan indikator IPM yaitu pada rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kabupaten Kulon Progo perlu mendorong agar masyarakat dapat mengakses tingkat pendidikan yang lebih tinggi diantaranya dengan perluasan aksesbilitas pendidikan dan sarana pendukung pendidikan serta pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pengembangan Bandara Baru di Kulon Progo

Sebagai upaya penyediaan pelayanan publik yang memadai khususnya infrastruktur transportasi udara maka dengan adanya keterbatasan layananan yang dilakukan oleh Bandara Adisucipto maka dirasa perlu dilakukan pengembangan bandara baru di DIY.Hal ini juga sesuai dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010.Untuk menangkap kebutuhan tersebut maka telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur dengan PT. Angkasa Pura I untuk penyusunan studi kelayakan dan rencana induk Pembangunan Bandara Baru di Yogyakarta.Semua dokumen tersebut sudah selesai pada bulan Agustus 2012.Sampai dengan saat ini sedang diproses ijin lokasi ke Kemeterian Perhubungan. Dalam pelaksanaan pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo direncanakan akan dilaksanakan oleh pihak investor .

Pelabuhan Tanjung Adikarto

Salah satu upaya untuk merevitalisasi kawasan Selatan DIY adalah pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.PP Tanjung Adikarto diharapkan menjadi kunci pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan di wilayah pesisir Selatan serta menjadi pusat pertumbuhan baru untuk menunjang perekonomian wilayah Selatan.Pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayah Selatan ditargetkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkaitan

dengan industri penangkapan dan industri lainnya, serta mengatasi persoalan ketimpangan wilayah Selatan. Pelabuhan yang ada di pesisir Selatan Kulon Progo itu diharapkan mampu menjadi pelabuhan perikanan yang mendaratkan kapal besar berkemampuan lebih dari 30 GT. Adanya kapal-kapal besar itu diharapkan bisa mendongkrak produksi perikanan laut yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari luar DIY.

Nilai strategis pelabuhan Tanjung Adiarto menjadi semakin penting ketika pembangunan yang prosesnya dimulai sejak tahun 2003 dapat diselesaikan melalui komitmen antara segenap pihak, baik Pusat maupun daerah sesuai kewenangannya. Pembangunan PP Tanjung Adikarto diproyeksikan selesai pada tahun 2015. Dengan beroperasinya pelabuhan tersebut, daya tampung yang dapat dipenuhi sebanyak 250 unit kapal yang terdiri atas 30 unit kapal 5 – 10 GT, 150 unit kapal 10 – 30 GT, dan 20 unit kapal 30 – 50 GT. dengan demikian, diharapkan terdapat peningkatan produksi perikanan yang bisa diperoleh dari dukungan sarana prasarana pelabuhan yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga memberikan nilai strategis terhadap wilayah pesisir

Selatan. Adapun rencana dan tahapan pembangunan pelabuhan dirinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.12 Rencana dan Tahapan Pembangunan Pelabuhan Tahun 2013-2017

Strategi/Kegiatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN PP TANJUNG ADIKARTO					
1. Pembangunan fisik (terutama break water, pengerukan alur, kolam, dan fasilitas pendukung)	X	X			
2. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelola pelabuhan.	X	X	X	X	
3. Perbaikan sistem lelang di TPI					
a) Pembentukan/penguatan KUBE/KOPERASI nelayan, pedagang, pengolah.	X	X		X	
b) Pelatihan dan pendampingan sistem lelang dan pemasaran ikan (mengatasi monopoli dan sistem lelang, meningkatkan posisi tawar nelayan dan harga ikan), bahkan apabila diperlukan, koperasi dapat melakukan pembelian	X	X	X X	X	
B. PEMANFAATAN KM 30 GT					
1. Pelatihan dan pendampingan di luar daerah (Cilacap, Prigi, Pacitan, Benoa/Bali untuk tuna)	X	X		X	X
2. Pelatihan dan pendampingan di DIY (kontrak pelatih nahkoda, fishing master, ABK (seting/ hauling/penanganan hasil/pemeliharaan alat dan KM)	X	X	X X	X	X

Selain pembangunan Tanjung Adikarto, hal yang tidak boleh dilupakan adalah pengembangan SDM dan kelembagaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.Pengembangan SDM tersebut dilakukan sinergis pada wilayah pesisir dengan mengoptimalkan SDM manusia setempat yang dilakukan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu upaya strategis untuk mendukung hal tersebut adalah mengoptimalkan peran masyarakat dalam memanfaatkan kapal 30 GT yang akan dilakukan secara kemitraan. Pola kemitraan dalam mendukung hal tersebut akan didukung oleh berbagai pihak melalui skema: Hibah murni, Hibah dengan pendampingan Pemda, maupun dikelola sepenuhnya oleh Pemda. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha perikanan masyarakat dan menjadi pionir dalam upaya meningkatkan produksi perikanan.

Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Baja di Kulon Progo

Pasir besi merupakan sumber daya alam yang potensial untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Kulon Progo. Pasir besi di Kabupaten Kulon Progo terdapat di Pantai Selatan Kulon Progo sepanjang 20 Km dari muara kali Progo sampai muara kali Bogowonto. Arahan pengembangan kawasan pertambangan terutama bahan galian pasir besi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Kulon Progo sepanjang 22 km dan lebar 1,8 km. Pasir besi dengan cadangan sekitar 240 juta ton dengan kadar Fe 14 %.

Pasir besi ini mempunyai prospek sangat baik dan rencananya akan dilaksanakan penambangan dan pembuatan pabrik baja di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, untuk memberikan manfaat bagi perekonomian DIY, produk besi baja hasil olahan pabrik baja tersebut semestinya dapat diolah menjadi produk-produk turunan yang memberikan nilai tambah.Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah kawasan industri berbasis baja di Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan dari pengembangan kawasan industri ini adalah untuk mewujudkan kawasan industri terpadu dari hulu hingga hilir. Sementara strategi dari pengembangan kawasn industri ini adalah :

1. Pengembangan industri hulu berbasis bahan baku pasir besi seperti pengolahan pasir besi menjadi baja
2. Pengembangan industri antara dan hilir baja berbasis pada bahan baku besi
   a. Industri hilir meliputi seperti industri profil berat, industri rod, industri seamless pipe dan sebagainya
   b. Industri hilir meliputi seperti industri konstruksi, industri komponen, industri alat berat dan sebagainya.

Untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri ini dilakykan strategi sebagai berikut:

1. Pemberian kemudahan kepada calon investor seperti fasilitasi kemudahan dalam proses perijinan dan insentif bagi investor
2. Pengembangan pemasaran dan persiapan sarana penunjang kawasan industri

Pembagian zonasi kawasan industri berbasis baja ini dibagi dalam beberapa zona berdasarkan jenis dan karakteristik industri serta unsure pendukung kegiatan industri tersebut. Rencana zonasi di kawasan industri ini dibagi dalam 3 kelompok zona yaitu:

1. Zona kawasan industri hulu
2. Zona Kawasan industri antara

3. Zona Kawasan industri hilir

Pengembangan Kawasan Industri Sentolo

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY, kawasan peruntukan industri di DIY ada di wilayah kecamatan Sentolo, Kab.Kulon Progo.Selain sebagai kawasan industri berbasis baja, direncanakan pengembangan kawasan industri secara umum di wilayah Sentolo. Industri sudah merencanakan pengembangan pabrik di wilayah ini adalah PT. Kubota yang bergerak di produksi *hand tractor.*Untuk pengembangan selanjutnya, pada tahun 2013 akan disusun Studi Kelayakan, Masterplan, dan dokumen AMDAL kawasan industri. Kemudian pada tahun berikutnya, kawasan ini akan mulai dijual kepada perusahan industri.

6.3.5 Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul capaian IPM tahun 2008-2011 mengalamai peningkatan namun baik secara Nasional maupun di wilayah DIY capaiannya masih cukup rendah. Perbandingan angka komposit dari indikator IPM tahun 2011 menunjukkan bahwa dari angka harapan hidup (70,01 tahun), angka melek huruf (84,94 persen), rata-rata lama sekolah (7,70 tahun) dan pengeluaran per kapita (ppp) yang mencapai Rp628.730 terendah diantara kabupaten-kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

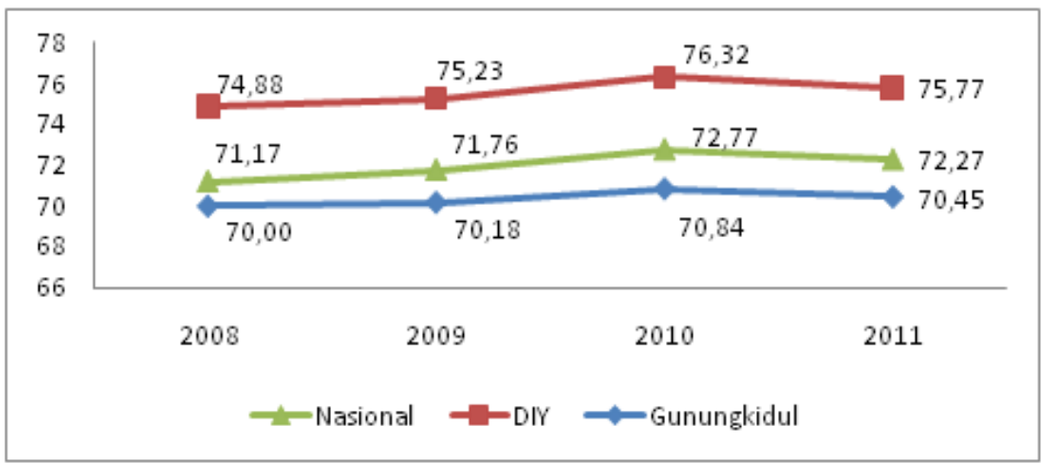

Sumber: BPS Provinsi DIY (2008-2011) diolah

Gambar 6.49 IPM Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2011

Pada periode 2007–2010, perkembangan pertumbuhan sektor pertanian Gunungkidul relatif searah dengan perkembangannya di tingkat DIY. Capaian pertumbuhan di tingkat Gunungkidul tertinggi terjadi di tahun 2009, yaitu sebesar 5,91%, namun tingkatnya mengalami penurunan tajam di tahun 2010 yang hanya menjadi -0,33%. Di akhir tahun, angkanya meningkat menjadi 0,55% yang berada jauh di atas rata-rata DIY sebesar -2,12%.

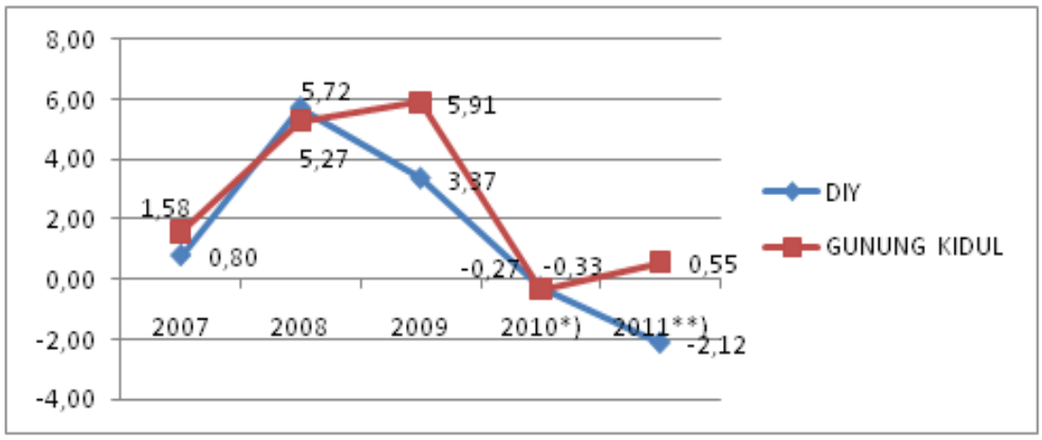

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.50 Pertumbuhan PDRB Pertanian Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

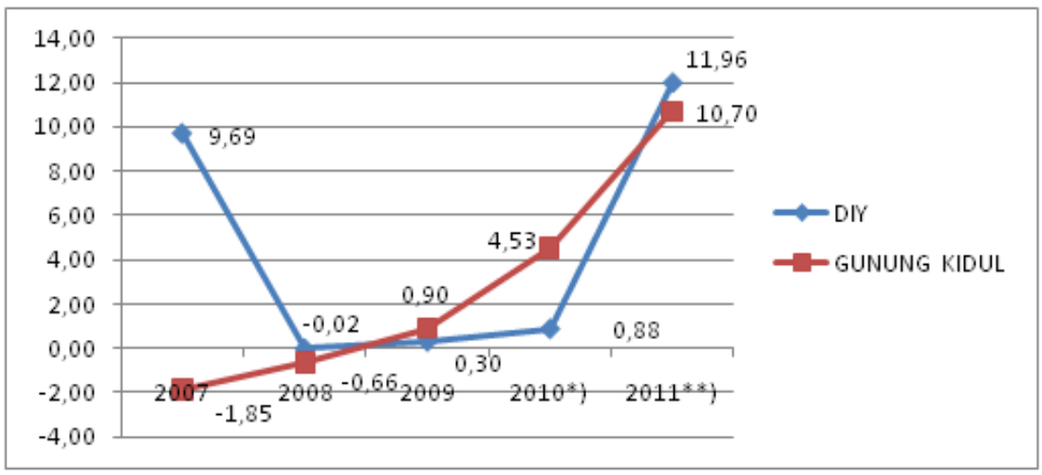

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.51 Pertumbuhan PDRB Pertambangan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, pertumbuhan PDRB pertambangan Gunungkidul senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka itu naik dari -1,85% di tahun 2007 menjadi 10,70% di tahun 2011. Angka pertumbuhan yang meningkat itu masih berada di bawah rata-rata DIY yang sebesar 11,96%.

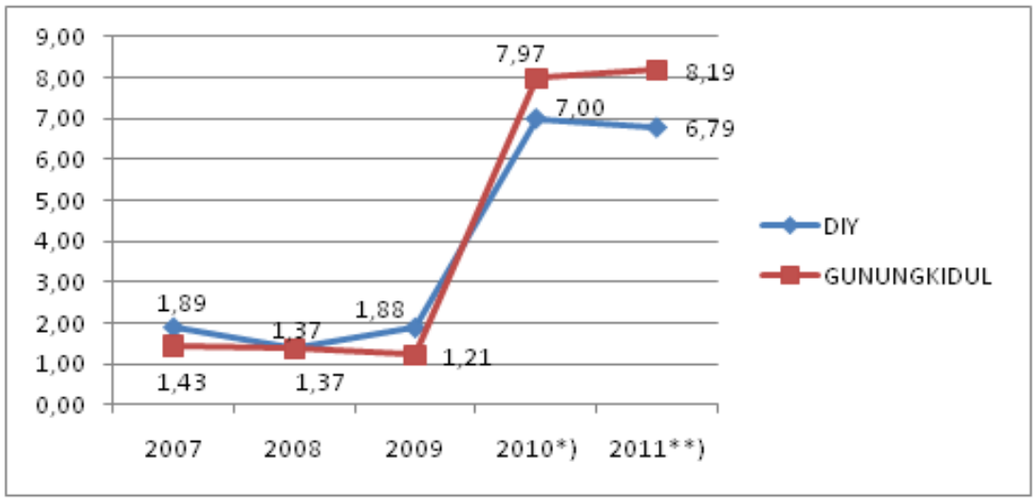

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.52 Pertumbuhan PDRB Industri Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

Selama periode 2007 sampai dengan 2011, pola perkembangan pertumbuhan PDRB industri Kabupaten Gunungkidul dan rata-rata DIY menunjukkan perkembangan yang relatif sama dengan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2010 dengan puncak peningkatan sebesar 7,97% (Kabupaten Gunungkidul) dan 7,00% (DIY). Sementara itu di akhir periode pertumbuhan PDRB industri Kabupaten Gunungkidul meningkat menjadi 8,19% sementara angka DIY turun menjadi 6,79%.

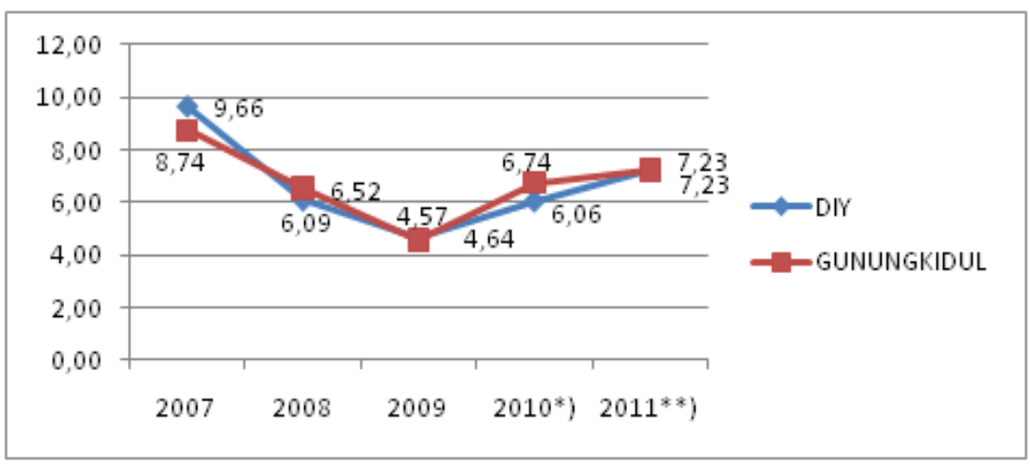

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.53 Pertumbuhan PDRB Konstruksi Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, pertumbuhan PDRB konstruksi Gunungkidul dan DIY mempunyai pola pergerakan yang hampir sama. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2009 dengan pertumbuhan sebesar 4,57% untuk DIY dan 4,64 untuk Gunungkidul. Sementara itu, tingkat pertumbuhan PDRB Gunungkidul dan DIY mencapai tingkat pertumbuhan yang sama di tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,23%.

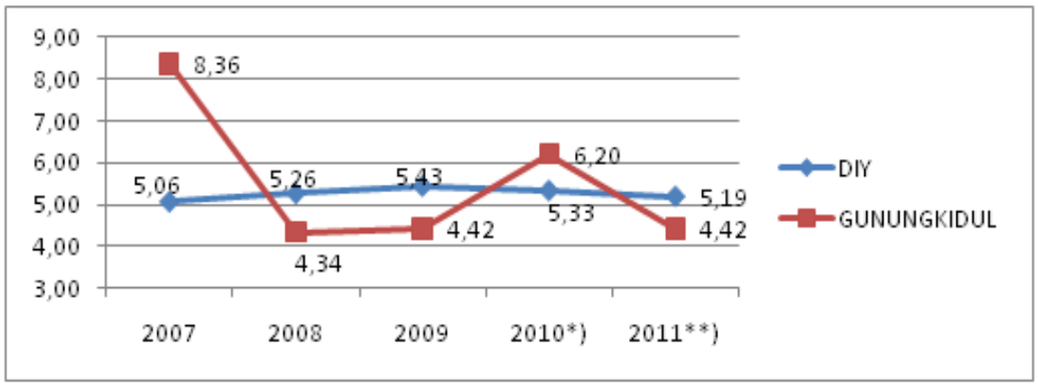

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.54 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

Pada periode 2007 sampai dengan 2011, perkembangan pertumbuhan PDRB perdagangan DIY relatif stabil berkisar 5,06%-5,43%, sementara pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 dan 2010 pertumbuhan sektor tersebut di Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY sementara di tahun yang lain kondisi menunjukkan keadaan yang sebaliknya.

Pertumbuhana PDRB pengangkutan baik di Gunungkidul dan DIY mengalami fluktuasi yang cukup besar pada periode 2007 sampai dengan 2011. Pertumbuhan PDRB pengangkutan Gunungkidul sempat turun drastis menuju angka 2,68% di tahun 2009 dan sempat mengalami kenaikan di tahun 2010 menjadi 6,60%. Sementara itu pada akhir periode pertumbuhan sektor bersangkutan di keseluruhan DIY lebih tinggi dibandingkan Gunungkidul.

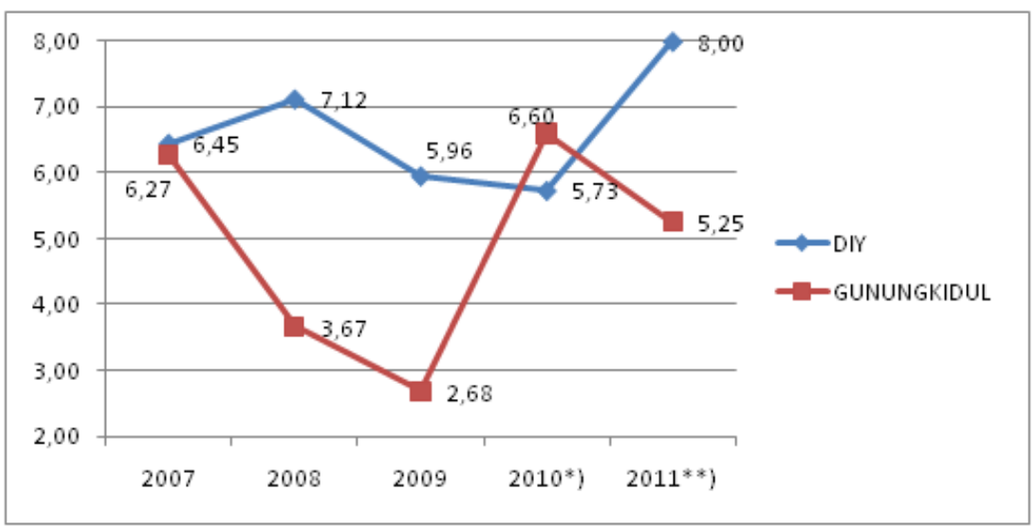

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.55 Pertumbuhan PDRB Pengangkutan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

Pertumbuhan PDRB keuangan Gunungkidul mengalami penuruna di tahun 2009, namun dapat mengalami kenaikan kembali sampai menuju pertumbuhan tertinggi sebesa 10,33% di tahun 2011. Secara umum, tingkat pertumbuhannya di Gunungkidul lebih tinggi dibandingkaan rata-rata DIY kecuali pada saat penurunan tajam di tahun 2009.

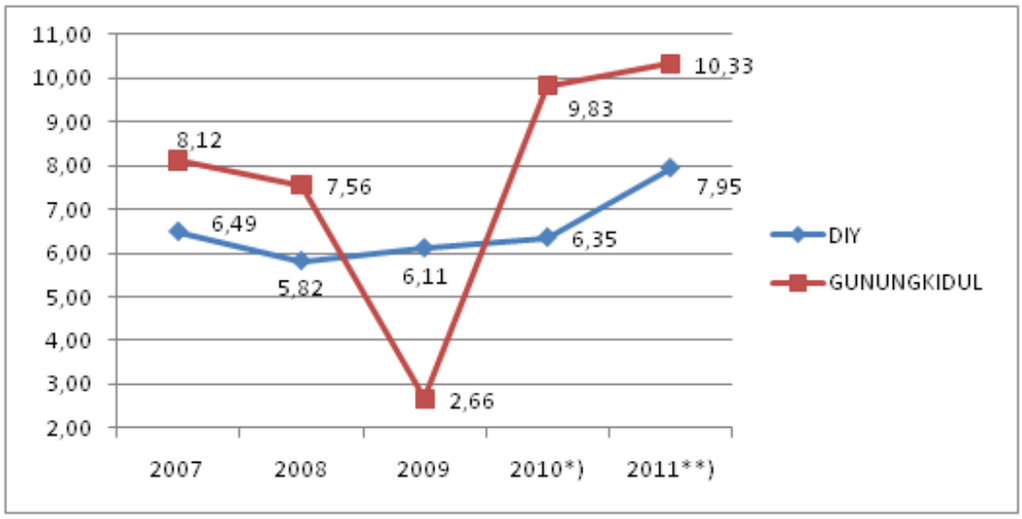

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.56 Pertumbuhan PDRB Keuangan Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

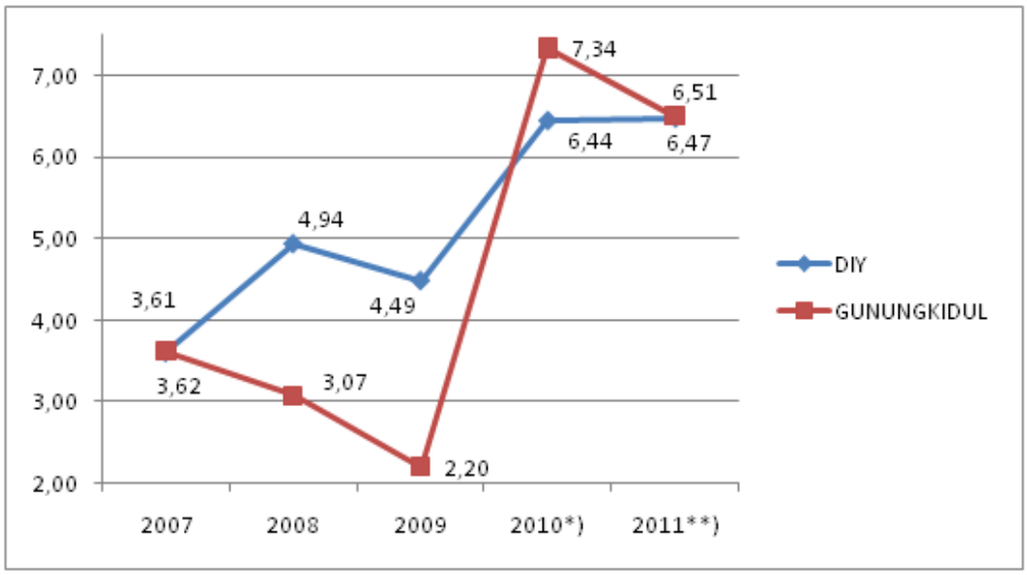

Sumber: BPS DIY (2007 – 2011)

Gambar 6.57 Pertumbuhan PDRB Jasa-jasa Gunungkidul dan DIY Tahun 2007-2011

Secara umum, pertumbuhan sektor jasa-jasa keuangan Gunungkidul sesuai dengan perkembanganya di tingkat DIY. Penurunan terjadi pada periode 2007 – 2009, di mana pertumbuhannya turun dari 3,62% (2007) menuju titik terendah selama 5 tahun yaitu 2,20% (2009). Setelah penurunan tersebutm pertumbuhannya mengalami kenaikan signifikan menjadi 7,34% di tahun berikutnya dan sempat turun kembali menjadi 6,51%. Pada tahun 2010 dan 2011, pertumbuhan jasa-jasa di Gunungkidul tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata DIY.

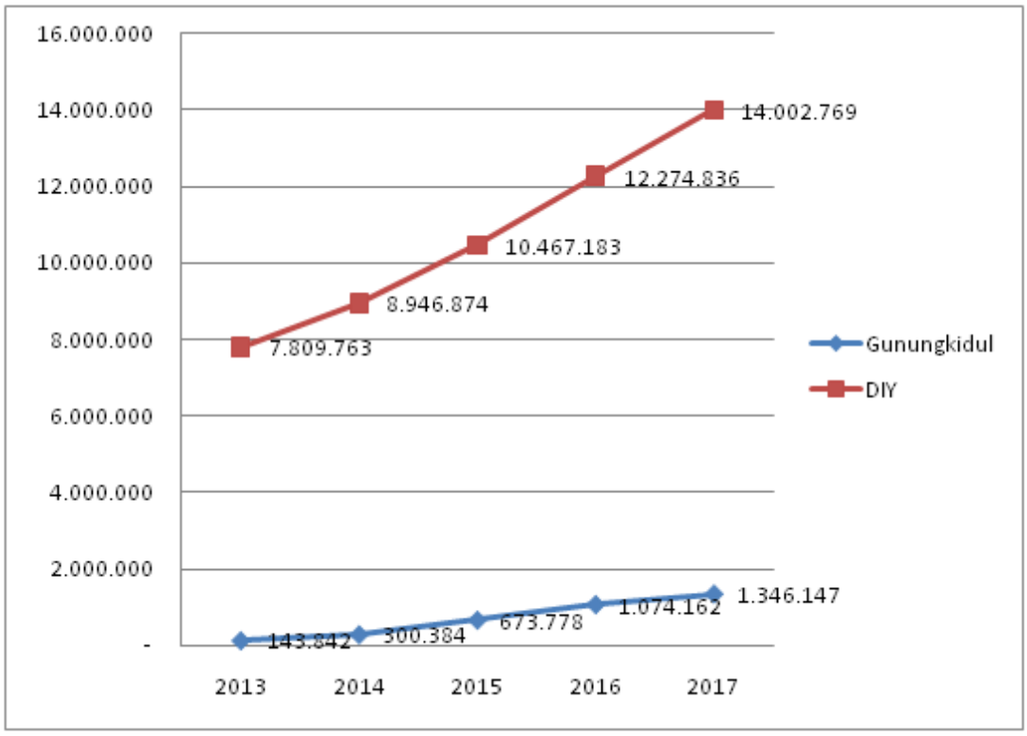

Sumber: Bappeda DIY

Gambar 6.58 Proyeksi Realisasi Investasi Gunungkidul dan DIY Tahun 2013-2017 dalam Juta Rupiah

Berdasarkan realisasi investasi kabupaten Gunungkidul dapat disajikan proyeksi realisasi investasi tahun 2013 sampai 2017 yang diharapkan minimal mencapai 203 millyar rupiah.

Berdasarkan perbandingan capaian indikator makro pembangunan daerah, dari 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY, antara lain berupa indikator pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB per kapita, dan indicator kesejahteraan rakyat Kabupaten Gunungkidul memiliki angka yang relatif terendah dan angka kemiskinan masih tinggi di DIY.

Tabel 6.13 Target Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM	71.3	71.57	71.83	72.1	72.37
2	Kemiskinan (%)	23.23	22.85	22.47	22.08	21.7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.87	1.85	1.53	1.22	0.9
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.66	4.78	4.89	5.01	5.12

Target yang diproyeksikan untuk dicapai pada tahun 2013 sampai denan 2017 menunjukkan proyeksi optimis adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul, di mana kinerja pembangunan diproyeksikan semakin membaik. Proyeksi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan IPM dari 71,3 (2013) menjadi 72,37 di akhir periode. Kemiskinan diproyeksikan turun dari 23,23% (2013) menjadi 21,7% (2017). Proyeksi pengangguran mengalami penurunan dari 1,87% di awal periode menjadi 0,9% di akhir periode. Sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 4,66% di tahun 2013 menjadi 5,12% di tahun 2017.

Kabupaten Gunungkidul dengan topografi yang berbukit-bukit (Rawan Longsor & Kekeringan) namun tersimpan kekayaan pantai dan suguhan wisata alam yang cukup banyak. Pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, Pengembangan Sektor Pertanian Lahan Kering, & Peternakan, Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan menjadi pilihan arah pengembangan wilayah. Pengembangan dan pengoptimalan potensi alam menjadikan Gunungkidul saat ini menjadi salah satu tujuan wisata alam favorit wisatawan. Arah kebijakan pembangunan Gunungkidul adalah:

1. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Gunungkidul perlu mendapat perhatian serius, berdasarkan empat indikator IPM pada tahun 2011 bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita pada posisi terendah di wilayah DIY. Berkaitan dengan capaian IPM maka wilayah Gunung Kidul diarahkan untuk melakukan percepatan dalam:
   a. Peningkatan harapan hidup masyarakat, peningkatan untuk komponen IPM ini dapat disupport antara lain dengan peningkatan pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, bantuan dan jaminan sosial.
   b. Penurunan Angka Melek Huruf dan peningkatan rata-rata lama bersekolah. Diperlukan kebijakan untuk peningkatan pemerataan pendidikan dengan upaya penguatan pada pelayanan pendidikan formal dan non formal bagi semua kalangan masyarakat. Diperlukan skema-skema bantuan dan fasilitasi pembelajaran bagi masyarakat untuk membantu meningkatkan aksesibilitas belajar.
   c. Peningkatan pengeluaran riil per kapita. Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing dan perluasan kesempatan kerja.
2. Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya memiliki trend positif yaitu pada pertanian, keuangan, industri pengolahan dan pertambangan namun ternyata tidak terlalu disupport oleh sektor perdagangan dan penganggkutan. Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada penganggkutan dan perdagangan yang nantinya akan diharapkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor utama yang telah tumbuh seperti pertanian dan industri pengolahan perlu untuk duspport agar memiliki nilai labih dari produk yang telah dihasilkan tersebut.

Pengembangan Kawasan Baron

Pengembangan Kawasan Baron dan sekitarnya terdiri dari 3 (tiga) sub Kawasan Pengembangan, yaitu Kawasan Baron Techno Park , Kawasan Agro Forestry, dan Pengembangan Kawasan Wisata Baron. Dokumen Master Plan pengembangan ketiga kawasan tersebut telah disusun pada tahun 2011 dan dilanjutkan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) pada tahun 2012.Pengembangan pada kawasan yang masuk dalam kategori kawasan karst, memerlukan dokumen Amdal yang disusun pada tahun 2013.

Khusus pada sub kawasan Baron Techno Park , diarahkan pada pembangunan dan pengembangan laboratorium energi baru terbarukan, yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di atas lahan seluas 9,25 Ha.

Pengembangan Kawasan Baron dan sekitarnya secara konsepsual membutuhkan dukungan pengembangan lintas sektor, meliputi pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan, sektor peternakan,

sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor Pariwisata, dengan dukungan sarana prasarana sektor Pekerjaan Umum.

Dengan melihat kondisi awal pada akhir 2012 bahwa kesiapan seluruh dokumen perencanaan telah siap, diharapkan pada tahun ke-2 RPJMD 2012-2017 (Tahun 2014) implementasi pengembangan pada masing masing sub kawasan dapat dimulai dengan pengembangan pada masing masing sektor dengan dukungan sarana dan prasarana dasar (penyediaan air bersih, aksesibilitas dalam kawasan dan dukungan utilitas serta sanitasi). Pengembangan selanjutnya diorientasikan pada integrasi antar sub kawasan, pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan wisata edukasi dan wisata alam . Diharapkan sampai dengan tahun terakhir RPJMD (tahun 2017), ke-3 (tiga) sub kawasan telah dapat berkembang menjadi kawasan baru yang mendukung pengembangan kawasan pantai Selatan Gunungkidul.

Pariwisata Berbasis Budaya

Pengembangan kepariwisataan di DIY mendapatkan prioritas utama, bersama dengan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Visi Pembangunan DIY Tahun 2025 yang mewujudkan DIY sebagai "Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera". Misi RPJPD 2005-2025 menyatakan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang kepariwisataan di DIY yaitu dengan mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

Walaupun Misi 2005-2025 menetapkan kondisi masa depan DIY yang diinginkan untuk tiap-tiap sektor, akan tetapi keterkaitan dan sinergi antarsektor merupakan syarat mutlak dalam pencapaian kondisi yang diinginkan dalam setiap sektor. Misi sektor kepariwisataan, yaitu 'mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif' dapat dicapai karena sinergi sektor ini dengan sektor pendidikan dan kebudayaan.Kemajuan sektor pendidikan dan kebudayaan merupakan sumber daya utama/basis pengembangan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.Pengembangan kepariwisataan di DIY menjadi unik dan berdaya saing karena keunggulan sektor pendidikan dan budaya di DIY.Industri kepariwisataan di DIY harus dikembangkan berbasis keunggulan sektor-sektor tersebut di DIY.Kepariwisataan di DIY adalah kepariwisataan berbasis budaya dan kreativitas sumber daya manufsia untuk mengolah sumber daya budaya dan alam di DIY untuk mewujudkan kepariwisataan DIY yang kreatif dan inovatif.

Mengacu pada filosofi pembangunan DIY yaitu '*Hamêmayu-Hayuning Bawânâ*' dan Visi DIY untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melandasi pilihan titik pijak *(standpoint)* pengembangan kepariwisataan DIY. Pengembangan kepariwisataan di DIY harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan, yaitu *Sustainable Tourism Development*, *Community-based Tourism*, *Four-track of Tourism Development* (*pro growth, pro job, pro poor, and pro environment*), *good tourism governance*, dan prinsip keterpaduan pembangunan kepariwisataan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.

Untuk pembangunan kepariwisataan untuk periode 2012-2017, dasar pengembangannya adalah kepariwisataan DIY berbasis budaya dan nilai tambah (*creative tourism*). Budaya dalam hal ini tidak boleh diartikan hanya sebagai produk budaya tradisional tetapi juga pengembangannya sesuai dan mencerminkan karakter budaya DIY.Kepariwisataan DIY perlu membangun keunikan yang bernilai tambah dan unggul yang didasarkan pada nilai-nilai budaya. Pengembangan pariwisata kreatif DIY secara khusus perlu menunjukkan peran serta masyarakat dan keterkaitan antar sektor misalnya, pendidikan, kebudayaan, industri kecil-menengah,

pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perkebunan, PU ESDM, perhubungan dan lain sebagainya. Pilihan kebijakan dalam pengembangan ke-empat ranah pembangunan kepariwisataan, yaitu destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan adalah kreativitas yang berlandaskan pada budaya DIY, keunggulan SDM pariwisata, peran serta masyarakat, dan pendekatan multi dan lintas sektor.

Upaya untuk mewujudkan kebijakan pembangunan kepariwisataan DIY yang meliputi ke-empat pembangunan kepariwisataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Pembangunan Destinasi harus dilaksanakan secara terfokus untuk menciptakan nilai tambah daya tarik wisata yang sudah ada (*current product*) dan membangun daya tarik wisata baru (terutama destinasi pantai) untuk potensi daya tarik wisata unggulan (*new product*). Nilai tambah yang diprioritaskan adalah penciptaan dan pengayaan Daya Tarik dengan sentuhan teknologi dan atraksi berbasis budaya dan masyarakat.
2. Akselerasi Pembangunan Pemasaran Pariwisata harus dilaksanakan untuk meningkatkan penetrasi ke pasar-pasar 'tradisional' DIY (*current market*) dan menciptakan pasar-pasar baru (*new market*), dengan strategi pemasaran pariwisata yang kreatif dan tepat sasaran.
3. Akselerasi Pembangunan Industri Pariwisata harus dilaksanakan untuk meningkatkan standar kualitas industri pariwisata dan meningkatkan rantai nilai keterkaitan antarindustri dan dampak pengganda pada masyarakat.
4. Akselerasi Pembangunan SDM dan Kelembagaan Pariwisata harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata, koordinasi lintas sektor dan daerah, dan penguatan manajemen pariwisata.

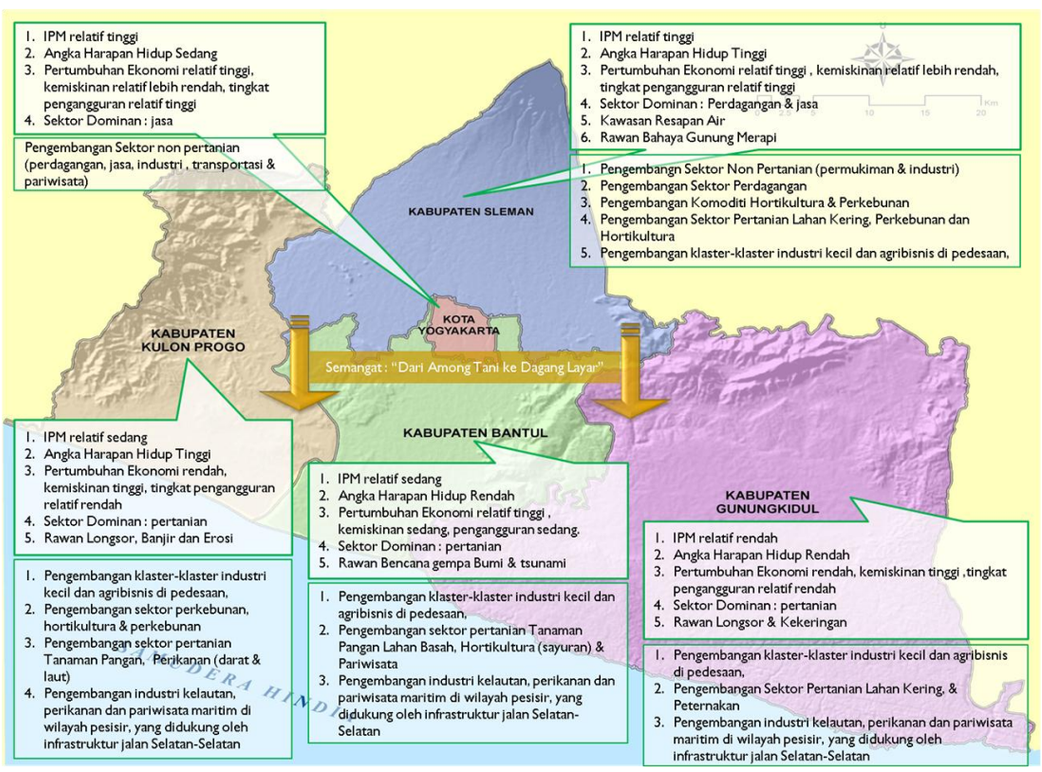

Gambar 6.59 Skema Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Tahun 2013-2017

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

   Program untuk mendukung misi ini adalah:

   Urusan Pendidikan

   a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
   b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
   c. Program Pendidikan Menengah
   d. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
   e. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
   f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   g. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
   h. Program Pendidikan Tinggi
   i. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
   j. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada BLUD
   k. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
   l. Program PengembanganUnggulanMutuPendidikan
   m. Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan

   Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

   a. Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
   b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
   c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
   d. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
   e. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda

   Urusan Perpustakaan

   a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
   b. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
   c. Program Pengembangan Budaya Baca

   Urusan Kearsipan

   a. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
   b. Program peningkatan kualitas layanan informasi

Urusan Kesehatan

a. Program Pembinaan Kesehatan Ibu
b. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan
c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes
d. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
e. Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
h. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
i. Program Pembinaan Kesehatan Lansia
j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
k. Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos
m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia
n. Program Pembiayaan kesehatan
o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP Respira;
p. Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
d. Program Pengembangan Bina Keluarga;
e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
f. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak;
c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
d. Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan;
e. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
f. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan;
g. Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
b. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
c. Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa;

d. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

e. Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa;

f. Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa.

Urusan Tenaga Kerja

a. Program pelayanan, pengawasan lembaga ketenagakerjaan

Urusan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

2. Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.

Program untuk mendukung misi ini adalah:

Urusan Pemuda dan Olah Raga:

a. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;

b. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;

c. Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan;

d. Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur;

e. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum;

f. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku;

g. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumberdaya Air Lainnya

Urusan Perumahan

a. Program Pengembangan Perumahan;

b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

Urusan Tenaga Kerja

a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

c. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan

d. Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Urusan Energi, Sumberdaya, Mineral

a. Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Ketenaga Listrikan;

b. Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar;

c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi;

d. Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

Urusan Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
d. Program Pengembangan Desa Wisata.

Urusan Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
b. Program PeningkatanPromosi, Kerjasama dan Pemerataan Investasi;
c. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

Urusan Ketahanan Pangan

a. Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan;
b. Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
c. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
d. Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan;
e. Program Pemberdayaan Penyuluhan.

Urusan Pertanian

a. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani;
b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian;
c. Program PeningkatanProduksi Pertanian TanamanPangan;
d. Program PeningkatanProduksiHortikultura;
e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Urusan Kehutanan

a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
b. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan;
c. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
b. Program PengembanganPerikananTangkap;
c. Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar;
d. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
f. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan.

Urusan Industri

a. Program Pengembangan IKM;
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
c. Program Pengembangan Industri Kreatif.

Urusan Ketransmigrasian:

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

3. Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Urusan Umum

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Pelayanan Jasa Pengujian;
b. Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
c. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
c. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana;
f. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

Urusan Statistik

a. Program Pengembangan Statistik Daerah.

Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
b. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi;
c. Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
b. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat;
c. Program Pemeliharaan kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
d. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
g. Program Penegakan Perda dan Perkada;
h. Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
b. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media;
c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
d. Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
e. Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan;
f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
i. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum;
j. Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
k. Program pencegahan dini bencana;
l. Program penanggulangan korban bencana;
m. Program Pemulihan Pasca bencana;
n. Program Peningkatan Pendapatan Daerah;
o. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
q. Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro;
r. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah;
s. Program Pendidikan Kedinasan;
t. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
u. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
v. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media;
w. Program Fasilitasi Bantuan Dan Layanan Hukum;
x. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum;
y. Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah;
z. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kab./Kota;
aa. Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan;
bb. Program Penelitian dan Pengembangan;
cc. Program Pengembangan Kehidupan Beragama;
dd. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
ee. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Urusan Kearsipan

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4. Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Program untuk mendukung misi ini adalah:

Urusan Perhubungan

a. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
c. Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal;
d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
g. Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi;
h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Urusan Tata Ruang

a. Program Pemanfaatan Ruang;
b. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY;
c. Program Perencanaan Tata Ruang;
d. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan;
e. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah;
b. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan;
c. Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan

Urusan Kehutanan

a. Program Penataan Kawasan Hutan;
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA;
b. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiran iklim laut.

Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
c. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
e. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam;
f. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;

b. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur;

c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya;

d. Program PenyediaandanPengelolaan Air Baku;

e. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum;

f. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya;

g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah;

h. Program PengelolaanPersampahan;

i. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan;

j. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan;

k. Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan;

l. Program Pengendalian Banjir;

m. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi.

Urusan Perumahan

a. Program Pengembangan Perumahan;

b. Program Pengurangan Kawasan Kumuh.

Lebih lanjut didalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdapat pula program yang diorientasikan pada upaya membangun dan mewujudkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program-program tersebut tentunya berkorelasi dengan misi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti telah diuraikan sebelumnya. Adapun program-program keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah, sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Keistimewaan

Urusan Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini *)

b. Program Pendidikan Menengah*)

c. Program Pendidikan Non Formal dan Informal*)

d. Program akselerasi pengembangan Pendidikan Terkemuka*)

e. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya *)

Urusan Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat *)

b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat *)

c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *)

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY*)

b. Program Penataan Kawasan Budaya pendukung keistimewaan DIY *)

Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan*)

b. Program Pengendalian Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan*)

Urusan Perhubungan

a. Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan*)

Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya*)

Urusan Pertanahan

a. Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan*)

b. Program Penataan Pemanfaatan Tanah*)

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan *)

Urusan Keluarga Berencana

a. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera *)

Urusan Sosial

a. Program Pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial *)

b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya *)

c. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) *)

d. Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawana, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)

Urusan Ketenagakerjaan

a. Program Peningkatan kesempatan kerja *)

Urusan Kebudayaan

a. Program Pelestarian Kekayaan Budaya*)

b. Program Pengembangan Nilai Budaya *)

c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya *)

d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya *)

e. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya *)

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan *)

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan*)

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*)

c. Program pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda*)

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*)

b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*)

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah*)

d. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan*)

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan *)

b. Program Pembinaan Budaya Gotong Royong

Urusan Kearsipan

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip, *)

b. Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan, *)

Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Berbasis Keistimewaan*)

Urusan Ketahanan Pangan

a. Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan*)

Urusan Perpustakaan

a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan*)

b. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan*)

B. Urusan Pilihan

Urusan Pertanian

a. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*)

b. Program Peningkatan Produksi Hortikultura *)

c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*)

Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap*)

Urusan Kehutanan

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan*)

Urusan Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*)

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*)

c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata*)

d. Program Pengembangan Desa Wisata*)

Urusan Industri

a. Program Pengembangan IKM*)

b. Program Pengembangan Industri Kreatif*)

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.	Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dari 30% (derajat non participation) menjadi 70% (degrees of citizen power)	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	n/a	36,5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	%	3,55	n/a	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Sebelum Perubahan
				Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	%	n/a	96,99	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Perubahan Baru
				Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	%	96,41	97,00	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Sebelum Perubahan
				Presentase Partisipasi Perempuan di organisasi politik	%	n.a.	11,5	Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	%	n.a.	n/a	Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Sebelum Perubahan
				Persentase pembinaan organisasi perempuan	%	37,64	100,00	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase pembinaan organisasi perempuan	%	37,64	n/a	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Sebelum Perubahan
				Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan	%	n/a	30,56	Program Pemberdayaan Potensi Sumber	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Sosial (UKS)				Kesejahteraan Sosial (PSKS)			
				Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	%	62,45	n/a	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial\	%	n/a	100,00	Program peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				prosentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	%	N/A	n/a	Program peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan	%	N/A	70,00	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan	%	33,35	N/A	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII	orang	n/a	95.276	Program Pelestarian kekayaan Budaya	Kebudayaan	BKPM	Perubahan Baru
				Persentase	%	0,94	n/a	PROGRAM	Kebudayaan	BKPM	Sebelum

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Organisasi Budaya berkategori maju				PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA			Perubahan
				Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	%	n/a	10	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Kearsipan	BPAD	Perubahan Baru
				Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	%	5,00	n/a	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Kearsipan	BPAD	Sebelum Perubahan
				Penambahan Khasanah Arsip dan Koleksi Bahan Pustaka Berbasis Budaya	%	n/a	5,00	Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan	Kearsipan	BPAD	Program Baru
				Persentase Pembinaan Budaya Gotong Royong	Desa	N/A	10,00	Program Pembinaan Budaya Gotong Royong	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPPM	Indikator Sasaran SKPD Baru Keistimewaan
				Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	%	5,00	30,00	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Kearsipan	BPAD	Tetap
				Organisasi budaya dan desa budaya kategori maju	unit	n/a	28	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	DISBUD	Perubahan Baru
				Persentase organisasi budaya berkategori maju	%	0,94	n/a	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan		Sebelum Perubahan
				Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	5,00	30,00	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DISBUD	Tetap
				Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	%	15,00	70,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Kebudayaan	DISBUD	Tetap
				Persentase implementasi hasil	%	3,00	35,00	Program Pengembangan Kerjasama	Kebudayaan	DISBUD	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				kesepakatan				Pengelolaan Kekayaan Budaya			
2	Melek huruf masyarakat meningkat	Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat terdidik.	Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49 menjadi 95	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	orang	6.000	10.000	Program Pendidikan NonFormal dan Informal*)	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Peningkatan pengunjung perpustakaan	orang	n/a	934.722	Program Pengembangan Budaya Baca	Perpustakaan	BPAD	Perubahan Baru
				Peningkatan Pemustaka	%	14	n/a	Program Pengembangan Budaya Baca	Perpustakaan		Sebelum Perubahan
				Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan	%	50	100	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	BPAD	Tetap
				Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan	%	n/a	76	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Perpustakaan	BPAD	Perubahan Baru
				Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan	%	70	n/a	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Perpustakaan	BPAD	Sebelum Perubahan
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin	Meningkatkan rata-rata lama sekolah dari 9,2 menjadi 12 serta peningkatan daya saing pendidikan	APK PAUD	%	69,93	88,00	Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi	%	55,43	59,00	Program Pendidikan Tinggi	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Persentase kinerja pelayanan PKPLK	%	69,89	72,11	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	%	80,31	86,56	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Persentase kinerja pemerataan dan	%	78,33	80,63	Program Pendidikan Menengah*)	Pendidikan	Disdikpora	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				perluasan pendidikan menegah							
4	Daya Saing Pendidikan meningkat	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.	Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dari 0% menjadi 40%	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	NA	40	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	%	NA	40	Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	%	20	60	Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja	%	NA	45	Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	Peserta	1713	1977	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B L U D	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
				Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	Medali	21	30	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga	Disdikpora	Tetap
				Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Atau Pembinaan Olahraga	orang	1800	2400	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Disdikpora	Tetap
				Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga	%	16,67	66,67	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan	Kepemudaan dan Olah Raga	Disdikpora	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Olahraga			
				Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	sentra	9	15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga	Disdikpora	Tetap
				Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda"	%	n/a	100	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	Disdikpora	Perubahan Baru
				Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda	Organisasi	35	n/a	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	Disdikpora	Sebelum Perubahan
				Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	%	74,01	75,17	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Disdikpora	Tetap
5	Harapan hidup masyarakat meningkat	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.	Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 73, 55	persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%	n/a	30,91	Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS	Perubahan Baru
				persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%	n/a	n/a	Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS	Sebelum Perubahan
				Rasio Korban kekerasan terhadap anak	Rasio	n/a	0,35	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Perubahan Baru
				Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Rasio	n/a	n/a	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	Rasio	n/a	0,45	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Perubahan Baru
				Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	Rasio	N/A	n/a	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPM	Sebelum Perubahan
				Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	%	n/a	0,500	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	%	0,530	n/a	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPM	Sebelum Perubahan
				Persentase Cakupan peserta KB aktif	%	n/a	80,224	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase Cakupan peserta KB aktif	%	71,36	n/a	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPM	Sebelum Perubahan
				Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan	%	n/a	24,27	Program Pengembangan Bina Keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan	%	21,47	n/a	Program Pengembangan Bina Keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPM	Sebelum Perubahan
				persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	%	n/a	4,53	Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				persentase perlindungan dan rehabilitasi	%	6,50	n/a	Program Pelayanan dan Perlindungan	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				sosial anak yang mengalami permasalahan sosial				Anak bermasalah sosial			
				persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	%	n/a	2,51	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	%	7,18	n/a	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan (RPJMD)	%	n/a	1,33	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan	%	1,70	n/a	Program Pembinaan Panti Sosial / Jompo	Sosial	DINSOS	
				persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	%	n/a	1,30	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	%	4,85	n/a	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	%	n/a	20,18	Program Penanganan dan penanggulangan Bencana	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	%	7,60	n/a	Program Penanganan dan penanggulangan Bencana	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia)	%	n/a	9,13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Kesehatan	RS. GRHASIA	Perubahan Baru
				persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia)	%	42,16	n/a	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Kesehatan	RS. GRHASIA	Sebelum Perubahan
				Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras)	Ton Setara beras	190	450	Program Peningkatan Ketersediaan & Cadangan Pangan	Ketahanan Pangan	BKPP	Tetap
				Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	%	94,55	100	Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	Ketahanan Pangan	BKPP	Tetap
				Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	n/a	**14**	Program Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Ketahanan Pangan	BKPP	Perubahan Baru
				Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	80	n/a	Program Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Ketahanan Pangan	BKPP	Sebelum Perubahan
				Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	73,5	90	Program Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	BKPP	Tetap
				Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	%	n/a	72,80	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase pelayanan kesehatan yang	%	45,57	n/a	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				bermutu				dan Rujukan			
				Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	n/a	40	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase rumah tangga ber-PHBS	%	58,00	n/a	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	n/a	99,00	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98,00	n/a	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1)	%	n/a	100	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	%	97,50	n/a	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	n/a	100	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa sekolah	%	97,00	n/a	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase Puskesmas mampu memberikan	%	n/a	80,00	Program Pembinaan Kesehatan Lansia	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				layanan pada lansia (PSL)							
				Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usila (PSU)	%	52,89	n/a	Program Pembinaan Kesehatan Lansia	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	%	n/a	6,50	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	%	8,95	n/a	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%	n/a	73,44	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%	55,50	n/a	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat	%	n/a	89,74	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	%	80	n/a	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan	%	n/a	86,30	Program Pembiayaan kesehatan	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	%	38,48	n/a	Program Pembiayaan kesehatan	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan	%	n/a	94,00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				kesehatan oleh Bapeljamkesos				B L U D Bapel Jamkesos			
				Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos	%	55,00	n/a	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan	%	n/a	71,90	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Persentase ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar	%	94,1	n/a	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	%	n/a	87,00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Kesehatan	DINKES	Program Baru
				Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	%	61,00	n/a	Program Pelatihan Kesehatan dan peningkatan Mutu Diklat Kesehatan	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama	%	n/a	82,00	Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
				Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya	%	100,00	n/a	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Kesehatan	DINKES	Sebelum Perubahan
				Terwujudnya	%	100,00	n/a	Program	Kesehatan	DINKES	Sebelum

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata			Perubahan
				Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Tipe C	persen	n/a	82,00	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSKP Respira	Kesehatan	DINKES	Perubahan Baru
6	Pendapatan masyarakat meningkat	Meningkatnya produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.	Rasio korban kekerasan terhadap anak Meningkatkan Pendapatan perkapita pertahun dari Rp.6,8 jt menjadi Rp. 8,5 jt Produksi pertanian tanaman pangan	Persentase Desa yang telah membentuk badan usaha milik desa (Bumdes)	%	N/A	43,36	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase usaha ekonomi desa (Renstra)	%	24,76	N/A	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Sebelum Perubahan
				Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	n/a	37,00	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	32,00	n/a	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Sebelum Perubahan
				Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif	%	n/a	31,57	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan*)	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	%	n/a	n/a	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan*)	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Sebelum Perubahan
				Persentase tahapan keluarga sejahtera	%	n/a	43,00	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPM	Perubahan Baru
				Persentase tahapan	%	45,83	n/a	Program Peningkatan	Keluarga Berencana dan	BPPM	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				keluarga sejahtera				Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Sejahtera		
				Produksi pertanian tanaman pangan	ton	n/a	2.208.665	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	**DISTAN**	**Perubahan Baru**
				Produksi pertanian tanaman pangan	ton	2.135.582	**n/a**	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pertanian	**DISTAN**	**Sebelum Perubahan**
				Produksi pertanian hortikultura	ton	375.714	394.800	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Pertanian	DISTAN	Tetap
				Jumlah populasi peternakan	AU (Animal Unit)	n/a	641.416	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	DISTAN	Perubahan Baru
				Jumlah populasi peternakan	AU (Animal Unit)	619.268	n/a	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	DISTAN	Sebelum Perubahan
				Rerata NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	%	n/a	99,00	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	Pertanian	DISTAN	*Perubahan Baru*
				Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	%	1,70	n/a	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani,	Pertanian	DISTAN	Sebelum Perubahan
				komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	komoditas	3,00	3,00	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Pertanian	DISTAN	Tetap
				Peningkatan kapasitas penyuluh	%	n/a	100,00	Program pemberdayaan penyuluhan	Ketahanan Pangan	BKPP	Perubahan Baru
				Peningkatan kapasitas penyuluh	%	35	n/a	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Ketahanan Pangan	BKPP	Sebelum Perubahan
				Peningkatan produksi Hasil Hutan	%	1,98	7,37	Program Pemanfaatan Potensi Sumber	Kehutanan	HUTBUN	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Daya Hutan			
				Persentase Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan	%	61,6	90	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Kehutanan	HUTBUN	Tetap
				NTP sektor perkebunan	%	n/a	117	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Kehutanan	HUTBUN	Perubahan Baru
				NTP sektor perkebunan	%	123,84	n/a	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Kehutanan	HUTBUN	Sebelum Perubahan
				Produksi perkebunan	Ton	n/a	80.152	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Kehutanan	HUTBUN	Perubahan Baru
				Produksi perkebunan	Ton	82.797	n/a	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Kehutanan	HUTBUN	Sebelum Perubahan
				produksi perikanan budidaya	Ton	50.247	88.500	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Tetap
				Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Ha	11	16	Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Tetap
				produksi perikanan tangkap	Ton	5.438	8.400	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Tetap
				Ketersediaan Ikan Perkapita	kg/kap/ thn	n/a	31	Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Perubahan Baru
				Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan		konsumsi: 12,74 kg/kapita/th dan ketersediaan: 23,01 kg/kapita/th	n/a	Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				NTP sektor perikanan	%	n/a	106,00	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Perubahan Baru
				NTP sektor perikanan	%	113,71	n/a	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Sebelum Perubahan
				Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokume n	300	300	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Tetap
				Jumlah Koperasi Aktif	unit	2.090	2.543	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISPERINDAG KOP	Tetap
				Jumlah UKM (unit usaha)	unit	203.995	248.191	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISPERINDAG KOP	Tetap
				Jumlah Wirausaha UMKM Baru	orang	30	280	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISPERINDAG KOP	Tetap
				Jumlah SIUP	Buah	n/a	48.787	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	DISPERINDAG KOP	Perubahan Baru
				Jumlah SIUP		40.732	n/a	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,	Perdagangan	DISPERINDAG KOP	Sebelum Perubahan
				Nilai Ekspor (Juta US$)	Juta US$	n/a	221.95	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DISPERINDAG KOP	Perubahan Baru
				Nilai Ekspor (Juta US$)	Juta US$	191.46	n/a	Program Peningkatan	Perdagangan	DISPERINDAG KOP	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Pengembangan Ekspor			
				Jumlah IKM	Unit	81.523	82.292	Program Pengembangan IKM	Industri	DISPERINDAG KOP	Tetap
				Jumlah IKM Industri Kreatif	Unit	33.882	34.157	Program Pengembangan Industri Kreatif	Industri	DISPERINDAG KOP	Tetap
				Nilai produksi IKM (Ribu Rp)	Ribu RP	3.199.224.964	3.431.546.985	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri	DISPERINDAG KOP	Tetap
				Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	%	22,29	27,00	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS	Tetap
				Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja	%	n/a	21,18	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS	Perubahan Baru
				Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja	%	7,81	n/a	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS	Sebelum Perubahan
				Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	n/a	53,00	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS	Tetap
				Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	n/a	84,00	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS	Tetap
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun	Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam	%	n/a	74,80	Program Peningkatan Jalan &	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
		agar makin kompetitif	yang ditandai dengan menurunnya Indek Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481	kondisi mantap.				Jembatan			
				Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.	%	n/a	74,80	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.	%	71,09	n/a	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	%	100	100	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	%	n/a	63,75	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	%	24,2	n/a	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Rasio elektrifikasi	%	n/a	88,10	Program Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Perubahan Baru
				Pencapaian rasio elektrifikasi	%	76,8	n/a	Program Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Peningkatan Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar	%	n/a	80	Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Pencapaian Kinerja Pengelolaan	%	30	n/a	Program Pembinaan, pengawasan dan	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Bahan Bakar				pengembangan bahan bakar			
				Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi	%	3,00	15,00	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Perubahan Baru
				Pencapaian Penyediaan energi baru terbarukan	SBM	104,72 (000 SBM)	130,10 (000 SBM)	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Perubahan Baru
				Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	%	n/a	6,75	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	PUESDM	Perubahan Baru
				Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	%	8,50	n/a	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	%	38,58	64,00	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Perumahan	PUESDM	Tetap
				Penambahan penduduk berakses air minum	jiwa	n/a	600.000	Program pengembangan pengelolaan air minum	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase penduduk berakses air minum		70,38	n/a	Program pengembangan pengelolaan air minum	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Peningkatan penyediaan debit air baku	l/det	n/a	2.100	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Peningkatan penyediaan debit air baku	l/det	n/a	2.100	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Penambahan penyediaan air baku	l/det	600	n/a	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya			
								Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Nilai Investasi (RP 000)	Juta Rupiah	7.056.066.141	14.002.769.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	BKPM	Tetap
				Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip	buah	334	369	Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi	Penanaman Modal	BKPM	Tetap
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata	Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878	Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial.	%	n/a	3,99	Program perlindungan dan pemberdayaan bagi Korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis, dan korban *trafficking*	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial.	%	5.40	n/a	Program perlindungan dan pemberdayaan bagi Korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis, dan korban trafficking	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	%	n/a	6,56	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Sosial Lainnya)			
				Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	%	3,1	n/a	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	%	n/a	4,24	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sosial	DINSOS	Perubahan Baru
				Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	%	8,1	n/a	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sosial	DINSOS	Sebelum Perubahan
				Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	kelompok	225	405	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olah Raga	DISDIKPORA	Tetap
				Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	n/a	8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketransmigrasian	DISNAKERTRANS	Perubahan Baru
				Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	22	n/a	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketransmigrasian	DISNAKERTRANS	Sebelum Perubahan
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	%	n/a	54	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	DISBUD	Perubahan Baru
				Persentase peningkatan	%	11	n/a	Program Pengelolaan	Kebudayaan	DISBUD	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
			kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi 2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198,	jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan				Kekayaan Budaya			
				Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW (Orang)	orang	11.036.493	22.198.333	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DISPAR	Tetap
				Jumlah Pokdarwis	kelompok	71	96	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pariwisata	DISPAR	Tetap
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi 2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198,	Jumlah daya tarik wisata	unit	83	93	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	DISPAR	Tetap
				Jumlah Desa Wisata	desa	65	90	Program Pengembangan Desa Wisata	Pariwisata	DISPAR	Tetap
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Umum	Semua SKPD	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
		akuntabel.		Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Umum	Semua SKPD	Tetap
				Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Umum	Semua SKPD	Tetap
				Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Umum	Semua SKPD	Tetap
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Umum	Semua SKPD	Tetap
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan	%	n/a	6,97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	28	n/a	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Sebelum Perubahan
				Persentase kesenjangan pencapaian	%	n/a	2,62	Program Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan				Pemerintahan			
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	%	1,34	n/a	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Sebelum Perubahan
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	n/a	1,09	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	6,71	n/a	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Sebelum Perubahan
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	%	n/a	3,05	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase kesenjangan pencapaian	%	17,45	n/a	Program Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya				Sosial Budaya			
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana (RPJMD)	%	n/a	1,31	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	%	2,68	n/a	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Sebelum Perubahan
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah keistimewaan dengan realisasi tahunan (RPJMD)	%	n/a	1,1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangjka menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	%	0	n/a	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Tetap
					%	n/a	n/a	Program Perencanaan Dan Pengendalian	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan			
				Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	n/a	100,00	Program Pengembangan Statistik Daerah	Statistik	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	n/a	N/a		Statistik	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	%	n/a	N/a		Statistik	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	%	50	n/a	Program Pengembangan Data/Informasi	Statistik	Bappeda	Sebelum Perubahan
				Persentase ketersediaan data/analisis data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan	%	92	n/a	Program Pengembangan Data Statistik Daerah	Statistik	Bappeda	Sebelum Perubahan
				Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan	%	n/a	79,41	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Perubahan Baru
				Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	%	0	n/a	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Sebelum Perubahan
				Persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan (RPJMD)	%	n/a	12,52	Program Pengendalian Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Program Baru
				Peningkatan jumlah	%	70	100	Program Pelayanan Jasa	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian				Pengujian			
				Persentase peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi	%	75	87,50	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	%	72,50	85,00	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan/ bidang	9,00	14,00	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Tetap
				Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	%	10,00	100,00	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Tetap
				Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	%	n/a	75,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Perubahan Baru
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat	%	55	n/a	Program fasilitasi pos telekomunikasi , Pengendalian frekuensi dan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Sebelum Perubahan
				Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan	%	N/A	98	Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi	Biro Umum, Humas dan Protokol	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Tamu yang Memuaskan					Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Persentase SKPD terlayani Tata Kearsipan Berbasis TI	%	90	N/A	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Umum, Humas dan Protokol	Tetap
				Kelancaran, ketertiban dan keamanan Pelayanan Keprotokolan (UHP)	%	n/a	100	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Umum, Humas dan Protokol, Setda	Perubahan Baru
				Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayan pimpinan	%	85	n/a	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sebelum Perubahan
				Persentase pengakses informasi aktivitas Pemerintahan Daerah melalui web, media elektronik dan media cetak	%	n/a	90	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Umum, Humas dan Protokol	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	%	90	n/a	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sebelum Perubahan
				Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu.	%	20	n/a	Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sebelum Perubahan
				Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	%	n/a	100	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	SETWAN	Perubahan Baru
				Persentase prolegda yang terselesaikan	%	92,3	n/a	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	SETWAN	Sebelum Perubahan
				Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY,	%	N/A	90	Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	SETWAN	Program Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				media elektronik dan media cetak					Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	n/a	90	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Organisasi	Perubahan Baru
				Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	70	n/a	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Organisasi	Sebelum Perubahan
				Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	n/a	90	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Organisasi	Perubahan Baru
				Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit	20	n/a	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Organisasi	Sebelum Perubahan
				Peningkatan	%	n/a	25	Program	Kesatuan	SATPOLPP	Program

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani				Penegakan Perda dan Perkada	Bangsa dan Politik dalam Negeri		Baru
				Peningkatan kepatuhan terhadap perda dan perkada	%	n/a	65	Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	SATPOLPP	Program Baru
				Penurunan kasus pelanggaran Perda	Kasus	299	235	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	SATPOLPP	Sebelum Perubahan
				Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani	%	n/a	25	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	SATPOLPP	Perubahan Baru
				Penurunan kasus tindak kriminal	%	987	n/a	Program Pemeliharaan kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	SATPOLPP	Sebelum Perubahan
				Peningkatan Penyakit Masyarakat yang tertangani	%	n/a	25	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	SATPOLPP	Perubahan Baru
				Penurunan kasus pekat	%	318	n/a	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	SATPOLPP	Sebelum Perubahan
				Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat	%	n/a	70	Program Pendidikan Kedinasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Diklat	Perubahan Baru
				persentase PNS	%	18	n/a	Program	Otonomi	Badan Diklat	Sebelum

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				yang mengikuti diklat				Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		Perubahan
				Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	%	n/a	100	Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Diklat	Perubahan Baru
				Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	n/a	95	Program Penelitian dan Pengembangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Adm. Pemb.	Perubahan Baru
				Persentase Pencapaian Penelitian dan Pengembangan	%	100	n/a	Program Penelitian dan Pengembangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Bandiklat, Biro Adm. Pemb.	Sebelum Perubahan
				Jumlah rekruitmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun	orang	n/a	520	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,	Badan Diklat	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
									Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Persentase Tindaklanjut Pelaksanaan Diklat atas Kesepakatan Pengiriman Peserta Diklat dari Luar DIY	%	100	n/a	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Diklat	Sebelum Perubahan
				Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	%	100	100	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BIRO HUKUM	Tetap
				Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/Kota	%	n/a	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BIRO HUKUM	Perubahan Baru
				Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	%	100	n/a	Program Pengawasan Produk Hukum	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BIRO HUKUM	Sebelum Perubahan
				Persentase Produk Hukum	%	n/a	100	Program Peningkatan	Otonomi Daerah,	BIRO HUKUM	Program Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Daerah yang dapat diakses masyarakat				Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Pemberian Bantuan dan Layanan Hukum	%	n/a	100	Program Fasilitasi Bantuan Dan Layanan Hukum	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BIRO HUKUM	Perubahan Baru
				Persentase pemberian Layanan Hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	%	100	n/a	Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BIRO HUKUM	Sebelum Perubahan
				Peningkatan jumlah Desa Tangguh	Angka	11 desa	70 desa	Program pencegahan dini bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BPBD	Tetap
				Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini	%	n/a	75%	Program penanggulangan korban bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	BPBD	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
									Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	N/A	n/a	Program Penanggulangan Korban Bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BPBD	Sebelum Perubahan
				Persentase pemulihan wilayah rawan bencana.	%	N/A	10	Program Pemulihan Pasca bencana	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BPBD	Program Baru
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	%	n/a	86,92	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemda	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BKD	Perubahan Baru
				Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	%	80	n/a	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BKD	Sebelum Perubahan
				Persentase pemenuhan kompetensi	%	n/a	71	Program Peningkatan Kapasitas	Otonomi Daerah, Pemerintahan	BKD	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				pegawai				Sumber Daya Aparatur Pemda DIY	Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	%	100	100	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BKD	Sebelum Perubahan
				Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	n/a	97	Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	BIRO TAPEM	Perubahan Baru
				Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	84	n/a	Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan
				Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	n/a	13.035	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Pertanahan	BIRO TAPEM	Perubahan Baru
				Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum		8.381 bidang	n/a	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Pertanahan	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan
				Persentase tanah Kasultanan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang sesuai Peruntukannya	%	n/a	50	Program Penataan Pemanfaatan Tanah	Pertanahan	BIRO TAPEM	Perubahan Baru
				Persentase konflik pertanahan yang	%	10	35	Program Penyelesaian Konflik-Konflik	Pertanahan	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				terselesaikan				Pertanahan			
				Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	8.381	10.501	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Pertanahan	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan
				Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	%	n/a	80	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BIRO TAPEM	Perubahan Baru
				Persentase Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan	%	n/a	n/a	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan
				Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Keagamaan yang terlayani	%	n/a	100	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Kesra	Perubahan Baru
				Persentase Pelaksanaan Kehidupan Beragama	%	100	n/a	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,	Biro Kesra	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
									Kepegawaian, dan Persandian		
				Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	%	n/a	51,17	Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Adm. Kesra, Biro Adm Pembangunan, Biro Adm Perekonomian dan SDA	Perubahan Baru
				Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	%	24,35	n/a	Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro Adm. Kesra, Biro Adm Pembangunan, Biro Adm Perekonomian dan SDA	Sebelum Perubahan
				Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	%	N/A	100	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Biro ADPEMB	Perubahan Baru
				Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT	%	100	N/A	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DISHUBKOMI NFO	Sebelum Perubahan
				Persentase Desa yang memiliki profil	%	N/A	100	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Pemerintah Desa			
				Persentase profil desa sesuai standar	%	28,54	n/a	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat	BPPM	Sebelum Perubahan
				Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	55	75	Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BKPM	Tetap
				Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang.	unit	215.539	247.500	Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	DISPERINDAG KOP	Tetap
				Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DIY	Persen	n/a	88,24	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BPAD	Perubahan Baru
				Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	SOPD	5	n/a	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	BPAD	Sebelum Perubahan
				Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber	angka	n/a	0.15	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Bakeslinmas	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY)							
				Jumlah Kab./Kota yang telah terbentuk Community Policing	angka	N/A	n/a	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Bakeslinmas	Sebelum Perubahan
				Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme	kasus	n/a	6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Bakeslinmas	Perubahan Baru
				Penurunan kasus konflik sosial	kasus	30	n/a	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Bakeslinmas	Sebelum Perubahan
				Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/musibah yang selamat	%	n/a	86,4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Bakeslinmas	Perubahan Baru
				Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	299	n/a	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Satpol PP	Sebelum Perubahan
				Prosentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	%	N/A	100	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Bakeslinmas	Perubahan Baru
				Persentase Partisipasi dalam Pemilu	%	67	N/A	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Bakeslinmas	Sebelum Perubahan
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi	Mempertahankan Opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah	%	n/a	46,25	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,	DPPKA	Program Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
		pendapatan daerah.							dan Persandian		
				Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah	%	n/a	100	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Perubahan Baru
				Persentase peningkatan PAD	%	10,26	n/a	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	n/a	19,36	Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Perubahan Baru
				Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	22	n/a	Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	N/A	54,46	Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi	DPPKA	Program Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
									Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Persentase capaian Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	%	N/A	N/A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	11,29	N/A	Program Pengembangan investasi dan aset daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	11,29	N/A	Program Pengembangan investasi dan aset daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	%	5,97	N/A	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Persentase jumlah SK gubernur Hasil evaluasi atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dan dokumen hasil penceramatan atas hasil evaluasi Gubernur Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu	%	N/A	100	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	DPPKA	Program Baru
						100	n/a				
				Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	%	n/a	5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Inspektorat	Perubahan Baru
				Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	%	n/a	90	Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Inspektorat	Program Baru
				Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	%	75	n/a	Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	Inspektorat	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
								Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
				Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	%	100	n/a	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Inspektorat	Sebelum Perubahan
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalulintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.	Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan	penumpang/ hari	n/a	10.145	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DISHUBKOMINFO	Perubahan Baru
				Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	%	32,57	n/a	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DISHUBKOMINFO	Sebelum Perubahan
				Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan	%	4,20	42,00	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Perhubungan	DISHUBKOMINFO	Tetap
				Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	%	80,00	100,00	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Perhubungan	DISHUBKOMINFO	Tetap
				Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	%	100,00	100,00	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	DISHUBKOMINFO	Tetap
				Persentase Dukungan Sarpras Transportasi pada Kawasan Budaya	%	15	35	Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan	Perhubungan	DISHUBKOMINFO	Perubahan Baru
				Persentase	%	15	35	Program	Perhubungan	DISHUBKOMI	Sebelum

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Dukungan Sarpras Transportasi pada Kawasan Budaya				Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan		NFO	Perubahan
				Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan	%	75,00	87,00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	DISHUBKOMI NFO	Tetap
				Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY	%	26,67	82,50	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	DISHUBKOMI NFO	Tetap
				Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	%	10,00	60,00	Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	Perhubungan	DISHUBKOMI NFO	Tetap
				Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	%	25,00	50,00	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	DISHUBKOMI NFO	Tetap
				Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	%	100,00	100,00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	DISHUBKOMI NFO	Perubahan Baru
				Berfungsinya sarana dan prasarana Fasilitas LLAJ	%	100,00	n/a	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	DISHUBKOMI NFO	Sebelum Perubahan
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan persentase kualitas lingkungan dari 2% menjadi 15,72%.	Persentase Peningkatan kualitas udara	%	n/a	11,26	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BLH	Perubahan Baru
				Peningkatan penaatan lingkungan bagi kegiatan usaha	%	2	n/a	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	BLH	Sebelum Perubahan
				Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan	%	n/a	58,33	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Lingkungan Hidup	BLH	Perubahan Baru

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Perkotaan							
				Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	%	7	n/a	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Lingkungan Hidup	BLH	Sebelum Perubahan
				Persentase Peningkatan kualitas air	%	n/a	18,69	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH	Perubahan Baru
				Peningkatan kualitas lingkungan	%	2	n/a	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH	Sebelum Perubahan
				Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	kelompok	n/a	60	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	BLH	Perubahan Baru
				Sumber pencemar lingkungan yang dibina	kelompok	360	n/a	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	BLH	Sebelum Perubahan
				Luas Lahan Yang Terkonservasi	ha	n/a	45	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	BLH	Perubahan Baru
				LuasLahan yang TerkonservasiTerhadapLuasan Total Lahan	%	3 Ha	n/a	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	BLH	Sebelum Perubahan
				Persentase Lingkungan Hidup Berkelanjutan Berbasis Budaya dalam Rangka Mendukung Keistimewaan DIY	%	n/a	10	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya	Lingkungan Hidup	BLH	Perubahan Baru
				Persentase Lingkungan Hidup Berkelanjutan	%	n/a	n/a	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya	Lingkungan Hidup	BLH	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Berbasis Budaya dalam Rangka Mendukung Keistimewaan DIY							
				Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jenis	n/a	11	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH	Perubahan Baru
				Persentase peningkatan akses inforamasi sumber daya air dan lingkungan hidup	jenis	10	n/a	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH	Sebelum Perubahan
				Persentase Luas Hutan	%	27,04	27,85	Program penataan kawasan hutan	Kehutanan	HUTBUN	Tetap
				Luas lahan kritis	Ha	29.000	24.000	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	HUTBUN	Tetap
				Persentasekerusakan hutan (RPJMD)	%	37,24	23,77	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	HUTBUN	Tetap
				Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total (RPJMD)	rasio	0	0,17	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Tetap
				jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim	orang	n/a	1.890	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Perubahan Baru
				Jumlah penerima manfaat atas mitigasi	orang	990 orang dan 39 desa tersosialisasi	n/a	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan	Kelautan dan Perikanan	DISLAUTKAN	Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				benacana alam laut dan prakiraan iklim laut				Prakiraan Iklim Laut			
				Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	%	45	70	Program pengelolaan persampahan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	13.329 SR	21.000 SR	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				Pengurangan jumlah titik genangan	%	27,90	57,90	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong,	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	%	23,2	51	Program pengurangan kawasan kumuh	Perumahan	PUESDM	Tetap
15	Pemanfaatan Ruang terkendali	Pemanfaatan ruang mengacu rencana tataruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 90%	Tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di DIY	%	n/a	86	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasanlindung bawahan	%	10	n/a	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Rerata penurunan muka air tanah	%	< 20	< 20	Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Tetap
				Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	20	120	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Persentase pengaturan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	%	n/a	65,00	Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase Pengaturan dan Pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	%	10	n/a	Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Persentase kawasan budaya yang ditata	%	n/a	60	Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase Penataan Kawasan Budaya	%	38,3	n/a	Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Peningkatan pengaturan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi	%	n/a	90	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	PUESDM	Perubahan Baru
				Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/ kota dan RTRW Provinsi	%	45	n/a	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang		Sebelum Perubahan
				Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Kawasan Strategis	10	19	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	PUESDM	Tetap
				Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	78	88	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	%	n/a	59	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	%	39	n/a	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	%	n/a	73	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Perubahan Baru
				Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	%	53	n/a	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Sebelum Perubahan
				Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	%	75,06	82,5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	%	n/a	58,00	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap
				Dukungan infrastruktur	%	28,00	n/a	Program Pengembangan	Pekerjaan Umum	PUESDM	Tetap

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	INDIKATOR	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD	Keterangan
						2012	2017				
				kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi				Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi			
				Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan	%	8,00	13,00	Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	PUESDM	Tetap
				Persentase dukungan sarana prasarana komunikasi dan informatika pada kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	%	n/a	50	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Berbasis Keistimewaan	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Program Baru
				Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	%	9 Urusan / Bidang	14 Urusan / Bidang	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa,	Komunikasi dan Informatika	DISHUBKOMINFO	Sebelum Perubahan

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

lndikasi rencana program prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-programbaik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untukpemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untukpenyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPDdalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalamkegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD DIY.Namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanyayang bersumber dari APBD DIY termasuk Dana Keistimewaan.

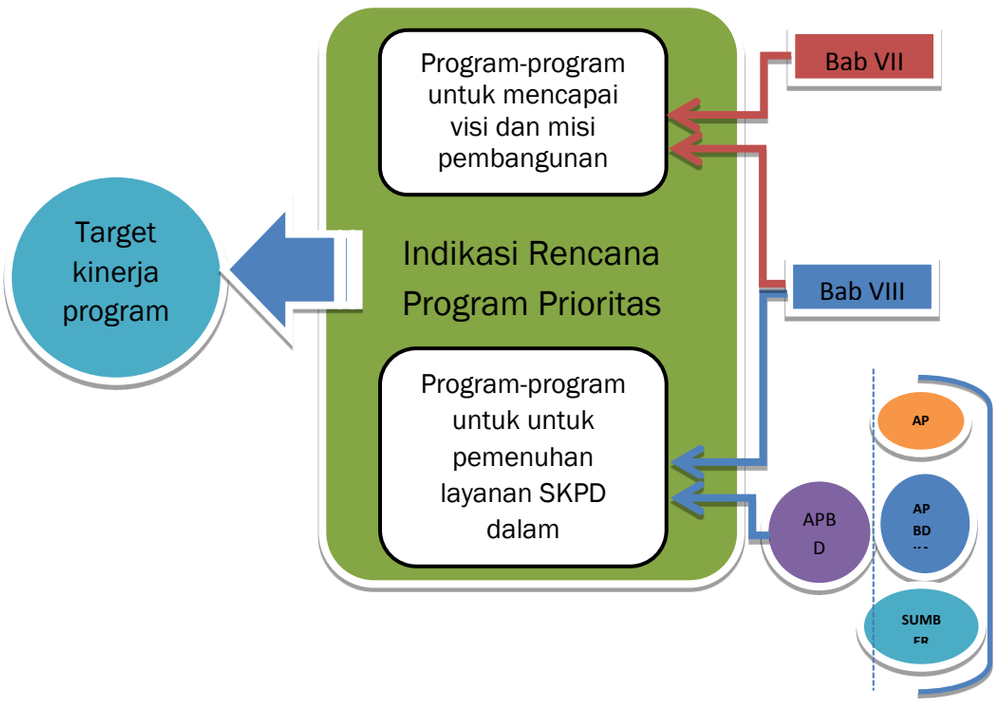

Gambar 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Pelayanan Umum yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
0	0			**Umum**																
		1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	65.224.401	100	69.924.605	100	82.387.826	100	99.089.439	100	97.928.261	100	414.554.532	Semua SKPD
		2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	126.666.470	100	85.266.335	100	115.890.572	100	259.887.426	100	187.910.176	100	775.620.979	Semua SKPD
		3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	717.204	100	1.101.516	100	1.193.379	100	925.420	100	935.420	100	4.872.939	Semua SKPD
		4		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	9.080.462	100	7.959.673	100	9.115.998	100	9.730.331	100	10.670.101	100	46.556.565	Semua SKPD
		5		Program Peningkatan Pengembanagn Sistem Pelaporan Capaian	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian	Persen	100	100	5.259.017	100	4.035.769	100	6.358.544	100	7.036.289	100	7.681.701	100	30.371.320	Semua SKPD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Kinerja dan Keuangan	kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD															

Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1				**Urusan Wajib**																	
	1			**Pendidikan**																	
		1		Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	APK PAUD	persen	69,93	80,00	-	82,00	-	84,00	750.000	86,00	1.000.000	88,00	1.500.000	88,00	3.250.000	DIKPORA	Tetap
		2		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	persen	80,31	83,25	354.267.640	84,08	398.539.048	84,92	439.560.956	85,75	483.699.048	86,56	531.567.453	86,56	2.207.634.145	DIKPORA	Tetap
		3		Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah	persen	78,33	78,79	35.163.612	79,25	123.552.774	79,71	137.917.956	80,17	155.327.278	80,63	173.169.193	80,63	625.130.813	DIKPORA	Tetap
		4		Program Pendidikan	Peningkatan layanan	orang	6.000	6.000	7.345.086	7.000	7.908.000	8.000	9.100.000	9.000	10.300.000	10.000	11.500.000	10.000	46.153.086	DIKPORA	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				NonFormal dan Informal*)	pendidikan non formal dan informal																
		5		Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	persen	69,89	70,33	9.076.555	70,78	12.000.000	71,22	16.500.000	71,66	20.000.000	72,11	24.000.000	72,11	81.576.555	DIKPORA	Tetap
		6		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	persen	74,01	74,21	11.336.890	0	0	0	0	0	0	74,21	11.336.890	74,21	22.673.780	DIKPORA	Tetap
		7		Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	persen	74,01	74,24	25.625.810	74,47	27.500.000	74,71	30.000.000	74,94	33.000.000	75,17	37.000.000	75,17	153.125.810	DIKPORA	Tetap
		8		Program Pendidikan Tinggi	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi	persen	55,43	56,93	7.764.500	57,50	8.540.000	58,00	9.395.000	58,50	10.334.000	59,00	11.368.000	59,00	47.401.500	DIKPORA	Tetap
		9		Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	persen	20,00	40,00	4.026.026	45,00	6.398.000	50,00	6.871.000	55,00	12.358.000	60,00	13.394.000	60,00	43.047.026	DIKPORA	Tetap
		10		Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B L U D	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik	Peserta	1.713	1.796	9.939.960	1.849	13.000.000	1.904	14.000.000	1942	15.000.000	1977	16.000.000	1977	67.939.960	DIKPORA	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					berstandar																
		11		Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	persen	NA	1,00	6.939.000	5,00	12.431.538	10,00	18.651.000	20,00	18.000.000	40,00	16.529.000	40,00	72.550.538	DIKPORA	Tetap
		12		Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	persen	NA	0	0	5,00	12.000.000	10,00	14.500.000	20,00	17.500.000	40,00	21.000.000	40,00	65.000.000	DIKPORA	Tetap
		13		Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan	Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja	persen	NA	0	0	30,00	8.000.000	35,00	9.500.000	40,00	11.500.000	45,00	14.000.000	45,00	43.000.000	DIKPORA	Tetap
1	**2**			**Kesehatan**																	
		1		Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	175.000	98,00	183.750	99,00	192.937	99,00	551.687	DINKES	Perubahan Baru
				Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	persen	98,00	98,00	134.500	98,00	150.000	99,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	99,00	284.500	DINKES	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					kebidanan																
		2		Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	69,00	543.475	70,40	570.650	71,90	599.180	71,90	1.713.305	DINKES	Perubahan Baru
				Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Persentase ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar	persen	94,10	95	300.000	95,50	330.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95,50	630.000	DINKES	Sebelum Perubahan
		3		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	79,00	8.631.593	84,00	9.063.170	87,00	9.516.330	87,00	27.211.093	DINKES	Program Baru
				Program Pelatihan Kesehatan dan peningkatan Mutu Diklat Kesehatan	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	persen	61,00	64,00	1.338.057	70,00	1.727.347	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	3.065.404	DINKES	Sebelum Perubahan
		4		Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48,4	11.800.828	63,00	12.390.870	72,80	13.010.415	72,80	37.202.113	DINKES	Perubahan Baru
				Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	persen	45,57	48,20	1.019.441	52,56	2.913.250	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	57,00	3.932.691	DINKES	Sebelum Perubahan
		5		Program	Persentase	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	188.600	100	198.030	100	207.931	100	594.561	DINKES	Peruba

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat																han Baru
				Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa sekolah	persen	97,00	98,00	62.000	98,00	68.200	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,00	130.200	DINKES	Sebelum Perubahan
		6		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	38,00	4.700.947	39,00	4.935.995	40,00	5.182.800	40,00	14.819.742	DINKES	Perubahan Baru
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber-PHBS	persen	58,00	60,00	550.000	62,00	600.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	62,00	1.150.000	DINKES	Sebelum Perubahan
		7		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,5	1.000.858	6,80	1.050.900	6,50	1.103.445	6,50	3.155.203	DINKES	Perubahan Baru
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	persen	8,95	8,90	5.062.968	8,80	6.490.864	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,70	11.553.832	DINKES	Sebelum Perubahan
		8		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	64,44	2.928.216	65,68	3.074.626	73,44	3.228.358	73,44	9.231.200	DINKES	Perubahan Baru
				Program	Persentase	persen	55,50	58,75	480.000	60,90	624.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60,90	1.104.000	DINKES	Sebelu

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit																m Perubahan
		9		Program Pembinaan Kesehatan Lansia	Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73,55	278.778	74,38	292.716	80	307.352	80	878.846	DINKES	Perubahan Baru
				Program Pembinaan Kesehatan Lansia	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usila (PSU)	persen	52,89	57,85	130.330	80,00	143.364	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,00	273.694	DINKES	Sebelum Perubahan
		10		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74,36	858.729	82,05	901.665	89,74	946.750	89,74	2.707.144	DINKES	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase kabupaten /kota yang menyelenggarakan program kabupaten /kota sehat	persen	80,00	100	534.675	100	588.143	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1.122.818	DINKES	Sebelum Perubahan
		11		Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	125.446	100	131.720	100	138.304	100	395.470	DINKES	Perubahan Baru
				Program Pembinaan Kesehatan	Persentase cakupan kunjungan	persen	97,50	98,00	112.100	98,25	123.310	98,5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,50	235.410	DINKES	Sebelum Peruba

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Bayi dan Balita	neonatus pertama (KN1)																han
		12		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos	Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	88,00	69.926.444	91,00	73.422.800	94,00	77.093.900	94,00	220.443.144	DINKES	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos	persen	55,00	60,85	77.976.204	65,23	81.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65,23	158.976.204	DINKES	Sebelum Perubahan
		13		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,62	33.232.691	8,80	34.939.876	9,13	36.636.869	9,13	104.809.436	RS. GRHASIA	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia)	persen	42,16	46,81	40.242.397	51,04	31.534.468	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	51,04	71.776.865	RS. GRHASIA	Sebelum Perubahan
		14		Program Pembiayaan kesehatan	Persentase Rumah sakit	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	72,60	739.530	79,45	776.506	86,30	815.330	86,30	2.331.366	DINKES	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					bekerja sama dengan BPJS kesehatan																
				Program Pembiayaan kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	persen	38,48	38,75	226.105	40,25	194.516	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40,25	420.621	DINKES	Sebelum Perubahan
		15		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSKP Respira	Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit Tipe C	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	81,00	611.555	82,00	642.133	82,00	1.253.688	DINKES	Perubahan Baru
		16		Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata	Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,00	582.434	81,00	611.555	82,00	642.133	82,00	1.836.122	DINKES	Perubahan Baru
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya	persen	100	100	8.782.031	100	12.785.919	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	100	21.567.950	DINKES	Sebelum Perubahan
				Program Pemeliharaan Sarana	Terwujudnya pemelihara	persen	100	1,00	233.496	1,00	442.700	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	1,00	676.196	DINKES	Sebelum Peruba

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	an sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya																han
1	3			**Pekerjaan Umum**																	
		1		Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74,20	82.484.940	74,80	93.549.393	74,80	176.034.333	DPUESDM	Perubahan Baru
		2		Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74,20	69.736.647	74,80	72.325.124	74,80	142.061.771	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap.	persen	71,09	72,04	69.097.637	72,64	64.411.360	73,24	72.834.384	n/a	n/a	n/a	n/a	73,24	370.932.302	DPUESDM	Sebelum Perubahan
				Program Peningkatan Jalan & Jembatan		persen			32.364.167		64.943.992		67.280.762		n/a		n/a				
		3		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	persen	100	100	486.854	100	535.539	100	589.093	100	648.002	100	712.802	100	2.972.290	DPUESDM	Tetap
		4		Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54,04	10.000.000	63,75	10.000.000	63,75	20.000.000,00	DPUESDM	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					baru																
				Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	persen	24,20	26,97	12.000.000	29,91	15.000.000	32,85	16.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	32,85	43.500.000	DPUESDM	Sebelum Perubahan
		5		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	persen	75,06	76,50	26.155.777	78,00	28.600.000	79,50	31.460.000	81,00	34.606.000	82,50	38.067.000	82,50	158.888.777	DPUESDM	Tetap
		6		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	Peningkatan penyediaan debit air baku	l/det	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.600	4.500.000	2.100	5.000.000	2.100	9.500.000	DPUESDM	Perubahan Baru
		7		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Peningkatan penyediaan debit air baku	l/det	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.600	41.000.000	2.100	42.500.000	2.100	83.500.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber	Penambahan penyediaan air baku	l/det	600	700	14.582.538	900	19.500.000	1200	19.750.000	n/a	n/a	n/a	n/a	1200	62.345.668	DPUESDM	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Daya Air Lainnya																	
				Program penyediaan dan pengelolaan air baku					1.013.130		3.500.000		4.000.000		n/a		n/a			DPUESDM	Sebelum Perubahan
		8		Program pengembangan pengelolaan air minum	Penambahan penduduk berakses air minum	jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	500.000	44.000.000	600.000	44.000.000	600.000	88.000.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program pengembangan pengelolaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum	persen	70,38	73,87	1.574.270	77,36	1.700.000	80,85	2.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	80,85	5.274.270	DPUESDM	Sebelum Perubahan
		9		Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	13.329	14.300	4.081.741	15.800	6.000.000	17.300	6.500.000	20.000	7.000.000	21.000	7.500.000	21.000	31.081.741	DPUESDM	Tetap
		10		Program pengelolaan persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	persen	45,00	50,00	174.950	55,00	1.500.000	60,00	2.000.000	65,00	2.500.000	70,00	2.500.000	70,00	8.674.950	DPUESDM	Tetap
		11		Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	69,00	2.000.000	73,00	2.000.000	73,00	4.000.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase peningkatan aksesibilita	persen	53,00	57,00	2.649.950	61,00	2.000.000	65,00	2.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	65,00	6.649.950	DPUESDM	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					s kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin																
		12		Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	55,00	15.000.000	59,00	15.000.000	59,00	30.000.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	persen	39,00	43,00	19.050.000	47,00	15.000.000	51,00	15.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	51,00	49.050.000	DPUESDM	Sebelum Perubahan
		13		Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	58,00	100.000	58,00	100.000	58,00	200.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan,	persen	28,00	34,00	0,00	40,00	5.000.000	46,00	5.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	58,00	10.000.000	DPUESDM	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Potensi	minapolitan dan desa potensi																
		14		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,	Pengurangan jumlah titik genangan	persen	27,90	33,90	3.424.916	39,90	5.000.000	45,90	6.000.000	51,90	6.000.000	57,90	6.000.000	57,90	26.424.916	DPUESDM	Tetap
		15		Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	persen	78,00	80,00	128.987	82,00	2.500.000	84,00	2.750.000	86,00	3.000.000	88,00	3.250.000	88,00	11.628.987	DPUESDM	Tetap
		16		Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	Titik	20	40	1.518.497	60	3.300.000	80	3.630.000	100	4.000.000	120	4.400.000	120	16.848.497	DPUESDM	Tetap
		17		Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	persen	70,00	75,00	680.000	81,25	650.000	87,50	700.000	93,75	750.000	100	800.000	100	3.580.000	DPUESDM	Tetap
		18		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi	persen	75,00	77,50	985.000	80,00	1.050.000	82,50	1.125.000	85,00	1.200.000	87,50	1.200.000	87,50	5.560.000	DPUESDM	Tetap
		19		Program Pengkajian dan Penerapan	Persentase peningkatan penguasaa	persen	72,50	75,00	693.455	77,50	800.000	80,00	850.000	82,50	900.000	85,00	950.000	85,00	4.193.455	DPUESDM	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	n teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum																
1	**4**			**Perumahan**																	
		1		Program pengurangan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	persen	23,20	29,00	6.050.000	34,00	4.015.000	40,00	4.396.000	46,00	4.596.000	51,00	4.998.000	51,00	24.055.000	DPUESDM	Tetap
		2		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	persen	38,58	44,00	4.100.000	49,00	2.750.000	54,00	3.025.000	59,00	3.327.000	64,00	3.660.000	64,00	16.862.000	DPUESDM	Tetap
		3		Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,25	7.500.000	7,00	8.000.000	6,75	8.000.000	6,75	23.500.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	persen	8,50	8,00	11.362.500	7,50	7.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,50	18.862.500	DPUESDM	Sebelum Perubahan
1	**5**			**Penataan Ruang**																	
		1		Program Perencanaan	Ketersediaan rencana	Kawasan	10	12	994.357	14	3.000.000	16	3.000.000	18	3.000.000	19	3.000.000	19	12.994.357	DPUESDM	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Tata Ruang	tata ruang pada kawasan strategis provinsi	Strategis															
		2		Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pengaturan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,00	2.500.000	90,00	2.500.000	90,00	5.000.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/ kota dan RTRW Provinsi	persen	45,00	50,00	1.024.600	60,00	2.500.000	70,00	2.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	6.024.600	DPUESDM	Sebelum Perubahan
		3		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersediany a instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di DIY	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	71,00	2.000.000	86,00	2.000.000	86,00	4.000.000	DPUESDM	Perubahan Baru
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasanlindung bawahan	persen	10,00	20,00	847.360	40,00	2.000.000	60,00	2.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	60,00	4.847.360	DPUESDM	Sebelum Perubahan
1	**6**			**Perencanaan Pembangunan**																	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13,94	2.265.000	9,38	2.718.000	6,97	3.261.600	6,97	8.244.600	BAPPEDA	Perubahan Baru
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	persen	28,19	24,16	1.193.915	20,45	2.190.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20,45	3.383.915	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
		2		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,52	2.316.000	2,62	2.779.200	2,62	5.095.200	BAPPEDA	Perubahan Baru
				Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka	persen	1,34	1,15	1.206.240	0,97	1.010.000	0,81	1.722.183	n/a	n/a	n/a	n/a	0,81	3.938.423	BAPPEDA	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan																
		3		Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,47	1.428.000	1,09	1.713.600	1,09	3.141.600	BAPPEDA	Perubahan Baru
				Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	persen	6,71	5,75	848.749	4,87	935.000	4,06	1.836.443	n/a	n/a	n/a	n/a	4,06	3.620.192	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
		4		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,11	1.818.000	3,05	2.181.600	3,05	3.999.600	BAPPEDA	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					tahunan di bidang sosial budaya)																
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	persen	17,45	14,96	1.181.841	12,66	1.365.000	10,55	1.515.000	n/a	n/a	n/a	n/a	10,55	4.061.841	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
		5		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana (RPJMD)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,76	2.358.000	1,31	2.829.600	1,31	5.187.600	BAPPEDA	Perubahan Baru
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang	persen	2,68	2,30	1.389.811	1,95	1.385.000	1,62	1.761.538	n/a	n/a	n/a	n/a	1,62	4.536.349	BAPPEDA	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					sarana prasarana																
		6		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77,00	2.616.000	79,41	3.139.200	79,41	5.755.200	BAPPEDA	Perubahan Baru
				Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	persen	0,00	74,00	1.439.699	79,00	1.655.000	84,00	2.180.000	n/a	n/a	n/a	n/a	79,00	3.094.699	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
1	**7**			**Perhubungan**																	
		1		Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan	persen	4,20	8,40	378.929	16,80	510.000	25,20	2.980.000	33,60	2.760.000	42,00	2.756.000	42,00	9.384.929	DISHUBKOM INFO	Tetap
		2		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan	persen	75,00	80,00	5.857.000	82,00	6.469.000	83	7.267.000	85	8.067.000	87	8.967.000	87	36.627.000	DISHUBKOM INFO	Tetap
		3		Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	persen	10,00	20,00	127.706	30,00	3.250.000	40,00	3.250.000	50,00	3.250.000	60,00	3.250.000	60,00	13.127.706	DISHUBKOM INFO	Tetap
		4		Program Peningkatan	Penumpang yang	penumpang/	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9.750	140.000.000	10.145	140.000.000	10.145	280.000.000	DISHUBKOM INFO	Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pelayanan Angkutan	terlayani angkutan umum perkotaan	hari															Baru
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	persen	32,57	34,57	53.043.000	36,57	56.630.000	38,57	75.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	38,57	184.673.000	DISHUBKOMINFO	Sebelum Perubahan
		5		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY	persen	26,67	27,08	54.000	30,42	300.000	44,17	6.000.000	65,83	7.000.000	82,50	9.000.000	82,50	22.354.000	DISHUBKOMINFO	Tetap
		6		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	persen	25,00	30,00	1.516.000	35,00	3.815.000	40,00	4.216.000	45,00	4.659.000	50,00	5.150.000	50,00	19.356.000	DISHUBKOMINFO	Tetap
		7		Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	persen	80,00	90,00	1.594.000	100	2.388.000	100	2.531.000	100	2.578.000	100,00	2.631.000	100	11.722.000	DISHUBKOMINFO	Tetap
		8		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	persen	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	3.720.000	100	4.099.000	100	7.819.000	DISHUBKOMINFO	Perubahan Baru
				Program Rehabilitasi dan	Berfungsinya sarana dan	persen	100	100	595.000	100	693.000	100	897.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.185.000	DISHUBKOMINFO	Sebelum Peruba

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	prasarana Fasilitas LLAJ																han
		9		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	persen	100	100	61.458	100	160.000	100	171.000	100	184.000	100	199.000	100	775.458	DISHUBKOMINFO	Tetap
1	**8**			**Lingkungan Hidup**																	
		1		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan kualitas air	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14,95	4.800.000	18,69	4.900.000	18,69	9.700.000	BLH	Perubahan Baru
				Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	persen	2,00	3,14	4.497.604	6,29	4.646.000	9,43	4.700.000	n/a	n/a	n/a	n/a	9,43	13.843.604	BLH	Sebelum Perubahan
		2		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	1.000.000	11	1.100.000	11	2.100.000	BLH	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses inforamasi sumber daya air dan lingkungan hidup	persen	10,00	15,00	700.424	20,00	866.000	25,00	900.000	n/a	n/a	n/a	n/a	25,00	2.466.424	BLH	Sebelum Perubahan
		3		Program Peningkatan	Persentase Peningkata	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9,01	1.135.000	11,26	1.230.000	11,26	2.365.000	BLH	Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pengendalian Polusi	n kualitas udara																Baru
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan penaatan lingkungan bagi kegiatan usaha	persen	2,00	3,00	269.028	5,00	955.000	7,00	1.050.000	n/a	n/a	n/a	n/a	7,00	2.274.028	BLH	Sebelum Perubahan
		4		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri	kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	675.000	60	700.000	60	1.375.000	BLH	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	persen	360	360	419.616	370	645.000	380	660.000	n/a	n/a	n/a	n/a	380	1.724.616	BLH	Sebelum Perubahan
		5		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	46,67	873.000	58,33	919.000	58,33	1.792.000	BLH	Perubahan Baru
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	persen	7,00	11,67	2.223.453	23,33	769.000	35,00	822.000	n/a	n/a	n/a	n/a	35,00	3.814.453	BLH	Sebelum Perubahan
		6		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan Yang Terkonservasi	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	36	2.300.000	45	2.500.000	45	4.800.000	BLH	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	LuasLahan yang TerkonservasiTerhadapLuasan Total Lahan	Ha	3	9	1.677.275	18	1.900.000	27	2.200.000	n/a	n/a	n/a	n/a	27 Ha	5.777.275	BLH	Sebelum Perubahan
1	**9**			**Pertanahan**																	
		1		Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11.035	11.660.000	13.035	13.320.000	13.035	24.980.000	BIRO TAPEM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	persen	8.381 bidang	8.805	100.000	9.229	500.000	9.653	500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	9.653	1.100.000	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan
		2		Program Penataan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah Kasultanan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang sesuai Peruntukannya	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20,00	440.000	50,00	484.000	50,00	924.000	BIRO TAPEM	Perubahan Baru
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	persen	10,00	15,00	169.600	20,00	200.000	25,00	230.000	30,00	260.000	35,00	300.000	25,00	599.600	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	8.381	8.805	100.000	9.229	500.000	9.653	500.000	10.077	500.000	10.501	500.000	9.653	2.100.000	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pertanahan																	
1	**10**			**Kependudukan dan Catatan Sipil**																	
		1		Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96,50	1.210.000	97,00	1.331.000	97,00	2.541.000	BIRO TAPEM	Perubahan Baru
				Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	persen	84,00	86,00	230.000	87,00	250.000	89,00	270.000	n/a	n/a	n/a	n/a	89	750.000	BIRO TAPEM	Sebelum Perubahan
1	**11**			**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																	
		1		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,47	2.044.682	0,46	2.249.150	0,45	2.474.065	0,45	6.767.897	BPPM	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	persen	N/A	670	415.978	657	2.220.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	657	2.635.978	BPPM	Sebelum Perubahan
		2		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Rasio Korban kekerasan terhadap anak	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,37	2.294.634	0,36	2.524.097	0,35	2.776.507	0,35	7.595.238	BPPM	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	persen	n/a	322,00	90.000	316,00	520.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	316,00	610.000	BPPM	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		3		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	36,20	1.024.900	36,30	1.127.390	36,50	1.240.129	36,50	3.392.419	BPPM	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	persen	3,55	3,59	4.365.500	3,61	3.170.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,61	7.535.500	BPPM	Sebelum Perubahan
		4		Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96,66	1.527.000	96,74	1.680.002	96,99	1.848.002	96,99	3.528.004	BPPM	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	persen	96,41	95,50	650.000	95,58	810.000	n/a	n/a	96,74	980.100	97,00	1.078.100	96,99	2.987.000	BPPM	Sebelum Perubahan
		5		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase pembinaan organisasi perempuan	persen	37,64	n/a	n/a	n/a	n/a	75,14	1.363.425	87,64	1.499.768	100	1.649.745	100	4.512.938	BPPM	Perubahan Baru
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase pembinaan organisasi perempuan	persen	37,64	50,14	1.512.732	62,64	1.200.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	63,00	4.032.732	BPPM	Sebelum Perubahan
					Jumlah penanganan	persen	N/A	670	415.978	657	2.220.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	657	2.635.978	BPPM	Sebelum Peruba

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					perempuan korban kekerasan																han
		6		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	Terlaksananya Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	persen	100	100	645.500									100	645.500	BPPM	Tetap
		7		Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Presentase Partisipasi Perempuan di organisasi politik	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11,06	958.345	11,00	1.054.179	11,50	1.159.597	11,50	3.172.121	BPPM	Perubahan Baru
				Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	persen	n/a	8,41	100.000	11,06	500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11,06	600.000	BPPM	Sebelum Perubahan
1	**12**			**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**																	
		1		Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan peserta KB aktif	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,220	857.270	80,222	942.997	80,224	1.037.297	80,224	2.837.564	BPPM	Perubahan Baru
				Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan peserta KB aktif	persen	71,36	71,48	500.000	71,60	800.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	71,60	1.300.000	BPPM	Sebelum Perubahan
		2		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,510	948.196	0,505	1.043.015	0,500	1.147.317	0,500	3.138.528	BPPM	Perubahan Baru
				Program	Persentase	persen	0,530	0,520	220.000	0,515	570.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,515	790.000	BPPM	Sebelu

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Kesehatan Reproduksi Remaja	penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun																m Perubahan
		3		Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase tahapan keluarga sejahtera	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44,10	2.575.107	43,40	2.832.617	43,00	3.115.880	43,00	8.523.604	BPPM	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase tahapan keluarga sejahtera	persen	45,83	45,20	350.000	44,60	610.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44,10	960.000	BPPM	Sebelum Perubahan
		4		Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23,00	2.575.107	23,63	2.832.618	24,27	3.115.880	24,27	8.523.605	BPPM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan	persen	21,47	21,47	350.000	22,13	485.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23,00	1.685.000	BPPM	Sebelum Perubahan
		5		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	persen	N/A	100	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	120.000	BPPM	Tetap
		6		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Terlaksananya Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk	persen	N/A	100	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	192.000	BPPM	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					HIV AIDS																
1	**13**			**Sosial**																	
		1		Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial	persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,39	4.117.328	3,87	4.526.061	4,53	4.981.967	4,53	13.625.356	DINSOS	Perubahan Baru
				Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial	persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	persen	6,50	6,92	3.401.908	7,55	3.743.026	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,55	7.144.934	DINSOS	Sebelum Perubahan
		2		Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,02	401.273	2,24	441.401	2,51	485.541	2,51	1.328.215	DINSOS	Perubahan Baru
				Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	persen	7,18	7,27	331.631	7,85	364.794	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,85	696.425	DINSOS	Sebelum Perubahan
		3		Program Penanganan dan penanggulangan Bencana	Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19,37	4.628.250	19,73	5.091.075	20,18	5.600.182	20,18	15.319.507	DINSOOS	Perubahan Baru
				Program Penanganan dan	Prosentase penerima perlindung	persen	7,60	7,80	3.825.000	8,54	4.207.500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,54	8.032.500	DINSOS	Sebelum Peruba

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				penanggulangan Bencana	an sosial bagi korban bencana																han
		4		Program perlindungan dan pemberdayaan bagi Korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis, dan korban *trafficking*	Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial.	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,50	246.598	3,70	271.257	3,99	298.383	3,99	816.238	DINSOS	Perubahan Baru
				Program perlindungan dan pemberdayaan bagi Korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis, dan korban trafficking	Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial.	persen	5,40	5,60	203.800	5,95	224.180	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5,95	427.980	DINSOS	Sebelum Perubahan
		5		Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitas	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,11	11.598.394	1,20	12.758.233	1,30	14.034.057	1,30	38.390.684	DINSOS	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					i dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma																
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	persen	4,85	4,67	349.279	4,90	10.543.995	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,90	10.893.274	DINSOS	Sebelum Perubahan
		6		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,68	743.556	4,68	817.912	6,56	899.703	6,56	2.461.171	DINSOS	Perubahan Baru
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	persen	3,10	3,25	614.509	3,77	675.960	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,77	1.290.469	DINSOS	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)																	
		7		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,62	19.384.496	3,20	20.238.570	4,24	21.178.051	4,24	60.801.117	DINSOS	Perubahan Baru
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	persen	8,10	8,24	14.843.760	9,33	16.367.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9,33	31.210.760	DINSOS	Sebelum Perubahan
		8		Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30,13	9.431.044	30,29	9.975.216	30,56	10.573.812	30,56	29.980.072	DINSOS	Perubahan Baru
				Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	persen	62,45	65,39	8.583.021	66,40	10.133.125	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	66,40	18.716.146	DINSOS	Sebelum Perubahan
		9		Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawa	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,02	649.657	63,02	679.582	70,00	712.501	70,00	2.041.740	DINSOS	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				dan Kesetiakawanan Sosial (K 3	nan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan																
				Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K 3	Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan	persen	33,35	35,00	662.529	45,00	687.072	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45,00	1.349.601	DINSOS	Sebelum Perubahan
		10		Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan (RPJMD)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,3	12.000.000	1,31	14.000.000	1,33	15.000.000	1,33	41.000.000	DINSOS	Perubahan Baru
				Program Pembinaan Panti Sosial / Jompo	Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan	persen	1,70	1,91	5.391.500	2,07	10.363.135	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,07	15.754.635	DINSOS	
		11		Program peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial	Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1.698.223	100	1.868.045	100	2.054.849	100	5.621.117	DINSOS	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial\																
				Program peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial	prosentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	persen	N/A	N/A	0,00	38,56	1.543.839	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	38,56	1.543.839	DINSOS	Sebelum Perubahan
		12		Program Pembinaan Anak Terlantar	Pembinaan anak terlantar	persen	N/A	1,22	1.472.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22	1.472.800	DINSOS	Tetap
		13		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	persen	N/A	27,13	4.134.443	0	0	0	0	0	0	0	0	27,13	4.134.443	DINSOS	Tetap
1	**14**			**Ketenagakerjaan**																	
		1		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	persen	22,29	23,50	5.785.466	24,20	8.478.727	25,00	9.326.599	26,00	10.259.259	27,00	11.285.185	27,00	45.135.236	DISNAKERTRANS	Tetap
		2		Program Peningkatan Kesempatan	Prosentase Besaran Kesempata	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20,77	n/a	20,98	11.540.422	21,18	12.694.464	21,18	24.234.886	DISNAKERTRANS	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Kerja	n Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja																
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja	persen	7,81	8,20	6.708.007	9,00	9.537.539	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9,00	16.245.546	DISNAKERTRANS	Sebelum Perubahan
		3		Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 sesuai dengan standar/ peraturan	persen	87,92	88,01	1.779.019	0	0	0	0	0	0	0	0	88,01	1.779.019	DISNAKERTRANS	Tetap
		4		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	persen	n/a	n/a	n/a	48,35	375.735	50,00	396.755	52,00	436.431	53,00	480.074	53,00	1.688.995	DISNAKERTRANS	Tetap
		5		Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	persen	n/a	n/a	n/a	60,00	734.797	65,00	808.276	75,00	889.104	84,00	978.014	84,00	3.410.191	DISNAKERTRANS	Tetap
		6		Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan	persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksana	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30,30	n/a	30,60	1.228.588	30,91	1.351.446	30,91	2.580.034	DISNAKERTRANS	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					kan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3																
				Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan	persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	persen	n/a	n/a	n/a	14,35	1.015.362	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14,35	1.015.362	DISNAKERTRANS	Sebelum Perubahan
1	**15**			**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**																	
		1		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UKM (unit usaha)	unit	203,995	212,155	247.342	220,641	756.894	229,467	951.762	238,645	1.156.495	248,191	1.569.641	248,191	4.682.134	DISPERINDAGKOP	Tetap
		2		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	unit	2.090	2.174	4.000.705	2.261	1.000.000	2.351	1.200.000	2.445,00	1.300.000	2.543,00	1.300.000	2.543,00	8.800.705	DISPERINDAGKOP	Tetap
		3		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	orang	30	80	76.377	130	500.000	180	600.000	230	700.000	280	847.000	280	2.723.377	DISPERINDAGKOP	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	**16**			**Penanaman Modal**																	
		1		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi (RP 000)	Juta Rupiah	7.056.066.141	7.809.763.000	2.013.033	8.946.874.000	2.000.000	10.467.183.000	2.500.000	12.274.836.000	2.700.000	14.002.769.000	2.970.000	14.002.769.000	12.183.033	BKPM	Tetap
		2		Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi	Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip	buah	334	341	2.199.662	347	2.500.000	354	2.500.000	362	2.700.000	369	2.970.000	369	12.869.662	BKPM	Tetap
1	**17**			**Kebudayaan**																	
		1		Program Pengembangan Nilai Budaya	Organisasi budaya dan desa budaya kategori maju	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	77.922.941	28	81.819.088	28	159.742.029	DISBUD	Perubahan Baru
				Program Pelestarian kekayaan Budaya	jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86.615	500.000	95.276	500.000	95.276	1.000.000	BKPM	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase organisasi budaya berkategori maju	persen	0,94	1,03	59.805.754	1,11	68.995.750	1,24	74.212.325	n/a	n/a	n/a	n/a	1,11	203.013.829	DISBUD	Sebelum Perubahan
		2		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	52,00	490.402.345	54,00	460.000.000	54,00	950.402.345	DISBUD	Perubahan Baru
				Program	Persentase		11	14	191.348.55	20	222.646.5	25	490.911.2	n/a	n/a	n/a	n/a	25	904.906.347	DISBUD	Sebelu

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pengelolaan Kekayaan Budaya	peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan				8		66		23								m Perubahan
		3		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	persen	5,00	10,00	72.323.391	13,00	75.859.188	15,00	146.481.534	20,00	123.329.688	30,00	119.162.657	30,00	537.156.458	DISBUD	Tetap
		4		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase implementasi hasil kesepakatan	persen	3,00	5,00	1.050.860	7,00	927.500	15,00	1.585.040	20,00	1.633.544	35,00	1.086.898	35,00	6.283.842	DISBUD	Tetap
		5		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	persen	15,00	20,00	40.709.370	30,00	49.450.000	40,00	166.765.000	55,00	173.441.500	70,00	174.185.650	70,00	604.551.520	DISBUD	Tetap
		6		Program Pelestarian Kekayaan Budaya	jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86.615	500.000	95.276	500.000	95.276	1.000.000	BKPM	Tetap
1	**18**			**Kepemudaan dan Olah Raga**																	
		1		Program Pengembangan dan keserasian	Dokumen pembangunan kepemuda	persen	74,01	74,24	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	DIKPORA	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				kebijakan pemuda	an																
		2		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	sentra	9	10	6.491.170	12	11.126.165	13	14.625.000	14	16.038.000	15	17.566.000	15	65.846.335	DIKPORA	Tetap
		3		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	kelompok	225	325	2.049.000	345	3.000.000	365	3.250.000	385	3.500.000	405	3.750.000	405	15.549.000	DIKPORA	Tetap
		4		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Atau Pembinaan Olahraga	orang	1800	2000	8.665.000	2100	1.305.000	2200	1.465.000	2300	1.632.000	2400	1.805.000	2400	14.872.000	DIKPORA	Tetap
		5		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga	persen	16,67	28,13	8.500.000	44,29	75.694.990	58,69	76.369.984	63,13	40.442.813	66,67	10.800.000	66,67	211.807.787	DIKPORA	Tetap
		6		Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	Medali	21	22	5.000.000	23	50.000.000	27	55.000.000	28	60.000.000	30	65.000.000	30	235.000.000	DIKPORA	Tetap
		7		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan /pemberdayaan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.984.000	100	3.532.000	100	6.516.000	DIKPORA	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					pemuda"																
				Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Pemuda	Organisasi	35	37	1.125.000	39	1.900.000	41	2.440.000	n/a	n/a	n/a	n/a	41	5.465.000	DIKPORA	Sebelum Perubahan
1	**19**			**Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri**																	
		1		Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Prosentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A	100	620.000	100	625.000	100	1.245.000	BAKESBANGLINMAS	Perubahan Baru
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi dalam Pemilu	persen	67,00	67,00	470.000	70,00	600.000	73,00	600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	73,00	1.670.000	BAKESBANGLINMAS	Sebelum Perubahan
		2		Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY)	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.17	1.460.000	0.15	1.500.000	0.15	2.960.000	BAKESBANGLINMAS	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Kab./Kota yang telah terbentuk Community Policing	persen	N/A	1,00	1.350.000	22,00	1.400.000	3,00	1.425.000	n/a	n/a	n/a	n/a	3,00	4.175.000	BAKESBANGLINMAS	Sebelum Perubahan
		3		Program Pemeliharaan	Peningkatan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20,00	1.200.000	25,00	1.320.000	25,00	2.520.000	SATPOLPP	Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				n Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani																Baru
				Program Pemeliharaan kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus tindak kriminal	persen	987	972	483.000	964	531.000	948	584.000	n/a	n/a	n/a	n/a	948,00	1.598.000	SATPOLPP	Sebelum Perubahan
		4		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/musibah yang selamat	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85,20	875.000	86,40	962.000	86,40	1.837.000	BAKESBANGLINMAS	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	299	285	659.000	260	724.000	250	796.000	n/a	n/a	n/a	n/a	250	2.179.000	SATPOLPP	Sebelum Perubahan
		5		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Peningkatan Penyakit Masyarakat yang tertangani	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20,00	500.000	25,00	550.000	25,00	1.050.000	SATPOLPP	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penurunan kasus pekat		318	316	84.000	315	92.000	314	101.000	n/a	n/a	n/a	n/a	314,00	277.000	SATPOLPP	Sebelum Perubahan
		6		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan aktifitas radikalisme dan separatism	kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	1.300.000	6	1.320.000	6	2.620.000	BAKESBANGLINMAS	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					e																
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	kasus	30	28	1.243.680	25	1.280.000	22	1.295.000	n/a	n/a	n/a	n/a	22	3.818.680	BAKESBANGLINMAS	Sebelum Perubahan
		7		Program Penegakan Perda dan Perkada	Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	700.000	25	770.000	25	1.470.000	SATPOLPP	Program Baru
		8		Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada	Peningkatan kepatuhan terhadap perda dan perkada	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	700.000	65	770.000	65	1.470.000	SATPOLPP	Program Baru
1	**20**			**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**																	
		1		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	87,00	710.000	90,00	735.000	90,00	1.445.000	BIRO ORGANISASI	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit	20	2	460.000	2	650.000	2	655.000	n/a	n/a	n/a	n/a	2	1.765.000	BIRO ORGANISASI	Sebelum Perubahan
		2		Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Prosentase penurunan temuan hasil	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.940.621	5,00	3.795.000	5,00	4.060.000	5,00	10.795.621	INSPEKTORAT	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	pemeriksaan																
		3		Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,00	765.000	90,00	960.000	90,00	1.725.000	INSPEKTORAT	Program Baru
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	persen	75,00	60,00	3.144.764	45,00	3.130.000	30,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30,00	6.274.764	INSPEKTORAT	Sebelum Perubahan
		4		Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan	Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95,00	5.100.000	98,00	9.900.000	98,00	15.000.000	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayan pimpinan	persen	85,00	85,00	2.500.000	90,00	1.672.839	95,00	1.689.954	100%	1.838.645	100%	2.113.180	100%	9.814.618	SETDA	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Persentase kelancaran penyelenggaraan	persen	85,00	85,00	2.500.000	90,00	1.672.839	95,00	1.689.954	n/a	n/a	n/a	n/a	95,00	5.862.793	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	pelayan pimpinan																
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	persen	100	100	133.437	100	78.023	100	78.708	n/a	n/a	n/a	n/a	100	290.168	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	Sebelum Perubahan
		5		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	97,50	36.559.214	100	40.215.135	100	76.774.349	SETWAN	Perubahan Baru
				Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media	Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	3.200.000	90	3.750.000	90	6.950.000	SETWAN	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	persen	92,30	93,00	36.526.224	93,00	24.540.541	94,50	25.669.886	n/a	n/a	n/a	n/a	93,00	86.736.651	SETWAN	Sebelum Perubahan
		6		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	persen	100	100	664.551	100	665.000	100	665.000	100	665.000	100	665.000	100	3.324.551	BIRO HUKUM	Tetap
		7		Program Pembinaan	Persentase Tindak	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	208.000	100	208.000	100	416.000	BIRO HUKUM	Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				dan Pengawasan Produk Hukum	lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/Kota																Baru
				Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	persen	100	100	207.000	100	208.000	100	208.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100	623.000	BIRO HUKUM	Sebelum Perubahan
		8		Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang dapat diakses masyarakat	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	50.000	100	60.000	100	110.000	BIRO HUKUM	Program Baru
		9		Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48,83	6.865.194	51,17	7.591.714	51,17	14.456.908	BIRO ADM. KESRA, BIRO ADM PEMBANGUNAN, BIRO ADM PEREKONOMIAN DAN SDA, SETDA	Perubahan Baru
				Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	persen	24,35	26,13	4.555.254	31,77	4.726.235	36,45	4.896.735	n/a	n/a	n/a	n/a	36,45	14.178.224	BIRO ADM. KESRA, BIRO ADM PEMBANGUNAN, BIRO ADM PEREKONOMIAN DAN SDA	Sebelum Perubahan
		1		Program	Peningkata	Angka	11 desa	15	1.390.000	25	1.480.000	40	1.550.000	55	1.676.000	70	1.745.000	70 desa	7.841.000	BPBD	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		0		pencegahan dini bencana	n jumlah Desa Tangguh			desa		desa		desa		desa		desa					
		11		Program penanggulangan korban bencana	Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,00	1.454.142	75,00	1.511.412	75,00	2.965.554	BPBD	Perubahan Baru
		12		Program Pemulihan Pasca bencana	Persentase pemulihan wilayah rawan bencana.	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,00	3.856.769	10,00	5.785.153	10,00	9.641.922	BPBD	Program Baru
				Program Penanggulangan Korban Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	persen	N/A	N/A	2.048.000	70,00	1.351.139	72,00	1.336.316	n/a	n/a	n/a	n/a	72,00	4.735.455	BPBD	Sebelum Perubahan
		13		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	51,31	7.737.697	49,18	8.521.458	46,25	8.987.906	46,25	25.247.061	DPPKA	Program Baru
		14		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakurata n dalam pengelolan keuangan daerah	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	6.284.973	100	7.528.917	100	8.704.421	100	22.518.311	DPPKA	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan	Persentase peningkatan PAD	persen	10,26	10,47	8.306.453	11,49	9.137.098	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11,49	17.443.551	DPPKA	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Keuangan Daerah																	
		15		Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54,03	2.565.362	54,46	2.860.653	54,46	5.426.015	DPPKA	Program Baru
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	1.686.142	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	1.686.142	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Program Pengembangan investasi dan aset daerah	Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan	persen	11,29	11,43	382.920	11,57	381.942	11,71	396.527	n/a	n/a	n/a	n/a	11,71	1.161.389	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Program Pengembangan investasi dan aset daerah	Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan	persen	11,29	11,43	382.920	11,57	381.942	11,71	401.938,00	n/a	n/a	n/a	n/a	11,71	1.166.800	DPPKA	Sebelum Perubahan
				Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	persen	5,97	100	600.000	100	660.000	100	1.191.372	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.451.372	DPPKA	Sebelum Perubahan
		1		Program	Persentase	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18,34	632.841	18,57	765.737	19,36	842.311	19,36	2.240.889	DPPKA	Peruba

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		6		pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro	deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD																han Baru
				Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	persen	22,00	31,56	321.500	26,13	350.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	26,13	671.500	DPPKA	Sebelum Perubahan
		17		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90,00	4.645.169	90,00	4.770.000	90,00	9.415.169	BIRO ORGANISASI	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	persen	70,00	75,00	6.120.591	80,00	4.849.162	85,00	4.812.293	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00	15.782.046	BIRO ORGANISASI	Sebelum Perubahan
		18		Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	55,00	13.172.262	70,00	14.489.488	70,00	27.661.750	BADAN DIKLAT	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan	persentase PNS yang mengikuti diklat	persen	18,00	20,00	8.151.586	22,50	8.756.445	25,00	8.989.500	n/a	n/a	n/a	n/a	25,00	25.897.531	BADAN DIKLAT	Sebelum Perubahan
		19		Program Pembinaan dan Pengembang	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	79,03	13.021.060	87,15	7.228.289	86,92	7.604.168	86,92	27.853.517	BKD	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				an Aparatur Pemda	Pegawai																
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	persen	80,00	81,00	4.604.670	82,00	4.695.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82,00	9.299.670	BKD	Sebelum Perubahan
		20		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DIY	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	73,53	464.193	88,24	469.510	88,24	933.703	BPAD	Perubahan Baru
				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	SOPD	5,00	10,00	616.982	15,00	2.090.000	20,00	2.090.000	n/a	n/a	n/a	n/a	20,00	4.796.982	BPAD	Sebelum Perubahan
		21		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase pengakses informasi aktivitas Pemerintahan Daerah melalui web, media elektronik dan media cetak	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80,00	2.660.000	90,00	2.750.000	90,00	5.410.000	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	Perubahan Baru
				Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media	persen	90,00	100	1.160.410	100	791.645	100	2.538.321	n/a	n/a	n/a	n/a	100	4.490.376	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					massa																
				Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu.	persen	20,00	25,00	625.401	35,00	650.800	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35,00	1.276.201	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	Sebelum Perubahan
		2 2		Program Fasilitasi Bantuan Dan Layanan Hukum	Pemberian Bantuan dan Layanan Hukum	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.004.177	100	2.315.000	100	2.500.000	100	6.819.177	BIRO HUKUM	Perubahan Baru
				Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	Persentase pemberian Layanan Hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	persen	100	100	3.088.027	100	1.994.667	100	1.952.053	n/a	n/a	n/a	n/a	100	7.034.747	BIRO HUKUM	Sebelum Perubahan
		2 3		Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/Kota	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	208.000	100	208.000	100	416.000	BIRO HUKUM	Perubahan Baru
				Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi Rancangan Produk	persen	100	100	207.000	100	208.000	100	208.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100	623.000	BIRO HUKUM	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					Hukum Kab/Kota																
		24		Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Jumlah rekruitmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	640	349.800	520	384.780	520	734.580	BADAN DIKLAT	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Persentase Tindaklanjut Pelaksanaan Diklat atas Kesepakatan Pengiriman Peserta Diklat dari Luar DIY	persen	100	100	383.797	100	259.803	100	269.203	n/a	n/a	n/a	n/a	100	912.803	BADAN DIKLAT	Sebelum Perubahan
		25		Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Persentase jumlah SK gubernur Hasil evaluasi atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dan dokumen hasil pencerama tan atas hasil evaluasi Gubernur	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	561.433	100	602.402	100	617.576	100	1.781.411	DPPKA	Program Baru
				Program Pembinaan	Peningkatan	persen	100	100	494.996	100	350.653	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	845.649	DPPKA	Sebelum

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu																Perubahan
		26		Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90,00	883.558	100	971.914	100	1.855.472	BADAN DIKLAT	Perubahan Baru
				Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90,00	1.200.000	95,00	1.350.000	100	2.550.000	BIRO ADM. PEMB.	Perubahan Baru
				Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pencapaian Penelitian dan Pengembangan	persen	100	100	1.155.935	100	817.117	100	876.272	n/a	n/a	n/a	n/a	100	2.849.324	BANDIKLAT, BIRO ADM. PEMB.	Sebelum Perubahan
		27		Program Pengembangan	Persentase kelompok masyaraka	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	7.566.823	100	10.021.094	100	17.587.917	BIRO KESRA	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Kehidupan Beragama	t dan lembaga Keagamaan yang terlayani																
				Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Persentase Pelaksanaan Kehidupan Beragama	persen	100	100	11.788.305	100	1.769.348	100	1.877.727	n/a	n/a	n/a	n/a	100	15.435.380	BIRO KESRA	Sebelum Perubahan
		28		Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	150.000	100	5.317.679	100	6.381.214	100	11.848.893	BIRO ADPEMB	Perubahan Baru
				Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT	persen	100	100	35.000	100	75.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75.000	110.000	DISHUBKOM INFO	Sebelum Perubahan
		29		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79,03	13.021.060	87,15	7.228.289	86,92	7.604.168	86,92	27.853.517	BKD	Perubahan Baru
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	persen	80,00	81,00	4.604.670	82,00	4.695.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82,00	9.299.670	BKD	Sebelum Perubahan
		30		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.879.220	70	1.223.659	71	1.625.000	71	4.727.879	BKD	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pemda DIY																	
				Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	persen	100	100	154.386	100	175.465	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	329.851	BKD	Sebelum Perubahan
		31		Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	persen	55,00	55,00	1.231.636	60,00	1.267.798	65,00	1.385.766	70,00	1.576.688	75,00	1.738.377	75,00	4.700.831	BKPM	Tetap
1	**21**			**Ketahanan Pangan**																	
		1		Program Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**18**	436.348	**14**	489.690	**14**	926.038	BKPP	Perubahan Baru
				Program Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan		80	71	3.174.403	62	355.034	53	391.335	n/a	n/a	n/a	n/a	53,00	3.920.772	BKPP	Sebelum Perubahan
		2		Program Peningkatan Ketersediaan & Cadangan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras)	Ton Setara beras	190	230	1.966.031	290	716.177	360	790.344	405	881.237	450	987.279	450	5.341.068	BKPP	Tetap
		3		Program Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	73,50	75,50	1.615.702	78,00	3.436.156	80,00	3.696.670	85,00	4.114.472	90,00	4.768.644	90,00	17.631.644	BKPP	Tetap
		4		Program Peningkatan Distribusi	Persentase ketersediaan	persen	94,55	96,87	1.136.409	99,15	954.393	100	1.055.070	100	1.176.277	100	1.315.055	100	5.637.204	BKPP	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				dan Akses Pangan	informasi pasokan, harga, dan akses pangan																
		5		Program pemberdayaan penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	87,00	3.284.258	100	3.672.677	100	6.956.935	BKPP	Perubahan Baru
				Program Pemberdayaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	persen	35,00	48,00	421.670	61,00	2.668.484	74,00	2.950.360	n/a	n/a	n/a	n/a	74,00	6.040.514	BKPP	Sebelum Perubahan
1	**2 2**			**Pemberdayaan Masyarakat**																	
		1		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34,43	395.275	38,26	434.803	43,36	478.283	43,36	1.308.361	BPPM	Perubahan Baru
				Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa (Renstra)	persen	24,76	28,46	80.000	33,08	1.020.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	33,08	1.100.000	BPPM	Sebelum Perubahan
		2		Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan*)	Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	29,16	2.446.106	30,37	2.690.716	31,57	2.959.788	31,57	8.096.610	BPPM	Perubahan Baru
				Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan*)	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	persen	n/a	26,76	2.164.000	27,96	67.883.652	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	27,96	70.047.652	BPPM	Sebelum Perubahan
		3		Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang memiliki profil	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00	1.872.200	85,00	2.059.420	100	2.265.362	100	6.196.982	BPPM	Perubahan Baru
				Program	Persentase	persen	28,54	42,00	95.000	55,00	595.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	55,00	690.000	BPPM	Sebelu

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	profil desa sesuai standar																m Perubahan
		4		Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35,00	2.010.635	36,00	2.211.698	37,00	2.432.868	37,00	6.655.201	BPPM	Perubahan Baru
				Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	persen	32,00	33,00	38.000	34,00	1.761.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35,00	1.799.000	BPPM	Sebelum Perubahan
		5		Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	persen	n/a	100	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	76.000	BPPM	Tetap
		6		Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya peningkatan Prasarana /Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	persen	n/a	100	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	95.000	BPPM	Tetap
1	**23**			**Statistik**																	
		1		Program Pengembang	Persentase kelengkap	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	97,00	1.525.000	98,00	1.830.000	100	2.196.000	100	5.551.000	BAPPEDA	Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				an Statistik Daerah	an data perencanaan yang tersedia																Baru
				Program Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data/analisis data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan	persen	92	94	1.425.000	96	1.475.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	3.404.100	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
				Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	persen	50,00	60,00	905.080	70,00	570.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	1.475.080	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
1	**24**			**Kearsipan**																	
		1		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,00	2.000.000	10,00	2.250.000	10,00	4.250.000	BPAD	Perubahan Baru
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	persen	5,00	7,00	4.500.000	9,00	2.212.296	11,00	2.433.000	n/a	n/a	n/a	n/a	11,00	9.145.296	BPAD	Sebelum Perubahan
		2		Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan	Penambahan Khasanah Arsip dan Koleksi	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,50	4.275.000	5,00	5.000.000	5,00	9.275.000	BPAD	Program Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Kepustakaan	Bahan Pustaka Berbasis Budaya																
		3		Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	persen	5,00	10,00	1.773.023	15,00	1.160.000	20,00	1.300.000	25,00	1.500.000	30,00	1.700.000	30,00	7.433.023	BPAD	Tetap
1	**25**			**Komunikasi dan Informatika**																	
		1		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan / bidang	9,00	10,00	595.000	11,00	693.000	12,00	897.000	13,00	902.000	14,00	907.000	14,00	3.994.000,00	DISHUBKOM INFO	Tetap
		2		Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	persen	10,00	40,00	7.282.000	60,00	5.000.000	80,00	5.000.000	90,00	3.500.000	100	3.000.000	100	23.782.000	DISHUBKOM INFO	Tetap
		3		Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75,00	1.000.000	75,00	1.000.000	75,00	2.000.000	DISHUBKOM INFO	Perubahan Baru
				Program fasilitasi pos telekomunikasi , Pengendalian frekuensi dan Informasi Publik	Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat	persen	55,00	60,00	950.000	65,00	975.000	70,00	1.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	2.925.000	DISHUBKOM INFO	Sebelum Perubahan
1	**2**			**Perpustakaan**																	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
	6																				
		1		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75,00	2.000.000	76,00	2.000.000	76,00	4.000.000	BPAD	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan	persen	70,00	80,00	20.000.000	82,50	25.000.000	85,00	12.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00	57.000.000	BPAD	Sebelum Perubahan
		2		Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan	persen	50,00	60,00	8.071.075	70,00	6.900.000	80,00	8.525.000	90,00	15.377.000	100	10.315.000	100	49.188.075	BPAD	Tetap
		3		Program Pengembangan Budaya Baca	Peningkatan pengunjung perpustakaan	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	849.747	4.750.000	934.722	5.000.000	934.722	9.750.000	BPAD	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Budaya Baca	Peningkatan Pemustaka	persen	14,00	16,00	2.606.279	18,00	4.300.000	20,00	4.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	20,00	11.406.279	BPAD	Sebelum Perubahan
2				**Urusan Pilihan**																	
2	**1**			**Pertanian**																	
		1		Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	Rerata Peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,55	3.299.786	99,00	3.791.150	99,00	7.090.936	DISTAN	*Perubahan Baru*
				Program	Persentase	persen	1,70	1,70	3.186.063	1,70	2.405.071	1,70	2.839.098	n/a	n/a	n/a	n/a	1,70	8.430.232	DISTAN	Sebelu

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani,	peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)																m Perubahan
		2		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	komoditas	3,00	3,00	2.383.491	3,00	1.565.205	3,00	1.995.042	3,00	2.445.724	3,00	2.922.345	3,00	11.311.807	DISTAN	Tetap
		3		Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**n/a**	**n/a**	2.203.677	10.228.998	2.208.665	6.437.057	2.208.665	16.666.055	DISTAN	**Perubahan Baru**
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	2.135.582	2.287.400	5.864.723	2.321.800	8.922.604	2.356.600	9.366.111	n/a	n/a	n/a	n/a	**2.356.600**	24.153.438	DISTAN	**Sebelum Perubahan**
		4		Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	ton	375.714	379.400	2.142.625	383.200	2.137.841	387.000	2.608.901	390.900	3.105.681	394.800	3.633.186	394.800	13.628.234	DISTAN	Tetap
		5		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi peternakan	AU (Animal Unit)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	620.320	9.938.180	641.416	10.978.539	641.416	20.916.719	DISTAN	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi peternakan	AU (Animal Unit)	619.268	644.257	17.256.785	671.634	8.093.255	700.516	8.977.689	n/a	n/a	n/a	n/a	700.516	34.327.729	DISTAN	Sebelum Perubahan
2	**2**			**Kehutanan**																	
		1		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan	Ton	82.797	84.600	-	86.300	3.206.761	88.000	3.491.324	80.125	3.882.102	80.152	4.304.535	80.152	14.884.722	DISHUTBUN	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		2		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	116	871.920	117,00	975.747	117,00	1.847.667	DISHUTBUN	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	persen	123,84	124,23	2.405.269	125,86	708.618	128,00	790.344	n/a	n/a	n/a	n/a	128	3.904.231	DISHUTBUN	Sebelum Perubahan
		3		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis	Ha	29.000	28.000	7.616.422	27.000	2.818.200	26.000	1.916.051	25.000	2.135.156	24.000	2.391.709	24.000	16.877.538	DISHUTBUN	Tetap
		4		Program penataan kawasan hutan	Persentase Luas Hutan	persen	27,04	27,34	163.042	27,5	217.880	27,63	239.529	27,77	265.906	27,85	298.565	27,85	1.184.922	DISHUTBUN	Tetap
		5		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan produksi Hasil Hutan	persen	1,98	3,52	4.042.132	4,70	4.024.127	5,59	4.429.856	6,48	4.928.116	7,37	5.503.659	7,37	22.927.890	DISHUTBUN	Tetap
		6		Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persentase Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan	persen	61,60	70,00	101.921	75,00	99.196	80,00	108.989	85,00	120.898	90,00	135.253	90,00	566.257	DISHUTBUN	Tetap
		7		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase kerusakan hutan (RPJMD)	persen	37,24	34,54	1.094.663	31,84	9.699.570	29,14	8.358.569	26,44	9.437.641	23,77	10.685.776	23,77	39.276.219	DISHUTBUN	Tetap
2	**3**			**Energi dan Sumberdaya Mineral**																	
		1		Program Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistr	Rasio elektrifikasi	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	84,5	4.440.000	86,30	7.000.000	88,10	8.000.000	88,10	19.440.000	DPUESDM	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				ikan																	
					Pencapaian rasio elektrifikasi		76,8	77,4	3.669.000	78,0	4.056.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78,00	7.725.000	DPUESDM	Sebelum Perubahan
		2		Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan	Pencapaian Penyediaan energi baru terbarukan	SBM	104,72 (000 SBM)	107,79 (000 SBM)	1.776.850	112 (000 SBM)	2.982.000	117,95 (000 SBM)	3.276.000	123,59 (000 SBM)	3.675.000	130,10 (000 SBM)	3.964.000	130,10 (000 SBM)	15.673.850	DPUESDM	Tetap
		3		Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah	Rerata penurunan muka air tanah	persen	< 20	< 20	3.475.000	< 20	4.000.000	< 20	4.300.000	< 20	4.600.000	< 20	2.665.000	< 20	19.040.000	DPUESDM	Tetap
		4		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi	persen	3,00	3,00	0	6,00	600.000	9,00	650.000	12,00	700.000	15,00	750.000	15,00	2.700.000	DPUESDM	Tetap
		5		Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70,00	1.000.000	80,00	1.200.000	80,00	2.200.000	DPUESDM	Sebelum Perubahan
				Program Pembinaan, pengawasan dan pengembangan bahan bakar	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Bahan Bakar	persen	30,00	40,00	1.226.834	50,00	600.000	60,00	650.000	n/a	n/a	n/a	n/a	60,00	2.476.834	DPUESDM	Sebelum Perubahan
		6		Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan	Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertamban	persen	8,00	9,00	696.828	10,00	775.000	11,00	800.000	12,00	825.000	13,00	850.000	13,00	3.946.828	DPUESDM	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				usaha pertambangan	gan																
2	**4**			**Pariwisata**																	
		1		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW (Orang)	orang	11,036,493	12,691,967	2.681.888	14,595,763	7.730.000	16,785,128	7.730.000	19,302,898	7.830.000	22,198,333	7.830.000	22,198,333	33.801.888	DISPAR	Tetap
		2		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	unit	83	85	2.667.110	87	6.500.000	89	6.500.000	91	6.600.000	93	6.600.000	93	28.867.110	DISPAR	Tetap
		3		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis	kelompok	71	76	25.731.512	81	24.120.000	86	25.120.000	91	25.320.000	96	25.540.000	96	125.831.512	DISPAR	Tetap
		4		Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata	desa	65	70	0	75	1.000.000	80	3.500.000	85	3.600.000	90	3.710.000	90	11.810.000	DISPAR	Tetap
2	**5**			**Kelautan dan Perikanan**																	
		1		Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan	Ketersediaan Ikan Perkapita	kg/kap/thn	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	29,94	3.881.969	31,32	4.367.526	31,32	8.249.495	DISLAUTKAN	Perubahan Baru
				Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan		konsumsi: 12,74 kg/kapita/th dan ketersediaan: 23,01 kg/kapita/th	konsumsi: 14,18 kg/kapita/th dan ketersediaan: 25,78 kg/kapita/th	964.657	konsumsi: 14,91 kg/kapita/th dan ketersediaan: 27,17 kg/kapita/th	1.703.012	konsumsi: 15,63 kg/kapita/th dan ketersediaan: 28,55 kg/kapita/th	3.418.730	n/a	n/a	n/a	n/a	konsumsi: 15,63 kg/kapita/th dan ketersediaan: 28,55 kg/kapita/th	6.086.399	DISLAUTKAN	Sebelum Perubahan
		2		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap	Ton	5.438	5.900	19.982.718	6.400	8.421.963	6.900	9.878.964	7.600	11.405.355	8.400	13.606.433	8.400	63.295.433	DISLAUTKAN	Tetap
		3		Program	Luas	Ha	11	12	670.010	13	567.671	14	899.987	15	1.117.945	16	1.326.347	16	4.581.960	DISLAUTKAN	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar																
		4		Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	300	124.993	300	151.379	300	181.216	300	212.024	300	255.067	300	924.679	DISLAUTKAN	Tetap
		5		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya	Ton	50.247	56.200	11.312.414	63.000	6.216.373	70.500	6.691.270	79.000	7.251.224	88.500	7.899.218	88.500	39.370.499	DISLAUTKAN	Tetap
		6		Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	NTP sektor perikanan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	105,00	877.394	106,00	1.271.409	106,00	2.148.803	DISLAUTKAN	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	NTP sektor perikanan	%	113,71	114,92	382.419	115,42	454.137	116,89	631.970	n/a	n/a	n/a	n/a	117	1.468.526	DISLAUTKAN	Sebelum Perubahan
		7		Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiran iklim laut	jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.710	134.924	1.890	164.812	1.890	299.736	DISLAUTKAN	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
					prakiraan iklim																
				Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi benacana alam laut dan prakiraan iklim laut		990 orang dan 39 desa tersosialisasi	1.170 orang dan 45 desa tersosialisasi	74.958	1.350 orang dan 51 desa tersosialisas	90.827	1.530 orang dan 57 desa tersosialisasi	108.882	n/a	n/a	n/a	n/a	1.530 orang dan 57 desa tersosialisasi	274.667	DISLAUTKAN	Sebelum Perubahan
		8		Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total (RPJMD)	rasio	0	0,06	121.896	0,08	138.512	0,11	178.931	0,14	208.169	0,17	251.143	0,17	898.651	DISLAUTKAN	Tetap
2	**6**			**Perdagangan**																	
		1		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Juta US$)	Juta US$	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	214.44	2.228.181	221.95	2.499.653	221.95	4.727.834	DISPERINDAGKOP	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Juta US$)	Juta US$	191.46	196.25	897.669	201.15	1.786.271	207.59	2.013.929	n/a	n/a	n/a	n/a	207.59	4.697.869	DISPERINDAGKOP	Sebelum Perubahan
		2		Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah SIUP	Buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	46.910	16.024.000	48.787	16.990.400	48.787	33.014.400	DISPERINDAGKOP	Perubahan Baru
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,	Jumlah SIUP		40.732	41.703	14.320.223	43.371	14.826.500	45.106	14.935.000	n/a	n/a	n/a	n/a	45.106	44.081.723	DISPERINDAGKOP	Sebelum Perubahan
		3		Program Perlindungan konsumen dan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera	unit	215.539	222.712	710.624	228	412.507	234	456.846	240.500	508.858	247.500	545.450	247.500	2.634.285	DISPERINDAGKOP	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Ket
								Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
				Pengamanan Perdagangan	ulang.																
2	**7**			**Industri**																	
		1		Program Pengembangan IKM	Jumlah IKM	Unit	81.523	81.621	2.021.005	81.751	1.345.758	81.907	1.456.577	82.087	1.647.620	82.292	1.685.794	82.292	8.156.754	DISPERINDAGKOP	Tetap
		2		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai produksi IKM (Ribu Rp)	Ribu RP	3.199.224.964	3.244.014.113	863.541	3.290.733.829	971.781.000	3.337.453.545	1.019.518.867	3.384.173.260	1.115.697.307	3.431.546.985	1.256.229.683	3.431.546.985	4.364.090.398	DISPERINDAGKOP	Tetap
		3		Program Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah IKM Industri Kreatif	Unit	33.882	33.923	760.880	33.964	2.588.579	34.018	2.744.883	34.082	2.956.772	34.157	3.202.068	34.157	12.253.182	DISPERINDAGKOP	Tetap
2	**8**			**Ketransmigrasian**																	
		1		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,85	3.338.732	8,00	3.672.606	8,00	10.046.550	DISNAKERTRANS	Perubahan Baru
				Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	persen	21,96	17,84	1.764.164	19,62	2.759.284	20,00	3.035.212	n/a	n/a	n/a	n/a	20,00	7.558.660	DISNAKERTRANS	Sebelum Perubahan
		2		Program Transmigrasi Regional	Jumlah Calon Transmigran yang mendapat Pelatihan Dasar Umum	KK	150	150	372.629	0	0	0	0	0	0	0	0		372.629	DISNAKERTRANS	Tetap

Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Keistimewaan yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
3				**URUSAN WAJIB KEISTIMEWAN**																
	1			**Pendidikan**																
		1		Program Pendidikan Anak Usia Dini *)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	78,31%	80%	0	82%	0	84%	750.000	86%	1.000.000	88%	1.500.000	88%	3.250.000	DIKPORA	Tetap
		2		Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK)	78,33 %	78,79%	13.978.500	79,25 %	16.400.000	79,71 %	17.500.000	80,17%	18.600.000	80,63 %	19.700.000	80,63%	86.178.500	DIKPORA	Tetap
		3		Program Pendidikan Non Formal dan Informal*)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	6.000 orang	6.000 orang	2.220.000	7.000 orang	2.408.000	8.000 orang	2.600.000	9.000 orang	2.800.000	10.000 orang	3.000.000	10.000 orang	13.028.000	DIKPORA	Tetap
		4		Program akselerasi pengembangan Pendidikan Terkemuka*)	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	20%	40%	0	45%	1.970.000	50%	2.000.000	55%	7.000.000	60%	7.500.000	60%	18.470.000	DIKPORA	Tetap
		5		Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya *)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	NA	1%	6.939.000	5%	11.592.300	10%	17.751.000	20%	17.000.000	40%	15.429.000	40%	68.711.300	DIKPORA	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
3	**2**			**Kesehatan**																
		1		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat *)	Persentase rumah tangga ber-PHBS	58%	60%	550.000	62%	600.000	64%	714.840	66,50%	550.000	68%	550.000	68%	2.964.840	DINKES	Tetap
		2		Program Perbaikan Gizi Masyarakat *)	Prevalensi Balita Gizi Kurang	8,95%	8,9%	4.608.000	8,8%	5.000.000	8,7%	4.608.000	8,6%	4.608.000	8,5%	4.608.000	8,5%	23.432.000	DINKES	Tetap
		3		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *)	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	55,50%	58,75%	480.000	60,90 %	624.000	63,00 %	480.000	65,18%	1.817.295	67,50 %	302.580	67,50%	3.703.875	DINKES	Tetap
3	**3**			**Pekerjaan Umum**																
		1		Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY*)	Persentase pengaturan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55%	5.800.000	60%	10.000.000	65%	10.000.000	65%	25.800.000	DPUPESDM	Perubahan Baru
				Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY*)	PersentasePengaturandan Pengembangankawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	10%	20%	5.500.000	40%	6.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40%	11.500.000	DPUPESDM	Sebelum Perubahan
		2		Program Penataan Kawasan	Persentase Penataan Kawasan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50%	200.000.000	60%	250.000.000	60%	450.000.000	DPUPESDM	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
				Budaya pendukung keistimewaan DIY *)	Budaya															
				Program Penataan Kawasan Budaya pendukung keistimewaan DIY *)	Persentase Penataan Kawasan Budaya	38,30%	43,90%	20.000.000	49,50 %	175.000.00	55,10 %	180.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	55,1%	195.000.000	DPUPESDM	Sebelum Perubahan
3	**4**			**Perencanaan Pembangunan**																
		1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan*)	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah keistimewaan dengan realisasi tahunan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,48%	2.616.000	1,1%	3.139.200	1,1%	5.755.200	BAPPEDA	Perubahan Baru
				Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangjka menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	n/a	13,00	4.956.571	n/a	n/a	12,00	4.700.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9.656.571	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
				Program Perencanaan Pembangunan Pemerintaha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.568.723	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.568.723	BAPPEDA	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
				n																
				Program Penataan Ruang Keistimewaan Diy	n/a	n/a	n/a	530.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	530.000	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	n/a	n/a	1.723.966	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1723.966	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	n/a	n/a	n/a	684.957	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	684.957	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
				Program Perencanaan Sosial Budaya	n/a	n/a	n/a	2.156.352	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.156.352	BAPPEDA	Sebelum Perubahan
		2		Program Pengendalian Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan*)	Persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12,14%	3.360.000	12,52 %	4.032.000	12,52%	7.392.000	BAPPEDA	Perubahan Baru
				Program Pengendalian Pembangunan Daerah*)	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	n/a	13%	606.781	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13%	606.781	BAPPEDA	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
3	**5**			**Perhubungan**																
				Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan*)	Persentase Dukungan Sarpras Transportasi pada kawasan budaya	15%	19%	2.500.000	23%	5.000.000	27%	10.000.000	31%	12.500.000	35%	15.000.000	35%	45.000.000	DISHUBKOMINFO	Tetap
3	**6**			**Lingkungan Hidup**																
		1		Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya*)	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Berbasis Budaya dalam Rangka Mendukung Keistimewaan DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,75%	4.500.000	10%	4.500.000	10%	9.000.000	BLH	Perubahan Baru
				Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya*)	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Berbasis Budaya dalam Rangka Mendukung Keistimewaan DIY	N/A	5%	499.000	6.25%	6.000.000	6.50%	1.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6,50%	8.299.000	BLH	Sebelum Perubahan
3	**7**			**Pertanahan**																
		1		Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan*)	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.035	11.660.000	13.035	13.320.000	13.035	24.980.000	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Perubahan Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan*)	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	8.831 bidang	8.805 bidang	100.000	9.229 bidang	500.000	9.653 bidang	500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.653 bidang	1.100.000	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Sebelum Perubahan
		2		Program Penataan Pemanfaatan Tanah*)	Persentase tanah Kasultanan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang sesuai Peruntukannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	440.000	50	484.000	50	924.000	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Perubahan Baru
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan*)	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	10%	15%	169.600	20%	200.000	25%	230.000	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	599.600	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Sebelum Perubahan
				Program Perbaikan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah*)	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hokum	8.381 bidang	8.805	42.652.937		43.500.110		44.665.595		46.281.942		46.408.450		223.509.034	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Sebelum Perubahan
3	**8**			**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																
		1		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga	3,55	3,59	2.400.000	3,61	2.150.000	3,62	2.500.000	3,63	2.600.000	3,65	2.650.000	3,65	12.300.000	BPPM	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
				Pembangunan *)	pemerintah															
3	**9**			**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**																
		1		Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera *)	Persentase Cakupan peserta KB aktif	71,36	71,48	500.000	71,60	800.000	71,72	850.000	71,75	900.000	71,78	1.000.000	71,78	4.050.000	BPPM	Tetap
3	**10**			**Sosial**																
		1		Program Pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial *)	persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	6,50%	6,92%	3.401.908	7,55%	3.743.026	8,34%	4.117.328	9,37%	4.529.061	10,79%	4.981.967	10,79%	20.773.290	DINSOS	Tetap
		2		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya *)	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	8,10%	8,24%	14.843.760	9,33%	16.367.000	10,84%	16.500.000	13,14%	16.500.000	17,15%	16.500.000	17,15%	80.710.760	DINSOS	Tetap
		3		Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) *)	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	62,45%	65,39%	3.989.288	66,40%	4.391.550	67,50%	4.830.705	68,60%	5.313.775	70,00%	5.845.153	70,00%	24.370.471	DINSOS	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
		4		Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawana, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)	Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	33,35%	35,00%	324.025	45,00 %	315.000	55,00 %	315.000	63,00%	315.000	70,00 %	315.000	70,00%	1.584.025	DINSOS	Tetap
3	**1 1**			**Ketenagakerjaan**																
		1		Program Peningkatan kesempatan kerja *)	Persentase besaran kesempatan terhadap jumlah pencari kerja	NA	NA	0	46,00 %	532.992	58,00 %	586.000	70,00%	644.920	72,00 %	702.412	72,00%	2.473.324	DISNAKER TRANS	Tetap
3	**1 2**			**Kebudayaan**																
		1		Program Pelestarian Kekayaan Budaya*)	jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86.615 Orang	500.000	95.276 Orang	500.000	95.276 Orang	500.000	BKPM	Perubahan Baru
		2		Program Pengembangan Nilai Budaya *)	Persentase nilai budaya, adat, dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	7%	11%	126.820.540	14%	79.990.000	18%	135.989.000	22%	111.787.900	35%	106.466.690	35%	561.054.130	DISBUD	Tetap
		3		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya *)	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan	10,73%	14,00%	191.348.558	20,00 %	222.646.566	25,00 %	490.911.223	34,00%	490.402.345	45,00 %	460.000.000	45,00%	1.855.308.692	DISBUD	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
					cagar budaya yang dilestarikan															
		4		Program Pengelolaan Keragaman Budaya *)	Persentase Organisasi Budaya berkategori maju	5%	10%	49.955.000	13%	52.350.000	15%	57.585.000	20%	108.343.500	30%	110.000.000	30%	378.233.500	DISBUD	Tetap
		5		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya *)	Persentase implementasi hasil kesepakatan	3%	5%	650.000	7%	600.000	15%	1.224.790	20%	1.237.269	35%	650.996	35%	4.363.055	DISBUD	Tetap
		6		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan *)	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	15%	20%	37.800.800	30%	50.300.000	40%	160.000.000	55%	166.000.000	70%	166.000.000	70%	580.100.800	DISBUD	Tetap
3	13			**Kepemudaan dan Olahraga**																
		1		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan*)	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	9 sentra	10 sentra	5.416.170	12 sentra	8.626.165	13 sentra	11.625.000	14 sentra	12.788.000	15 sentra	14.066.000	15 sentra	52.521.335	DIKPORA	Tetap
		2		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	1.800 orang	2.000 orang	550.000	2.100 orang	605.000	2.200 orang	665.000	2.300 orang	732.000	2.400 orang	805.000	2.400 orang	3.357.000	DIKPORA	Tetap
		3		Program pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda*)	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	35 organisasi	37 organisasi	0	39 organisasi	400.000	41 organisasi	440.000	43 organisasi	484.000	45 organisasi	532.000	45 organisasi	1.856.000	DIKPORA	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
					Pemuda															
3	**14**			**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**																
		1		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*)	Persentase ketercukupan SDM aparatur dari formasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		200.000	SATPOL PP PRAJA	Tetap
		2		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*)	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.000		686.000	SEKRETARIAT DPRD	Tetap
		3		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah*)	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	0	0	1.200.591	0	1.730.605	0	960.450	0	790.560	0	699.345		5.381.551	BIRO ORGANISASI	Tetap
		4		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan*)	Persentase Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan											300.000		300.000	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Tetap
3	**15**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
		1		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan *)	Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat	n/a	n/a	0	27,96 %	60.978.652	29,16 %	85.502.100	30,37%	111.346.300	31,57 %	111.604.030	31,57%	369.431.082	BPPM	Tetap
				Program Pembinaan Budaya	Persentase Pembinaan Budaya	n/a	n/a	n/a	10,00 %	1.500.000	n/a	n/a	10,00%	1.500.000	10,00 %	1.650.000	10,00%	4.650.000	BPPM	Program Baru

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
				Gotong Royong	Gotong Royong															
3	**16**			**Kearsipan**																
		1		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip, *)	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	5%	7%	4.500.000	9%	2.212.296	11%	2.433.000	13%	2.676.000	15%	2.944.000	15%	14.765.296	BPAD	Tetap
		2		Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan	Penambahan Khasanah Arsip dan Koleksi Bahan Pustaka Berbasis Budaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,50%	4.275.000	5,00%	5.000.000	5,00%	9.275.000	BPAD	Program Baru
3	**17**			**Komunikasi dan Informatika**																
		1		Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika Berbasis Keistimewaan*)	Persentase dukungan sarana prasarana komunikasi dan informatika pada kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40%	25.000.000	%50%	30.000.000	50%	50.000.000	DISHUBKOMINFO	Perubahan Baru
		2		Program Pengembangan Komunikasi Informasi	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	9 Urusan / Bidang	10 Urusan / Bidang	595.000	11 Urusan / Bidang	693.000	12 Urusan / Bidang	897.000	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Urusan / Bidang	2.185.000	DISHUBKOMINFO	Sebelum Perubahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
				dan Media Massa *)																
3	**18**			**Ketahanan Pangan**																
		1		Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan*)	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	73,5	75,5	1.000.000	78	1.500.000	80	1.800.000	85	2.100.000	90	2.400.000	90	8.800.000	BKPP	Tetap
3	**19**			**Perpustakaan**																
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan*)	Peningkatan Fasilitas Perpustakaan	70	80%	0	82,50 %	0	85,00 %	2.000.000	87,50%	1.000.000	90,00 %	1.000.000	90,00%	4.000.000	BPAD	Tetap
				Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan*)	Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan Desa	50%	60 %	8.071.075	70%	6.900.000	80%	8.525.000	90%	15.377.000	100%	10.315.000	100%	49.188.705	BPAD	Tetap
																				Tetap
4				**URUSAN PILIHAN KEISTIMEWAAN**																
	1			**Pertanian**																
		1		Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*)	Produksi pertanian tanaman pangan	2.135.582 ton	2.287.400 ton	4.450.000	2.321.800 ton	4.450.000	2.356.600 ton	4.860.000	2.391.900 ton	5.270.000	2.427.800 ton	5.680.000	2.427.800 ton	24.710.000	DINAS PERTANIAN	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
		2		Program Peningkatan Produksi Hortikultura *)	Produksi pertanian hortikultura	375.714 ton	379.400 ton		383.200 ton	250.000	387.000 ton	275.000	390.900 ton	300.000	394.800 ton	325.000	394.800 ton	1.150.000	DINAS PERTANIAN	Tetap
		3		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*)	Populasi peternakan	14.623.140 ekor	15.237.300 ekor		15.884.800 ekor	400.000	16.567.900 ekor	500.000	17.288.500 ekor	600.000	18.049.300 ekor	700.000	18.049.300 ekor	2.200.0000	DINAS PERTANIAN	Tetap
	2			**Kelautan dan Perikanan**																
		1		Program Pengembangan Perikanan Tangkap*)	Produksi perikanan tangkap	5437,5 ton	5.900 ton	1.875.000	6.400 ton	1.875.000	6.900 ton	2.180.000	7.600 ton	2.485.000	8.400 ton	2.790.000	8.400 ton	11.205.000	DISHUTBUN	Tetap
	3			**Kehutanan**																
		1		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan*)	Persentase kerusakan hutan	37,24%	34,54%	1.100.000	31,84%	6.600.000	29,14%	4.825.000	26,44%	5.500.000	23,77%	6.275.000	23,77%	24.300.000	DISHUTBUN	Tetap
	4			**Pariwisata**																
		1		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*)	Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW	11,036,493	12,691,967	0	14,595,763	6.030.000	16,785,128	6.030.000	19,302,898	6.030.000	22,198,333	6.030.000	22,198,333	24.120.000	DISPAR	Tetap Tetap
		2		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*)	Jumlah Daya Tarik Wisata	83	85	2.500.000	87	5.000.000	89	5.000.000	91	5.000.000	93	5.000.000	93	22.500.000	DISPAR	Tetap

Kode				Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000	target	Rp 000		
-1-				-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
		3		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata*)	Jumlah Pokdarwis	71	76	19.630.000	81	23.120.000	86	23.120.000	91	23.120.000	96	23.120.000	96	112.110.000	DISPAR	Tetap
		4		Program Pengembangan Desa Wisata*)	Jumlah Desa Wisata	65	70	0	75	0	80	2.500.000	85	2.500.000	90	2.500.000	90	7.500.000	DISPAR	Tetap
	5			**Industri**																
		1		Program Pengembangan IKM*)	Jumlah IKM	81,523	81,621		81,751	3.000.000	81,907	3.500.000	82,087	4.000.000	82,292	4.500.000	82,292	15.000.000	DISPERINDAGKOP & UKM	Tetap
		2		Program Pengembangan Industri Kreatif*)	Jumlah IKM Industri Kreatif	33.882	33.923	530.000	33.964	2.000.000	34.018	2.500.000	34.082	3.000.000	34.157	3.500.000	34.157	11.530.000	DISPERINDAGKOP & UKM	Tetap

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi pembangunan. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2017 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Didalam RPJMD DIY Tahun 2012-2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 telah disusun indikator kinerja utama (IKU) Gubernur. Namun pada Tahun 2014 sebagai bagian mewujudkan peningkatan dan kualitas kinerja dilakukan perubahan pada beberapa indikator berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

1. Satu indikator realisasi 2013-nya telah melampaui target tahun 2014, yaitu :Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat, target 2014 60%, pada 2013 terealisasi 63,25%;
2. Dua indikator realisasi 2013-nya telah melampaui target tahun 2015, yaitu :Angka Harapan Hidup, Jumlah Wisatwan Mancanegara; angka

harapan hidup target 2015 73,97, pada 2013 terealisasi 74; sedangkan Jumlah WISMAN target 2015 235.190, pada 2013 terealisasi 235.888;

3. Dua indikator realisasi 2013-nya telah melampaui target tahun 2016, yaitu : Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Derajat Partisipasi Masyarakat target 2016 60, pada 2013 terealisasi 63,46; sedangkan Nilai AKIP target 2016 B, pada 2013 terealisasi B bahkan di 2014 sudah A);
4. Satu indikator realisasi 2013-nya telah melampaui target tahun 2017, yaitu : Jumlah Wisatwan Nusantara, target 2017 2.437.614, pada 2013 terealisasi 2.602.074).

Sehingga pada Tahun 2014 dirumuskan kembali indikator kinerja (IKU) Gubernur yang secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1 Target Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
1	**Sasaran : Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.**							
	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	%	n/a	n/a	67,28	68,58	70,00	Sesudah Perubahan
	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	%	30	40	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
2	**Sasaran : Melek huruf masyarakat meningkat**							
	Angka Melek huruf	%	n/a	n/a	93,85	94,65	95,00	Sesudah Perubahan
	Angka Melek huruf	%	91,99	92,60	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
3	**Sasaran : Aksesibilitas pendidikan meningkat**							
	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	9,60	10,00	10,80	11,60	12,00	Tetap
4	**Sasaran : Daya Saing Pendidikan meningkat**							
	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	%	-	5,00	10,00	20,00	40,00	Tetap
5	**Sasaran : Harapan hidup masyarakat meningkat**							
	Angka Harapan Hidup.	Tahun	n/a	n/a	73,81	73,96	74,18	Sesudah Perubahan
	Angka Harapan Hidup.	Tahun	73,37	73,67	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
6	**Sasaran : Pendapatan masyarakat meningkat**							
	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta Rupiah	7,00	7,40	7,80	8,20	8,50	Tetap
7	**Sasaran : Ketimpangan Antar Wilayah menurun**							
	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	n/a	n/a	0,4465	0,4455	0,4445	Sesudah Perubahan
	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	0,2980	0,2950	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
8	**Sasaran : Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun**							
	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	Indeks Gini	0,298	0,295	0,2898	0,2888	0,2878	Tetap

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
9	**Sasaran : Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat**							
a.	Jumlah wisatawan nusantara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	n/a	n/a	3.581.860	4.071.753	4.561.646	Sesudah Perubahan
	Jumlah wisatawan nusantara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	2.113.314	2.237.500	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
b.	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	n/a	n/a	261.053	272.053	272.162	Sesudah Perubahan
	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	212.518	225.100	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
10	**Sasaran : Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat**							
	Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari (Wisatawan Mancanegara)	2,15	2,25	2,35	2,45	2,69	Tetap
	Lama tinggal wisatawan nusantara	Hari (Wisatawan Nusantara)	2,00	2,15	2,30	2,45	2,60	Tetap
11	**Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat**							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Nilai (Kementerian PAN)	n/a	n/a	A	A	A	Sesudah Perubahan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Nilai (Kementerian PAN)	B	B	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
12	**Sasaran : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat**							
	Opini pemeriksaan BPK.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tetap
13	**Sasaran : Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan**							
	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	%	34,57	36,57	38,57	40,57	42,57	Tetap

No.	INDIKATOR SASARAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Keterangan
14	**Sasaran : Kualitas lingkungan hidup meningkat**							
	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	%	3,14	6,29	9,43	12,58	15,72	Tetap
15	**Sasaran : Pemanfaatan Ruang terkendali**							
	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.	%	n/a	n/a	64,25	64,50	64,75	Sesudah Perubahan
	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.	%	50,00	60,00	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan

Tabel 9.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD DIY

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga						
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal						
Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	orang	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
Sasaran 2 : Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif						
Rata - rata lama sekolah	tahun	9,60	10,00	10,80	11,60	12,00
Sasaran 3 : Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan						
Persentase sekolah yang mengiimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan	persen	NA	24,17	29,17	35,83	45,83
Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	Peserta	1796	1849	1904	1942	1977
Sasaran 4 : Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter						
Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	13	4	13	3	13
Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	sentra	10	12	13	14	15
Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda"	%	100	100	100	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya						
Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	%	74,24	74,47	74,71	74,94	75,17
Sasaran 6 : Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda						
Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan	kelompok	325	345	365	385	405
Dinas Kesehatan						
Sasaran 1 : Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu						
Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	%	48,2	52,56	48,4	63,00	72,80
Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu						
Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Persen (%)	98	98	99	98	99
Sasaran 3 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita						
Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama	Persen (%)	98	98,25	98,5	100	100

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja						
Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Persen (%)	98	98	98	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia						
Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)	Persen (%)	57,85	61,98	73,55	74,38	80
Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat						
Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	Persen (%)	8,9	8,8	7,5	6,8	6,5
Sasaran 7 : Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat						
Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persen (%)	61,98	63,2	64,44	65,68	73,44
Sasaran 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan						
Persentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat	Persen (%)	100	100	74,36	82,05	89,74
Sasaran 9 : Terwujudnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup,merata dan bermutu						
Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan	Persen (%)	38,75	40,25	72,6	79,45	86,3
Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos	Persen (%)	60,85	63,87	88,00	91,00	94,00
Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan	Persen (%)	95,00	95,5	69,00	70,40	71,90
Sasaran 10 : Meningkatnya mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan						
Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	Persen (%)	64	70	79	84	87
Sasaran 11 : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya						
Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Sesuai Tipenya	%	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
RSJ GRHSIA						
Sasaran 1 : terwujudnya peningkatan persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY						
persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY	%	46,81	51,04	8,62	8,80	9,13
Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral						
Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas jalan						

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi	%	82	84	86	88	90
Sasaran 3 : Meningkatnya akses energi						
Penduduk berakses Energi	%	89,5	90	92	93	94
Sasaran 4 : Menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni						
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	%	8	7,5	7,25	7	6,75
Sasaran 5 : Meningkatnya akses air minum						
Persentase penduduk berakses air minum	%	73,87	77,36	80,85	84,34	87,83
Sasaran 6 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi						
Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	75,83	79,58	83,33	87,08	90,83
Sasaran 7 : Meningkatnya akses sanitasi yang layak						
Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak	%	70	75	80	85	90
Sasaran 8 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi						
Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat.	%	80,23	80,90	81,20	81,40	81,60
Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat.	%	47,14	47,75	48,05	48,25	48,5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Sasaran 1 : Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat						
persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	persen	n/a	n/a	13,94	10,86	8,07
Sasaran 2 : Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan						
Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	persen	94	96	97	98	100
Sasaran 3 : Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yag telah disusun sebelumnya						
persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	persen	74	79	84	89,14	91,93
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika						
Sasaran 1 : Dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas Tehnologi Informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik						
Dukungan layanan Informasi Teknologi	%	36,67	45,33	54,00	59,33	63,00
Sasaran 2 : Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat						
Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan	penumpang/ hari	n/a	n/a	n/a	9.750	10.145

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Sasaran 3 : Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda						
Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi (HUBKOMINFO)	%	8,29	15,83	22,37	30,31	43,03
Badan Lingkungan Hidup						
Sasaran 1 : Kualitas Udara Meningkat						
Persentase Peningkatan kualitas udara	%	2,25	4,51	6,76	9,01	11,26
Sasaran 2 : Kualitas Air Meningkat						
Persentase Peningkatan kualitas air	%	3,74	7,48	11,21	14,95	18,69
Sasaran 3 : Pengelolaan Data dan Informasi LH Meningkat						
Peningkatan akses informasi lingkungan hidup	jenis	8	8	9	10	11
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
Sasaran 1 : Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik						
Presentase Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik	%	0,531	35,31	47,97	48,01	48,33
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA						
Presentase pembinaan organisasi perempuan	%	50,14	62,64	75,14	87,64	100
Sasaran 3 : Meningkatkan Pembinaan Budaya Gotongroyong						
Persentase Pembinaan Budaya Gotong Royong	Desa	N/A	10,00	N/A	10,00	10,00
Sasaran 4 : Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak						
Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio	0,44	0,42	0,42	0,41	0,40
Sasaran 5 : Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja						
Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	%	0,520	0,515	0,510	0,505	0,500
Sasaran 6 : Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB						
Prevalensi pasangan usia subur ber KB	%	71,48	71,60	80,22	80,222	80,224
Sasaran 7 : Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						
Persentase lembaga Bina Keluarga Berkatagori Percontohan	%	21,47	22,13	23,00	23,63	24,27
Sasaran 8 : Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat						

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes	%	28,48	33,08	34,43	38,26	43,36
Sasaran 9 : Meningkatkan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat						
Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	26,76	27,96	32,08	33,19	34,29
Sasaran 10 : Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera						
Persentase tahapan keluarga sejahtera	%	45,2	44,60	44,10	43,40	43,00
Sasaran 11 : Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan						
Persentase Desa yang memiliki profil	%	28,46	33,08	70	85	100
Dinas Sosial						
Saasaran 1 : Meningkatnya pengetahuan, kemampuan partisipasi dan jangkauan pelayanan KSM, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS						
Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesos yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	%	59,51	75,07	73,24	73,47	73,86
Sasaran 2 : Terwujudnya pemahaman dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penyelenggaraan UKS, serta tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan mudah diakses						
Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	%	59,51	75,07	100	100	100
Sasaran 3 : Terwujudnya masyarakat yang inklusif memiliki kepedulian dan kesetiakawanansosial serta memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan menghargai budaya bangsa						
Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasimuda dan masyarakat	%	35,88	45	55,02	63,02	70
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Anak bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas						
Persentase anak bermasalah sosial, Korban Bencana, Lanjut Uisa Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	%	13,66	14,29	27,20	28,35	29,84
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas hidup, status ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan,						

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Pekerja Migran bermasalah sosial, dan para tuna sosial						
Prosentase Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran bermasalah sosial, dan para tuna sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial.	%	13,66	14,29	9,80	11,58	14,79
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
Sasaran 1 : Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja						
Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3	persen	na	14,35	30,30	30,60	30,91
Sasaran 2 : Tersedianya tenaga kerja terampil yang kompeten dan sesuai permintaan pasar kerja						
Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	persen	23,50	24,20	25,00	26,00	27,00
Sasaran 3 : Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja						
Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	persen	8,20	9,00	20,77	20,98	21,18
Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaran pelayanan lembaga ketenagakerjaan						
Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	persen	n/a	n/a	48,35	50,00	52,00
Sasaran 5 : Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja						
Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	persen	n/a	60,00	65,00	75,00	84,00
Sasaran 6 : Terlaksananya perpindahan dan penempatan calon transmigran sesuai kesepakatan KSAD						
Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	persen	18	20	20	7,85	8,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM						
Sasaran 1 : Meningkatnya usaha ekonomi produktif						
Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif dan UKM	%	4	4	4	4	4
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY						
Nilai sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY	Rupiah	5.225.055	5.688.117	6.077.411	6.502.461	6.961.756

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY						
nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY	Juta Rupiah	3.142.836	3.152.860	3.271.732	3.398.080	3.530.122
Sasaran 4 : Meningkatnya perlindungan konsumen dengan terwujudnya ketertiban alat Ukur timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP)						
Jumlah UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang.	unit	222.712	228.000	234.000	240.500	247.500
Badan Koordinasi Penanaman Modal						
Sasaran 1 : Mewujudkan Anjungan DIY sebagai show windows budaya Yogyakarta.						
jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII	orang	65.075	71.583	78.741	86.615	95.276
Sasaran 2 : Meningkatan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN						
Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	Juta Rupiah	19.908.292	20.979.358	22.120.635	23.465.570	24.920.435
Sasaran 3 : Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri						
Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	55	60	65	70	75
Dinas Kebudayaan						
Sasaran 1 : Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal						
Peningkatan Organisasi Budaya dan Desa Budaya Kategori Maju	unit	4	2	3	2	3
Sasaran 2 : Terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya						
Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	persen	10	13	15	20	30
Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif						
Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	persen	20	30	40	55	70
Sasaran 4 : Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya						
Persentase implementasi hasil kesepakatan	persen	5	7	15	20	35
Sasaran 5 : Meningkatnya pelestarian BCB dan KCB						
Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	persen	44	46	50	52	54
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat						
Sasaran 1 : Meningkatnya kebebasan hak-hak sipil						
Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	angka	n/a	n/a	90,50	90.78	91.00
Sasaran 2 : Meningkatnya hak-hak politik						

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	angka	n/a	n/a	55	55,52	60
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana						
Indeks Ketahanan Daerah	angka	n/a	n/a	50	55	60
Satuan Polisi Pamong Praja						
Sasaran 1 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	n/a	n/a	70	70	75
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat						
Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani	%	n/a	n/a	20	25	30
Biro Tata Pemerintahan						
Sasaran 1 : Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil						
Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	86	95	96	96,5	97
Sasaran 2 : Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan						
Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	8,805	9.229	10.535	11.035	13.035
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah						
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	%	n/a	n/a	65	70	80
Biro Hukum						
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas produk hukum daerah						
Persentase Rancangan produk hukum daerah* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum	%	100	100	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum						
Persentase layanandan bantuan hukum serta layanan informasi hukum	%	90	93	96	100	100
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan						
Sasaran 1 : Peningkatan Fasilitasi Layanan Kehidupan Beragama						
Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Keagamaan yang terlayani	%	n/a	n/a	100	100	100

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan						
Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	26,13	31,77	36,45	48,83	51,17
Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam						
Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan						
Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	26,13	31,77	36,45	48,83	51,17
Biro Administrasi Pembangunan						
Sasaran 1 : Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa						
Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	%	n/a	n/a	100	100	100
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan						
Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	26,13	31,77	36,45	48,83	51,17
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	n/a	n/a	n/a	90	95
Biro Organisasi						
Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah						
Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	75	80	85	90	90
Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik						
Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	80	85	85	87	90
Biro Umum Humas dan Protokoler						
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu						
Kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan	%	n/a	n/a	n/a	95	98
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemda DIY						
Persentase pengakses informasi aktivitas Pemda DIY melalui web, media elektronik dan media cetak	%	n/a	n/a	n/a	90	95
Sekretariat DPRD						
Sasaran 1: Terfasilitasinya agenda DPRD						
Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	%	n/a	n/a	n/a	97,5	100
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan DPRD DIY						

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak	%	n/a	n/a	n/a	80	90
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan						
Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	n/a	n/a	51,31	49,18	46,25
Sasaran 2 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah						
Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan dan aset daerah	%	n/a	n/a	100	100	100
Sasaran 3 : Peningkatan Kinerja BUMD						
Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	31,56	26,13	18,34	18,57	19,36
Sasaran 4 : Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah						
Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	n/a	n/a	N/A	54,03	54,46
Badan Pendidikan dan Pelatihan						
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan						
Akreditasi Badan Diklat (1 = A, 2 = B, 3 = C)	klasifikasi	2	2	2	2	1
Inspektorat						
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal						
Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	%	239	265	5%	5%	5%
Badan Kepegawaian Daerah						
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur						
Persentase kualitas manajemen Sumberdaya Aparatur	%	70,32	60,56	79,03	78,57	78,96
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan						
Sasaran 1 : Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat						
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	80,2	81,9	84,6	88,5	90
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha 150 orang per tahun						
Peningkatan Kapasitas Jumlah Penyuluh	%	48	61	74	87	100
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah						
Sasaran 1 : Bertambahnya Khasanah Arsip sebagai warisan budaya						

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	persen	7,00	9,00	11,00	11,50	15,00
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi						
Persentase Arsip yang dimanfaatkan	persen	10	15	20	25	30
Sasaran 3 : Peningkatan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan						
Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	persen	16	18	20	22	24
Dinas Pertanian						
Sasaran 1 : Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)						
Produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	2.511.296	2.705.000	2.356.000	2.203.677	2.208.665
Sasaran 2 : Meningkatkan populasi ternak						
Junlah populasi ternak	animal unit	644,257	671,634	700.516	620.320	641.416
Sasaran 3 : Meningkatkan nilai tambah produk pertanian(DISTAN)						
Rerata NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	%	1,7*	1,7*	1,7*	98,55	99,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
Sasaran 1 : Peningkatan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (HUTBUN)						
Peningkatan produksi Hasil Hutan	%	3,52	4,7	5,59	6,48	7,32
Sasaran 2 : Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan meningkat (HUTBUN)						
NTP sektor perkebunan	%	123,84	125,86	128,00	116,00	117,00
Sasaran 3 : Produksi hasil perkebunan meningkat						
Produksi perkebunan	ton	84.600	86.300	88.000	80.125	80.152
Sasaran 4 : Peningkatan luasan kawasan hutan						
Persentase Luas Hutan	%	27,34	27,5	27,63	27,77	27,85
Dinas Pariwisata						
Sasaran 1 : Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan						
Jumlah wisatawan nusantara yang menggunakan hotel bintang & Non bintang	Orang	2.113.314	2.237.500	2.877.493	2.400.500	2.437.614
Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan	Orang	212,518	225,1	261,053	245,1	245,198

INDIKATOR SASARAN SKPD	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
hotel bintang dan non bintang						
Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing						
Lama Tinggal wisatawan nusantara yg menggunakan hotel bintang dan non bintang	Hari	2	2,15	2,3	2,45	2,6
Lama tinggal wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel bintang dan non bintang	Hari	2,15	2,25	2,35	2,45	2,69
Dinas Kelautan dan Perikanan						
Sasaran 1 : Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat						
Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total(DISLAUTKAN)	rasio	0,06	0,08	0,11	0,14	0,17
Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim.						
Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiran iklim.	orang	1.170	1.350	1.530	1.710	1.890
Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan						
produksi perikanan budidaya dan tangkap	Ton	62.100	6 9.400	77.400	86.600	96.900
Sasaran 4 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan & perikanan						
NTP sektor perikanan meningkat	%	114,92	115,42	116,89	105	106
Sasaran 5 : Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap						
Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	300	300	300	300

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2012-2017); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2012-2017.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, dan rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode satu tahun.

10.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2013 hingga 2017. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005 - 2025 Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengacu pada RKP Tahun 2018. Hal ini didasarkan pada tahun 2018 merupakan masa transisi antara periodesasi RPJMD 2012-2017 dengan RPJMD periode 2018-2022, dimana dalam tahun 2018 masih dalam proses penyusunan.

Dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemantapan rencana penataan ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat terkurangi secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2018 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluangpeluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumbersumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Badan/dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat,termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2012-2017 ini dengan sebaik baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2013 hingga 2017.
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD).
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.
5. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
6. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
7. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.

GUBERNUR

DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X